

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016 - 2021**



**Pemerintah Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**





## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2019

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan;
- b. bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan dan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Tengah termasuk akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi terjadi perubahan yang mendasar menuntut dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar termasuk karena bencana alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021.



## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan angka 5 dan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5a, angka 5b dan angka 5c, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, serta di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
4. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.
- 5a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- 5b. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 5c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.
- 6a. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
- 7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7a. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 7b. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
- 7c. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.



8. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;
  - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
  - c. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

**3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
  - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
  - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
  - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
  - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
  - i. BAB IX : PENUTUP.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam Perubahan RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 Oktober 2019

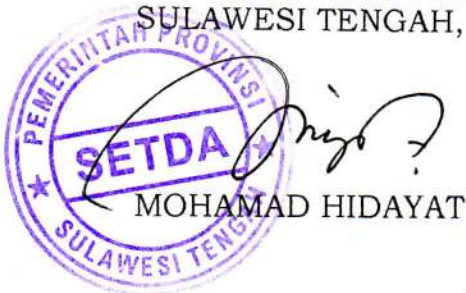
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



MOHAMAD HIDAYAT



# DAFTAR ISI

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                            | Halaman   |
| Bab I. Pendahuluan.....                                                    | Bab I-1   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                   | Bab I-1   |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....                                           | Bab I-4   |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen.....                                           | Bab I-8   |
| 1.4. Maksud dan Tujuan.....                                                | Bab I-9   |
| 1.5. Sistematika Penulisan.....                                            | Bab I-10  |
| Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....                                  | Bab II-1  |
| 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....                                      | Bab II-1  |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....                                   | Bab II-1  |
| 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....                             | Bab II-1  |
| 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah administrasi.....                        | Bab II-1  |
| 2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....                                | Bab II-3  |
| 2.1.1.1.3. Topografi.....                                                  | Bab II-3  |
| 2.1.1.1.4. Geologi.....                                                    | Bab II-4  |
| 2.1.1.1.5. Hidrologi.....                                                  | Bab II-4  |
| 2.1.1.1.6. Klimatologi.....                                                | Bab II-5  |
| 2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan.....                                           | Bab II-7  |
| 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....                                 | Bab II-8  |
| 2.1.1.2.1. Pertanian.....                                                  | Bab II-9  |
| 2.1.1.2.2. Perkebunan.....                                                 | Bab II-10 |
| 2.1.1.2.3. Peternakan.....                                                 | Bab II-11 |
| 2.1.1.2.4. Perikanan.....                                                  | Bab II-11 |
| 2.1.1.2.5. Industri.....                                                   | Bab II-11 |
| 2.1.1.2.6. Pariwisata.....                                                 | Bab II-12 |
| 2.1.1.2.7. Pertambangan.....                                               | Bab II-14 |
| 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....                                        | Bab II-17 |
| 2.1.1.3.1. Tataan Tektonik dan Sejarah Kegempaan Palu Sulawesi Tengah..... | Bab II-18 |
| 2.1.1.3.2. Kawasan Tanah Longsor dan Likufaksi.....                        | Bab II-20 |
| 2.1.1.4. Demografi.....                                                    | Bab II-21 |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                 | Bab II-22 |
| 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....                   | Bab II-22 |
| 2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....                                           | Bab II-22 |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.2.1.2. PDRB Perkapita.....                                                      | Bab II-26 |
| 2.1.2.1.3. Potensi Daerah.....                                                      | Bab II-27 |
| 2.1.2.1.4. Laju Inflasi.....                                                        | Bab II-33 |
| 2.1.2.1.5. Kesenjangan Distribusi Pendapatan.....                                   | Bab II-35 |
| 2.1.2.1.6. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah.....                       | Bab II-37 |
| 2.1.2.1.7. Perkembangan Penduduk Miskin.....                                        | Bab II-37 |
| 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....                                            | Bab II-42 |
| 2.1.2.2.1 . Pendidikan.....                                                         | Bab II-42 |
| 2.1.2.2.2. Kesehatan.....                                                           | Bab II-48 |
| 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....                                        | Bab II-49 |
| 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....                                                    | Bab II-50 |
| 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.....                                            | Bab II-50 |
| 2.1.3.1.1. Pendidikan.....                                                          | Bab II-50 |
| 2.1.3.1.2. Kesehatan.....                                                           | Bab II-53 |
| 2.1.3.1.3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....                                   | Bab II-58 |
| 2.1.3.1.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....                                    | Bab II-58 |
| 2.1.3.1.5. Kebudayaan.....                                                          | Bab II-59 |
| 2.1.3.1.6. Perpustakaan.....                                                        | Bab II-60 |
| 2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan.....                                                     | Bab II-61 |
| 2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup.....                                                    | Bab II-64 |
| 2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan.....                                                   | Bab II-64 |
| 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....                                          | Bab II-65 |
| 2.1.3.2.1. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional<br>(PMDN/PMA)..... | Bab II-65 |
| 2.1.3.2.2. Pariwisata.....                                                          | Bab II-65 |
| 2.1.3.2.3. Kelautan dan Perikanan.....                                              | Bab II-67 |
| 2.1.3.2.4 Perindustrian dan Perdagangan.....                                        | Bab II-68 |
| 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....                                                 | Bab II-70 |
| 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....                                        | Bab II-70 |
| 2.1.4.1.1. Produktivitas Total Daerah.....                                          | Bab II-70 |
| 2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita.....                         | Bab II-70 |
| 2.1.4.1.3. Nilai Tukar Petani.....                                                  | Bab II-71 |
| 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....                                 | Bab II-74 |
| 2.1.4.2.1. Luas Wilayah Ekonomi Produktif.....                                      | Bab II-79 |
| 2.1.4.2.2. Perkembangan Infrastruktur.....                                          | Bab II-80 |
| 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....                                              | Bab II-88 |
| 2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani.....                                  | Bab II-88 |



|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia.....                         | Bab II-89  |
| 2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)..... | Bab II-89  |
| 2.1.4.4.2. Rasio Ketergantungan.....                           | Bab II-90  |
| 2.1.4.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....               | Bab II-90  |
| Bab III Gambaran Keuangan Daerah.....                          | Bab III-1  |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....                           | Bab III-4  |
| 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....                            | Bab III-4  |
| 3.1.1.1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah.....             | Bab III-4  |
| 3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah.....                | Bab III-10 |
| 3.1.1.3 Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....             | Bab III-14 |
| 3.1.2 Neraca Daerah.....                                       | Bab III-17 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....             | Bab III-21 |
| 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....                       | Bab III-25 |
| 3.2.2. Analisis Pembiayaan.....                                | Bab III-26 |
| 3.3. Kerangka Pendanaan.....                                   | Bab III-28 |
| 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....                    | Bab III-29 |
| 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....                    | Bab III-35 |
| Bab IV. Analisis Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis.....       | Bab IV-1   |
| 4.1. Permasalahan Pembangunan.....                             | Bab IV-1   |
| 4.2. Isu Strategis.....                                        | Bab IV-19  |
| 4.2.1 Isu Strategis Global.....                                | Bab IV-19  |
| 4.2.1.1 Gejolak Perekonomian Global.....                       | Bab IV-19  |
| 4.2.1.2 MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).....                    | Bab IV-21  |
| 4.2.1.3 <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> .....     | Bab IV-22  |
| 4.2.1.4 Lingkungan Hidup.....                                  | Bab IV-23  |
| 4.2.1.5 Perkembangan Teknologi Informasi.....                  | Bab IV-25  |
| 4.2.1.6 Ketahanan Pangan.....                                  | Bab IV-25  |
| 4.2.1.7 Keterbatasan Energi.....                               | Bab IV-27  |
| 4.2.1.8 Dunia menghadapi ancaman Bencana Alam Global.....      | Bab IV-28  |
| 4.2.1.9 Tantangan Umum Global.....                             | Bab IV-29  |
| 4.2.2. Telaahan Kebijakan Nasional.....                        | Bab IV-31  |
| 4.2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional.....              | Bab IV-31  |
| 4.2.2.2 Kondisi Perekonomian Nasional.....                     | Bab IV-33  |
| 4.2.2.3 Situasi Pangan Nasional.....                           | Bab IV-35  |
| 4.2.2.4. Ketimpangan Infrastruktur.....                        | Bab IV-36  |
| 4.2.2.5. Bonus Demografi.....                                  | Bab IV-37  |
| 4.2.2.6. Lingkungan Hidup.....                                 | Bab IV-38  |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2.7. Potensi dan Ancaman Bencana Alam.....                                                                   | Bab IV-39 |
| 4.2.2.8. Korupsi.....                                                                                            | Bab IV-42 |
| 4.2.3. Isu Regional Sulawesi.....                                                                                | Bab IV-43 |
| 4.2.4. Isu Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                         | Bab IV-44 |
| 4.2.4.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.....                                                         | Bab IV-44 |
| 4.2.4.2 Angka Kemiskinan Masih Tinggi.....                                                                       | Bab IV-45 |
| 4.2.4.3 Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas.....                                                          | Bab IV-46 |
| 4.2.4.4 Pembangunan Infrastruktur.....                                                                           | Bab IV-49 |
| 4.2.4.5 Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum Dan HAM<br>Belum Optimal.....                            | Bab IV-50 |
| 4.2.4.6 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan<br>Berkelanjutan Belum Optimal.....                 | Bab IV-51 |
| 4.2.4.7 Potensi Bencana Sulawesi Tengah.....                                                                     | Bab IV-51 |
| 4.2.5. Isu Strategis Daerah Lainnya.....                                                                         | Bab IV-55 |
| 4.3. Penelaahan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable<br/>Development Goals/SDG's</i> )..... | Bab IV-55 |
| 4.4. Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi<br>Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025..... | Bab IV-62 |
| 4.5. Tahapan dan Skala Prioritas.....                                                                            | Bab IV-64 |
| 4.5.1. Perencanaan Tahun 2005.....                                                                               | Bab IV-65 |
| 4.5.2. RPJMD ke I (2006 – 2011).....                                                                             | Bab IV-66 |
| 4.5.3. RPJMD ke II (2011 - 2016).....                                                                            | Bab IV-67 |
| 4.5.4. RPJMD ke III (2016 – 2021).....                                                                           | Bab IV-68 |
| 4.5.5. RPJMD ke IV (2021 – 2025).....                                                                            | Bab IV-69 |
| 4.6. Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tengah.....                                             | Bab IV-72 |
| 4.7. Penelaah Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Sulawesi<br>Tengah tahun 2016-2021.....         | Bab IV-76 |
| Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....                                                                       | Bab V-1   |
| 5.1. Visi.....                                                                                                   | Bab V-1   |
| 5.2. Misi.....                                                                                                   | Bab V-4   |
| 5.3. Tujuan dan Sasaran.....                                                                                     | Bab V-10  |
| Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah.....                                             | Bab VI-1  |
| 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....                                                                            | Bab VI-1  |
| 6.2. Prioritas dan Program Aksi Daerah.....                                                                      | Bab VI-11 |
| 6.3. Program Percepatan Unggulan Daerah.....                                                                     | Bab VI-19 |
| 6.4. Prioritas Program Lintas Bidang dan Lintas Wilayah.....                                                     | Bab VI-20 |



Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah..... Bab VII-1

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... Bab VIII-1

Bab. IX. Penutup..... Bab IX-1

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                         | Halaman   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 2.1. Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                                                     | Bab II-1  |
| Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Di Provinsi Sulawesi Tengah<br>Tahun 2018.....                                                          | Bab II-3  |
| Tabel 2.3. Wilayah Sungai Yang Terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                                | Bab II-4  |
| Tabel 2.4. Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah.....                                                                                        | Bab II-5  |
| Tabel 2.5 Ketersediaan Komoditas Pangan di Sulawesi Tengah Tahun 2018                                                                                   | Bab II-9  |
| Tabel 2.5. Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah.....                                                                                     | Bab II-9  |
| Tabel 2.6 Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein, Skor PPH<br>Konsumsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018.....                            | Bab II-10 |
| Tabel 2.7 Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah.....                                                                                      | Bab II-15 |
| Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan<br>Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 –<br>2018..... | Bab II-21 |
| Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi<br>Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018.....                                         | Bab II-24 |
| Tabel 2.10 Nilai PDRB, Distribusi, Laju dan Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi<br>Sulawesi Tengah Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2017-2018.....          | Bab II-23 |
| Tabel 2.11 Nilai PDRB, Distribusi, Laju dan Andil Pertumbuhan PDRB Provinsi<br>Sulawesi Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2017 – 2018.....      | Bab II-26 |
| Tabel 2.12. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan<br>Palawija Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 017.....             | Bab II-28 |
| Tabel 2.13. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah,<br>Tahun 2014 – 2017.....                                                | Bab II-29 |
| Tabel 2.14. Populasi Ternak Menurut Jenisnya Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun<br>2014-2017.....                                                       | Bab II-30 |
| Tabel 2.15. Perkembangan Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha Di Provinsi<br>Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017 (Ton).....                            | Bab II-32 |
| Tabel 2.16. Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya Provinsi Sulawesi<br>Tengah, Tahun 2014-2017.....                                        | Bab II-33 |
| Tabel 2.17. Inflasi Pada Masing-Masing Kelompok Pengeluaran Di Kota Palu, Tahun<br>2018.....                                                            | Bab II-34 |
| Tabel 2.18. Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2018 -<br>Maret 2019.....                                                           | Bab II-39 |
| Tabel 2.19. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan<br>(P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Maret 2018 - Maret 2019.....    | Bab II-41 |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017.....                               | Bab II-49 |
| Tabel 2.21. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017..... | Bab II-50 |
| Tabel 2.22. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017.....                              | Bab II-51 |
| Tabel 2.23. Perkembangan Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018.....                             | Bab II-53 |
| Tabel 2.24. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017.....                                 | Bab II-54 |
| Tabel 2.25. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2018.....                                          | Bab II-61 |
| Tabel 2.26 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2017.....                              | Bab II-63 |
| Tabel 2.27. Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013 – 2018.....                                | Bab II-65 |
| Tabel 2.28. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Di Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017.....                                                      | Bab II-66 |
| Tabel 2.29. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018.....                          | Bab II-67 |
| Tabel 2.30. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan dan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014 - 2018 (Persen).....        | Bab II-72 |
| Tabel 2.31 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya (NTNP) Bulan Januari s.d Agustus 2019.....                                           | Bab II-73 |
| Tabel. 2.32 Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Struktur Ruang).....    | Bab II-75 |
| Tabel. 2.33. Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Pola Ruang).....       | Bab II-76 |
| Tabel. 2.34. Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Strategis).....        | Bab II-78 |
| Tabel 2.35. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah.....                                                                                 | Bab II-80 |
| Tabel 2.36. Jumlah Pelayanan Angkutan Darat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.....                                                      | Bab II-83 |
| Tabel 2.37. Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah.....                                                                        | Bab II-84 |
| Tabel 2.38. Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Provinsi Sulawesi Tengah.....                                            | Bab II-85 |
| Tabel 2.39. Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah.....                                                                      | Bab II-85 |



|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabel 2.40. Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah.....                                                                                  | Bab II-85  |
| Tabel 2.41. Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah.....                                                                                        | Bab II-86  |
| Tabel 2.42. Sarana Pelabuhan Laut Utama/NasionalDi Sulawesi Tengah.....                                                                                           | Bab II-87  |
| Tabel 2.43. Sarana Bandar Udara Menurut JenisnyaDi Sulawesi Tengah.....                                                                                           | Bab II-88  |
| Tabel 2.44. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun<br>2018.....                                                                            | Bab II-92  |
| Tabel 3.1. Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2013 – 2018.....                                                   | Bab III-7  |
| Tabel 3.2. Target dan Realisasi PAD pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun<br>Anggaran 2013-2018.....                                                           | Bab III-8  |
| Tabel 3.3. Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2013 – 2018.....                                                      | Bab III-13 |
| Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 –<br>2018.....                                                                         | Bab III-16 |
| Tabel 3.5. Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013 – 2018.....                                                                                           | Bab III-17 |
| Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah<br>Tahun 2015-2018.....                                                                    | Bab III-20 |
| Tabel 3.7. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018.....                                                                                   | Bab III-24 |
| Tabel. 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah<br>Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018.....                                    | Bab III-26 |
| Tabel 3.9. Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-<br>2018.....                                                                     | Bab III-27 |
| Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2016-2018.....                                                        | Bab III-27 |
| Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Provinsi<br>Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018.....                                           | Bab III-28 |
| Tabel 3.12. Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi<br>Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.....                                            | Bab III-32 |
| Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah<br>Provinsi Sulawesi Tengah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun<br>2016-2021..... | Bab III-38 |
| Tabel 3.14. Realisasi dan Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah<br>Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.....                                       | Bab III-39 |
| Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Perubahan<br>Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....                                             | Bab IV-2   |
| Tabel 4.2. Agenda Prioritas (Nawa cita) RPJMN 2015-2019.....                                                                                                      | Bab IV-32  |
| Tabel 4.3. Sinergi RPJMD 2016-2021, Prioritas Pembangunan dan TPB/SDGs.....                                                                                       | Bab IV-57  |

|             |                                                                                                                 |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabel 5.1.  | Perumusan Penjelasan Visi.....                                                                                  | Bab V-3    |
| Tabel 5.2.  | Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....                                                | Bab V-11   |
| Tabel 6.1.  | Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2016-2021.....                    | Bab VI-2   |
| Tabel 6.2.  | Program Aksi Prioritas I.....                                                                                   | Bab VI-11  |
| Tabel 6.3.  | Program Aksi Prioritas II.....                                                                                  | Bab VI-12  |
| Tabel 6.4.  | Program Aksi Prioritas III.....                                                                                 | Bab VI-13  |
| Tabel 6.5.  | Program Aksi Prioritas IV.....                                                                                  | Bab VI-14  |
| Tabel 6.5.  | Program Aksi Prioritas V.....                                                                                   | Bab VI-14  |
| Tabel 6.6.  | Program Aksi Prioritas VI.....                                                                                  | Bab VI-15  |
| Tabel 6.7.  | Program Aksi Prioritas VII.....                                                                                 | Bab VI-15  |
| Tabel 6.8.  | Program Aksi Prioritas VIII.....                                                                                | Bab VI-16  |
| Tabel 6.9.  | Program Aksi Prioritas IX.....                                                                                  | Bab VI-17  |
| Tabel 6.10. | Program Aksi Prioritas X.....                                                                                   | Bab VI-17  |
| Tabel 6.11. | Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), Prioritas<br>Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah..... | Bab VI-18  |
| Tabel 7.1.  | Keterkaitan Bidang Urusan dan Perangkat Daerah Penanggungjawab.....                                             | Bab VII-1  |
| Tabel 7.2.  | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....                                                                      | Bab VII-4  |
| Tabel 8.1.  | Capaian Indikator Dan Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Daerah....                                          | Bab VIII-2 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                           | Halaman   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gambar 2.1. Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                                 | Bab II-2  |
| Gambar 2.2. Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2017.....                                                                | Bab II-6  |
| Gambar 2.3. Suhu Udara Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2017.....                                                                  | Bab II-6  |
| Gambar 2.4. Kelembaban Udara Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2017.....                                                                      | Bab II-7  |
| Gambar 2.5. Rata-Rata Intensitas Sinar Matahari di Kota Palu Tahun 2017.....                                                              | Bab II-7  |
| Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                   | Bab II-18 |
| Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                      | Bab II-20 |
| Gambar 2.8. Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018.....                                                     | Bab II-23 |
| Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif Regional SULAMPUA Tahun 2018.....                          | Bab II-23 |
| Gambar 2.10. Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018.....                                        | Bab II-25 |
| Gambar 2.11. Trend PMTB Nominal Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2018..                                                             | Bab II-26 |
| Gambar 2.12. Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2018.....                                              | Bab II-27 |
| Gambar 2.13. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2018.....                                   | Bab II-34 |
| Gambar 2.14. Pergerakan Inflasi/Deflasi Bulanan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2018.....                                  | Bab II-35 |
| Gambar 2.15. Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Tengah dan Nasional Periode Tahun 2015 – 2018.....                                         | Bab II-36 |
| Gambar 2.16. Capaian Indeks Gini Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2018.....                                                               | Bab II-36 |
| Gambar 2.17. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017.....                                                  | Bab II-37 |
| Gambar 2.18. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2019.....                            | Bab II-38 |
| Gambar 2.19. Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2018.....                          | Bab II-40 |
| Gambar 2.20. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah dan Nasional, Periode 2014 – 2018.....                                       | Bab II-40 |
| Gambar 2.21. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2017... | Bab II-43 |
| Gambar 2.22. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017.....       | Bab II-44 |

|                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gambar 2.23. Capaian APK SD/MI Kabupaten/Kota Tahun 2017.....                                                                                                  | Bab II-44 |
| Gambar 2.24. Capaian APK SMP Kabupaten/Kota Tahun 2017.....                                                                                                    | Bab II-45 |
| Gambar 2.25. Capaian APK SMA Kabupaten/Kota Tahun 2017.....                                                                                                    | Bab II-45 |
| Gambar 2.26. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2014-2017.....                                                       | Bab II-46 |
| Gambar 2.27. Capaian APM SD Kabupaten/Kota Tahun 2017.....                                                                                                     | Bab II-47 |
| Gambar 2.28. Capaian APM SMP Kabupaten/Kota Tahun 2017.....                                                                                                    | Bab II-47 |
| Gambar 2.29. Capaian APM SMA Kabupaten/Kota Tahun 2017.....                                                                                                    | Bab II-48 |
| Gambar 2.30. Perkembangan Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi<br>Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017.....                                                | Bab II-55 |
| Gambar 2.31. Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten/Kota Tahun 2017...                                                                                   | Bab II-56 |
| Gambar 2.32. Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Tengah<br>Tahun 2014–2017.....                                                          | Bab II-56 |
| Gambar 2.33. Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan<br>Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014<br>– 2017.....    | Bab II-57 |
| Gambar 2.34. Perkembangan Persentase Koperasi Aktif, Usaha Mikro Kecil dan<br>Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Provinsi Sulawesi Tengah<br>Tahun 2014 – 2017..... | Bab II-58 |
| Gambar 2.35. Perkembangan Kelompok Binaan LPM, Kelompok Binaan PKK, dan<br>LPM Berprestasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017.....                    | Bab II-59 |
| Gambar 2.36. Perkembangan Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya serta<br>Benda Situs Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014<br>– 2017.....       | Bab II-60 |
| Gambar 2.37. Perkembangan Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku<br>Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017.....                  | Bab II-60 |
| Gambar 2.38. Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif<br>Regional Sulawesi, Tahun 2018.....                                              | Bab II-62 |
| Gambar 2.39. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut<br>Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017 – 2018.....          | Bab II-63 |
| Gambar 2.40. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Di Sulawesi Tengah, Tahun<br>2014 – 2017.....                                                                    | Bab II-66 |
| Gambar 2.41. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Ikan Di Sulawesi Tengah, Tahun<br>2014 – 2017.....                                                                | Bab II-68 |
| Gambar 2.42. Perkembangan Produksi Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun<br>2014–2018.....                                                               | Bab II-70 |



|                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gambar 2.43. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita<br>Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017.....                            | Bab II-71  |
| Gambar 2.44. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga<br>Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017.....                 | Bab II-71  |
| Gambar 2.45. Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi Di Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2014-2017.....                                   | Bab II-81  |
| Gambar 2.46. Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Nasional Di Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2014-2017.....                                   | Bab II-81  |
| Gambar 2.47. Perkembangan Luas Potensial dan Fungsional Daerah Irigasi di<br>Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017.....                      | Bab II-82  |
| Gambar 2.48. Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum Yang Tertangani<br>Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016.....                   | Bab II-89  |
| Gambar 2.49. Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di<br>Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2016.....                        | Bab II-89  |
| Gambar 2.50. Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap<br>Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2017..... | Bab II-90  |
| Gambar 2.51. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi<br>Tengah Tahun 2014 – 2018.....                                          | Bab II-91  |
| Gambar 2.52. Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Persepektif Regional<br>SULAMPUA, Tahun 2018.....                                         | Bab II-92  |
| Gambar 2.56. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun<br>2018.....                                                           | Bab II-92  |
| Gambar 3.1 . Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah<br>Tahun 2013-2018.....                                                | Bab III-5  |
| Gambar 3.2. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap<br>Total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi TengahTahun 2013-2018 (%).    | Bab III-10 |
| Gambar 4.1. Proyeksi Rasio Ketergantungan Indonesia 2010-2035.....                                                                                | Bab IV-38  |
| Gambar 4.2. Wilayah Terdampak Gempa Dan Tsunami.....                                                                                              | Bab IV-53  |
| Gambar 4.3. Tahapan dan Prioritas RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025....                                                                    | Bab IV-72  |
| Gambar 6.1. Arah dan Tahapan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-<br>2025.....                                                              | Bab VI-2   |

**DAFTAR MATRIKS PERANGKAT DAERAH**

| NO | URUSAN / PERANGKAT DAERAH                                    | HALAMAN |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|
| A  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR                    |         |
| 1  | Pendidikan                                                   |         |
|    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....                         | VII-4   |
| 2  | Kesehatan                                                    |         |
|    | Dinas Kesehatan.....                                         | VII-14  |
|    | RSUD Undata.....                                             | VII-17  |
|    | RS Jiwa Madani.....                                          | VII-31  |
| 3  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |         |
|    | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.....                     | VII-33  |
|    | Dinas Cipta Karya dan SDA.....                               | VII-36  |
| 4  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                       |         |
|    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....      | VII-39  |
| 5  | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat     |         |
|    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.....                | VII-40  |
|    | Satuan Polisi Pamong Praja.....                              | VII-42  |
| 6  | Sosial                                                       |         |
|    | Dinas Sosial.....                                            | VII-43  |
| B  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                |         |
| 1  | Tenaga Kerja                                                 |         |
|    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....                     | VII-47  |
| 2  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 |         |
|    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....      | VII-53  |
| 3  | Pangan                                                       |         |
|    | Dinas Pangan.....                                            | VII-55  |
| 4  | Lingkungan Hidup                                             |         |
|    | Dinas Lingkungan Hidup Daerah.....                           | VII-57  |
| 5  | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil               |         |
|    | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....                    | VII-60  |
| 6  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                             |         |
|    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.....     | VII-61  |
| 7  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                 |         |
|    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....      | VII-63  |
| 8  | Perhubungan                                                  |         |
|    | Dinas Perhubungan.....                                       | VII-65  |
| 9  | Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik         |         |
|    | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik..... | VII-68  |
| 10 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                           |         |
|    | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga.....                 | VII-70  |
| 11 | Penanaman Modal                                              |         |
|    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....  | VII-72  |
| 12 | Kepemudaan dan Olah Raga                                     |         |
|    | Dinas Pemuda dan Olah Raga.....                              | VII-74  |
| 13 | Perpustakaan                                                 |         |
|    | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....                        | VII-75  |

|    |                                                                              |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| C  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI                                       |         |
| 1  | Pengawasan                                                                   |         |
|    | Inspektorat Daerah.....                                                      | VII-77  |
| 2  | Perencanaan                                                                  |         |
|    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....                                    | VII-78  |
| 3  | Keuangan                                                                     |         |
|    | Badan Pendapatan Daerah.....                                                 | VII-80  |
|    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....                              | VII-83  |
| 4  | Kepegawaian                                                                  |         |
|    | Badan Kepegawaian Daerah.....                                                | VII-85  |
| 5  | Pendidikan dan Pelatihan                                                     |         |
|    | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....                                  | VII-86  |
| 6  | Penelitian dan Pengembangan                                                  |         |
|    | Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.....                        | VII-88  |
| 7  | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah dan Perangkat Daerah. |         |
|    | Sekretariat Daerah                                                           |         |
|    | Sekretariat DPRD.....                                                        | VII-89  |
|    | Biro Otonomi Daerah.....                                                     | VII-90  |
|    | Biro Bina Administrasi Kewilayahan.....                                      | VII-91  |
|    | Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan.....               | VII-93  |
|    | Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.....                          | VII-94  |
|    | Biro Organisasi.....                                                         | VII-95  |
|    | Biro Humas dan Protokol.....                                                 | VII-96  |
|    | Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....                                          | VII-97  |
|    | Biro Hukum.....                                                              | VII-98  |
|    | Biro Umum.....                                                               | VII-99  |
|    | - Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.....                                 | VII-100 |
|    | - TU Pimpinan.....                                                           | VII-101 |
|    | Badan Penghubung.....                                                        | VII-102 |
|    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....                                     | VII-103 |
| D. | URUSAN PILIHAN                                                               |         |
| 1  | Kelautan dan Perikanan                                                       |         |
|    | Dinas Kelautan dan Perikanan.....                                            | VII-105 |
| 2  | Pariwisata                                                                   |         |
|    | Dinas Pariwisata.....                                                        | VII-107 |
| 3  | Pertanian                                                                    |         |
|    | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....                                   | VII-109 |
|    | Dinas Perkebunan dan Peternakan.....                                         | VII-111 |
| 4  | Kehutanan                                                                    |         |
|    | Dinas Kehutanan.....                                                         | VII-117 |
| 5  | Energi dan Sumber Daya Mineral                                               |         |
|    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....                                    | VII-138 |
| 6  | Perdagangan dan Industri                                                     |         |
|    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....                                     | VII-145 |

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN  
2016-2021

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pasal 201 bahwa evaluasi hasil RPJMD Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Disamping itu disebutkan pula evaluasi terhadap hasil



RPJMD antar provinsi mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD guna mengetahui: a) Konsistensi dan realisasi antara kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD; dan b). Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN.

Pada prinsipnya evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dinamika perkembangan Peraturan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selanjutnya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berkaitan dengan Substansi ini, pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan : a) holistik-tematik; b) integratif; dan c) spasial dan pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di ayat (2) dijelaskan bahwa pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Permasalahan lain yang juga melatarbelakangi perubahan Perubahan RPJMD yaitu terjadinya bencana alam berupa Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Secara ringkas, hal-hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. Kebutuhan Perencanaan Pembangunan guna menyikapi dampak atas terjadinya Bencana Alam Gempa. Tsunami dan Likuifaksi di Tahun 2018.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
22. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6).
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);
30. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebuah perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di daerah, hubungan Dokumen Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Dokumen P-RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.
2. P-RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.
3. P-RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 khususnya terkait peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir.

Dokumen perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 secara berkesinambungan serta mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
2. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
3. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan kabupaten;
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD ini.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
  - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
  - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
  - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
  - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1. Visi

### 5.2. Misi

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

## BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## BAB IX PENUTUP



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**  
**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**  
**2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**  
**2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah daratan yang tertuang pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, dengan luas wilayah daratan mencapai 65.526,72 Km<sup>2</sup> atau 6.552.672 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

| NO   | FUNGSI KAWASAN                                         | LUAS       |        | KETERANGAN                                                      |
|------|--------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                                        | (Ha)       | %      |                                                                 |
| I    | Kawasan Lindung                                        | 2.329.745  | 35,55  |                                                                 |
|      | Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam     | 656.270*   | 10,00  | * Termasuk DPCLS seluas 5.510Ha. Dalam Proses Persetujuan DPRRI |
|      | Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air | 340.120    | 5,19   |                                                                 |
|      | Hutan Lindung                                          | 1.333.355* | 21,00  | *Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI |
| II   | Kawasan Budi daya Hutan                                | 2.078.858  | 31,73  |                                                                 |
|      | Hutan Produksi Tetap(HPT)                              | 1.442.649  | 22,02  |                                                                 |
|      | Hutan Produksi (HP)                                    | 412.746    | 6,30   |                                                                 |
|      | Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)             | 223.463    | 3,41   |                                                                 |
| III. | Areal Penggunaan Lain(APL)                             | 2.083.765  | 32,00  |                                                                 |
|      | APL                                                    | 2.083.765  | 32,00  |                                                                 |
| IV.  | Perairan (Danau dan Sungai)                            | 60.304     | 0,92   |                                                                 |
|      | Jumlah III& IV                                         | 2.144.069  | 32,72  |                                                                 |
|      | Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)    | 6.552.672  | 100,00 |                                                                 |
|      |                                                        |            |        |                                                                 |

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Secara administrasi, hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 175 Kecamatan, 175 Kelurahan dan 1.842 Desa.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018**

| No.                    | Kabupaten/Kota    | Kecamatan  | Desa         | Kelurahan  |
|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| 1                      | Banggai Kepulauan | 12         | 141          | 3          |
| 2                      | Banggai           | 23         | 291          | 46         |
| 3                      | Morowali          | 9          | 126          | 7          |
| 4                      | Poso              | 19         | 142          | 28         |
| 5                      | Donggala          | 16         | 158          | 9          |
| 6                      | Tolitoli          | 10         | 103          | 6          |
| 7                      | Buol              | 11         | 108          | 7          |
| 8                      | Parigi Moutong    | 23         | 278          | 5          |
| 9                      | Tojo Una-Una      | 12         | 134          | 12         |
| 10                     | Sigi              | 15         | 176          | -          |
| 11                     | Banggai Laut      | 7          | 63           | 3          |
| 12                     | Morowali Utara    | 10         | 122          | 3          |
| 13                     | Palu              | 8          | -            | 46         |
| <b>Sulawesi Tengah</b> |                   | <b>175</b> | <b>1.842</b> | <b>175</b> |

Sumber: BPS, Tahun 2019.

**2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2<sup>0</sup>22’ Lintang Utara dan 3<sup>0</sup>48’ Lintang Selatan serta 119<sup>0</sup>22’ dan 124<sup>0</sup>22’ Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

**2.1.1.1.3. Topografi**

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m = 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m = 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m = 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas = 25,9 persen.

**2.1.1.1.4. Geologi**

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

**2.1.1.1.5. Hidrologi**

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah kabupaten/kota. Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung. Selanjutnya Wilayah Sungai yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Wilayah Sungai Yang Terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah**

| No.  | Uraian                               | Nama WS                                                                                                   | Keterangan                                 |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.   | Wilayah Sungai Lintas Provinsi       | 1. Palu-Lariang<br>2. Pompengan-Lorena<br>3. Lasolo-Sampara<br>4. Randangan-Paguyuman<br>5. Kaluku-Karama | 48 DAS<br>1 DAS<br>5 DAS<br>1 DAS<br>1 DAS |
| II.  | Wilayah Sungai Strategis Nasional    | 1. Parigi-Poso                                                                                            | 50 DAS                                     |
| III. | Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota | 1. Lambunu-Buol<br>2. Bongka-Mentawa<br>3. Laa - Tambalako                                                | 98 DAS<br>113 DAS<br>36 DAS                |

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Selanjutnya, Wilayah Danau Kawasan Lindung yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada table berikut:

**Tabel 2.4**  
**Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah**

| NO. | NAMA DANAU       | KABUPATEN/<br>KOTA | LUAS<br>(KM <sup>2</sup> ) |
|-----|------------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | Tatawu           | Donggala           | 0,625                      |
| 2   | Padang           | Donggala           | 0,02875                    |
| 3   | Kalimpaa         | Donggala           | 0,055                      |
| 4   | Wanga            | Donggala           | 0,245                      |
| 5   | Dampelas         | Donggala           | 4,9375                     |
| 6   | Rano             | Donggala           | 2,50                       |
| 7   | Lindu            | Sigi               | 33,925                     |
| 8   | Bolano Toga      | Parigi Moutong     | 0,2575                     |
| 9   | Batu Dako        | Parigi Moutong     | 0,1775                     |
| 10  | Bolanosau        | Parigi Moutong     | 0,9375                     |
| 11  | Dedei            | Parigi Moutong     | 0,2125                     |
| 12  | Laut Kecil       | Parigi Moutong     | 2,4375                     |
| 13  | Bolano Molosifat | Parigi Moutong     | 0,1250                     |
| 14  | Poso             | Poso               | 369,385                    |
| 15  | Tanah Morambo    | Poso               | 0,0625                     |
| 16  | Limbo Kasimpo    | Poso               | 0,825                      |
| 17  | Telaga Toju      | Poso               | 0,295                      |
| 18  | Tiu              | Morowali           | 1,3125                     |
| 19  | Bae              | Morowali           | 4,125                      |
| 20  | Kodi             | Morowali           | 2,5625                     |
| 21  | Laindungan       | Banggai            | 0,14                       |
| 22  | Petinding        | Banggai            | 0,0325                     |
| 23  | Bakalan          | Banggai            | 0,0625                     |
| 24  | Kobit            | Banggai            | 0,03                       |
| 25  | Lamotong         | Banggai            | 0,02                       |
| 26  | Tendetung        | Banggai            | 1,4375                     |
| 27  | Alan             | Banggai            | 0,09                       |
| 28  | Makapa B         | Banggai            | 0,23                       |

Sumber: RTRW Provinsi Sulteng, Tahun 2013-2033.

**2.1.1.1.6. Klimatologi**

Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Tahun 2017 terjadi musim hujan di Kota Palu, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Juni sekitar 165,6 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Desember sekitar 24,6 mm.

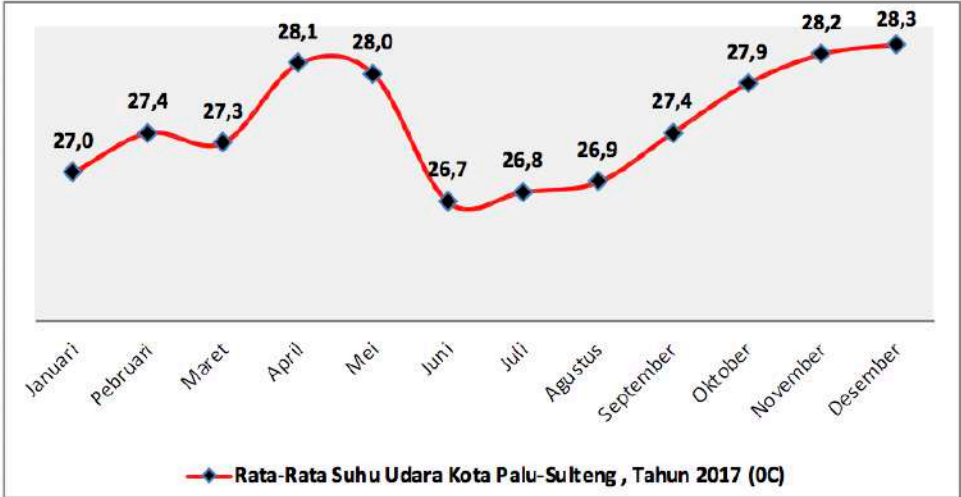
**Gambar 2.2**  
**Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Pada Tahun 2017, suhu udara rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juni yaitu 26,7°C, sementara tertinggi yaitu 28°C terjadi pada Bulan April, Mei, November dan Desember.

**Gambar 2.3**  
**Suhu Udara Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Kelembaban udara rata-rata di Kota Palu selama Tahun 2016 mencapai 75,3 persen. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 79,0 persen dan terendah 71,5 persen terjadi pada Bulan Januari.



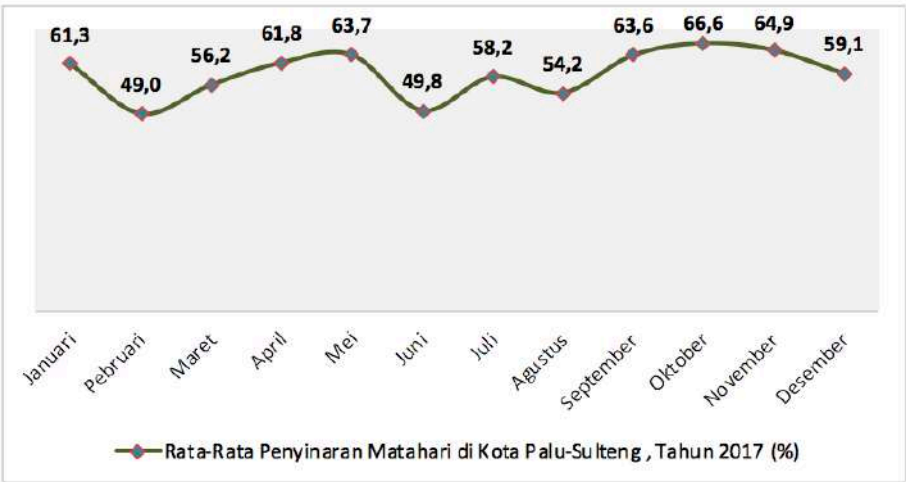
**Gambar 2.4**  
**Kelembaban Udara Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Intensitas sinar matahari pada Tahun 2017 rata-rata mencapai 59,0 persen. Rata-rata penyinaran tertinggi terjadi pada Bulan Oktober mencapai 66,6 persen, sedangkan terendah terjadi pada Bulan Pebruari yaitu 49,0 persen.

**Gambar 2.5**  
**Rata-Rata Intensitas Sinar Matahari di Kota Palu Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

**2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan**

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu,

tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha.

#### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

##### **2.1.1.2.1. Pertanian**

Berdasarkan data RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

**Untuk lahan basah;** pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

**Untuk Lahan Kering;** lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

Situasi ketersediaan komoditas pangan strategis pangan di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 atau kondisi sebelum terjadinya bencana pada Bulan September 2018 masih mengalami surplus untuk komoditas beras, jagung, kedelai, daging dan telur. Kondisi surplus menunjukkan bahwa angka ketersediaan pangan strategis masih lebih tinggi dari kebutuhan atau konsumsi penduduk. Situasi ketersediaan komoditas pangan di Sulawesi Tengah tahun 2018 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Ketersediaan Komoditas Pangan di Sulawesi Tengah Tahun 2018**

| No. | JENIS PANGAN | PRODUKSI (TON) | KETERSEDI- AAN (TON) | KEBUTUHAN (TON) | KONSUMSI PER KAPITA/ THN (Kg) | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | SURPLUS/ DEFISIT | KET |
|-----|--------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----|
| 1.  | BERAS        | 1.101.344      | 633.258              | 322.264         | 110,3                         | 2.921.700              | 310.994          | +   |
| 2.  | JAGUNG       | 316.815        | 281.965              | 6.720           | 2,3                           | 2.921.700              | 275.245          | +   |
| 3.  | KEDELAJ      | 15.418         | 14.595               | 12.563          | 4,3                           | 2.921.700              | 2.032            | +   |
| 4.  | CABE         | 15.140         | 14.235               | 117.745         | 40,3                          | 2.921.700              | (103.510)        | -   |

| No. | JENIS PANGAN  | PRODUKSI (TON) | KETERSEDIAAN (TON0 | KEBUTUHAN (TON) | KONSUMSI PER KAPITA/ THN (Kg) | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | SURPLUS/ DEFISIT | KET |
|-----|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----|
| 5.  | BAWANG MERAH  | 12.469         | 11.397             | 117.745         | 40,3                          | 2.921.700              | (106.3480        | -   |
| 6.  | DAGING        | 5.115          | 3.641              | 2.045           | 1,0                           | 2.921.700              | 1.596            | +   |
| 7.  | DAGING UNGGAS | 10.743         | 5.919              | 6.720           | 2,3                           | 2.921.700              | (801)            | -   |
| 8.  | TELUR         | 11.972         | 10.728             | 5.259           | 1,8                           | 2.921.700              | 5.469            | +   |

**\*Ket:+= Surplus; -=Defisit.**  
**\*\*Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (2019)**

Kondisi surplus untuk beberapa komoditas pangan, khususnya beras membantu ketersediaan pangan dalam mengantisipasi pasca bencana, sehingga 1 tahun pasca bencana masyarakat Sulawesi Tengah masih dapat menikmati persediaan beras sebagai komoditas pangan pokok. Adapun perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat Tahun 2014 - 2018 yang ditunjukkan dengan pencapaian skor PPH berfluktuasi setiap tahunnya. Meskipun menunjukkan penurunan skor PPH pada tahun 2015 dan 2017. Penurunan skor PPH tersebut banyak dipengaruhi oleh penurunan konsumsi pangan hewani serta konsumsi sayur dan buah (Tabel dibawah ini).

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein, Skor PPH Konsumsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018\***

| No. | Uraian                  | Tahun |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|     |                         | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
| 1.  | ENERGI (Kkal/Kap/hari)  | 1.959 | 2.874,5 | 2.192,1 | 2.142,1 | 2.295,5 |
| 2.  | PROTEIN (gram/Kap/hari) | 57,0  | 57,0    | 62,6    | 67,7    | 66,61   |
| 3.  | SKOR PPH KONSUMSI       | 85,7  | 85,1    | 89,5    | 88,7    | 91,4    |

**\*Sumber: Susenas BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan Pengeluaran oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (2019).**

**2.1.1.2.2. Perkebunan**

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik/lingkungan dengan ketinggian di bawah 2000 m,

kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 289.805 Ha, dengan potensi komoditi kelapa seluas 61.999 Ha, kakao 120.085 Ha, cengkeh 33.361 Ha, karet 6.250 Ha, jambu mente 9.815 Ha, pala 11.434 Ha dan sawit rakyat 23.115 Ha.

#### **2.1.1.2.3. Peternakan**

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Adapun jenis ternak yang diusahakan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

#### **2.1.1.2.4. Perikanan**

Potensi perairan laut Sulawesi Tengah seluas 193.923,75 km<sup>2</sup> yang banyak mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun. (Tanya pa saleh)

#### **2.1.1.2.5. Industri**

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai.

#### **2.1.1.2.6. Pariwisata**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah:

- a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
- c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- d. **Kabupaten Morowali – Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori,



- Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;
- e. **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
  - f. **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalith Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;
  - g. **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
  - h. **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakko, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;

- i. **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- j. **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.
- k. **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah;

#### **2.1.1.2.7 Pertambangan**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun

kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah**

| No. | Bahan Galian                                         | Ciri Khas - Lokasi                                                                                                                                                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Batuan Ornamen/poles</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.  | Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit | Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli                                                                                               | Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM                                                                                                                                                       |
| 2   | Marmer/pualam dan Sarpentin                          | Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali | Marmer Hijau-Muda pernah dieksplorasi di Poso dan Morowali.                                                                                                                                                                      |
| II. | <b>Batuan Bahan Konstruksi</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | Sirtukil                                             | Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.                                                                                                                                                                                           | Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri daribatuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro,Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit,juga dari Breksi dan KonglomeratDi Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulauan keKalimantan Timur. |

| No.  | Bahan Galian                     | Ciri Khas - Lokasi                                            | Keterangan                                                                                                    |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. | <b>Mineral Non Logam lainnya</b> |                                                               |                                                                                                               |
| 4    | Batugamping                      | Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali      | Kab. Donggala, BanggaiKepulauan mempunyai potensiBahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan danAMDAL. |
| 5    | Lempung                          | Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah                          | Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata,Genteng dan batako.                                      |
| 6.   | Pasir Kwarsa                     | Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan | Umumnya mempunyai kadar SiO3 kurang dari 75 %                                                                 |
| 7.   | Gypsum                           | Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu                          | Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan                                                           |
| 8.   | Talk                             | Kab. Banggai, dan Tojo Unauna                                 | Berupa Sisipan pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar Mg 03                                    |
| 9.   | Dolomit                          | Kab. Banggai                                                  | Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium ) sampai 35 %                                                              |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng.

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

- Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik
- Panas Bumi : 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:
  - ❑ Air : 1.001,980 MW
  - ❑ Matahari : 5.512 kWh/m<sup>2</sup>
  - ❑ Angin : 2 – 5 m/s
  - ❑ Biogas : 19.026 kW
- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2

telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW yang sementara dalam konstruksi dan direncanakan Tahun 2019 beroperasi. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan *Solar Home System* (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

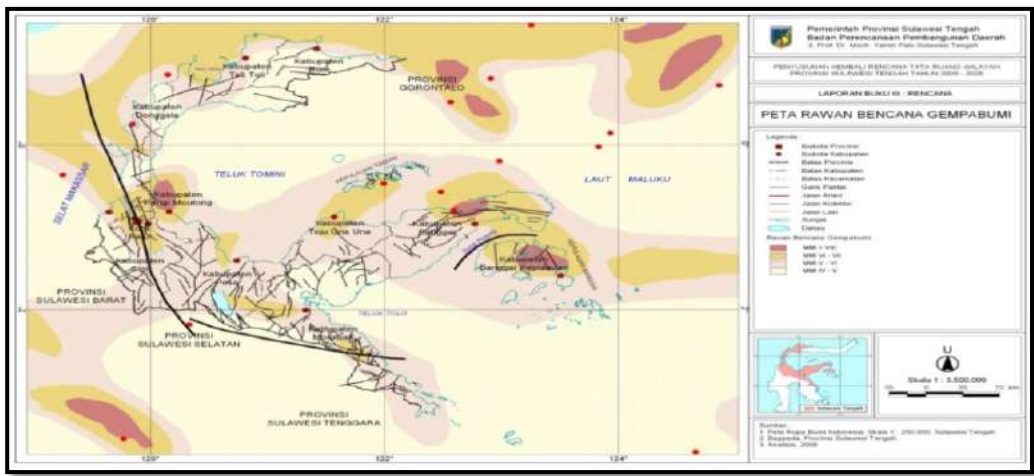
Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

#### **2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu Gunung Colo yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong,

berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.

**Gambar 2.6**  
**Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah**



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI

**2.1.1.3.1. Tataan Tektonik dan Sejarah Kegempaan Palu Sulawesi Tengah**

Menurut Daryono (2011) Daerah Palu merupakan salah satu kawasan seismik aktif di Indonesia. Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di kawasan ini tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif mengakibatkan Daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia berkaitan dengan aktivitas sesar aktif.

Menurut Hamilton (1979), ada beberapa segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempa bumi kuat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sesar-sesar tersebut adalah: (a) Sesar Palu-Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara melalui Sulawesi Selatan bagian Utara menuju ke selatan Bone sampai di laut Banda, dengan panjang patahan sekitar 500 Kilometer (b) Sesar Saddang yang memanjang dari pesisir Pantai Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke Pulau Selayar bagian Timur, dan



(c) Sesar Parit-Parit di Laut Makassar Selatan dan Laut Bone, dan beberapa anak patahan baik yang berada di darat maupun di laut.

Untuk mengetahui tingkat aktivitas kegempaan di Palu, perlu dilakukan kajian sejarah gempabumi dan seismisitas. Berdasarkan distribusi seismisitas, tampak klaster aktivitas gempabumi yang cukup tinggi di sepanjang sesar aktif Palu-Koro hingga memotong Kota Palu. Ditinjau dari kedalaman gempabuminya, aktivitas gempabumi di zona ini tampak didominasi oleh gempabumi kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer, yang merupakan cerminan pelepasan tegangan kerak bumi yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Klaster seismisitas gempabumi dangkal ini terkonsentrasi hampir merata baik di lepas pantai maupun di daratan. Klaster seismisitas ini merupakan gambaran dari sangat aktifnya kondisi tektonik di kawasan ini. Kondisi seismisitas ini menunjukkan bahwa daerah Palu dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan terhadap gempabumi dan tsunami. Apalagi kondisi seismisitas dan tektonik yang ada mendukung untuk terjadinya gempabumi kuat dengan kedalaman dangkal yang dapat membangkitkan tsunami.

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, tercatat sebagai daerah rawan gempa karena salah satu wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena di kota Palu terdapat patahan kerak bumi (sesar) berdimensi cukup besar, dikenal dengan sesar Palu-Koro. Sesar itu memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sesar yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik di bawah perut bumi itu jenis sesar aktif. Sesar itu terus bergerak satu sama lain dan memiliki sifat pergeseran sinistral (pergeseran ke arah kanan) dengan kecepatan geser sekitar 14-17 mm/tahun. Pergeseran pada lempeng-lempeng tektonik yang cukup aktif di sesar Palu Koro membuat tingkat kegempaan di wilayah ini juga dikategorikan cukup tinggi. Catatan seismograf pada Badan Meteorologi

dan Geofisika (BMG) Palu menyebutkan, hampir setiap menit Palu dan Donggala diguncang gempa. Hanya saja getarannya kecil-kecil, dan hanya bisa dicatat seismograf. Mengutip ungkapan Kepala BMKG Palu, Mudjiyanto, dalam sebuah situs internet sekitar September 2010, bahwa kota Palu diguncang gempa 600 kali dalam sebulan dengan kekuatan 3 sampai 6 SR memperlihatkan betapa tingginya aktifitas tektonik di kawasan ini.

Potensi gempa juga bertambah dengan fakta bahwa pulau Sulawesi dilewati oleh apa yang dikenal dengan formasi Pasific ring of fire yang membentang dari Jepang, Filipina, Maluku dan Sulawesi. Formasi ini berupa sederetan gunung api yang menjadi tempat kurang lebih 450 gunung api aktif maupun tidak aktif atau sekitar 75% dari jumlah gunung api di seluruh dunia. Sekitar 90% gempa dan 80% gempa terbesar terjadi di sepanjang formasi ini.

**2.1.1.3.2. Kawasan Tanah Longsor dan Likufaksi**

Kawasan tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

2.1.1.4. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2014-2018 cenderung meningkat, yakni dari 2.831.283 jiwa pada Tahun 2014 menjadi 3.010.440 jiwa pada Tahun 2018. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk dari 1,64 persen pada Tahun 2014 berhasil ditekan hingga menjadi 1,49 persen pada Tahun 2018. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk cenderung yakni dari 46 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2014 menjadi 47 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2018.

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018**

| NO. | INDIKATOR                                          | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Jumlah Penduduk (Jiwa)                             | 2.831.283 | 2.876.689 | 2.921.715 | 2.966.325 | 3.010.440 |
|     | - Laki-Laki (Jiwa)                                 | 1.446.890 | 1.469.626 | 1.492.152 | 1.514.457 | 1.536.490 |
|     | - Perempuan (Jiwa)                                 | 2.831.283 | 1.407.063 | 1.429.563 | 1.451.868 | 1.473.950 |
| 2.  | Laju Pertumbuhan Penduduk (%)                      | 1,64      | 1,6       | 1,57      | 1,5       | 1,49      |
| 3.  | Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) | 46        | 47        | 47        | 47        | 47        |

Sumber: BPS, 2019.

Sementara dilihat dari struktur kelompok umur, penduduk Sulawesi Tengah di dominasi oleh kelompok usia produktif. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018**

| Kelompok Umur | 2014             | 2015             | 2016             | 2017                | 2018             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 0-4           | 298.581          | 303.369          | 308.117          | 312.822,00          | 299.410          |
| 5-9           | 268.168          | 272.470          | 276.734          | 280.957,00          | 290.566          |
| 10-14         | 264.915          | 269.164          | 273.376          | 277.550,00          | 264.363          |
| 15-19         | 263.416          | 267.640          | 271.829          | 275.980,00          | 259.791          |
| 20-24         | 242.007          | 245.889          | 249.738          | 253.552,00          | 257.830          |
| 25-29         | 236.912          | 240.712          | 244.480          | 248.213,00          | 238.298          |
| 30-34         | 238.098          | 241.917          | 245.705          | 249.457,00          | 233.826          |
| 35-39         | 226.729          | 230.365          | 233.971          | 237.543,00          | 233.641          |
| 40-44         | 200.415          | 203.628          | 206.814          | 209.972,00          | 221.126          |
| 45-49         | 164.098          | 166.730          | 169.339          | 171.924,00          | 193.771          |
| 50-54         | 130.520          | 132.612          | 134.687          | 136.743,00          | 156.727          |
| 55-59         | 100.462          | 102.072          | 103.669          | 105.252,00          | 122.387          |
| 60-64         | 72.142           | 73.298           | 74.445           | 75.581,00           | 91.541           |
| 65 +          | 124.820          | 126.823          | 128.811          | 130.779,00          | 147.166          |
| <b>Jumlah</b> | <b>2.831.283</b> | <b>2.876.689</b> | <b>2.921.715</b> | <b>2.966.325,00</b> | <b>3.010.443</b> |

Sumber: BPS, 2019.

**2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**  
**2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**  
**2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB**

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 sebesar 6,30 persen lebih rendah dibanding dengan Tahun 2017 sebesar 7,14 persen sebagai konsekuensi terjadinya bencana alam, tsunami dan likuifaksi pada Tanggal 28 September 2018 yang melanda 3 Kabupaten (Donggala, Sigi dan Parigi Moutong) dan 1 Kota (Palu).

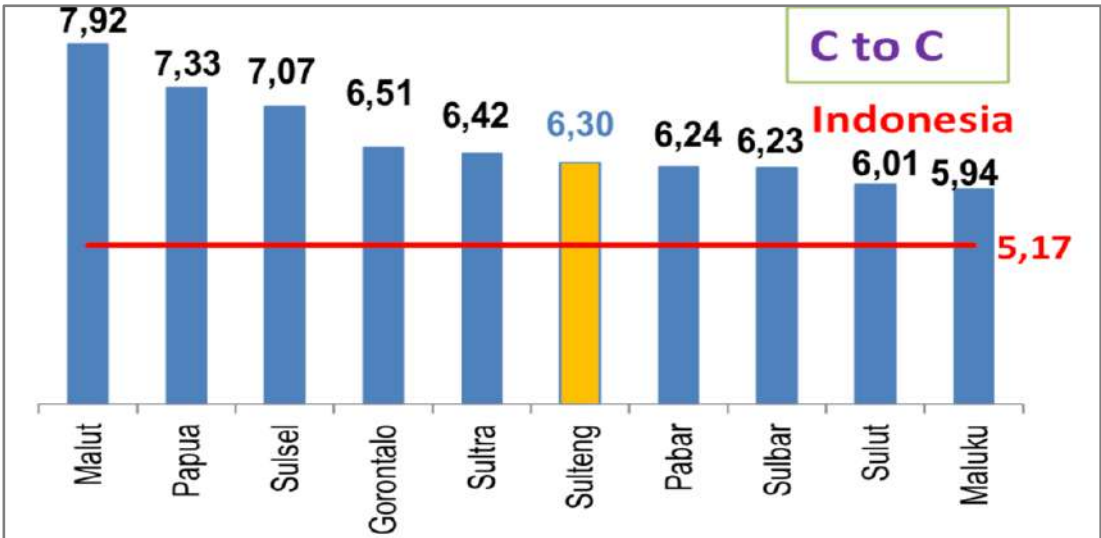
**Gambar 2.8**  
**Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 - 2018**



Sumber: BPS 2019.

Dalam skala regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2018, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat keenam.

**Gambar 2.9**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Dalam Perspektif Regional SULAMPUA Tahun 2018**



Sumber: BPS, 2019.

Perspektif pertumbuhan sektoral, pada Tahun 2018 pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Adm Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial sebesar 10,37 persen, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Industri Pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar 9,77 persen dan Sektor Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial dengan laju pertumbuhan 9,42 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,63 persen.

Dilihat dari andil pertumbuhan, pada Tahun 2018 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yakni sebesar 1,25 persen, disusul terbesar kedua dan ketiga yaitu Sektor Industri Pengolahan sebesar 1,22 persen dan Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,10 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan yakni dari Rp.133.951 Milyar pada Tahun 2017 menjadi Rp.150.636 Milyar pada Tahun 2018, sedangkan PDRB ADHK 2010 dari Rp.97.475 Milyar pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp.103.618 Milyar pada Tahun 2018.

**Tabel 2.10**  
**Nilai PDRB, Distribusi, Laju dan Andil Pertumbuhan Ekonomi**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Sektor Ekonomi,**  
**Tahun 2017-2018**

| Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha,<br>Laju Pertumbuhan, Distribusi, dan Sumber Pertumbuhan (c- to-c) |                                                |            |                                                     |            |                                |                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Lapangan Usaha                                                                                       | Atas Dasar<br>Harga Berlaku<br>(Milyar Rupiah) |            | Atas Dasar<br>Harga Konstan 2010<br>(Milyar Rupiah) |            | Tahun 2018                     |                        |                                  |
|                                                                                                      | Tahun 2017                                     | Tahun 2018 | Tahun 2017                                          | Tahun 2018 | Laju<br>Pertum-<br>buan<br>(%) | Distri-<br>busi<br>(%) | Sumber<br>Pertum-<br>buan<br>(%) |
| (1)                                                                                                  | (2)                                            | (3)        | (4)                                                 | (5)        | (6)                            | (7)                    | (8)                              |
| A.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                                 | 38.823                                         | 41.766     | 28.131                                              | 29.346     | 4,32                           | 27,73                  | 1,25                             |
| B.Pertambangandan Penggalian                                                                         | 17.192                                         | 20.253     | 14.272                                              | 15.345     | 7,52                           | 13,44                  | 1,10                             |
| C.Industri Pengolahan                                                                                | 16.541                                         | 18.987     | 12.185                                              | 13.375     | 9,77                           | 12,60                  | 1,22                             |
| D.Pengadaan Listrik dan Gas                                                                          | 44                                             | 50         | 47                                                  | 50         | 7,29                           | 0,03                   | 0,00                             |
| E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah                                                       | 177                                            | 191        | 128                                                 | 135        | 4,93                           | 0,13                   | 0,01                             |
| F.Konstruksi                                                                                         | 16.785                                         | 18.783     | 10.736                                              | 11.268     | 4,95                           | 12,47                  | 0,55                             |
| G.Perdag Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Spd Motor                                                  | 11.800                                         | 13.348     | 8.615                                               | 9.012      | 4,61                           | 8,86                   | 0,41                             |
| H.Transportasi dan Pergudangan                                                                       | 5.195                                          | 5.958      | 3.717                                               | 4.001      | 7,66                           | 3,96                   | 0,29                             |
| I.Akomodasi dan Makan Minum                                                                          | 719                                            | 799        | 501                                                 | 531        | 5,99                           | 0,53                   | 0,03                             |
| J.Informasi dan Komunikasi                                                                           | 4.291                                          | 5.075      | 3.716                                               | 4.063      | 9,34                           | 3,37                   | 0,36                             |
| K.Jasa Keuangan dan Asuransi                                                                         | 3.161                                          | 3.332      | 2.217                                               | 2.254      | 1,63                           | 2,21                   | 0,04                             |
| L.Real Estate                                                                                        | 2.436                                          | 2.696      | 1.804                                               | 1.892      | 4,87                           | 1,79                   | 0,09                             |
| M.N.Jasa Perusahaan                                                                                  | 335                                            | 371        | 235                                                 | 248        | 5,72                           | 0,25                   | 0,01                             |
| O.Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial                                                    | 8.291                                          | 9.871      | 5.532                                               | 6.106      | 10,37                          | 6,55                   | 0,59                             |
| P.Jasa Pendidikan                                                                                    | 5.165                                          | 5.737      | 3.571                                               | 3.763      | 5,37                           | 3,81                   | 0,20                             |
| Q.Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial                                                                   | 1.819                                          | 2.135      | 1.298                                               | 1.420      | 9,42                           | 1,42                   | 0,13                             |
| R.S.T.U.Jasa Lainnya                                                                                 | 1.177                                          | 1.284      | 769                                                 | 808        | 5,08                           | 0,85                   | 0,04                             |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)                                                                | 133.951                                        | 150.636    | 97.475                                              | 103.618    | 6,30                           | 100,00                 | 6,30                             |

Sumber: BPS, 2019

Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi, Tahun 2018 sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi sebesar 27,73 persen, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-



masing adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 13,44 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,60 persen.

**Gambar 2.10**  
**Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Ekonomi**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018**



Sumber: BPS, Tahun 2019.

Perspektif PDRB dari komponen pengeluaran pada Tahun 2018, andil pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 37,24 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Net Ekspor Antar Daerah dengan andil pertumbuhan sebesar 33,21 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan andil pertumbuhan sebesar 6,06 persen.

Dilihat dari pola distribusi PDRB dari sisi pengeluaran Tahun 2018, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 48,71 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 48,28 persen dan Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi sebesar 39,89 persen.

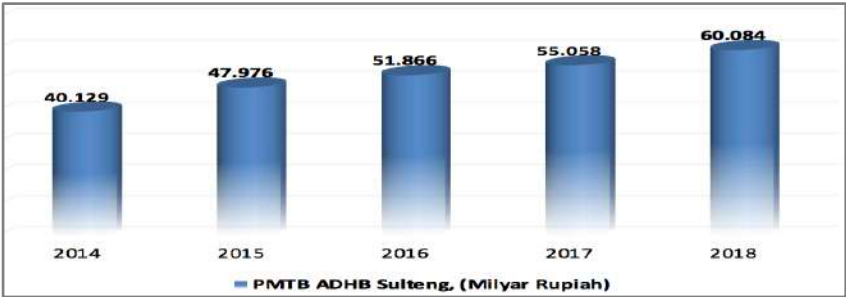
**Tabel 2.11**  
**Nilai PDRB, Distribusi, Laju dan Andil Pertumbuhan PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen Pengeluaran**  
**Tahun 2017 - 2018**

| Jenis Pengeluaran                            | Atas Dasar<br>Harga Berlaku<br>(Milyar Rupiah) |                | Atas Dasar<br>Harga Konstan 2010<br>(Milyar Rupiah) |                | Tahun 2018              |                 |                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
|                                              |                                                |                |                                                     |                | Laju<br>Pertum-<br>buan | Distri-<br>busi | Sumber<br>Pertum-<br>buan |
|                                              | 2017                                           | 2018           | 2017                                                | 2018           | (%)                     | (%)             | (%)                       |
| (1)                                          | (2)                                            | (3)            | (4)                                                 | (5)            | (6)                     | (7)             | (8)                       |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga         | 66.441                                         | 73.378         | 47.082                                              | 49.474         | -5,31                   | 48,71           | -2,57                     |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT                | 2.424                                          | 2.895          | 1.681                                               | 1.949          | 28,66                   | 1,92            | 0,50                      |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah           | 17.545                                         | 17.354         | 11.173                                              | 10.799         | 13,24                   | 11,52           | 1,49                      |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto             | 55.058                                         | 60.084         | 41.367                                              | 43.304         | 14,98                   | 39,89           | 6,06                      |
| 5. Perubahan Inventori                       | 2.476                                          | 5.487          | 1.491                                               | 2.915          | -                       | 3,64            | -                         |
| 6. Ekspor Barang dan Jasa                    | 40.750                                         | 72.734         | 37.272                                              | 63.518         | 3,43                    | 48,28           | 2,27                      |
| 7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa           | 17.870                                         | 40.883         | 13.586                                              | 30.624         | 223,82                  | 27,14           | 37,24                     |
| 8. Net Ekspor Antar Daerah                   | -32.872                                        | -40.414        | -29.004                                             | -37.717        | -59,94                  | -26,83          | 33,21                     |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b> | <b>133.951</b>                                 | <b>150.636</b> | <b>97.475</b>                                       | <b>103.618</b> | <b>0,55</b>             | <b>100,00</b>   | <b>0,55</b>               |

Sumber: BPS, 2019

Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Nominal Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yakni dari Rp.40.129 Milyar pada Tahun 2014 menjadi Rp.60.084 Milyar pada Tahun 2018.

**Gambar 2.11**  
**Trend PMTB Nominal Provinsi Sulawesi Tengah,**  
**Tahun 2014 – 2018**



Sumber: BPS, 2019.

### 2.1.2.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup

faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan *trend* peningkatan yakni dari Rp.31,88 juta pada Tahun 2014 menjadi Rp.50,18 juta pada Tahun 2018.

**Gambar 2.12**  
**Perkembangan PDRB Perkapita ADHB**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2018**



Sumber: BPS, Tahun 2019.

**2.1.2.1.3. Potensi Daerah**

**2.1.2.1.3.1. Pertanian**

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya daya serap tenaga kerja di sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebesar 49 persen pertahun. Sementara kontribusi Sektor Pertanian (secara umum) dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah yakni menyumbang rata-rata sebesar 28,92 persen.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas**  
**Tanaman Padi dan Palawija Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 – 2017**

| NO. | KOMODITAS               | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Padi (Sawah+Ladang)     |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 219.608   | 209.057   | 228.571   | 243.070   |
|     | - Produksi (Ton)        | 1.022.055 | 1.015.368 | 1.103.169 | 1.144.398 |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 46,54     | 48,57     | 48,26     | 47,08     |
| 2   | Jagung                  |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 41.647    | 32.502    | 62.165,4  | 78.993,3  |
|     | - Produksi (Ton)        | 170.203   | 131.123   | 317.669   | 374.322   |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 40,87     | 40,34     | 51,10     | 47,39     |
| 3   | Kedelai                 |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 10.138    | 7.094     | 8.867,8   | 3.450,8   |
|     | - Produksi (Ton)        | 16.399    | 13.270    | 15.358    | 4.962     |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 16,18     | 18,71     | 17,32     | 14,38     |
| 4   | Kacang Tanah            |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 3.751     | 2.928     | 3.246,8   | 2.549,9   |
|     | - Produksi (Ton)        | 5.853     | 4.942,76  | 4.410     | 2.766     |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 15,60     | 16,88     | 13,58     | 10,85     |
| 5   | Kacang Hijau            |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 839       | 764       | 944,7     | 586,2     |
|     | - Produksi (Ton)        | 720       | 628       | 780       | 780       |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 8,58      | 8,22      | 8,25      | 8,25      |
| 6   | Ubi Kayu                |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 4.068     | 2.321     | 1.808,5   | 1.991,5   |
|     | - Produksi (Ton)        | 84.688    | 47.294,99 | 34.970    | 54.225    |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 208,18    | 211,99    | 193,37    | 272,28    |
| 7   | Ubi Jalar               |           |           |           |           |
|     | - Luas Panen (Ha)       | 1.833     | 1.533     | 1.102,7   | 1.215,2   |
|     | - Produksi (Ton)        | 20.452    | 16.650,21 | 15.684    | 15.464    |
|     | - Produktivitas (Kw/Ha) | 111,58    | 108,61    | 142,23    | 127,25    |

Sumber: BPS, 2018.

Perkembangan produksi tanaman padi dan palawija di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014-2017 cenderung meningkat. Pada Tahun 2017, Produksi tertinggi yakni komoditi padi dengan produksi mencapai 1.144.398 ton dan luas panen 243.070 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 47,08 kw/ha, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi jagung dengan produksi mencapai 374.322 ton dan luas panen 78,993,3 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 47,39 kw/ha, dan komoditi ubi kayu dengan produksi mencapai 54.225 ton dan luas panen 1.991,5 ha dengan

tingkat produktivitas sebesar 272,28 kw/ha. Sedangkan produksi terendah yakni komoditi kacang hijau dengan produksi 780 ton dan luas panen 586,2 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 8,25 kw/ha.

**2.1.2.1.3.2. Perkebunan**

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti : kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti: kemiri, pala dan panili.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Sub Sektor Perkebunan telah memberikan andil yang cukup baik dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2017 Sub Sektor Perkebunan berkontribusi sebesar 11,93 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017**

| NO. | KOMODITI          | 2014    | 2015       | 2016       | 2017       |
|-----|-------------------|---------|------------|------------|------------|
| 1.  | Kakao             |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha) | 291.445 | 288.986    | 289.194    | 285.783    |
|     | - Produksi (Ton)  | 208.485 | 146.507,06 | 168.733,90 | 134.322,50 |
| 2.  | Kelapa            |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha) | 213.881 | 213.587    | 215.450    | 218.144    |
|     | - Produksi (Ton)  | 190.568 | 167.172,07 | 184.486,51 | 187.404,30 |
| 3.  | Kopi              |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha) | 8.373   | 8.466      | 8.644      | 8.630      |
|     | - Produksi (Ton)  | 3.572   | 3.070,49   | 2.927,38   | 2.647,60   |
| 4.  | Cengkeh           |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha) | 56.554  | 67.545     | 68.162     | 71.454     |
|     | - Produksi (Ton)  | 16.444  | 14.691,56  | 17.171,36  | 5.314,10   |
| 5.  | Lada              |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha) | 1.228   | 1.790      | 2.160      | 2.848      |
|     | - Produksi (Ton)  | 114     | 80,35      | 162,41     | 203,90     |
| 6.  | Pala              |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha) | 8.444   | 12.216     | 16.551     | 18.167     |

| NO. | KOMODITI           | 2014    | 2015       | 2016       | 2017       |
|-----|--------------------|---------|------------|------------|------------|
|     | - Produksi (Ton)   | 227     | 200,62     | 406,68     | 389,00     |
| 7.  | Jambu Mete         |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha)  | 15.030  | 13.976     | 13.811     | 14.309     |
|     | - Produksi (Ton)   | 2.217   | 2.189,82   | 2.150,45   | 2.276,90   |
| 8.  | Karet              |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha)  | 6.201   | 6.203      | 6.242      | 6.086      |
|     | - Produksi (Kw/Ha) | 2.243   | 2.243,42   | 2.392,40   | 2.301,60   |
| 9.  | Vanila             |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha)  | 623     | 595        | 478        | 442        |
|     | - Produksi (Ton)   | 43      | 36,77      | 21,11      | 20,60      |
| 10. | Kelapa Sawit       |         |            |            |            |
|     | - Luas Panen (Ha)  | 69.686  | 73.646     | 83.191     | 83.214     |
|     | - Produksi (Ton)   | 127.191 | 227.630,05 | 174.837,81 | 243.340,00 |

Sumber: BPS 2018.

Selama periode Tahun 2014-2017 perkembangan produksi komoditi tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah rata-rata mengalami peningkatan setiap tahun. Komoditi perkebunan yang memiliki produksi terbesar pada Tahun 2017 yaitu kelapa, kelapa sawit, kakao, dan cengkeh.

Produksi tanaman Kelapa pada Tahun 2017 mencapai 187.404,30 ton dengan luas panen 212.144 ha, sementara produksi tanaman kelapa sawit mencapai 243.340,00 ton dengan luas panen 83.214 ha, produksi kakao sebanyak 168.733,90 ton dengan luas panen 289.194 ha, dan produksi cengkeh sebesar 5.314,10 ton dengan luas panen 71.454 ha.

### 2.1.2.1.3.3. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Sulawesi Tengah terdiri dari: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

**Tabel 2.14**  
**Populasi Ternak Menurut Jenisnya**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2017**

| No. | Jenis Ternak | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Ternak Besar |         |         |         |         |
|     | a. Kerbau    | 3.297   | 3.723   | 3.842   | 3.884   |
|     | b. Sapi      | 262.854 | 299.485 | 320.537 | 353.486 |
|     | c. Kuda      | 3.007   | 2.636   | 1.911   | 1.661   |



| No. | Jenis Ternak    | 2014      | 2015      | 2016       | 2017       |
|-----|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2.  | Ternak Kecil    |           |           |            |            |
|     | a. Kambing      | 498.260   | 518.698   | 402.124    | 445.337    |
|     | b. Domba        | 8.164     | 7.996     | 6.735      | 7.351      |
|     | c. Babi         | 213.657   | 200.125   | 200.524    | 230.356    |
| 3.  | Ternak Unggas   |           |           |            |            |
|     | a. Ayam Ras     | 9.971.550 | 9.295.578 | 10.340.668 | 13.852.266 |
|     | - Petelur       | 1.040.733 | 981.233   | 730.938    | 2.081.518  |
|     | - Pedaging      | 8.930.817 | 8.314.345 | 9.609.730  | 11.770.748 |
|     | b. Ayam Kampung | 5.206.088 | 5.443.194 | 3.326.433  | 4.477.451  |
|     | c. Itik         | 564.602   | 616.200   | 637.603    | 792.469    |

Sumber: BPS, 2018.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, selama periode tahun 2014-2017, hampir semua jenis ternak mengalami peningkatan populasi kecuali pada jenis ternak kuda yang cenderung menurun.

Populasi terbanyak untuk kategori jenis ternak besar yaitu sapi dengan jumlah populasi pada Tahun 2017 sebanyak 353.486 ekor. Sementara untuk kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak adalah kambing dengan jumlah populasi pada Tahun 2017 mencapai 445.337 ekor. Sedangkan untuk kateori jenis ternak unggas populasi terbanyak yaitu ayam ras pedaging dengan jumlah populasi pada Tahun 2017 mencapai 11.770.748 ekor.

**2.1.2.1.3.4. Kelautan dan Perikanan**

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dari 5 sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2017 Sektor Perikanan memberi kontribusi sebesar 6,01 persen terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2017 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 1.059.050,30 ton, lebih rendah dibanding Tahun 2016 yang produksinya sebesar 1.335.114,92 ton. Sementara produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2017 mencapai 174.964,00 ton menurun dari Tahun 2016 yang sebesar 212.330,60 ton.

Perkembangan produksi perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017 (Ton)**

| No. | Jenis Usaha Perikanan          | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | <b>Perikanan Budidaya</b>      | <b>1.218.260,19</b> | <b>1.396.699,24</b> | <b>1.335.114,92</b> | <b>1.059.050,30</b> |
|     | a. Tambak                      | 73.733,61           | 113.201,97          | 120.098,80          | 104.939,86          |
|     | b. Budidaya Laut (Rumput Laut) | 1.137.030,06        | 1.274.254,10        | 1.207.480,10        | 937.023,60          |
|     | c. Kolam                       | 6.511,22            | 8.039,99            | 7.111,94            | 4.542,64            |
|     | d. Karamba                     | 17,74               | 25,27               | 26,29               | 27,00               |
|     | e. Jaring Apung                | 934,56              | 1.144,91            | 1.214,79            | 12.473,70           |
| 2.  | <b>Perikanan Tangkap</b>       |                     | <b>174.794,20</b>   | <b>212.330,60</b>   | <b>174.964,00</b>   |
|     | a. Laut                        |                     | 174.794,20          | 210.140,20          | 174.049,30          |
|     | b. Perairan Umum               | -                   | -                   | 2.190,40            | 914,70              |

Sumber : BPS, 2018.

Kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang cukup besar juga dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, karena adanya ekosistem pesisir dan pulau kecil seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang sangat luas dan beragam. Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah cukup beragam seperti ekosistem terumbu karang seluas 186.766,71 Ha, padang lamun seluas 27.406,48 Ha dan mangrove seluas 33.876,29 Ha yang merupakan sumberdaya hayati potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wilayah perairan Sulawesi Tengah memiliki letak strategis yang berada di garis khatulistiwa dengan posisi di tengah Pulau Sulawesi.

Aspek keaneragaman sumberdaya hayati, kawasan perairan sangat subur dengan keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup lengkap, dimana kawasan Sulawesi Tengah letaknya di sekitar Khatulistiwa dan merupakan jantung dari segitiga karang dunia (World Coral Triangle) yang merupakan pusat keberadaan sumberdaya terumbu karang dunia. Posisi yang dianggap sangat menguntungkan, karena memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi wilayah ke depan.

**2.1.2.1.3.5. Kehutanan**

Perkembangan produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah selama periode tahun 2014-2017 cenderung fluktuatif. Jenis hasil hutan Kayu Bulat pada Tahun 2017 mencapai 46.681,61 m<sup>3</sup> meningkat di banding

Tahun 2016 yang produksinya hanya sebesar 11.109,92 m<sup>3</sup>. Sementara produksi Kayu Gergajian pada Tahun 2017 mencapai 17.434,06 m<sup>3</sup> meningkat dibanding Tahun 2016 sebesar 24.288,49 m<sup>3</sup>. Hasil jenis hutan lainnya yaitu rotan dengan jumlah produksi pada Tahun 2017 mencapai 4.620,0 ton meningkat dibanding Tahun 2015 yang produksinya hanya mencapai 2.689,0 ton. Untuk jenis hasil hutan Damar produksinya pada Tahun 2017 sebanyak 440,0 ton menurun dibanding Tahun 2016 yang produksinya mencapai 510,0 ton.

**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2017**

| No. | Jenis Hasil Hutan                | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      |
|-----|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )     | 102.789,45 | 58.352,01 | 11.109,92 | 46.681,61 |
| 2   | Kayu Gergajian (m <sup>3</sup> ) | 10.338,72  | 17.927,65 | 24.288,49 | 17.434,06 |
| 3   | Rotan (ton)                      | 8.394,70   | 4.202,40  | 2.689,00  | 4.620,00  |
| 4   | Damar (ton)                      | 1.712,00   | 1.363,39  | 510,00    | 440,00    |

Sumber : BPS, 2018.

#### 2.1.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Sepanjang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 laju inflasi di Kota Palu cenderung menurun yakni dari 8,85 persen pada Tahun 2014 menjadi 1,49 persen di Tahun 2016, pada Tahun 2017 inflasi menjadi 4,33 persen, dan selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat menjadi 6,46 persen. Kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh bencana alam pada Tanggal 28 September 2018 yang menyebabkan langkanya pasokan barang dan jasa serta lumpuhnya jaringan distribusi barang dan jasa pada empat kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

Gambar 2.13  
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kota Palu  
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, 2019.

Pada periode yang sama, inflasi year on year Kota Palu mencapai 6,46 persen. Kenaikan indeks year on year tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 8,12 persen, sedangkan kelompok sandang mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 2,12 persen. Inflasi Kota Palu sebesar 1,10 persen disumbangkan oleh kelompok pengeluaran bahan makanan (0,54 persen), transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,32 persen), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,17 persen), makanan jadi (0,06 persen), kesehatan (0,03 persen), serta pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,01 persen). Sementara kelompok sandang memberikan andil negatif sebesar 0,03 persen.

Tabel 2.17  
Inflasi Pada Masing-Masing Kelompok Pengeluaran  
Di Kota Palu, Tahun 2018

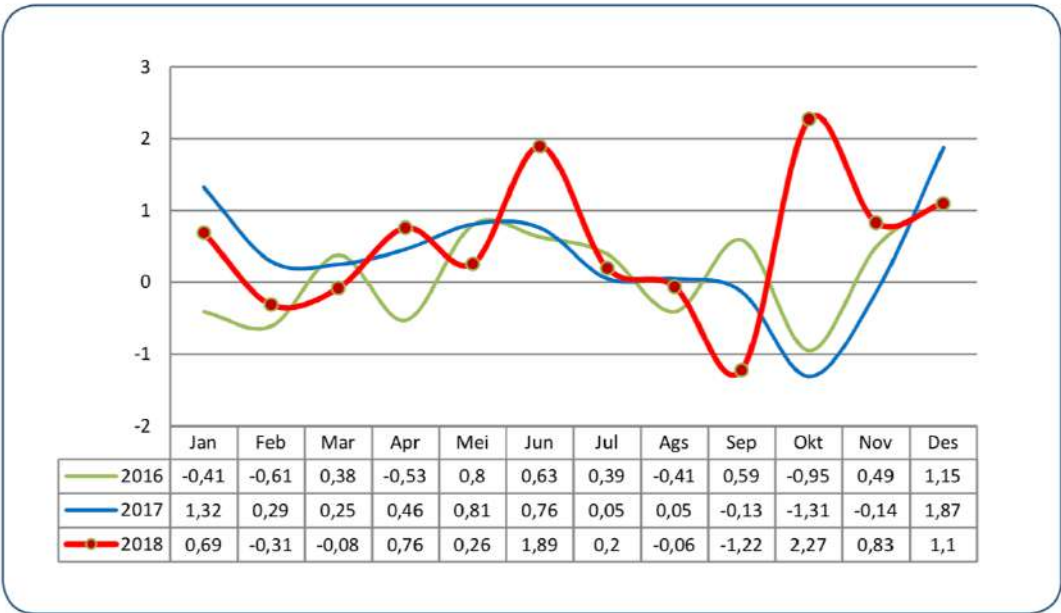
| Kelompok Pengeluaran                             | Indeks Harga Konsumen |          |          |          | Inflasi | Laju Inflasi Tahun Kalender 2018** | Inflasi Year on Year *** | Andil Inflasi |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                  | Des 2017              | Des 2017 | Nov 2018 | Des 2018 |         |                                    |                          |               |
| (1)                                              | (2)                   | (3)      | (4)      | (5)      | (6)     | (7)                                | (8)                      | (9)           |
| U m u m                                          | 132,59                | 132,59   | 139,61   | 141,15   | 1,10    | 6,46                               | 6,46                     | 1,10          |
| 1. Bahan Makanan                                 | 136,64                | 136,64   | 141,56   | 145,34   | 2,67    | 6,37                               | 6,37                     | 0,54          |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau    | 144,85                | 144,85   | 156,21   | 156,61   | 0,26    | 8,12                               | 8,12                     | 0,06          |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar | 129,80                | 129,80   | 134,86   | 135,87   | 0,75    | 4,68                               | 4,68                     | 0,17          |
| 4. Sandang                                       | 111,85                | 111,85   | 114,91   | 114,22   | -0,60   | 2,12                               | 2,12                     | -0,03         |
| 5. Kesehatan                                     | 122,64                | 122,64   | 129,19   | 130,26   | 0,83    | 6,21                               | 6,21                     | 0,03          |
| 6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga            | 125,27                | 125,27   | 135,08   | 135,30   | 0,16    | 8,01                               | 8,01                     | 0,01          |
| 7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan   | 130,37                | 130,37   | 137,96   | 140,39   | 1,76    | 7,69                               | 7,69                     | 0,32          |

\*) Perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya  
\*\*) Perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017  
\*\*\*) Perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

Sumber : BPS, 2019.

Dalam periode yang sama tiga tahun terakhir, inflasi Kota Palu bulan Desember 2018 sebesar 1,10 persen tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2016 dan 2017 yang sebesar 1,15 persen dan 1,87 persen. Laju inflasi tahun kalender serta inflasi *year on year* Desember 2018 sebesar 6,46 persen jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2016 yang hanya sebesar 1,49 persen, begitu pula bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 4,33 persen. Cukup tingginya angka inflasi di tahun 2018 ini tidak lepas dari pengaruh bencana yang melanda Kota Palu dan sekitarnya pada akhir September lalu, sehingga berdampak terhadap tingginya angka inflasi sampai akhir tahun 2018.

**Gambar 2.14**  
**Pergerakan Inflasi/Deflasi Bulanan Kota Palu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2018**



Sumber: BPS, 2019.

**2.1.2.1.5. Kesenjangan Distribusi Pendapatan**

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui distribusi pendapatan masyarakat, yang direfresentasikan melalui indikator indeks gini atau koefisien gini. Nilai indeks gini berada diantara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka pemerataan distribusi pendapatan

masyarakat sempurna dan indeks gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

Sepanjang Tahun 2015-2017 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah cenderung menurun, yakni dari 0,370 poin pada Tahun 2015 menjadi 0,347 poin pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 Indeks Gini dapat ditekan menjadi 0,345 poin pada Tahun 2017, selanjutnya pada Tahun 2018 kembali dapat ditekan hingga menjadi 0,317 poin. Capaian Indeks gini tersebut lebih baik dibanding capaian nasional.

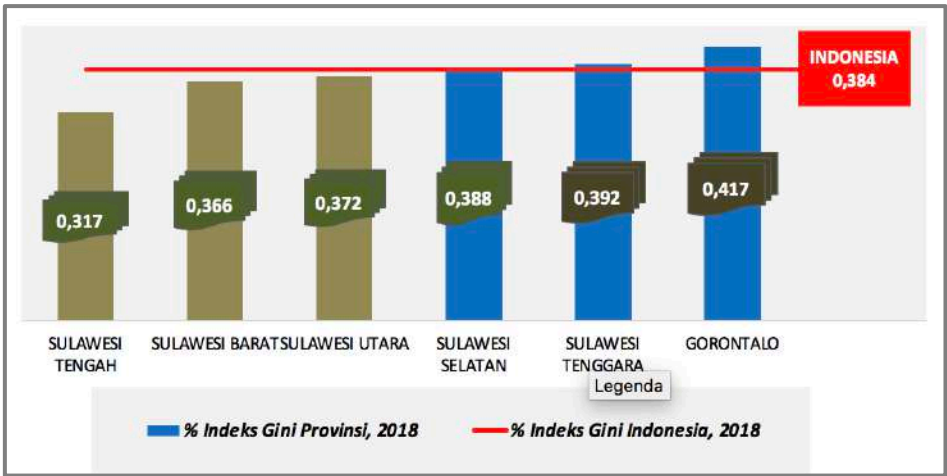
**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Periode Tahun 2015 – 2018**



Sumber: BPS, 2019.

Perspektif Regional Sulawesi, pada Tahun 2018 capaian Indeks Gini Sulawesi Tengah menempati posisi ke 1.

**Gambar 2.16**  
**Capaian Indeks Gini Provinsi di Pulau Sulawesi**  
**Tahun 2018**



Sumber: BPS, Tahun 2019.

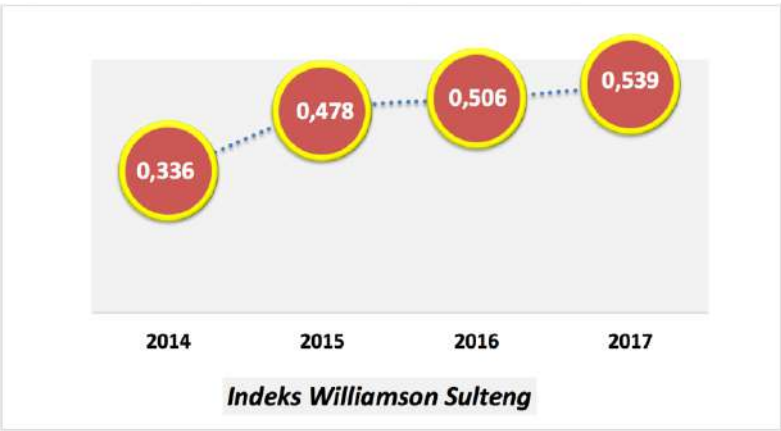


**2.1.2.1.6. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah**

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2017 cenderung meningkat yang direfleksikan dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,336 poin pada Tahun 2014 menjadi 0,539 poin pada Tahun 2017. Untuk itu langkah yang penting ke depan dilakukan adalah *manage pengeluaran fiscal* dengan baik, menata dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan, dengan demikian maka kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.

**Gambar 2.17**  
**Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 - 2017**



Sumber: BPS 2018 (Data Diolah Kembali).

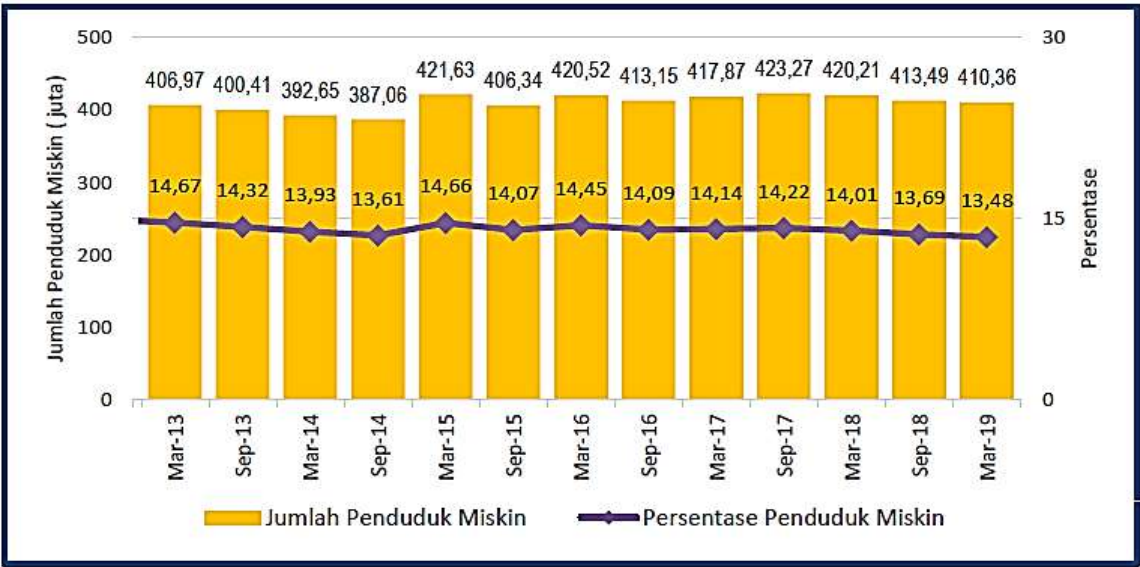
**2.1.2.1.7. Perkembangan Penduduk Miskin**

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat

masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 400.410 jiwa (14,32 persen) menurun menjadi 387.060 jiwa (13,61 persen) pada Tahun 2014, selanjutnya pada Tahun 2015 meningkat menjadi 406.340 jiwa (14,07 persen) dan sebanyak 413.150 jiwa (14,09 persen) pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 423.270 jiwa (14,22 persen), pada Tahun 2018 penduduk miskin menurun menjadi 413.490 jiwa (13,69 persen). Dan sesuai data terbaru BPS Maret Tahun 2019 penduduk miskin menurun menjadi 410,360 jiwa (13,48 persen).

**Gambar 2.18.**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2019**



Sumber: BPS, 2019.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Tahun 2017 terutama dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras, ikan, telur, gula, dan mie instan, serta juga dipicu tingginya konsumsi rokok di kalangan penduduk miskin dan sebagai konsekuensi dari meningkatnya akselerasi Garis Kemiskinan, yakni dari Rp.382.775,- pada Tahun 2016 menjadi Rp.408.522,- pada Tahun 2017.

Selama periode September 2018 – Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,01 persen, yaitu dari Rp 424.040,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 441.036,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Sementara pada periode Maret 2018 – Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,59 persen, yaitu dari Rp 413.785,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 441.036,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

**Tabel 2.18**  
**Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,**  
**Maret 2018 - Maret 2019**

| Daerah/Tahun                | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) |               |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
|                             | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |
| (1)                         | (2)                                | (3)           | (4)     |
| <i>Perkotaan</i>            |                                    |               |         |
| Maret 2018                  | 309 458                            | 124 955       | 434 414 |
| September 2018              | 311 845                            | 125 852       | 437 697 |
| Maret 2019                  | 326 695                            | 130 498       | 457 193 |
| Perubahan Mar'18—Mar'19 (%) | 5,57                               | 4,44          | 5,24    |
| Perubahan Sep'18—Mar'19 (%) | 4,76                               | 3,69          | 4,45    |
| <i>Perdesaan</i>            |                                    |               |         |
| Maret 2018                  | 297 929                            | 85 168        | 383 097 |
| September 2018              | 312 051                            | 88 588        | 400 639 |
| Maret 2019                  | 314 521                            | 91 186        | 405 707 |
| Perubahan Mar'18—Mar'19 (%) | 8,33                               | 2,15          | 6,94    |
| Perubahan Sep'18—Mar'19 (%) | 4,26                               | 2,08          | 3,79    |
| <i>Total</i>                |                                    |               |         |
| Maret 2018                  | 313 190                            | 100 595       | 413 785 |
| September 2018              | 322 861                            | 101 179       | 424 040 |
| Maret 2019                  | 336 739                            | 104 297       | 441 036 |
| Perubahan Mar'18—Mar'19 (%) | 7,52                               | 3,68          | 6,59    |
| Perubahan Sep'18—Mar'19 (%) | 4,30                               | 3,08          | 4,01    |

Sumber: BPS, 2019.

Sementara dilihat sebaran penduduk miskin menurut daerah perkotaan dan perdesaan, rata-rata hampir 1/3 penduduk miskin berada di daerah perkotaan dan selebihnya 2/3 penduduk miskin hidup di daerah perdesaan.

**Gambar 2.19**  
**Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2018**



Sumber: BPS, 2019.

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Meski demikian kita tidak berhenti sampai disini, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih diatas tingkat kemiskinan nasional.

**Gambar 2.20**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah**  
**dan Nasional, Periode 2014 – 2018**



Sumber: BPS, 2019.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan

adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2018 - Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2018 adalah 2,28 dan pada Maret 2019 naik menjadi 2,33. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,68 menjadi 0,63 pada periode yang sama (Tabel 2.15). Sementara apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu Maret 2018 – Maret 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

**Tabel 2.19**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Maret 2018 - Maret 2019**

| Tahun<br>(1)                                     | Perkotaan<br>(2) | Perdesaan<br>(3) | Total<br>(4) |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )    |                  |                  |              |
| Maret 2018                                       | 2,02             | 2,88             | 2,64         |
| September 2018                                   | 1,30             | 2,68             | 2,28         |
| Maret 2019                                       | 1,43             | 2,71             | 2,33         |
| Indeks Keparahannya Kemiskinan (P <sub>2</sub> ) |                  |                  |              |
| Maret 2018                                       | 0,57             | 0,80             | 0,74         |
| September 2018                                   | 0,42             | 0,78             | 0,68         |
| Maret 2019                                       | 0,32             | 0,76             | 0,63         |

Sumber: BPS, 2019.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,43 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,71. Sementara itu nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,32 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,76.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*)
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*)
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

#### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.2.2.1 Pendidikan**

###### **2.1.2.2.1.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah**

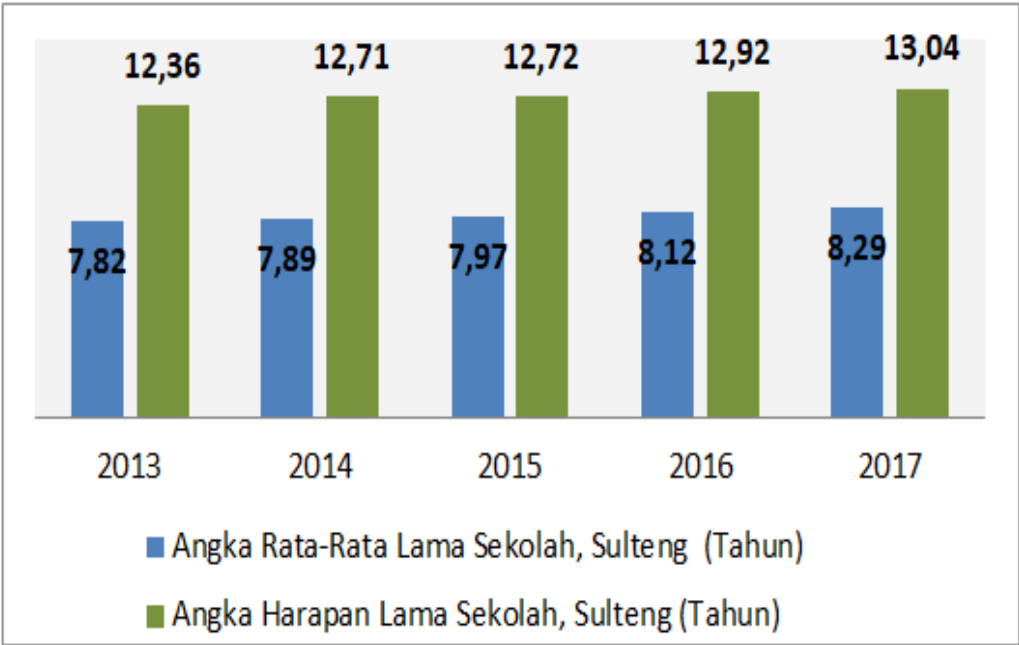
Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yaitu: Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Sepanjang Tahun 2013-2017, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 7,82 tahun pada Tahun 2013 menjadi 8,29 tahun pada Tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia sekolah di Sulawesi Tengah telah mencapai kelas 2 (dua) pada jenjang pendidikan tingkat pertama (SLTP).

Dilihat dari capaian angka Harapan Lama Sekolah pada periode yang sama, juga menunjukkan tren peningkatan yakni dari 12,36 tahun pada Tahun 2016 menjadi 13,04 tahun pada Tahun 2017.



**Gambar 2.21**  
**Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2013 – 2017**



Sumber: BPS, Tahun 2018.

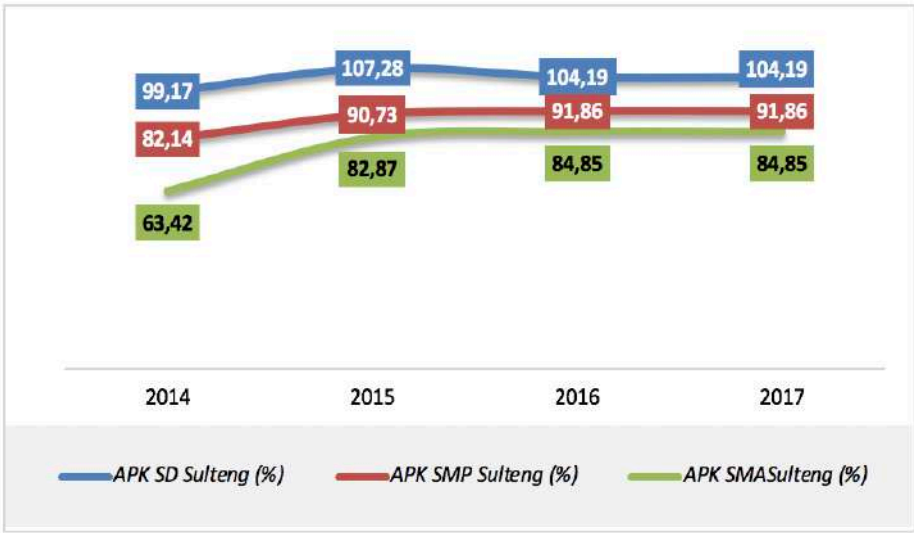
**2.1.2.2.1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikantertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitandengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Capaian APK SD di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebesar 104,19 persen, sementara capaian APK SMP sebesar 91,86 persen dan capaian APK SMA sebesar 84,85 persen.

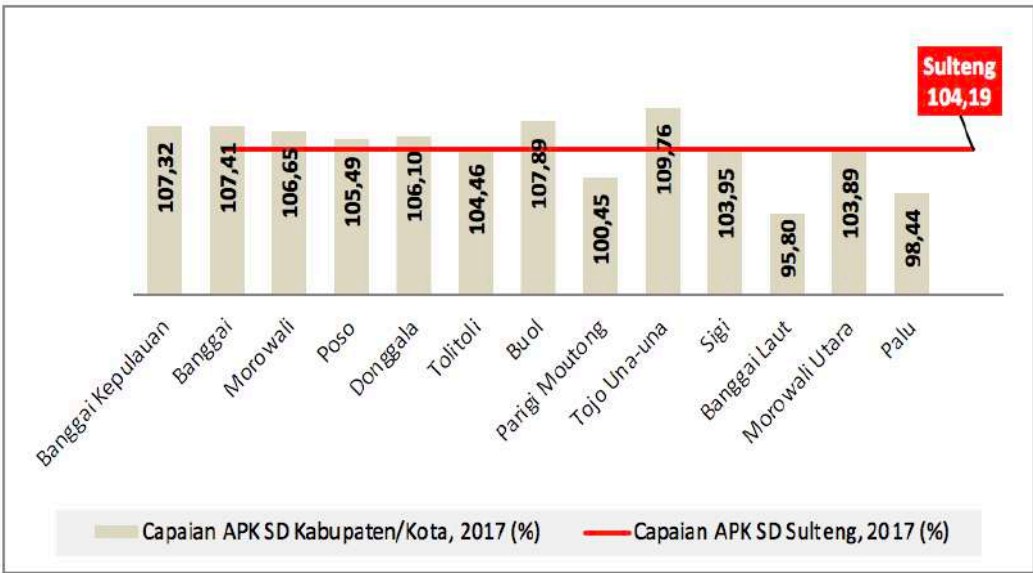
**Gambar 2.22**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014-2017**



Sumber: BPS, 2018.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2017 capaian APK SD tertinggi terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 109,76 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 95,80 persen.

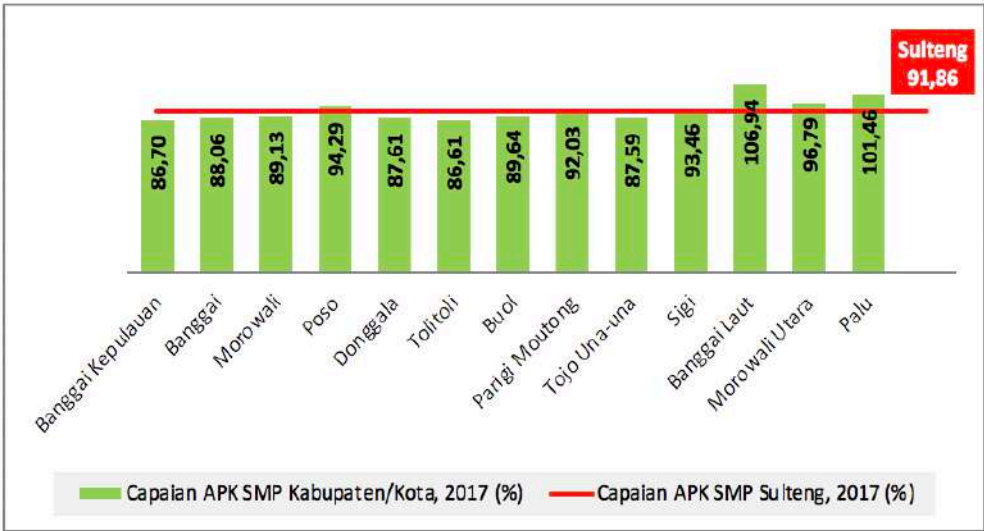
**Gambar 2.23**  
**Capaian APK SD/MI Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Capaian APK SMP pada Tahun 2017 tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 106,94 persen dan terendah di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 86,70 persen.

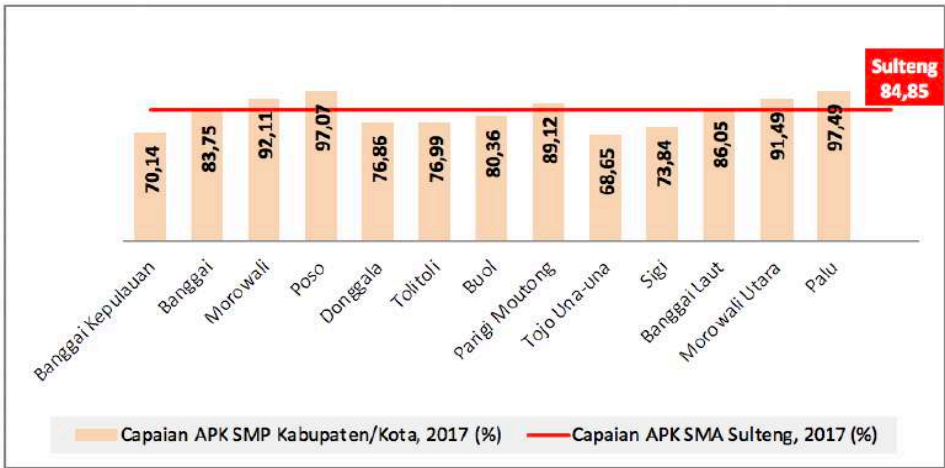
**Gambar 2.24**  
**Capaian APK SMP Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Pada jenjang SMA Tahun 2017, capaian APK tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 97,49 persen dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 68,65 persen.

**Gambar 2.25**  
**Capaian APK SMA Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017**



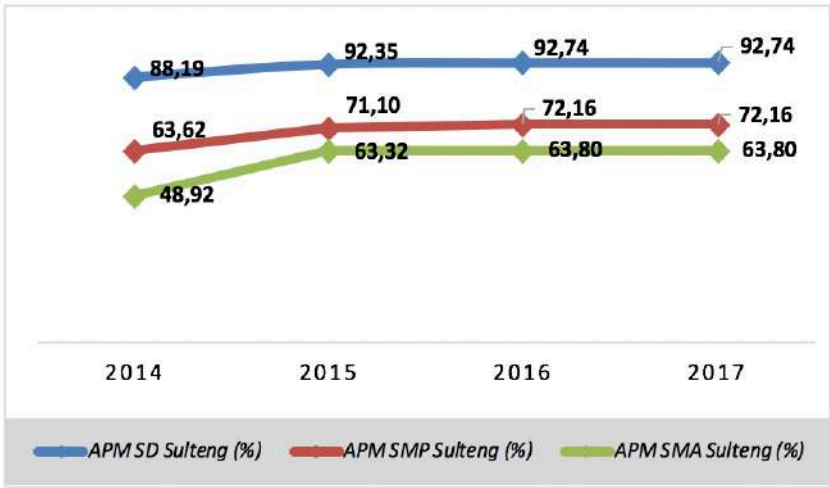
Sumber: BPS, 2018.

**2.1.2.2.1.3.      Angka Partisipasi Murni (APM)**

Sama halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, atau dengan perkataan lain APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Capaian APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2013-2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 capaian APM SD/MI sebesar 92,74 persen meningkat dibanding Tahun 2015 sebesar 92,35 persen. Sementara capaian APM SMP/MTs pada Tahun 2016 sebesar 72,16 persen meningkat dibanding Tahun 2015 yang sebesar 71,10 persen. Sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK pada Tahun 2016 sebesar 63,80 persen meningkat dibanding Tahun 2015 yang sebesar 63,32 persen.

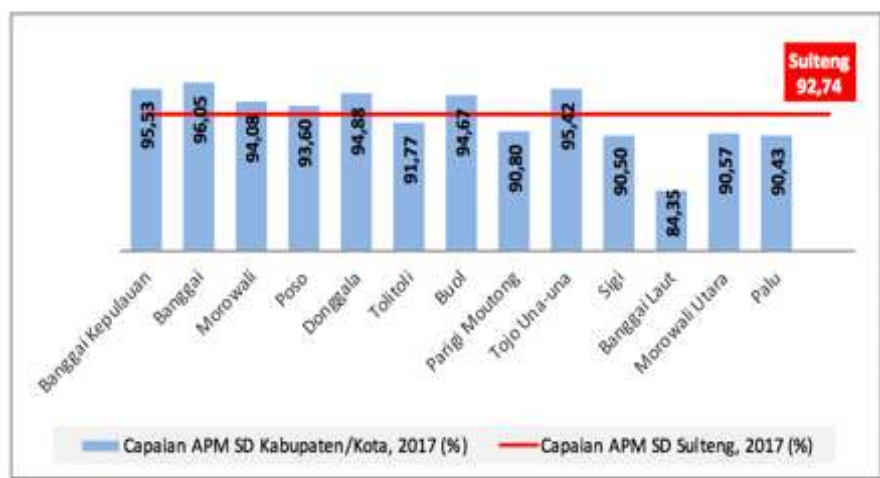
**Gambar 2.26**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017**



Sumber: BPS, 2018.

Perspektif spasial kabupaten/kota, pada Tahun 2017 capaian APM SD tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai sebesar 96,05 persen dan terendah di Kabupaten Banggai Laut sebesar 84,35 persen.

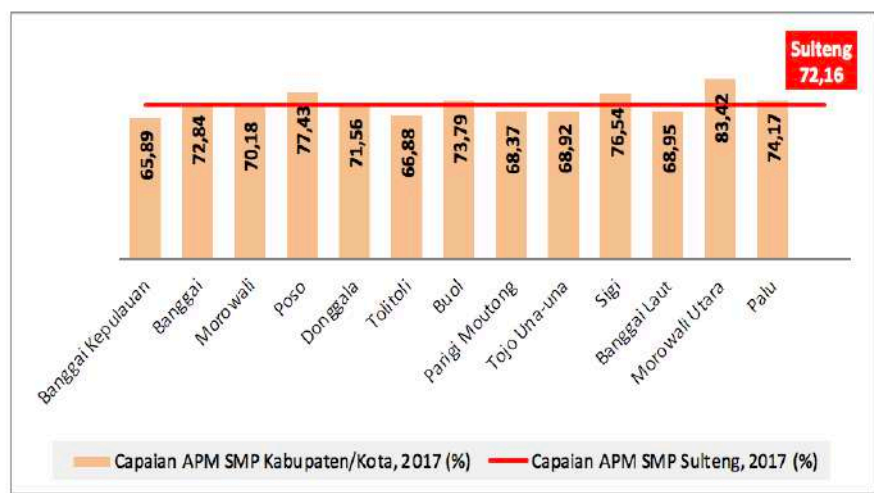
**Gambar 2.27**  
**Capaian APM SD Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Pada jenjang SMP, pada Tahun 2017 capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 83,42 persen dan terendah di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 63,55 persen.

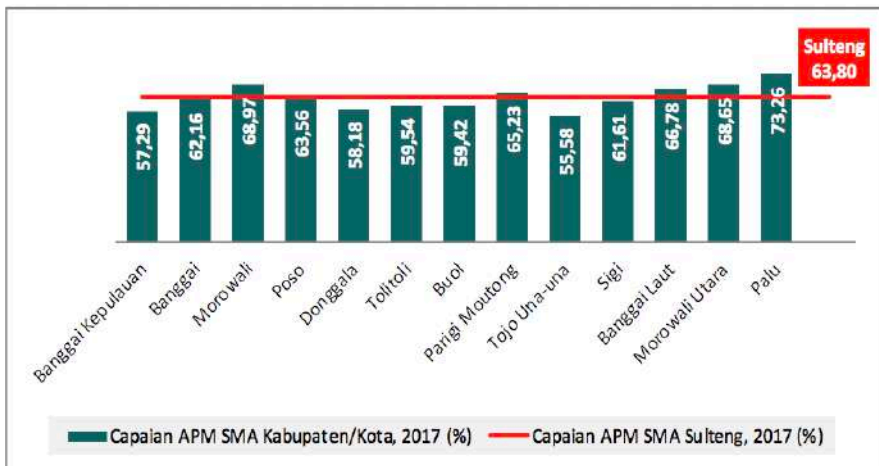
**Gambar 2.28**  
**Capaian APM SMP Kabupaten/Kota Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

Pada jenjang SMA, pada Tahun 2017, capaian APM tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 73,26 persen dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 55,58 persen.

**Gambar 2.29**  
**Capaian APM SMA Kabupaten/Kota Tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018.

## 2.1.2.2.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Secara substansi, pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa perkembangan indikator kesehatan, antara lain: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Persentase Balita Gizi Buruk.

Selama periode Tahun 2014-2018, perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, yakni dari 67,18 tahun pada Tahun 2014 menjadi 67,9 tahun pada Tahun 2018. Sementara perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) pada periode yang sama cenderung menurun, yakni dari 215 per 100.000



Kelahiran Hidup pada Tahun 2014 menjadi 153 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018.

Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode Tahun 2014-2018 mengalami *trend* penurunan, yakni dari 10,4 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2014 menjadi 8,7 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2018.

Angka Kematian Balita (AKABA) pada periode sama mengalami penurunan, yakni pada Tahun 2014 sebesar 11,7 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 0,6 per 1000 Kelahiran Hidup.

Perkembangan persentase balita gizi buruk selama periode 2014-2018 menunjukkan *trend* yang membaik, yakni dari 0,79 persen pada Tahun 2014 berkurang signifikan menjadi 0,15 persen pada Tahun 2018.

**Tabel 2.20**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018**

| NO. | INDIKATOR KESEHATAN                 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1   | Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)    | 67,18 | 67,26 | 67,31 | 67,32 | 67,9 |
| 2   | Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) | 215   | 208   | 155   | 141   | 153  |
| 3   | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)   | 10,4  | 11,0  | 11    | 10    | 8,7  |
| 4   | Angka Kematian Balita (per 1000 KH) | 11,7  | 11,3  | 11,71 | 1     | 0,6  |
| 5   | Persentase Balita Gizi Buruk (%)    | 0,79  | 0,35  | 0,16  | 0,15  | 0,15 |

Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2019.

**2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Kekayaan seni dan kebudayaan Sulawesi Tengah yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota merupakan asset yang sangat penting nilainya bagi pengembangan dan pembangunan di Sektor Pariwisata. Seni dan budaya ini antara lain berupa tarian tradisional, berbagai macam seni rupa dan seni musik tradisional.

Perkembangan jumlah grup kesenian di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014-2017 mengalami peningkatan yakni dari 227 sanggar seni pada Tahun 2014 menjadi 265 sanggar seni pada

Tahun 2017, sementara jumlah gedung kesenian dari 4 unit pada Tahun 2014 meningkat menjadi 5 unit pada Tahun 2017.

Di bidang pemuda dan olah raga, jumlah gedung olahraga yang terdapat di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2014-2017 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,06 per 10.000 penduduk.

**Tabel 2.21**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**

| NO. | INDIKATOR KINERJA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1   | Kebudayaan                                         |      |      |      |      |
|     | - Jumlah grup kesenian (sanggar)                   | 227  | 259  | 261  | 265  |
|     | - Jumlah gedung                                    | 4    | 4    | 5    | 5    |
| 2   | Pemuda dan Olahraga                                |      |      |      |      |
|     | Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)       | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Sumber: Disbudpar dan Dispora Daerah Provinsi Sulteng, 2018.

**2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

**2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan atau investasi dibidang pendidikan dan kesehatan menempati posisi urgen dalam skala prioritas pembangunan daerah harus terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia lebih diutamakan dengan memberi kesempatan kepada penduduk usia sekolah, dimana luasnya wilayah yang harus dijangkau merupakan faktor yang cukup berpengaruh disamping faktor-faktor lainnya dalam menjalankan program-program pendidikan yang berimplikasi terciptanya SDM yang handal dan siap bersaing di era globalisasi.

**2.1.3.1.1. Pendidikan**

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**

| No. | INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN                                         | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :</b>                                |       |       |       |       |
|     | - APS SD/MI                                                                 | 97,50 | 98,02 | 98,14 | 98,14 |
|     | - APS SMP/MTs                                                               | 89,25 | 91,80 | 92,32 | 92,32 |
|     | - APS SMA/MA/SMK                                                            | 70,53 | 73,80 | 74,82 | 74,82 |
| 2.  | <b>Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 1000 penduduk)</b> |       |       |       |       |
|     | - SD/MI                                                                     | 10,30 | 11,19 | 11,05 | 8,42  |
|     | - SMP/MTs                                                                   | 3,02  | 4,47  | 4,01  | 6,68  |
|     | - SMA/MA/SMK                                                                | 1,32  | 1,85  | 1,91  | 4,22  |
| 3.  | <b>Rasio Guru Terhadap Murid (per 1000 )</b>                                |       |       |       |       |
|     | - SD/MI                                                                     | 73,72 | 68,39 | 67,71 | 93,23 |
|     | - SMP/MTs                                                                   | 93,23 | 78,16 | 66,15 | 79,57 |
|     | - SMA/MA/SMK                                                                | 49,17 | 79,55 | 64,84 | 84,29 |

Sumber: BPS, 2018.

**a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2017 sebagai berikut:

- Pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), APS cenderung meningkat, yakni dari 97,50 persen pada Tahun 2014 menjadi 98,14 persen pada Tahun 2017.
- Pada jenjang SMP/MTs, APS cenderung meningkat, yakni dari 89,25 persen pada Tahun 2014 menjadi 92,32 persen pada Tahun 2017.
- Pada tingkat SMA/MA/SMK, APS cenderung meningkat, yakni dari 70,53 persen pada Tahun 2014 menjadi 74,82 persen pada Tahun 2017.

**b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah**

Selanjutnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2017 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD/MI cenderung menurun, yakni dari 10,30 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun

2014 menjadi 8,42 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2017.

- Pada jenjang SMP/MTs, rasionya cenderung meningkat, yakni dari 3,02 per 1000 penduduk usia sekolah menjadi 6,68 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2017.
- Pada jenjang SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK cenderung meningkat, yakni dari 1,32 per 1000 penduduk usia sekolah pada tahun 2014 menjadi 4,22 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2017.

#### **c. Rasio Guru Terhadap Murid**

Perkembangan rasio guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode 2014-2017 sebagai berikut:

- Pada jenjang pendidikan SD/MI, rasio guru terhadap murid cenderung meningkat, yakni dari 73,72 per 1000 murid pada Tahun 2014 menjadi 67,71 per 1000 murid pada Tahun 2016.
- Pada tingkat SMP/MTs, rasio guru terhadap murid cenderung menurun, yakni dari 93,23 per 1000 murid pada Tahun 2014 menjadi 79,57 per 1000 murid pada Tahun 2017.
- Pada tingkat SMA/SMK/MA, rasio guru terhadap murid cenderung meningkat, yakni dari 49,17 per 1000 murid pada Tahun 2014 menjadi 84,29 per 1000 murid pada Tahun 2017.

#### **d. Angka Putus Sekolah**

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, Angka Putus Sekolah cenderung menurun, yakni dari 1,59 persen pada Tahun 2014 pada Tahun 2014 menjadi 1,3 persen pada Tahun 2018.
- Pada tingkat SMP/MTs, Angka Putus Sekolah mengalami menurun, yakni dari 10,1 persen pada Tahun 2014 menjadi 9,0 persen pada Tahun 2018.

- Pada tingkat SMA/MA/SMK angka putus sekolah cenderung meningkat, yakni dari 2,80 persen pada Tahun 2014 menjadi 3,1 persen pada Tahun 2018.

**e. Angka Kelulusan**

Perkembangan Angka Kelulusan di Sulawesi Tengah selama periode 2014-2018 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, selama periode Tahun 2013-2016 mencapai 100 persen.
- Pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan cenderung meningkat, yakni dari 97,06 persen pada Tahun 2013 menjadi 100 persen pada Tahun 2016.
- Pada jenjang SMA/SMK, Angka Kelulusan cenderung meningkat, yakni dari 98,25 persen pada Tahun 2013 menjadi 99,90 persen pada Tahun 2016.

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah dan**  
**Angka Kelulusan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 - 2018**

| NO. | INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Angka Putus Sekolah (%):            |       |       |       |       |       |
|     | Angka Putus Sekolah SD/MI           | 1,59  | 1,22  | 1,0   | 1,60  | 1,30  |
|     | Angka Putus Sekolah SMP/MTs         | 10,1  | 9,45  | 9,0   | 11,0  | 9,0   |
|     | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK      | 3,03  | 2,65  | 2,0   | 3,20  | 3,10  |
| 2   | Angka Kelulusan (AL) (%):           |       |       |       |       |       |
|     | Angka Kelulusan SD/MI               | 97,97 | 98,99 | 98,99 | 96,80 | 97,0  |
|     | Angka Kelulusan SMP/MTs             | 96,46 | 97,52 | 97,52 | 95,00 | 95,50 |
|     | Angka Kelulusan SMA/MA/SMK          | 96,81 | 98,08 | 98,08 | 95,50 | 97,75 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulteng, 2019.

**2.1.3.1.2 Kesehatan**

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014-2017 dapat dilihat dari perkembangan indikator kesehatan pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014 - 2017**

| NO. | INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN                        | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Rasio posyandu per satuan balita (per 1000)                | 11,79 | 11,90 | 10,74 | 10,70 |
| 2.  | Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 1000)             | 0,065 | 0,066 | 0,064 | 0,065 |
| 3.  | Rasio Pustu per satuan penduduk (per 1000)                 | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  |
| 4.  | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000)           | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
| 5.  | Rasio Dokter gigi per satuan penduduk (per 1000)           | 0,043 | 0,041 | 0,099 | 0,044 |
| 6.  | Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk (per 1000)      | 0,052 | 0,058 | 0,060 | 0,062 |
| 7.  | Rasio Dokter Umum per satuan penduduk (per 1000)           | 0,17  | 0,15  | 0,16  | 0,151 |
| 8.  | Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk (per 1000) | 1,83  | 1,98  | 1,88  | 2,28  |
| 9.  | Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk (per 1000)  | 1,16  | 1,16  | 1,28  | 1,52  |

Sumber : BPS, 2018 (Data diolah kembali).

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan indikator kinerja kesehatan di Sulawesi Tengah selama periode 2014-2017 sebagai berikut:

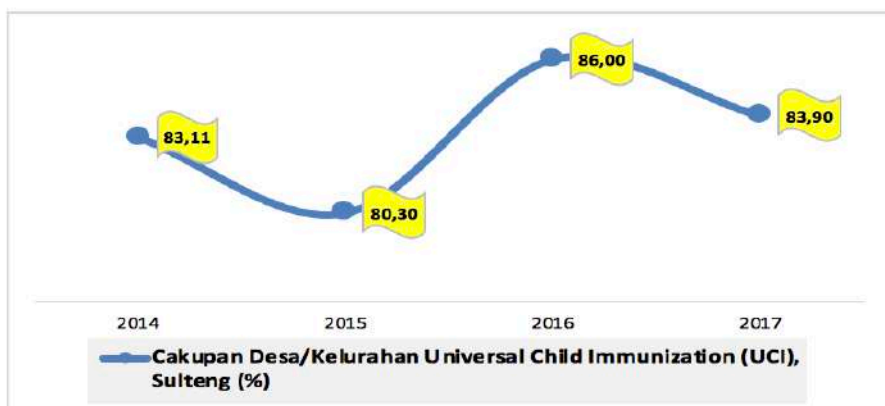
- Perkembangan rasio posyandu per satuan balita cenderung menurun, yakni dari 11,79 per 1000 balita pada Tahun 2014 menjadi 10,70 per 1000 balita pada Tahun 2017.
- Perkembangan rasio puskesmas per satuan penduduk mengalami perubahan signifikan, yakni dari 0,065 per 1000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 0,065 per 1000 penduduk pada Tahun 2017.
- Perkembangan rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk tidak mengalami perubahan selama periode Tahun 2014-2017 dengan rasio sebesar 0,25 per 1000 penduduk.
- Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 0,008 per 1000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 0,011 per 1000 penduduk pada Tahun 2017.



- Perkembangan rasio dokter gigi per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 0,043 per 1000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 0,044 per 1000 penduduk pada Tahun 2017.
- Perkembangan rasio dokter spesialis per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 0,052 per 1000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 0,062 per 1000 penduduk pada Tahun 2017.
- Perkembangan rasio dokter umum per satuan penduduk mengalami penurunan yakni dari 0,17 per 1000 penduduk menjadi 0,151 per 1000 penduduk.
- Perkembangan rasio perawat per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 1,83 per 1000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 2,28 per 1000 penduduk pada Tahun 2017.
- Perkembangan rasio bidan per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 1,16 per 1000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 1,52 per 1000 penduduk pada Tahun 2017.

Selanjutnya, perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2013-2016 cenderung fluktuatif, yakni pada Tahun 2011 sebesar 90,90 persen menurun menjadi 80,30 persen pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI meningkat menjadi 86,0 persen.

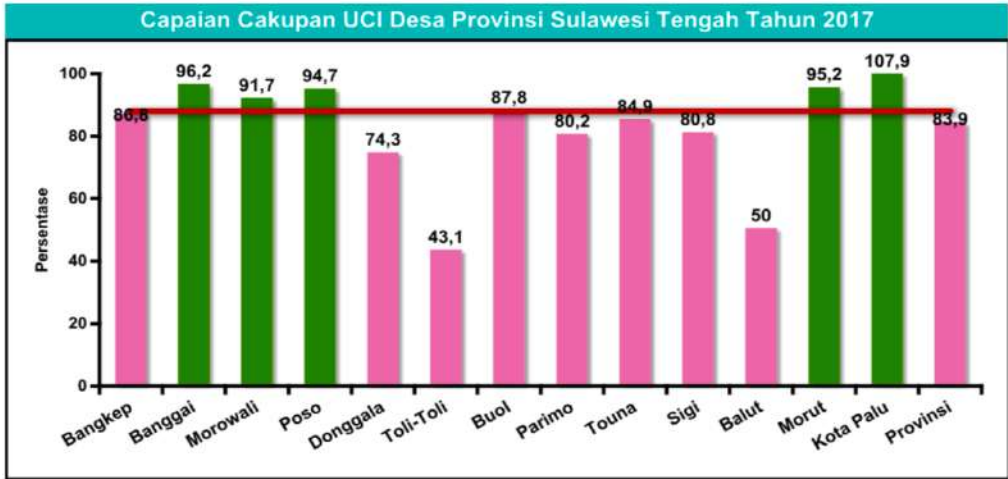
**Gambar 2.30**  
**Perkembangan Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2017 capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 107,9 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Tolitoli sebesar 43,1 persen. Dari 13 Kabupaten/Kota, terdapat 5 kabupaten/Kota yang mencapai target yaitu Kabupaten Banggai (96,2%), Kabupaten Morowali (91,7%), Kabupaten Poso (94,7%), Kabupaten Morowali Utara (95,2%) dan Kota Palu (107,9%)

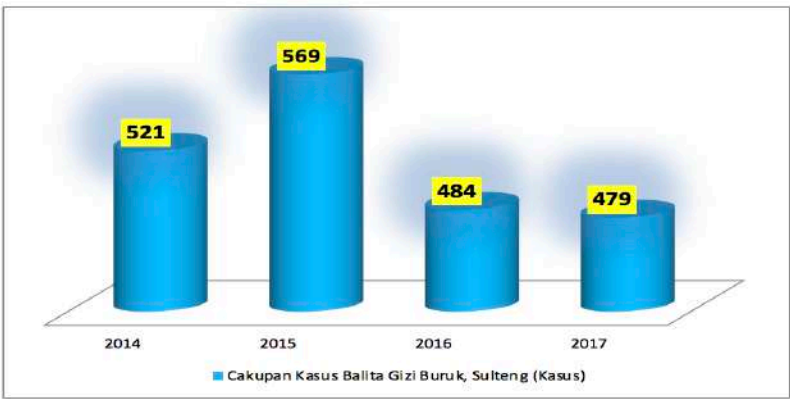
**Gambar 2.31**  
**Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2017**



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Sedangkan jumlah kasus balita gizi buruk di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 479 kasus, menurun dibanding dengan Tahun 2016 yang sebesar 484 kasus.

**Gambar 2.32**  
**Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017**



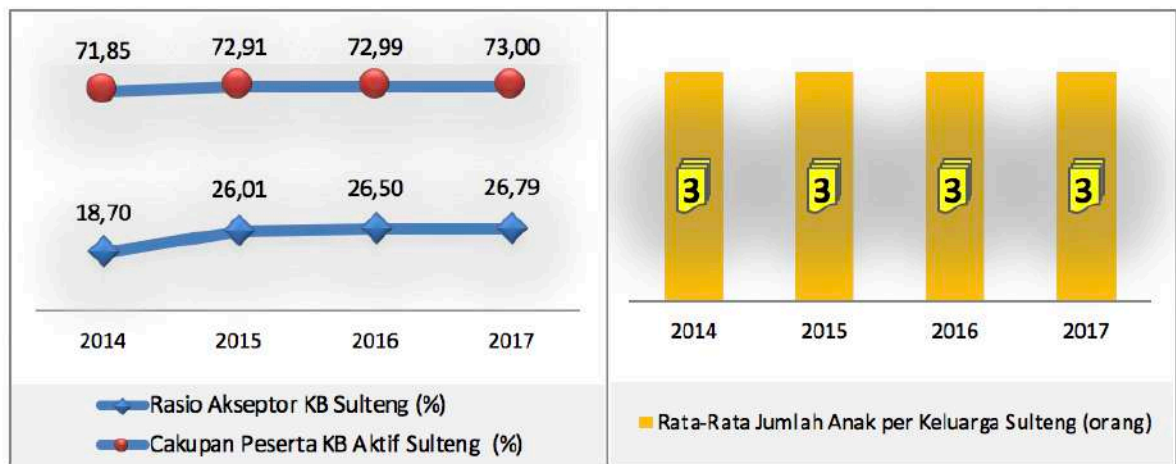
Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

**2.1.3.1.2.1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Disamping itu melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga (kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan program KB di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator pada gambar berikut:

**Gambar 2.33**  
**Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2018.

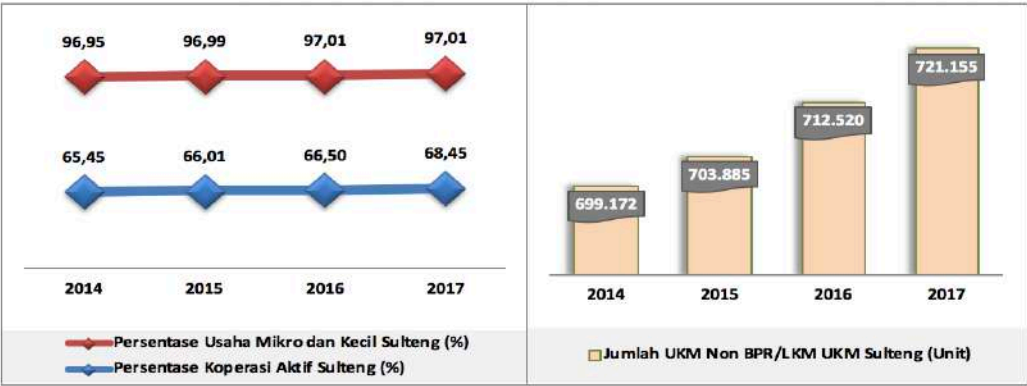
Terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sepanjang periode Tahun 2014-2017 sebanyak 3 anak per keluarga. Sementara rasio akseptor KB diantara pasangan usia subur pada Tahun 2017 sebesar 73,0 persen, angka ini meningkat dibanding

Tahun 2016 sebesar 72,99 persen. Sedangkan pada cakupan peserta KB aktif pada Tahun 2017 mencapai 26,79 persen meningkat dibanding Tahun 2016 sebesar 26,50 persen.

**2.1.3.1.3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan saat ini UKM menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Suawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.34**  
**Perkembangan Persentase Koperasi Aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**



Sumber: Dinas KUMKM Perindag Daerah Provinsi Sulteng, 2018.

Persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 mencapai 68,45 persen, capaian ini lebih tinggi dibanding Tahun 2016 yang hanya sebesar 65,45 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan kecil pada Tahun 2017 sebesar 97,01 persen. Sedangkan jumlah UKM dan BPR/LKM pada Tahun 2017 mencapai 721.155 unit usaha.

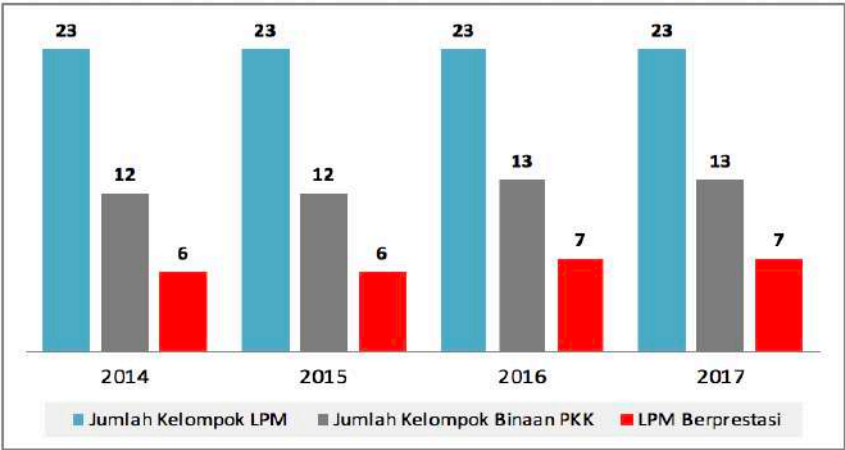
**2.1.3.1.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dalam rangka mensukseskan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat baik program nasional maupun program yang dibangun

melalui pemerintah daerah sangat dibutuhkan kesiapan institusi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah.

Pada Tahun 2017 rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Sulawesi Tengah sebanyak 23 lembaga. Dari jumlah binaan LPM tersebut, yang menjadi LPM berprestasi sebanyak 7 LPM. Sedangkan jumlah kelompok binaan PKK di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13.

**Gambar 2.35**  
**Perkembangan Kelompok Binaan LPM, Kelompok Binaan PKK,**  
**dan LPM Berprestasi di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014-2017**



Sumber: BPPMD Provinsi Sulteng, Tahun 2018.

**2.1.3.1.5. Kebudayaan**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dan sekaligus sebagai pendorong perekonomian daerah. Untuk itu potensi pariwisata, seni dan budaya perlu terus untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui kegiatan promosi, baik dalam negeri maupun manca negara.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 17 kali, dengan jumlah sarana fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya yaitu 20 buah.

Selanjutnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Sulawesi Tengah sejak Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yakni dari 16 situs/BCB pada Tahun 2014 menjadi 18 situs/BCB pada Tahun 2017.

**Gambar 2.36**  
**Perkembangan Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya serta**  
**Benda Situs Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 - 2017**

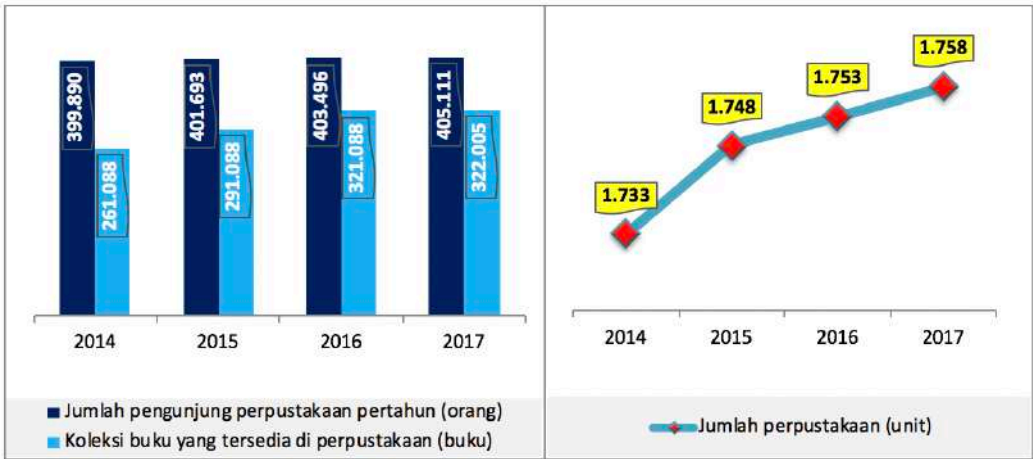


Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulteng, 2018.

**2.1.3.1.6. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah. Sejak empat tahun terakhir, jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia.

**Gambar 2.37**  
**Perkembangan Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan**  
**Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 - 2017**



Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulteng, 2018.

Jumlah perpustakaan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan, yaitu dari 1.733 unit pada Tahun 2014 menjadi 1.758 unit pada Tahun 2017. Sejalan dengan itu jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami



peningkatan dari 399.890 pengunjung pada Tahun 2014 menjadi 405.111 pengunjung pada Tahun 2017. Sedangkan koleksi buku yang tersedia dari 261.088 buku pada Tahun 2014 meningkat menjadi 322.005 buku pada Tahun 2017.

**2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan**

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Pada Tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1.502.972 orang meningkat dibanding Tahun 2017 sebanyak 1.428.583 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2018 sebesar 69,52 persen, angka ini lebih tinggi dibanding Tahun 2017 sebesar 67,14 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2017 sebesar 3,81 persen menurun pada Tahun 2018 menjadi 3,43 persen.

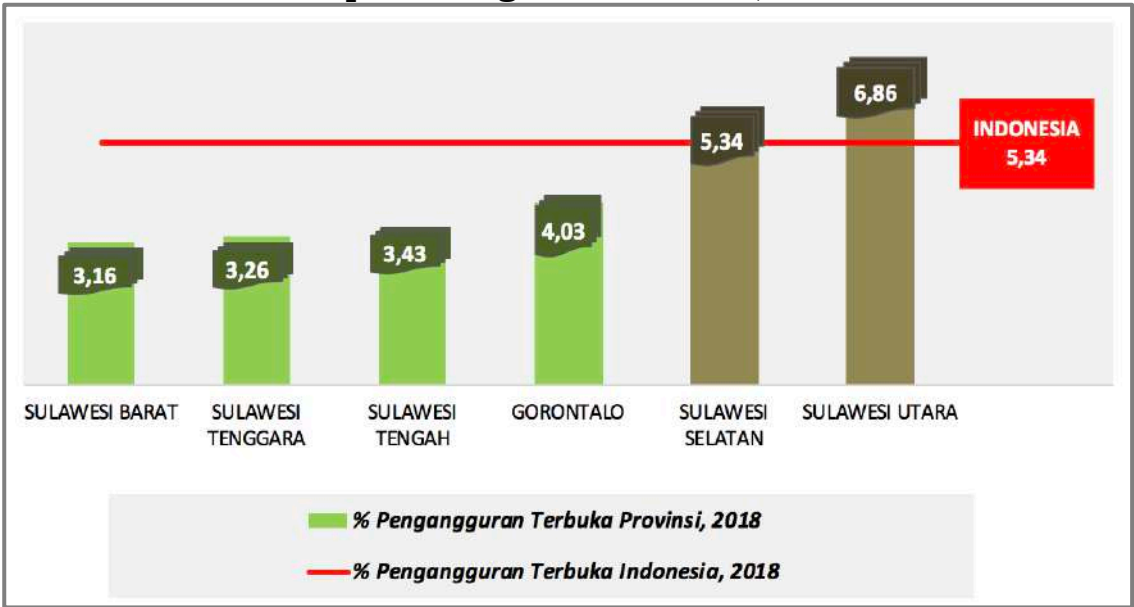
**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2018**

| INDIKATOR<br>KETENAGAKERJAAN                  | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Angkatan Kerja (orang)                        | 1.342.615 | 1.384.235 | 1.509.505 | 1.428.583 | 1.502.972 |
| Bekerja (orang)                               | 1.293.226 | 1.327.418 | 1.459.803 | 1.374.214 | 1.451.491 |
| Pengangguran (orang)                          | 49.389    | 56.817    | 49.702    | 54.369    | 51.481    |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) | 66,76     | 67,51     | 72,28     | 67,14     | 69,52     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)        | 3,68      | 4,10      | 3,29      | 3,81      | 3,43      |

Sumber: BPS, 2019.

Capaian TPT Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional dan menempati posisi ketiga tingkat pengangguran terendah di Pulau Sulawesi.

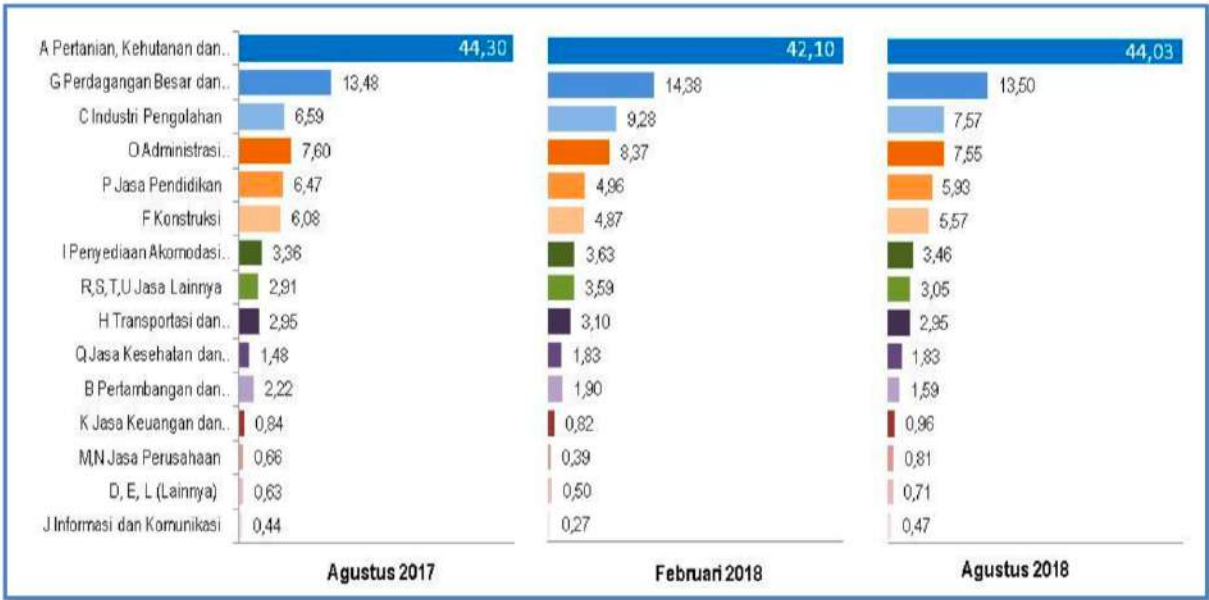
**Gambar 2.38**  
**Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Dalam Perspektif Regional Sulawesi, Tahun 2018**



Sumber: BPS, 2019.

Dilihat dari daya serap tenaga kerja di sektor lapangan usaha, hampir tidak ada lapangan usaha yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi tenaga kerja bergerak fluktuatif antar semesternya. Selama Agustus 2017 – Agustus 2018, kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Industri pengolahan (0,99 poin), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,35 poin), Jasa Perusahaan (0,15 poin) dan jasa lainnya (0,15), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,12 poin), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,10 poin), dan Informasi dan Komunikasi (0,03 poin). Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu Pertambangan dan Penggalian (0,63 poin), Jasa Pendidikan (0,54 poin), Konstruksi (0,51 poin), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,27 poin), Administrasi Pemerintahan (0,06 poin).

**Gambar 2.39**  
**Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017 – 2018**



Sumber: BPS, 2019.

Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi selama lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.26**  
**Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2017**

| LAPANGAN KERJA                                                              | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan                            | 616.499   | 616.626   | 664.142   | 669.959   | 608.746   |
| 2. Pertambangan dan penggalian                                              | 21.307    | 16.044    | 24.035    | 22.239    | 30.491    |
| 3. Industri pengolahan                                                      | 62.348    | 63.587    | 53.869    | 92.470    | 86.986    |
| 4. Listrik, gas dan air                                                     | 3.669     | 2.357     | 2.453     | 7.221     | 2.983     |
| 5. Bangunan                                                                 | 65.740    | 71.949    | 73.525    | 82.005    | 83.518    |
| 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel                        | 176.118   | 206.094   | 217.697   | 246.546   | 218.002   |
| 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi                                     | 44.701    | 44.583    | 40.872    | 51.304    | 44.913    |
| 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan | 18.263    | 16.775    | 17.328    | 27.777    | 20.905    |
| 9. Jasa kemasyarakatan                                                      | 230.477   | 255.211   | 233.497   | 260.282   | 277.670   |
| JUMLAH                                                                      | 1.239.122 | 1.293.226 | 1.327.418 | 1.459.803 | 1.374.214 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 diolah.

#### **2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi; serta 2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Provinsi.

##### **1) Tersusunnya RPPLH Provinsi**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Tengah pada 2019 dokumen RPPLH proses penyusunan, yang antara lain memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

##### **2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah RPJMD.

#### **2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan**

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat diantaranya pemberian izin lokasi. Izin lokasi diwajibkan bagi setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang akan menanamkan modal dengan memanfaatkan lahan/tanah lintas daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penetapan lokasi

pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

**2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

**2.1.3.2.1. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan daerah.

Perkembangan Nilai Investasi PMDN di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami perkembangan yang fuktuatif. Pada Tahun 2018 nilai PMDN mencapai Rp12.689.562.560.000,- meningkat dari Tahun 2017 yang hanya sebesar Rp1.929.657.000.000,- atau meningkat sebesar 557,61 persen dari Tahun 2017.

Sementara nilai investasi PMA di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2014-2018 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Tahun 2018 Nilai PMA mencapai Rp9.010.437.440.000,- lebih rendah dari Tahun 2017 sebesar Rp.20.635.458.000.000,- atau menurun sebesar 129,02 persen dari Tahun 2017.

**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013 - 2018**

| Tahun | PMA        |                      | PMDN       |                      |
|-------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|       | Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) |
| 2014  | 58         | 16.105.670.000.000   | 8          | 95.800.000.000       |
| 2015  | 82         | 13.564.545.900.000   | 23         | 968.450.500.000      |
| 2016  | 13         | 21.910.839.900.000   | 42         | 1.081.241.000.000    |
| 2017  | 43         | 20.635.458.000.000   | 75         | 1.929.657.000.000    |
| 2018  | 23         | 9.010.437.440.000    | 103        | 12.689.562.560.000   |

Sumber: BPM-P2TSPD Provinsi Sulteng, 2019.

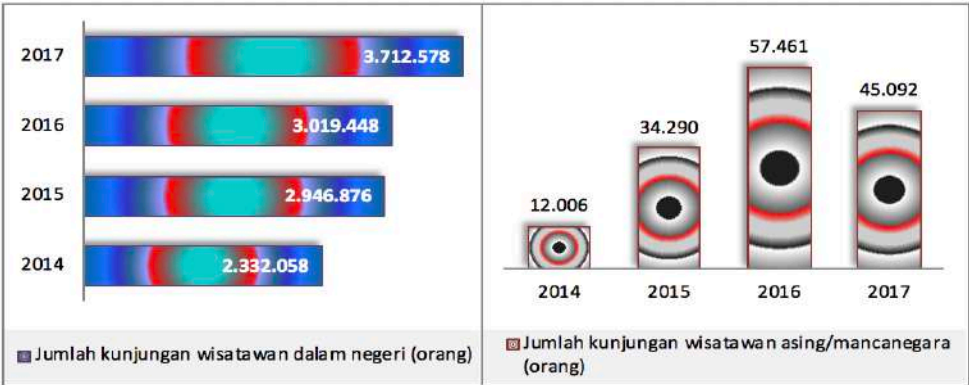
**2.1.3.2.2. Pariwisata**

Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah.Sektor pariwisata

diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/mancanegara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah.

Selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, yakni dari 2.332.058 orang pada Tahun 2014 menjadi 3.712.578 orang pada Tahun 2017. Sementara jumlah kunjungan wisatawan asing dari 12.006 orang pada Tahun 2014 meningkat menjadi 57.461 orang pada Tahun 2016, selanjutnya pada Tahun 2017 menurun menjadi 45.092 orang.

**Gambar 2.40**  
**Perkembangan Kunjungan Wisatawan**  
**Di Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017**



Sumber: BPS, Tahun 2018.

Untuk jumlah restoran/rumah makan selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif, yakni dari 712 buah pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 1.066 buah pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.029 buah.

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Kunjungan Wisatawan**  
**Di Sulawesi Tengah, Tahun 2014 – 2017**

| Nama Wilayah      | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|
| Banggai Kepulauan | 16   | 16   | 16   |
| Banggai           | 86   | 90   | 85   |
| Morowali          | 21   | 26   | 16   |
| Poso              | 107  | 130  | 130  |
| Donggala          | 38   | 126  | 126  |
| Toli-Toli         | 25   | 25   | 25   |
| Buol              | 44   | 44   | 44   |
| Parigi Moutong    | 27   | 208  | 198  |
| Tojo Una-Una      | 67   | 67   | 66   |



| Nama Wilayah           | 2016       | 2017         | 2018         |
|------------------------|------------|--------------|--------------|
| Sigi                   | 32         | 33           | 33           |
| Banggai Laut           |            | 25           | 25           |
| Morowali Utara         | 31         | 67           | 61           |
| Kota Palu              | 218        | 209          | 204          |
| <b>SULAWESI TENGAH</b> | <b>712</b> | <b>1.066</b> | <b>1.029</b> |

Sumber: BPS, Tahun 2019.

### 2.1.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 mencapai 1.059.050,30 ton, capaian ini lebih rendah dibanding dengan Tahun 2016 yang mencapai 1.339.013,78 ton dan untuk tahun 2018 capaiannya kembali naik menjadi sebesar 1.226.687,91 ton. Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2016 sebanyak 212.330,60 ton menurun menjadi 174.964,00 ton pada Tahun 2017 dan untuk tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sbesar 173.621,20 ton.

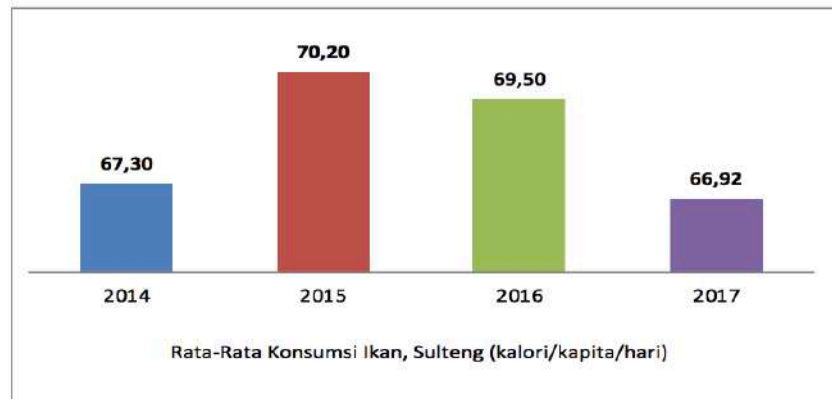
**Tabel 2.29**  
**Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018**

| PRODUKSI PERIKANAN (TON) |                    |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| TAHUN                    | PERIKANAN BUDIDAYA | PERIKANAN TANGKAP |
| 2014                     | 1.218.260,00       | 267.101,60        |
| 2015                     | 1.396.700,74       | 174.794,20        |
| 2016                     | 1.339.013,78       | 212.330,60        |
| 2017                     | 1.059.050,30       | 174.964,00        |
| 2018                     | 1.226.687,91       | 173.621,20        |

Sumber: BPS, 2019.

Perkembangan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2013 rata-rata konsumsi ikan mencapai 68,50 kalori/kapita/hari menurun menjadi 67,30 kalori/kapita/hari pada Tahun 2014, selanjutnya pada Tahun 2015 konsumsi ikan meningkat signifikan menjadi 70,20 kalori/kapita/hari, dan pada Tahun 2016 konsumsi ikan sedikit menurun menjadi 69,50 kalori/kapita/hari.

**Gambar 2.41**  
**Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Ikan**  
**Di Sulawesi Tengah (Kalori/perkapita/tahun)**  
**Tahun 2014 – 2017**



Sumber: BPS, Tahun 2018.

Selanjutnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 ha melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tersebut terdiri atas:

1. Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan
4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

#### **2.1.3.2.4 Perindustrian dan Perdagangan**

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tengah cenderung stagnan. Untuk sektor industri skala kecil dan menengah cukup berkembang tetapi untuk industri skala besar (industri manufaktur) tidak begitu berkembang. Industri skala kecil

dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta, seperti industri kerajinan tangan (rotan dan bambu), meubel, food (kuliner), dan penginapan (homestay). Adapun sektor perdagangan lebih bergerak pada perdagangan antar pulau dan antar provinsi untuk komoditas hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038, Industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

- a. Industri Pangan terdiri dari :
  - Industri pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan
  - Industri Pengolahan Minyak Nabati
  - Industri berbahan baku ikan dan hasil kelautan
  - Industri olahan coklat
  - Industri bawang
  - Industri olahan kopi
- b. Industri Hulu Agro
  - Industri pengolahan kelapa terpadu
  - Industri pengolahan minyak atsiri (cengkeh, pala dan nilam)
  - Industri pengolahan kelapa sawit
  - Industri karet
  - Industri Pakan
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)
  - Industri Tekstil
  - Industri Furniture
  - Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
  - Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan
- d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
  - Industri Minyak dan Gas
- e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
  - Industri Besi
  - Industri Nikel
  - Industri Bahan Galian Bukan Logam

**2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

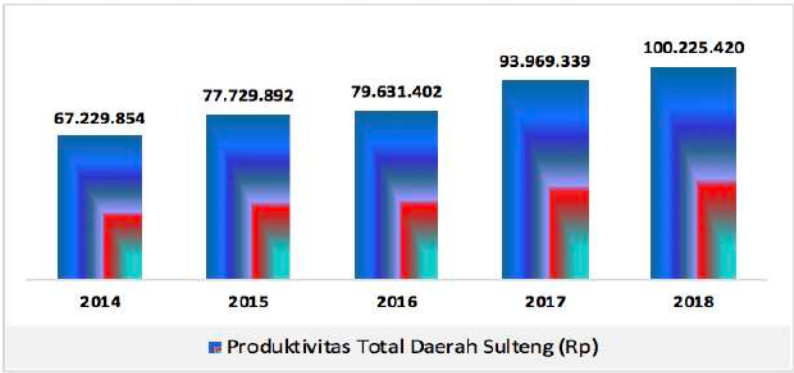
**2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

**2.1.4.1.1. Produktivitas Total Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang telah dicapai tidak lepas dari peran semua sektor lapangan usaha. Produktivitas Total daerah menunjukkan seberapa besar bilah tambah bruto yang diciptakan oleh suatu daerah. Nilai produktivitas sektor ekonomi daerah yang tangguh diharapkan dapat mendukung daya saing daerah di era otonomi.

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan *trend* yang meningkat, yakni dari Rp67.229.854 pada Tahun 2014 menjadi Rp100.225.420,- dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 11 persen.

**Gambar 2.42**  
**Perkembangan Produksi Total Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2018**

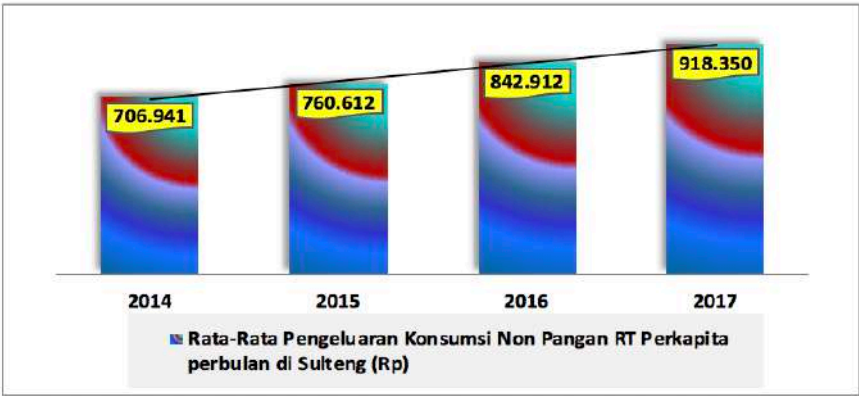


Sumber: BPS, Tahun 2018 (Data Diolah kembali).

**2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 menunjukan *trend* peningkatan, yakni pada Tahun 2014 sebesar Rp706.941,- perkapita/bulan, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp.918.350,- perkapita/bulan pada Tahun 2017.

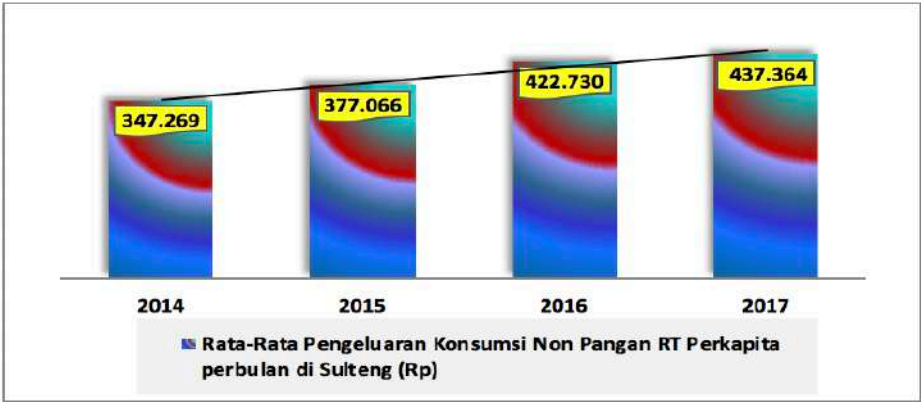
**Gambar 2.43**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017**



Sumber: BPS, Tahun 2018.

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp.347.269,- perkapita/bulan menjadi Rp.437.364,- perkapita/bulan pada Tahun 2017.

**Gambar 2.44**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga**  
**Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017**



Sumber: BPS, Tahun 2018.

### 2.1.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu, dan diharapkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan melebihi pengeluaran= $NTP > 100$ ). NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) terhadap indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ) dan nilai NTP dinyatakan dalam bentuk persentase.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2014 sebesar 102,18 persen menurun menjadi 98,12 persen pada Tahun 2015, selanjutnya pada Tahun 2016 meningkat menjadi 99,35 persen, dan pada Tahun 2017 menurun menjadi 95,04 persen, selanjutnya meningkat menjadi 96,93 persen pada Tahun 2018.

Sementara dilihat dari NTP Sub Sektor pada Tahun 2018, terdapat tiga subsektor cenderung mengalami peningkatan NTP dengan nilai diatas 100, yakni: (1) NTP Sub Sektor Hortikultura sebesar 109,94 persen, (2) NTP Sub Sektor Peternakan sebesar 108,26 persen, dan (3) NTP Sub Sektor Perikanan sebesar 106,63 persen.

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan**  
**dan Sub SektorProvinsi Sulawesi Tengah,**  
**Periode 2014 - 2018 (Persen)**

| NO. | NILAI TUKAR PETANI                   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | NTP Gabungan                         | 102,18 | 98,12  | 99,35  | 95,04  | 96,93  |
| a.  | NTP Sub Sektor Tanaman Pangan        | 94,13  | 92,18  | 94,45  | 90,31  | 92,65  |
| b.  | NTP Sub Sektor Hortikultura          | 107,91 | 108,85 | 109,92 | 112,63 | 109,94 |
| c.  | NTP Sub Sektor Tan.Perkebunan Rakyat | 101,69 | 91,64  | 92,74  | 82,31  | 86,88  |
| d.  | NTP Sub Sektor Peternakan            | 108,12 | 106,58 | 106,70 | 107,06 | 108,26 |
| e.  | NTP Sub Sektor Perikanan             | 101,22 | 104,88 | 107,30 | 107,85 | 106,63 |

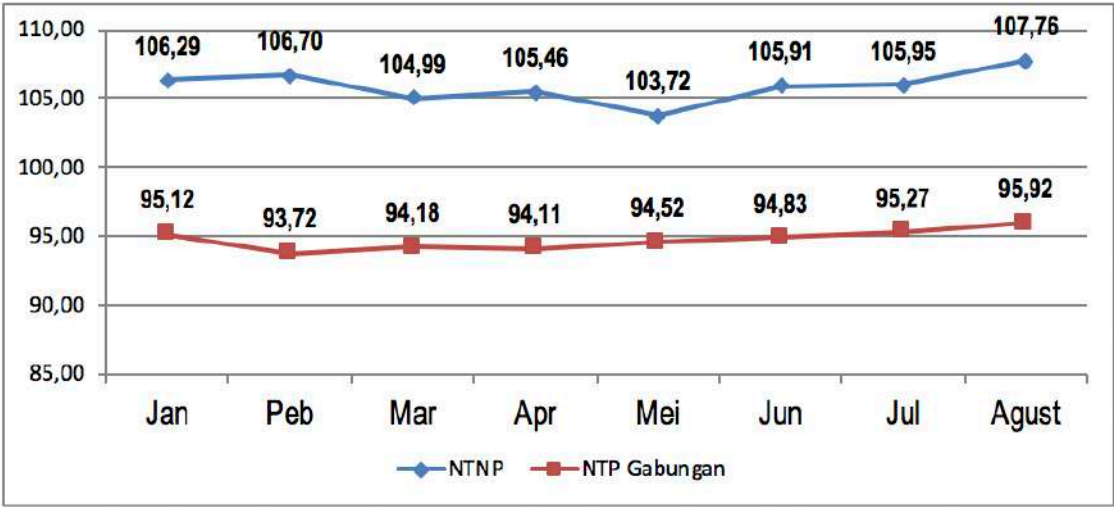
Sumber: BPS, Tahun 2019.

Nilai NTP Gabungan pada tahun 2018 yang berada dibawah nilai 100 mengindikasikan bahwa petani produsen masih belum sepenuhnya mampu menikmati keuntungan daya saing dari produk pertanian mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar keuntungan masih dinikmati oleh pelaku usaha (*establishment*) di bidang pertanian. Oleh karena itu perlu adanya *road map* kebijakan yang mengarah pada aspek *competitiveness* produk unggulan melalui peningkatan skala usaha pertanian, produktivitas, penambahan atau perluasan areal tanam, dan perbaikan dukungan infrastruktur pertanian, sehingga produk pertanian tersebut akan mampu bersaing di pasaran. Selain itu mengontrol dan menjaga agar harga produk yang dihasilkan petani kita juga menjadi fokus perhatian.



Nilai Tukar Perikanan di Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang menggembirakan karena berada diangka lebih dari 100 yang berarti indeks harga keuntungan produksi yang diterima oleh nelayan/pembudidaya ikan adalah lebih besar dari indeks harga pengeluaran operasional produksi atau dapat dikatakan nelayan/pembudidaya ikan mengalami surplus. Pasca bencana di awal tahun 2019, Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya (NTNP) masih berada diangka lebih dari 100, sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya (NTNP)**  
**Bulan Januari s.d Agustus 2019\***



Keterangan : NTNP (Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya);  
\*Sumber: BRS (2019);

Ekspor perikanan Sulawesi Tengah memiliki trend positif, walaupun masih berkategori rendah karena baru sekitar US\$ 20,80 Juta atau sekitar 4,12 persen dari total Ekspor Sulawesi Tengah sebesar US\$ 504,15 Juta di tahun 2019 (BPS, 2019). Ekspor untuk perikanan tangkap sebesar 153.677 ton dan perikanan budidaya sebanyak 437.846 ton. Komoditas perikanan dan kelautan yang diekspor terdiri atas ikan tuna, cakalang, rumput laut dan udang.

Permasalahan paling mendasar dari sub sektor kelautan khususnya perikanan tangkap yaitu maraknya kegiatan *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing* terutama aktivitas *illegal fishing* di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojouna-una ditambah lagi armada penangkapan nelayan yang minim dan masih kurangnya pasokan BBM

sehingga kemampuan jelajah kapal penangkap ikan yang tidak lebih dari 2 – 3 mil laut.

Diupayakan pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) lebih ditingkatkan melalui penambahan jumlah pos pengawasan dari pemerintah dan penambahan jumlah UPT pelabuhan dari 4 buah menjadi 11 buah yang mewakili setiap perairan di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.

Untuk menjaga kekayaan alam laut Sulawesi Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan **luas 1.379.159,41 ha** melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tersebut terdiri atas:

- a. Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
- b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
- c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan
- d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

#### **2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Pada tahun 2017 Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan penataan ruang telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, tahapannya salah satunya yaitu tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap indikasi program dalam rencana tata ruang terhadap data pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan target capaian dalam indikasi

program. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Dalam pemanfaatan ruang, simpangan- simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah

**Tabel. 2.32**  
**Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033**  
**(Perwujudan Rencana Struktur Ruang)**

| No.                               | Indikasi Program Lima Tahunan                                                 | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                               | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|                                   |                                                                               |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|                                   |                                                                               |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
| PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG |                                                                               |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
| A                                 | Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan                    |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
|                                   | 1. Pengembangan/ Peningkatan fungsi                                           | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|                                   | 2. Pengembangan baru                                                          | 33%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|                                   | 3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi                                | 0,5                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| B                                 | Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah | 0,33                                      |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| C                                 | Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan          |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
|                                   | 1. Pengembangan/ Peningkatan fungsi                                           | 33%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|                                   | 2. Pengembangan baru                                                          | 33%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|                                   | 3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi                                | 33%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| D                                 | Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana                              |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
|                                   | 1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam                                      | 0,5                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|                                   | 2. Pengendalian perkembangan kota- kota berbasis Mitigasi Bencana             | 0,25                                      | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
| E                                 | Perwujudan Sistem Transportasi                                                |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |

| No. | Indikasi Program Lima Tahunan                                                                            | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|     |                                                                                                          |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|     |                                                                                                          |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
|     | 1. Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan Lintas Trans Sulawesi Tengah, Jaringan lintas Barat | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 2. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan                                                                    | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 3. Pembangunan Terusan Khatulistiwa                                                                      | 33%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 4. Pemantapan Pelabuhan Propinsi                                                                         | 100%                                      | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 5. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer                                      | 100%                                      | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 6. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder                                    | 100%                                      | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 7. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier                                     | 100%                                      | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
| F   | Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya                                                             |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
|     | 1. Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan PengendalianDayaRusak                                          | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 2. Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas (Energi)Bumi                                    | 100%                                      |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|     | 3. Rehabilitasi Jaringan Terestrial (Komunikasi)                                                         | 100%                                      |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 4. Pengembangan JaringanTerestrial (Komunikasi)                                                          | 100%                                      |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

**Tabel. 2.33**  
**Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033**  
**(Perwujudan Rencana Pola Ruang)**

| No.                           | Indikasi Program Lima Tahunan                              | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                                                            | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|                               |                                                            |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|                               |                                                            |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
| PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG |                                                            |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
| A                             | Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |

| No. | Indikasi Program Lima Tahunan                                                    | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|     |                                                                                  |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|     |                                                                                  |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
|     | 1. Pengembangan/ Peningkatan fungsi                                              | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| A   | Perwujudan Kawasan Lindung                                                       |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
|     | 1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut   | 33%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 2. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi                   | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 3. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi                                            | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 4. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi                   | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 5. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Rava  | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 6. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 7. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka                       | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 8. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa            | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 9. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Cagar Alam                  | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 10. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman                      | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 11. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya           | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 12. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman WisataAlam           | 33%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 13. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung                           | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 14. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung                                     | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 15. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru                        | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 16. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru                                  | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
| B   | Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya                                        |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |

| No. | Indikasi Program Lima Tahunan                    | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                  | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|     |                                                  |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|     |                                                  |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
|     | 2. Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian  | 50%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 3. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian  | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 4. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk            | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 5. Pengembangan Kawasan Andalan untuk            | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 6. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk            | 50%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 7. Pengembangan Kawasan Andalan untuk            | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 8. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk industry   | 50%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 9. Pengembangan Kawasan Andalan untuk industry   | 25%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |
|     | 10.Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 11.2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk         | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 12.Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan  | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 13.Pengembangan Kawasan                          | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 14.Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan   | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 15.Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan   | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 16.Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan  | 50%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |
|     | 17.Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan        | 25%                                       | √                 |           | √                            |        | Tinggi                                           | Rendah                                                |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019.

**Tabel. 2.34**  
**Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033**  
**(Perwujudan Rencana Strategis)**

| No.                           | Indikasi Program Lima Tahunan                                                              | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                            | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|                               |                                                                                            |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|                               |                                                                                            |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
| PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG |                                                                                            |                                           |                   |           |                              |        |                                                  |                                                       |
| A                             | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |



| No. | Indikasi Program Lima Tahunan                                                                                             | Jenis dan Besaran                         |                   |           |                              |        |                                                  | Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           | Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll) | Realisasi Rencana |           | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |        | Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah) |                                                       |
|     |                                                                                                                           |                                           | Realisasi         | Realisasi | Sesuai                       | Tidak  |                                                  |                                                       |
|     |                                                                                                                           |                                           | >50%              | <50%      |                              | Sesuai |                                                  |                                                       |
| B   | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup            | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| C   | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya                                      | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| D   | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| E   | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan                            | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
| F   | Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan                                                       | 50%                                       |                   | √         | √                            |        | Rendah                                           | Tinggi                                                |
|     | 1. Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas                                                                                 | 33%                                       | √                 | √         |                              |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 2. Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana                                                                                     | 33%                                       | √                 | √         |                              |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
|     | 3. Pengembangan Kilang LNG                                                                                                | 33%                                       | √                 | √         |                              |        | Tinggi                                           | Tinggi                                                |
| G   | Pengembangan Kawasan Andalan Bahan Bakar Nabati                                                                           | 33%                                       |                   | √         |                              | √      | Rendah                                           | Rendah                                                |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

### 2.1.4.2.1. Luas Wilayah Ekonomi Produktif

Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, maka kawasan pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas lima Kawasan Strategis Nasional yang diakomodir dalam RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yakni: (1) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE); (2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri; (3) Kawasan Cepat Tumbuh; (4) Kawasan Agrotourism; dan (5) Kawasan Perbatasan.

**Tabel 2.35**  
**Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah**

| No. | Nama KSN                                                                                                                                                                             | Nama Kabupaten/Kota                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Palu Utara                                                                                                                                           | Kota Palu                                                                                              |
| 2.  | Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang, KTM Bungku, KTM Padauloyo, KTM Bahari Bolano Lambunu dan KTM Talabosa                                                                 | Buol, Morowali, Tojo Unauna, Parigi Moutong dan Poso                                                   |
| 3.  | Kawasan Cepat Tumbuh<br>Kaw. Parigi – Ampibabo dsk.,<br>Kaw. Danau Poso dsk.,<br>Kaw. Ampana dsk.,<br>Kaw. Moutong – Tomini dsk.,<br>Kaw. Damsol – Damsel dsk.,<br>Kaw. Lalundu dsk. | Kab. Parigi Moutong Kab. Poso<br>Kab. Tojo Una - Una Kab. Parigi MoutongKab. Donggala<br>Kab. Donggala |
| 4.  | <b>Kawasan Agrotourism</b><br>Sausu – Manggalapi - Palolo dsk.                                                                                                                       | Kab. Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi                                                 |
| 5.  | <b>Kawasan Perbatasan;</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|     | Kawasan Tindantana                                                                                                                                                                   | perbatasan kabupaten Poso dengan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;                       |
|     | Kawasan Teluk Matarape                                                                                                                                                               | perbatasan kabupaten Morowali dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;                                       |
|     | Kawasan Surumana                                                                                                                                                                     | perbatasan kabupaten Donggala dengan Provinsi Sulawesi Barat;                                          |
|     | Kawasan Umu                                                                                                                                                                          | perbatasan kabupaten Buol dengan Provinsi Gorontalo;                                                   |
|     | Kawasan Kepulauan Togian                                                                                                                                                             | perbatasan kabupaten Tojo Unauna dengan Provinsi Gorontalo;                                            |
|     | Kawasan Molosipat                                                                                                                                                                    | perbatasan kabupaten Parigi-Moutong dengan Provinsi Gorontalo;                                         |
|     | Kawasan Pulau Sonit                                                                                                                                                                  | perbatasan kabupaten Banggai Kepulauan dengan Provinsi Maluku Utara.                                   |

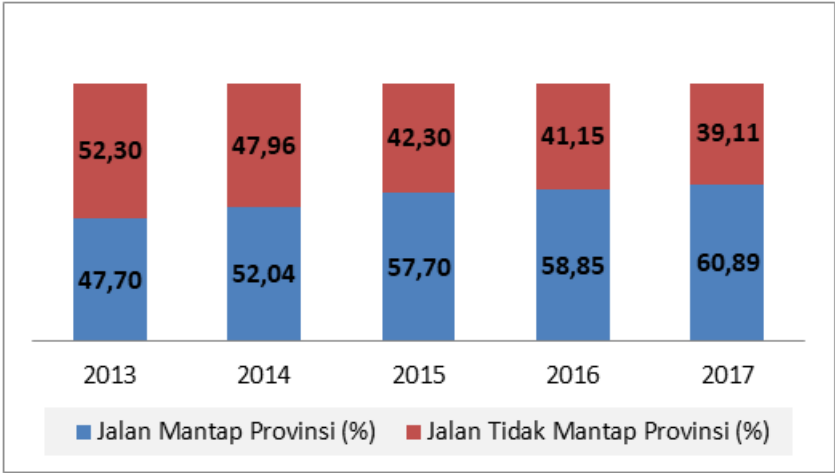
Sumber: RTRWProvinsiSulawesi Tengah Tahun 2013-2033

**2.1.4.2.2. Perkembangan Infrastruktur**

**2.1.4.2.2.1. Infrastruktur Jalan**

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi mencapai 47,70 persen dari total panjang jalan provinsi (1.643,74 km) meningkat menjadi 52,04 persen pada Tahun 2014, pada Tahun 2015 kondisi jalan mantap meningkat menjadi 57,70 persen, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 58,85 persen, selanjutnya meningkat menjadi 60,89 persen pada Tahun 2017.

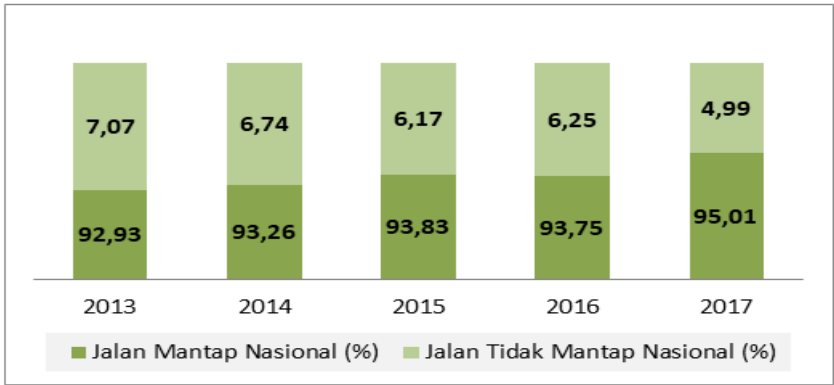
**Gambar 2.45**  
**Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017**



Sumber: BPS, 2018.

Di sisi lain perkembangan jalan nasional (2.373,40 km) di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kondisi jalan yaitu Kondisi Jalan Mantap nasional pada Tahun 2017 sebesar 95,01 persen, capaian ini meningkat dibanding Tahun 2016 yang hanya sebesar 93,73 persen.

**Gambar 2.46**  
**Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Nasional**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017**



Sumber: BPS, Tahun 2018.

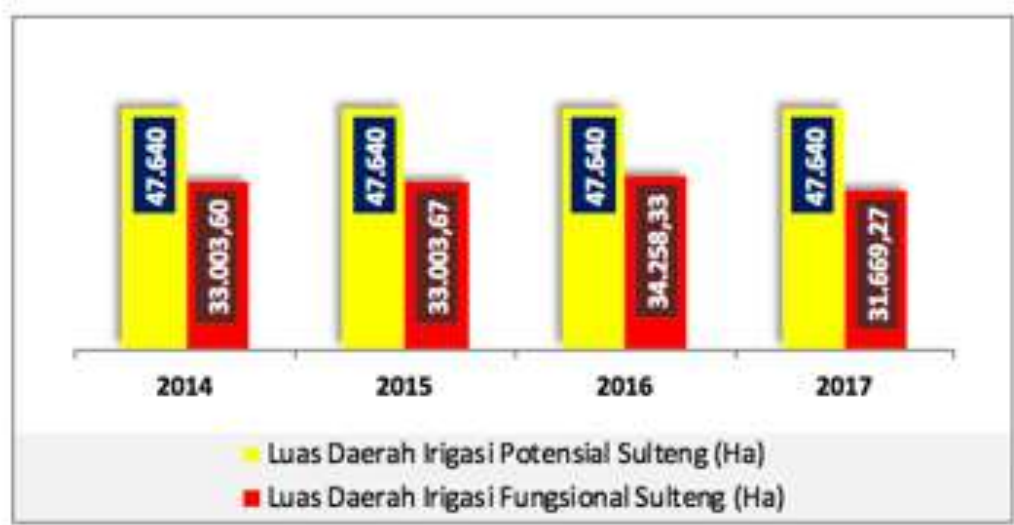
**2.1.4.2.2.2. Infrastruktur Daerah Irigasi**

Kondisi daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 3 kewenangan antara lain:

- 1) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 7 (tujuh) daerah irigasi dengan luas potensial 48.777 Ha dan luas fungsional 34.691 Ha,

- 2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) daerah irigasi dengan luas potensial 47.640 Ha dan luas fungsional 31.669,27 Ha.
- 3) Daerah irigasi menurut kabupaten/kota yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni pada Tahun 2017 luas fungsional, hal ini menggambarkan bahwa penanganan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota masih membutuhkan perhatian untuk menciptakan ketahanan pangan.

**Gambar 2.47**  
**Perkembangan Luas Potensial dan Fungsional**  
**Daerah Irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014 - 2017**



Sumber: BPS, 2018.

**2.1.4.2.2.3. Infrastruktur Kelistrikan**

Kota Palu adalah titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan merupakan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2020 melalui kegiatan 31 proyek pembangkit listrik.

Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data berikut, dimana daya terpasang sebesar 203.077 MW, daya mampu 143.893 MW, beban puncak 118.120 MW, sedangkan daya

tersambung sebesar 193.297 MVA dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen. Jika kita melihat data rasio elektrifikasi desa, maka dapat disimpulkan masih cukup banyak desa yang belum dialiri listrik, salah satu kabupaten yang rasio elektrifikasinya sangat rendah adalah Kabupaten Banggai laut, dimana dari 66 desa baru 25 desa yang dialiri listrik.

**2.1.4.2.2.4. Ifrastruktur Perhubungan**

**a. Angkutan Darat**

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Jumlah pelayanan angkutan darat yang beroperasi di Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2017 mencapai 1.175 unit, terdiri dari armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 440 unit, Armada Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 110 unit, Armada Antar Jemput Dalam Provinsi sebanyak 82 Unit, Armada Antar Jemput Antar Provinsi sebanyak 8 unit, Angkutan Kota sebanyak 454 unit, dan taksi (argo meter) sebanyak 81 unit.

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Pelayanan Angkutan Darat**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017**

| NO    | JENIS ANGKUTAN DARAT             | JUMLAH     |
|-------|----------------------------------|------------|
| 1     | ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) | 440 UNIT   |
| 2     | ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) | 110 UNIT   |
| 3     | ANTAR JEMPUT DALAM PROPINSI      | 82 UNIT    |
| 4     | ANTAR JEMPUT ANTAR PROPINSI      | 8 UNIT     |
| 5     | ANGKUTAN KOTA                    | 454 UNIT   |
| 6     | TAKSI (ARGO METER)               | 81 UNIT    |
| TOTAL |                                  | 1.175 UNIT |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng, 2018.

Berikut disajikan kondisi jaringan jalan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 2.37**  
**Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah**

| NO  | NOMOR RUAS | NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG) | PANJANG (KM) | KEPUTUSAN PENETAPAN                                                                                                               |
|-----|------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 018 19 K   | Jl. Hasanuddin II (Palu)                        | 0,850        | Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.567/KPTS/M/2001, Tanggal 10 November 2010 Perihal Penetapan Ruas-Jalan Strategis Nasional. |
| 2.  | 019 16 K   | Jl. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu.         | 5,640        |                                                                                                                                   |
| 3.  | 019 17 K   | Jl. Sungai Gumbasa (Palu)                       | 0,230        |                                                                                                                                   |
| 4.  | 019 18 K   | Jl. Danau Poso (Palu)                           | 0,400        |                                                                                                                                   |
| 5.  | 019 19 K   | Jl. Sungai Dolago (Palu)                        | 0,200        |                                                                                                                                   |
| 6.  | 019 1A K   | Jl. Sis Aljufri I (Palu)                        | 0,350        |                                                                                                                                   |
| 7.  | 019 14 K   | Jl. Yos Sudarso (Poso)                          | 0,650        |                                                                                                                                   |
| 8.  | 043        | Ruas Luwuk-Batui (Banggai)                      | 42,114       |                                                                                                                                   |
| 9.  | 043 11 K   | Jl. Samratulangi (Luwuk/Banggai)                | 0,321        |                                                                                                                                   |
| 10. | 043 12 K   | Jl. A. Yani (Luwuk/Banggai)                     | 1,492        |                                                                                                                                   |
| 11. | 043 13 K   | Jl. Urif Sumoharjo (Luwuk/Banggai)              | 0,886        |                                                                                                                                   |
| 12. | 043 14 K   | Jl. Sidirman (Luwuk/Banggai)                    | 0,976        |                                                                                                                                   |
| 13. | 043 15 K   | Jl. M. Hatta (Luwuk/Banggai)                    | 10,553       |                                                                                                                                   |
| 14. | 044        | Ruas Batui-Toili (Banggai)                      | 40,955       |                                                                                                                                   |
| 15. | 045        | Ruas Toili-Rata (Banggai)                       | 53,346       |                                                                                                                                   |
| 16. | 046        | Ruas Rata-Baturube (Morowali)                   | 57           |                                                                                                                                   |
| 17. | 063        | Ruas Mepanga-Pasir Putih (Parigi Moutong)       | 23           |                                                                                                                                   |
| 18. | 064        | Ruas Pasir Putih-Basi (Tolitoli)                | 32,50        |                                                                                                                                   |
| 19. | 065        | Ruas Tomata-Pape (Morwali)                      | 64           |                                                                                                                                   |
| 20. | 066        | Ruas Salakan-Sambiut (Banggai Kepulauan)        | 24           |                                                                                                                                   |

Sumber : RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033

Selanjutnya Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.38**  
**Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang)**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah**

| No. | Nama Terminal Penumpang          | Nama Kabupaten/Kota | L u a s (m²) |
|-----|----------------------------------|---------------------|--------------|
|     | <b>Terminal Penumpang Tipe A</b> |                     |              |
| 1.  | Mamboro (Eksisting)              | Palu                | 19.174       |
| 2.  | Sintuwu (Eksisting)              | Poso                | 3.115        |
| 3.  | Toboli (Eksisting)               | Parigi Moutong      | 33.800       |
|     | <b>Terminal Penumpang Tipe B</b> |                     |              |
| 1.  | Tentena (Eksisting)              | Poso                |              |
| 2.  | Pasar Sentral (Eksisting)        | Poso                |              |
| 3.  | Biak (Eksisting)                 | Banggai             |              |
| 4.  | Lelean Nono (Baru)               | Tolitoli            |              |
| 5.  | Mensung                          | Parigi Moutong      |              |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya untuk Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah**

| No. | Nama Jembatan Timbang | Nama Kabupaten/Kota | L u a s (m) |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | Toboli                | Parigi Moutong      | 60 m x 40 m |
| 2.  | Kayu Malue            | Palu                | 64 m x 56 m |
| 3.  | Mayoa                 | Poso                | 60 m x 60 m |
| 4.  | Moutong               | Parigi Moutong      |             |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.40**  
**Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**  
**Di Sulawesi Tengah**

| No. | Lokasi Pengujian | Nama Kabupaten/ Kota | Merk / Tahun Operasi | Kapasitas | Kondisi |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 1.  | Lolu             | Kota Palu            | Kubota/1979          | 10 Ton    | Rusak   |
| 2.  | Poso             | Poso                 | Kubota/2008          | 10 Ton    | Baik    |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengantisipasi pergerakan barang dan manusia dikembangkan jaringan moda transportasi angkutan penyeberangan melalui program angkutan sungai, danau, dan perairan (ASDP) seperti tabel berikut.

**Tabel 2.41**  
**Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah**

| No. | Nama Pelabuhan | Nama Kabupaten/ Kota | Nama Lintas Penyeberangan                                                   |
|-----|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pagimana       | Banggai              | Pagimana-Gorontalo<br>(Prov. Sulteng-Gorontalo)                             |
| 2.  | Luwuk          | Banggai              | Luwuk-Salakan                                                               |
| 3.  | Taipa          | Palu                 | Taipa-Balikpapan                                                            |
| 4.  | Ampana         | Tojo Unauna          | (Prov. Sulteng - Kaltim)<br>Ampana-Wakai-Gorontalo                          |
| 5.  | Tolitoli       | Tolitoli             | (Prov. Sulteng-Gorontalo)<br>Tolitoli-Tarakan<br>(Prov. Sulteng - Kaltim)   |
| 6.  | Banggai        | Banggai Kepulauan    | Banggai-Luwuk-Banggai-<br>Boniton-Banggai-Bobong<br>Dolong-Uwebone-Marissa- |
| 7.  | Toboli         | Parigi Moutong       | Parigi-Marissa-Dolong<br>(Prov. Sulteng-Gorontalo)                          |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng

**b. Perkembangan Perhubungan Laut**

Di bidang perhubungan laut, perkembangan pelayanan transportasi laut yang mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra, secara kontinu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayaran angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 1 (satu) pelabuhan utama (internasional) yakni Pelabuhan Pantoloan, 14 (empat belas) pelabuhan pengumpul (nasional), yakni Luwuk, Pagimana, Bunta, Tangkiang, Banggai, Kolonodale, Leok, Tolitoli, Donggala, Wani, Ogoamas, Parigi, Poso, Ampana; dan 12 (dua belas) pelabuhan pengumpan (regional), yakni Sabang, Ogotua, Kumaligon, Paleleh, Wakai, Salakan, Menui, Sambalagi, Malala, Bungku, Dolong/Popolii, Moutong; serta 14 (empat belas) pelabuhan terminal khusus (tarsus).

**Tabel 2.42**  
**Sarana Pelabuhan Laut Utama/NasionalDi Sulawesi Tengah**

| No. | Nama Pelabuhan                                          | Nama Kabupaten/<br>Kota | Kapasitas<br>Dermaga | Luas Dermaga |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | <b>Pelabuhan Utama<br/>(international)</b><br>Pantoloan | Palu                    | 4.000 DWT            | 250 m x 13 m |
|     | <b>Pelabuhan<br/>Pengumpul<br/>(nasional)</b>           |                         |                      |              |
| 1   | Banggai                                                 | Banggai                 | 1.000 DWT            | 150mx12m     |
| 2   | Luwuk                                                   | Banggai                 | 1.000 DWT            | 70 mx8 m     |
| 3   | Pagimana                                                | Banggai                 | 1.000 DWT            | 70 m x8 m    |
| 4   | Bunta                                                   | Banggai                 | 1.000 DWT            | 88mx12m      |
| 5   | Tangkang                                                | Banggai Kepulauan       | 10.000 DWT           | 150mx8m      |
| 6   | Banggai                                                 | Morowali                |                      |              |
| 7   | Kolonodale                                              | Buol                    | 1.000 DWT            | 50mx8m       |
| 8   | Leok                                                    | Tolitoli                | 1.000 DWT            | 81 mx8 m     |
| 9   | Tolitoli                                                | Donggala                | 1.000 DWT            | 70 mx8 m     |
| 10  | Donggala                                                | Donggala                | 500 DWT              | 46mx8m       |
| 11  | Wani                                                    | Donggala                | 1.000 DWT            | 70mx8m       |
| 12  | Ogoamas                                                 | Parigi Moutong          | 400 DWT              | 35 m x 8 m   |
| 13  | Parigi                                                  | Poso                    | 1.000 DWT            | 100mx 9m     |
| 14  | Poso                                                    | Tojo Una-Una            | 1.000 DWT            | 70mx 8m      |
|     | Ampa                                                    |                         |                      |              |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033

**d. Perkembangan Perhubungan Udara**

Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan status Bandar Udara pengumpul sekunder sebagaipintu gerbang utama melalui udara semakin dituntut dalam peningkatan aktifitas pelayanan penerbangan guna mengantisipasi kesiapan daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan era globalisasi. Pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu agar dapat didarati pesawat yang berbadan besar, tidak terbatas hanya mampu melayani pesawat jenis Boeing 737-900 ER dan Boeing 737-800 NG. Selain itu, di beberapa kabupaten terdapat pula Bandar Udarapengumpul tersieryakni Bandar Udara Bubung Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang dapat melayani jenis pesawat Boeing 737/200, Cassa 212, ATR 500/600, Dornier 32, Bandar Udara Lalos Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli. Untuk melayani penerbangan pengumpan Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol yang baru mampu didarati jenis pesawat Cassa 212 dan Dornier 32 serta Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang sudah mampu didarati oleh jenis pesawat N 219 dan ATR 500/600. Selain itu di Sulawesi

Tengah sedang dilakukan pembangunan 2 (dua) Bandar Udara baru yaitu Bandar Udara Ampana di Kabupaten Tojo Unauna yang direncanakan dapat diresmikan pada tahun 2015, penggunaanya dirangkaikan dengan pelaksanaan Sail Tomini. Sedangkan Bandar Udara Bungku di Kabupaten Morowali saat ini terkendala dengan penyelesaian lahan untuk pembangunannya. Sehingga fasilitas transportasi udara yang ada di Sulawesi Tengah hingga Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) bandar udara. selain itu juga diupayakan studi kelayakan untuk perencanaan pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut.

**Tabel 2.43**  
**Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah**

| No.      | Nama Bandara                                                                               | Nama Kabupaten/ Kota    | Dimensi Landasan Pacu            | Maksimal Pesawat       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1.       | <u><b>Pengumpul Sekunder</b></u><br>Mutiara Sis Aljufri                                    | Palu                    | 2.250 m x 45 m                   | B – 737                |
| 1.<br>2. | <u><b>Pengumpul Tersier</b></u><br>Bubung Syukuran Aminuddin Amir<br>Lalos Sultan Bantilan | Banggai<br>Tolitoli     | 1.850 m x 30 m<br>1.400 m x 30 m | B – 737.200<br>C - 212 |
| 1.<br>2. | <u><b>Pengumpan</b></u><br>Pogogul<br>Kasiguncu                                            | Buol<br>Poso            | 1.373 m x 30 m<br>1.620 m x 30 m | C – 212<br>D - 900     |
| 1.<br>2. | <u><b>Sedang dibangun</b></u><br>Ampana<br>Umbele                                          | Tojo Unauna<br>Morowali |                                  |                        |
| 1.<br>2. | <u><b>Missioner</b></u><br>Gintu (operasional)<br>Tentena (operasional)                    | Poso<br>Poso            |                                  | Cesna<br>Cesna         |
| 1.       | <u><b>Bandara yang direncanakan</b></u><br>Banggai                                         | Banggai Laut            |                                  |                        |

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan memerlukan dukungan investasi khususnya dari kalangan sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan dan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan.

Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2013 pemerintah memfokuskan perhatian pada

penanganan keamanan dan ketertiban terutama masalah yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat yakni tawuran antar kampung.

Jumlah perkara tindak pidana umum yang tertangani (terselesaikan) di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 *trendnya* mengalami peningkatan, yakni dari 1.600 kasus menjadi 2.109 kasus.

**Gambar 2.48**  
**Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum Yang Tertangani Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016**



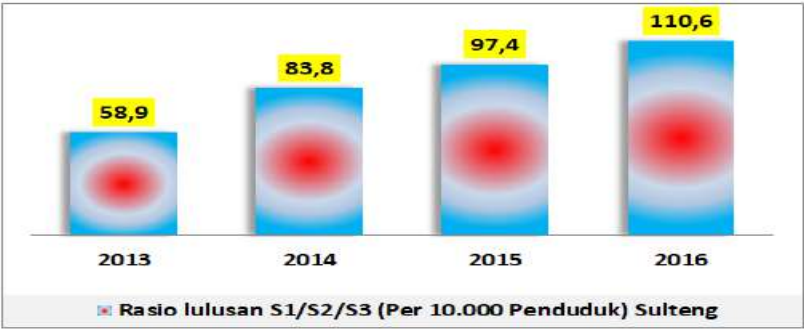
Sumber: BPS, 2017.

**2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia**

**2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2013 rasionya sebesar 59,9 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 83,8 per 10.000 penduduk pada Tahun 2014, selanjutnya setiap tahun rasionya mengalami peningkatan hingga mencapai 110,6 per 10.000 penduduk.

**Gambar 2.49**  
**Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 - 2016**



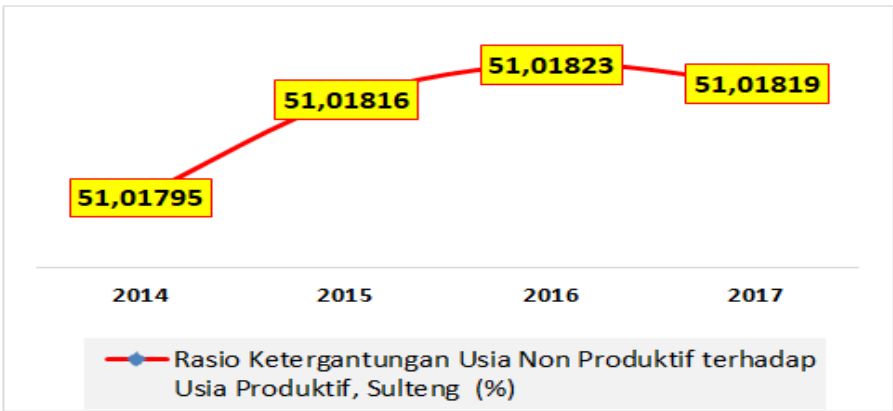
Sumber: BPS, Tahun 2017 (Data Diolah Kembali)

**2.1.4.4.2. Rasio Ketergantungan**

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator *dependency ratio* atau rasio ketergantungan. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 tidak mengalami perubahan signifikan yakni rasionya sebesar 51,01 persen.

**Gambar 2.50**  
**Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017**



Sumber: BPS, 2018 (Data Diolah Kembali)

**2.1.4.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil perkapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia menengah keatas. Pada Tahun 2014 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 66,43 poin meningkat menjadi 68,88 poin pada Tahun 2018. Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut relatif rendah dibanding capaian IPM Nasional.

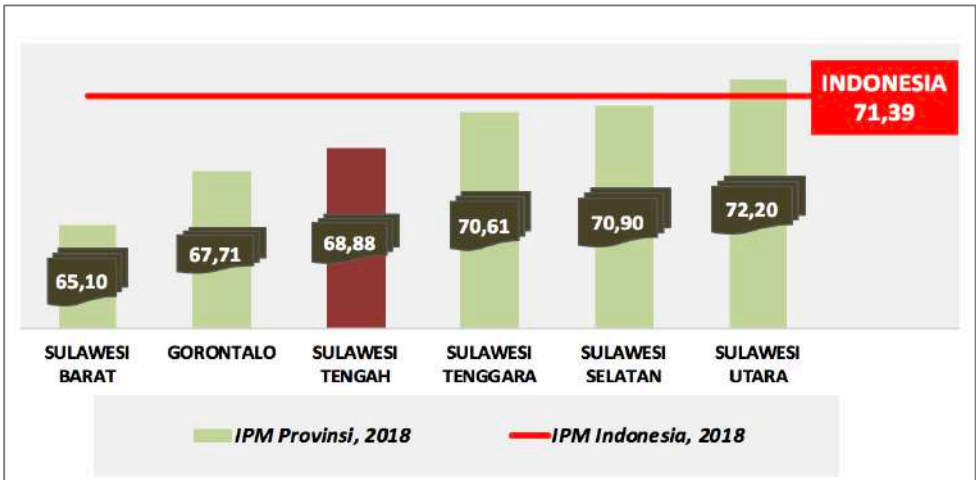
**Gambar 2.51**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2018**



Sumber: BPS, Tahun 2019.

Perspektif regional Sulawesi, Pada Tahun 2018 IPM Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

**Gambar 2.52**  
**Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Persepektif**  
**Regional SULAMPUA, Tahun 2018**



Sumber: BPS, Tahun 2019.



Perspektif pencapaian IPM kabupaten/kota Tahun 2018, capaian IPM tertinggi masih berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 80,91 poin, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 63,38 poin.

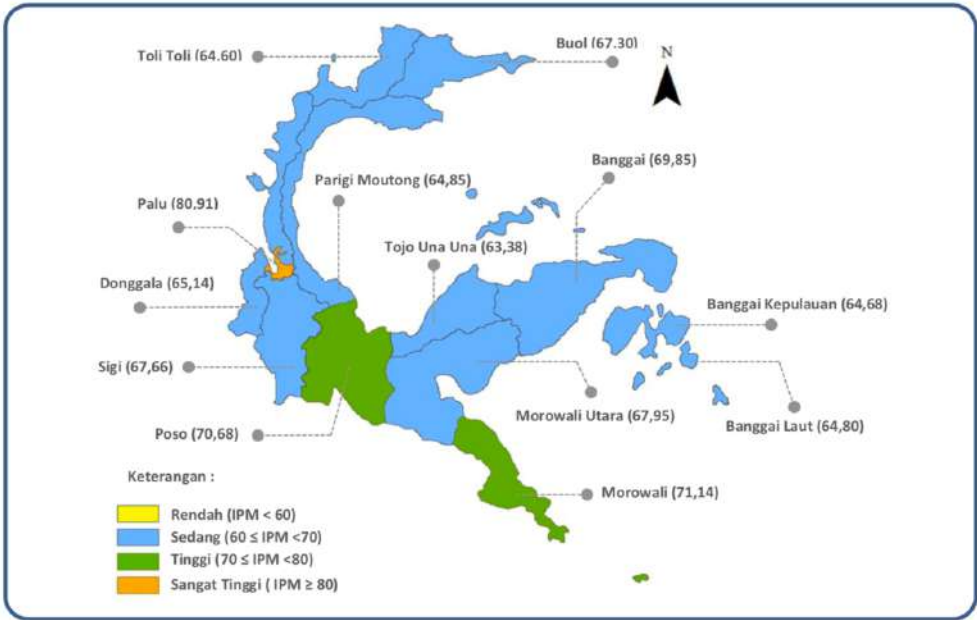
**Tabel 2.44**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2018**

| Provinsi          | UHH<br>(tahun) |       | HLS<br>(tahun) |       | RLS<br>(tahun) |       | Pengeluaran per<br>Kapita<br>Disesuaikan<br>(Rp000) |        | IPM     |       |                    |
|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------------------|
|                   |                |       |                |       |                |       |                                                     |        | Capaian |       | Pertumbuhan<br>(%) |
|                   | 2017           | 2018  | 2017           | 2018  | 2017           | 2018  | 2017                                                | 2018   | 2017    | 2018  | 2017-2018          |
| (1)               | (2)            | (3)   | (4)            | (5)   | (6)            | (7)   | (8)                                                 | (9)    | (10)    | (11)  | (12)               |
| Banggai Kepulauan | 64,53          | 65,12 | 13,03          | 13,04 | 7,99           | 8,14  | 7.440                                               | 7.545  | 64,07   | 64,68 | 0,95               |
| Banggai           | 70,02          | 70,32 | 12,89          | 13,22 | 7,92           | 8,06  | 9.516                                               | 9.712  | 69,00   | 69,85 | 1,23               |
| Morowali          | 68,07          | 68,45 | 12,77          | 12,89 | 8,73           | 8,98  | 11.012                                              | 11.159 | 70,41   | 71,14 | 1,04               |
| Poso              | 70,16          | 70,51 | 13,38          | 13,68 | 8,81           | 9,04  | 8.781                                               | 8.936  | 69,78   | 70,68 | 1,29               |
| Donggala          | 65,89          | 66,37 | 12,46          | 12,47 | 7,84           | 7,85  | 7.924                                               | 8.106  | 64,66   | 65,14 | 0,74               |
| Toli-Toli         | 64,12          | 64,71 | 12,70          | 12,71 | 7,85           | 7,96  | 7.916                                               | 8.017  | 64,05   | 64,60 | 0,86               |
| Buol              | 67,00          | 67,59 | 13,06          | 13,07 | 8,63           | 8,74  | 7.934                                               | 8.079  | 66,69   | 67,30 | 0,91               |
| Parigi Moutong    | 63,19          | 63,57 | 12,44          | 12,45 | 6,98           | 7,18  | 9.488                                               | 9.808  | 64,09   | 64,85 | 1,19               |
| Tojo Una-Una      | 64,07          | 64,61 | 11,81          | 11,82 | 7,90           | 8,16  | 7.465                                               | 7.608  | 62,61   | 63,38 | 1,23               |
| Sigi              | 68,72          | 69,15 | 12,51          | 12,85 | 8,22           | 8,43  | 8.113                                               | 8.236  | 66,72   | 67,66 | 1,41               |
| Banggai Laut      | 63,62          | 64,21 | 12,87          | 12,88 | 8,21           | 8,44  | 7.693                                               | 7.810  | 64,08   | 64,80 | 1,12               |
| Morowali Utara    | 68,34          | 68,77 | 12,21          | 12,22 | 8,39           | 8,58  | 8.842                                               | 8.985  | 67,35   | 67,95 | 0,89               |
| Kota Palu         | 69,93          | 70,31 | 15,92          | 16,20 | 11,26          | 11,33 | 14.871                                              | 15.074 | 80,24   | 80,91 | 0,83               |
| SULAWESI TENGAH   | 67,32          | 67,78 | 13,04          | 13,13 | 8,29           | 8,52  | 9.311                                               | 9.488  | 68,11   | 68,88 | 1,13               |

Sumber: BPS, Tahun 2019.

Data spasial pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Tahun 2018, disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 2.53**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2018**



Sumber: BPS, Tahun 2019.

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Sebaran IPM di Sulawesi Tengah berkisar antara 63,38 (Tojo Una-una) hingga 80,91 (Palu). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 63,57 tahun (Parigi Moutong) hingga 70,51 tahun (Poso). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,82 tahun (Tojo Una-una) hingga 16,20 tahun (Palu), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,18 tahun (Parigi Moutong) hingga 11,33 tahun (Palu). Adapun rentang nilai pengeluaran per kapita disesuaikan berkisar antara 7.545 ribu rupiah per tahun (Banggai Kepulauan) hingga 15.074 ribu rupiah per tahun (Palu).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Gambaran keuangan daerah pada perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah selang waktu 5 (lima) tahun perencanaan sebelumnya yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2018, serta kerangka pendanaannya. Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pada pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemampuan keuangan daerah yang disusun melalui kerangka pendanaan dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Di sisi lain gambaran pengelolaan keuangan daerah masa lalu diperlukan untuk menjadi dasar membangun asumsi dan proyeksi kemampuan pendanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Hal pertama yang diketahui dalam pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yaitu memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan pada struktur APBD dan selanjutnya analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Analisis pendapatan daerah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah seperti angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi diantaranya PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan dibidang keuangan negara, dimana analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka setiap daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini (Permendagri 86 Tahun 2017).

Setelah dilakukan analisis pendapatan daerah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang bertujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis belanja dan pembiayaan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pelaksanaan APBD dijadikan dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan peluang, hambatan dan tantangan yang ditemui. Pengalokasian APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Rencana pendanaan pada RPJMD menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran dan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Untuk itu, kebutuhan APBD setiap tahun diorientasikan pada upaya: (1) Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM; (2) Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan; (3) Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota; (4) Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan; (5) Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; (6) Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*; (7) Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing; (8) Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan; (9) Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai

Standar Pelayanan Minimal (SPM); (10) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021 diarahkan pada program prioritas pembangunan Sulawesi Tengah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan Daya Saing dan peningkatan Jaringan Infrastruktur untuk mencapai pelayanan publik maksimal dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan program prioritas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahapan pembangunan sebelumnya (5 tahun) dan dilanjutkan pada tahapan pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya untuk mencapai target program dan kegiatan yang diinginkan. Capaian kinerja keuangan masa lalu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018 digambarkan melalui kinerja pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, serta Neraca Daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Indikasi keberhasilan kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari semakin tingginya kemampuan fiskal daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal terus dilakukan untuk mengurangi *gap* antara kemampuan dan kebutuhan fiskal tersebut. Cara yang paling baik dilakukan yaitu dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sebagai upaya menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

##### **3.1.1.1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**

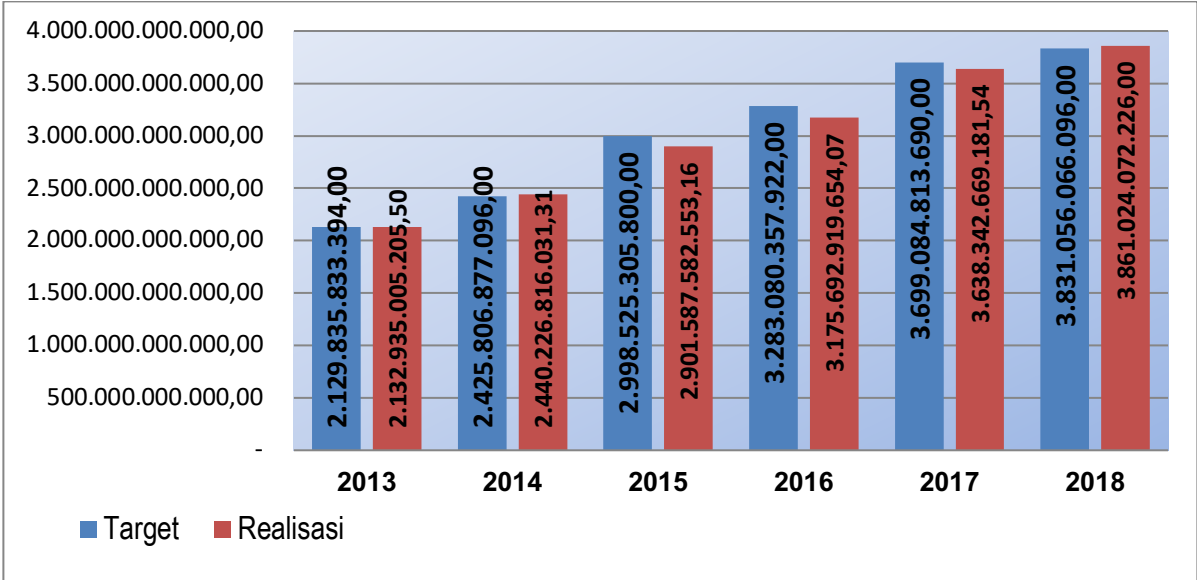
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dipungut sesuai penetapan Peraturan Daerah. Adapun objek pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2. Pendapatan transfer;
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak, retribusi daerah (provinsi) dengan tidak menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, (d) Berkembangnya investasi disektor pertambangan, dan (e) Kondisi daerah yang cukup aman. Berikut gambaran pendapatan kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

**Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018**



Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018, data telah diolah (2019)

Tren pendapatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Target tahun 2013 sebesar Rp.2.129.835.833.394,00, terealisasi sebesar Rp.2.132.935,005,205.50



dan target pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp.2.425.806.877.096,00 terealisasi sebesar Rp.2.440.226.816.031,31 dan target pada Tahun 2015 sebesar Rp.2.998.525.305.800,00 terealisasi sebesar Rp.2.901.587.582.553,16. Target pendapatan di Tahun 2016 sebesar Rp.3.283.080.357.922,00 terealisasi sebesar Rp.3.175.692.919.654,07, target Tahun 2017 sebesar Rp.3.699.084.813.690,00 teralisasi sebesar 3.638.342.669.181,54 dan target Tahun 2018 sebesar Rp.3.831.056.066.096,00 terealisasi sebesar Rp.3.861.024.072.226,00. Capaian pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan sebesar 12,69 persen secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2018**

| No.        | Uraian                                                            | 2013<br>(Rp.)               | 2014<br>(Rp.)               | 2015<br>(Rp.)               | 2016<br>(Rp.)               | 2017<br>(Rp.)               | 2018<br>(Rp.)               | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(persen) |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                                 | <b>2.132.935.005.205,50</b> | <b>2.440.226.816.031,31</b> | <b>2.901.587.582.553,16</b> | <b>3.175.692.919.654,07</b> | <b>3.638.342.669.181,54</b> | <b>3.861.024.072.226,00</b> | <b>12,69</b>                         |
| 1.1        | Pendapatan Asli Daerah                                            | 662.226.615.649,50          | 824.611.352.385,31          | 904.937.124.509,16          | 939.092.069.082,07          | 958.212.001.717,54          | 1.016.622.688.427,00        | 9,23                                 |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                           | 555.077.909.479,10          | 663.633.353.296,00          | 738.993.196.650             | 776.340.400.576,00          | 790.439.057.679,00          | 835.456.979.571,00          | 8,70                                 |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah                                       | 3.622.024.492,00            | 4.326.901.700,00            | 6.203.473.975,00            | 7.046.280.402,00            | 8.876.138.026,00            | 11.225.203.122,00           | 25,77                                |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan      | 8.170.066.530,45            | 9.548.970.026,38            | 20.311.030.000,62           | 23.605.752.658,06           | 18.478.974.477,00           | 16.907.254.096,00           | 23,12                                |
| 1.1.4      | Lain-lain PAD yang sah                                            | 95.356.615.147,95           | 147.102.127.362,93          | 139.429.423.883,54          | 132.099.635.446,01          | 140.417.831.535,54          | 153.033.251.638,00          | 11,81                                |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                           | <b>1.160.797.526.883,00</b> | <b>1.239.776.947.097,00</b> | <b>1.557.754.565.164,00</b> | <b>2.210.604.520.193,00</b> | <b>2.647.241.314.195,00</b> | <b>2.731.430.163.822,00</b> | <b>19,46</b>                         |
| 1.2.1      | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak                      | 100.189.491.883,00          | 87.949.453.097,00           | 85.165.410.164,00           | 102.058.131.981,00          | 124.837.810.552,00          | 196.347.609.076,00          | 16,81                                |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                                 | 994.658.685.000,00          | 1.087.885.014.000,00        | 1.221.602.865.000,00        | 1.272.925.036.000,00        | 1.546.247.611.000,00        | 1.586.163.908.000,00        | 9,98                                 |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                               | 65.949.350.000,00           | 63.942.480.000,00           | 250.986.290.000,00          | 835.621.352.212,00          | 976.155.892.643,00          | 948.918.646.746,00          | 107,29                               |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                       | <b>309.910.862.673,00</b>   | <b>375.838.516.549,00</b>   | <b>438.895.892.880,00</b>   | <b>25.996.330.379,00</b>    | <b>32.889.353.269,00</b>    | <b>112.971.219.977,00</b>   | <b>42,80</b>                         |
| 1.3.1      | Hibah                                                             | 4.557.356.673,00            | 12.951.395.049,00           | 3.865.455.380,00            | 20.996.330.379,00           | 25.389.353.269,00           | 10.646.556.364,00           | 104,01                               |
| 1.3.2      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 305.353.506.000,00          | 362.887.121.500,00          | 435.030.437.500,00          | 5.000.000.000,00            | 7.500.000.000,00            | -                           | -2,53                                |
| 1.3.3      | Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 102.324.663.613,00          | 100,00                               |
| 1.3.4      | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                                    |

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018, data telah diolah (2019)

Pada tabel 3.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Tahun 2013-2018 sebesar **12,69%**. Sementara itu target RPJMD 2016-2021 sebesar **8,52%**. Tren peningkatan realisasi pendapatan ini mengisyaratkan bahwa sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan daerah.

Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu tahun anggaran 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pemerintah Daerah menaikkan target Pendapatan rata-rata setiap tahun sebesar 9,19 persen, demikian juga. rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai setiap tahun meningkat sebesar 9,23 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sudah efektif menggali sumber-sumber pendapatan daerah, disamping masih banyaknya potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber-sumber pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga pendapatan Provinsi sulawesi Tengah dapat lebih ditingkatkan lagi.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi PAD pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun Anggaran 2013-2018**

| Tahun          | Target             |             | Realisasi            |             | Rasio Efektifitas |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                | PAD (Rp)           | Growth (%)  | PAD (Rp)             | Growth (%)  |                   |
| 2013           | 653.429.411.019,00 |             | 662.226.615.649,50   |             | 101,35            |
| 2014           | 796.548.323.600,00 | 21,90       | 824.611.352.385,31   | 24,52       | 103,52            |
| 2015           | 955.558.091.800,00 | 19,96       | 904.937.124.509,16   | 9,74        | 94,70             |
| 2016           | 984.824.587.122,00 | 3,06        | 939.092.069.082,07   | 3,77        | 95,36             |
| 2017           | 937.207.466.990,00 | -4,84       | 958.212.001.717,54   | 2,04        | 102,24            |
| 2018           | 992.020.879.596,00 | 5,85        | 1.016.622.688.427,00 | 6,10        | 102,48            |
| Rata Per Tahun |                    | <b>9,19</b> |                      | <b>9,23</b> |                   |

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018, data telah diolah (2019)

Komposisi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD menunjukkan trend peningkatan yang positif. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp.662.226.615.649,50, tahun 2014 sebesar Rp. 824.611.352.385,31, tahun 2015 sebesar Rp.

904.937.124.509,16, tahun 2016 sebesar Rp.939.092.069.082,07, tahun 2017 sebesar Rp.958.212.001.717,54 dan tahun 2018 sebesar Rp.1.016.622.688.427,00 dengan capaian rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 9,23 persen. Komponen Pendapatan asli daerah yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah Pendapatan Retribusi Daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,77 persen. Untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah sektor retribusi daerah maka kebijakan pengelolaan retribusi daerah harus terarah dan didukung oleh regulasi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Kelompok Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan kurun waktu 2013-2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi pendapatan transfer tahun 2013 sebesar Rp.1.160.797.526.883,00, pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.239.776.947.097,00; tahun 2015 sebesar Rp.1.557.754.565.164,00; tahun 2016 sebesar Rp.2.210.604.520.193,00; tahun 2017 sebesar Rp.2.467.241.314.195,00 dan pada tahun 2018 dapat dicapai sebesar Rp.2.731.430.163.822,00 dengan capaian rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 19,46 persen.

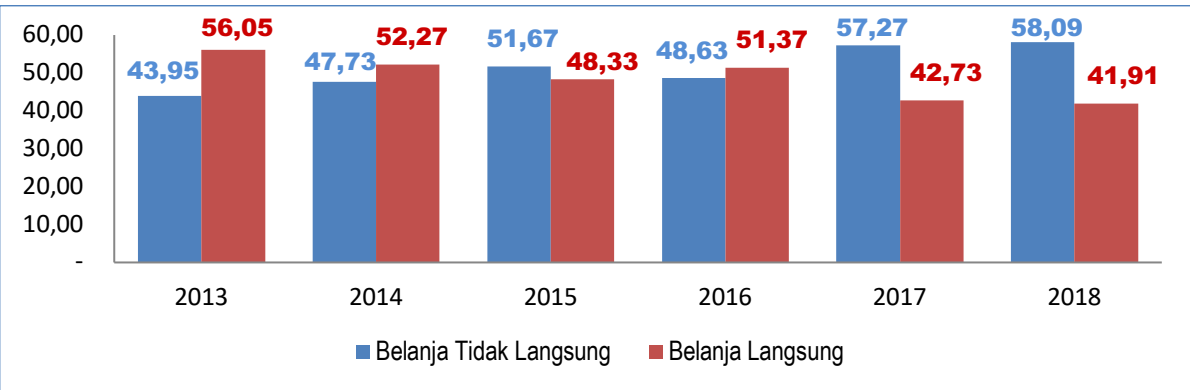
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diperuntukkan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Proporsi pendapatan untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2013 sebesar Rp.309.910.862.673,00; tahun 2014 sebesar Rp.375.838.516.549,00; tahun 2015 sebesar Rp.438.895.892.880,00; tahun 2016 sebesar Rp. 25.996.330.379,00; tahun 2017 sebesar Rp.32.889.353.269,00; dan pada tahun 2018 sebesar Rp.112.971.219.977,00 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 42,80 persen.

3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD pada periode sebelumnya sangat diperlukan untuk analisis pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

Penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyusunannya dilaksanakan dengan pendekatan kinerja. Khusus untuk belanja daerah dianggarkan dengan batas tertinggi untuk setiap belanja sehingga realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.

Gambar 3.2 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018 (%)



Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018, (diolah kembali)

Proporsi alokasi belanja tidak langsung Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 terhadap APBD menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang mengalihkan beberapa kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi termasuk pembiayaan asset dan personil pada Sektor Pendidikan, Kehutanan, Pertambangan dan Kelautan sehingga meningkatkan pembiayaan pada belanja tidak langsung. Adapun proporsi anggaran belanja daerah diarahkan untuk belanja pelayanan publik yaitu belanja langsung yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Untuk kebijakan alokasi belanja tidak langsung ditujukan pada:

1. Peningkatan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien melalui peningkatan kemampuan motivasi, disiplin, etos kerja dan mobilitas aparatur daerah;
2. Mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan;
3. Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
4. Penanganan berbagai kejadian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, alokasi belanja langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, atau alokasi belanja langsung merupakan anggaran belanja daerah yang diperuntukkan kegiatan publik yang merupakan hak publik dan menjadi kewajiban pemerintah daerah yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada Tabel 3.3 Belanja Tidak Langsung memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 17,86 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 5,52 persen. Meningkatnya alokasi Belanja Tidak Langsung disebabkan besarnya belanja pegawai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 29,88 persen. Belanja Pegawai setiap tahunnya menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan bertambahnya tanggungan pembayaran gaji ASN yang pindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah karena kebijakan pengalihan kewenangan. Sedangkan pada Belanja Langsung, komponen Belanja Modal memiliki pertumbuhan

rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 11,53 persen jika dibandingkan dengan komponen Belanja Langsung lainnya, seperti belanja pegawai (-5,27 persen) dan dan belanja barang dan jasa (7,36 persen).



**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Belanja Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2018**

| No.        | Uraian                                                                                       | 2013<br>(Rp.)               | 2014<br>(Rp.)               | 2015<br>(Rp.)               | 2016<br>(Rp.)               | 2017<br>(Rp.)               | 2018<br>(Rp.)               | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(persen) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>                                                                               | <b>2.145.227.819.901,50</b> | <b>2.445.661.248.020,50</b> | <b>2.953.280.683.117,67</b> | <b>3.178.114.481.726,24</b> | <b>3.445.777.071.450,82</b> | <b>3.628.027.188.795,17</b> | <b>11,22</b>                         |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                | <b>942.898.008.240,50</b>   | <b>1.167.333.262.161,98</b> | <b>1.526.076.325.257,70</b> | <b>1.545.657.443.529,00</b> | <b>1.973.535.890.121,00</b> | <b>2.107.589.143.171,00</b> | <b>18,06</b>                         |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                                              | 350.485.761.730,00          | 376.699.997.783,98          | 31.258.852.220,10           | 562.081.903.000,00          | 1.056.063.908.764,00        | 1.213.130.403.863,00        | 31,41                                |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                                                | 328.963.443.847,50          | 363.244.678.500,00          | 578.491.677.000,00          | 603.336.224.000,00          | 500.953.710.000,00          | 474.819.970.000,00          | 10,36                                |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                                       | 3.116.500.000,00            | 4.124.500.000,00            | 2.025.000.000,00            | 1.684.500.000,00            | 1.073.800.000,00            | 1.184.500.000,00            | -38,31                               |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa                              | 194.496.853.101,00          | 305.162.965.537,00          | 307.534.979.186,60          | 365.381.747.228,00          | 409.671.449.702,00          | 406.143.964.908,00          | 17,55                                |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | 65.745.494.562,00           | 117.267.144.341,00          | 106.638.837.601,00          | 13.171.319.301,00           | 5.639.009.155,00            | 12.072.854.800,00           | 7,71                                 |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga                                                                        | 89.955.000,00               | 833.976.000,00              | 126.979.250,00              | 1.750.000,00                | 134.012.500,00              | 237.449.600,00              | 1.655,75                             |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                      | <b>1.202.329.811.661,00</b> | <b>1.278.327.985.858,52</b> | <b>1.427.204.357.859,97</b> | <b>1.632.457.038.197,24</b> | <b>1.472.241.181.329,82</b> | <b>1.520.438.045.624,17</b> | <b>5,16</b>                          |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                                              | 140.506.896.390,00          | 148.177.160.301,00          | 143.934.107.475,00          | 120.271.628.562,00          | 119.857.964.211,00          | 105.952.132.520,00          | -5,16                                |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 706.301.865.153,00          | 853.319.017.407,52          | 840.745.925.332,97          | 1.008.212.400.009,54        | 887.262.608.556,85          | 954.701.505.477,50          | 6,97                                 |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                                                                | 355.519.048.118,00          | 276.831.808.150,00          | 442.524.325.052,00          | 503.973.009.625,70          | 465.120.608.561,97          | 459.784.407.626,67          | 10,97                                |

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018, data telah diolah (2019)

### **3.1.1.3 Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran.

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada periodisasi Tahun 2016-2021 ditujukan untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan upaya preventif mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Pada kurun waktu 2013-2018, Penerimaan Pembiayaan Daerah Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi sesuai dengan SILPA yang memang tidak dapat diproyeksi. Demikian juga untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang pada 4 (empat) tahun terakhir hanya pada beban penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah (Tabel 3.4). Pada kondisi anggaran mengalami defisit, memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah, atau panjang) guna menutupinya. Sebaliknya dalam kondisi anggaran yang surplus, dimungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan atas penggunaan surplus anggaran sebagai dana cadangan, penyertaan modal maupun pembayaran hutang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun SILPA tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya dan melakukan rasionalisasi belanja;

3. Apabila SILPA tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2018**

| No.        | Uraian                                         | 2013<br>(Rp.)             | 2014<br>(Rp.)             | 2015<br>(Rp.)             | 2016<br>(Rp.)            | 2017<br>(Rp.)            | 2018<br>(Rp.)             |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>3</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       |                           |                           |                           |                          |                          |                           |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>            | <b>147.788.885.933,88</b> | <b>147.909.346.495,88</b> | <b>135.829.772.307,69</b> | <b>77.436.671.743,18</b> | <b>70.385.619.571,25</b> | <b>225.583.754.260,97</b> |
| 3.1.1      | SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya                | 147.788.885.933,88        | 128.588.066.991,88        | 135.829.772.307,69        | 77.436.671.743,18        | 70.385.619.571,25        | 225.583.754.260,97        |
| 3.1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah                     | -                         | 2.236.148.199,00          | -                         | -                        | -                        |                           |
| 3.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah                      | -                         | 17.085.131.305,00         | -                         | -                        | -                        |                           |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>           | <b>6.908.004.246,00</b>   | <b>6.645.142.199,00</b>   | <b>6.700.000.000,00</b>   | <b>4.500.000.000,00</b>  | <b>37.334.000.000,00</b> | <b>39.184.000.000,00</b>  |
| 3.2.1      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 3.000.000.000,00          | 4.300.000.000,00          | 6.700.000.000,00          | 4.500.000.000,00         | 37.334.000.000,00        | 39.184.000.000,00         |
| 3.2.2      | Pembayaran Utang                               | 3.908.004.246,00          | 2.345.142.199,00          | -                         | -                        | -                        | -                         |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                        | <b>140.880.881.687,88</b> | <b>141.264.204.296,88</b> | <b>129.129.772.307,69</b> | <b>72.936.671.743,18</b> | <b>33.051.619.571,25</b> | <b>186.399.754.260,97</b> |

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2018, data telah diolah (2019)

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Standar Akuntansi Pemerintah). Dengan demikian, Neraca Daerah merupakan sumber informasi kepada manajemen pemerintah daerah mengenai likuiditas keuangan daerah yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana.

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyusun sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Sedangkan Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini disajikan neraca daerah dan pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 3.5**  
**Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013 - 2018**

| No.   | Uraian                          | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
| 1     | <b>ASET</b>                     | 7,03                      |
| 1.1   | <b>ASET LANCAR</b>              | 30,83                     |
| 1.1.1 | Kas                             | 51,98                     |
| 1.1.2 | Piutang                         | 4,61                      |
| 1.1.3 | Persediaan                      | 39,03                     |
| 1.2   | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b> | 24,59                     |
| 1.2.1 | Investasi non permanen          | -50,00                    |
| 1.2.2 | Investasi permanen              | 24,61                     |

| No.        | Uraian                                            | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>ASET TETAP</b>                                 | 1,93                      |
| 1.3.1      | Tanah                                             | 14,02                     |
| 1.3.2      | Peralatan dan mesin                               | 19,16                     |
| 1.3.3      | Gedung dan bangunan                               | 24,95                     |
| 1.3.4      | Jalan, Irigasi dan Jaringan                       | 3,34                      |
| 1.3.5      | Aset tetap lainnya                                | 35,80                     |
| 1.3.6      | Konstruksi dalam pengerjaan                       | 45,11                     |
| <b>1.4</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                               | 53,06                     |
| 1.4.1      | Tagihan penjualan angsuran                        | 0,00                      |
| 1.4.2      | Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah            | -0,31                     |
| 1.4.5      | Aset Lainnya                                      | 55,75                     |
|            | <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>                 | 7,03                      |
| <b>2</b>   | <b>KEWAJIBAN</b>                                  | 16,49                     |
| 2.1        | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                           | 16,49                     |
| 2.1.6      | Utang jangka pendek lainnya                       | 16,49                     |
| <b>3</b>   | <b>EKUITAS DANA</b>                               | 7,09                      |
| <b>3.1</b> | <b>EKUITAS DANA LANCAR</b>                        | 0,21                      |
| 3.1.1      | SILPA                                             | 5,63                      |
| 3.1.3      | Cadangan piutang                                  | 20,74                     |
| 3.1.3      | Cadangan persediaan                               | 22,41                     |
| 3.1.4      | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang | 47,80                     |
| 3.1.5      | Pendapatan yang ditangguhkan                      | -98,38                    |
| <b>3.2</b> | <b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>                     | 1,62                      |
| 3.2.1      | Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang     | 7,44                      |
| 3.3.2      | Diinvestasikan dalam aset tetap                   | -0,70                     |
| 3.2.3      | Diinvestasikan dalam aset lainnya                 | 66,31                     |

Berdasarkan informasi Neraca Daerah pada Tabel 3.5, aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2013-2018, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,03 persen. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Rata-rata pertumbuhan Aset Lancar senilai 30,83 persen, dengan Aset Lancar Kas senilai 51,98 persen yang menunjukkan telah terjadi pemakaian kas daerah secara konsisten setiap tahunnya pada selang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang mengindikasikan tertibnya administrasi keuangan daerah, dimana terjadi pemanfaatan secara efisien dan terdapat penyimpanan kas setiap tahunnya untuk dijadikan penjaminan pemanfaatan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewajiban Jangka Pendek, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang meliputi penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2018) dengan rata-rata sebesar 16,49 persen, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 7,09 persen.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.



Aset lancar Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2018 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2018 mencapai 8,11 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 8,11 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2015-2018**

| NO | Uraian                                  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| 1. | Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )   | 2,08 | 1,46 | 4,75 | 8,11 |
| 2. | Rasio cepat ( <i>quick ratio</i> )      | 1,85 | 1,20 | 4,34 | 7,38 |
| 3. | Rasio total hutang terhadap total asset | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Rasio hutang terhadap modal             | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Rata-rata umur piutang (Hari)           | 1    | -    | -    | -    |
| 6. | Rata-rata umur persediaan (Hari)        | 365  | 365  | 365  | 365  |

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2018, data telah diolah (2019)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai rasio cepat (*quick ratio*) mencapai 7,38 pada Tahun 2018 hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu yang singkat karena ratio lancar yakni satu ukuran likuiditas keuangan terbaik, untuk rasio solvabilitas Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 0,01 (Tabel 3.6). Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena menghitung rasio *solvabilitas* yaitu perbandingan total aset dengan total utang. Untuk rata-rata umur persediaan selama kurun waktu Tahun 2015-2018 mencapai 365 hari per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada tingkat aman karena mempunyai persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama kurang lebih 365 hari, karena rata-rata umur persediaan yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Pada sektor pelayanan publik

semakin lama rata-rata umur persediaan adalah semakin baik. Rata-rata umur persediaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 365 hari.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016–2018 dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka secara umum kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 - 2018, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Transfer guna menjaga ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

- 1) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota, POLRI;
- 4) Meningkatkan kinerja Bank Sulteng dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah;
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- 7) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 8) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- 9) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah daerah;
  - 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
  - 3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- Pengelolaan Belanja Daerah  
Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimal atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terutama merespon prioritas Pembangunan Nasional yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja. Kebijakan anggaran untuk belanja daerah terbagi ke dalam dua bagian belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.
    - 1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung  
Belanja tidak langsung diarahkan:

- a. Mengalokasikan belanja wajib/mengikat, meliputi belanja pegawai dan belanja bagi hasil;
- b. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah, yang dapat menunjang ketercapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

## 2) Kebijakan Belanja Langsung

Adapun kebijakan Belanja Langsung diarahkan pada:

- a. Program Prioritas sesuai RPJMD Tahun 2016-2021;
- b. Program yang bersifat lanjutan dan sudah menjadi komitmen sebelumnya;
- c. Program baru sebagai landasan kegiatan baru;
- d. Penambahan alokasi belanja pelayanan dasar dan administrasi umum kantor (*fixed cost*);
- e. Mengalokasikan pembiayaan yang bersifat penting dan mendesak, seperti penanggulangan bencana;
- f. Penambahan alokasi anggaran untuk penunjang Program Nasional.

Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014-2018**

| Kode      | Uraian                                                                        | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|           |                                                                               | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) |
|           | Belanja                                                                       |                             | 2.953.280.683.117.67        | 3.178.114.481.726.24        | 3.445.777.071.450.82        | 3.628.027.188.795.17        | 11.22                        |
| <b>I</b>  | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                 | <b>1,167,333,262,161.98</b> | <b>1,526,076,325,257.70</b> | <b>1,545,657,443,529,00</b> | <b>1,973,535,890,121,00</b> | <b>2,107,589,143,171,00</b> | 18.06                        |
| 1         | Belanja Pegawai                                                               | 376,699,997,783.98          | 531,258,852,220.10          | 562.081.903.000,00          | 1.056.063.908.764,00        | 1.213.130.403.863,00        | 31.41                        |
| 2         | Belanja Hibah                                                                 | 363,244,678,500.00          | 578,491,677,000.00          | 603.336.224.000,00          | 500.953.710.000,00          | 474.819.970.000,00          | 10.36                        |
| 3         | Belanja Bantuan Sosial                                                        | 4,124,500,000.00            | 2,025,000,000.00            | 1.684.500.000,00            | 1.073.800.00,00             | 1.184.500.000,00            | -38.31                       |
| 4         | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa       | 305,162,965,537.00          | 307,534,979,186.60          | 365.381.747.228,00          | 409.671.449.702.00          | 406.143.964.908,00          | 17.55                        |
| 5         | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 117,267,144,341.00          | 106,638,837,601.00          | 13.171.319.301,00           | 5.639.09.155,00             | 12.072.854.800,00           | 7.71                         |
| 6         | Belanja Tidak Terduga                                                         | 833,976,000.00              | 126,979,250.00              | 1.750.000,00                | 134.012.500.00              | 237.449.600.00              | 1.655.75                     |
| <b>II</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                       | <b>1,278,327,985,858.52</b> | <b>1,427,204,357,859.97</b> | <b>1,632,457,038,197,24</b> | <b>1,472,241,181,329,82</b> | <b>1,520,438,045,624,17</b> | <b>5.16</b>                  |
| 1         | Belanja Pegawai                                                               | 148,177,160,301.00          | 143,934,107,475.00          | 120.271.628.562,00          | 119.857.964.211,00          | 105.952.132.520.00          | -5.16                        |
| 2         | Belanja Barang dan Jasa                                                       | 853,319,017,407.52          | 840,745,925,332.97          | 1.008.212.400.009,54        | 887.262.608.556,85          | 954.701.505.477,50          | 6.97                         |
| 3         | Belanja Modal                                                                 | 276,831,808,150.00          | 442,524,325,052.00          | 503.973.009.625,70          | 465.120.608.561,97          | 459.784.407.626,67          | 10.97                        |

**Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah 2014-2018**

Berdasarkan Tabel 3.7 Alokasi belanja daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2018 di prioritaskan untuk program dan kegiatan prioritas pembangunan. Untuk tahun 2014 alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.167.333.262.161,98 atau 48,12 persen dari total APBD dengan belanja langsung sebesar Rp. 1.278.327.985.858,52 atau 52,69 persen dari total APBD, pada tahun 2015 alokasi belanja tidak langsung naik sebesar Rp. 1.526.076.325.257,70 atau 52,59 persen dari total APBD, sedangkan belanja langsung juga meningkat sebesar Rp. 1.427.204.357.859,97 atau 49,19 persen dari total APBD, tahun 2016 alokasi belanja tidak langsung naik sebesar Rp. 1.545.657.443.529,00 atau 48,68 persen dari total APBD tetapi belanja langsung meningkat sebesar Rp. 1.632.457.038.197 atau 51,40 persen dari total APBD. Selanjutnya pada tahun 2017 belanja tidak langsung kembali meningkat sebesar Rp. 1.973.535.890.121,00 atau 54,24 persen dari total APBD, demikian juga untuk Belanja Langsung turun sebesar Rp. 1.472.241.181.330,00 atau 40,47 persen dari total APBD. Pada tahun 2018 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung meningkat masing-masing sejumlah Rp. 2.107.589.143.171,00 atau 54,59 persen dan Rp. 1.520.438.045.624,00 atau 39,38 persen dari total APBD di tahun 2018.

- **Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada peningkatan penyertaan modal pada Bank Sulteng.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

Analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 s/d 2018 yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang datang untuk peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.8**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018**

| No. | Uraian              | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Persentase (%) |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|     |                     | (a)                                                   | (b)                                                       | (a)/(b)x100%   |
| 1   | Tahun Anggaran 2016 | 682.354.106.012,00                                    | 3.182.614.481.726.24                                      | 21.44          |
| 2   | Tahun Anggaran 2017 | 1.176.492.343.170,00                                  | 3.483.111.071.450.82                                      | 33.78          |
| 3   | Tahun Anggaran 2018 | 1.319.082.536.383,00                                  | 3.667.211.188.795.17                                      | 35.97          |

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018.

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dilihat dari total pengeluaran daerah relative meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, tahun 2016 persentase sebesar 21.44%, tahun 2017 sebesar 33.78% dan tahun 2018 meningkat menjadi 35.97%. namun persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dapat disimpulkan bahwa total pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan aparatur.

**3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: SILPA; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang;



dan pemberian pinjaman daerah. Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2016-2018 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Defisit Riil Anggaran Pemerintah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018**

| No | Uraian                        | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Realisasi Pendapatan Daerah   | 3.175.692.919.654.07 | 3.638.342.669.181.54 | 3.861.024.072.226.00 |
| 2  | Belanja daerah                | 3.178.114.481.726.24 | 3.445.777.071.450.82 | 3.628.027.188.795.17 |
| 3  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4.500.000.000,00     | 37.334.000.000,00    | 39.184.000.000.00    |
|    | Surplus/ Defisit riil         | 6.921.562.072.17     | 155.231.597.730.72   | 193.812.883.430.83   |

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018.

Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa defisit anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp.6.921.562.072.17 kemudian surplus menjadi Rp.155.231.597.730.72 pada Tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi Rp.193.812.883.430.83 pada Tahun 2018. Untuk menutup defisit anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Komposisi Penutup Defisit Anggaran**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018**

| No. | Uraian                                                            | Proporsi dari total defisit |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|     |                                                                   | 2016 (%)                    | 2017 (%) | 2018 (%) |
| 1.  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 2.44                        | 2.05     | 6.22     |
| 2.  | Pencairan Dana Cadangan                                           | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| 3.  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan                | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| 4.  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| 5.  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| 6.  | Penerimaan Piutang Daerah                                         | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018.

Berdasarkan data defisit anggaran dari Tahun 2016-2018 dibandingkan dengan SILPA Tahun 2016-2018 terlihat bahwa angka SILPA lebih besar dibandingkan dengan defisit anggaran. Hal ini berarti bahwa defisit dapat ditutupi dengan SILPA tahun sebelumnya, sehingga data pada tabel 3.10 menunjukkan persentase SILPA di atas 100 persen. Untuk realisasi SILPA pemerintah daerah, dengan kurun waktu 2016-2018, terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)**  
**Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018**

| No. | Uraian                                                     | 2016                |              | 2017                |              | 2018                |              |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|     |                                                            | Rp                  | % dari SiLPA | Rp                  | % dari SiLPA | Rp                  | % dari SiLPA |
|     |                                                            |                     |              |                     |              |                     |              |
| 1.  | Jumlah SiLPA                                               | 70.515.109.671.01   | 100          | 225.617.217.301.97  | 100          | 419.396.637.691.80  | 100          |
| 2.  | Pelampauan penerimaan PAD                                  | (45.734.749.766.37) | 95.36        | 20.848.647.263.11   | 102.22       | 21.967.507.728.06   | (102.21)     |
| 3.  | Pelampauan penerimaan dana perimbangan                     | (58.783.786.907.00) | 97.41        | (84.409.434.505,00) | (96.91)      | (92.098.855.178.00) | (96.74)      |
| 4.  | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | (2.871.133.321.00)  | (90.05)      | 2.662.755.269.00    | 108.81       | (97.465.052.477.00) | (728.56)     |

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018.

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SILPA terjadi apabila terdapat pelampauan penerimaan PAD, pendapatan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pelampauan penerimaan pembiayaan, menghemat belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa kegiatan lanjutan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang memberikan kontribusi terhadap SILPA yaitu pelampauan penerimaan PAD, pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja.

**3.3 Kerangka Pendanaan**

Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Hal ini merupakan salah satu indikator penunjang turunnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-

sumber pendapatan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah memiliki dana yang signifikan dalam rangka belanja dan pembiayaan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun masih terdapat beberapa sumber pajak yang dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan kata lain masih terdapat beberapa pajak yang pemungutannya belum efektif karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting daerah dan potensi peningkatannya masih dapat dioptimalkan.

Pencapaian target pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui pendekatan anggaran yang berorientasi pada pencapaian target dari input perencanaan yang dilakukan berdasarkan prinsip penganggaran yang akuntabilitas demi menjamin keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran.

### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Berdasarkan tabel 3.12, Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 berjumlah Rp.3.861.024.072.226,00.- mengalami peningkatan sebesar Rp. 222.681.403.044.46.- atau sebesar 6,12 persen dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp.3.638.342.669.181,54,-. Untuk Tahun 2019 pendapatan daerah naik sebesar Rp.4.149.229.921.367,00.- dengan peningkatan sebesar Rp. 288.205.840.141,00 atau sebesar 7,46 persen dari Tahun 2018. Untuk Pendapatan Daerah tahun 2020 diproyeksikan naik menjadi Rp. 4.566.591.614.289,23., atau sebesar 10,06 persen dan Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.030.040.070.978,61,- atau sebesar 10,15 persen.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebesar Rp. 3.445.777.071.450,82,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 182.250.117.344,35.- atau sebesar 5,29 persen di Tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 3.628.027.118.792,17,-. Pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 635.099.017.560,83,- menjadi Rp.

4.263.126.206.356,00,- atau naik 17,51 persen. Untuk tahun 2020 Belanja Daerah diproyeksikan naik menjadi Rp. 4.589.112.687.141,03,- atau 7,65 persen dan untuk tahun 2021 diproyeksikan naik menjadi Rp. 5.038.568.177.010,91 atau sebesar 9,79 persen.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.107.589.143.171,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 134.053.253.050,00,- atau 6,79 persen jika dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.973.535.890.121,00,-. Pada tahun 2019 Belanja Tidak Langsung kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 234.692.769.425,00,- dari tahun 2018 dengan persentase kenaikan sebesar 11,14 persen sehingga Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp. 2.342.281.912.596,00,-. Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 2.528.656.348.984,59,-. Dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.686.159.720.424,29,-.

Belanja Langsung merupakan sumber Belanja Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan rincian pada Tahun 2017 sebesar Rp.1.472.241.181.329,82,00,- mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen menjadi sebesar Rp. 1.520.438.045.624,17,- pada Tahun 2018. Untuk tahun 2019 belanja langsung meningkat sebesar Rp. 400.406.248.135,83 atau sebesar 17,51 persen menjadi Rp. 1.920.844.293.760,00,-. Selanjutnya untuk Tahun 2020 Total Belanja Langsung diproyeksikan sebesar Rp. 2.060.456.338.156,44,- dan tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.352.408.456.586,62,-

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 70.384.136.950,01,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 155.233.080.351,96 atau sebesar 68,80 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 225.617.217.301,97. Kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp. 174.096.293.989,00,- atau -29,59 persen yaitu sebesar Rp.51.520.923.312,97. Tahun 2020 dan 2021 Penerimaan Pembiayaan masing-masing diproyeksikan sebesar Rp. 82.721.072.851,80,- dan Rp. 68.728.106.032,30,-. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 37.334.000.000,00,- dan pada Tahun 2018 menjadi 39.184.000.000,00,0 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.850.000.000,00 atau sebesar 4,72 persen dibandingkan tahun 2017. Untuk Tahun 2019 total Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 60.200.000.000,00,-, dan proyeksi untuk tahun 2020 dan 2021 disamakan dengan tahun 2019

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. Pembiayaan Daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan adalah bersumber dari SILPA yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Untuk jelasnya masing-masing uraian pendapatan, belanja maupun pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021**

| NO         | URAIAN                                                            | Pertumbuhan % | REALISASI TAHUN 2016        | REALISASI TAHUN 2017        | REALISASI TAHUN 2018        | TAHUN ANGGARAN 2019         | PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2020 | PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>PENDAPATAN</b>                                                 | <b>9,51</b>   | <b>3.175.692.919.654,07</b> | <b>3.638.342.669.181,54</b> | <b>3.861.024.072.226,00</b> | <b>4.149.229.912.367,00</b> | <b>4.566.591.614.289,23</b>  | <b>5.030.040.070.978,61</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     |               | <b>939.092.069.082,07</b>   | <b>958.212.001.717,54</b>   | <b>1.016.622.688.427,00</b> | <b>1.007.404.152.467,00</b> | 1.032.404.703.081,16         | 1.058.551.952.633,99         |
| 1.1.1      | Pajak Daerah                                                      | 2,01          | 776.340.400.576,00          | 790.439.057.679,00          | 835.456.969.571,00          | 824.000.000.000,00          | 840.528.066.600,37           | 857.387.658.668,63           |
| 1.1.2      | Retribusi Daerah                                                  | 5,32          | 7.046.280.402,00            | 8.876.138.026,00            | 11.225.203.122,00           | 8.232.348.000,00            | 8.669.998.058,25             | 9.130.914.573,84             |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                 | -10,43        | 23.605.752.658,06           | 18.478.974.447,00           | 16.907.254.096,00           | 16.965.608.967,00           | 15.196.841.007,04            | 13.612.477.868,75            |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                         | 6,20          | 132.099.635.446,01          | 140.417.831.535,54          | 153.033.251.638,00          | 158.206.195.500,00          | 168.009.797.415,50           | 178.420.901.522,77           |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                           |               | <b>2.215.604.520.193,00</b> | <b>2.647.241.314.195,00</b> | <b>2.731.430.163.822,00</b> | <b>3.091.969.271.800,00</b> | <b>3.468.423.384.413,71</b>  | <b>3.881.837.655.722,80</b>  |
| 1.2.1.1    | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                      | 26,29         | 102.058.31.981,00           | 124.837.810.552,00          | 196.347.609.076,00          | 205.582.623.800,00          | 259.636.652.470,35           | 312.441.163.955,80           |
| 1.2.1.2    | Dana Alokasi Umum                                                 | 8,76          | 1.272.925.036.000,00        | 1.546.247.611.000,00        | 1.586.163.908.000,00        | 1.637.588.970.000,00        | 1.781.034.217.141,67         | 1.937.044.606.882,92         |
| 1.2.1.3    | Dana Alokasi Khusus                                               | 14,33         | 835.621.352.212,00          | 976.155.892.643,00          | 948.918.646.746,00          | 1.248.797.678.000,00        | 1.427.752.514.801,68         | 1.632.351.884.884,38         |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>                              |               | <b>25.996.330.379,00</b>    | <b>32.889.353.269,00</b>    | <b>112.971.219.977,00</b>   | <b>49.856.488.100,00</b>    | <b>65.763.526.794,36</b>     | <b>89.650.462.621,82</b>     |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                                  | 11,57         | 20.996.330.379,00           | 25.389.353.269,00           | 10.646.556.364,00           | 29.161.506.100,00           | 32.536.098.008,28            | 36.301.200.286,93            |
| 1.3.2      | Pendapatan Dana Darurat                                           |               | -                           | -                           | -                           | -                           |                              |                              |
| 1.3.3      | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya |               |                             | -                           | -                           | -                           |                              |                              |
|            |                                                                   |               |                             |                             |                             |                             |                              |                              |

|            |                                                                             |        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                         | 60,56  | 5.000.000.000,00            | 7.500.000.000,00            | -                           | 20.694.982.000,00           | 33.227.428.786,08           | 53.349.262.334,89           |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)                 |        |                             | -                           | 102.324.663.613,00          | -                           |                             |                             |
| <b>2.</b>  | <b>BELANJA</b>                                                              | 9,62   | <b>3.178.114.481.726,24</b> | <b>3.445.777.071.450,82</b> | <b>3.628.027.188.795,17</b> | <b>4.263.126.206.356,00</b> | <b>4.589.112.687.141,03</b> | <b>5.038.568.177.010,91</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                               |        | <b>1.545.657.443.529,00</b> | <b>1.973.535.890.121,00</b> | <b>2.107.589.143.171,00</b> | <b>2.342.281.912.596,00</b> | <b>2.528.656.348.984,59</b> | <b>2.686.159.720.424,29</b> |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                             | 27,77  | 562.081.903.000,00          | 1.056.063.908.764,00        | 1.213.130.403.863,00        | 1.331.667.460.396,00        | 1.498.125.892.945,50        | 1.607.293.732.498,76        |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                               | -0,26  | 604.513.114.750,00          | 500.953.710.000,00          | 474.819.970.000,00          | 598.700.025.000,00          | 597.162.555.742,21          | 644.585.351.891,00          |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                      | -3,79  | 1.684.500.000,00            | 1.073.800.000,00            | 1.184.500.000,00            | 1.500.000.000,00            | 1.443.105.251,06            | 1.541.294.590,88            |
| 2.1.6      | Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa       | 2,47   | 365.381.747.228,00          | 409.671.449.702,00          | 406.143.964.908,00          | 393.130.000.000,00          | 402.840.041.857,06          | 401.744.717.660,84          |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 0,29   | 13.171.319.301,00           | 5.639.009.155,00            | 12.072.854.800,00           | 13.284.427.200,00           | 13.322.345.268,60           | 13.766.945.315,91           |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga                                                       | 874,20 | 1.750.000,00                | 134.012.500,00              | 237.449.600,00              | 13.284.427.200,00           | 15.762.407.920,17           | 17.227.678.466,90           |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                     | 5,99   | <b>1.632.457.038.197,24</b> | <b>1.472.241.181.329,82</b> | <b>1.520.438.045.624,17</b> | <b>1.920.844.293.760,00</b> | <b>2.060.456.338.156,44</b> | <b>2.352.408.456.586,62</b> |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                             | -1,79  | 120.271.628.562,00          | 119.857.964.211,00          | 105.952.132.520,00          | 113.960.781.400,00          | 111.930.691.552,79          | 113.997.593.104,86          |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | -1,27  | 1.008.212.400.009,54        | 887.262.608.556,85          | 954.701.505.477,50          | 970.326.429.728,80          | 958.016.824.822,90          | 959.126.730.898,53          |



|            |                               |       |                          |                          |                           |                           |                          |                          |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.2.3      | Belanja Modal                 | 18,40 | 503.973.009.625,70       | 465.120.608.561,97       | 459.784.407.626,67        | 836.557.082.631,20        | 990.508.821.780,76       | 1.279.284.132.583,23     |
| <b>3.</b>  | <b>PEMBIAYAAN</b>             |       |                          |                          |                           |                           |                          |                          |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  | 1,66  | <b>77.436.671.743,33</b> | <b>70.385.619.571,25</b> | <b>225.617.217.301,97</b> | <b>174.096.293.989,00</b> | <b>82.721.072.851,80</b> | <b>68.728.106.032,30</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> | 0,91  | <b>4.500.000.000,00</b>  | <b>37.334.000.000,00</b> | <b>39.184.000.000,00</b>  | <b>60.200.000.000,00</b>  | <b>60.200.000.000,00</b> | <b>60.200.000.000,00</b> |
|            |                               |       |                          |                          |                           |                           |                          |                          |

Sumber : Laporan Keuangan Daerah (2019)

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pendanaan pada penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih serta terarahnya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan.

Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 seperti pada Tabel 3.13 memperlihatkan kondisi kapasitas riil kemampuan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.697.987.888.731,55, atau 46,67 persen, tahun 2018 sebesar Rp.1.939.834.683.315,97 atau sebesar 50,24 persen, selanjutnya pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.920.844.293.760,00 atau sebesar 46,29 persen dan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 masing-masing diproyeksikan sebesar Rp.2.060.456.338.153,43 atau sebesar 45,12 persen dan Rp.2.352.408.456.5860,91,- atau sebesar 46,77 persen.

Sedangkan untuk prioritas III yang digunakan untuk memenuhi belanja tidak langsung dari tahun 2017 hingga proyeksi tahun 2021 yaitu tahun 2017 sebesar 54,24 persen yaitu Rp. 1.973.535.890.121,00, tahun 2018 sebesar 54,59 persen, atau senilai Rp 2.107.589.143.171,00.-, tahun 2019 sebesar 56,45 persen atau senilai Rp 2.342.281.912.596,00.-, dan tahun 2020 dan 2021 masing-masing diproyeksikan sebesar 55,37 persen atau senilai Rp. 2.528.656.348.984,59 dan tahun 2021 sebesar 53,40 persen atau senilai Rp. 2.686.159.720.424,29.

Kapasitas riil diperuntukkan untuk menunjang program prioritas I, prioritas II. Adapun rincian prioritas tersebut antara lain:

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yang berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu program prioritas berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan pada capaian visi dan misi kepala daerah terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2021. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II :

Berkaitan dengan program di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran per urusan yang paling berdampak luas pada masyarakat yang dilayani sesuai permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yang berkaitan dengan alokasi belanja tidak langsung :

- belanja pegawai,
- belanja hibah,
- belanja bantuan sosial,
- belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa,
- belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa,
- belanja tidak terduga.

Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Jika dilihat pada tabel 3.13 Realisasi/Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah mengalami kenaikan, tetapi harus tetap memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan itulah yang merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan dua hal yaitu : (1) tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan

secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021**

| No. | Uraian                                   | Realisasi dan Proyeksi      |                             |                             |                             |                             |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                          | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        |
| 1   | <b>Pendapatan</b>                        | <b>3.638.342.669.181,54</b> | <b>3.861.024.072.226,00</b> | <b>4.149.229.912.367,00</b> | <b>4.566.591.614.286,22</b> | <b>5.030.040.070.979,61</b> |
| 2   | Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)   | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3   | Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran     | 70.515.109.671,00           | 225.583.754.260,97          | 174.096.293.989,00          | 82.721.072.851,80           | 68.728.106.032,30           |
|     | Total Penerimaan                         | 3.708.857.778.852,55        | 4.084.607.826.486,97        | 4.323.326.206.356,00        | 4.649.312.687.138,02        | 5.098.768.177.010,91        |
|     | Dikurangi :                              |                             |                             |                             |                             |                             |
| 4   | Belanja Tidak langsung                   | 1.973.535.890.121,00        | 2.107.589.143.171,00        | 2.342.281.912.596,00        | 2.528.656.348.984,59        | 2.686.159.720.424,29        |
| 5.  | Pengeluaran Pembiayaan                   | 37.334.000.000,00           | 39.184.000.000,00           | 60.200.000.000,00           | 60.200.000.000,00           | 60.200.000.000,00           |
|     | <b>Kapasitas rill kemampuan keuangan</b> | <b>1.697.987.888.731,55</b> | <b>1.939.834.683.315,59</b> | <b>1.920.844.293.760,00</b> | <b>2.060.456.338.153,43</b> | <b>2.352.408.456.586,62</b> |

Sumber : Laporan Keuangan Daerah (2019)

**Tabel 3.14**  
**Realisasi dan Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2021**

| NO  | JENIS DANA      | ALOKASI       |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |                 | 2017          |                             | 2018          |                             | 2019          |                             | 2020          |                             | 2021          |                             |
|     |                 | %             | Rp.                         | %             | Rp.                         | %             | Rp.                         | %             | Rp.                         | %             | Rp.                         |
| I   | Prioritas I     | 31,77         | 1.166.351.245.553,70        | 33,32         | 1.348.506.062.266,22        | 30,32         | 1.292.459.490.943,13        | 30,03         | 1.378.055.281.578,57        | 31,69         | 1.596.623.230.264,48        |
| II  | Prioritas II    | 14,48         | 531.636.643.177,85          | 14,61         | 591.328.621.049,75          | 14,74         | 628.384.802.816,87          | 14,87         | 682.401.056.577,87          | 15,00         | 755.785.226.592,14          |
|     | Jumlah I + II   | <b>46,25</b>  | <b>1.697.987.888.731,55</b> | <b>47,93</b>  | <b>1.939.834.683.315,97</b> | <b>45,06</b>  | <b>1.920.844.293.760</b>    | <b>44,90</b>  | <b>2.060.456.338.156,44</b> | <b>46,69</b>  | <b>2.352.408.456.856,02</b> |
| III | Prioritas III   | <b>54,24</b>  | <b>1.973.535.890.121,00</b> | <b>52,07</b>  | <b>2.107.589.143.171,00</b> | <b>54,94</b>  | <b>2.342.281.912.596,00</b> | <b>55,10</b>  | <b>2.528.656.348.984,59</b> | <b>53,31</b>  | <b>2.686.159.720.424,29</b> |
|     | Jumlah I+II+III | <b>100,00</b> | <b>3.671.523.778.852,55</b> | <b>100,00</b> | <b>4.047.423.826.486,97</b> | <b>100,00</b> | <b>4.263.126.206.356,00</b> | <b>100,00</b> | <b>4.589.112.687.138,02</b> | <b>100,00</b> | <b>5.038.568.177.010,91</b> |

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan permasalahan Pembangunan dan isu strategis pada paruh waktu perjalanan RPJMD hasil evaluasi tiga tahun terakhir.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan pada paruh waktu pelaksanaan RPJMD 2016-2021, masih terdapat beberapa target indikator yang tidak dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal, khususnya terkait dengan Bencana Alam yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan analisis evaluasi capaian indikator kinerja visi misi pembangunan daerah. Sebagai perbandingan pencapaian antara realisasi kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk memberikan penguatan pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada urusan pemerintahan sebagai berikut.



**Tabel 4.1**

**Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

| No. | Masalah Pokok                                                                  | Masalah                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM belum optimal | a. Pelayanan Publik                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua kabupaten/kota mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik di antaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;</li> <li>2. Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam Perencanaan berbagai sektor pembangunan.</li> <li>3. Belum diterapkan standar pelayanan public sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                | b. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) melalui penerapan system <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum dijalankan secara tertib dan berkelanjutan;</li> <li>2. Penerapan dan peningkatan teknologi informasi melalui sistem <i>e-Government</i> belum berjalan dengan baik.</li> <li>3. Komitmen untuk mencapai target Visi-Misi masih belum optimal;</li> <li>4. Kesejahteraan ASN melalui tunjangan tambahan kinerja daerah (TKD) belum maksimal;</li> <li>5. Kelembagaan pelaksanaan urusan pemerintahan belum didukung SOP dan standar pelayanan minimal (SPM);</li> <li>6. Kuantitas dan kualitas ASN belum didasarkan muatan kompetensi memadai dalam penempatannya dan jenjang karirnya (<i>tour of duty</i>);</li> </ol> |
|     |                                                                                | c. Kapasitas, kapabilitas dan keahlian teknis sumberdaya ASN belum memadai | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM aparatur baik kompetensi maupun kapabilitas melalui pendidikan penjurusan dan pendidikan formal masih rendah.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN belum didukung kelembagaan Diklat yang moderen dan maju.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                | A. Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka panjang.</li> <li>2. Belum up-date kualitas perencanaan seiring dengan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | pengembangan daerah belum optimal.      | <p>dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;</li> <li>4. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai <i>feed back</i> dalam proses pembangunan daerah.</li> <li>5. Data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum memadai;</li> <li>6. Hasil pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan belum optimal;</li> <li>7. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan;</li> <li>8. Belum optimalnya dukungan PD (perangkat daerah) dalam penyediaan informasi dan data statistik;</li> <li>9. Masih banyak jenis data statistik yang belum tersedia yang sesuai kebutuhan daerah.</li> </ol> |
|     |               | d. Pengawasan Pembangunan belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman ASN daerah tentang pengawasan masih rendah;</li> <li>2. Sistem pengawasan PD masih rendah;</li> <li>3. Sistem pengawasan internal belum optimal;</li> <li>4. Masih banyaknya pelanggaran administrasi;</li> <li>5. Keterbatasan SDM auditor internal Pemda;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |               | e. Ketentraman dan ketertiban           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi;</li> <li>2. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu;</li> <li>3. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No. | Masalah Pokok | Masalah              | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | f. Pemberdayaan Desa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa;</li> <li>2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;</li> <li>3. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri;</li> <li>4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;</li> <li>5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;</li> <li>6. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa;</li> <li>7. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;</li> <li>8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;</li> <li>9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam</li> </ol> |

| No. | Masalah Pokok                                                             | Masalah                              | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                                      | <p>pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;</p> <p>10. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;</p> <p>11. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.</p> <p>12. Bundes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;</p> <p>13. SDM yang terlibat dalam pengelolaan BUNDes</p> <p>14. Belum Optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju nkemandirian desa;</p> <p>15. Belum Optimalnya pembangunan desa yang mencakup peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskalaproduktif dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;</p> <p>16. Menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang mulain berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>17. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagi bahan penyusunan perencanaan</p> |
| 2.  | Ketimpangan infrastruktur daerah dan masih terbatasnya sumber daya energy | a. Aksesibilitas Jalan belum memadai | <p>1. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum dalam kondisi atau status jalan kondisi baik/Mantap;</p> <p>2. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan dengan Panjang jalan yang merupakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                       | kewenangan Provinsi yang harus ditangani;<br>3. Masih banyak jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah kabupaten/kota kondisi belum memadai (rusak).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |               | b. Infrastruktur Perhubungan Terbatas | 1. Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;<br>4. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;<br>5. Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat (terminal tipe A, bandara dan pelabuhan);<br>6. Sebagian wilayah infrastruktur perhubungan strategis masih terbatas bahkan pada wilayah terdampak terjadi kerusakan sarana prasarana perhubungan; |
|     |               | 2. Fungsional Jaringan Irigasi        | 1. Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak;<br>2. Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;<br>3. Adanya potensi rawan banjir limpuhan yang disebabkan daerah aliran sungai di Sulawesi Tengah yang cukup luas dengan debit yang cukup besar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |               | 3. Akses Air Bersih dan Sanitasi      | 1. Masih tingginya jumlah penduduk yang mengakses air dari sumber air terlindungi;<br>2. Akses pelayanan sanitasi dan air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |               | 4. Perumahan dan Pemukiman layak      | 1. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah ( <i>Backlog</i> Rumah) yang masih tinggi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                              | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | huni                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah dan penanganan rumah di wilayah Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Penyediaan Hunian sementara (HUNTARA) dan Hunian Tetap (HUNTAP) pada wilayah yang terkena dampak bencana belum optimal;</li> <li>4. Perlu penangan khusus pada wilayah yang berada di zona merah Kawasan tidak layak huni pada daerah rawan bencana</li> <li>5. Perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru Kabupaten/Kota;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |               | 5. Ketersediaan Energi belum memadai | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak;</li> <li>2. Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum mencapai skala ekonomi, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EBT karena energi fosil harganya lebih murah;</li> <li>3. Konflik didalam pemanfaatan Sumber daya alam bagi investasi energi baru terbarukan (EBT) masih terjadi antar tingkat pemerintahan berdasarkan kewenangan, dan antar masyarakat dan pemerintah;</li> <li>4. Masih besarnya potensi SDA bagi pemanfaatan penciptaan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang belum termanfaatkan;</li> <li>5. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah;</li> <li>6. Adanya beberapa Kuasa Pertambangan (KP) yang tumpang tindih antara kuasa pertambangan (KP) dengan kontrak karya (KK) maupun kuasa pertambangan dengan Kawasan Hutan;</li> </ol> |

| No. | Masalah Pokok                           | Masalah                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                  | 7. Masih terbatasnya data yang akurat mengenai sumber daya mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Air dan Tanah, karena masih kurangnya kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                         | 6. Tata Ruang diperlukan peninjauan kembali      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi;</li> <li>2. Masih banyaknya RTRW kabupaten/kota yang perlu direvisi terutama daerah rawan bencana menyesuaikan dengan rencana zonasi;</li> <li>3. Masih adanya kabupaten/kota belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan;</li> <li>4. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada RTH perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).</li> </ol>                                        |
| 3.  | Pertumbuhan Ekonomi yang belum inklusif | a. Kemiskinan dan Pengangguran yang masih Tinggi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Kemiskinan masih sangat tinggi pada wilayah-wilayah pesisir dan kantong KAT di Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya belum optimal;</li> <li>3. Pengendalian Inflasi sulit dilakukan mengakibatkan garis kemiskinan Sulawesi Tengah tinggi;</li> <li>4. Angka kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan akibat dampak bencana alam yang terjadi pada sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota;</li> </ol> |
|     |                                         | b. Daerah Tertinggal                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 9 (Sembilan) dari 12 (duabelas) Kabupaten diwilayah Sulawesi Tengah merupakan Kabupaten Tertinggal;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| No. | Masalah Pokok | Masalah                        | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pada Kabupaten tertinggal sebagian besar disebabkan keterbatasan sapsras dasar, ekonomi masyarakat rendah, SDM rendah dan aksesibilitas;</li> <li>3. Data Kabupaten tertinggal, kecamatan dan Desa tertinggal serta sangat tertinggal di Sulawesi Tengah belum optimal digunakan sebagai focus intervensi Perangkat Daerah;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |               | c. Perekonomian Daerah         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal;</li> <li>2. Pertumbuhan dan persebaran investasi dan ketersediaan kawasan industri belum merata;</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan dampak dari bencana alam;</li> <li>4. Kerusakan Infrastruktur Ekonomi di wilayah bencana dan terdampak;</li> <li>5. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah Kabupaten/Kota.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |               | d. Penanaman Modal             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah;</li> <li>2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah;</li> <li>3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik;</li> <li>4. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia;</li> <li>5. Posisi ruang Sulawesi Tengah yang cenderung tidak seunggul posisi ruang Provinsi lainnya di regional Sulawesi khususnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan;</li> </ol> |
|     |               | e. Peran Koperasi, UKM dan IKM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan kelembagaan koperasi masih perlu penguatan;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                           | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Skala pembiayaan dan akses sumberdaya koperasi dan UMKM masih terbatas dan rendah;</li> <li>3. Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;</li> <li>4. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM</li> <li>5. Sebagian koperasi dan UMKM serta IKM mengalami kerugian pada wilayah terdampak akibat bencana Alam;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |               | f. Perdagangan belum optimal      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;</li> <li>2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;</li> <li>3. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;</li> <li>4. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/ pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;</li> <li>5. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu;</li> <li>6. Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai;</li> </ul> |
|     |               | g. Industri yang belum berkembang | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | Masalah Pokok                                                    | Masalah                             | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>produksi, desain dan selera konsumen;</li> <li>2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;</li> <li>3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;</li> <li>4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;</li> <li>5. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;</li> <li>6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah;</li> </ul> |
| 4.  | Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang belum Optimal | a. Pariwisata yang belum berkembang | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah;</li> <li>2. Sadar wisata masyarakat masih relatif kurang;</li> <li>3. Belum ada rencana studi kawasan wisata secara detail;</li> <li>4. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas;</li> <li>5. Masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi namun inovatif di lingkungan parawisata;</li> <li>6. Desain Kampanye wisata masih belum optimal.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|     |                                                                  | b. Pertanian                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan;</li> <li>2. produksi pertanian semakin menurun;</li> <li>3. diversifikasi tanaman dan menggunakan teknologi tepat guna belum optimal;</li> <li>4. Pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan</li> <li>5. adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkat kesejahteraan petani;</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

| No. | Masalah Pokok | Masalah   | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |           | 6. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal;<br>7. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik;<br>8. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah bencana, rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup, perubahan iklim dan Bencana alam;<br>9. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani;<br>10. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;<br>11. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;<br>12. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;<br>13. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi;<br>14. Tata niaga ternak masih belum optimal;<br>15. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin; |
|     |               | c. Pangan | 1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk ;<br>2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain;<br>3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial;<br>4. Keandalan sistem irigasi semakin menurun;<br>5. Intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                   | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                           | <p>tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Masyarakat Miskin rawan pangan masih tinggi;</li> <li>7. Keanekaragaman konsumsi pangan masih rendah;</li> <li>8. Ketidakstabilan harga pangan</li> <li>9. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi;</li> <li>10. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan <i>upstream</i> (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;</li> <li>11. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan berpengaruh terhadap gizi;</li> <li>12. Masalah gizi buruk di masyarakat;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |               | d. Perikanan dan Kelautan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;</li> <li>2. Meningkatnya kerusakan ekosistem dan ekologi akibat illegal fishing;</li> <li>3. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan;</li> <li>4. Tata letak (<i>lay out</i>) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;</li> <li>5. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;</li> <li>6. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;</li> <li>7. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;</li> <li>8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan</li> </ol> |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                               | <p>yang kurang optimal;</p> <p>9. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;</p> <p>10. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;</p> <p>11. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;</p> <p>12. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di berbagai kawasan di Sulawesi Tengah;</p> <p>13. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.</p>                                                                                                                                 |
|     |               | e. Degradasi lingkungan hidup | <p>1. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam secara luas meningkat;</p> <p>2. Pengelolaan dan pengolahan sampah ditingkat Kabupaten/Kota belum optimal;</p> <p>3. Luas Lahan kritis meningkat;</p> <p>4. Aktivitas deforestasi (Proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan) sangat tinggi.</p> <p>5. Meningkatnya kerusakan hutan akibat illegal logging;</p> <p>6. Belum terintegrasinya keterlibatan masyarakat adat dan perempuan adat dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal mengurangi emisi, degradasi dan pencapaian karbon.</p> <p>7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah;</p> <p>8. Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan;</p> |

| No. | Masalah Pokok                                        | Masalah         | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | f. Bencana Alam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi bencana belum berjalan secara optimal;</li> <li>2. Ancaman kerusakan lingkungan hidup oleh berbagai aktivitas dan alih fungsi lahan masih cukup tinggi;</li> <li>3. Tipologi wilayah Sulawesi Tengah dengan struktur geologi kompleks dan jalur gempa menyebabkan wilayahnya sangat rentan bencana alam (gempa, banjir dan longsor);</li> <li>4. Sebagian besar wilayah Sulawesi tengah berada di leher pulau Sulawesi yang memiliki air laut pasang yang tinggi membuat kerusakan infrastruktur lebih cepat;</li> <li>5. Karakter wilayah yang berada di wilayah garis patahan khusus patahan Palu Koro sebagai salah satu sesar sangat aktif didunia mengakibatkan wilayah Sulawesi Tengah rawan bencana gempa besar;</li> </ol> |
|     |                                                      | g. Pertambangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik pertambangan terkait status kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sangat tinggi;</li> <li>2. Masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (<i>good mining practice</i>);</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | Kualitas Sumberdaya Manusia Yang belum Berdaya Saing | a. Pendidikan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih perlunya peningkatan lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;</li> <li>2. Kualitas Layanan Pendidikan SMA belum memadai;</li> <li>3. Masih rendahnya angka Harapan lama sekolah (HLS) dan Angka rata-rata lama sekolah (RLS)</li> <li>4. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan;</li> <li>5. Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;</li> <li>6. Daya saing Pendidikan Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   |



| No. | Masalah Pokok | Masalah                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | 7. Kesehatan                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi(AKB), serta</li> <li>2. Masih adanya kasus gizi buruk dan Gizi kurang khususnya wilayah pedalaman dan daerah tertinggal;</li> <li>3. Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i> di kabupaten/kota;</li> <li>4. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;</li> <li>5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;</li> <li>6. mutu pelayanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan;</li> <li>7. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;</li> <li>8. Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif;</li> <li>9. Sebagian layanan fasilitas kesehatan belum terakreditasi di tingkat Kabupaten/Kota;</li> </ol> |
|     |               | 8. Produktivitas Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah;</li> <li>2. Masih terbatasnya lapangan kerja yang tercipta di tingkat Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Lapangan kerja yang tersedia sebagian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja;</li> <li>4. Akibat Bencana Alam telah menghilangkan sebagian lapangan kerja pada sector pertanian dan IKM-UMKM di wilayah bencana dan terdampak (PADAGIMO);</li> <li>5. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;</li> <li>6. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tripartit dan bipartit di kabupaten/kota;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | Masalah Pokok | Masalah                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                  | 7. Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |               | 9. Peran Perempuan belum optimal | 1. Masih kurangnya kemandirian perempuan;<br>2. Belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan;<br>3. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan;<br>4. Belum optimalnya hak anak untuk mewujudkan provinsi layak anak;<br>5. Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan korban pasca konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan;                                                                                                                                                                                                                               |
|     |               | 10. Pembangunan Kependudukan     | 1. Kuantitas Penduduk tidak diikuti daya saing SDM;<br>2. Struktur Penduduk Sulawesi Tengah kurang menguntungkan dimana Jumlah Balita & Anak masih sangat besar, Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar dengan kualitas rendah, Jumlah lansia semakin meningkat;<br>3. Persebaran Penduduk timpang antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dalam lingkup Kabupaten/Kota;<br>4. Kualitas Penduduk masih rendah dimana Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah Masih diwabah rata-rata nasional;<br>5. Pencapaian Kualitas Penduduk tidak merata antar wilayah kabupaten/kota; |
|     |               | 11. Sosial Kemasyarakatan        | 1. Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, KAT);<br>2. Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat);                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Masalah Pokok | Masalah        | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada masalah kerawanan sosial;</li> <li>4. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;</li> <li>5. Belum Optimalnya Penangana bencana Sosial;</li> <li>6. Masih Rendahnya Penangana Kasus Anak,perempuan dan human <i>tracfficking</i>;</li> <li>7. Belum Optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial,pemberdayaan sosial,penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan Jaminan Sosial;</li> <li>8. Masih Rentan terhadap konflik sosial;</li> <li>9. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);</li> </ul> |
|     |               | 12. Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;</li> <li>2. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai- nilai kebudayaan daerah;</li> <li>3. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah;</li> <li>4. Lemahnya pendokumentasian sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Sulawesi Tengah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

## **4.2. ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

### **4.2.1 ISU STRATEGIS GLOBAL**

#### **4.2.1.1 Gejolak Perekonomian Global**

Perekonomian global sampai akhir tahun 2018 ditandai ketidakpastian yang meningkat dipicu tiga perkembangan yang kurang menguntungkan. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,8% pada 2017 menjadi 3,7% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi yang melambat kemudian

menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua, suku bunga Federal Funds Rate (FFR) naik lebih cepat dan lebih tinggi dari respons tahun sebelumnya, sehingga memicu risiko pembalikan aliran modal dari negara berkembang. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat dipicu beberapa faktor seperti peningkatan ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan negara lain, risiko geopolitik seperti perundingan Brexit dan krisis di beberapa negara berkembang seperti Argentina dan Turki. Ketiga faktor ini kemudian mendorong investor global menarik dananya dan mengancam stabilitas eksternal negara berkembang. Mata uang berbagai negara melemah tajam terhadap dolar AS dan menimbulkan kerentanan instabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Ketidakpastian ekonomi global mendorong beragam respons dari berbagai negara dengan mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Di negara maju, sebagian negara maju non-AS mengambil kebijakan moneter bias longgar untuk menjaga momentum pertumbuhan. Sementara itu, konsolidasi fiskal negara maju berlangsung perlahan, kecuali AS yang melakukan stimulus fiskal dalam jumlah besar.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, dimana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Pemerintah Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhannya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi adalah dalam mengoptimalkan populasi. Kerja sama internasional juga diperkuat baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan, dengan tetap menjaga resiliensi perekonomian.

#### **4.2.1.2 MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)**

Hubungan antar negara yang semakin terbuka sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi akan membawa pada saling kebergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

*Keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016.* Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan pada Provinsi Sulawesi Tengah kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA. Disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Kondisi diatas membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti MEA tersebut. Beberapa hal perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti MEA bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

#### **4.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDG's)**

Pencapaian tujuan pembangunan milenium yang berkelanjutan merupakan isu penting dalam peningkatan martabat kemanusiaan secara bersama sama. Isu ini meliputi beberapa tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi perbaikan lingkungan hidup. Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dideklarasikan pada akhir tahun 2015, berorientasi pada peningkatan martabat dan kualitas hidup manusia melalui : (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara signifikan terhadap isu-isu permasalahan lingkungan.; (2) Perkembangan pembangunan menjadi siklus yaitu *Economic Development - Population Development - Environment Development*.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 aspek yang perlu dicapai dalam dunia global antara lain: thriving lives and livelihoods (kehidupan yang sehat dan layak), sustainable food security (keamanan dan ketahanan pangan), secure sustainable water (sumber air bersih), universal clean energy (energi yang aman), healthy and productive ecosystems (ekosistem yang produktif dan sehat), governance for sustainable Societies (kebijakan yang berpihak terhadap komunitas). Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya.

Berbeda dengan MDGs, metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2040 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ia juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda MDG's di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Tengah, menjadikan pencapaian tujuan SDG's sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah guna mendukung Pencapaian RAD SDG's Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan penyusunan Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.

#### **4.2.1.4 Lingkungan Hidup**

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (Protocol Kyoto), keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal, dan perlindungan kehidupan laut.

Berdasarkan Copenhagen Accord, catatan yang dihasilkan dari rangkaian pembahasan 26 negara termasuk Indonesia, mengenai perubahan iklim dalam Conference of the Parties (COP) ke-15 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) di Copenhagen, Denmark, telah disepakati bahwa upaya mitigasi global (*global coherent mitigation actions*) secara sukarela/tidak mengikat dibutuhkan untuk membatasi peningkatan suhu global. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penurunan emisi GRK oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

Isu internasional tentang lingkungan hidup adalah perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Berbagai kerusakan lingkungan yang dirasakan saat ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa kini, lalu kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki. Hal ini terjadi silih berganti sesuai dengan zamannya yang merupakan siklus hidup dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dan dari peradaban ke peradaban. Kondisi memasuki peralihan dari fase buruknya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menjadi fase positif terhadap lingkungan. Sekarang ini umumnya manusia telah menyadari pentingnya alam untuk kelangsungan hidup. Perlahan manusia memperbaiki alam yang telah rusak dan mengurangi hal-hal yang merugikan alam. Manusia melakukan upaya penyelamatan hutan dan makhluk hidup lain yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Namun, banyak pula manusia yang terus mencemari alam tanpa memikirkan risiko yang ditimbulkan ke depan. Meski memang tidak dapat dipungkiri bahwa mengembalikan keseimbangan alam merupakan pekerjaan yang sulit dan terkadang butuh biaya tidak sedikit, namun jika ada tekad dan komitmen,

maka insya Allah pasti dapat dilakukan untuk tujuan dan keinginan terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Untuk membatasi peningkatan suhu global dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's*).

#### **4.2.1.5 Perkembangan Teknologi Informasi**

*Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara.* Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.

#### **4.2.1.6 Ketahanan Pangan**

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga

perlu upaya-upaya yang berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).

Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bejolak secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Menurut *FAO Agricultural and Development Economics Division* (June 2006) tentang "*Food Security*", ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.

Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan dapat dilihat dari kacamata keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini masih banyak orang lapar. Salah satu ancaman serius dan ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini adalah terjadinya kelangkaan akan kecukupan pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika menjadi pengalaman yang berharga. Tingginya harga pangan menjadi salah satu sebab munculnya gerakan reformasi yang radikal. Mozambique adalah salah satu negara contoh yang mengalami persoalan pangan dan berakhir pada ketidakstabilan politik.

Adanya dampak sosial yang cukup memprihatinkan dari meroketnya harga pangan dunia menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal dan sekaligus mengancam stabilitas keamanan negara itu. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin mahal mendorong permintaan akan peningkatan pendapatan demi bertahan dalam situasi ekonomi dan politik yang sulit. Berdasarkan laporan Food Security Information Network (FSIN), 2017, kemungkinan krisis pangan dunia semakin memburuk, dan tampaknya keadaan ini akan bertambah parah di sejumlah tempat di dunia, khususnya di beberapa negara yang ketahanan pangannya rendah, sehingga berpotensi menghadapi tingginya risiko kelaparan.

Wilayah dan negara yang disinyalir memiliki potensi kelaparan yang tinggi antara lain di beberapa wilayah di Timur Laut Nigeria, Somalia, Sudan Selatan dan Yemen. Penyebab kelaparan di beberapa negara ini yakni karena adanya konflik bersenjata, kekeringan, buruknya situasi ekonomi makro, dan politik.

Sebagaimana yang diumumkan FSIN, bahwa terdapat 108 juta orang menghadapi tingkat kritis kerawanan pangan pada 2016, dan terus meningkat secara drastis dari angka di tahun sebelumnya yang tercatat sekitar hanya 80 juta orang. Penyebaran daerah rawan pangan akan terjadi di beberapa wilayah Asia lainnya menyusul Irak, Suriah, Malawi dan Zimbabwe.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diestimasi sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan.

#### **4.2.1.7 Keterbatasan Energi**

Isu internasional energy dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energy dan pengembangan energy baru terbarukan, pertambangan ilegal dan pertambangan berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian.

Sumberdaya hutan di Sulawesi Tengah masih luas sehingga aktifitas pertanian dan kehutanan akan memberi pilihan antara kebutuhan energi dan pangan sebagai suatu substitusi. Artinya adalah para pelaku ekonomi di bidang pertanian dituntut untuk cerdas memilih komoditi yang akan diproduksi. Jika pilihan pilihan ekonomi saja menjadi pertimbangan maka konflik kepentingan terjadi. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Isu global diatas akan menjadi konflik konflik lokal jika tidak diantisipasi.

#### **4.2.1.8 Dunia menghadapi ancaman Bencana Alam Global**

Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi mereka. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan sang maha pencipta. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran. Kata bencana dalam Bahasa Inggris "disaster" berasal dari kata Bahasa Latin "dis" yang bermakna "buruk" atau "kemalangan" dan "aster" yang bermakna "dari bintang-bintang". Kedua kata tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah bintang", yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk.

Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, yang disebabkan perubahan iklim. Menurut para ahli, bencana yang dimaksud mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar bahkan tsunami yang akan menghantam kawasan pantai. Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya

yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia, akibat Perubahan Iklim. Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian USA, wilayah Eropa dan Asia. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Sampai saat ini para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu per satu. Mereka belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini terjadi sekaligus. Tahun 2018, negara bagian Amerika dan sebagian Eropa mengalami musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai (badai Michael) yang paling kuat yang pernah menghantam kawasan itu. Kalau hanya memusatkan perhatian pada satu aspek saja dari bencana alam itu, mungkin kita tidak akan melihat bencana lain. Karenanya, peringatan dini membuat penilaian menyeluruh tentang dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, perlu dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban yang banyak akibat bencana. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus tergantung dari apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat.

Perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi diatas dua derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Kalau emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota-kota didunia kemungkinan akan dilanda empat jenis bencana alam sekaligus. Termasuk di antaranya adalah hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Kalau itu terjadi maka kawasan-kawasan pantai di daerah tropis akan menghadapi bencana paling besar, kata para pakar iklim.

#### **4.2.1.9 Tantangan Umum Global**

- Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, yakni kebijakan pemerintahan AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan



berdampak pada perdagangan global. Risiko ini cenderung berkurang seiring dengan hasil pemilihan umum di Prancis dan Belanda, misalnya, yang memenangkan pemimpin yang lebih pro terhadap kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.

- Risiko proses penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi RRT. Risiko yang masih dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat utang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah RRT berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko terjadinya “*hard landing*”. Kebijakan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi RRT. Risiko lain yang masih dihadapi ekonomi RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT.
- Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan dampak yang lebih besar akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris keluar dari Uni Eropa.
- Normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Setelah kenaikan FFR pada bulan Maret dan Juni tahun 2017, Bank Sentral AS diperkirakan masih akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya pada akhir tahun. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Normalisasi neraca keuangan the Fed juga diperkirakan akan mulai dilakukan sejak awal tahun 2018. Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa. Potensi normalisasi kebijakan moneter di negara- negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.
- Kenaikan harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era *commodity boom*. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak

sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.

- Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.
- Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global.

#### **4.2.2 . Telaahan Kebijakan Nasional**

##### **4.2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. RPJMNasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMN 2015-2019, dinyatakan antara lain bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman antara lain kepada RPJMN.

Agenda prioritas atau nawa cita dan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 harus dijadikan salah satu pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun agenda prioritas dan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Agenda Prioritas (Nawa cita) RPJMN 2015-2019**

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.                                           |
| 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.                                 |
| 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.                                                 |
| 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.                           |
| 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.                                                                                               |
| 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. |
| 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.                                                                |
| 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.                                                                                                                         |
| 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.                                                                                          |

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Selain amanat nawa cita dan arah kebijakan umum pembangunan nasional, pembangunan nasional dalam kurun waktu 2015-2019 juga mengamanatkan beberapa hal khususnya terkait Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 4.2.2.2 Kondisi Perekonomian Nasional

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,1% ditopang kuatnya permintaan domestik (*domestic demand*) yang tumbuh sekitar 5,5%. Investasi tumbuh kuat, yaitu sekitar 6,8%, didukung oleh tingginya investasi non-bangunan yang tumbuh sekitar 10,0% dan berlanjutnya kenaikan investasi bangunan sekitar 5,7%. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh relatif tinggi, yaitu sekitar 5,2%, didukung oleh terjaganya daya beli dan meningkatnya program sosial Pemerintah. Ekspor Oil tumbuh sekitar 6,9%. Namun, masih tingginya impor sekitar 12,3% menyebabkan permintaan eksternal (*external demand*) berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi yang membaik tercatat di sejumlah wilayah NKRI. Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,7% didukung oleh kuatnya investasi dan konsumsi, serta membaiknya kinerja sektor manufaktur. Ekonomi wilayah Sumatera diperkirakan tumbuh 4,6% dengan dukungan ekspor khususnya kelapa sawit. Ekonomi di wilayah Sulawesi serta Maluku dan Papua diperkirakan tumbuh tinggi, yaitu masing-masing 6,8% dan 9,7%, didukung oleh sektor pertambangan. Sementara itu, ekonomi wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 2,6% serta wilayah Kalimantan tumbuh 3,6% pada tahun 2018. Di samping faktor ekspor dan harga komoditas, perbedaan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dipengaruhi pula oleh intensitas investasi, khususnya infrastruktur. Perbaikan kinerja perekonomian nasional disertai oleh upaya penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang aman. Sejumlah kebijakan telah ditempuh, baik dari sisi fiskal, sektor oil, maupun moneter, meskipun masih memerlukan waktu untuk membuahkan hasil yang nyata.

Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III 2018 masih relatif tinggi sejalan dengan menguatnya permintaan domestik, tercatat sebesar 8,8 miliar dolar AS (3,37% PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar 8,0 miliar dolar AS (3,02% PDB). Kenaikan defisit transaksi berjalan antara lain dipengaruhi kenaikan impor yang berkaitan dengan proyek infrastruktur Pemerintah yang diyakini dapat meningkatkan produktivitas perekonomian ke depan. Sementara itu,

surplus neraca transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2018 cukup besar, yakni 4,2 miliar dolar AS, didukung oleh meningkatnya aliran masuk investasi asing. Secara keseluruhan tahun 2018, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap berada di level yang aman, yakni di bawah 3% dari PDB.

Nilai tukar Rupiah bergerak sesuai mekanisme pasar dan mendukung proses penyesuaian sektor eksternal dalam menopang kesinambungan perekonomian. Tekanan depresiasi Rupiah tidak terlepas dari kuatnya mata uang dolar AS dan pembalikan aliran modal asing seiring dengan tingginya ketidakpastian perekonomian global. Akan tetapi, responss kebijakan moneter dan langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia dengan koordinasi erat Pemerintah dapat meredakan tekanan depresiasi Rupiah.

Bahkan Rupiah kemudian bergerak stabil dan cenderung menguat seiring dengan kembali masuknya aliran investasi portofolio asing, akselerasi kebijakan pendalaman pasar uang, tetap kondusifnya ekonomi domestik, serta mulai meredanya ketegangan perdagangan AS dan Tiongkok.

Secara *year-to-date (ytd)* sampai dengan akhir tahun 2018, Rupiah terdepresiasi sekitar 7% atau lebih rendah dari negara-negara *emerging markets* lain seperti India, Afrika Selatan, Brasil, Rusia, dan Turki. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh posisi cadangan devisa yang cukup tinggi.

Inflasi sepanjang tahun 2018 tetap rendah dan karenanya mendukung peningkatan daya beli masyarakat. Dengan perkembangan hingga bulan Oktober, inflasi pada akhir tahun 2018 diperkirakan sekitar 3,2%, di bawah titik tengah kisaran sasaran 3,5±1%. Semua kelompok inflasi, baik inflasi inti (*core inflation*), harga pangan (*volatile food*) dan komoditas yang harganya diatur Pemerintah (*administered prices*), terkendali.

Stabilitas sistem keuangan terjaga ditopang oleh permodalan perbankan yang kuat, risiko kredit yang terkendali, meningkatnya penyaluran kredit, dan likuiditas yang cukup. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan relatif tinggi mencapai 22,9%, rasio likuiditas (*AL/DPK*) terjaga cukup sebesar 19,2%, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap rendah yaitu sebesar 2,7% (*gross*) atau 1,2% (*net*). Dari fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada September 2018 meningkat sebesar 12,7% (*yoy*), baik kredit modal kerja, investasi,

maupun konsumsi, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, yaitu penerbitan saham (*IPO dan rights issue*), obligasi korporasi, *Medium Term Notes (MTN)*, dan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* hingga September 2018 tercatat sebesar Rp168,1 triliun (gross). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin membaiknya pembiayaan korporasi dari sumber-sumber domestik baik dari perbankan maupun pasar modal.

Perekonomian domestik yang tetap baik ditopang kelancaran sistem pembayaran yang tetap terpelihara, baik dari sisi tunai maupun nontunai. Dari sisi pembayaran tunai, posisi Uang Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 10,7% (yoy) hingga akhir 2018. Sementara transaksi uang elektronik tumbuh sebesar 300,4% (yoy) tahun 2018, terutama didorong menguatnya preferensi masyarakat bertransaksi melalui platform teknologi finansial (tekfin) dan *e-commerce*.

#### **4.2.2.3 Situasi Pangan Nasional**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi (*basic needs*) dan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*), karena hal tersebut akan ikut menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Letak geografis dan luas wilayah Indonesia menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk sumber pangan yang dihasilkan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga ikut andil mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan yang akan di konsumsi.

Secara umum potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebagai pilihan konsumsi masyarakat terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya atau biasa disebut keanekaragaman hayati mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta

ekosistem dengan proses ekologi dari bentuk kehidupan yang merupakan bagiannya.

Akibat belum maksimalnya pengelolaan hasil komoditas pangan menyebabkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun setiap tahunnya angka produktivitas padi Indonesia selalu ada peningkatan antara 1-3 persen atau selama 30 tahun terakhir produksi panen padi telah meningkat dua kali lipat, bahkan untuk produksi jagung bisa meningkat sampai empat kali lipat. Sehingga pencapaian prestasi tersebut masih dirasakan belum signifikan, mengingat berdasarkan hitungan angka yang dihasilkan dari impor beberapa komoditas bahan pangan yang masuk ke Indonesia, tercatat cukup tinggi angka peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bangsa kita masih mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

Situasi pangan di Indonesia pada 2015 tidak lebih baik dibandingkan 2014. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”. Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2013-2016 dibandingkan dengan periode 2011-2013).

#### **4.2.2.4. Ketimpangan Infrastruktur**

Buruknya infrastruktur di Indonesia mengakibatkan daya saing (*competitiveness*) bangsa secara keseluruhan masih rendah. Infrastruktur berada di posisi ketiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis (*doing business*) di samping birokrasi yang tak efisien dan korupsi. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82, dibandingkan Cina urutan 74, Thailand urutan 61 dan Malaysia urutan 25. Indonesia pun jauh dari negeri jiran Singapura yang berada urutan 5.

Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur di Tanah Air yakni *Pertama*, tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72,95 persen



dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58 persen. *Ke-dua*, terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan perumahan. *Ke-tiga*, aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang belum memadai. *Ke-empat*, rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu ha/tahun. *Ke-lima*, tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta perkebunan terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. *Ke-enam*, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika belum memadai yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur broadband dan belum terhubungnya Pulau Maluku dan Papua dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. *Ke-tujuh*, urbanisasi masih tinggi, sekitar 53 persen penduduk menetap di wilayah perkotaan. Padahal daya dukung infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya di perkotaan semakin sempit, lantaran pertambahan jumlah penduduk.

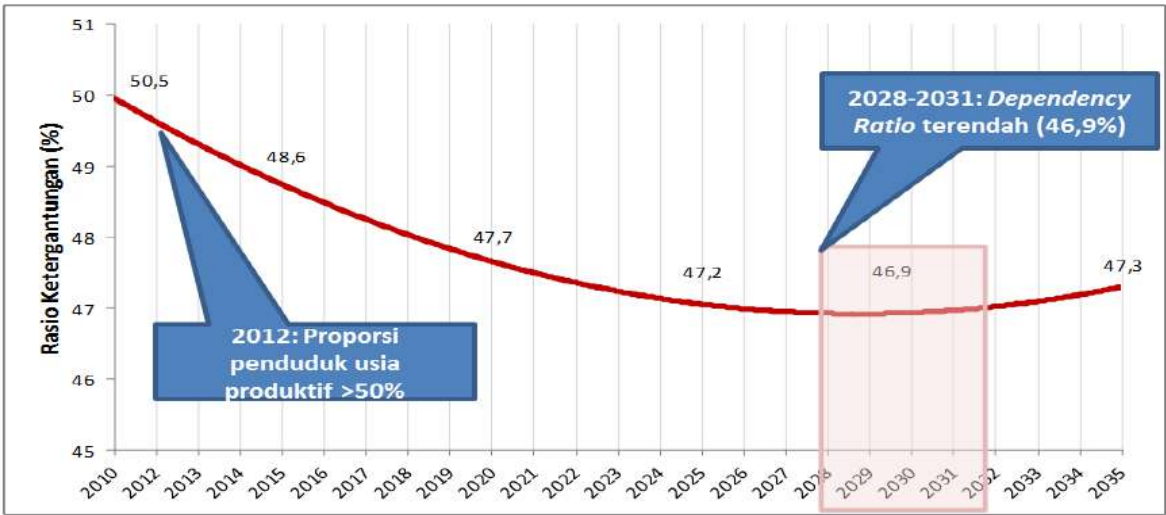
Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

#### **4.2.2.5. Bonus Demografi**

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional.

Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di seluruh Negara ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

**Gambar 4.1**  
**Proyeksi Rasio Ketergantungan Indonesia 2010-2035**



Sumber data: RPJMNas 2014-2019.

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan (*trade openness*) dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

**4.2.2.6. Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi meningkatnya perusakan/kebakaran hutan, terjadinya banjir/tanah longsor, musim kemarau yang panjang, terjadinya perburuan/perdagangan hewan dilindungi, aktivitas penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta RAN GRK sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan

iklim (*climate change*). RAN GRK merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan mencapai 41 persen jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

#### **4.2.2.7. Potensi dan Ancaman Bencana Alam**

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana, kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa-Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-

2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai Selatan Pulau Jawa, pantai Utara dan Selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain, laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang

berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

Sepanjang tahun 2018, terjadi lebih dari 2.564 bencana alam di Indonesia. Dampaknya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tren bencana 2018 masih didominasi oleh angin puting beliung (799 kasus), banjir (677 kasus), dan longsor (472 kasus). Ketiga bencana tersebut kerap disebut bencana hidrometeorologi dan menyumbang 97 persen dari total bencana alam keseluruhan. Tiga persen sisanya adalah bencana geologis. Meski begitu, bencana geologis berdampak lebih besar, terutama bencana geologis yang dipicu Tsunami dan gempa bumi.

Diperkirakan pada tahun 2019-2021 akan datang, bencana hidrometeorologi masih mendominasi 95 persen dari total bencana keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh luasnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, dan perubahan penggunaan lahan. BNPB melaporkan sekitar 110.000 hektar lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian sedang lahan kritis mencapai 14 juta hektar. Tidak ada potensi *El Nino* dan *La Nina* yang menguat, musim akan berjalan seperti normal baik musim penghujan juga musim kemarau. Puncak musim penghujan adalah Januari 2019, dengan potensi tinggi banjir besar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Gempa juga diprediksi akan terjadi sepanjang tahun 2019-2020. BNPB memperkirakan sekitar 500 gempa akan terjadi setiap bulannya di Indonesia. Ini berkaitan dengan posisi geologis Indonesia yang berada di

kawasan Cincin Api Pasifik (*ring of fire*) dan pertemuan beberapa lempeng tektonik. Sejauh ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti dimana dan kapan akan terjadi. Namun ditekankan, Indonesia bagian timur perlu mewaspadaai gempa karena kondisi geologisnya yang tergolong rumit.

Potensi tsunami disebutkan, tergantung pada gempa dan lokasi episentrumnya. Jika terjadi gempa berskala 7 SR atau lebih, dengan episentrum di kawasan laut atau samudra, maka potensi tsunami patut diwaspadai. Hampir seluruh tsunami diawali atau dipicu gempa kuat. Namun Tsunami Selat Sunda disebabkan oleh longsoran material yang dipicu Erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi ini tidaklah memicu monitor gempa secara signifikan.

Mitigasi bencana atau rangkaian pengurangan risiko bencana bisa dilakukan dengan dua hal, yakni dengan pembangunan struktural maupun non struktural. Pembangunan struktural dimulai dengan pembangunan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, shelter tsunami, sumur resapan, bendungan, dan lainnya. Sedangkan pembangunan non struktural dimulai melalui lembaga, legislasi, penataan ruang, sosialisasi, diklat, penelitian, dan lainnya.

#### **4.2.2.8. Korupsi**

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu nasional dan menjadi komitmen RPJM nasional 2014-2019 hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. *Transparency International (TI)* menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi terganggu dan upaya pemberantasan korupsi akan melemah, ketika penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan dana publik, Terutama negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat makin rentan korupsi khususnya Indonesia. Laporan TI menyebutkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang menolak transparansi dan menoleransi korupsi, menciptakan kebudayaan impunitas yang pada gilirannya mendorong meluasnya korupsi. Korupsi tidak hanya merampok hak asasi masyarakat miskin, melainkan juga menciptakan masalah pemerintahan dan instabilitas. Di Indonesia, pemerintahan kini



sedang berusaha membenahi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Revolusi mental. TI mengalang kampanye "*unmask the corrupt*" yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan membeberkan tindakan-tindakan korupsi yang selama ini terselubung.

#### **4.2.3 ISU REGIONAL SULAWESI**

Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting bagi pemngembangan wilayah Sulawesi Tengah. Pembangunan Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan bio-energi serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.

Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut.

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
2. Pengembangan industri berbasis logistik;
3. Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industry berbasis kakao, padi, jagung;
4. Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar *Pembangunan Wilayah Sulawesi adalah:*

1. Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
2. Pengembangan industri berbasis logistik;
3. Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
4. Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.



#### **4.2.4. ISU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Isu strategis Sulawesi Tengah diperlukan selagi sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Adapun isu-isu Strategis di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

##### **4.2.4.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kondisi empiris ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah. Pada tahun 2016 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 67,47 serta pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 68,11. Pembangunan mutu modal manusia di Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan, ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Sulawesi Tengah selama 2012-2017, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Berdasarkan metode baru IPM, terlihat pada tahun 2012 IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 65,00 poin pada tahun 2012, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahun hingga menjadi 70,18 poin tahun 2016. Angka IPM ini masih berada di bawah rata-rata Nasional mencapai 70,18. Dalam perspektif regional Sulampua tahun 2017, IPM Sulawesi Tengah menempati ke-5 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, angka IPM kabupaten dan kota hanya satu daerah yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Kota Palu. Untuk daerah kabupaten, tahun 2017 pada umumnya termasuk dalam kategori menengah ke atas. IPM Kota Palu mencapai 80,42 lalu diikuti Kabupaten Morowali sebesar 70,41 dan berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Poso 69,78; Kabupaten Banggai 69,00; Kabupaten Morowali Utara 67,35; Kabupaten Buol 66,69; Kabupaten Sigi 66,72; Kabupaten Donggala 64,66. Sementara itu, Kabupaten Parigi Moutong mencapai 64,09 meningkat dari sebelumnya 63,60; Kabupaten Banggai Laut 64,08; Kabupaten Banggai Kepulauan 64,07; Kabupaten Tolitoli 64,05; dan Kabupaten Tojo Una-una 62,61.

Dilihat dari sisi pencapaiannya, peningkatan tertinggi pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Indikator (indeks) ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **4.2.4.2 Angka Kemiskinan Masih Tinggi**

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami penurunan periode 2011-2018. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari 15,83% pada Tahun 2011 menjadi 14,22% pada Tahun 2017 (BPS, angka Maret) dan pada tahun 2018 sebesar 14,01%. Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 432,10 ribu penduduk pada Tahun 2011 menjadi 423,27 ribu penduduk pada Tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 420,21 ribu penduduk miskin yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 481 jiwa/tahun. Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2011-2018, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 1,61% pertahun. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada Tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,71%, sementara pada periode 2014–2018 cenderung terjadi kenaikan persentase penduduk miskin.

Tantangan kedua terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya penurunan pengeluaran kelompok 40% berpendapatan rendah dari 19,24% pada september 2016 menjadi 18,91% pada Maret 2018. Secara umum, selama periode September 2016 terhadap Maret 2018 pengeluaran konsumsi 20% dari kelompok pendapatan teratas mengalami peningkatan dari 42,72% menjadi 43,37%. Kecenderungan positif terjadi pada september 2018 karena rata-rata pengeluaran dari 20% berpendapatan tertinggi hanya menerima 42,72%. Rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah 9,54%. Pertumbuhan konsumsi antarkelompok pengeluaran bervariasi dimana kelompok 10% teratas mengalami pertumbuhan terendah, yaitu 6,92%. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi 20% kelompok pengeluaran terbawah. Rendahnya pertumbuhan

konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok 20% terbawah mengalami peningkatan.

Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih berada di atas rata-rata nasional. Selama periode tahun 2011-2017, jumlah dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan secara signifikan, yakni dari 433.660 jiwa atau 16,04 persen pada tahun 2011 berkurang menjadi 387.060 jiwa atau 13,61 persen pada tahun 2014. Pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 421.630 jiwa atau 14,66 persen dan pada September 2015 kemiskinan dapat ditekan hingga menjadi 406.340 jiwa atau 14,07 persen. Kinerja penganggulangan kemiskinan sedikit mengalami penurunan, hal ini diakibatkan semakin meningkatnya persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 413,15 jiwa atau 14,09 persen. Sementara pada tahun 2017 naik menjadi 14,22 persen atau setara 423,27 ribu jiwa. Pada Tahun 2018 statis pada posisi 14,20 persen atau setara 420,21 ribu penduduk miskin (BPS, Maret 2018).

Meningkatnya jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebagai konsekuensi dari meningkatnya akselerasi Garis Kemiskinan, yakni dari Rp.358.892,- pada September 2015 menjadi Rp.382,775,- pada September 2016. menjadi Rp.408.522,- pada Tahun 2017 dan menjadi Rp.413.785,- pada Tahun 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

#### **4.2.4.3 Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas**

Upaya pengembangan Ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota secara berkeadilan. Meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas rata-rata nasional, namun masih bertumpu pada Sektor Pertanian (Sektor Primer) dimana pertumbuhannya tinggi tetapi relatif

belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan ke depan berangsur-angsur beralih ke sektor Sekunder Industri, Perdagangan dan Jasa.

Perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah masih menunjukkan kinerja yang positif yakni pada triwulan III 2018 tumbuh 6,46% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 6,20% (yoy). Dari sisi penawaran, kenaikan pertumbuhan didorong meningkatnya pertumbuhan di Sektor Industri Pengolahan, yang berimbas pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai penyedia input (*raw material*). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ditopang dari konsumsi rumah tangga dan sektor pemerintah, serta meningkatnya kinerja ekspor. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, pertumbuhan investasi mulai mengalami deselerasi. Seiring dengan itu, impor menurun signifikan hanya tumbuh 75,32% (yoy) setelah selama semester I 2018 sempat tumbuh tinggi 275,23% (yoy). Pada triwulan IV 2018, arah pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap positif meski mengalami perlambatan (5,6-5,9% yoy), sebagai dampak dari bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, dari sisi ukuran ekonomi, Sulawesi Tengah menempati peringkat ketiga di Sulampua setelah Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua. Nilai PDRB Sulawesi Tengah terus meningkat menjadi indikasinya, yang berasal dari kinerja ekspor. Nilai ekspor Sulawesi Tengah yang terbesar di Sulampua. Pada periode Januari-Oktober 2018, total ekspor mencapai USD 4.116.30 juta, atau 30% dari total ekspor. Tingginya ekspor tersebut terutama ditopang oleh komoditas olahan nikel dan gas, yang pangsa mencapai 96,71%. Di sisi lain, impor hanya USD 1.906.16 juta, sehingga neraca perdagangan tercatat surplus sebesar USD 2.207,14 juta.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang relatif tinggi di beberapa tahun terakhir, secara struktural juga diikuti dengan proses transformasi. Dimana, pangsa Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2013 hanya 5,67%, sudah mencapai 12,09% saat ini. Sementara, pangsa Sektor Pertanian menurun dari 34,36% pada 2013 menjadi 28,75%. Dari sisi ketenagakerjaan, proses transformasi sektor tersebut juga diikuti penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi di Sektor Industri Pengolahan. Pada Tahun 2013 hanya sebesar 5,04%, kini sudah mencapai 7,57%.

Dalam konteks ekonomi, tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah saat ini adalah permasalahan pengendalian harga-harga barang dan jasa. Inflasi pada November 2018 tercatat 7,27% (yoy), atau secara akumulatif telah mencapai 5,29% (ytd). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga barang dan jasa konstruksi, seperti; jasa tukang bukan mandor, besi beton, seng, dan semen, yang disebabkan oleh tingginya permintaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk renovasi atau pembangunan hunian, dan infrastruktur pasca terjadinya bencana alam. Sementara dari sisi penawaran (*supply*), terdapat hambatan dalam proses distribusi barang dikarenakan bongkar muat barang di pelabuhan masih terkendala karena kerusakan beberapa fasilitas penunjang bongkar muat akibat tsunami.

Sementara itu, stabilitas keuangan di Sulteng masih terjaga baik. Dari sisi keuangan korporasi, potensi sumber kerentanan terpantau aman, yang terindikasi dan perkembangan harga komoditas andalan Sulteng di pasar global (nikel dan gas) dan kondisi negara mitra dagang cukup stabil. Dengan demikian, kinerja ekspor ke depan diperkirakan tetap positif. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan menurunnya harga komoditas di sektor pertanian seperti kelapa sawit dan kakao. Sementara itu, dari sisi sektor rumah tangga, kondisinya terpantau sedikit mengalami pelemahan seiring dengan terjadinya bencana. Hal ini tercermin dari hasil survei Bank Indonesia dimana indeks keyakinan konsumen Sulteng diindikasikan menurun. Sedangkan, dari sisi sektor Perbankan kondisinya tetap terjaga baik. Per November 2018, aset Perbankan tumbuh 9,09% (yoy), DPK tumbuh 14,59% (yoy) dan kredit tumbuh 9,16% (yoy), sementara *non performing loan* (NPL) masih dalam batas aman yakni 2,33%. Namun demikian, kalangan perbankan kedepan tampaknya perlu melakukan penanganan ekstra terutama dalam memperbaiki NPL di sektor perdagangan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berjalannya proses transformasi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Berdasarkan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 3,81% pada Agustus 2017 menjadi 3,43% pada Agustus 2018. Tingkat kemiskinan juga mengalami sedikit penurunan dari 14,14% pada Maret 2017 menjadi 14,01 % pada Maret 2018, seiring dengan terkendalinya inflasi (inflasi maret 2018: 2,71 % (yoy). Rasio gini Sulteng juga semakin membaik dari 0,355 di Maret 2017

menjadi 0,346 di Maret 2018. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah nilai tukar petani (NTP) yang pada November 2018 masih berada di angka 95,70.

#### **4.2.4.4 Pembangunan Infrastruktur**

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode 2013-2017 berdasarkan kondisi jalan mengalami perkembangan fluktuatif. Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi mencapai 47,70 persen dari total panjang jalan provinsi (1.643,74 km) meningkat menjadi 52,04 persen pada Tahun 2014, pada Tahun 2015 kondisi jalan mantap meningkat menjadi 57,70 persen, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 58,85 persen, selanjutnya meningkat menjadi 60,89 persen pada Tahun 2017. Di sisi lain, perkembangan jalan nasional dari sepanjang 2.373,40 km yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah kondisi jalan dalam status Kondisi Jalan Mantap pada Tahun 2017 sebesar 95,01 persen.

Kondisi ketersediaan sumber energi listrik belum mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat dan Sektor Industri, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah. Kota Palu sebagai titik simpul Pembangunan Sistem Kelistrikan Sulawesi dan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2020 melalui kegiatan 31 proyek pembangkit listrik.

Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data, menunjukkan daya terpasang sebesar 203.077 MW, daya mampu 143.893 MW, beban puncak 118.120 MW, sedangkan daya tersambung



sebesar 193.297 MVA dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen. Jika kita melihat data rasio elektrifikasi desa, maka dapat disimpulkan masih cukup banyak desa yang belum dialiri listrik, salah satu kabupaten yang rasio elektrifikasinya sangat rendah adalah Kabupaten Banggai laut, dimana dari 66 desa baru 25 desa yang dialiri listrik.

#### **4.2.4.5 Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum Dan HAM Belum Optimal**

Dari sisi tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Kondisi kelembagaan pemerintah daerah dari aspek struktur maupun fungsi belum efektif dan efisien, sehingga kualitas pelayanan publik (*public services*) belum optimal, di samping itu masih rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip *good governance*. Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2016 tentang perangkat daerah memerlukan berbagai penyesuaian (*adjustment*) termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah.

Dari sisi hukum dan penegakkan hak asasi manusia, masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai kasus hukum sehingga perlu upaya yang terus menerus untuk memperbaikinya.



#### **4.2.4.6 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan Dan Berkelanjutan Belum Optimal**

Pengelolaan sumberdaya alam yang belum memperhatikan fungsi dan tata kelola lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan (deforestasi), akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar (*illegal mining*), rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya konservasi hutan dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya.

#### **4.2.4.7 Potensi Bencana Sulawesi Tengah**

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki resiko tinggi akan multi ancaman, termasuk juga epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 yang dikeluarkan oleh BNPB, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki resiko ancaman sedang dan tinggi, termasuk juga diantaranya: Kabupaten Donggala, Palu, Morowali, Poso, Kepulauan Banggai, Banggai Toli-Toli, Buol, Tojo Una-Una, dan Sigi serta wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Wilayah yang terkena dampak akan gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018, yakni: Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong dikategorikan sebagai Kota dan Kabupaten dengan risiko multi ancaman tinggi. Pasca kejadian gempa bumi, tsunami dan likuifaksi (*triple disaster*) yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan masyarakat dan wilayah Sulawesi Tengah.

### **a. Gempa Bumi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi (*earthquake*). Penyebab utama adanya Patahan Palu Koro (Sesar Palu Koro) yang memanjang dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone dengan panjang sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada di sekitar jalur patahan sangat rawan terhadap guncangan gempa bumi yang umumnya relatif dangkal. Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara Kota Palu;
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR (scala richter). Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian sebagai akibat gempa bumi tersebut, yaitu tsunami dan likuifaksi.

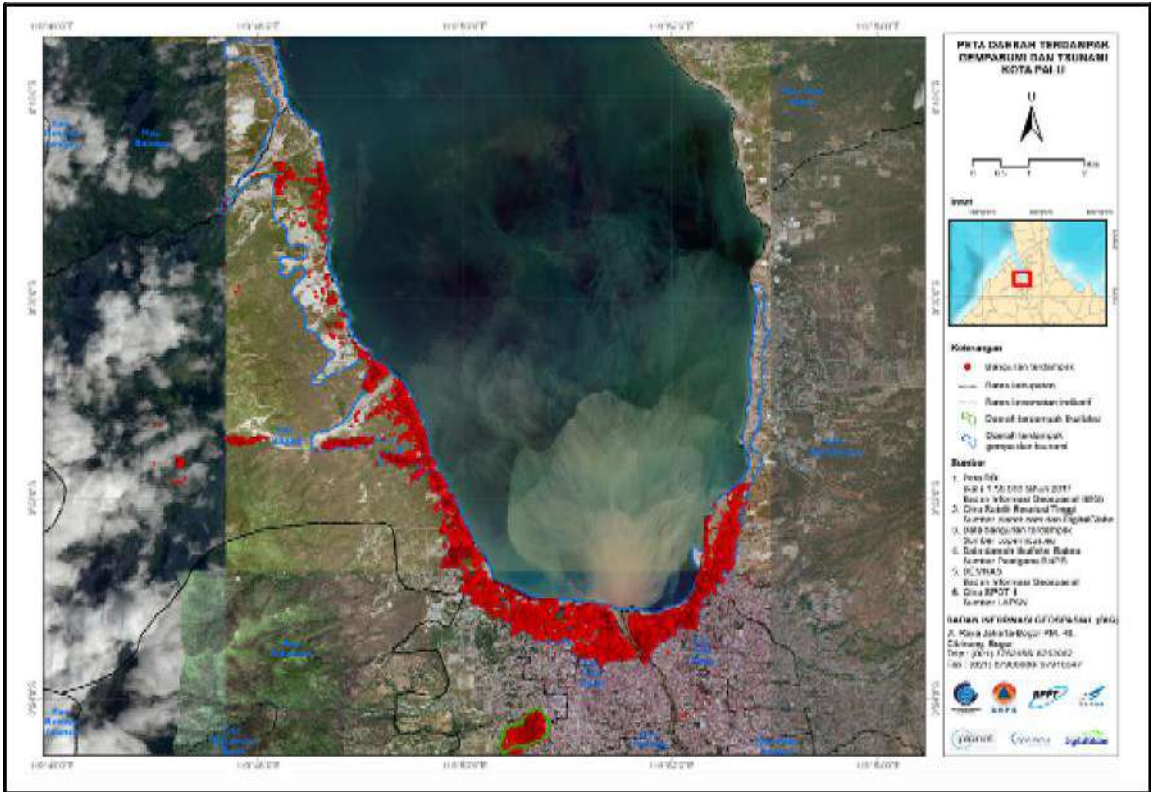
### **b. Tsunami**

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ancaman risiko tinggi akan tsunami, beberapa peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah tersebut:

1. 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai tsunami setinggi dua meter;

2. 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan 6 SR berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan tsunami setinggi 8 hingga 10 meter di Pantai Barat Kabupaten Donggala. Akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam;
3. 1 Januari 1996, gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Selat Makassar sehingga mengakibatkan tsunami di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala dan Toli-Toli.

**Gambar 4.2**  
**Wilayah Terdampak Gempa Dan Tsunami**



Sumber: BIG, LAPAN dan BNPB

**c. Likuifaksi**

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Donggala dan Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah disekitarnya mengalami fenomena mengejutkan yang disebut lukuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Kota Palu, serta Desa Jono Oge dan Desa Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblasnya wilayah tersebut. Terjadinya likuifaksi dimana hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

Sementara penghitungan dan pendataan terkait dengan wilayah terdampak yang juga termasuk jumlah bangunan yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi, masih dan sedang dilakukan oleh lembaga terkait BNPB, pada saat rencana induk ini disiapkan, data dan informasi terkait wilayah dan jumlah bangunan terdampak bencana yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang dilakukan oleh LAPAN dan beberapa mitra terkait lainnya termasuk komunitas pemetaan *Open Street Map (OSM)*, bisa memberikan gambaran secara spasial mengenai wilayah dan jumlah bangunan terdampak. Penting untuk dijadikan catatan bahwa data tentang jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan verifikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak.

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26 Km utara Kab. Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 m. Tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di empat tempat yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya Selatan.

Berdasarkan perhitungan BNPB di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.18,48 Triliun, khususnya di 4 kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (*in-situ*), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (*ex-situ*).

Juga berikutnya gempa terjadi di wilayah Kabupaten Poso berkekuatan 5,7 SR pada Maret 2019. Akibat dari gempa tersebut, puluhan rumah warga dan sejumlah rumah ibadah di beberapa desa di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Disusul kemudian pada bulan April 2019 terjadi Gempa berkekuatan 6,9 SR

mengguncang Poso. Juga pada wilayah lainnya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebuah gempa bermagnitudo 6,8 yang melanda perairan Teluk Tolo, tercatat pada tanggal 12 April 2019 Pukul 18.40 WIB. Pusat gempa berada di 85 km barat daya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kedalaman 17 km. Guncangan gempa ini dirasakan hingga Gorontalo, Palu bahkan Makassar. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami.

#### **4.2.5. Isu Strategis Daerah Lainnya**

Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan Provinsi daerah sekitar yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah, adapun hasil penelaahan Isu Strategis dan arah pembangunan dokumen RPJMD Provinsi sekitar dapat di jelaskan sebagai berikut.

#### **4.3. Penelaahan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).**

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan TPB bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.



5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Studi *Baseline* Indikator TPB (SDGs). Tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah adalah angka kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 masih berada pada angka 14,01%, sementara secara nasional 9.82%. Kondisi lainnya dimana peringkat daya saing daerah (*regional competitiveness*) menyangkut terkait IPM juga yang masih berada di bawah angka rata-rata secara nasional.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019 yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021. Agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2016-2021, berfokus pada pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. RPJMD 2016-2021 telah memuat seluruh goals yang ada pada TPB/SDGs. Sinergi antara Program Prioritas, RPJMD 2016-2021 dan TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Sinergi RPJMD 2016-2021, Prioritas Pembangunan dan TPB/SDGs**

| <b>RPJMD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Prioritas Pembangunan RPJMD</b>                                                                                                                | <b>TPB/SDGs</b>                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Percepatan Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya Hukum dan Perlindungan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat;</li> <li>- Penerapan Pengelolaan E-Government Dan E-Budgeting Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Publik;</li> <li>- Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD);</li> <li>- Optimalisasi Dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah dan Pusat.</li> </ul> | <p>1) Percepatan Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya Hukum dan Perlindungan HAM</p>                   | <p>- G16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</p>                               |
| <p>Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh NKRI Dan Kebangsaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Mediator Dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah;</li> <li>- Revitalisasi Pemberdayaan, penguatan dan perlindungan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2) Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh NKRI Dan Kebangsaan</p> | <p>- G16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>- G6 Kesetaraan Gender</p> |



| <b>RPJMD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Prioritas<br/>Pembangunan RPJMD</b>                                                                                                                        | <b>TPB/SDGs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>perempuan dan anak mempersiapkan generasi emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (FORKOPIMDA);</li> <li>- Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Penyelewengan;</li> <li>- Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI</li> </ul> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Akselerasi Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Serta Penataan Ruang Guna Konektivitas Dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah</li> <li>- Fasilitasi perumahan rakyat dan kawasan Permukiman serta penyediaan air bersih.</li> <li>- Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi Dan Komunikasi Khususnya</li> </ul>                                                                                              | <p>3) Akselerasi Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Serta Penataan Ruang Guna Konektivitas Dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G1 Tanpa Kemiskinan</li> <li>- G2 Tanpa Kelaparan</li> <li>- G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</li> <li>- G7 Energi Bersih dan Terjangkau</li> <li>- G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- G9 Industri, inovasi dan Infrastruktur</li> <li>- G10 Berkurangnya ketimpangan</li> <li>- G11 Kota dan permukiman berkelanjutan</li> </ul> |

| <b>RPJMD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Prioritas<br/>Pembangunan RPJMD</b>                                                        | <b>TPB/SDGs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pada Daerah Terpencil dan Tertinggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mendukung Percepatan Kemandirian Energi Baru Terbarukan.<br>Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik Dalam Daerah Dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbaharukan Khususnya pada Daerah Terpencil dan Tertinggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4) Mendukung Percepatan Kemandirian Energi Baru Terbarukan.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G7 Energi Bersih dan Terjangkau</li> <li>- G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- G9 Industri, inovasi dan Infrastruktur</li> <li>- G10 Berkurangnya ketimpangan</li> <li>- G11 Kota dan permukiman berkelanjutan</li> <li>- G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan</li> </ul> |
| Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dan Pendayagunaan Ekonomi Desa Serta Penataan Lembaga dan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa;</li> <li>- Desa Membangun dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;</li> <li>- Pembinaan Dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi;</li> <li>- Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul> | 5 ) Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G1 Tanpa Kemiskinan</li> <li>- G2 Tanpa Kelaparan</li> <li>- G8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- G9 Industri, Inovasi, dan infrastruktur</li> <li>- G10 Berkurangnya Kesenjangan</li> <li>- G11 Kota dan permukiman Berkelanjutan</li> </ul>                                 |
| Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan <i>Market Friendly</i> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Peran Penanaman Modal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 ) Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan <i>Market Friendly</i> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G7 Energi Bersih dan Terjangkau</li> <li>- G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- G9 Industri, inovasi</li> </ul>                                                                                                                                                               |

| <b>RPJMD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Prioritas<br/>Pembangunan RPJMD</b>                                                                                              | <b>TPB/SDGs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kawasan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Industri Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing.</li> <li>- Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Dan Transmigrasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | <p>dan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G10 Berkurangnya ketimpangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <p>Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah yang Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian,Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan).</li> <li>- Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.</li> <li>- Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata Daerah.</li> <li>- Optimalisasi Distribusi Perdagangan Dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah.</li> <li>- Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Dan Keamanan Pangan.</li> </ul> | <p>7 ) Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah yang Berdaya Saing</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G1 Tanpa Kemiskinan</li> <li>- G2 Tanpa Kelaparan</li> <li>- G7 Energi Bersih dan Terjangkau</li> <li>- G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- G9 Industri, inovasi dan Infrastruktur</li> <li>- G10 Berkurangnya ketimpangan</li> </ul> |
| <p>Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>8) Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</p>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G13. Perubahan Iklim dan dampaknya</li> <li>- G14. Melestarikan dan memanfaatkan secara</li> </ul>                                                                                                                                                      |

| <b>RPJMD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Prioritas<br/>Pembangunan RPJMD</b>                                                                                                                                                          | <b>TPB/SDGs</b>                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan dan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;</li> <li>- Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat;</li> <li>- Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | Secara Berkelanjutan                                                                                                                                                                            | berkelanjutan sumber daya kelautan<br>- G15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratn |
| <p>Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai SPM (Isi, Proses,Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Serta Manajemen Pengelolaan Yang Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal.</li> <li>- Peningkatan Kerjasama dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset dalam Mendorong Daya Saing Daerah.</li> <li>- Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca.</li> <li>- Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Peningkatan Prestasi</li> </ul> | 9 Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai SPM (Isi, Proses,Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Serta Manajemen Pengelolaan Yang Baik | - G1. Tanpa kemiskinan<br>- G4. Pendidikan Berkualitas                                                                          |

| RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prioritas Pembangunan RPJMD                                                              | TPB/SDGs                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olahraga Unggulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau dan Berkualitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Upaya Kesehatan, Sdm Kesehatan, Sarana Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.</li> <li>- Optimalisasi Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.</li> <li>- Optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan KB.</li> </ul> | 10 Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau dan Berkualitas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- G1 Tanpa Kemiskinan</li> <li>- G2 Tanpa Kelaparan</li> <li>- G3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera</li> <li>- G5 Kesetaraan Gender</li> <li>- G6. Air Bersih dan sanitasi layak</li> </ul> |

**4.4. Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dokumen perencanaan umum pembangunan daerah di tetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, elemen masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang disepakati bersama. RPJP Daerah selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi acuan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten dan Kota.

- Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan nasional dan daerah.
  2. Menjamin terdatanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah Provinsi

dan Kabupaten maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2005-2025 dilaksanakan dengan misi yang didasarkan pada kondisi, potensi, hasil pembangunan yang telah dicapai, masalah dan isu pokok pembangunan serta tantangan, kendala dan peluang pembangunan yang dihadapi maka dirumuskan visi **“Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan”**

Rangkaian kata-kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim **“JURI TERADIL”**

Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi masalah bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh Kemampuan dan kejujuran hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan cita-cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 25 tahun mendatang. Dengan menghayati dan mengamalkan makna Juri Teradil diharapkan Sulawesi Tengah menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah ini. Gambaran yang akan dicapai dalam masa jangka panjang dalam Juri Teradil tersebut adalah :

**Maju** ; adalah selalu menginginkan peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berorientasi ke masa depan, tidak mudah terpuaskan dengan kondisi yang ada selalu terdorong mencari hal - hal yang baru dan berpandangan luas, terbuka dengan hal yang baru dan nilai - nilai baru.

**Mandiri** ; adalah tidak tergantung pada sesuatu, ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar mempunyai kemampuan, prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelolah dan mengembangkan

potensi yang dimiliki

**Sejahtera** ; adalah kondisi kehidupan yang memadai dari segi ekonomi, aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam hambatan, gangguan dan kesulitan hidup, masyarakat, hidup rukun dan penuh kebersamaan dan kekeluargaan, saling mengamankan, mewujudkan kesenangan hidup bersama

**Aman**; adalah suasana kehidupan masyarakat yang harmonis sebagai satu Kebutuhan hidup, masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta sebagai sebuah sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalani tahapan pelaksanaan pembangunan dua puluh tahun ke depan.

**Berkeadilan** ; adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil, pengakuan dan mempertahankan hak-hak masyarakat memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sewenang - wenang, menghargai dan menghormati supremasi hukum dan HAM di atas segala - galanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**
2. **Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
3. **Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur wilayah**
4. **Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, dan kelembagaan masyarakat.**
5. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**

#### **4.5.. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS**

Untuk kesinambungan program dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.



Setiap tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mengacu kepada tahapan dan skala prioritas rencana pembangunan jangka panjang nasional dan mencerminkan kondisi riil dan permasalahan daerah yang hendak diselesaikan, dan menjadi prioritas dalam setiap tahapan berbeda - beda, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Sulawesi Tengah.

#### **4.5.1. PERENCANAAN TAHUN 2005**

Sebagai arahan dan pedoman dalam pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2005, telah dirumuskan Visi Pembangunan yaitu Terwujudnya Tatahan Masyarakat Madani Melalui Otonomi Daerah Dalam Format Baru Sulawesi Tengah dengan Misi yaitu Restrukturisasi, Refungsionalisasi, Revitalisasi, Reaktualisasi dan Reposisi Kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan LSM, serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan sebagai Jembatan ke Arah Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka Mewujudkan Tatahan Masyarakat Madani dalam Format Baru Sulawesi Tengah, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 – 2006, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2006.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Poldas dan Propeda secara konkrit disusun dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 -2006 yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berencana dan bertahap, melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.

Tatanan Masyarakat Madani atau secara sederhana dapat diartikan dengan masyarakat yang maju, beradab, mandiri, demokratis yang berlandaskan moral agama. Kegiatan yang lakukan tahun 2005 adalah berkonotasi pada bagian dari pengertian tatanan, yakni membangun interaksi yang saling menguntungkan menuju satu tujuan yang lebih memberi mashlahat, dengan agenda utama pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah yakni 9 (sembilan) prioritas pembangunan Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Reformasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah;

- b. Peningkatan Layanan Publik;
- c. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan.
- e. Pembangunan Supremasi Hukum dan HAM.
- f. Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- g. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- h. Pengelolaan SDA Berwawasan Lingkungan;
- i. Pengembangan Iklim Investasi dan Pembangunan Interkoneksi.

Sesuai hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2001 - 2006, bahwa melalui prioritas pembangunan telah dilaksanakan 1). Restrukturisasi, Refungsionalisasi, Revitalisasi, Reaktualisasi dan Reposisi kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terwujudnya misi I yaitu Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah; 2). Meningkatnya keikutsertaan masyarakat melalui organisasi politik, pemerintah daerah, kemasyarakatan dan LSM berdemokrasi dan secara proaktif mengawasi kerja dan kinerja pemerintah daerah dalam semangat keterbukaan dan demokratisasi sebagai indikator pencapaian misi II yaitu Pemberdayaan terhadap Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan LSM : 3). Pemberdayaan masyarakat, utamanya masyarakat lokal sehingga benar - benar menjadi subjek pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat setiap tahunnya merupakan capaian dalam mewujudkan misi III yaitu Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Dari gambaran umum capaian tersebut sebagai jembatan menuju visi yang diamanatkan oleh masyarakat yang perlu di rumuskan keberkelanjutan dari berbagai pencapaian yang telah di peroleh untuk perencanaan pembangunan jangka panjang Sulawesi Tengah.

#### **4.5.2. RPJMD KE I (2006 – 2011)**

Berdasarkan hasil pembangunan yang telah dicapai dan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah yang mengacu kepada kondisi tahun sebelumnya maka skala prioritas yang akan dicapai RPJM - I adalah terciptanya suasana aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta tidak terjadi lagi konflik antar

masyarakat dengan terciptanya harmonisasi kerukunan antar umat beragama khususnya di daerah konflik.

Terciptanya kondisi daerah dalam suasana aman dan damai sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian maka pemberdayaan ekonomi rakyat yang didukung pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Tengah, serta penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen.

Di samping itu tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu hamil serta terjangkauunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, serta tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi yang ditandai dengan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan angka melek huruf.

Bersamaan dengan hal tersebut Pemerintah daerah diharapkan benar - benar dapat memberikan pelayanan optimal pada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang ditandai dengan meningkatnya nilai - nilai keadilan, demokratis, persamaan hak dan kewajiban serta partisipasi publik dalam pembangunan semakin tinggi.

#### **4.5.3. RPJMD Ke II (2011 - 2016)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencepaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan disegala bidang, dengan menekankan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penguatan daya saing perekonomian daerah.

Meningkatnya rasa aman dan damai diikuti kemampuan daerah dalam mengelola keragaman (orientasi kelompok, etnik dan agama) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, diikuti meningkatnya kesadaran dan penegakkan hukum serta penegakkan hak asasi manusia yang didukung oleh suasana berusaha yang kondusif. Di lima tahun kedua RPJPD ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen.

Penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara terpadu terus di lakukan dengan penyediaan berbagai infrastruktur yang semakin mantap dan lengkap serta peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna

sehingga produktifitas dapat ditingkatkan.

Peningkatan kesehatan masyarakat terus diupayakan terutama status gizi masyarakat dengan mengupayakan peran gender dalam lingkungan keluarga disamping itu meningkatnya jumlah angka partisipasi sekolah menengah atas dengan lulusan siap terjun di dunia usaha.

Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Kondisi ini didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Sulawesi Tengah yang kaya akan budaya yang merupakan modal dasar bagi pengembangan pembangunan terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi asset bagi daerah.

#### **4.5.4. RPJMD Ke III (2016 – 2021)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 sebagai landasan utama penyusunan Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Sulawesi Tengah di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang didukung oleh suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi terutama tingkat menengah keatas dan kejuruan, disamping itu pula terbukanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada berkurangnya angka pengangguran.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tinggi sehingga usia harapan hidup turut meningkat, kecukupan gizi serta hilangnya penyakit seperti TBC, BCG, campak dan polio di masyarakat.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya

ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh mantapnya jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat - pusat kegiatan, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi Perdesaan dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangannya sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus di kembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasaranan dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena di dukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

#### **4.5.5. RPJMD KE IV (2021 – 2025)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberkelanjutan RPJB ke-3,RPJD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang maju, damai, sejahtera dan mandiri melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak – hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Kondisi itu didukung oleh mantapnya ketertiban dan keamanan,

terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang professional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi regional dan global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang didirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara, industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan - perusahaan baik dalam negeri maupun modal asing dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per

kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan propinsi lainnya berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan pada tahapan selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang tahap II yaitu 2025 - 2045.



**Gambar 4.3**  
**Tahapan dan Prioritas RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025**



**4.6. Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tengah.**

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka RTRWP adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan

potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Bahwa telah terjadi perubahan tatanan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembentukan daerah otonomi baru dan perubahan pemanfaatan ruang dan Pola Ruang akibat terjadinya Bencana Alam.

Hal ini menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Tujuan penataan ruang Provinsi sesuai pasal 3 adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan keamanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arah Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. Peningkatan sumberdaya lahan pertanian;
- b. Peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- c. Pengembangan potensi pariwisata;
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata;

- e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan;
- f. Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai strategi pemanfaatan ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

- (1) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya lahan pertanian terdiri atas:
  - a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
  - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
  - c. mengembangkan jenis hasil pertanian;
  - d. mengembangkan areal lahan pertanian komoditas tertentu secara selektif; dan
  - e. meningkatkan produksi komoditas peternakan dalam rangka swasembada daging.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan terdiri atas:
  - a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
  - b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap;
  - c. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
  - d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove;
  - e. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan
  - f. mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan peruntukan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.

- (3) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk pengembangan potensi pariwisata terdiri atas:
- mengembangkan promosi pariwisata;
  - mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
  - meningkatkan jalur perjalanan wisata;
  - mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan; dan
  - mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata.
- (4) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata terdiri atas:
- mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata;
  - menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata; dan
  - mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan pariwisata.
- (5) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata terdiri atas:
- meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian;
  - mengembangkan kawasan industri pertanian;
  - mengembangkan pasar hasil industri pertanian;
  - meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
  - mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian.
- (6) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
  - b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, dengan PKN, PKW, dan PKL;
  - c. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata;
  - d. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi guna mendukung sektor pertanian;
  - e. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkan kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
  - f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; dan
  - g. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (7) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi pada peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - d. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset pertahanan TNI.

#### **4.7. Penelaah Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2016-2021.**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sub urusan lingkungan hidup terdiri dari 11 sub urusan yaitu Perencanaan Lingkungan Hidup; Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS); Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keanekaragaman Hayati (Kehati); Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA); kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Pengaduan Lingkungan Hidup; Persampahan.

Terkait dengan KLHS, sebagai turunan dari UU No. 32 tahun 2009, Pemerintah menyusun PP Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada Pasal 17 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pembuatan KLHS pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD sebagai pedoman bagi daerah dalam membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD.

Isu pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi prioritas. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang menjadi akar permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil telaahan merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas ditelaah dengan cara menggunakan kriteria penilaian paling sedikit memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, intensitas dan cakupan wilayah bencana alam, status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat status jumlah penduduk miskin dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap kawasan tertentu.

Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip KLHS diantaranya: sesuai kebutuhan (*fit-for-the purpose*), berorientasi pada tujuan (*objectives-led*), didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*), komprehensif (*comprehensive-scope*), relevan dengan pembuatan keputusan (*decision relevant*), terpadu (*integrated*), transparan (*transparent*), partisipatif (*participative*), akuntabel (*accountable*), efektif biaya (*cost-effectiveness*), iteratif (*iterative*) dan menilai diri sendiri (*self-assessment*)

Secara umum pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk memberikan perbaikan materi rancangan awal Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 - 2021. Secara khusus, KLHS ini mengkaji lebih jauh tentang:

1. Pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah tahun 2016 - 2021 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2016 - 2021.
3. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 - 2021.
4. Peningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan KLHS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dengan harapan dapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, ada kalanya tidak selalu tercapai konsensus, sehingga KLHS tidak selalu mengarah pada satu kesepakatan bersama. Untuk itu proses KLHS tetap membuka peluang adanya keragaman pendapat (*"dissenting opinion"*) dan dilampirkan pada hasil akhir kesepakatan. Secara garis besar, pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam RPJMD Sulawesi Tengah hanya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan proses penyusunan kebijakan dan pembentukan regulasi karena sesungguhnya kebijakan dan regulasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Regulasi selalu berisikan kebijakan, meskipun kebijakan sendiri tidak selalu harus diwadahi dalam bentuk



regulasi. Oleh karena itu, pengintegrasian kerangka regulasi ke dalam pelaksanaan kebijakan/rencana/program, khususnya RPJMD Sulawesi Tengah merupakan keharusan, yang sekaligus untuk melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rekomendasi yang tidak bersifat pengaturan jika hasil pengkajian tidak menyarankan dilakukannya penundaan dan/atau penghentian KRP. Dengan kata lain, rekomendasi yang disarankan adalah tindakan konkrit yang dapat dilaksanakan dengan segera. Rekomendasi yang bersifat pengaturan adalah suatu keadaan dimana hasil pengkajian dan penelitian merekomendasikan dilakukannya revisi/amandemen atau bahkan pembentukan dan pencabutan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan substansi kajian yang berpotensi berisiko terhadap lingkungan. Urgensi integrasi KLHS dalam RPJMD Sulawesi Tengah sangat tinggi karena penyelenggaraan KRP bertujuan untuk mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah saat ini, maka diperlukan suatu model dan paradigma perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah ditempuh berbasis pada potensi dan kemampuan daerah yang ada, sebagai tindak lanjut dengan potensi dan kemampuan tersebut maka perlu dituangkan ke dalam visi pembangunan daerah periode 2016-2021.

Berdasarkan penilaian dan analisis data terkini, telah banyak kemajuan atau prestasi yang dicapai dalam lima tahun terakhir. Kemajuan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan daya saing serta indikator-indikator keberhasilan lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja serta kemajuan dalam sektor-sektor ekonomi lainnya.

Keberhasilan lima tahun terakhir telah membangkitkan optimisme menuju kesejajaran dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia. Pengembangan kuantitas dan kualitas SDM masyarakat Sulawesi Tengah dalam usaha mencapai daya saing daerah yang tinggi sudah *on the track*. Keberhasilan yang sudah tercapai tersebut merupakan hasil dari sinergitas dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keberhasilan pembangunan dan pemerintahan dari pasangan Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dan H. Sudarto, SH,M.Hum menjadi penggerak energi mewujudkan provinsi yang maju, mandiri dan berdaya saing. Untuk menggerakkan energi kolektif tersebut dilakukan dengan mendorong investasi terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah. Upaya mendorong investasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengembangkan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dan Kawasan Industri Morowali-Morowali Utara. Selain itu juga mendorong berkembangnya UMKM yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai periode 2011-2016 mengusung visi *Mewujudkan Sulawesi Tengah Seajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia Dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Pada Tahun 2020*. Capaian visi pada periode tersebut merupakan modal dasar yang akan **diteruskan** dan **dituntaskan** oleh gubernur terpilih yang menerima amanah dari masyarakat Sulawesi Tengah.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan.

Guna menentukan arah ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2015-2020.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMN Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah *Maju, Mandiri dan berdaya Saing*. Pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

| Visi                                                                     | Pokok-Pokok Visi  | Penjelasan Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“SULAWESI<br/>TENGAH MAJU,<br/>MANDIRI DAN<br/>BERDAYA<br/>SAING”</b> | <b>1. MAJU</b>    | Secara umum Maju berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi.<br>Makna kata Maju ditandai dengan hal-hal berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif</li><li>2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng</li><li>3. Infrastruktur yang berkembang baik</li><li>4. Kemiskinan daritahun ketahun menurun</li><li>5. Tingkat pengganguran terbuka (TPT) makin rendah</li><li>6. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik</li></ol> |
|                                                                          | <b>2. MANDIRI</b> | Kondisi masyarakat Sulteng yang mandiri dapat dijelaskan dimana masyarakat sulteng sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang/pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhannya.<br>Makna kata Mandiri ditandai dengan hal-hal berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik</li><li>2. Meningkatnya Investasi daerah</li><li>3. Meningkatnya kemandirian Desa- desa di wilayah Sulawesi Tengah</li></ol>                                                                                                           |

| Visi | Pokok-Pokok Visi        | Penjelasan Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>3. BERDAYA SAING</b> | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan. Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:<br>1. Stabilitas ekonomi makro daerah<br>2. Pemerintahan yang makin bersih dan profesional<br>3. Perencanaan pemerintah yang makin baik<br>4. Kondisi investasi dan tenaga kerja<br>5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)<br>6. Pembangunan infrastruktur meningkat |

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. *Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.*
2. *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.*
3. *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.*
4. *Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.*

5. *Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.*

### **1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM**

Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas.

Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 mengacu kepada perubahan struktur perangkat daerah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis badan dan cabang dinas, yang mengatur pengembangan dan perampingan pada beberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan program dalam mendukung misi reformasi birokrasi dan penegakan supremasi hukum.

Pembangunan bidang hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban. Ketaatan terhadap peraturan daerah yang dibarengi dengan pengawasan dan penegakannya lebih ditingkatkan untuk menciptakan keserasian dan keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat kedepannya. Sebagai contoh dalam penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah pascabencana harus diimplementasikan dari tataran pemerintah kabupaten/kota.

Pemenuhan hak asasi manusia didorong dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan perubahannya

dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018, yang mewajibkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan rekapitulasi 46 aksi daerah untuk pencapaian 6 strategi pemenuhan hak asasi manusia.

## **2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi**

Pembangunan infrastruktur meliputi pelayanan dan penyediaan infrastruktur baik transportasi, ketenagalistrikan, energi, telekomunikasi informatika, sumber daya air maupun kawasan permukiman.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2019) pencapaian dan penyediaan infrastruktur telah cukup memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun demikian masih perlu dilakukan peninjauan kembali terkait beberapa target indikator sampai dengan akhir tahun RPJMD terutama terjadinya penurunan kondisi infrastruktur pascabencana. Sebagai contoh penurunan kondisi mantap jalan yang ditargetkan pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 65 persen namun yang tercapai hanya 60,46persen dengan ruas jalan yang terdampak pada ruas jalan Biromaru-Palolo, Kalukubula-Kalawara, Kalawara-Kulawi dan beberapa ruas jalan yang ada dalam Kota Palu.

Oleh karena itu dalam pencapaian pelayanan dan penyediaan infrastruktur untuk 2 (dua) tahun sisa periode RPJMD akan lebih difokuskan pada peningkatan tingkat kemantapan jalan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ke kantong-kantong produksi, peningkatan kualitas jaringan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan, penurunan indikator lingkungan kumuh, peningkatan penyediaan air baku untuk pelayanan air minum, dan pemenuhan kebutuhan energi listrik sampai ke pelosok daerah. Sumber pendanaan pencapaian pelayanan dan infrastruktur tersebut berasal dari Hibah, Loan, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta bantuan beberapa Lembaga Non Pemerintah.



### **3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Prioritas pemerintah daerah periode 2016-2021 adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah untuk rentang waktu 2016-2018 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada akhir tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 6,3persen diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,17persen. Bencana Sulawesi Tengah yang terjadi pada Tanggal 28 September 2018 menyebabkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini telah diprediksi oleh Kedeputian Ekonomi Bappenas bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan terkoreksi sebesar 4,49persen menjadi sekitar 1,49persen. Dikarenakan upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi kondisi pascabencana Sulawesi Tengah cukup signifikan maka prediksi pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi tidak terjadi.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pascabencana pada Semester I Tahun 2019 secara riil tumbuh 6,80persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,12 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 13,15 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,16 persen. Dari sisi pengeluaran, terjadi peningkatan beberapa komponen seperti pada import Barang dan Jasa sebesar 33,05 persen, konsumsi LNPRRT sebesar 21,91 persen serta ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,16 persen.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pascabencana yaitu: upaya peningkatan investasi dan ekspor untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran karena peningkatan kesempatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan investasi. Selanjutnya meningkatkan peranan swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan Usaha kecil Menengah dan Koperasi serta perbankan.

#### **4) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia**

Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2019) pencapaian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus antara lain lemahnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, jumlah produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang masih rendah, perlu peningkatan swasembada daging, produksi perkebunan yang masih rendah (kelapa sawit, cengkeh, lada), kasus lingkungan akibat aktifitas pertambangan, izin usaha pertambangan yang perlu ditertibkan dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu untuk mendapatkan dukungan fasilitasi dikarenakan pendanaan setiap tahunnya terbatas.

Sehubungan dengan terjadinya bencana di Sulawesi Tengah berupa tsunami, likuifaksi dan gempa yang menyebabkan kerusakan potensi-potensi sumber daya alam (perikanan, pertambangan, pariwisata, pertanian dan perkebunan), diperlukan upaya pemulihan dan rehabilitasi dan penataan relokasi ruang yang dibuat dengan pendekatan berbasis bencana. Sebagai contoh, akan dilakukannya penataan alokasi ruang pesisir dan laut yang terdampak bencana tsunami dan gempa melalui revisi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037, selain itu akan dilakukan perubahan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Pertanian untuk kabupaten/kota terdampak dan revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Sulawesi Tengah.

#### **5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya**

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Sebagaimana amanat Presiden bahwa perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia, maka disinilah sector pendidikan menemukan urgensinya. Pembangunan sumber daya manusia dalam perspektif pendidikan menekankan pada dua penguatan yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja.

Pendidikan vokasi adalah masa depan Indonesia di tengah arus gelombang Revolusi Industri 4.0. Sebab era digital menjanjikan peluang besar bagi generasi *millennial* yang berjiwa dinamis dan kreatif. Keseriusan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam menyikapi hal tersebut dengan menyelesaikan penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Revitalisasi Pendidikan Vokasi 2018-2025. Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi berisi sasaran dan tahapan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan di SMK, SMA-LB

dan lembaga kursus sehingga meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam bidang kesehatan, indikator capaian utama adalah peningkatan usia harapan hidup. Pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui sejumlah pendekatan, seperti: peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA), pencegahan berat bayi lahir rendah (BBLR), pencegahan penyakit tidak menular dan menular, serta penurunan angka *stunting*.

Penurunan angka *stunting* merupakan prioritas nasional yang harus didukung oleh daerah melalui integrasi program-program dalam dokumen perencanaan. Sulawesi Tengah masih memiliki angka *stunting* yang cukup tinggi sebesar 32,3 persen pada tahun 2018, dan angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata prevalensi *stunting* nasional yang sebesar 30,8 persen. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan yaitu membentuk tim aksi penurunan *stunting* terintegrasi Sulawesi Tengah untuk melakukan supervisi pendampingan, pembinaan dan monitoring aksi penurunan *stunting* di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional dan daerah. Komitmen Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam mendorong kesetaraan gender di daerah adalah melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, Sulawesi Tengah saat ini sedang menjadi wilayah percontohan untuk penanggulangan bencana berbasis sub-klaster, termasuk di antaranya sub-klaster Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                 |           |           |                                |           |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| No                                                     | Misi                                                                                | Tujuan                                                                   | Sasaran                                                                                                                                             | Indikator Kinerja (impact)                      | Capaian   |           | Target Setelah Perubahan RPJMD |           |           |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                 | 2017      | 2018      | 2019                           | 2020      | 2021      |
| 1                                                      | 2                                                                                   | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                   | 5                                               | 6         | 7         | 8                              | 9         | 10        |
| 1                                                      | <b>Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM</b> | 1,1 Melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Pelayanan Publik | 1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.                                                                              | 1 Nilai SAKIP                                   | B         | B         | B                              | B         | BB        |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          | 1.1.2 Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah                                                                    | 2 Jumlah ASN Yg mendapatkan DIKLAT Penjenjangan |           |           |                                |           |           |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          | 1.1.3 Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat | 3 Nilai Opini Pengelolaan Keuangan (Opini BPK)  | WTP       | WTP       | WTP                            | WTP       | WTP       |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          | 1.1.4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan                   | 4 Lama Pengurusan Izin Usaha                    | 1-30 Hari | 1-25 Hari | 1-20 Hari                      | 1-15 Hari | 1-10 Hari |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 5 Lama Pengurusan Non Izin Usaha                | 1-7 Hari  | 1-6 Hari  | 1-5 Hari                       | 1-4 Hari  | 1-3 Hari  |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                      |         |       |                                |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------|---------------|---------------|
| No                                                     | Misi                                                     | Tujuan                                                              | Sasaran                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja<br>(impact)                                        | Capaian |       | Target Setelah Perubahan RPJMD |               |               |
|                                                        |                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                      | 2017    | 2018  | 2019                           | 2020          | 2021          |
| 1                                                      | 2                                                        | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                    | 6       | 7     | 8                              | 9             | 10            |
|                                                        |                                                          |                                                                     | akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat                                                                                               |                                                                      |         |       |                                |               |               |
|                                                        |                                                          | 1.2 Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi produk hukum; serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 6 Jumlah Produk Hukum (PERDA) yang Dihasilkan                        |         |       |                                |               |               |
|                                                        |                                                          |                                                                     | 2.1.2 Terlaksananya penegakan hukum secara adil dan merata                                                                                                    | 7 Angka kriminalitas yang tertangani                                 | 769     | 719   | 92,48 - 92,68                  | 92,88 - 93,28 | 93,38 - 93,78 |
|                                                        |                                                          |                                                                     | 2.1.3 Menurunnya Tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak                                                                                                     | 8 Rasio Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 86,8%   | 82,5% | 86%                            | 87%           | 90%           |
| 2                                                      | <b>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan</b> | 2,1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan               | 2.1.1 Tersedianya berbagai infrastruktur yang Merata dan                                                                                                      | 1 Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap                        | 0,609   | 0,605 | 0,610                          | 0,615         | 0,620         |

## VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

| No | Misi                                | Tujuan                                                         | Sasaran                                                                      | Indikator Kinerja (impact)                                                      | Capaian                                      |                                                                           | Target Setelah Perubahan RPJMD |                                             |                    |                    |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                                     |                                                                |                                                                              |                                                                                 | 2017                                         | 2018                                                                      | 2019                           | 2020                                        | 2021               |                    |
| 1  | 2                                   | 3                                                              | 4                                                                            | 5                                                                               | 6                                            | 7                                                                         | 8                              | 9                                           | 10                 |                    |
|    | <b>Mendukung Kemandirian Energi</b> | Mendukung Kemandirian Energi                                   | Memadai                                                                      | 2                                                                               | Presentase Rumah Layak Huni                  | 69,47                                                                     | 71,25                          | 72,35                                       | 73,45              | 74,55              |
|    |                                     |                                                                |                                                                              | 3                                                                               | Rasio Jaringan Irigasi                       | 0,707                                                                     | 0,727                          | 0.70-0.75                                   | 0.75-0.80          | >80                |
|    |                                     |                                                                | 2.1.2 Fasilitasi penyediaan energi baru terbaharukan (EBT) diseluruh wilayah | 4                                                                               | Kontribusi Sektor Pertambangan               | 12,83                                                                     | 13,44                          | 13.50-14.00                                 | 14.00-14.75        | 14.75-15.45        |
|    |                                     |                                                                |                                                                              | 5                                                                               | Rasio Elektrifikasi RT                       | 79,56persen                                                               | 91,93persen                    | 94persen                                    | 96persen           | 98persen           |
|    |                                     |                                                                |                                                                              | 6                                                                               | Jumlah IUP                                   | 170 IUP                                                                   | 247 IUP                        | 100-86 IUP                                  | 100-86 IUP         | 100-86 IUP         |
|    |                                     |                                                                |                                                                              | 7                                                                               | Pemanfaatan Sumberdaya Geologi dan Air Tanah | 6 Unit Sumur Bor                                                          | 8 Unit Sumur Bor               | 5-2 Unit Sumur Bor                          | 5-2 Unit Sumur Bor | 5-2 Unit Sumur Bor |
|    |                                     | 2,2 Meningkatkan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup | 2.2.1 Lingkungan hidup yang makin Baik                                       | 8                                                                               | IKLH                                         | 69,39                                                                     | 69,50                          | 69.50-70.00                                 | 70.00-72.00        | 70.00-72.01        |
|    |                                     |                                                                |                                                                              | 9                                                                               | TPS Per Satuan Penduduk (per 10.000)         | 262                                                                       | 262                            | 263                                         | 263-265            | 265-267            |
|    |                                     |                                                                | 3                                                                            | <b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan</b> | 3,2 <b>Pemberdayaan Ekonomi Rakyat</b>       | 3.2.1 Menurunkan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat | 10                             | Presentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan | 85,78              | 86,31              |
| 11 | Presentase Penduduk Miskin          | 14,22                                                          |                                                                              |                                                                                 |                                              |                                                                           | 13,69                          | 14.00-15.00                                 | 14.00-15.00        | 13.00-14.00        |
| 12 | Kedalaman Kemiskinan (P1)           | 2,80                                                           |                                                                              |                                                                                 |                                              |                                                                           | 2,28                           | 2,27 - 2,28                                 | 2,26 - 2,27        | 2,25 - 2,26        |



| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |      |        |         |                                                             |                                                     |                                              |                                |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| No                                                     | Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja<br>(impact)                               | Capaian                                             |                                              | Target Setelah Perubahan RPJMD |             |             |             |             |
|                                                        |      |        |         |                                                             | 2017                                                | 2018                                         | 2019                           | 2020        | 2021        |             |             |
| 1                                                      | 2    | 3      | 4       | 5                                                           | 6                                                   | 7                                            | 8                              | 9           | 10          |             |             |
|                                                        |      |        |         | 13                                                          | Keparahan Kemiskinan (P2)                           | 0,78                                         | 0,68                           | 0,67 - 0,68 | 0,66 - 0,67 | 0,65 - 0,66 |             |
|                                                        |      |        |         | 14                                                          | persentase koperasi aktif (persen)                  | 65,556                                       | 65,612                         | 65,668      | 65,724      | 65,78       |             |
|                                                        |      |        |         | 15                                                          | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)                   | 711.143                                      | 714.643                        | 718.143     | 721.643     | 725.143     |             |
|                                                        |      |        |         | 16                                                          | urutan peringkat daya saing bisnis dan tenaga kerja | 25                                           | 24                             | 23          | 22          | 21          |             |
|                                                        |      |        |         | 17                                                          | Pertumbuhan Industri (persen)                       | 7,00 - 7,20                                  | 7,20 - 7,40                    | 7,40 - 7,60 | 7,60 - 7,80 | 7,80 - 8,00 |             |
|                                                        |      |        | 3.2.2   | Meningkatnya nilai dan realisasi investasi                  | 18                                                  | Nilai Realisasi Investasi :                  |                                |             |             |             |             |
|                                                        |      |        |         |                                                             | . PMDN                                              | 1,1 T                                        | 1,2 T                          | 1,3 T       | 1,4 T       | 1,6 T       |             |
|                                                        |      |        |         |                                                             | . PMA                                               | 14.8 T                                       | 16,3 T                         | 17,7 T      | 19.7 T      | 21,7 T      |             |
|                                                        |      |        | 3.2.3   | Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi | 19                                                  | Peningkatan Indeks Pembangunan Gendern (IPG) | 71,43persen                    | 73,43persen | 75,43persen | 77,43persen | 79,43persen |
|                                                        |      |        |         |                                                             | 20                                                  | Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) | 73,33persen                    | 75,33persen | 77,37persen | 79,33persen | 81,33persen |

## VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

| No | Misi                                                                                                                                                   | Tujuan                                                                                                                                               | Sasaran                                                                                                                                      | Indikator Kinerja (impact)                        | Capaian   |           | Target Setelah Perubahan RPJMD |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                   | 2017      | 2018      | 2019                           | 2020      | 2021       |
| 1  | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                            | 5                                                 | 6         | 7         | 8                              | 9         | 10         |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 3.2.4 Meningkatkan jumlah wisatawan                                                                                                          | 21 Jumlah kunjungan Wisman (Orang)                | 18.500    | 19.000    | 19.500                         | 20.000    | 21.500     |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 22 Jumlah kunjungan Wisnus (Orang)                | 3.200.000 | 3.450.000 | 3.600.000                      | 3.800.000 | 4.000.000  |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 3.2.5 Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil                                                                                      | 23 Persentase Kabupaten Bebas dari Ketertinggalan | 38,46     | 46,15     | 53,85                          | 61,54     | 69,23      |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.                                                                                     | 24 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa          | 84 Orang  | 168 Orang | 252 Orang                      | 336 Orang | 420 Orang  |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 3.2.7 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Ekonomi                                                                               | 25 Jumlah pengeluaran per kapita Perempuan        | -         | 7,8 Juta  | 7,9 Juta                       | 8 Juta    | 8,7 Juta   |
| 4  | <b>Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia</b> | 4,1 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia. | 4.1.1 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak                                                                    | 1 Pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan (persen)  | 8-9persen | 8-9persen | 8-9persen                      | 8-9persen | 8-9persen  |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 4.1.2 Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup | 2 Luas hutan yang dikelola masyarakat             | 20.000 Ha | 40.000 Ha | 60.000 Ha                      | 80.000 Ha | 100.000 Ha |

**VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**

| No | Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>(impact)                            | Capaian                      |                              | Target Setelah Perubahan RPJMD |                              |                              |
|----|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |      |        |                                                                                                                                                      |                                                          | 2017                         | 2018                         | 2019                           | 2020                         | 2021                         |
| 1  | 2    | 3      | 4                                                                                                                                                    | 5                                                        | 6                            | 7                            | 8                              | 9                            | 10                           |
|    |      |        | 4.1.3 Optimalnya tatakelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung                                                                 | 3 Rehabilitasi hutan dan lahan (Hektar)                  | 1.385 Ha                     | 1.535 Ha                     | 1.660 Ha                       | 1.975 Ha                     | 2.245 Ha                     |
|    |      |        | 4.1.4 Terwujudnya peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan                                        | 4 Kerusakan Kawasan Hutan (persen)                       | 0,18persen (7.694,44 Ha/Thn) | 0,17persen (7.266,97 Ha/Thn) | 0,16persen (6.839,51 Ha/Thn)   | 0,15persen (6.412,04 Ha/Thn) | 0,14persen (5.984,57 Ha/Thn) |
|    |      |        | 4.1.5 Meningkatkan kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta penanggulangan bencana | 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)         | 81                           | 82                           | 83                             | 84                           | 85                           |
|    |      |        | 4.1.6 Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan                                                                                                  | 6 Nilai Tukar Petani                                     | 97,5 - 98,5                  | 102,29                       | 102,39                         | 102,50                       | 102,60                       |
|    |      |        | 4.1.7 Meningkatkan luas areal, produksi, produktivitas, keragaman, serta mutu tanaman bahan pangan dan                                               | 7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB BHB (persen) | 30,74                        | 28,69                        | 28,40                          | 28,12                        | 27,84                        |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                               |                                                   |                                                                             |                                                       |                 |                 |                                |             |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| No                                                     | Misi                                          | Tujuan                                            | Sasaran                                                                     | Indikator Kinerja<br>(impact)                         | Capaian         |                 | Target Setelah Perubahan RPJMD |             |             |
|                                                        |                                               |                                                   |                                                                             |                                                       | 2017            | 2018            | 2019                           | 2020        | 2021        |
| 1                                                      | 2                                             | 3                                                 | 4                                                                           | 5                                                     | 6               | 7               | 8                              | 9           | 10          |
|                                                        |                                               |                                                   | perkebunan                                                                  |                                                       |                 |                 |                                |             |             |
|                                                        |                                               |                                                   |                                                                             | 8 PDRB Sub Sektor Perkebunan (Rp)                     | 11.992.066      | 12.351.828      | 12.722.383                     | 13.104.055  | 13.497.176  |
|                                                        |                                               |                                                   | 4.1.8 Meningkatnya Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang berkelanjutan      | 9 Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan (persen) | 2,0 - 2,5       | 2,5 - 3,0       | 3,0 - 3,5                      | 3,5 - 4,0   | 4,0 - 4,5   |
|                                                        |                                               |                                                   | 4.1.9 Meningkatnya populasi ternak, produksi daging dan telur               | 10 Populasi Ternak Sapi (ekor)                        | 350.000-450.000 | 450.000-570.000 | 135.575                        | 163.662     | 198.339     |
|                                                        |                                               |                                                   | 4.1.10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya | 11 Nilai Tukar Perikanan (persen)                     | 106,62          | 107,15          | 107,68                         | 108,22      | 108,76      |
|                                                        |                                               |                                                   | 4.1.11 Meningkatnya manfaat sosial ekonomi di kawasan pesisir               | 12 Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (persen)     | 6,0 - 6,5       | 6,5 - 7,0       | 7,0 - 7,5                      | 7,5 - 8,0   | 8,0 - 8,5   |
| 5                                                      | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang | 5.1 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Yang | 5.1.1 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia                               | 1 IPM                                                 | 68,11           | 68,88           | 68,25-68,50                    | 68,75-69,00 | 68,50-68,76 |

## VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

| No | Misi                               | Tujuan                      | Sasaran                                                                                         | Indikator Kinerja (impact)                                   | Capaian                                                              |                                 | Target Setelah Perubahan RPJMD |             |             |             |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                    |                             |                                                                                                 |                                                              | 2017                                                                 | 2018                            | 2019                           | 2020        | 2021        |             |
| 1  | 2                                  | 3                           | 4                                                                                               | 5                                                            | 6                                                                    | 7                               | 8                              | 9           | 10          |             |
|    | <b>Berdaya Saing dan Berbudaya</b> | Berdaya Saing dan Berbudaya | 5.1.2 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat                                | 2                                                            | Usia Harapan Hidup (UHH)                                             | 67,32                           | 67,90                          | 67,95-68.00 | 68.00-68.25 | 68.25-68.50 |
|    |                                    |                             |                                                                                                 | 3                                                            | Prevalensi Stanting                                                  | 36,10                           | 35,00                          | 34.00-33.00 | 33.00-32.00 | 32.00-31.00 |
|    |                                    |                             |                                                                                                 | 4                                                            | Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)/AKI      | 196                             | 192                            | 192-188     | 188-184     | 184-180     |
|    |                                    |                             |                                                                                                 | 5                                                            | Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)/AKB | 10,5                            | 10,1                           | 10.00-9.70  | 9.70-9.40   | 9.40-9.10   |
|    |                                    |                             |                                                                                                 | 6                                                            | Persentase balita gizi buruk                                         | 0,15                            | 0,15                           | 0,14        | 0,14        | 0,14        |
|    |                                    |                             |                                                                                                 | 5.1.3 Suksesnya KB dan terciptanya keluarga yang berkualitas | 7                                                                    | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 1,65 persen                    | 1,65-1,50   | 1,65-1,51   | 1,65-1,52   |
|    |                                    |                             | 8                                                                                               |                                                              | Angka Fertilitas (TFR)                                               | 2,70                            | 2,68                           | 2,43-2,50   | 2,43-2,51   | 2,43-2,52   |
|    |                                    |                             | 5.1.4 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan terutama untuk menuntasan wajib belajar pendidikan | 9                                                            | Harapan Lama Sekolah (HRS)                                           | 12,85                           | 13,13                          | 13,13-13.45 | 13,13-13.46 | 13,13-13.47 |
|    |                                    |                             |                                                                                                 | 10                                                           | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                                         | 8,29                            | 8,52                           | 8.52-8.72   | 8.62-8.82   | 8.72-8.92   |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |      |        |                                                                               |                                                                   |         |        |                                |             |             |
|--------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|
| No                                                     | Misi | Tujuan | Sasaran                                                                       | Indikator Kinerja<br>(impact)                                     | Capaian |        | Target Setelah Perubahan RPJMD |             |             |
|                                                        |      |        |                                                                               |                                                                   | 2017    | 2018   | 2019                           | 2020        | 2021        |
| 1                                                      | 2    | 3      | 4                                                                             | 5                                                                 | 6       | 7      | 8                              | 9           | 10          |
|                                                        |      |        | dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah  | 11 Angka Melek Huruf                                              | 96,10   | 96,50  | 96.51-97.00                    | 97.01-97.25 | 97.26-97.50 |
|                                                        |      |        | 5.1.5 Memajukan peran Vokasi dalam meningkatkan SDM berdaya saing             | 12 SMK Tekraktriditasi                                            |         |        |                                |             |             |
|                                                        |      |        | 5.1.6 Mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan peran perempuan | 13 Indeks Pembangunan Gender Provinsi                             | 71,43%  | 73,43% | 75,43%                         | 77,43%      | 79,43%      |
|                                                        |      |        | 5.1.7 Meningkatnya kualitas SDM Perempuan dan anak                            | 15 Rasio Kota/Kab Layak Anak (KLA) terhadap total jumlah Kab/Kota | -       | -      | 8 %                            | 23 %        | 39 %        |

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **6.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran tersebut.

Kebijakan umum disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan jaringan infrastruktur, dan peningkatan daya saing daerah. Perumusan kebijakan umum pemerintah daerah juga bertujuan menterjemahkan strategi kebijakan pembangunan daerah ke dalam program prioritas pembangunan. Perumusan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 ini mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (*holistic-integrated*). Tahapan utama RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6.1  
Arah dan Tahapan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2005-2025



Sumber: RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yang ditempuh dalam rangka percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi                                                                                | Tujuan                                                                   | Sasaran                                                                  | Strategi                                                                       | Arah Kebijakan                                                                    |
| 1                                                      | 2                                                                                   | 3                                                                        | 4                                                                        | 5                                                                              | 6                                                                                 |
| 1                                                      | <b>Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM</b> | 1,1 Melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Pelayanan Publik | 1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien    | Meningkatkan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah         | Kebijakan pelayanan publik yang mudah (tidak birokratis)                          |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          | 1.1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah          | Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah                                    | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis (sertifikasi profesi). |
|                                                        |                                                                                     |                                                                          | 1.1.3 Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan | Memperkuat system pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Penyelenggaraan pelatihan system aparat pengawasan intern pemerintah              |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi                                                                                  | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                                                                                                                                                     | Strategi                                                                                                                                       | Arah Kebijakan                                                                                                                      |
| 1                                                      | 2                                                                                     | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                   |
|                                                        |                                                                                       |                                                                                    | kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                                                       |                                                                                    | 1.1.4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat           | Mengoptimalkan kualitas SDM pelayanan untuk meningkatkan pelayanan public yang berkualitas                                                     | Peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai kebutuhan dan tuntunan masyarakat                                                        |
|                                                        |                                                                                       | 1.2 Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)                | 2.1.1 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat                                                                                                                                                               | Sosialisasi serta evaluasi produk hukum                                                                                                        | Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah                                                       |
|                                                        |                                                                                       |                                                                                    | 2.1.2 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang hukum                                                                                                                                           | Terlaksananya penegakan hukum secara adil dan merata                                                                                           | Peningkatan kapasitas aparaturnegak Peraturan Daerah                                                                                |
| 2                                                      | <b>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi</b> |                                                                                    | 2.1.3 Menurunnya Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak                                                                                                                                                   | Meningkatkan jejaring stakeholder di bidang Hukum menyangkut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, termasuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | Peningkatan Kapasitas dan jejaring kelembagaan Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak                                    |
|                                                        |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | Pelibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak                                                                    | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Laki laki terhadap Kekerasan Berbasis Gender                                                  |
|                                                        |                                                                                       | 2,1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi | 2.1.1 Tersedianya berbagai infrastruktur yang Merata dan Memadai dalam mendukung konektivitas antar wilayah dalam provinsi serta penghubung wilayah Indonesia timur terhadap rencana pindah ibu kota negara | Membangun dan meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.                                                                               | Pembangunan baru, rehabilitasi, dan peningkatan infrastuktur darat, laut dan udara secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. |
|                                                        |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum dan sanitasi.                                                              | Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum dan sanitasi dengan harga terjangkau.                            |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                                                 |                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi                                                                            | Tujuan                                                         | Sasaran                                                                      | Strategi                                                                                                                                         | Arah Kebijakan                                                                                                                           |
| 1                                                      | 2                                                                               | 3                                                              | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                                 |                                                                |                                                                              | Menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah.                                                      | Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.                     |
|                                                        |                                                                                 |                                                                |                                                                              | Mendorong peningkatan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara.                                                                           | Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara.                                          |
|                                                        |                                                                                 |                                                                |                                                                              | Membangun fasilitas infrastruktur dan SDM teknologi informasi dan komunikasi.                                                                    | Penyediaan perangkat lunak dan keras serta SDM TIK yang berkemampuan informatika.                                                        |
|                                                        |                                                                                 |                                                                |                                                                              | Meningkatkan kualitas infrastruktur pasca bencana                                                                                                | Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan selain APBD Provinsi                                                                 |
|                                                        |                                                                                 |                                                                | 2.1.2 Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) diseluruh wilayah | - Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi.<br>- Mendukung program pemerintah dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik | Fasilitasi penyediaan, Pengembangan dan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensial, terutama sebagai sumber energi listrik. |
|                                                        |                                                                                 |                                                                |                                                                              | Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan energi alternatif.                                                            | Peningkatan hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam pengembangan energi.                                       |
|                                                        |                                                                                 | 2.2 Meningkatkan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup | 2.2.1 Lingkungan hidup yang makin Baik                                       | Mewujudkan penataan ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana                                                                   | Penyesuaian RTRW berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana                                                                    |
| 3                                                      | <b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan</b> | 3.2 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                                | 3.2.1 Menurunkan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat    | Melanjutkan program-program khusus penanganan masyarakat miskin (seperti "bedah kampung").                                                       | pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.                                                                            |
|                                                        |                                                                                 |                                                                | 3.2.2 Meningkatnya nilai dan realisasi investasi                             | Memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi para investor                                                                                       | Jaminan investasi yang aman bagi investor (safe investment).                                                                             |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi                                                                                                                                                  | Tujuan                                                                                                                                              | Sasaran | Strategi                                                                                                          | Arah Kebijakan                                                            |                                                                                                                                                  |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                                                                                                  |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 3.2.3   | Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi                                                       | Mengotimalkan peran perempuan dalam pembangun ekonomi.                    | Pemberdayaan perempuan dan peningkatan alokasi anggaran bagi kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 3.2.4   | Meningkatnya jumlah wisatawan                                                                                     | Membangun, meningkatkan dan menata destinasi wisata.                      | Peningkatan daya saing wisata Sulawesi Tengah di tingkat nasional dan internasional.                                                             |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 3.2.5   | Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil                                                                 | Mendorong terbukanya kawasan ekonomi baru.                                | Sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistim pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia.         |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                   |                                                                           | Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.                                      |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                   |                                                                           | Meningkatnya sarana prasarana daerah tertinggal.                                                                                                 |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 3.2.6   | Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.                                                          | Pelibatan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi.                      | Pembinaan ekonomi masyarakat perdesaan.                                                                                                          |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 3.2.7   | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan Ekonomi                                                          | Meningkatkan Kemampuan Ekonomi perempuan                                  | Pemberdayaan perempuan dan peningkatan alokasi anggaran bagi kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)                                               |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                   |                                                                           | Penurunan Kemiskinan berbasis perempuan                                                                                                          |
| 4                                                      | <b>Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia</b> | 4.1 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia. | 4.1.1   | Meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar hutan                                                                | Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak.      | Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak.                                                     |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 4.1.2   | Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat/ para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan hutan | Meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil hutan alam dan hutan tanaman. | Peningkatan mutu pengelolaan hutan produksi untuk meningkatkan produksi hasil hutan berkelanjutan.                                               |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |      |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                              | Strategi                                                                                                                                       | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                          |
| 1                                                      | 2    | 3      | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                       |
|                                                        |      |        | dan lingkungan hidup                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                      | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.                                                                                    | Peningkatan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.                                           |
|                                                        |      |        | 4.1.3 Optimalnya tatakelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung                                                                 | Meningkatkan teknologi dan inovasi Pokmas.                                                                                                     | Peningkatan kemampuan kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial melalui pengembangan TTG.                                                                                         |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                      | Meningkatkan jumlah unit pengelolaan Hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.                                                           | Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang tercermin pada meningkatnya kualitas hutan, lahan, air dan udara.                                                                      |
|                                                        |      |        | 4.1.4 Terwujudnya peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan                                        | Menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan (hutan masyarakat, hutan desa, hutan rakyat, dan hutan adat).                     | Pelestarian dan keekonomian dari keanekaragaman hasil hutan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.                                                                       |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                      | Melakukan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan.                                                                               | Peningkatan kesadaran hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk menurunkan pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan.                                                        |
|                                                        |      |        | 4.1.5 Meningkatnya kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanggulangan bencana | Meningkatkan kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanggulangan bencana. | Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan dunia usaha dan masyarakat tentang kebencanaan./ |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |      |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                         | Strategi                                                                                                                         | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                      | 2    | 3      | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        |      |        | 4.1.6 Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan                                                                             | Menyediakan sarana dan prasarana sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan secara memadai.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan jalur distribusi dan tata niaga komoditas hasil-hasil pertanian.</li> <li>- Subsidi pupuk dan saprodi pertanian serta peralatan tangkap perikanan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta menjamin stabilitas harga.</li> </ul> |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                 | Model pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan                     | Penciptaan masyarakat dalam pengusaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan peningkatan pendapatan daerah sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan                                                                                                                         |
|                                                        |      |        | 4.1.7 Meningkatkan luas areal, produksi, produktivitas, keragaman, serta mutu komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan | Mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi untuk peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Perluasan dan pengembangan Lahan dan kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |      |        | 4.1.8 Meningkatkan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan                                           | Mengembangkan varietas unggulan berbagai jenis pertanian tanaman pangan yang banyak diusahakan petani.                           | Perluasan dan pengembangan Lahan dan kawasan pertanian tanaman pangan.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                 | Mengembangkan varietas unggulan berbagai jenis tanaman perkebunan yang banyak diusahakan pekebun.                                | Peningkatan penyediaan jumlah dan mutu benih sesuai standar secara tepat waktu dengan harga yang terjangkau berbagai jenis tanaman perkebunan                                                                                                                                                |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                 | Optimalisasi pengelolaan lahan usaha.                                                                                            | Peningkatan penyediaan jumlah dan mutu benih sesuai standar secara tepat waktu dengan harga yang terjangkau berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan                                                                                                                                     |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |      |        |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi | Tujuan | Sasaran                                                                            | Strategi                                                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                          |
| 1                                                      | 2    | 3      | 4                                                                                  | 5                                                                                                                                    | 6                                                                                                                       |
|                                                        |      |        |                                                                                    | Meningkatkan kualitas SDM petani dan para pelaku usaha pengolah hasil pertanian.                                                     | Peningkatan mutu hasil pertanian melalui pembinaan SDM petani dan pengelola hasil pertanian tanaman pangan pasca panen. |
|                                                        |      |        |                                                                                    |                                                                                                                                      | Peningkatan mutu hasil pertanian melalui pembinaan SDM petani dan pengelola hasil perkebunan pasca panen.               |
|                                                        |      |        | 4.1.9 Meningkatkan populasi ternak, produksi daging dan telur                      | Mengembangkan populasi berbagai jenis ternak potong dan unggas meningkatkan produksi daging.                                         | Peningkatan produksi daging dan telur untuk pemenuhan pangan asal ternak potong dan unggas.                             |
|                                                        |      |        |                                                                                    | Mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis inovasi teknologi dibidang peternakan.                                                    | Pengembangan dan penelitian untuk mendapatkan bibit ternak unggul.                                                      |
|                                                        |      |        |                                                                                    | Mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis inovasi teknologi dibidang peternakan.                                                    | Peningkatan upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.                                    |
|                                                        |      |        |                                                                                    |                                                                                                                                      | Pengembangan benih tanaman untuk pakan ternak.                                                                          |
|                                                        |      |        | 4.1.10 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya        | Mendorong kemampuan dan kapasitas serta peralatan nelayan tangkap dalam upaya meningkatkan pendapatannya.                            | Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan tangkap.                           |
|                                                        |      |        |                                                                                    | Mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi perikanan budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan perikanan budidaya. | Peningkatan nilai dan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya.                                                    |
|                                                        |      |        |                                                                                    | Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan.                                                                                         | Peningkatan sarana dan prasarana di bidang perikanan.                                                                   |
|                                                        |      |        | 4.1.11 Meningkatkan manfaat sosial ekonomi di kawasan pesisir                      | Melibatkan masyarakat kawasan pesisir dalam pembangunan.                                                                             | Pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.                                                         |
|                                                        |      |        | 4.1.12 Meningkatkan ketersediaan pangan bersumber hasil-hasil komoditas pertanian, | Peningkatan hasil olahan pangan berbasis industrialisasi                                                                             | Pengembangan sentra-sentra produksi dan pusat-pusat                                                                     |



| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |                                                                           |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi                                                                      | Tujuan                                                                        | Sasaran                              | Strategi                                                                                                                                                                 | Arah Kebijakan                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| 1                                                      | 2                                                                         | 3                                                                             | 4                                    | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                           |                                                                               | perkebunan, peternakan dan perikanan | (hilirisasi)                                                                                                                                                             | pengolahan hasil pangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis industrialisasi (hilirisasi) |                                                                                                                                        |
| 5                                                      | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya | 5.1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya | 5.1.1                                | Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat                                                                                                               | Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.                                                                   | Peningkatan mutu dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.                                                                |
|                                                        |                                                                           |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | Pemerataan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.                                                                                 |
|                                                        |                                                                           |                                                                               | 5.1.2                                | Penurunan angka <i>stunting</i> pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                                                   | Meningkatkan intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan)                                               | Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat secara terintegrasi                                                                          |
|                                                        |                                                                           |                                                                               | 5.1.3                                | Suksesnya KB dan terciptanya keluarga yang berkualitas                                                                                                                   | Meningkatkan kepesertaan ber- KB bagi pasangan usia subur.                                                              | Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber- KB.              |
|                                                        |                                                                           |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                          | Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB.                                  | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya ber- KB. |
|                                                        |                                                                           |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | Advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan promosi serta pergerakan kepada masyarakat tentang fungsi keluarga.              |
|                                                        |                                                                           |                                                                               | 5.1.4                                | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. | Meningkatkan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.                                                              | Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti pendidikan.                                  |
|                                                        |                                                                           |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                          | Mempertahankan peserta didik agar tidak putus sekolah melalui pelayanan pendidikan yang baik.                           | Penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan.                                                                              |

| VISI : SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | Misi | Tujuan | Sasaran                                                                                                                                                                    | Strategi                                                                                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                       |
| 1                                                      | 2    | 3      | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                    |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas semakin baik.                                    |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.                                             |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Peningkatan standar sekolah pada setiap jenjang pendidikan.                                          |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Peningkatan akreditasi di semua jejang pendidikan.                                                   |
|                                                        |      |        | 5.1.5 Mengintegrasikan SMK, Lembaga Kursus dalam orientasi untuk pemenuhan tenaga kerja menengah untuk dunia usaha dunia industri sesuai karakteristik dan potensi wilayah | Revitalisasi kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, system sertifikasi, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, tata kelola kelembagaan | Penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna      |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK                              |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lemba ga, pemerintah daerah dan dunia usaha dunia industri |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK                                       |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Membentuk kelompok kerja pengembangan SMK                                                            |
|                                                        |      |        | 5.1.6 Mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan peran perempuan                                                                                              | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan                                                                 | Peningkatan komitmen pelaksanaan PUG dan PPRG kepada seluruh pemangku kebijakan kabupaten/kota       |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak                                       |
|                                                        |      |        | 5.1.7 Meningkatkan kualitas SDM Perempuan dan anak                                                                                                                         | Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan                                                                                                                                | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan                                                                 |
|                                                        |      |        |                                                                                                                                                                            | Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak                                                                                                                            | Peningkatan kualitas tumbuh kembang anak                                                             |

6.2 Prioritas dan Program Aksi Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama menuju pada perwujudan **“Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan *10 (sepuluh) Agenda prioritas daerah yang diimplementasikan dalam 35 (tigapuluh lima) Program Aksi yang akan dijabarkan ke dalam kegiatan Perangkat Daerah*. Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan sebagai berikut:

**PRIORITAS 1:** Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM. Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh beberapa program aksi sebagai berikut:

Tabel 6.2. Program Aksi Prioritas I

| NO | Program Aksi                                                                                               | Perangkat Daerah                                                                     | Perangkat Daerah Pendukung                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | Badan Kepegawaian Daerah<br>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                   | Dinas Perpustakaan dan kearsipan                                              |
| 2  | Penerapan Pengelolaan E-Government Dan E-Budgeting Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Publik      | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah<br>Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah | Dinas Pendapatan daerah<br>Biro Adm. Pembangunan dan SDA<br>Biro Perekonomian |
| 3  | Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)       | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah                                          | Inspektorat Daerah<br>Biro Organisasi                                         |

| NO | Program Aksi                                                                                                                  | Perangkat Daerah                                                                     | Perangkat Daerah Pendukung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4  | Optimalisasi Dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Dan Pusat | Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | Badan Pendapatan daerah    |

**PRIORITAS 2:** Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

**Tabel 6.3. Program Aksi Prioritas II**

| NO | Program Aksi                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah                                                                                                                                   | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Mediator Dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Biro Bina Administrasi Kewilayahan</li> <li>- Biro Hukum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan</li> <li>- Biro Otonomi Daerah</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 2  | Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (FORKOPIMDA). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekertariat DPRD</li> <li>- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>- Kesbangpol</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Penghubung</li> <li>- Biro Umum</li> <li>- Kesbangpol</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 3  | Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Penyelewengan.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat Daerah</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Adm. Pembangunan</li> <li>- Biro Organisasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Biro Hukum.</li> </ul>                                              | Biro Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | Perlindungan Hak Perempuan dan Anak                                                                                                                                                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>- Dinas NAKERTRANS</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Biro Kesra</li> </ul> |

**PRIORITAS 3:** Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.

**Tabel 6.4. Program Aksi Prioritas III**

| NO | Program Aksi                                                                                          | Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Bina Marga dan penataan Ruang.</li><li>- Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.</li><li>- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Perhubungan</li><li>- Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik</li></ul>                  |
| 2  | Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi Dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik</li></ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.</li><li>- Biro Adm. Kewilayahan.</li><li>- Badan Penghubung</li></ul> |

**PRIORITAS 4:** Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.

**Tabel 6.5. Program Aksi Prioritas IV**

| NO | Program Aksi                                                                                                                                        | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Pendukung             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1  | Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik Dalam Daerah Dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbaharukan Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal. | Dinas ESDM       | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**PRIORITAS 5:** Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

**Tabel 6.5. Program Aksi Prioritas V**

| No | Program Aksi                                                                                                                             | Perangkat Daerah                                   | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengembangan dan Pendayagunaan Ekonomi Desa serta Penataan Lembaga dan Fasilitasi Kerjasama Desa Dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa. | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pariwisata</li> <li>- Biro Adm. Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>- Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan</li> </ul>                                                                                                   |
| 2  | Desa Membangun Dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                      | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda     | Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Pengembangan Dan Pemberdayaan UKM Dan Koperasi                                                                                           | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Penciptaan Lapangan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja                                                                                    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                | Badan Pengembangan Sumber daya Manusia                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Pengentasan Kemiskinan Berbasis Perempuan                                                                                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>- Dinas NAKERTRANS</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Biro Kesra</li> </ul> |

**PRIORITAS 6:** Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*.

**Tabel 6.6. Program Aksi Prioritas VI**

| No. | Program Aksi                                                                                                | Perangkat Daerah                                                                                                    | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Optimalisasi Peran Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                              | Biro Adm. Perekonomian & Pembangunan                                                                                                                               |
| 2   | Pengembangan Kawasan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Industri Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Badan Penghubung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>- Biro Adm. Perekonomian &amp; Pembangu- nan.</li> </ul> |
| 3   | Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Dan Transmigrasi              | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                 | Biro Bina Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                 |

**PRIORITAS 7:** Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.

**Tabel 6.7. Program Aksi Prioritas VII**

| No | Program Aksi                                                                                         | Perangkat Daerah                                                                                                                                                | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>- Dinas Kehutanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>- Dinas Perindustrian</li> </ul> |
| 2  | Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan                                           | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>- Dinas Perindustrian</li> </ul> |
| 3  | Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata Daerah                                   | Dinas Pariwisata                                                                                                                                                | Badan Penghubung                                                                                          |



| No | Program Aksi                                                                       | Perangkat Daerah                    | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Optimalisasi Distribusi Perdagangan Dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>- Biro Adm. Perekonomian dan Pemba- ngunan</li> </ul>                  |
| 5  | Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan dan Keamanan Pangan.                | Dinas Ketahanan Pangan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.</li> <li>- Dinas Perkebunan &amp; Peternakan.</li> <li>- Dinas Perikanan dan Kelautan</li> </ul> |

**PRIORITAS 8:** Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.

**Tabel 6.8. Program Aksi Prioritas VIII**

| No | Program Aksi                                                                                                                                                                 | Perangkat Daerah                                                                                      | Perangkat Daerah Pendukung            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kehutanan</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul> | Biro Adm. Perekonomian & Pembangunan. |
| 2  | Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat                                                                                  | Dinas ESDM                                                                                            | Dinas Lingkungan Hidup                |
| 3  | Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana                                                                                                     | Badan Penanggulangan Bencana                                                                          | Dinas Sosial                          |

**PRIORITAS 9:** Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

**Tabel 6.9. Program Aksi Prioritas IX**

| No | Program Aksi                                                                                                   | Perangkat Daerah                                                             | Perangkat Daerah Pendukung                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal                                                    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br><br>Badan Pengembangan Sumber daya Manusia                     |
| 2  | Peningkatan Kerjasama Dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset Dalam Mendorong Daya Saing Daerah | Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Badan Penghubung<br><br>Badan Pengembangan Sumber daya Manusia |
| 3  | Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca                         | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,<br><br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Pariwisata                                                                                  |
| 4  | Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan                         | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |

**PRIORITAS 10:** Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

**Tabel 6.10. Program Aksi Prioritas X**

| No | Program Aksi                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Pendukung                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Optimalisasi Upaya Kesehatan, SDM, Kesehatan, Sarana Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | Dinas Kesehatan  | Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan<br>Dinas Sosial |
| 2  | Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                               | Dinas Sosial     | Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.                |

| No | Program Aksi                                        | Perangkat Daerah                                   | Perangkat Daerah Pendukung                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dan KB | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Adapun keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah yang diagendakan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.11**  
**Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA),**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

| No | Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) 2015-2019                                                                                   | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.                 | Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan         |
| 2  | Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. | Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.               |
| 3  | Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.       |                                                                                                                                                |
| 4  | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.                       | Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota. |
|    |                                                                                                                                   | Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbaharukan.                                                                                     |
|    |                                                                                                                                   | Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan                                                                          |
| 5  | Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.                                                                | Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan         |
| 6  | Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.                                                                     | Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.                                                          |

| No | Agenda Prioritas Nasional<br>(NAWA CITA) 2015-2019                                                                                                          | Prioritas Pembangunan Daerah<br>Provinsi Sulawesi Tengah<br>2016-2021                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Melakukan revolusi karakter bangsa.                                                                                                                         | Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.           |
| 8  | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. | Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly                                                       |
| 9  | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.                                                                | Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan                                                                  |
|    |                                                                                                                                                             | Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan <i>market friendly</i>                                                |
|    |                                                                                                                                                             | Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing. |
|    |                                                                                                                                                             | Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.                                                    |

### 6.3. Program Percepatan Unggulan Daerah

Program Percepatan Unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Pengembangan **UKM** melalui penjaminan **Modal Usaha Rakyat**.
- 2) **Kartu Petani Maju** (antara lain: Pupuk dan Obat-Obatan Bersubsidi).
- 3) **Kartu Nelayan Maju** (antara lain: Bahan Bakar Solar Bersubsidi).
- 4) **Kartu Buruh Maju** (antara lain: pelatihan dan pendidikan gratis).
- 5) Memberikan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 6) **Sekolah murah dan berkualitas** untuk SMU/SMA/SMK dan MA (Di luar dana BOS).
- 7) Melanjutkan **Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung** untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan kemandirian Desa.
- 8) Melanjutkan **Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur** untuk pemerataan pembangunan antarwilayah.
- 9) Fasilitasi sumber **energi baru terbarukan** bagi masyarakat.

#### **6.4. Prioritas Program Lintas Bidang dan Lintas Wilayah**

Selanjutnya Program Prioritas Lintas Bidang dan Lintas Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2021 sebagai berikut:

##### **1) Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi program penanggulangan kemiskinan berbasis **Bedah Kampung**. Program bedah kampung dilaksanakan melalui belanja tidak langsung pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.

##### **2) Program Sulteng Maju**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan untuk mensejajarkan diri dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia melalui program unggulan daerah untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan serta buruh melalui program lintas SKPD **“Program Sulteng Maju”**.

##### **3) Program Sulteng Bersaing**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja dan memiliki daya saing yang diberi nama **“Program Sulteng Bersaing”**.

##### **4) Program Sulteng Sejuta Sapi**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program dalam mendukung swasembada daging nasional melalui **“Program Sulteng Sejuta Sapi”**.

**BAB VII**

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN**

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Keterkaitan Bidang Urusan dan Perangkat Daerah Penanggungjawab**

| KODE        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN                                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 01</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>          |                                                                                            |
| 1 01 1      | Pendidikan                                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                            |
| 1 01 2      | Kesehatan                                                 | 1. Dinas Kesehatan<br>2. BLUD RSUD Undata<br>3. BLUD RSUD Madani                           |
| 1 01 3      | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                         | 1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi<br>2. Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air |
| 1 01 4      | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman                   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                         |
| 1 01 5      | Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat | 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja               |
| 1 01 6      | Sosial                                                    | Dinas Sosial Provinsi                                                                      |
| <b>1 02</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>      |                                                                                            |
| 1 02 1      | Tenaga Kerja                                              | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                        |
| 1 02 2      | Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                         |
| 1 02 3      | Pangan                                                    | Dinas Pangan Provinsi                                                                      |
| 1 02 4      | Pertanahan                                                | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                         |
| 1 02 5      | Lingkungan Hidup                                          | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi                                                            |
| 1 02 6      | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                    |
| 1 02 7      | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                     |

| KODE        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;                                     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 02 9      | Perhubungan                                                                       | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 02 10     | Komunikasi Dan Informatika                                                        | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 02 11     | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah                                               | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 02 12     | Penanaman Modal                                                                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 02 13     | Kepemudaan Dan Olah Raga                                                          | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 02 14     | Statistik                                                                         | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 02 15     | Persandian                                                                        | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 02 16     | Kebudayaan                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 02 17     | Perpustakaan                                                                      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 02 18     | Kearsipan                                                                         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1 03</b> | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 03 1      | Perencanaan                                                                       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 03 2      | Keuangan                                                                          | 1. Badan Pendapatan Daerah<br>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 03 3      | Kepegawaian;                                                                      | Badan Kepegawaian Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 03 4      | Pendidikan dan pelatihan;                                                         | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 03 5      | Penelitian dan pengembangan                                                       | Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 03 6      | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Daerah dan Perangkat Daerah, | 1. Inspektorat Daerah<br>2. Sekretariat DPRD<br>3. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Daerah</li> <li>- Wakil Kepala Daerah</li> <li>- Biro Otonomi Daerah</li> <li>- Biro Bina Administrasi Kewilayahan</li> <li>- Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan</li> <li>- Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>- Biro Organisasi</li> <li>- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>- Biro Pengadaan Barang dan</li> </ul> |



| KODE        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB                                                                                       |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                | Jasa<br>- Biro Hukum<br>- Biro Umum<br>- TU Pimpinan<br>4. Badan Penghubung<br>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
| <b>2 01</b> | <b>Urusan Pilihan</b>          |                                                                                                                        |
| 2 01 1      | Kelautan Dan Perikanan         | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                           |
| 2 01 2      | Pariwisata                     | Dinas Pariwisata.                                                                                                      |
| 2 01 3      | Pertanian                      | 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan                                         |
| 2 01 4      | Kehutanan                      | Dinas Kehutanan Provinsi                                                                                               |
| 2 01 5      | Energi Dan Sumber Daya Mineral | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral                                                                                   |
| 2 01 6      | Perdagangan                    | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                                                                    |
| 2 01 7      | Industri                       | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                                                                    |
| 2 01 8      | Ketransmigrasian               | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                    |

Selanjutnya matriks program masing-masing perangkat daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Perangkat Daerah: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 7.2 Matriks Program Menurut Perangkat Daerah

| Kode                            |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan         | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                       | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                   |                   |     |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |     |                | PD Penangung Jawab              |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------------|
|                                 |   |                                                                      |                                                                            | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |               | Target            |                   | Rp  |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                |     |                |                                 |
|                                 |   |                                                                      |                                                                            | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp            |                   |                   |     |               | Target     | Rp            | Target     | Rp            |                                          | Target         | Rp  |                |                                 |
|                                 |   |                                                                      |                                                                            |                                                       |                    |                        |                    |                                               |               | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |     |               |            |               |            |               |                                          |                |     |                |                                 |
| 01                              |   | URUSAN WAJIB<br><br>BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN                       |                                                                            |                                                       |                    |                        |                    |                                               |               |                   |                   |     |               |            |               |            |               |                                          |                |     |                |                                 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |   |                                                                      |                                                                            |                                                       |                    |                        |                    |                                               |               |                   |                   |     |               |            |               |            |               |                                          |                |     |                |                                 |
|                                 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 96,76                                                 | 3.417.108.075      | 100                    | 3.249.434.105      | 60                                            | 3.697.621.717 | 80                | 4.079.273.307     | 80  | 4.079.273.307 | 100        | 5.434.781.416 | 100        | 6.249.998.628 | 100                                      | 19.766.561.461 | 100 | 22.731.545.681 | Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
|                                 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 96,76                                                 | 2.115.052.200      | 100                    | 1.941.495.416      | 60                                            | 1.864.813.835 | 80                | 2.035.184.344     | 80  | 3.500.000.000 | 100        | 2.202.699.694 | 100        | 2.533.104.648 | 100                                      | 8.986.629.814  | 100 | 10.334.624.286 | Sub Bagian Keuangan dan Aset    |
|                                 | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 96,76                                                 | 202.989.100        | 100                    | 454.913.282        | 60                                            | 385.131.293   | 80                | 420.317.119       | 80  | 483.364.686   | 100        | 454.913.282   | 100        | 523.150.274   | 100                                      | 1.861.493.456  | 100 | 2.140.717.474  | Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
|                                 | 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja & Keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan             | 93,42                                                 | 483.751.400        | 100                    | 1.495.392.400      | 100                                           | 366.791.697   | 100               | 400.302.006       | 100 | 460.347.307   | 100        | 433.250.732   | 100        | 498.238.342   | 100                                      | 2.598.467.751  | 100 | 2.988.237.914  | Sub Bagian Keuangan dan Aset    |
|                                 | 5 | Program Fasilitasi Tugas Pembantuan Pendidikan                       | - APK PAUD (%)                                                             | 97,68                                                 | 2.961.000.926      | 85,00                  | 1.915.181.046      | 81,00                                         | 4.279.236.469 | 83,00             | 4.670.190.074     | 100 | 5.370.718.585 | 85,00      | 5.054.591.874 | 100        | 5.812.780.655 | 85,00                                    | 20.767.486.013 | 100 | 23.882.608.915 | Bidang PTK dan Tugas Pembantuan |
|                                 |   |                                                                      | - Angka Rata-rata Lama Sekolah                                             | 8,30                                                  | -                  | 8,50                   | -                  | 8,10                                          | -             | 8,30              | -                 | -   | -             | 8,50       | -             | -          | -             | 8,50                                     | -              | -   | -              |                                 |
|                                 |   |                                                                      | - Penduduk Usia 15 Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)              | 98,77                                                 | -                  | 99,30                  | -                  | 98,23                                         | -             | 98,77             | -                 | -   | -             | 99,30      | -             | -          | -             | 99,30                                    | -              | -   | -              |                                 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                               | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |    |                 | PD Penanggung Jawab             |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----|-----------------|---------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                    | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |                | Target            |                   | Rp                |                   | Tahun 2020        |                   | Tahun 2021        |                   |                                          |                 |    |                 |                                 |
|      |                                                              |                                                                                                    | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp             | Target            | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp                | Target                                   | Rp              |    |                 |                                 |
|      |                                                              |                                                                                                    |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |                                          |                 |    |                 |                                 |
| 6    | Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas                   | - % Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA;                                                             | 15                                                    | 36.292.718.870     | 86                     | 22.332.987.274     | 82                                            | 22.043.162.545 | 15                | 24.057.039.069    | 20                | 27.665.594.929    | 86                | 26.037.166.000    | 25                | 29.942.740.900    | 90                                       | 116.042.215.918 | 25 | 133.448.548.306 | Bidang Pembinaan SMA            |
|      |                                                              | - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK;                                                         | 78                                                    | -                  | 80                     | -                  | 75                                            | -              | 78                | -                 | -                 | -                 | 80                | -                 | -                 | -                 | 80                                       | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - APK SMA/SMK/MA;                                                                                  | 87,00                                                 | -                  | 89,00                  | -                  | 85,08                                         | -              | 87,00             | -                 | -                 | -                 | 89,00             | -                 | -                 | -                 | 89,00                                    | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - APM SMA/SMK/MA;                                                                                  | 73,50                                                 | -                  | 78,00                  | -                  | 71,00                                         | -              | 73,50             | -                 | -                 | -                 | 78,00             | -                 | -                 | -                 | 78,00                                    | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK;                                                                  | 1,90                                                  | -                  | 1,50                   | -                  | 1,95                                          | -              | 1,90              | -                 | -                 | -                 | 1,50              | -                 | -                 | -                 | 1,50                                     | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK;                                                                 | 99,00                                                 | -                  | 99,00                  | -                  | 99,00                                         | -              | 99,00             | -                 | -                 | -                 | 99,00             | -                 | -                 | -                 | 99,00                                    | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - Persentase SMA/SMLB yang memenuhi SPM                                                            | 20,00                                                 | -                  | 25,00                  | -                  | 15,00                                         | -              | 20,00             | -                 | -                 | -                 | 25,00             | -                 | -                 | -                 | 25,00                                    | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - Persentase Kecamatan yang memiliki minlma 1 Sekoah Menengah                                      | 40,00                                                 | -                  | 45,00                  | -                  | 35,00                                         | -              | 40,00             | -                 | -                 | -                 | 45,00             | -                 | -                 | -                 | 45,00                                    | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              | - Persentase guru SMA/SMALB,Ber kualifikasi Akademik S2 dan Bersertifkat Pendidik                  | 20 orang                                              | -                  | 25 orang               | -                  | 15 orang                                      | -              | 20 orang          | -                 | -                 | -                 | 25 orang          | -                 | -                 | -                 | 25 orang                                 | -               | -  | -               |                                 |
|      |                                                              |                                                                                                    |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                          |                 |    |                 |                                 |
| 7    | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan            | - Persentase guru SMA/SMALB, SMK, berkualifikasi akademik S2/ dan bersertifikasi pendidik          | 55                                                    | 4.557.955.589      | 57,50%                 | 2.301.252.637      | 50%                                           | 33.585.077.587 | 55                | 36.653.430.377    |                   | 42.151.444.934    | 57,50%            | 39.670.362.112    |                   | 45.620.916.429    | 60%                                      | 169.306.920.048 |    | 194.702.958.055 | Bidang PTK dan Tugas Pembantuan |
|      |                                                              | - Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Peningatan Kompetensi Keahlian Khusus | 20 orang                                              | -                  | 25 orang               | -                  | 15 orang                                      | -              | 20 orang          | -                 | -                 | -                 | 25 orang          | -                 | -                 | -                 | 25 orang                                 | -               | -  | -               |                                 |

| Kode  |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |                   |                   |        |                 |                   |                   |        |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |        |                 | PD Penanggung Jawab                |
|-------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------|
|       |    |                                                              |                                                                              | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |                 | Tahun 2020        |                   |        |                 | Tahun 2021        |                   |        |                 |                                          |                 |        |                 |                                    |
|       |    |                                                              |                                                                              | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp              | Target            | Rp                | Target | Rp              | Target            | Rp                | Target | Rp              | Target                                   | Rp              | Target | Rp              |                                    |
|       |    |                                                              |                                                                              |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                 | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |        |                 | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |        |                 |                                          |                 |        |                 |                                    |
|       | 8  | Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan               | - Angka Melanjutkan dari SMP ke SMK;                                         | 84                                                    | 79.021.305.743     | 86                     | 31.164.584.144     | 82                                            | 22.043.162.545  | 84                | 24.057.039.069    | 20     | 27.665.594.929  | 86                | 26.037.166.000    | 25     | 29.942.740.900  | 90                                       | 116.042.215.918 | 25     | 133.448.548.306 | Bidang Pembinaan SMK               |
|       |    |                                                              | - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK;                                   | 78                                                    | -                  | 80                     | -                  | 75                                            | -               | 78                | -                 | -      | -               | 80                | -                 | -      | -               | 80                                       | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - APK SMA/SMK/MA;                                                            | 87,00                                                 | -                  | 89,00                  | -                  | 85,08                                         | -               | 87,00             | -                 | -      | -               | 89,00             | -                 | -      | -               | 89,00                                    | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - APM SMA/SMK/MA;                                                            | 73,50                                                 | -                  | 78,00                  | -                  | 71,00                                         | -               | 73,50             | -                 | -      | -               | 78,00             | -                 | -      | -               | 78,00                                    | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK;                                            | 1,90                                                  | -                  | 1,50                   | -                  | 1,95                                          | -               | 1,90              | -                 | -      | -               | 1,50              | -                 | -      | -               | 1,50                                     | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK;                                           | 99,00                                                 | -                  | 99,00                  | -                  | 99,00                                         | -               | 99,00             | -                 | -      | -               | 99,00             | -                 | -      | -               | 99,00                                    | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - Sekolah Menengah Menerapkan Program Penyelarasan dengan Dunia Kerja        | 50                                                    | -                  | 55                     | -                  | 45                                            | -               | 50                | -                 | -      | -               | 55                | -                 | -      | -               | 60                                       | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - Persentase guru SMK, Berkualifikasi Akademik S2 dan Bersertifikat Pendidik | 30 orang                                              | -                  | 35 orang               | -                  | 25 orang                                      | -               | 30 orang          | -                 | -      | -               | 35 orang          | -                 | -      | -               | 40 orang                                 | -               | -      | -               |                                    |
|       | 9  | Program Manajemen Pelayanan pendidikan                       | - Rasio Ketersediaan Sekolah thdp Penduduk Usia Sekolah :                    |                                                       | 2.033.383.204      |                        | 2.861.796.181      |                                               | 7.012.250.797   |                   | 7.652.894.227     | 100    | 8.800.828.361   |                   | 8.282.801.421     | 100    | 9.525.221.634   |                                          | 36.669.472.328  | 100    | 42.169.893.178  | Sub Bagian Perencanaan dan Program |
|       |    |                                                              | - SD/MI                                                                      | 0,954                                                 | -                  | 0,956                  | -                  | 0,952                                         | -               | 0,954             | -                 | -      | -               | 0,956             | -                 | -      | -               | 0,956                                    | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - SMP/MTs                                                                    | 0,400                                                 | -                  | 0,450                  | -                  | 0,336                                         | -               | 0,400             | -                 | -      | -               | 0,450             | -                 | -      | -               | 0,450                                    | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - Rasio Murid Terhadap Guru :                                                |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                 |                   |                   |        |                 |                   |                   |        |                 |                                          |                 |        |                 |                                    |
|       |    |                                                              | - SD/MI                                                                      | 12                                                    | -                  | 11                     | -                  | 12                                            | -               | 12                | -                 | -      | -               | 11                | -                 | -      | -               | 11                                       | -               | -      | -               |                                    |
|       |    |                                                              | - SMP/MTs                                                                    | 13                                                    | -                  | 12                     | -                  | 13                                            | -               | 13                | -                 | -      | -               | 12                | -                 | -      | -               | 12                                       | -               | -      | -               |                                    |
|       | 10 | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus                 | - persentase penduduk mengikuti Pendidikan Luar Biasa (%) :                  | 90%                                                   | 9.408.254.554      | 100%                   | 8.852.419.837      | 80%                                           | 1.210.412.601   | 90%               | 1.320.996.621     | 20%    | 1.519.146.114   | 100%              | 1.429.727.416     | 25%    | 1.644.186.528   | 100%                                     | 8.306.017.576   | 25%    | 9.551.920.212   | Bidang Pembinaan PKPLK             |
|       | 11 | Program Kebudayaan                                           | - Persentase Benda,Situs dan cagar budaya yang dilestarikan                  | 90%                                                   | 2.248.270.795      | 100%                   | 2.530.675.190      | 80%                                           | 4.435.207.001   | 90%               | 4.812.788.944     | 90%    | 5.534.707.286   | 100%              | 5.179.203.884     | 100%   | 5.956.084.467   | 100%                                     | 22.456.126.220  | 100%   | 25.824.545.153  | Bidang kebudayaan                  |
| TOTAL |    |                                                              |                                                                              |                                                       | 142.741.790.456    |                        | 79.100.131.512     |                                               | 100.922.868.089 |                   | 110.159.455.157   |        | 127.231.020.439 |                   | 120.216.663.832   |        | 138.249.163.407 |                                          | 522.803.606.503 |        | 601.224.147.479 |                                    |

| Kode                      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                  | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                      |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                                   |                   |               |     |               |      |               |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |      |                |      | PD Penanggung Jawab |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----|---------------|------|---------------|--------|------------------------------------------|------|----------------|------|---------------------|--------------|
|                           |                                                              |                                                       | Tahun 2017                                                                 |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |     | Target<br>Rp<br>Sebelum Perubahan |                   | Tahun 2020    |     | Tahun 2021    |      |               |        |                                          |      |                |      |                     |              |
|                           |                                                              |                                                       | Capaian Target Kinerja                                                     | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp  |                                   |                   | Target        | Rp  | Target        | Rp   |               | Target | Rp                                       |      |                |      |                     |              |
|                           |                                                              |                                                       |                                                                            |                    |                        |                    |                                               |     | Sebelum Perubahan                 | Sebelum Perubahan |               |     |               |      |               |        |                                          |      |                |      |                     |              |
| UPT. TKIP                 |                                                              |                                                       |                                                                            |                    |                        |                    |                                               |     |                                   |                   |               |     |               |      |               |        |                                          |      |                |      |                     |              |
|                           | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran            | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 80%                | 394.545.794            | 100%               | 262.934.174                                   | 60% | 1.197.734.909                     | 80%               | 1.310.649.485 | 80% | 1.507.246.908 | 100% | 1.425.400.680 | 100%   | 1.639.210.781                            | 100% | 5.767.724.409  | 100% | 6.632.883.071       | TU UPT. TKIP |
|                           | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur     | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 80%                | 398.683.400            | 100%               | 146.272.496                                   | 60% | 2.172.146.091                     | 80%               | 2.370.594.658 | 80% | 2.726.183.857 | 100% | 2.565.717.521 | 100%   | 2.950.575.149                            | 100% | 9.857.119.697  | 100% | 11.335.687.652      | TU UPT. TKIP |
|                           | 3                                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur    | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 80%                | -                      | 100%               | -                                             | 60% | 299.546.534                       | 80%               | 326.913.285   | 80% | 375.950.278   | 100% | 353.821.409   | 100%   | 406.894.621                              | 100% | 1.534.390.366  | 100% | 1.764.548.921       | TU UPT. TKIP |
|                           | 4                                                            | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | - Tingkat Capaian Wajar Dikdas 9 Tahun                                     | 80%                | 1.119.983.395          | 100%               | 429.595.914                                   | 60% | 3.982.355.412                     | 80%               | 4.346.185.786 | 80% | 4.998.113.654 | 100% | 4.703.918.901 | 100%   | 5.409.506.736                            | 100% | 18.750.875.984 | 100% | 21.563.507.381      |              |
|                           | TOTAL                                                        |                                                       |                                                                            |                    | 1.913.212.589          |                    | 838.802.584                                   |     | 7.651.782.947                     |                   | 8.354.343.214 |     | 9.607.494.696 |      | 9.048.858.511 |        | 10.406.187.287                           |      | 35.910.110.456 |      | 41.296.627.025      |              |
| UPT. PENELIAAN PENDIDIKAN |                                                              |                                                       |                                                                            |                    |                        |                    |                                               |     |                                   |                   |               |     |               |      |               |        |                                          |      |                |      |                     |              |
|                           | 1                                                            | Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran             | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 80%                | 313.118.710            | 100%               | -                                             | 60% | 1.481.387.144                     | 80%               | 1.619.384.319 | -   | -             | 100% | 1.945.518.466 | -      | -                                        | 100% | 6.864.020.945  | -    | -                   |              |
|                           | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur     | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 80%                | 46.276.720             | 100%               | -                                             | 60% | 903.168.605                       | 80%               | 985.682.630   | -   | -             | 100% | 1.066.813.841 | -      | -                                        | 100% | 4.132.121.518  | -    | -                   |              |
|                           | 3                                                            | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                | - Terolptanya Manajemen Layanan Pendidikan                                 | 80%                | 2.284.583.400          | 100%               | -                                             | 60% | 3.442.865.277                     | 80%               | 3.757.407.509 | -   | -             | 100% | 4.066.678.479 | -      | -                                        | 100% | 17.460.413.511 | -    | -                   |              |
|                           | TOTAL                                                        |                                                       |                                                                            |                    | 2.643.978.830          |                    | -                                             |     | 5.827.421.026                     |                   | 6.362.474.457 |     | -             |      | 7.079.010.786 |        | -                                        |      | 28.456.555.974 |      | -                   |              |
| UPT. MUSEUM               |                                                              |                                                       |                                                                            |                    |                        |                    |                                               |     |                                   |                   |               |     |               |      |               |        |                                          |      |                |      |                     |              |
|                           | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran            | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 80%                | 104.598.828            | 100%               | -                                             | 60% | 1.481.387.144                     | 80%               | 1.619.384.319 | -   | -             | 100% | 1.945.518.466 | -      | -                                        | 100% | 6.864.020.945  | -    | -                   |              |
|                           | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur     | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 80%                | 160.726.750            | 100%               | -                                             | 60% | 903.168.605                       | 80%               | 985.682.630   | -   | -             | 100% | 1.066.813.841 | -      | -                                        | 100% | 4.132.121.518  | -    | -                   |              |

| Kode                                  |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                  | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                   |                   |                   |                   |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |      |                | PD Penangung Jawab |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|------|----------------|--------------------|
|                                       |   |                                                              |                                                                                                       | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |               | Target            |                   | Rp                |                   | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                |      |                |                    |
|                                       |   |                                                              |                                                                                                       | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp            |                   |                   |                   |                   | Target     | Rp            | Target     | Rp            |                                          | Target         | Rp   |                |                    |
|                                       |   |                                                              |                                                                                                       |                                                       |                    |                        |                    |                                               |               | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |            |               |            |               |                                          |                |      |                |                    |
|                                       | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur           | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                            | 80%                                                   | 88.350.100         | 100%                   | -                  | 60%                                           | 299.546.534   | 80%               | 326.913.285       | -                 | -                 | 100%       | 353.821.409   | -          | -             | 100%                                     | 1.534.390.366  | -    | -              |                    |
|                                       | 4 | Program Peningkatan dan Pengembangan Museum                  | - Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Dilindungi dan dlpelihara                                       | 80%                                                   | 1.074.308.750      | 100%                   | -                  | 60%                                           | 3.442.865.277 | 80%               | 3.757.407.509     | -                 | -                 | 100%       | 4.066.678.479 | -          | -             | 100%                                     | 17.460.413.511 | -    | -              | -                  |
| TOTAL                                 |   |                                                              |                                                                                                       |                                                       | 1.427.984.428      |                        | -                  |                                               | 6.126.967.560 |                   | 6.689.387.742     |                   | -                 |            | 7.432.832.195 |            | -             |                                          | 29.990.946.341 |      | -              |                    |
| UPT. TAMAN BUDAYA                     |   |                                                              |                                                                                                       |                                                       |                    |                        |                    |                                               |               |                   |                   |                   |                   |            |               |            |               |                                          |                |      |                |                    |
|                                       | 1 | Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                        | 80%                                                   | 358.172.540        | 100%                   | -                  | 60%                                           | 1.481.387.144 | 80%               | 1.619.384.319     | -                 | -                 | 100%       | 1.945.518.466 | -          | -             | 100%                                     | 6.864.020.945  | -    | -              |                    |
|                                       | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                       | 80%                                                   | 1.651.109.250      | 100%                   | -                  | 60%                                           | 903.168.605   | 80%               | 985.682.630       | -                 | -                 | 100%       | 1.066.813.841 | -          | -             | 100%                                     | 4.132.121.518  | -    | -              |                    |
|                                       | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur           | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bldangnya                            | 80%                                                   | -                  | 100%                   | -                  | 60%                                           | 299.546.534   | 80%               | 326.913.285       | -                 | -                 | 100%       | 353.821.409   | -          | -             | 100%                                     | 1.534.390.366  | -    | -              |                    |
|                                       | 4 | Program Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman | - Jumlah Fasilitas Sarana Pengembangan, Pendalaman Pagelaran Seni Budaya dan Dokumentasi Karya Budaya | 80%                                                   | 1.263.822.315      | 100%                   | -                  | 60%                                           | 3.442.865.277 | 80%               | 3.757.407.509     | -                 | -                 | 100%       | 4.066.678.479 | -          | -             | 100%                                     | 17.460.413.511 | -    | -              |                    |
| TOTAL                                 |   |                                                              |                                                                                                       |                                                       | 3.273.104.105      |                        | -                  |                                               | 6.126.967.560 |                   | 6.689.387.742     |                   | -                 |            | 7.432.832.195 |            | -             |                                          | 29.990.946.341 |      | -              |                    |
| UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI |   |                                                              |                                                                                                       |                                                       |                    |                        |                    |                                               |               |                   |                   |                   |                   |            |               |            |               |                                          |                |      |                |                    |
|                                       | 1 | Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI                      | -                                                     | -                  | -                      | 478.220.325        | 60%                                           | 2.962.774.288 | -                 | -                 | 80%               | 3.238.768.637     | -          | -             | 100%       | 3.891.036.933 | -                                        | -              | 100% | 13.728.041.890 |                    |
|                                       | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI                 | -                                                     | -                  | -                      | 3.776.075.000      | 60%                                           | 1.806.337.211 | -                 | -                 | 80%               | 1.971.365.260     | -          | -             | 100%       | 2.133.627.682 | -                                        | -              | 100% | 8.264.243.037  |                    |

| Kode                               |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                             | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |        |                |            |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |        |               | PD Penanggung Jawab |                   |                   |  |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                    |   |                                                              |                                                                                                                  | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |                | Target            |                   | Rp     |                | Tahun 2020 |             |                                          |                |        |               |                     | Tahun 2021        |                   |  |
|                                    |   |                                                              |                                                                                                                  | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp             |                   |                   | Target | Rp             | Target     | Rp          | Target                                   | Rp             | Target | Rp            |                     |                   |                   |  |
|                                    |   |                                                              |                                                                                                                  |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |        |                |            |             |                                          |                |        |               |                     | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |  |
|                                    | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur           | - Persentase sumberdaya aparatur UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | -                                                     | -                  | -                      | -                  | 60%                                           | 599.093.068    | -                 | -                 | 80%    | 653.826.570    | -          | -           | 100%                                     | 707.642.818    | -      | -             | 100%                | 3.068.780.732     |                   |  |
|                                    | 4 | Program Peningkatan dan Pengembangan Museum                  | - Benda Budaya yang Dilindungi dan dipelihara                                                                    | -                                                     | -                  | -                      | -                  | 60%                                           | 3.442.865.277  | -                 | -                 | 80%    | 3.757.407.509  | -          | -           | 100%                                     | 4.066.678.479  | -      | -             | 100%                | 17.460.413.511    |                   |  |
|                                    | 5 | Program Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman | - Persentase Fasilitas Sarana Pengembangan, Pendalaman Pagelaran Seni Budaya dan Dokumentasi Karya Budaya        | -                                                     | -                  | -                      | 1.885.374.800      | 60%                                           | 3.442.865.277  | -                 | -                 | 80%    | 3.757.407.509  | -          | -           | 100%                                     | 4.066.678.479  | -      | -             | 100%                | 17.460.413.511    |                   |  |
|                                    | 6 | Program DAK Taman Budaya dan Museum                          | - Terlaksananya DAK Taman Budaya dan Museum                                                                      | -                                                     | -                  | -                      | -                  | 60%                                           | -              | -                 | -                 | 80%    | -              | -          | -           | 100%                                     | -              | -      | -             | 100%                | -                 |                   |  |
| TOTAL                              |   |                                                              |                                                                                                                  |                                                       | -                  |                        | 6.139.670.125      |                                               | 12.253.935.120 |                   | -                 |        | 13.378.775.484 |            | -           |                                          | 14.865.664.390 |        | -             |                     | 59.981.892.681    |                   |  |
| CABANG DINAS WILAYAH I (KOTA PALU) |   |                                                              |                                                                                                                  |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                |                   |                   |        |                |            |             |                                          |                |        |               |                     |                   |                   |  |
|                                    | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                   | 80%                                                   | 310.518.000        | 100%                   | -                  | 60%                                           | 147.435.358    | 80%               | 181.561.977       | -      | -              | 100%       | 199.937.233 | -                                        | -              | 100%   | 980.000.000   | -                   | -                 |                   |  |
|                                    | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                  | 80%                                                   | 1.800.000          | 100%                   | -                  | 60%                                           | 120.000.000    | 80%               | 115.000.000       | -      | -              | 100%       | 120.000.000 | -                                        | -              | 100%   | 988.842.844   | -                   | -                 |                   |  |
|                                    | 3 | Program Pendidikan Menengah Atas                             | - Persentase SMA yang Memenuhi SPM di Wilayah I                                                                  | 80%                                                   | 30.166.000         | 100%                   | -                  | 60%                                           | 250.000.000    | 80%               | 250.000.000       | -      | -              | 100%       | 250.000.000 | -                                        | -              | 100%   | 950.000.000   | -                   | -                 |                   |  |
|                                    | 4 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan                         | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM di Wilayah I                                                                  | 80%                                                   | 29.801.000         | 100%                   | -                  | 60%                                           | 250.000.000    | 80%               | 250.000.000       | -      | -              | 100%       | 250.000.000 | -                                        | -              | 100%   | 950.000.000   | -                   | -                 |                   |  |
| TOTAL                              |   |                                                              |                                                                                                                  |                                                       | 372.285.000        |                        | -                  |                                               | 767.435.358    |                   | 796.561.977       |        | -              |            | 819.937.233 |                                          | -              |        | 3.868.842.844 |                     | -                 |                   |  |



| Kode                                                              | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)              | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                               |                   |             |     |             |      |             |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |      |               |      | PD Penanggung Jawab |                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|------|-------------|--------|------------------------------------------|------|---------------|------|---------------------|---------------------------|
|                                                                   |                                                              |                                                   | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |     | TargetRp<br>Sebelum Perubahan |                   | Tahun 2020  |     | Tahun 2021  |      |             |        |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                   |                                                              |                                                   | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp  |                               |                   | Target      | Rp  | Target      | Rp   |             | Target | Rp                                       |      |               |      |                     |                           |
|                                                                   |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     | Sebelum Perubahan             | Sebelum Perubahan |             |     |             |      |             |        |                                          |      |               |      |                     |                           |
| CABANG DINAS WILAYAH I (KOTA PALU DAN KABUPATEN SIGI)             |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |                               |                   |             |     |             |      |             |        |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                   | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)        | -                  | -                      | -                  | 348.847.600                                   | 60% | 147.435.358                   | -                 | -           | 80% | 208.796.274 | -    | -           | 100%   | 229.927.818                              | -    | -             | 100% | 980.000.000         |                           |
|                                                                   | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur       | -                  | -                      | -                  | 51.600.000                                    | 60% | 120.000.000                   | -                 | -           | 80% | 132.250.000 | -    | -           | 100%   | 138.000.000                              | -    | -             | 100% | 988.842.844         |                           |
|                                                                   | 3                                                            | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | -                  | -                      | -                  | -                                             | 60% | 250.000.000                   | -                 | -           | 80% | 287.500.000 | -    | -           | 100%   | 287.500.000                              | -    | -             | 100% | 950.000.000         |                           |
|                                                                   | 4                                                            | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | -                  | -                      | -                  | 35.355.000                                    | 60% | 250.000.000                   | -                 | -           | 80% | 287.500.000 | -    | -           | 100%   | 138.000.000                              | -    | -             | 100% | 950.000.000         |                           |
| TOTAL                                                             |                                                              |                                                   |                                                       |                    | -                      |                    | 435.802.600                                   |     | 767.435.358                   |                   | -           |     | 916.046.274 |      | -           |        | 793.427.818                              |      | -             |      | 3.868.842.844       |                           |
| CABANG DINAS WILAYAH II (KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN DONGGALA)   |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |                               |                   |             |     |             |      |             |        |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                   | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)        | 80%                | 288.739.900            | 100%               | -                                             | 60% | 147.435.358                   | 80%               | 181.561.977 | -   | -           | 100% | 199.937.233 | -      | -                                        | 100% | 980.000.000   | -    | -                   |                           |
|                                                                   | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur       | 80%                | 24.300.000             | 100%               | -                                             | 60% | 120.000.000                   | 80%               | 115.000.000 | -   | -           | 100% | 120.000.000 | -      | -                                        | 100% | 988.842.844   | -    | -                   |                           |
|                                                                   | 3                                                            | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 33.920.000             | 100%               | -                                             | 60% | 250.000.000                   | 80%               | 250.000.000 | -   | -           | 100% | 250.000.000 | -      | -                                        | 100% | 950.000.000   | -    | -                   |                           |
|                                                                   | 4                                                            | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 27.084.000             | 100%               | -                                             | 60% | 250.000.000                   | 80%               | 250.000.000 | -   | -           | 100% | 250.000.000 | -      | -                                        | 100% | 950.000.000   | -    | -                   |                           |
| TOTAL                                                             |                                                              |                                                   |                                                       |                    | 374.043.900            |                    | -                                             |     | 767.435.358                   |                   | 796.561.977 |     | -           |      | 819.937.233 |        | -                                        |      | 3.868.842.844 |      | -                   |                           |
| CABANG DINAS WILAYAH II (KABUPATEN PARIMO DAN KABUPATEN DONGGALA) |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |                               |                   |             |     |             |      |             |        |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                   | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)        | -                  | -                      | -                  | 278.726.151                                   | 60% | 147.435.358                   | -                 | -           | 80% | 208.796.274 | -    | -           | 100%   | 229.927.818                              | -    | -             | 100% | 980.000.000         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                   | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur       | -                  | -                      | -                  | 2.447.000                                     | 60% | 120.000.000                   | -                 | -           | 80% | 132.250.000 | -    | -           | 100%   | 138.000.000                              | -    | -             | 100% | 988.842.844         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                   | 3                                                            | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | -                  | -                      | -                  | 83.713.325                                    | 60% | 250.000.000                   | -                 | -           | 80% | 287.500.000 | -    | -           | 100%   | 287.500.000                              | -    | -             | 100% | 950.000.000         | SEKSI PEMBINAAN SMA       |

| Kode                                                                            |   |                                                   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes) | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                               |     |             |      |             |      |             |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |      |               |                           | PD Penanggung Jawab |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------------------------------------------|------|---------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                 |   |                                                   |                                                              |                                      | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |     | TargetRp<br>Sebelum Perubahan |     | Tahun 2020  |      | Tahun 2021  |      |             |      |                                          |      |               |                           |                     |
|                                                                                 |   |                                                   |                                                              |                                      | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp  |                               |     | Target      | Rp   | Target      | Rp   | Target      | Rp   | Target                                   | Rp   | Target        | Rp                        |                     |
|                                                                                 |   |                                                   |                                                              |                                      |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |                               |     |             |      |             |      |             |      |                                          |      |               |                           |                     |
|                                                                                 | 4 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                           | -                                    | -                                                     | -                  | 75.621.950             | 60%                | 250.000.000                                   | -   | -                             | 80% | 287.500.000 | -    | -           | 100% | 138.000.000 | -    | -                                        | 100% | 950.000.000   | SEKSI PEMBINAAN SMK       |                     |
| TOTAL                                                                           |   |                                                   |                                                              |                                      | -                                                     |                    | 440.508.426            |                    | 767.435.358                                   |     | -                             |     | 916.046.274 |      | -           |      | 793.427.818 |      | -                                        |      | 3.868.842.844 |                           |                     |
| CABANG DINAS WILAYAH III (KABUPATEN PARIMO, KABUPATEN POSO DAN KABUPATEN TOUNA) |   |                                                   |                                                              |                                      |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |                               |     |             |      |             |      |             |      |                                          |      |               |                           |                     |
|                                                                                 | 1 | Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)               | 80%                                  | 238.925.825                                           | 100%               | -                      | 60%                | 147.435.358                                   | 80% | 181.561.977                   | -   | -           | 100% | 199.937.233 | -    | -           | 100% | 980.000.000                              | -    | -             | TU CABANG DINAS WILAYAH I |                     |
|                                                                                 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur              | 80%                                  | 83.900.000                                            | 100%               | -                      | 60%                | 120.000.000                                   | 80% | 115.000.000                   | -   | -           | 100% | 120.000.000 | -    | -           | 100% | 988.842.844                              | -    | -             | TU CABANG DINAS WILAYAH I |                     |
|                                                                                 | 3 | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                           | 80%                                  | 16.578.815                                            | 100%               | -                      | 60%                | 250.000.000                                   | 80% | 250.000.000                   | -   | -           | 100% | 250.000.000 | -    | -           | 100% | 950.000.000                              | -    | -             | SEKSI PEMBINAAN SMA       |                     |
|                                                                                 | 4 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                           | 80%                                  | 16.701.432                                            | 100%               | -                      | 60%                | 250.000.000                                   | 80% | 250.000.000                   | -   | -           | 100% | 250.000.000 | -    | -           | 100% | 950.000.000                              | -    | -             | SEKSI PEMBINAAN SMK       |                     |
| TOTAL                                                                           |   |                                                   |                                                              |                                      | 356.106.072                                           |                    | -                      |                    | 767.435.358                                   |     | 796.561.977                   |     | -           |      | 819.937.233 |      | -           |      | 3.868.842.844                            |      | -             |                           |                     |
| CABANG DINAS WILAYAH III (KABUPATEN POSO DAN KABUPATEN TOUNA)                   |   |                                                   |                                                              |                                      |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |                               |     |             |      |             |      |             |      |                                          |      |               |                           |                     |
|                                                                                 | 1 | Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)               | -                                    | -                                                     | -                  | 272.753.326            | 60%                | 147.435.358                                   | -   | -                             | 80% | 208.796.274 | -    | -           | 100% | 229.927.818 | -    | -                                        | 100% | 980.000.000   | TU CABANG DINAS WILAYAH I |                     |
|                                                                                 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur              | -                                    | -                                                     | -                  | 78.741.229             | 60%                | 120.000.000                                   | -   | -                             | 80% | 132.250.000 | -    | -           | 100% | 138.000.000 | -    | -                                        | 100% | 988.842.844   | TU CABANG DINAS WILAYAH I |                     |
|                                                                                 | 3 | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                           | -                                    | -                                                     | -                  | 15.866.750             | 60%                | 250.000.000                                   | -   | -                             | 80% | 287.500.000 | -    | -           | 100% | 287.500.000 | -    | -                                        | 100% | 950.000.000   | SEKSI PEMBINAAN SMA       |                     |
|                                                                                 | 4 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                           | -                                    | -                                                     | -                  | 17.106.737             | 60%                | 250.000.000                                   | -   | -                             | 80% | 287.500.000 | -    | -           | 100% | 138.000.000 | -    | -                                        | 100% | 950.000.000   | SEKSI PEMBINAAN SMK       |                     |
| TOTAL                                                                           |   |                                                   |                                                              |                                      | -                                                     |                    | 384.468.042            |                    | 767.435.358                                   |     | -                             |     | 916.046.274 |      | -           |      | 793.427.818 |      | -                                        |      | 3.868.842.844 |                           |                     |

| Kode                                                                              | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)              | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |             |     |             |     |             |      |             |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |      |               |      | PD Penanggung Jawab |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|------------------------------------------|------|---------------|------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                   |                                                              |                                                   | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |     | Target      |     | Rp          |     | Tahun 2020  |      | Tahun 2021  |      |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                                   |                                                              |                                                   | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp  | Target      | Rp  | Target      | Rp  | Target      | Rp   | Target      | Rp   | Target                                   | Rp   | Target        | Rp   |                     |                           |
|                                                                                   |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |             |     |             |     |             |      |             |      |                                          |      |               |      |                     | Sebelum Perubahan         |
| CABANG DINAS WILAYAH IV (KABUPATEN MOROWALI DAN KABUPATEN MOROWALI UTARA)         |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |             |     |             |     |             |      |             |      |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                                   | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)        | 80%                | 194.617.867            | 100%               | 188.085.329                                   | 60% | 147.435.358 | 80% | 181.561.977 | 80% | 181.561.977 | 100% | 199.937.233 | 100% | 199.937.233                              | 100% | 980.000.000   | 100% | 980.000.000         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                                   | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur       | 80%                | 40.000.000             | 100%               | 102.550.000                                   | 60% | 120.000.000 | 80% | 115.000.000 | 80% | 115.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000                              | 100% | 988.842.844   | 100% | 988.842.844         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                                   | 3                                                            | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 62.574.600             | 100%               | 81.333.400                                    | 60% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000                              | 100% | 950.000.000   | 100% | 950.000.000         | SEKSKI PEMBINAAN SMA      |
|                                                                                   | 4                                                            | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 62.574.600             | 100%               | 97.917.900                                    | 60% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000                              | 100% | 950.000.000   | 100% | 950.000.000         | SEKSKI PEMBINAAN SMK      |
|                                                                                   | TOTAL                                                        |                                                   |                                                       |                    | 359.767.067            |                    | 469.886.629                                   |     | 767.435.358 |     | 796.561.977 |     | 796.561.977 |      | 819.937.233 |      | 819.937.233                              |      | 3.868.842.844 |      | 3.868.842.844       |                           |
| CABANG DINAS WILAYAH V (KABUPATEN BANGGAI, KABUPATEN BANGKEP DAN KABUPATEN BALUT) |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |             |     |             |     |             |      |             |      |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                                   | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)        | 80%                | 113.213.600            | 100%               | 215.333.175                                   | 60% | 147.435.358 | 80% | 181.561.977 | 80% | 181.561.977 | 100% | 199.937.233 | 100% | 199.937.233                              | 100% | 980.000.000   | 100% | 980.000.000         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                                   | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur       | 80%                | 50.822.000             | 100%               | 126.834.000                                   | 60% | 120.000.000 | 80% | 115.000.000 | 80% | 115.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000                              | 100% | 988.842.844   | 100% | 988.842.844         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                                   | 3                                                            | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 98.424.100             | 100%               | 24.328.325                                    | 60% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000                              | 100% | 950.000.000   | 100% | 950.000.000         | SEKSKI PEMBINAAN SMA      |
|                                                                                   | 4                                                            | Program Pendidikan Menengah Kejuruan              | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 87.241.100             | 100%               | 24.213.075                                    | 60% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000                              | 100% | 950.000.000   | 100% | 950.000.000         | SEKSKI PEMBINAAN SMK      |
|                                                                                   | TOTAL                                                        |                                                   |                                                       |                    | 349.700.800            |                    | 390.708.575                                   |     | 767.435.358 |     | 796.561.977 |     | 796.561.977 |      | 819.937.233 |      | 819.937.233                              |      | 3.868.842.844 |      | 3.868.842.844       |                           |
| CABANG DINAS WILAYAH VI (KABUPATEN BUOL DAN KABUPATEN TOLI-TOLI)                  |                                                              |                                                   |                                                       |                    |                        |                    |                                               |     |             |     |             |     |             |      |             |      |                                          |      |               |      |                     |                           |
|                                                                                   | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)        | 80%                | 279.207.298            | 100%               | 205.281.598                                   | 60% | 147.435.358 | 80% | 181.561.977 | 80% | 181.561.977 | 100% | 199.937.233 | 100% | 199.937.233                              | 100% | 980.000.000   | 100% | 980.000.000         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                                   | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur       | 80%                | 22.000.000             | 100%               | 127.543.894                                   | 60% | 120.000.000 | 80% | 115.000.000 | 80% | 115.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000                              | 100% | 988.842.844   | 100% | 988.842.844         | TU CABANG DINAS WILAYAH I |
|                                                                                   | 3                                                            | Program Pendidikan Menengah Atas                  | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM                    | 80%                | 25.391.199             | 100%               | 26.010.500                                    | 60% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000                              | 100% | 950.000.000   | 100% | 950.000.000         | SEKSKI PEMBINAAN SMA      |

| Kode  |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes) | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                        |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |                                   |                   |            |                 |            |                   |                   |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |                   |                   | PD Penanggung Jawab |
|-------|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |   |                                                              |                                      | Tahun 2017                                            |                    | Tahun 2018             |                    | Tahun 2019                                    |                 | Target<br>Rp<br>Sebelum Perubahan |                   | Tahun 2020 |                 | Tahun 2021 |                   |                   |                 |                                          |                 |                   |                   |                     |
|       |   |                                                              |                                      | Capaian Target Kinerja                                | Realisasi Keu (Rp) | Capaian Target Kinerja | Realisasi Keu (Rp) | Target                                        | Rp              |                                   |                   | Target     | Rp              | Target     | Rp                |                   | Target          | Rp                                       | Target          | Rp                |                   |                     |
|       |   |                                                              |                                      |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                 | Sebelum Perubahan                 | Sebelum Perubahan |            |                 |            | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |                 |                                          |                 | Sebelum Perubahan | Sebelum Perubahan |                     |
|       | 4 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan                         | - Persentase SMK yang Memenuhi SPM   | 80%                                                   | 23.488.449         | 100%                   | 24.588.000         | 60%                                           | 250.000.000     | 80%                               | 250.000.000       | 80%        | 250.000.000     | 100%       | 250.000.000       | 100%              | 250.000.000     | 100%                                     | 950.000.000     | 100%              | 950.000.000       | SEKSI PEMBINAAN SMK |
| TOTAL |   |                                                              |                                      |                                                       | 350.086.946        |                        | 383.423.992        |                                               | 767.435.358     |                                   | 796.561.977       |            | 796.561.977     |            | 819.937.233       |                   | 819.937.233     |                                          | 3.868.842.844   |                   | 3.868.842.844     |                     |
|       |   |                                                              |                                      |                                                       |                    |                        |                    |                                               |                 |                                   |                   |            |                 |            |                   |                   |                 |                                          |                 |                   |                   |                     |
|       |   | JUMLAH                                                       |                                      |                                                       | 154.162.060.193    |                        | 88.583.402.485     |                                               | 145.816.860.523 |                                   | 143.034.420.175   |            | 155.355.115.371 |            | 156.129.820.917   |                   | 168.361.110.237 |                                          | 670.365.222.679 |                   | 725.715.724.249   |                     |

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

| No | Kode |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                     | Indikator Kinerja Program (outcomes) | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                 |                   |                  |                   |                                          |                    | Penanggung jawab                 |
|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|    |      |   |                                                                                                  |                                      |                                       | Tahun I (2016)                                 |                   | Tahun II (2017) |                   | Tahun III (2018) |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                    |                                  |
|    |      |   |                                                                                                  |                                      |                                       | Target                                         | Rp                | Target          | Rp                | Target           | Rp                | Target                                   | Rp                 |                                  |
| 1  | 2    |   | 3                                                                                                | 4                                    | 5                                     | 6                                              | 7                 | 8               | 10                | 11               | 12                | 17                                       | 18                 | 19                               |
|    | 1    | 2 | KESEHATAN                                                                                        |                                      |                                       |                                                | 20.636.612.924,50 |                 | 20.448.785.511,50 |                  | 29.118.180.856,00 |                                          | 138.750.860.361,64 |                                  |
|    |      |   | 1 Upaya Penyediaan SDM Kesehatan                                                                 |                                      |                                       |                                                | 4.308.224.589,00  | 90%             | 2.474.300.805,00  | 90%              | 2.662.513.400,00  | 100%                                     | 13.018.149.054     | Bid. Alkes, Kefarmasian dan SDMK |
|    |      |   | 1 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang,                | 1.848 Orang                          | 1.848 Orang                           |                                                |                   | 2208 Or         |                   | 2658 Or          |                   | 3898 Or                                  |                    |                                  |
|    |      |   | 2 Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi                                                      | 5.385 Orang                          | 5.385 Orang                           |                                                |                   | 6000 Or         |                   | 7000 Or          |                   | 10.000 Or                                |                    |                                  |
|    |      |   | 3 Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                             | 36%                                  | 36%                                   |                                                |                   | 45%             |                   | 50%              |                   | 75%                                      |                    |                                  |
|    |      |   | 2 Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan                                                   |                                      |                                       |                                                |                   | 100%            |                   | 100%             | 1.049.948.622,00  | 100%                                     | 3.099.559.298      | Bid. Alkes, Kefarmasian dan SDMK |
|    |      |   | 4 Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi                                 | 100%                                 | 100%                                  |                                                |                   | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                  |
|    |      |   | 3 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer                                                       |                                      |                                       |                                                |                   |                 | 424.842.600,00    |                  | 490.496.200,00    |                                          | 11.158.413.475,00  | Bid. Pelayanan Kesehatan         |
|    |      |   | 4 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi,                                                       | 3%                                   | 3%                                    |                                                |                   | 25%             |                   | 50%              |                   | 100%                                     |                    |                                  |
|    |      |   | 5 Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer                                              | 3%                                   | 3%                                    |                                                |                   | 25%             |                   | 50%              |                   | 100%                                     |                    |                                  |
|    |      |   | 4 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan                                                   |                                      |                                       |                                                | 794.130.880,00    |                 | 1.009.944.783,00  |                  | 951.580.800,00    |                                          | 12.398.237.194,00  | Bid. Pelayanan Kesehatan         |
|    |      |   | 6 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi                                                      | 3%                                   | 3%                                    |                                                |                   | 25%             |                   | 50%              |                   | 100%                                     |                    |                                  |
|    |      |   | 5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah    |                                      |                                       |                                                |                   |                 | 714.937.350,00    |                  | 1.696.090.000,00  |                                          | 2.479.647.439      | Bid. Pelayanan Kesehatan         |
|    |      |   | 7 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional                               | 25%                                  | 25                                    |                                                |                   | 45%             |                   | 60%              |                   | 100%                                     |                    |                                  |
|    |      |   | 8 Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah                                          | 28%                                  |                                       |                                                |                   |                 |                   |                  |                   |                                          |                    |                                  |
|    |      |   | 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                             |                                      |                                       |                                                | 3.182.631.375,00  |                 | 1.724.227.700,00  |                  | 1.816.167.200,00  |                                          | 13.638.060.913     | Bid. Kesehatan Masyarakat        |
|    |      |   | 10 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan,                                                 | 63, 41%                              | 63, 41%                               |                                                |                   | 80%             |                   | 85%              |                   | 90%                                      |                    |                                  |
|    |      |   | 11 Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)                                                     | 16,9%                                | 16,9%                                 |                                                |                   | 16,5%           |                   | 16%              |                   | 14,3 %                                   |                    |                                  |
|    |      |   | 12 Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI                                          | 15 Pos                               | 15 Pos                                |                                                |                   | 55 Pos          |                   | 65 Pos           |                   | 80 Pos                                   |                    |                                  |
|    |      |   | 7 Program Upaya Kesehatan Laboratorium                                                           |                                      |                                       |                                                |                   | 42.000          | 1.894.607.812,50  | 43.000           |                   | 45.000                                   | 3.646.540.351      | UPT Laboratorium                 |
|    |      |   | 13 Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium, | 41.000 Sampel                        | 41.000 Sampel                         |                                                |                   | 42.000          |                   | 43.000           |                   | 45.000                                   |                    |                                  |
|    |      |   | 8 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat                                                                |                                      |                                       |                                                | 917.949.799,00    |                 | 812.645.700,00    |                  | 662.346.486,00    |                                          | 8.678.766.036      | Bid. Kesehatan Masyarakat        |
|    |      |   | 14 Persentase Balita Gizi Buruk                                                                  | 7%                                   | 7%                                    |                                                |                   | 6,5%            |                   | 5,8%             |                   | 4%                                       |                    |                                  |
|    |      |   | 15 Persentase Balita Stunting                                                                    | 47%                                  | 45%                                   |                                                |                   | 41%             |                   | 37%              |                   | 30%                                      |                    |                                  |

| No | Kode |  |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                    | Indikator Kinerja Program (outcomes) | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |                  |       |                  |       |                                          |                                           | Penanggung jawab |
|----|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|    |      |  |  |                                                                                                 |                                      |                                       | Tahun I (2016)                                 |       | Tahun II (2017)  |       | Tahun III (2018) |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                                           |                  |
|    |      |  |  |                                                                                                 |                                      |                                       | Target                                         | Rp    | Target           | Rp    | Target           | Rp    | Target                                   | Rp                                        |                  |
|    |      |  |  | <b>9 Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi</b>                              |                                      |                                       | 3.281.145.000,00                               | 1,1 % | 2.171.845.199,00 | 1,1 % | 1.628.731.500,00 | <1 %  | 11.158.413.475                           | Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |                  |
|    |      |  |  | 16 Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis (spesifik daerah),                                 | 1,07 %                               | 1,07 %                                |                                                | 0,9%  |                  | 0,8%  |                  | 0,5 % |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 17 Persentase bayi yang mendapat immunisaasi dasar lengkap                                      | 75%                                  | 75%                                   |                                                | 82,5% |                  | 85,3% |                  | 91%   |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 18 Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk,                                              | 90%                                  | 90%                                   |                                                | 91%   |                  | 92%   |                  | 95%   |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 19 Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)        | 100%                                 | 100%                                  |                                                | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 20 Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk                                           | 5 KAB                                | 5 KAB                                 |                                                | 6 KAB |                  | 7 KAB |                  | 8 KAB |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 21 Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap                                                    | 85, 3 %                              | 85, 3 %                               |                                                | 87,5% |                  | 90%   |                  | 95,3% |                                          | Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |                  |
|    |      |  |  | <b>10 Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>                                     |                                      |                                       | 2.415.078.000,00                               |       | 2.566.293.055,00 |       | 2.022.465.086,00 |       | 8.678.766.036                            |                                           |                  |
|    |      |  |  | 22 Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan       | 50%                                  | 50%                                   |                                                | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 23 Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM,             | 0%                                   | 0%                                    |                                                | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 24 Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehtan sesuai standar (SPM),             | 0%                                   | 0%                                    |                                                | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 25 Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM,                 | 0%                                   | 0%                                    |                                                | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | <b>11 Program Upaya Kesehatan Lingkungan</b>                                                    |                                      |                                       | 2.107.698.000,00                               |       | 873.294.229,00   |       | 1.134.596.150,00 |       | 7.438.942.316                            | Bid. Kesehatan Masyarakat                 |                  |
|    |      |  |  | 26 Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan         | 50%                                  | 50%                                   |                                                | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 27 Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat                                  | 2 Kab                                | 2 Kab                                 |                                                | 3 Kab |                  | 4 Kab |                  | 7 Kab |                                          | Bid. Alkes, Kefarmasian dan SDMK          |                  |
|    |      |  |  | <b>12 Program Upaya Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan</b> |                                      |                                       |                                                | 86%   | 1.308.094.723,00 | 90%   | 3.636.072.000,00 | 96%   | 9.918.589.755                            |                                           |                  |
|    |      |  |  | 28 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas,                                        | 85%                                  | 85%                                   |                                                | 90%   |                  |       |                  | 95%   |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 29 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,                 | 48,2%                                | 48,2%                                 |                                                | 55%   |                  | 60%   |                  | 70%   |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 30 Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat,                 | 79%                                  | 79%                                   |                                                | 81%   |                  | 83%   |                  | 87%   |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 31 Persentase rumah sakit yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehataan            | 25%                                  | 25%                                   |                                                |       |                  |       |                  |       |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 32 Persentase puskesmas yang memiliki standar sarana prasarana dan alat kesehatan               | 25%                                  | 25%                                   |                                                | 50%   |                  | 75%   |                  | 100   |                                          | Bid. Kesehatan Mayarakat                  |                  |
|    |      |  |  | <b>13 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan</b>                                 |                                      |                                       | 2.038.122.000,00                               | 8     | 1.593.848.777,00 | 9     | 650.980.650,00   | 11    | 3.464.213.334                            |                                           |                  |
|    |      |  |  | 33 Jumlah kebijakan berwawasan kesehatan di provinsi kab/kota,                                  | 8 kab                                |                                       |                                                |       |                  |       |                  |       |                                          |                                           |                  |
|    |      |  |  | 34 Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan model intervensi menuju keluarga sehat,                   | 6 kab                                |                                       |                                                |       |                  |       |                  |       |                                          |                                           |                  |

| No | Kode |  |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes) | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016                                                                         | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                 |                   |                  |                   |                                          |                    | Penanggung jawab                         |
|----|------|--|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|    |      |  |  |                                                              |                                      |                                                                                                               | Tahun I (2016)                                 |                   | Tahun II (2017) |                   | Tahun III (2018) |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              |                                      |                                                                                                               | Target                                         | Rp                | Target          | Rp                | Target           | Rp                | Target                                   | Rp                 |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 14                                   | Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan Riset Operasional Kesehatan                |                                                |                   |                 | 642.072.175,00    |                  |                   |                                          | 2.187.924.211      |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 35                                   | Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu                   | 48,5 %                                         | 50%               | 55%             |                   | 60%              |                   | 80%                                      |                    | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              | 36                                   | Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang di respon                                    | 20%                                            | 23%               | 38%             |                   | 54%              |                   | 100%                                     |                    | Bid. P2P                                 |
|    |      |  |  |                                                              | 37                                   | Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring dan evaluasi                             | 1 Riset                                        | 1 Riset           | 3 Riset         |                   | 3 Riset          |                   | 3 Riset                                  |                    | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              | 15                                   | Program Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan                                             |                                                | 1.206.647.890,00  | 3               | 1.084.673.709,00  | 3                | 1.394.205.300,00  | 2                                        | 2.370.251.228      | UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu |
|    |      |  |  |                                                              | 38                                   | Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana | 0                                              | 3                 | 3               |                   | 3                |                   | 2                                        |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 39                                   | Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam,                            | 100%                                           | 100%              | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 40                                   | Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC                                                     | 0                                              | 2 Kab             | 3 Kab           |                   | 3 Kab            |                   | 3 Kab                                    |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 16                                   | Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan                                                                |                                                |                   |                 |                   |                  | 8.761.441.262,00  |                                          | 11.778.325.334     | Bid. Pelayanan Kesehatan                 |
|    |      |  |  |                                                              | 41                                   | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan,                                                        | 73,62%                                         |                   |                 |                   |                  |                   |                                          |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 17                                   | Program Perencanaan dan Penganggaran Pembanguna Kesehatan                                                     |                                                |                   |                 |                   |                  |                   |                                          | 2.479.647.439      | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              | 42                                   | Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %,                                       | 10%                                            | 10%               | 10%             |                   | 10%              |                   | 10%                                      |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 43                                   | Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal,                 | 100%                                           | 100%              | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 44                                   | Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi,                                                         | 100%                                           | 100%              | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 18                                   | Program Administrasi Kepegawaian, Umum dan Humas                                                              |                                                |                   |                 | 847.667.000,00    |                  | 560.546.200,00    |                                          | 1.239.823.719      | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              | 45                                   | Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas                                                                 | 100%                                           | 100%              | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 46                                   | Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan                                       | 100%                                           | 100%              | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 19                                   | Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset                                                            |                                                |                   |                 |                   |                  |                   |                                          | 1.239.823.719      | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              | 47                                   | Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan        | 100%                                           | 100%              | 100%            |                   | 100%             |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 20                                   | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                                              |                                                |                   |                 | 154.382.054,00    | 100%             |                   | 100%                                     | 2.479.647.439      | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              |                                      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi      | 100%                                           | 100%              |                 |                   |                  |                   |                                          |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 21                                   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                                             |                                                | 235.245.391,50    | 100%            | 74.223.340,00     | 100%             |                   | 100%                                     | 3.719.471.158      | Sekretariat                              |
|    |      |  |  |                                                              |                                      | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah                        | 100%                                           | 100%              |                 |                   |                  |                   |                                          |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 22                                   | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                                         |                                                | 149.740.000,00    | 100%            | 76.884.500,00     | 100%             |                   | 100%                                     | 1.239.823.719      |                                          |
|    |      |  |  |                                                              |                                      | Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Kesehatan                                                                | 100%                                           | 100%              |                 |                   |                  |                   |                                          |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              | 23                                   | PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN                                                     |                                                |                   |                 |                   |                  |                   |                                          | 1.239.823.719      | Bid. Alkes, Kefarmasian dan SDMK         |
|    |      |  |  |                                                              |                                      | Persentase rumah sakit yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehataan                             | 3%                                             | 3%                | 25%             |                   | 50%              |                   | 100%                                     | 25%                |                                          |
|    |      |  |  |                                                              |                                      | Prosentase puskesmas yang memiliki standar sarana prasarana dan alat kesehatan                                | 3%                                             | 3%                | 25%             |                   | 50%              |                   | 100%                                     |                    |                                          |
|    |      |  |  |                                                              |                                      |                                                                                                               |                                                | 20.636.612.924,50 |                 | 20.448.785.511,50 |                  | 29.118.180.856,00 |                                          | 138.750.860.361,64 |                                          |



| Kode                                         | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                       | Indikator Kinerja Program (outcomes) | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 |                        |                 |                        |                |                        |                 |                        |                 |                        |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                  | OPD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                              |                                                                                                    |                                      |                                       | 2017                   |                 | 2018                   |                | 2019                   |                 | 2020                   |                 | 2021                   |                 |                                          |                  |                      |
|                                              |                                                                                                    |                                      |                                       | Target                 | Rp              | Target                 | Rp             | Target                 | Rp              | Target                 | Rp              | Target                 | Rp              | Target                                   | Rp               |                      |
| 02                                           | URUSAN WAJIB                                                                                       |                                      |                                       |                        |                 |                        |                |                        |                 |                        |                 |                        |                 |                                          |                  |                      |
|                                              | BIDANG URUSAN KESEHATAN                                                                            |                                      |                                       |                        |                 |                        |                |                        |                 |                        |                 |                        |                 |                                          |                  |                      |
|                                              | BLUD RSUD UNDATA                                                                                   |                                      |                                       |                        |                 |                        |                |                        |                 |                        |                 |                        |                 | 707.096.689.158                          | BLUD RSUD UNDATA |                      |
|                                              | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                  | Capaian SPM di unit-unit Pelayanan   | Tercapai Sesuai Target                | Tercapai Sesuai Target | 123.444.218.179 | Tercapai Sesuai Target | 98.084.446.179 | Tercapai Sesuai Target | 103.039.204.874 | Tercapai Sesuai Target | 108.104.309.478 | Tercapai Sesuai Target | 114.507.452.629 | Tercapai Sesuai Target                   | 547.179.631.338  |                      |
|                                              | A. Gawat Darurat                                                                                   |                                      |                                       |                        |                 |                        |                |                        |                 |                        |                 |                        |                 |                                          |                  |                      |
|                                              | 1. Kemampuan menangani life saving                                                                 | 100%                                 | 100%                                  |                        | 100%            |                        | 100%           |                        | 100%            |                        | 100%            |                        | 100%            |                                          | 100%             |                      |
|                                              | 2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku | 100%                                 | 100%                                  |                        | 100%            |                        | 100%           |                        | 100%            |                        | 100%            |                        | 100%            |                                          | 100%             |                      |
|                                              | 3. Ketersediaan tim Penanggulangan bencana                                                         | 1 tim                                | 1 tim                                 |                        | 1 tim           |                        | 1 tim          |                        | 1 tim           |                        | 1 tim           |                        | 1 tim           |                                          | 1 tim            |                      |
|                                              | 4. Jam buka pelayanan gawat                                                                        | 24 jam                               | 24 jam                                |                        | 24 jam          |                        | 24 jam         |                        | 24 jam          |                        | 24 jam          |                        | 24 jam          |                                          | 24 jam           |                      |
|                                              | 5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat                                                 | ≤ 5 menit                            | 5 menit                               |                        | 5 menit         |                        | 5 menit        |                        | 5 menit         |                        | 5 menit         |                        | 5 menit         |                                          | 5 menit          |                      |
| 6. Tidak adanya keharusan membayar uang muka | 100%                                                                                               | 100%                                 |                                       | 100%                   |                 | 100%                   |                | 100%                   |                 | 100%                   |                 | 100%                   |                 | 100%                                     |                  |                      |
| 7. Kematian pasien di IGD (≤8 jam)           | ≤ 2/1000                                                                                           | ≤ 2/1000                             |                                       | ≤ 2/1000               |                 | ≤ 2/1000               |                | ≤ 2/1000               |                 | ≤ 2/1000               |                 | ≤ 2/1000               |                 | ≤ 2/1000                                 |                  |                      |
| 8. Kepuasan pasien                           | < 70%                                                                                              | < 70%                                |                                       | < 70%                  |                 | < 70%                  |                | < 70%                  |                 | < 70%                  |                 | < 70%                  |                 | < 70%                                    |                  |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                         | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016         |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD      |    | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                              |                                               | 2017                                  |    | 2018                                  |    | 2019                                  |    | 2020                                  |    | 2021                                  |    |                                               |    |                      |
|      |                                                              |                                                              |                                               | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                        | Rp |                      |
|      |                                                              | B. RAWAT JALAN                                               |                                               |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                               |    |                      |
|      |                                                              | 1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik                    | 100% Dokter Spesialis                         | 100% Dokter                           |    | 100% Dokter                           |    | 100% Dokter                           |    | 100% Dokter                           |    | 100% Dokter                           |    | 100% Dokter Spesialis                         |    |                      |
|      |                                                              | 2. Ketersediaan Pelayanan                                    | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (26 Klinik)   | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (26   |    | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (26   |    | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (27   |    | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (28   |    | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (29   |    | Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (29 Klinik)   |    |                      |
|      |                                                              | 3. Jam Buka Pelayanan Poliklinik                             | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja |    | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja |    | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja |    | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja |    | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja |    | Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali |    |                      |
|      |                                                              | 4. Waktu tunggu di Rawat Jalan                               | ≤ 60 menit                                    | ≤ 60 menit                            |    | ≤ 60 menit                            |    | ≤ 60 menit                            |    | ≤ 60 menit                            |    | ≤ 60 menit                            |    | ≤ 60 menit                                    |    |                      |
|      |                                                              | 5. Kepuasan Pelanggan                                        | ≥ 90%                                         | ≥ 90%                                 |    | ≥ 90%                                 |    | ≥ 90%                                 |    | ≥ 90%                                 |    | ≥ 90%                                 |    | ≥ 90%                                         |    |                      |
|      |                                                              | 6. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis    | 100%                                          | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                          |    |                      |
|      |                                                              | 7. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan Pelaporan TB di RS  | ≥ 60%                                         | ≥ 60%                                 |    | ≥ 60%                                 |    | ≥ 60%                                 |    | ≥ 60%                                 |    | ≥ 60%                                 |    | ≥ 60%                                         |    |                      |
|      |                                                              | 8. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS | 100%                                          | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                          |    |                      |
|      |                                                              | 9. Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)                          | Tersedia dengan                               | Tersedia dengan                       |    | Tersedia dengan                       |    | Tersedia dengan                       |    | Tersedia dengan                       |    | Tersedia dengan                       |    | Tersedia dengan                               |    |                      |
|      |                                                              | 10. Peresepan Obat Sesuai Dengan Formularium                 | 100%                                          | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                          |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                    | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016       |                                             |    |                                             |    |                                             |    |                                             |    |                                             |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD    |    | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                                         |                                             | 2017                                        |    | 2018                                        |    | 2019                                        |    | 2020                                        |    | 2021                                        |    | Target                                      | Rp |                      |
|      |                                                              |                                                                         |                                             | Target                                      | Rp | Target                                      | Rp | Target                                      | Rp | Target                                      | Rp | Target                                      | Rp |                                             |    |                      |
|      |                                                              | C. Rawat Inap                                                           |                                             |                                             |    |                                             |    |                                             |    |                                             |    |                                             |    |                                             |    |                      |
|      |                                                              | 1. Ketersediaan Pelayanan                                               | Sesuai jenis & kelas RS                     | Sesuai jenis & kelas RS                     |    | Sesuai jenis & kelas RS                     |    | Sesuai jenis & kelas RS                     |    | Sesuai jenis & kelas RS                     |    | Sesuai jenis & kelas RS                     |    | Sesuai jenis & kelas RS                     |    |                      |
|      |                                                              | 2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap                                      | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS |    | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS |    | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS |    | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS |    | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS |    | Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS |    |                      |
|      |                                                              | 3. Tempat tidur dengan pengaman                                         | 100%                                        | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan                          | 100%                                        | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 5. Dokter penanggungjawab pasien rawat inap                             | 100%                                        | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 6. Jam Visite Dokter Spesialis                                          | 08.00 s/d 14.00                             | 08.00 s/d 14.00                             |    | 08.00 s/d 14.00                             |    | 08.00 s/d 14.00                             |    | 08.00 s/d 14.00                             |    | 08.00 s/d 14.00                             |    | 08.00 s/d 14.00                             |    |                      |
|      |                                                              | 7. Kejadian infeksi pasca operasi                                       | ≤ 1,5%                                      | ≤ 1,5%                                      |    | ≤ 1,5%                                      |    | ≤ 1,5%                                      |    | ≤ 1,5%                                      |    | ≤ 1,5%                                      |    | ≤ 1,5%                                      |    |                      |
|      |                                                              | 8. Kejadian infeksi nosokomial                                          | ≤ 9%                                        | ≤ 9%                                        |    | ≤ 9%                                        |    | ≤ 9%                                        |    | ≤ 9%                                        |    | ≤ 9%                                        |    | ≤ 9%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 9.Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian | 100%                                        | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 10. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS  | 100%                                        | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    | 100%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 11. Pencatatan dan pelaporan TB di RS                                   | ≥ 60%                                       | ≥ 60%                                       |    | ≥ 60%                                       |    | ≥ 60%                                       |    | ≥ 60%                                       |    | ≥ 60%                                       |    | ≥ 60%                                       |    |                      |
|      |                                                              | 12. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh                           | ≤ 5%                                        | ≤ 5%                                        |    | ≤ 5%                                        |    | ≤ 5%                                        |    | ≤ 5%                                        |    | ≤ 5%                                        |    | ≤ 5%                                        |    |                      |
|      |                                                              | 13. Kematian pasien ≥ 48 jam                                            | ≤0,24%                                      | ≤0,24%                                      |    | ≤0,24%                                      |    | ≤0,24%                                      |    | ≤0,24%                                      |    | ≤0,24%                                      |    | ≤0,24%                                      |    |                      |
|      |                                                              | 14. Kepuasan pasien                                                     | ≥ 90 %                                      | ≥ 90 %                                      |    | ≥ 90 %                                      |    | ≥ 90 %                                      |    | ≥ 90 %                                      |    | ≥ 90 %                                      |    | ≥ 90 %                                      |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                       | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |    | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                                                            |                                       | 2017                                  |    | 2018                                  |    | 2019                                  |    | 2020                                  |    | 2021                                  |    | Target                                   | Rp |                      |
|      |                                                              |                                                                                            |                                       | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                | Rp | Target                                | Rp |                                          |    |                      |
|      |                                                              | <b>D. Bedah Sentral</b>                                                                    |                                       |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1. Ketersediaan tim bedah                                                                  | Sesuai dengan kelas RS                | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                   |    |                      |
|      |                                                              | 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi                                            | Sesuai dengan kelas RS                | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                   |    |                      |
|      |                                                              | 3. Kemampuan melakukan tindakan operasi                                                    | Sesuai dengan kelas RS                | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                |    | Sesuai dengan kelas RS                   |    |                      |
|      |                                                              | 4. Waktu tunggu operasi elektif                                                            | ≤ 2 hari                              | ≤ 2 hari                              |    | ≤ 2 hari                              |    | ≤ 2 hari                              |    | ≤ 2 hari                              |    | ≤ 2 hari                              |    | ≤ 2 hari                                 |    |                      |
|      |                                                              | 5. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi                                                | 100%                                  | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 6. Tidak adanya kejadian operasi salah orang                                               | 100%                                  | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 7. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi                                       | 100%                                  | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 8. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi. | 100%                                  | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                  |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 9. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET              | ≤ 6 %                                 | ≤ 6 %                                 |    | ≤ 6 %                                 |    | ≤ 6 %                                 |    | ≤ 6 %                                 |    | ≤ 6 %                                 |    | ≤ 6 %                                    |    |                      |
|      |                                                              | 10. Kejadian kematian di meja operasi                                                      | ≤ 1 %                                 | ≤ 1 %                                 |    | ≤ 1 %                                 |    | ≤ 1 %                                 |    | ≤ 1 %                                 |    | ≤ 1 %                                 |    | ≤ 1 %                                    |    |                      |
|      |                                                              | 11. Kepuasan pasien                                                                        | ≥ 80 %                                | ≥ 80 %                                |    | ≥ 80 %                                |    | ≥ 80 %                                |    | ≥ 80 %                                |    | ≥ 80 %                                |    | ≥ 80 %                                   |    |                      |
|      |                                                              | <b>E. Persalinan dan Perinatologi</b>                                                      |                                       |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                       |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1. Pemberi pelayanan persalinan normal                                                     | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan       | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan       |    | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan       |    | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan       |    | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan       |    | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan       |    | Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan          |    |                      |
|      |                                                              | 2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit                                            | Tim PONEK terlatih                    | Tim PONEK terlatih                    |    | Tim PONEK terlatih                    |    | Tim PONEK terlatih                    |    | Tim PONEK terlatih                    |    | Tim PONEK terlatih                    |    | Tim PONEK terlatih                       |    |                      |
|      |                                                              | 3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif                                   | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An |    | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An |    | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An |    | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An |    | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An |    | Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An    |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                        | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016                     |                                                            |    |                                                            |    |                                                            |    |                                                            |    |                                                           |    |                                                           |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |  | OPD Penanggung g Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|------------------------|
|      |                                                              |                                                                             |                                                           | 2017                                                       |    | 2018                                                       |    | 2019                                                       |    | 2020                                                       |    | 2021                                                      |    |                                                           |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              |                                                                             |                                                           | Target                                                     | Rp | Target                                                     | Rp | Target                                                     | Rp | Target                                                     | Rp | Target                                                    | Rp | Target                                                    | Rp |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 4. Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)                                  | 100%                                                      | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                      |    | 100%                                                      |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia                           | 100%                                                      | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                      |    | 100%                                                      |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria                           | ≤ 20%                                                     | ≤ 20%                                                      |    | ≤ 20%                                                      |    | ≤ 20%                                                      |    | ≤ 20%                                                      |    | ≤ 20%                                                     |    | ≤ 20%                                                     |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 7. Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh Tenaga Kompeten              | 100%                                                      | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                      |    | 100%                                                      |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 8. Pelayanan Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih                | 100%                                                      | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                      |    | 100%                                                      |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 9. Kejadian Kematian ibu karena persalinan                                  | a. Perdarahan ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % | a. Perdaraha n ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % |    | a. Perdaraha n ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % |    | a. Perdaraha n ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % |    | a. Perdaraha n ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % |    | a. Perdarahan ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % |    | a. Perdarahan ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 % |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 10. Kepuasan pasien                                                         | ≥ 80 %                                                    | ≥ 80 %                                                     |    | ≥ 80 %                                                     |    | ≥ 80 %                                                     |    | ≥ 80 %                                                     |    | ≥ 80 %                                                    |    | ≥ 80 %                                                    |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | F. Pelayanan Intensif                                                       |                                                           |                                                            |    |                                                            |    |                                                            |    |                                                            |    |                                                           |    |                                                           |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 1. Pemberi pelayanan Intensif                                               | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU                           | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator               | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                            |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           |    | Sesuai kelas RS dan standar ICU                           |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 4.Kepatuhan terhadap hand hygiene                                           | 100%                                                      | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                       |    | 100%                                                      |    | 100%                                                      |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 5. Kejadian infeksi nosokomial                                              | ≤ 21%                                                     | ≤ 21%                                                      |    | ≤ 21%                                                      |    | ≤ 21%                                                      |    | ≤ 21%                                                      |    | ≤ 21%                                                     |    | ≤ 21%                                                     |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 6.Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam | ≥ 3 %                                                     | ≥ 3 %                                                      |    | ≥ 3 %                                                      |    | ≥ 3 %                                                      |    | ≥ 3 %                                                      |    | ≥ 3 %                                                     |    | ≥ 3 %                                                     |    |                                          |  |                        |
|      |                                                              | 7.Kepuasan pelanggan                                                        | ≥ 70 %                                                    | ≥ 70 %                                                     |    | ≥ 70 %                                                     |    | ≥ 70 %                                                     |    | ≥ 70 %                                                     |    | ≥ 70 %                                                    |    | ≥ 70 %                                                    |    |                                          |  |                        |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                               | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016   |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                         |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |    | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                                    |                                         | 2017                                    |    | 2018                                    |    | 2019                                    |    | 2020                                    |    | 2021                                    |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              |                                                                    |                                         | Target                                  | Rp | Target                                  | Rp | Target                                  | Rp | Target                                  | Rp | Target                                  | Rp | Target                                   | Rp |                      |
|      |                                                              | <b>G. Pelayanan Radiologi</b>                                      |                                         |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1. Pemberi pelayanan radiologi                                     | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer |    | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer |    | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer |    | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer |    | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer |    | Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer  |    |                      |
|      |                                                              | 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi                 | Sesuai kelas RS                         | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                          |    |                      |
|      |                                                              | 3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax                        | ≤ 3 jam                                 | ≤ 3 jam                                 |    | ≤ 3 jam                                 |    | ≤ 3 jam                                 |    | ≤ 3 jam                                 |    | ≤ 3 jam                                 |    | ≤ 3 jam                                  |    |                      |
|      |                                                              | 4.Kerusakan foto                                                   | ≤ 2%                                    | ≤ 2%                                    |    | ≤ 2%                                    |    | ≤ 2%                                    |    | ≤ 2%                                    |    | ≤ 2%                                    |    | ≤ 2%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 5.Tidak terjadinya kesalahan pemberian label.                      | 100%                                    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 6.Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi                 | Dokter spesialis radiologi              | Dokter spesialis radiologi              |    | Dokter spesialis radiologi              |    | Dokter spesialis radiologi              |    | Dokter spesialis radiologi              |    | Dokter spesialis radiologi              |    | Dokter spesialis radiologi               |    |                      |
|      |                                                              | 7.Kepuasan Pelanggan                                               | ≥ 80 %                                  | ≥ 80 %                                  |    | ≥ 80 %                                  |    | ≥ 80 %                                  |    | ≥ 80 %                                  |    | ≥ 80 %                                  |    | ≥ 80 %                                   |    |                      |
|      |                                                              | <b>H. Laboratorium Patologi Klinik</b>                             |                                         |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                         |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1.Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik                   | Sesuai kelas RS                         | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                         |    | Sesuai kelas RS                          |    |                      |
|      |                                                              | 2. Fasilitas dan peralatan                                         | SesuaiKelas RS                          | SesuaiKelas RS                          |    | SesuaiKelas RS                          |    | SesuaiKelas RS                          |    | SesuaiKelas RS                          |    | SesuaiKelas RS                          |    | SesuaiKelas RS                           |    |                      |
|      |                                                              | 3. Waktu tunggu pelayanan laboratorium                             | < 120 Menit                             | < 120 Menit                             |    | < 120 Menit                             |    | < 120 Menit                             |    | < 120 Menit                             |    | < 120 Menit                             |    | < 120 Menit                              |    |                      |
|      |                                                              | 4. Tidak adanya kejadian tertukar specimen                         | 100%                                    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 5.Kemampuan memeriksaHIV-AIDS                                      | Tersedia Peralatan, dan Reagen          | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen           |    |                      |
|      |                                                              | 6.Kemampuan Mikroskopis TB Paru                                    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen          |    | Tersedia Peralatan, dan Reagen           |    |                      |
|      |                                                              | 7. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium                       | Dokter Spesialis Patologi Klinik        | Dokter Spesialis Patologi Klinik        |    | Dokter Spesialis Patologi Klinik        |    | Dokter Spesialis Patologi Klinik        |    | Dokter Spesialis Patologi Klinik        |    | Dokter Spesialis Patologi Klinik        |    | Dokter Spesialis Patologi Klinik         |    |                      |
|      |                                                              | 8. tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium | 100%                                    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                    |    | 100%                                     |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                               | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016  |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |  | OPD Penangung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|------------------------------------------|--|---------------------|
|      |                                                              |                                                                                    |                                        | 2017                                   |    | 2018                                   |    | 2019                                   |    | 2020                                   |    | 2021                                   |    |                                        |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              |                                                                                    |                                        | Target                                 | Rp | Target                                 | Rp | Target                                 | Rp | Target                                 | Rp | Target                                 | Rp | Target                                 | Rp |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 9.Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal                                 | 100%                                   | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 10.Kepuasan pelanggan                                                              | ≥ 80 %                                 | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | I. Pelayanan Rehabilitasi Medik                                                    |                                        |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 1.Pemberi pelayanan rehabilitasi medik                                             | Sesuai persyaratan kelas rumah sakit   | Sesuai persyarat an kelas rumah sakit  |    | Sesuai persyarat a n kelas rumah sakit |    | Sesuai persyarat a n kelas rumah sakit |    | Sesuai persyarat a n kelas rumah sakit |    | Sesuai persyarat a n kelas rumah sakit |    | Sesuai persyarat an kelas rumah sakit  |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 2.Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis                                       | Sesuai kelas rumah sakit               | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 3.Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik                      | 100%                                   | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 4.Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan | ≤ 50 %                                 | ≤ 50 %                                 |    | ≤ 50 %                                 |    | ≤ 50 %                                 |    | ≤ 50 %                                 |    | ≤ 50 %                                 |    | ≤ 50 %                                 |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 5.Kepuasan pelanggan                                                               | ≥ 80 %                                 | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | J. Pelayanan Farmasi                                                               |                                        |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                        |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 1.Pemberi pelayanan farmasi                                                        | Sesuai kelas rumah sakit               | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi                                       | Sesuai kelas rumah sakit               | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    | Sesuai kelas rumah sakit               |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 3.Ketersediaan formularium                                                         | Tersedia dan updated paling lama 3 thn | Tersedia dan updated paling lama 3 thn |    | Tersedia dan updated paling lama 3 thn |    | Tersedia dan updated paling lama 3 thn |    | Tersedia dan updated paling lama 3 thn |    | Tersedia dan updated paling lama 3 thn |    | Tersedia dan updated paling lama 3 thn |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 4.Waktu tunggu pelayanan obat jadi                                                 | ≤ 30 menit                             | ≤ 30 menit                             |    | ≤ 30 menit                             |    | ≤ 30 menit                             |    | ≤ 30 menit                             |    | ≤ 30 menit                             |    | ≤ 30 menit                             |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 5. Waktu tunggu pelayanan obat racikan                                             | ≤ 60 menit                             | ≤ 60 menit                             |    | ≤ 60 menit                             |    | ≤ 60 menit                             |    | ≤ 60 menit                             |    | ≤ 60 menit                             |    | ≤ 60 menit                             |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 6. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat                                  | 100%                                   | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    | 100%                                   |    |                                          |  |                     |
|      |                                                              | 7. Kepuasan pelanggan                                                              | ≥ 80 %                                 | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    | ≥ 80 %                                 |    |                                          |  |                     |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                 | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |    | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                                      |                                       | 2017                            |    | 2018                            |    | 2019                            |    | 2020                            |    | 2021                            |    | Target                                   | Rp |                      |
|      |                                                              |                                                                      |                                       | Target                          | Rp | Target                          | Rp | Target                          | Rp | Target                          | Rp | Target                          | Rp |                                          |    |                      |
|      |                                                              | <b>K. Pelayanan Gizi</b>                                             |                                       |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1.Pemberi pelayanan gizi                                             | Sesuai pola ketenagaan tersedia       | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia          |    |                      |
|      |                                                              | 2.Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi                             | Sesuai pola ketenagaan tersedia       | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia |    | Sesuai pola ketenagaan tersedia          |    |                      |
|      |                                                              | 3.Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien                      | ≥ 90 %                                | ≥ 90 %                          |    | ≥ 90 %                          |    | ≥ 90 %                          |    | ≥ 90 %                          |    | ≥ 90 %                          |    | ≥ 90 %                                   |    |                      |
|      |                                                              | 4.Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet                     | 100%                                  | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 5.Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien                        | ≤ 20 %                                | ≤ 20 %                          |    | ≤ 20 %                          |    | ≤ 20 %                          |    | ≤ 20 %                          |    | ≤ 20 %                          |    | ≤ 20 %                                   |    |                      |
|      |                                                              | 6.Kepuasan pelanggan                                                 | ≥ 80 %                                | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                                   |    |                      |
|      |                                                              | <b>L. Pelayanan Transfusi Darah</b>                                  |                                       |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1.Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit                   | Sesuai Standar BDRS                   | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS                      |    |                      |
|      |                                                              | 2.Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit        | Sesuai Standar BDRS                   | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS             |    | Sesuai Standar BDRS                      |    |                      |
|      |                                                              | 3.Kejadian reaksi transfusi                                          | ≤ 0,01 %                              | ≤ 0,01 %                        |    | ≤ 0,01 %                        |    | ≤ 0,01 %                        |    | ≤ 0,01 %                        |    | ≤ 0,01 %                        |    | ≤ 0,01 %                                 |    |                      |
|      |                                                              | 4.Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit | 100%                                  | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | Kepuasan pelanggan                                                   | ≥ 80 %                                | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                          |    | ≥ 80 %                                   |    |                      |
|      |                                                              | <b>M. Pelayanan Gakin</b>                                            |                                       |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                 |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1.Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin                       | Tersedia                              | Tersedia                        |    | Tersedia                        |    | Tersedia                        |    | Tersedia                        |    | Tersedia                        |    | Tersedia                                 |    |                      |
|      |                                                              | 2.Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin                | ada                                   | ada                             |    | ada                             |    | ada                             |    | ada                             |    | ada                             |    | ada                                      |    |                      |
|      |                                                              | 3.Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin         | ≤ 15 menit                            | ≤ 15 menit                      |    | ≤ 15 menit                      |    | ≤ 15 menit                      |    | ≤ 15 menit                      |    | ≤ 15 menit                      |    | ≤ 15 menit                               |    |                      |
|      |                                                              | 4. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin  | 100%                                  | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 5.Semua pasien keluarga miskin yang dilayani                         | 100%                                  | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                            |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 6.Kepuasan pelanggan                                                 | ≥ 80%                                 | ≥ 80%                           |    | ≥ 80%                           |    | ≥ 80%                           |    | ≥ 80%                           |    | ≥ 80%                           |    | ≥ 80%                                    |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016                            |                                                                  |                                                                  |            |                                                                  |            |                                                                  |            |                                                                  |            |                                                                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                                                                 | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 2017                                                             |                                                                  | 2018       |                                                                  | 2019       |                                                                  | 2020       |                                                                  | 2021       |                                                                  |                                          |                                                                 |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Target                                                           | Rp                                                               | Target     | Rp                                                               | Target     | Rp                                                               | Target     | Rp                                                               | Target     | Rp                                                               | Target                                   | Rp                                                              |                      |
|      |                                                              | <b>N. Pelayanan Rekam Medik</b><br>1.Pemberi pelayanan Rekam medik<br><br>2.Waktu penyediaan dokumen Rekam medik rawat jalan<br>3.Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap<br>4. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan ‘<br><br>5.Kelengkapan <i>informed Concent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas<br>6. Kepuasan pelanggan | Sesuai persyaratan                                               | Sesuai persyaratan                                               | Sesuai persyaratan                                               |            | Sesuai persyaratan                                               |            | Sesuai persyaratan                                               |            | Sesuai persyaratan                                               |            | Sesuai persyaratan                                               |                                          |                                                                 |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 10 menit                                                       | ≤ 10 menit                                                       |                                                                  | ≤ 10 menit |                                                                  | ≤ 10 menit |                                                                  | ≤ 10 menit |                                                                  | ≤ 10 menit |                                                                  | ≤ 10 menit                               |                                                                 |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 15 menit                                                       | ≤ 15 menit                                                       |                                                                  | ≤ 15 menit |                                                                  | ≤ 15 menit |                                                                  | ≤ 15 menit |                                                                  | ≤ 15 menit |                                                                  | ≤ 15 menit                               |                                                                 |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                             | 100%                                                             |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%                                     |                                                                 |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                             | 100%                                                             |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%       |                                                                  | 100%                                     |                                                                 |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 80%                                                            | ≥ 80%                                                            |                                                                  | ≥ 80%      |                                                                  | ≥ 80%      |                                                                  | ≥ 80%      |                                                                  | ≥ 80%      |                                                                  | ≥ 80%                                    |                                                                 |                      |
|      |                                                              | <b>O. Pengelolaan Limbah</b><br>1.Adanya penanggungjawab pengelola limbah rumah sakit<br><br>2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit: padat, cair<br>3. Pengelolaan limbah cair<br><br>4.Pengelolaan limbah padat<br><br>5.Baku mutu limbah cair                                                                                                       | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  |            | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  |            | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  |            | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  |            | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)  |                                          | Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004) |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesuai peraturan perundangan                                     | Sesuai peraturan perundangan                                     | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |                                          | Sesuai peraturan perundangan                                    |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesuai peraturan perundangan                                     | Sesuai peraturan perundangan                                     | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |                                          | Sesuai peraturan perundangan                                    |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesuai peraturan perundangan                                     | Sesuai peraturan perundangan                                     | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |            | Sesuai peraturan perundangan                                     |                                          | Sesuai peraturan perundangan                                    |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. |            | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. |            | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. |            | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. |            | a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.BH< 30 mg/l. |                                          | Sesuai peraturan perundangan                                    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                  | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |    | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                                                       |                                       | 2017    |    | 2018    |    | 2019    |    | 2020    |    | 2021    |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              |                                                                                       |                                       | Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp | Target                                   | Rp |                      |
|      |                                                              | P. Administrasi dan Manajemen                                                         |                                       |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |                                          |    |                      |
|      |                                                              | 1.Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi. | ≥ 90%                                 | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%                                    |    |                      |
|      |                                                              | 2.Adanya peraturan internal rumah sakit                                               | Ada                                   | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada                                      |    |                      |
|      |                                                              | 3.Adanya peraturan karyawan rumah sakit                                               | Ada                                   | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada                                      |    |                      |
|      |                                                              | 4.Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan                                           | Ada                                   | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada                                      |    |                      |
|      |                                                              | 5. adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit                                     | Ada                                   | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada                                      |    |                      |
|      |                                                              | 6.adanya perencanaan pengembangan SDM                                                 | Ada                                   | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada     |    | Ada                                      |    |                      |
|      |                                                              | 7. Tindak lanjut penyelesaian pertemuan direksi                                       | 100%                                  | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 8.Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat                                         | 100%                                  | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 9.Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala                                             | 100%                                  | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM                                              | ≥ 90%                                 | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%   |    | ≥ 90%                                    |    |                      |
|      |                                                              | 11.Ketepatan penyusunan laporan keuangan                                              | 100%                                  | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 12. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap                     | ≤ 2 Jam                               | ≤ 2 Jam |    | ≤ 2 Jam |    | ≤ 2 Jam |    | ≤ 2 Jam |    | ≤ 2 Jam |    | ≤ 2 Jam                                  |    |                      |
|      |                                                              | 13.Cost recoveruy                                                                     | ≥ 60%                                 | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%                                    |    |                      |
|      |                                                              | 14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja                                       | 100%                                  | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%                                     |    |                      |
|      |                                                              | 15. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun                               | ≥ 60%                                 | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%   |    | ≥ 60%                                    |    |                      |
|      |                                                              | 16. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu.                      | 100%                                  | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%    |    | 100%                                     |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |  | OPD Penangun g Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|----------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | 2017                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2018                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2019                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2020                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2021                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                           |    |                                          |  |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | Target                                                                                                                    | Rp                                                                                                                        | Target                                                                                                                    | Rp                                                                                                                        | Target                                                                                                                    | Rp                                                                                                                        | Target                                                                                                                    | Rp                                                                                                                        | Target                                                                                                                    | Rp                                                                                                                        | Target                                                                                                                    | Rp |                                          |  |                      |
|      |                                                              | <b>Q. Ambulance/ Kereta Jenazah</b><br>1.Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah<br>2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah<br>3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah<br>4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit<br>5.Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan<br>6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit<br>7.Kepuasan pelanggan | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% | 24 jam<br>Supir ambulans terlatih<br>Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah<br>≤ 30 menit<br>≤ 30 menit<br>100%<br>80% |    |                                          |  |                      |
|      |                                                              | <b>R. Pemulasaran Jenazah</b><br>1. Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah.<br>2.Ketersediaan fasilitas kamar jenazah<br>3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah<br>4.Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah<br>5.Perawatan jenazah sesuai standar universal<br>6.Tidak terjadinya kesalahan identifikasi<br>7. Kepuasan pelanggan                                                                                             | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     | 24 jam<br>Sesuai kelas rumah sakit<br>Ada SK Direktur<br>≤ 15 menit setelah di kamar jenazah<br>100%<br>100%<br>≥ 80%     |                                                                                                                           |    |                                          |  |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016                                                                                        |                                                                                                                          |    |                                                                                                                          |    |                                                                                                                          |    |                                                                                                                          |    |                                                                                                                          |                                                                                                                              | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |    | OPD Penangun g Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 2017                                                                                                                     |    | 2018                                                                                                                     |    | 2019                                                                                                                     |    | 2020                                                                                                                     |    | 2021                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                          |    |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Target                                                                                                                   | Rp | Target                                                                                                                   | Rp | Target                                                                                                                   | Rp | Target                                                                                                                   | Rp | Target                                                                                                                   | Rp                                                                                                                           | Target                                   | Rp |                      |
|      |                                                              | <b>S. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS</b><br>1.Adanya Penanggungjawab IPSRS<br>2.Ketersediaan bengkel kerja<br>3.Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit<br>4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan<br>5.Ketepatan waktu kalibrasi alat<br>6. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu.                                         | SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                | SK Direktur Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                   |    | SK Direktur Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                   |    | SK Direktur Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                   |    | SK Direktur Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                   |    | SK Direktur Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                   | SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>≥ 80%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>≥ 75%                                                |                                          |    |                      |
|      |                                                              | <b>T. Pelayanan Laundry</b><br>1. Ketersediaan pelayanan laundry<br>2.Adanya penanggungjawab pelayanan laundry<br>3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry.<br>4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan<br>5.Ketepatan pengelolaan linen infeksius<br>6. Ketersediaan linen<br><br>7. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi | Tersedia<br><br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% | Tersedia<br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% |    | Tersedia<br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% |    | Tersedia<br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% |    | Tersedia<br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% |    | Tersedia<br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% | Tersedia<br><br>Ada SK Direktur<br><br>Tersedia<br><br>100%<br><br>100%<br><br>2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur<br><br>100% |                                          |    |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                  | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | OPD Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                       |                                       | 2017                              |               | 2018                              |               | 2019                              |               | 2020                              |               | 2021                              |               | Target                                   | Rp             |                      |
|      |                                                              |                                                                                                                       |                                       | Target                            | Rp            | Target                            | Rp            | Target                            | Rp            | Target                            | Rp            | Target                            | Rp            |                                          |                |                      |
|      |                                                              | <b>U. Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI)</b>                                                                   |                                       |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                          |                |                      |
|      |                                                              | 1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih                                                                               | Anggota Tim PPI yang terlatih 75%     | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% |               | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% |               | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% |               | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% |               | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% |               | Anggota Tim PPI yang terlatih 75%        |                |                      |
|      |                                                              | 2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen                                                                    | ≥ 60%                                 | ≥ 60%                             |               | ≥ 60%                             |               | ≥ 60%                             |               | ≥ 60%                             |               | ≥ 60%                             |               | ≥ 60%                                    |                |                      |
|      |                                                              | 3.Rencana program PPI                                                                                                 | Ada                                   | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                                      |                |                      |
|      |                                                              | 4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana                                                                             | 100%                                  | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                                     |                |                      |
|      |                                                              | 5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas                                                                             | 100%                                  | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                                     |                |                      |
|      |                                                              | 6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ <i>health care associated infection</i> (HAI) di rumah sakit | ≥ 75%                                 | ≥ 75%                             |               | ≥ 75%                             |               | ≥ 75%                             |               | ≥ 75%                             |               | ≥ 75%                             |               | ≥ 75%                                    |                |                      |
|      |                                                              | <b>V. Pelayanan Keamanan</b>                                                                                          |                                       |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |               |                                          |                |                      |
|      |                                                              | 1. Petugas keamanan bersertifikat pengamanan                                                                          | 100%                                  | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                                     |                |                      |
|      |                                                              | 2. Sistem pengamanan                                                                                                  | Ada                                   | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                               |               | Ada                                      |                |                      |
|      |                                                              | 3. Petugas Keamanan melakukan keliling RS                                                                             | Setiap jam                            | Setiap jam                        |               | Setiap jam                        |               | Setiap jam                        |               | Setiap jam                        |               | Setiap jam                        |               | Setiap jam                               |                |                      |
|      |                                                              | 4. Evaluasi terhadap system pengamanan                                                                                | Setiap 3 bulan                        | Setiap 3 bulan                    |               | Setiap 3 bulan                    |               | Setiap 3 bulan                    |               | Setiap 3 bulan                    |               | Setiap 3 bulan                    |               | Setiap 3 bulan                           |                |                      |
|      |                                                              | 5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang.                                                | 100%                                  | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                              |               | 100%                                     |                |                      |
|      |                                                              | 6. Kepuasan pasien                                                                                                    | ≥ 90%                                 | ≥ 90%                             |               | ≥ 90%                             |               | ≥ 90%                             |               | ≥ 90%                             |               | ≥ 90%                             |               | ≥ 90%                                    |                |                      |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                        | Rp -                                  | 20%                               | 4.114.807.273 | 40%                               | 3.170.406.341 | 60%                               | 3.333.621.334 | 80%                               | 3.500.520.497 | 100%                              | 4.163.907.368 | 100%                                     | 18.283.262.814 |                      |
|      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                        | - Meningkatnya disiplin aparatur                                                                                      | Rp -                                  | 100%                              | 663.678.592   | 100%                              | 594.451.189   | 100%                              | 681.877.091   | 100%                              | 720.695.397   | 100%                              | 780.732.632   | 100%                                     | 3.441.434.900  |                      |
|      | Program Peningkatan Kapasitas SDM                            | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                            | Rp -                                  | 63%                               | 517.669.302   | 65%                               | 463.671.927   | 67%                               | 531.864.131   | 80%                               | 602.295.439   | 100%                              | 608.971.453   | 100%                                     | 2.724.472.252  |                      |
|      | Program Standarisasi Pelayanan                               | - RS Terakreditasi                                                                                                    | Rp -                                  | Paripurna                         | 464.575.015   | Paripurna                         | 416.115.832   | Paripurna                         | 477.313.964   | Paripurna                         | 494.191.129   | JCI                               | 546.512.842   | JCI                                      | 2.398.708.782  |                      |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                    | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 | OPD Penanggun g Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|      |                                                                                |                                                                                                         |                                       | 2017   |                 | 2018   |                 | 2019   |                 | 2020   |                 | 2021   |                 | Target                                   | Rp              |                       |
|      |                                                                                |                                                                                                         |                                       | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              |                                          |                 |                       |
|      | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat                          | - Capaian Jumlah Kegiatan PKRS dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkup RS dan Lingkungan Luar RS         | Rp -                                  | 100%   | 464.575.015     | 100%   | 416.115.832     | 100%   | 303.056.485     | 100%   | 442.712.886     | 100%   | 546.512.842     | 100%                                     | 2.172.973.060   |                       |
|      | Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit                          | - Presentase Sarana dan prasaran RS dalam kondisi baik                                                  | Rp -                                  | 20%    | 1.327.357.185   | 40%    | 1.192.865.386   | 60%    | 1.161.716.526   | 80%    | 1.235.477.823   | 100%   | 1.457.367.579   | 100%                                     | 6.374.784.498   |                       |
|      | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit                | Presentase Pemanfaatan dan jumlah Sarana dan Prasarana RS yang sesuai standar Oleh masyarakat Meningkat | Rp -                                  | 20%    | 24.542.516.220  | 40%    | 19.888.591.833  | 60%    | 22.618.115.912  | 80%    | 25.390.263.831  | 100%   | 27.989.228.093  | 100%                                     | 120.428.715.888 |                       |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                          | Rp -                                  | 100%   | 889.329.314     | 100%   | 693.526.387     | 100%   | 717.233.681     | 100%   | 746.434.518     | 100%   | 1.046.181.726   | 100%                                     | 4.092.705.626   |                       |
|      | JUMLAH                                                                         |                                                                                                         |                                       |        | 156.428.726.094 |        | 124.920.190.906 |        | 132.864.003.997 |        | 141.236.900.997 |        | 151.646.867.164 |                                          | 707.096.689.158 |                       |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome's)                   | Tahun 2016 |                   | Tahun 2017 |                   | Tahun 2018 |                   |        |                |        |                |        |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 | SKPD PENANGGUN G JAWAB | CATATAN PENGANGGARAN |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|      |                                                              |                                                         | Capaian    | Rp                | Capaian    | Rp                | Capaian    | Rp                | 2019   |                | 2020   |                | 2021   |                |                                          |                 |                        |                      |
| 2    |                                                              |                                                         |            |                   |            |                   |            |                   | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |                        |                      |
| 2    |                                                              |                                                         |            |                   |            |                   |            |                   |        |                |        |                |        |                |                                          |                 |                        |                      |
|      | Program :                                                    |                                                         | 86,79%     | 24.365.989.072,00 | 97,78%     | 26.577.125.222,00 | 89,14%     | 26.741.704.873,00 |        |                |        | 12.500.000.000 |        | 13.775.000.000 |                                          | 162.553.555.720 | UPT. RSUD MADANI       |                      |
|      | 1. Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Kesehatan BLUD       | 1. Perspektif Pelanggan                                 |            |                   |            |                   |            |                   | 95     | 58.593.736.553 |        |                |        |                |                                          |                 |                        |                      |
|      |                                                              |                                                         |            |                   |            |                   |            |                   |        |                |        |                |        |                |                                          |                 |                        |                      |
|      |                                                              |                                                         | 80,54%     | 22.973.172.513,00 | 98,36%     | 22.290.891.587,38 | 97,41%     | 17.659.846.712,40 |        |                |        |                |        |                |                                          |                 |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana (IPRS)  |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 200.000.000    | 100    | 500.000.000    | 100    | 600.000.000    | 100                                      | 1.300.000.000   |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rehab Medik    |            |                   |            |                   |            |                   | 75     | 150.000.000    | 100    | 200.000.000    | 100    | 225.000.000    | 100                                      | 575.000.000     |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu layanan Radiologi        |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 200.000.000    | 100    | 250.000.000    | 100    | 300.000.000    | 100                                      | 750.000.000     |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu layanan Farmasi          |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 6.500.000.000  | 100    | 6.500.000.000  | 100    | 7.000.000.000  | 100                                      | 20.000.000.000  |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu layanan Gizi             |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 3.500.000.000  | 100    | 3.500.000.000  | 100    | 3.750.000.000  | 100                                      | 10.750.000.000  |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu Transfusi darah (BDRS)   |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 300.000.000    | 100    | 325.000.000    | 100    | 350.000.000    | 100                                      | 975.000.000     |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pemulazaran jenazah      |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 10.000.000     | 100    | 10.000.000     | 100    | 10.000.000     | 100                                      | 30.000.000      |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu Ambulance/Kereta jenazah |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 15.000.000     | 100    | 15.000.000     | 100    | 15.000.000     | 100                                      | 45.000.000      |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu layanan Laboratorium     |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 500.000.000    | 100    | 750.000.000    | 100    | 1.000.000.000  | 100                                      | 2.250.000.000   |                        |                      |
|      |                                                              | kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit                |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 150.000.000    | 100    | 150.000.000    |        | 200.000.000    |                                          | 500.000.000     |                        |                      |
|      |                                                              | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan CSSD           |            |                   |            |                   |            |                   | 100    | 250.000.000    | 100    | 300.000.000    | 100    | 325.000.000    | 100                                      | 875.000.000     |                        |                      |



| Kode | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan Program<br>Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (outcome's)      | Tahun 2016 |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir<br>Periode RPJMD |                |         |                |         |                | SKPD<br>PENANGGUN<br>G JAWAB | CATATAN<br>PENGANGGARAN |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
|      |                                                                    |                                               | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | 2019                                        |                | 2020    |                | 2021    |                |                              |                         |  |  |
|      |                                                                    |                                               |            |                |            |                |            |                | Target                                      | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target                       | Rp                      |  |  |
|      | 2. Program Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran                   |                                               |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 85      | 10.500.000.000 | 95      | 12.000.000.000 |                              | 22.500.000.000          |  |  |
|      | 3 Program Peningkatan<br>Sumber Daya Rumah Sakit                   | Terpenuhinya Sumber<br>Daya Aparatur          |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 80      | 400.000.000    | 100     | 480.000.000    | 100                          | 880.000.000             |  |  |
|      | 4. Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                    | Terpenuhinya Sarana<br>dan Prasarana Aparatur |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 80      | 864.000.000    | 90      | 950.400.000    | 90                           | 1.814.400.000           |  |  |
|      |                                                                    | b. Pertumbuhan<br>Customer Loyalty            |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         |                |         |                |                              | -                       |  |  |
|      | 5 Program Peningkatan<br>Disiplin Aparatur                         | c. Indeks Kepuasan<br>Pelanggan               |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 80      | 300.000.000    | 95      | 400.000.000    | 95                           | 700.000.000             |  |  |
|      |                                                                    | 2. Perspektif Proses<br>Bisnis Internal       |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 85      |                | 90      |                | 90                           | -                       |  |  |
|      |                                                                    | 1. Quality of Place                           |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 0       |                | -       |                | -                            | -                       |  |  |
|      |                                                                    | a. Bed Occupancy Rate                         |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 0       |                | -       |                | -                            | -                       |  |  |
|      |                                                                    | b. Bed Turn Over                              |            |                |            |                |            |                |                                             |                | > 1     |                | > 1     |                | > 1                          | -                       |  |  |
|      | 6. Program Kebijakan<br>Manajemen Pelayanan<br>Rumah Sakit         |                                               |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         | 350.000.000    |         | 375.000.000    |                              | 725.000.000             |  |  |
|      |                                                                    | c. Turn Over Interval                         |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 80      | 500.000.000    | 90      | 550.000.000    | 90                           | 1.050.000.000           |  |  |
|      |                                                                    | d. Length of Stay                             |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         |                |         |                |                              | -                       |  |  |
|      | 7. Program Pengadaan dan<br>Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana RS | 2. Quality of Service                         |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 85      | 25.000.000.000 | 95      | 27.500.000.000 | 95                           | 52.500.000.000          |  |  |
|      |                                                                    | a. Gross Death Rate                           |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         |                |         |                |                              | -                       |  |  |
|      |                                                                    |                                               |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         |                |         |                |                              | -                       |  |  |
|      |                                                                    |                                               |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         |                |         |                |                              | -                       |  |  |
|      | 8. Program Peningkatan<br>Pelayanan RS                             | b. Net Death Rate                             |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 85      | 12.500.000.000 | 95      | 13.000.000.000 | 95                           | 25.500.000.000          |  |  |
|      |                                                                    | c. Angka Kematian<br>Bayi                     |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 30 Kali |                | 30 Kali |                | 30 Kali                      |                         |  |  |
|      |                                                                    | d. Angka Kematian Ibu                         |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 3 Hari  |                | 3 Hari  |                | 3 Hari                       |                         |  |  |
|      |                                                                    | 3. Perspektif<br>Pertumbuhan<br>Pembelajaran  |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 17 0/00 |                | 17 0/00 |                | 17 0/00                      |                         |  |  |
|      |                                                                    | a. Peningkatan<br>Kapabilitas                 |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 7 0/00  |                | 7 0/00  |                | 7 0/00                       |                         |  |  |
|      |                                                                    | Sumber Daya Manusia                           |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 0       |                | 0       |                | 0                            |                         |  |  |
|      |                                                                    | - Rata-Rata jumlah<br>karyawan yang           |            |                |            |                |            |                |                                             |                | 0       |                | 0       |                | 0                            |                         |  |  |
|      |                                                                    |                                               |            |                |            |                |            |                |                                             |                |         |                |         |                |                              |                         |  |  |
|      | JUMLAH                                                             |                                               |            | 47.339.161.585 |            | 48.868.016.809 |            | 44.401.551.585 |                                             | 58.593.736.553 |         | 62.914.000.000 |         | 69.030.400.000 |                              | 306.272.955.720         |  |  |

PERANGKAT DAERAH : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH

C

| KODE     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                      | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME)                                             | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |            |                 |            |                 | CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |            |                 |            |                 | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |                   | PD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                                                                                    | TAHUN 2016                                     |                 | TAHUN 2017 |                 | TAHUN 2018 |                 | TAHUN 2019                                            |                 | TAHUN 2020 |                 | TAHUN 2021 |                 |                                             |                   |                                                     |
|          |                                                                                         |                                                                                    | Capaian                                        | Rp.             | Capaian    | Rp.             | Capaian    | Rp.             | Target                                                | Rp.             | Target     | Rp.             | Target     | Rp.             | Target                                      | Rp.               |                                                     |
|          | URUSAN WAJIB                                                                            |                                                                                    |                                                |                 |            |                 |            |                 |                                                       |                 |            |                 |            |                 |                                             |                   |                                                     |
|          | BIDANG URUSAN : PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN RUANG                                    |                                                                                    |                                                |                 |            |                 |            |                 |                                                       |                 |            |                 |            |                 |                                             |                   | Dinas Bina Marga<br>dan Penataan Ruang              |
| 03.01.01 | 1. Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Cakupan layanan administrasi<br>perkantoran (%)                                    | 20                                             | 1.402.385.000   | 40         | 2.295.953.728   | 60         | 1.908.313.692   | 60                                                    | 1.717.665.750   | 80         | 1.543.720.537   | 100        | 1.762.896.111   | 100                                         | 10.630.934.818    | Sekretariat                                         |
| 03.01.02 | 2. Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Cakupan layanan sarana dan<br>prasarana aparatur (%)                               | 20                                             | 3.886.956.246   | 40         | 2.752.819.526   | 60         | 3.994.730.263   | 60                                                    | 2.118.096.750   | 80         | 1.903.600.541   | 100        | 2.173.871.444   | 100                                         | 16.830.074.770    | Sekretariat                                         |
| 03.01.03 | 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                | Persentase peningkatan disiplin<br>aparatur (%)                                    | 20                                             | 358.174.400     | 40         | 108.762.550     | 60         | 71.795.450      | 60                                                    | 192.559.250     | 80         | 173.059.088     | 100        | 197.629.808     | 100                                         | 1.101.980.547     | Sekretariat                                         |
| 03.01.05 | 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                | Persentase sumberdaya aparatur yang<br>memiliki kompetensi sesuai bidangnya<br>(%) | 20                                             | 648.036.200     | 40         | 170.200.350     | 60         | 185.892.956     | 60                                                    | 215.013.400     | 80         | 193.239.343     | 100        | 220.675.231     | 100                                         | 1.633.057.480     | Sekretariat                                         |
| 03.01.06 | 5. Program Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan<br>Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan<br>capaian kinerja dan keuangan (%)              | 100                                            | 2.171.715.769   | 100        | 1.253.985.300   | 100        | 1.596.819.425   | 100                                                   | 1.197.292.157   | 80         | 1.076.044.330   | 100        | 1.228.819.802   | 100                                         | 8.524.676.783     | Sekretariat                                         |
| 03.01.15 | 6. Program Penyelenggaraan Jalan                                                        | Meningkatnya persentase kondisi<br>mantap jaringan jalan provinsi (%)              | 58,85                                          | 262.181.956.599 | 60,89      | 125.350.467.195 | 60,46      | 136.951.563.523 | 61,00                                                 | 207.319.673.577 | 61,50      | 192.802.092.898 | 62,00      | 220.175.900.848 | 62,00                                       | 1.144.781.654.639 | Bidang Jalan dan<br>Jembatan,<br>Bidang Bina Teknik |
|          |                                                                                         | Meningkatnya persentase konektivitas<br>jaringan jalan Provinsi (%)                | 74,31                                          |                 | 83,32      |                 | 82,86      |                 | 82,91                                                 |                 | 82,97      |                 | 83,02      |                 | 83,02                                       |                   |                                                     |
|          | Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Kebinamargaan                               |                                                                                    |                                                | 8.567.836.940   |            |                 |            |                 |                                                       |                 |            |                 |            |                 |                                             |                   | Bidang Jalan dan<br>Jembatan                        |
| 03.01.01 | 7. Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Cakupan layanan administrasi<br>perkantoran (%)                                    | 20                                             |                 | 40         | 539.787.330     | 60         | 479.067.600     | 60                                                    | 909.300.412     | 80         | 817.217.040     | 100        | 933.244.527     | 100                                         | 3.678.616.909     | UPT. Laboratorium<br>dan Pengujian Bahan            |
| 03.01.31 | 8. Program Pelayanan Pengujian                                                          | Meningkatnya persentase jumlah<br>pelayanan pengujian (%)                          | 60,00                                          | 1.799.375.830   | 91,03      | 634.884.354     | 109,74     | 945.717.350     | 87,43                                                 | 1.478.401.588   | 93,71      | 1.328.686.267   | 100        | 1.517.331.536   | 100                                         | 7.704.396.924     | UPT. Laboratorium<br>dan Pengujian Bahan            |
|          |                                                                                         | Tingkat kepuasan pelanggan atas<br>layanan uji mutu                                | A                                              |                 | A          |                 | A          |                 | A                                                     |                 | A          |                 | A          |                 | A                                           |                   |                                                     |

| KODE     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               | CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |                | PD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | TAHUN 2016                                     |               | TAHUN 2017 |               | TAHUN 2018 |               | TAHUN 2019                                            |               | TAHUN 2020 |               | TAHUN 2021 |               |                                             |                |                             |
|          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | Capaian                                        | Rp.           | Capaian    | Rp.           | Capaian    | Rp.           | Target                                                | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target                                      | Rp.            |                             |
| 03.01.32 | 9 Program Sistem Informasi Jasa Konstruksi                         | Tersedianya layanan kelembagaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi<br><br>Tersedianya data dan informasi sumber daya konstruksi serta layanan informasi produk pembinaan jasa konstruksi | -                                              | -             | -          | -             | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 7          | 831.496.841   | 13                                          | 831.496.841    | Bidang Bina Jasa Konstruksi |
|          | Program Pengaturan Jasa Konstruksi                                 | Terpenuhinya data IUJK kabupaten/kota yang terbaharui (kab/kota)                                                                                                                                       | -                                              | -             | 5          | 339.704.600   | 3          | 326.341.200   | 10                                                    | 409.262.350   | 6          | 728.119.338   | -          | -             | -                                           | 1.803.427.488  |                             |
| 03.01.34 | 10. Program Pengembangan Tenaga Ahli Konstruksi                    | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas konstruksi provinsi dan kabupaten/kota (provinsi/kabupaten/kota)                                                                                             | -                                              | -             | -          | -             | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 13         | 1.462.948.166 | 13                                          | 1.462.948.166  | Bidang Bina Jasa Konstruksi |
|          |                                                                    | Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompentensi (%)                                                                                                                                         | -                                              | -             | -          | -             | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 100        | -             | 100                                         | -              |                             |
|          | Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi                               | Terpublikasinya profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota (Provinsi/Kab./Kota)                                                                                                    | -                                              | -             | -          | 841.264.055   | 3          | 988.190.432   | 13                                                    | 1.425.413.524 | 13         | 1.281.064.218 | -          | -             | -                                           | 4.535.932.229  |                             |
|          |                                                                    | Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompentensi (%)                                                                                                                                         | 27,58                                          | -             | 87,39      | -             | 96,21      | -             | 98,00                                                 | -             | 80,00      | -             | -          | -             | -                                           | -              |                             |
| 03.01.35 | 11 Program Sistem Informasi Jasa Konstruksi                        | Terlaksananya Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi                                                                                                                                                   | -                                              | -             | -          | -             | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 100        | 288.914.794   | 100                                         | 288.914.794    | Bidang Bina Jasa Konstruksi |
|          | Program Pengawasan Jasa Konstruksi                                 | Persentase Paket Pekerjaan Konstruksi selesai tepat waktu (%)                                                                                                                                          | -                                              | -             | 88,46      | 560.829.775   | 90,00      | 257.575.775   | 95                                                    | 281.502.150   | 100        | 252.994.886   | -          | -             | -                                           | 1.352.902.586  |                             |
|          |                                                                    | Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah                                                                                                                                                          | 0,76                                           | -             | 0,38       | -             | 0,37       | -             | 0,52                                                  | -             | -          | -             | -          | -             | -                                           | -              | -                           |
|          | Program Pembinaan Konstruksi                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                | 2.129.835.000 |            |               |            |               |                                                       |               |            |               |            |               |                                             | 2.129.835.000  | Bidang Bina Jasa Konstruksi |
| 03.01.39 | 12 Program Perencanaan Tata Ruang                                  | Meningkatnya Persentase Raperda Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang yang Ditetapkan                                                                                                              | -                                              | -             | -          | -             | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 100        | 5.414.463.904 | 100                                         | 5.414.463.904  | Bidang Penataan Ruang       |
|          |                                                                    | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)                                                  | -                                              | -             | 41         | 1.227.986.200 | 44         | 2.340.922.275 | 33                                                    | 5.735.628.700 | 67         | 4.858.008.802 | -          | -             | -                                           | 14.162.545.977 |                             |

| KODE     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME)                                      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |     |            |             |            |               | CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |               | PD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|          |                                                                    |                                                                             | TAHUN 2016                                     |     | TAHUN 2017 |             | TAHUN 2018 |               | TAHUN 2019                                            |               | TAHUN 2020 |               | TAHUN 2021 |               |                                             |               |                           |
|          |                                                                    |                                                                             | Capaian                                        | Rp. | Capaian    | Rp.         | Capaian    | Rp.           | Target                                                | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target                                      | Rp.           |                           |
| 03.01.40 | 13. Program Pemanfaatan Ruang                                      | Meningkatnya Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi | -                                              | -   | -          | -           | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 10         | 999.593.336   | 20                                          | 999.593.336   | Bidang Penataan Ruang     |
|          |                                                                    | Terlaksananya sosialisasi regulasi/NSPK Pemanfaatan Ruang (dokumen)         | -                                              | -   | 1          | 856.222.800 | 1          | 765.308.100   | 5                                                     | 801.051.475   | 5          | 809.668.134   | -          | -             | -                                           | 3.232.250.509 |                           |
| 03.01.41 | 14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                         | Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diselesaikan                       | -                                              | -   | -          | -           | -          | -             | -                                                     | -             | -          | -             | 2          | 1.581.161.729 | 4                                           | 1.581.161.729 | Bidang Penataan Ruang     |
|          |                                                                    | Meningkatnya Kinerja POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang                   | -                                              | -   | 1          | 956.976.600 | 1          | 1.571.526.600 | 1                                                     | 1.540.594.100 | 1          | 1.384.580.644 | -          | -             | -                                           | 5.453.677.944 |                           |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                        | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                  |            |                  |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
|      |                                                              |                                                                                             | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                  | Tahun 2019 |                  | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                |                    |
|      |                                                              |                                                                                             | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp               | Capaian    | Rp               | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian                                  | Rp             |                    |
|      |                                                              | URUSAN PILIHAN                                                                              |                                                       |    |            |                |            |                  |            |                  |            |               |            |               |                                          |                |                    |
|      |                                                              | BIDANG URUSAN : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR                                       |                                                       |    |            |                |            |                  |            |                  |            |               |            |               |                                          |                |                    |
|      |                                                              | DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR                                                       |                                                       |    |            |                |            |                  |            | 131.610.000.000  |            |               |            |               |                                          |                |                    |
| 1    |                                                              | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                  | -                                                     | -  | 20%        | 1.817.789.910  | 40%        | 2.319.749.200    | 60%        | 4.700.000.000    | 80%        | 4.850.000.000 | 100%       | 4.900.000.000 | 100%                                     | 14.450.000.000 |                    |
| 2    |                                                              | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                           | -                                                     |    |            | 2.490.791.001  | 40%        | 4.951.390.484,00 | 60%        | 3.900.000.000,00 | 80%        | 3.250.000.000 | 100%       | 3.400.000.000 | 100%                                     | 10.550.000.000 |                    |
| 3    |                                                              | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                       |                                                       |    |            | 224.988.200    | 40%        | 466.475.000,00   | 60%        | 1.600.000.000,00 | 80%        | 3.350.000.000 | 100%       | 1.820.000.000 | 100%                                     | 6.770.000.000  |                    |
| 4    |                                                              | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                          | -                                                     |    |            | 52.300.000     | 40%        | 276.949.800      | 60%        | 460.000.000      | 80%        | 470.000.000   | 100%       | 476.000.000   | 100%                                     | 1.406.000.000  |                    |
| 5    |                                                              | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan              | -                                                     |    |            | 920.475.600    | 100%       | 1.208.229.800    | 100%       | 3.000.000.000    | 100%       | 3.100.000.000 | 100%       | 3.200.000.000 | 100%                                     | 9.300.000.000  |                    |
| 6    |                                                              | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                    |                                                       |    | 2 Laporan  | 312.037.300    | 100%       | 465.432.000      | 100%       | 560.000.000,00   | 100%       | 590.000.000   | 100%       | 594.000.000   | 100%                                     | 1.744.000.000  |                    |
| 7    |                                                              | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  |                                                       |    |            | 16.581.115.586 | 0,727      | 35.038.508.400   |            |                  |            |               |            |               |                                          | -              |                    |
| 8    |                                                              | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku                                                 |                                                       |    |            | 976.027.400    | 10 Ltr/det | 2.180.906.950    | 9          | 2.500.000.000,00 | 10 Ltr/det | 2.650.000.000 | 10 Ltr/det | 2.800.000.000 | 29 Ltr/det                               | 7.950.000.000  |                    |
| 9    |                                                              | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya |                                                       |    |            | 1.826.582.300  | 19 Ha      | 2.205.842.000    | 15 Ha      | 3.010.000.000,00 | 19 Ha      | 3.946.000.000 | 19 Ha      | 4.850.600.000 | 53 Ha                                    | 11.806.600.000 |                    |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan      | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |                               |                |                  |                  |                |                |               |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
|      |                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |                | Tahun 2018                    |                | Tahun 2019       |                  | Tahun 2020     |                | Tahun 2021    |                |                                          |                |                    |
|      |                                                                   |                                                                                                                                                                           | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp             | Capaian                       | Rp             | Capaian          | Rp               | Capaian        | Rp             | Capaian       | Rp             | Capaian                                  | Rp             |                    |
| 10   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di Provinsi Sulawesi Tengah                                                                                     |                                                       |    |            | 15.214.217.600 | 1 IPLT Regional dan 4 Kawasan | 7.047.290.700  |                  |                  |                |                |               |                | -                                        | -              |                    |
|      |                                                                   | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di kawasan Strategis Daerah Provinsi |                                                       |    |            |                |                               | 150 RT         | 5.700.000.000,00 | 150 RT           | 6.840.000.000  | 150 RT         | 8.208.000.000 | 450 RT         | 20.748.000.000                           |                |                    |
|      |                                                                   | Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                        |                                                       |    |            |                |                               | 86 RT          | 1.600.000.000,00 | 95 RT            | 1.950.000.000  | 104 RT         | 2.400.000.000 | 285 RT         | 5.950.000.000                            |                |                    |
| 11   | Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai                   | Luas Kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)                                                                                                               |                                                       |    |            | 5.068.925.400  | 4 Ha                          | 10.059.429.600 | 28 Ha            | 9.780.000.000,00 | 7 Ha           | 13.890.000.000 | 8 Ha          | 18.906.000.000 | 43 Ha                                    | 42.576.000.000 |                    |
| 12   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan              | Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Tengah                                                                                                  |                                                       |    |            | 2.386.026.800  | 1 TPA Regional dan 5 Kawasan  | 650.000.000    | -                | 0,00             | -              | -              | -             | -              | -                                        | -              |                    |
| 13   | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh           | Termanfaatkannya bangunan gedung yang ditetapkan berfungsi strategis daerah provinsi                                                                                      |                                                       |    |            | 12.759.482.600 | 4 Gedung                      | 14.111.252.225 |                  |                  |                |                |               |                | -                                        | -              |                    |
|      |                                                                   | Terpeliharanya infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi                                                                                         |                                                       |    |            |                |                               | 2 kawasan      | 20.800.000.000   | 2 kawasan        | 43.000.000.000 | 2 kawasan      | 6.000.000.000 | 6 kawasan      | 69.800.000.000                           |                |                    |
| 14   | Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong                | Luas daerah genangan yang tertangani (Ha)                                                                                                                                 |                                                       |    |            | 5.005.959.200  | 400                           | 3.244.294.850  | 400 Ha           | 7.100.000.000,00 | 400 Ha         | 7.600.000.000  | 400 Ha        | 8.100.000.000  | 1200 Ha                                  | 22.800.000.000 |                    |
|      | UPT SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH                           |                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |                |                               |                |                  | 6.730.000.000    |                |                |               |                |                                          |                |                    |
| 15   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                                                                                  |                                                       |    |            |                | 40%                           | 279.400.000    | -                | 0                | 0%             | -              | 0%            | -              | -                                        | -              |                    |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                              |                                                       |    |            |                |                               |                | 60%              | 80.000.000       | 80%            | 96.000.000     | 100%          | 115.200.000    | 100%                                     | 291.200.000    |                    |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                                                                                  |                                                       |    |            |                |                               |                | 60%              | 200.000.000      | 80%            | 240.000.000    | 100%          | 288.000.000    | 100%                                     | 728.000.000    |                    |
|      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                             | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                             |                                                       |    |            |                |                               |                | 60%              | 250.000.000      | 80%            | 300.000.000    | 100%          | 360.000.000    | 100%                                     | 910.000.000    |                    |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                               | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                    | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                  |                                                  |                 |               |                 |               |                 |               |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 | PD Penangung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|      |                                                                                            |                                                                                                         | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |                  | Tahun 2018                                       |                 | Tahun 2019    |                 | Tahun 2020    |                 | Tahun 2021    |                 |                                          |                 |                    |
|      |                                                                                            |                                                                                                         | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp               | Capaian                                          | Rp              | Capaian       | Rp              | Capaian       | Rp              | Capaian       | Rp              | Capaian                                  | Rp              |                    |
| 16   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                          | Terpenuhinya pelayanan air minum dan air limbah.                                                        |                                                       |    |            |                  | Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala | 237.020.000     |               |                 |               |                 |               |                 |                                          |                 |                    |
|      |                                                                                            | Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. |                                                       |    |            |                  |                                                  | 0%              | 6.200.000.000 | 50%             | 7.500.000.000 | 100%            | 9.000.000.000 | 100%            | 22.700.000.000                           |                 |                    |
|      |                                                                                            | UPT SUMBER DAYA AIR WILAYAH I                                                                           |                                                       |    |            |                  |                                                  | 24.517.000.000  |               |                 |               |                 |               |                 |                                          |                 |                    |
| 17   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                            |                                                       |    |            | 142.331.273,00   | 40%                                              | 132.270.450     | 60%           | 142.000.000     | 80%           | 170.400.000     | 100%          | 204.480.000     | 100%                                     | 516.880.000     |                    |
| 18   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                      | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                |                                                       |    |            | 89.700.000,00    | 40%                                              | 1.302.406.950   | 60%           | 1.300.000.000   | 80%           | 1.560.000.000   | 100%          | 1.872.000.000   | 100%                                     | 4.732.000.000   |                    |
| 19   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                          | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                           |                                                       |    |            | 157.350.000,00   | 40%                                              | 242.638.850     | 60%           | 355.000.000     | 80%           | 200.000.000     | 100%          | 150.000.000     | 100%                                     | 705.000.000     |                    |
| 20   | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah OP Jaringan irigasi                                                                              |                                                       |    |            | 7.131.236.042,00 | 17 D.I                                           | 6.824.018.900   | 15 D.I        | 16.150.000.000  | 15 D.I        | 20.600.000.000  | 15 D.I        | 23.000.000.000  | 15 D.I                                   | 59.750.000.000  |                    |
| 21   | Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya | Luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (Ha)                                                    |                                                       |    |            | 267.000.000,00   | 3 Ha                                             | 747.062.400     | 3 Ha          | 2.570.000.000   | 3 Ha          | 2.950.000.000   | 3 Ha          | 3.250.000.000   | 9 Ha                                     | 8.770.000.000   |                    |
| 22   | Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai                                            | Luas kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)                                             |                                                       |    |            | 5.978.020.777,00 | 1 Ha                                             | 1.666.374.500   | 1 HA          | 4.000.000.000   | 1 Ha          | 4.800.000.000   | 1 Ha          | 5.000.000.000   | 3 Ha                                     | 13.800.000.000  |                    |
|      |                                                                                            | UPT SUMBER DAYA AIR WILAYAH II                                                                          |                                                       |    |            |                  |                                                  |                 |               | 24.412.000.000  |               |                 |               |                 |                                          |                 |                    |
| 23   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                            |                                                       |    |            | 151.170.677,00   | 40%                                              | 101.915.233     | 60%           | 142.000.000     | 80%           | 170.400.000     | 100%          | 204.480.000     | 100%                                     | 516.880.000     |                    |
| 24   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                      | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                |                                                       |    |            | 17.300.000,00    | 40%                                              | 1.404.014.000   | 60%           | 1.600.000.000   | 80%           | 1.920.000.000   | 100%          | 2.304.000.000   | 100%                                     | 5.824.000.000   |                    |
| 25   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                          | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                           |                                                       |    |            | 165.179.000,00   | 40%                                              | 119.950.000     | 60%           | 220.000.000     | 80%           | 264.000.000     | 100%          | 316.800.000     | 100%                                     | 800.800.000     |                    |
| 26   | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah OP Jaringan irigasi                                                                              |                                                       |    |            | 7.330.258.300,00 | 15 D.I                                           | 7.015.067.500   | 15 Unit       | 14.600.000.000  | 15 D.I        | 16.200.000.000  | 15 D.I        | 18.000.000.000  | 15 D.I                                   | 48.800.000.000  |                    |
| 27   | Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya | Luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (Ha)                                                    |                                                       |    |            | 497.500.000,00   | 4 Ha                                             | 1.655.360.000   | 4 HA          | 3.750.000.000   | 7 Ha          | 4.175.000.000   | 8 Ha          | 4.600.000.000   | 21 Ha                                    | 12.525.000.000  |                    |
| 28   | Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai                                            | Luas kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)                                             |                                                       |    |            | 3.809.763.533,00 | 2 Ha                                             | 7.524.998.400   | 2 Ha          | 4.100.000.000   | 2 Ha          | 5.000.000.000   | 2 Ha          | 5.200.000.000   | 6 Ha                                     | 14.300.000.000  |                    |
|      |                                                                                            | JUMLAH                                                                                                  |                                                       |    |            | 91.373.528.499   |                                                  | 113.478.248.192 |               | 187.269.000.000 |               | 278.303.800.000 |               | 275.619.560.000 |                                          | 741.192.360.000 |                    |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                       | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |                |            |                |             |                   |              |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab |                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                                      |                                                                            | Tahun 2016                                            | Tahun 2017   |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019  |                   | Tahun 2020   |                | Tahun 2021     |                                          |                |                    |                                    |
|      |                                                                                                                      |                                                                            |                                                       | Capaian      | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian     | Rp                | Capaian      | Rp             | Capaian        | Rp                                       | Capaian        |                    | Rp                                 |
| 01.  | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG<br>DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |                                                                            |                                                       |              |                |            |                |             |                   |              |                |                |                                          |                |                    |                                    |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                           | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             |                                                       | 100%         | 835.466.280    | 40%        | 817.480.000    | 60%         | 578.932.964       | 80%          | 414.366.269    | 100%           | 475.078.317                              | 100%           | 761.675.912        | Sekretariat                        |
|      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                 |                                                       | -            | -              | -          | -              | 60%         | 926.292.742       | 80%          | 587.018.882    | 100%           | 657.800.746                              | 100%           | 1.054.628.186      | Sekretariat                        |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                    | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            |                                                       | 100%         | 1.224.912.070  | 40%        | 726.918.966    | 60%         | 1.505.225.706     | 80%          | 932.324.106    | 100%           | 1.096.334.577                            | 100%           | 1.757.713.643      | Sekretariat                        |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                   | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                                                       | 60%          | 129.505.774    | 60%        | 104.299.575    | 60%         | 578.932.964       | 80%          | 414.366.269    | 100%           | 475.078.317                              | 100%           | 761.675.912        | Sekretariat                        |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                       | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan               |                                                       | 100%         | 976.307.186    | 100%       | 744.502.126    | 100%        | 463.146.371       | 100%         | 310.774.702    | 100%           | 365.444.859                              | 100%           | 585.904.548        | Sekretariat                        |
|      | Program Pengembangan Perumahan                                                                                       | Penanganan Kawasan permukiman kumuh (ha)                                   |                                                       | 9 Kab        | 16.384.086.640 | 15.90 Ha   | 18.484.005.165 | 18,91       | 11.578.659.274    | 25,00        | 7.596.714.937  | 13475804596,27 | 8.405.231.756                            | 13475804596,27 | 13.475.804.593     | Bid Perumahan, PSU dan Bid Kawasan |
|      |                                                                                                                      | Penanganan kawasan permukiman (ha)                                         |                                                       | 3 Kab/1 Kota |                | 16.50 Ha   |                | 18,15       | 10.420.793.347    | 21,78        | 6.776.424.960  | 11718090952,63 | 7.308.897.179                            | 11718090952,63 | 11.718.090.951     |                                    |
|      |                                                                                                                      | Sertifikat dan Registrasi bagi Perencana Perumahan dan Permukiman          |                                                       | -            |                | -          |                | 20          | 810.506.149       | 30           | 552.488.359    | 50             | 730.889.718                              | 50             | 1.171.809.095      |                                    |
|      | Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial                                                               | Penanganan rumah yang terkena relokasi akibat bencana alam                 |                                                       | 10 Unit      | 1.478.714.100  | 10 Unit    | 1.875.801.247  | 19 Unit     | 4.052.530.746     | 22 Unit      | 2.555.258.661  | 25 Unit        | 3.579.872.265                            | 25 Unit        | 5.739.479.946      | Bid Perumahan                      |
|      | Program Lingkungan Sehat Perumahan                                                                                   | Meningkatnya lingkungan sehat perumahan                                    |                                                       | 100%         | 3.371.114.500  | -          | -              | 9 Kab/ Kota | 2.894.664.819     | 10 Kab/ Kota | 1.933.709.257  | 11 Kab/ Kota   | 2.192.669.154                            | 11 Kab/ Kota   | 3.515.427.285      | Bid Kawasan                        |
|      | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah                                             | Persentase bangunan yang dibina sesuai dengan peruntukannya                |                                                       | 100%         | 464.807.000    | -          | -              | 100         | 1.968.372.077     | 100          | 1.277.629.330  | 100            | 1.425.234.950                            | 100            | 2.285.027.735      | Bid Pertanahan                     |
|      | Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan                                                                      | Persentase penyelesaian konflik pertanahan                                 |                                                       | -            | -              | 100%       | 495.853.701    | 100         | 1.532.021.039     | 100          | 955.114.251    | 100            | 1.083.909.452                            | 100            | 1.737.792.888      | sda                                |
|      | Program Pengembangan sistem informasi pertanahan                                                                     | Jumlah web                                                                 |                                                       | 100%         | 230.686.450    | -          | -              | 1 Laporan   | 926.292.742       | 1 Laporan    | 552.488.359    | 1 Laporan      | 584.711.774                              | 1 Laporan      | 937.447.276        | sda                                |
|      |                                                                                                                      | JUMLAH                                                                     |                                                       |              | 25.095.600.000 |            | 23.248.860.780 |             | 38.236.370.937,79 |              | 24.858.678.342 |                | 28.381.153.063                           |                | 45.502.477.969     |                                    |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                           | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun Ke-0                                                                                                                  |            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                                    |                   | OPD Penanggung Jawab              |                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                        | Tahun 2017 |                   | Tahun 2018       |                   | Tahun 2019       |                   | Tahun 2020       |                   | Tahun 2021       |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |                   |                                   |                                        |
|      |                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                        | Target     | Rp                | Target           | Rp                | Target           | Rp                | Target           | Rp                | Target           | Rp               | Target                             | Rp                |                                   |                                        |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                                            | (4)                                                                                                                                                    | (7)        | (8)               | (9)              | (10)              | (11)             | (12)              | (13)             | (14)              | (15)             | (16)             | (17)                               | (18)              | (19)                              |                                        |
| 1    |                                                              | URUSAN WAJIB                                                                   |                                                                                                                                                        |            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                                    |                   |                                   |                                        |
| 1    | 01                                                           | BIDANG URUSAN: KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT      |                                                                                                                                                        |            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                                    |                   |                                   |                                        |
|      | 5                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                              |                                                                                                                                                        |            | 12.305.033.527,37 |                  | 13.412.486.544,84 |                  | 14.619.610.333,87 |                  | 15.935.375.263,92 |                  | 6.942.509.299,35 |                                    | 63.215.014.969,35 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                        |
|      |                                                              | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                           | 100%       | 20%               | 1.055.739.751,75 | 40%               | 1.201.050.256,33 | 60%               | 1.288.663.513,77 | 80%               | 1.494.695.338,72 | 100%             | 652.818.391,49                     | 100%              | 5.692.967.252,05                  | SEKRETARIAT                            |
|      |                                                              | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah             | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                          | 100%       | 20%               | 762.235.339,44   | 40%               | 845.467.933,96   | 60%               | 1.055.739.751,76 | 80%               | 1.130.211.020,52 | 100%             | 741.148.677,22                     | 100%              | 4.534.802.722,90                  | SEKRETARIAT                            |
|      |                                                              | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                                                               | 100%       | 20%               | 433.685.624,16   | 40%               | 445.513.413,91   | 60%               | 477.930.319,16   | 80%               | 575.619.101,15   | 100%             | 600.508.704,84                     | 100%              | 2.533.257.163,22                  | SEKRETARIAT                            |
|      |                                                              | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                                                               | 100%       | 20%               | 148.942.537,59   | 40%               | 153.323.200,46   | 60%               | 175.226.514,81   | 80%               | 157.703.863,33   | 100%             | 200.514.947,13                     | 100%              | 835.711.063,32                    |                                        |
|      |                                                              | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                                                                           | 100%       | 100%              | 403.897.116,64   | 100%              | 420.718.862,06   | 100%              | 574.042.062,53   | 100%              | 602.341.144,66   | 100%             | 613.550.510,55                     | 100%              | 2.614.549.696,44                  | SEKRETARIAT                            |
|      |                                                              | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan              | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan                                                                                                        | 3 dok/lap  | 3 dok/lap         | 998.791.134,43   | 3 dok/lap         | 1.011.933.123,03 | 3 dok/lap         | 1.020.694.448,80 | 3 dok/lap         | 1.038.918.006,30 | 3 dok/lap        | 686.855.826,67                     | 15 Dok/Lap        | 4.757.192.539,24                  | SEKRETARIAT                            |
|      |                                                              | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                        | Meningkatnya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan disemua elemen masyarakat                                                                            | 500 orang  | 500 orang         | 1.593.244.895,61 | 500 orang         | 1.661.383.040,07 | 500 orang         | 1.809.449.445,13 | 500 orang         | 2.037.008.234,66 | 500 orang        | 517.143.347,31                     | 3000 Orang        | 7.618.228.962,77                  | BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |
|      |                                                              | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                              | Meningkatnya Kemitraan wawasan Kebangsaan diantara anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat,Agama, Perempuan dan Pemuda. | 400 org    | 400 org           | 903.184.306,26   | 400 org           | 1.206.361.747,86 | 500 org           | 1.299.129.380,84 | 500 org           | 1.467.522.061,53 | 500 org          | 557.558.772                        | 2800 orang        | 5.433.756.268,48                  | BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                  | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun Ke-0                                                   |             |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                                    |            | OPD Penanggung Jawab |                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                       |                                                                                         | Tahun 2017  |               | Tahun 2018        |               | Tahun 2019        |               | Tahun 2020        |               | Tahun 2021        |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |            |                      |                                                                  |
|      |                                                              |                                                                       |                                                                                         | Target      | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target                             | Rp         |                      |                                                                  |
|      |                                                              | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Menurunnya Jumlah Konflik/kasus yang terjadi di masyarakat Prov Sulteng                 | 6 Konflik   | 5 Konflik     | 2.264.802.703,96  | 4 Konflik     | 2.492.597.173,18  | 3 Konflik     | 2.637.159.047,96  | 2 Konflik     | 2.825.527.551,30  | 1 Konflik     | 608.837.464,69                     | 1 Konflik  | 10.828.923.941,09    | BIDANG KEWASPADAAN                                               |
|      |                                                              | Program Pendidikan Politik Masyarakat                                 | Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah                        | 73%         | 75%           | 2.032.627.571,83  | 75%           | 2.107.098.840,60  | 76%           | 1.910.761.103,67  | 76%           | 2.091.328.454,25  | 76%           | 587.480.685,49                     | 76%        | 8.729.296.655,84     | BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, KEMASYARAKATAN DAN AGAMA |
|      |                                                              | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)         | Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemerantasan penyakit masyarakat             | 175 org/lap | 200 org/lap   | 455.588.938,51    | 250 org/lap   | 481.872.915,73    | 275 org/lap   | 652.718.767,69    | 325 org/lap   | 696.525.396,37    | 350 org/lap   | 583.488.757,49                     | 1575 orang | 2.870.194.775,79     | BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, KEMASYARAKATAN DAN AGAMA |
|      |                                                              | Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan  | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai seni budaya agama dan kemasyarakatan | 375 orang   | 335 org/1 lap | 1.252.293.607,19  | 335 org/1 lap | 1.385.166.037,65  | 335 org/1 lap | 1.718.095.977,76  | 330 org/1 lap | 1.817.975.091,15  | 330 org/1 lap | 592.603.214,47                     | 2000 orang | 6.766.133.928,21     | BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, KEMASYARAKATAN DAN AGAMA |
|      |                                                              | JUMLAH                                                                |                                                                                         |             |               | 12.305.033.527,37 |               | 13.412.486.544,84 |               | 14.619.610.333,87 |               | 15.935.375.263,92 |               | 6.942.509.299,35                   |            | 63.215.014.969,35    |                                                                  |

| Kode            | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                            | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun Ke-0 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |               |                  |                                          |                |                                        | OPD Penanggung Jawab |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                |                                                                                                                |                                       | Tahun 2017                                     |                | Tahun 2018      |                  | Tahun 2019      |                  | Tahun 2020      |                  | Tahun 2021      |               |                  | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                        |                      |
|                 |                                                                                |                                                                                                                |                                       | Target                                         | Rp             | Target          | Rp               | Target          | Rp               | Target          | Rp               | Target          | Rp            |                  | Target                                   | Rp             |                                        |                      |
| (1)             | (2)                                                                            | (3)                                                                                                            | (4)                                   | (5)                                            | (6)            | (7)             | (8)              | (9)             | (10)             | (11)            | (12)             | (13)            | (14)          | (2)              | (15)                                     | (16)           | (17)                                   |                      |
|                 | URUSAN WAJIB                                                                   |                                                                                                                |                                       |                                                |                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |               |                  |                                          |                |                                        |                      |
|                 | BIDANG URUSAN: KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT      |                                                                                                                |                                       |                                                | 10.546.678.449 |                 | 11.495.879.510   |                 | 12.530.508.665   |                 | 13.658.254.445   |                 | 6.598.001.500 | 14.887.497.345   |                                          | 54.829.322.570 | Dinas Polisi                           |                      |
|                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                     |                                                                                                                |                                       |                                                |                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |               |                  |                                          |                |                                        |                      |
| 1               | Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban M                       | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat                                                        | 0                                     | 48                                             | 1.263.931.107  | 60              | 1.402.470.049,82 | 72              | 1.486.977.773,11 | 96              | 1.635.675.550,48 | 144             | 750.373.328   | 1.784.373.327,61 | 420                                      | 6.539.427.808  | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN |                      |
|                 |                                                                                | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibumtranmas)               | 0                                     | 12 Laporan                                     |                | 12 Laporan      |                  | 12 Laporan      |                  | 12 Laporan      |                  | 12 Laporan      |               | 60 Laporan       |                                          |                |                                        |                      |
| 2               | Program Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah                                   | meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah                                    | 2 Perda/Perkada                       | 2 Perda/Perkada                                | 743.488.887    | 3 Perda/Perkada | 885.770.557,78   | 5 Perda/Perkada | 1.040.884.441,18 | 6 Perda/Perkada | 1.115.233.329,87 | 8 Perda/Perkada | 759.582.218   | 1.189.582.218,41 | 8 Perda/Perkada                          | 4.544.959.434  | BIDANG PENEGAKKAN PERDA                |                      |
| 3               | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan                         | Meningkatnya potensi masyarakat dan satlinmas dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat            | 130 Orang                             | 100 Orang                                      | 743.488.887    | 150 Orang       | 811.956.344,64   | 200 Orang       | 966.535.552,52   | 250 Orang       | 1.040.884.441,21 | 300 Orang       | 655.233.330   | 1.115.233.329,76 | 1000 Orang                               | 4.218.098.555  | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT         |                      |
|                 |                                                                                | Meningkatnya Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)                                            | 0                                     | 0,2                                            |                | 0,3             |                  | 0,4             |                  | 0,5             |                  | 0,6             |               | 0,6              |                                          |                |                                        |                      |
| 4               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur                             | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                       | 100%                                  | 20%                                            | 446.093.332    | 40%             | 516.699.492,04   | 60%             | 669.139.997,90   | 80%             | 743.488.886,58   | 100%            | 517.837.775   | 817.837.775,16   | 100%                                     | 2.893.259.484  | SEKRETARIAT                            |                      |
| 5               | Program Penegakan Disiplin Aparatur                                            | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                       | 100%                                  | 20%                                            | 294.421.599    | 40%             | 292.304.284,07   | 60%             | 416.353.776,47   | 80%             | 446.093.331,95   | 100%            | 394.791.109   | 594.791.109,20   | 100%                                     | 1.843.964.101  | SEKRETARIAT                            |                      |
| 6               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                  | 100%                                  | 20%                                            | 1.933.071.105  | 40%             | 2.066.797.968,16 | 60%             | 2.081.768.882,35 | 80%             | 2.379.164.437,06 | 100%            | 753.266.369   | 2.527.862.214,12 | 100%                                     | 9.214.068.762  | SEKRETARIAT                            |                      |
|                 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                   | 100%                                  | 20%                                            | 3.560.856.871  | 40%             | 3.600.711.271,15 | 60%             | 3.638.381.582,20 | 80%             | 3.769.852.253,75 | 100%            | 788.961.825   | 3.883.861.825,07 | 100%                                     | 15.358.763.803 | SEKRETARIAT                            |                      |
| 7               | Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                                   | 100%                                  | 100%                                           | 297.395.555    | 100%            | 369.071.065,74   | 100%            | 446.093.331,93   | 100%            | 520.442.220,61   | 100%            | 394.791.109   | 594.791.109,20   | 100%                                     | 2.027.793.282  | SEKRETARIAT                            |                      |
| 8               | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                       | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                                                    | 100%                                  | 100%                                           | 297.395.555    | 100%            | 369.071.065,74   | 100%            | 446.093.331,93   | 100%            | 520.442.220,61   | 100%            | 394.791.109   | 594.791.109,20   | 100%                                     | 2.027.793.282  |                                        |                      |
| 9               | Program Pembinaan Masyarakat                                                   | Meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat dalam menciptakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat | 0                                     | 100 Orang                                      | 594.791.109    | 150 Orang       | 664.327.918,34   | 200 Orang       | 743.488.886,55   | 250 Orang       | 817.837.775,24   | 300 Orang       | 594.186.664   | 892.186.663,81   | 1000 Orang                               | 3.414.632.353  | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT            |                      |
| 10              | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                  | Meningkatnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi                                      | 0                                     | 20%                                            | 371.744.443    | 30%             | 516.699.492,04   | 50%             | 594.791.109,24   | 70%             | 669.139.997,92   | 100%            | 594.186.664   | 892.186.663,81   | 85%                                      | 2.746.561.706  | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN               |                      |
| JUMLAH ANGGARAN |                                                                                |                                                                                                                |                                       |                                                | 10.546.678.449 |                 | 11.495.879.510   |                 | 12.530.508.665   |                 | 13.658.254.445   |                 | 6.598.001.500 |                  |                                          | 54.829.322.570 |                                        |                      |

TABEL VII-1  
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                          | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun - O                                                    |                    |                                                |                |                    |                |                     |                |                     |                |                     |                |                  |                                          |                      | OPD Penanggung Jawab |              |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|      |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                         | Tahun 2016         |                                                | Tahun 2017     |                    | Tahun 2018     |                     | Tahun 2019     |                     | Tahun 2020     |                     | Tahun 2021     |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                      |                      |              |
|      |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                         | Target             | Rp                                             | Target         | Rp                 | Target         | Rp                  | Target         | Rp                  | Target         | Rp                  | Target         | Rp               | Target                                   | Rp                   |                      |              |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                                                                                           | (4)                                                                                     | (5)                | (6)                                            | (5)            | (6)                | (7)            | (8)                 | (9)            | (10)                | (11)           | (12)                | (13)           | (14)             | (15)                                     | (16)                 | (17)                 |              |
| 13   | URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN SOSIAL                            |                                                                                                                               |                                                                                         |                    |                                                |                |                    |                |                     |                |                     |                |                     |                |                  |                                          |                      |                      |              |
|      | A.                                                           | DINAS SOSIAL                                                                                                                  |                                                                                         |                    |                                                | 12.445.580.233 |                    | 13.543.866.000 |                     | 13.036.040.517 |                     | 12.539.147.911 |                     | 23.687.266.654 |                  | 35.868.614.287                           |                      | 86.797.148.302       | DINAS SOSIAL |
|      | I                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                    | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                          | 100%               | 75%                                            | 867.421.324    | 20%                | 1.401.402.600  | 40%                 | 1.020.163.472  | 60%                 | 1.219.894.353  | 80%                 | 900.000.000    | 100%             | 2.102.908.031,11                         | 100%                 | 6.644.368.456,11     |              |
|      | II                                                           | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                             | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                         | 100%               | 1Paket                                         | 1.239.123.922  | 20%                | 696.802.000    | 40%                 | 1.639.313.587  | 60%                 | 2.392.865.300  | 80%                 | 13.487.889.749 | 100%             | 2.135.884.659,82                         | 100%                 | 20.352.755.295,82    |              |
|      | III                                                          | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                            | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya              | 100%               | 75%                                            | 113.448.950    | 20%                | 191.851.400    | 40%                 | 237.460.000    | 60%                 | 160.733.159    | 80%                 | 50.000.000     | 100%             | 457.689.569,96                           | 100%                 | 1.097.734.128,96     |              |
|      | IV                                                           | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                            | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                          | 100%               | 75%                                            | 463.200.000    | 100%               | 226.887.000    | 100%                | 294.175.000    | 100%                | 174.613.300    | 100%                | 95.000.000     | 100%             | 457.689.569,96                           | 100%                 | 1.248.364.869,96     |              |
|      | V                                                            | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                                                      | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                           | 100%               | 1Dokumen                                       | 525.190.000    | 100%               | 608.863.000    | 100%                | 740.367.200    | 100%                | 680.860.939    | 100%                | 337.000.000    | 100%             | 1.159.480.243,90                         | 100%                 | 3.526.571.382,90     |              |
|      | VI                                                           | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | - Meningkatnya Produktivitas Keluarga Fakir Miskin Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KK) | 1340 KK, 5360 Jiwa | 640 KK, 2560 Jiwa                              | 2.266.191.387  | 1195 KK, 4780 Jiwa | 2.655.668.000  | 2525 KK, 10069 Jiwa | 2.689.370.200  | 2555 KK, 10220 Jiwa | 2.116.146.500  | 2555 KK, 10220 Jiwa | 1.920.000.000  | 3105, 12420 Jiwa | 4.296.179.430,04                         | 12255 KK, 49020 Jiwa | 13.677.364.130,04    |              |
|      | VII                                                          | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                       | - Terlayannya korban bencana dan pekerja migran PMKS yang memperleh Askesos             | 11903 org          | 1 Paket 76 Org2 Keg 440 org,16 UEP, 156 Lansia | 1.776.465.000  |                    | -              |                     | -              |                     | -              |                     | -              |                  | -                                        |                      | -                    |              |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                                | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun - O |            |             |                                            |               |                                            |               |                                            |             |                                             |               |                                          |                  |                                                |                  | OPD Penanggung Jawab |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Tahun 2016 |             | Tahun 2017                                 |               | Tahun 2018                                 |               | Tahun 2019                                 |             | Tahun 2020                                  |               | Tahun 2021                               |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD       |                  |                      |
|      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Target     | Rp          | Target                                     | Rp            | Target                                     | Rp            | Target                                     | Rp          | Target                                      | Rp            | Target                                   | Rp               | Target                                         | Rp               |                      |
| VIII | Program Pembinaan Anak Terlantar                                                                            | - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap PMKS                                                                                                                                                                | 2740 org                             | 207 Anak   | 619.421.000 | -                                          | -             | -                                          | -             | -                                          | -           | -                                           | -             | -                                        | -                | -                                              | -                | -                    |
| IX   | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                 | - Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejujuran dan keperintisan                                                                                                                     | 0                                    | 0          | 0           | 7 Keg                                      | 551.873.100   | 8 Keg                                      | 454.401.200   | 9 Keg                                      | 606.974.361 | 9 Keg                                       | 285.000.000   | 11 Keg                                   | 1.037.429.691,91 | 45 Keg                                         | 2.935.678.352,91 |                      |
| X    | Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos                                                                      | - Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi karang taruna dalam UKS, dan meningkatnya TKSK                                                                                       | 0                                    | 0          | 0           | 20 PSM, 50 Orsos, 37 KT, 110 Org           | 772.300.000   | 25 PSM, 55 Orsos, 40 KT, 120 Org           | 842.428.600   | 27 PSM, 57 Orsos, 42 KT, 120 Org           | 696.175.500 | 27 PSM, 57 Orsos, 42 KT, 120 Org            | 200.000.000   | 30 PSM, 61 Orsos, 42 KT, 131 Org         | 1.342.556.071,89 | 160 PSM, 283 Orsos, 203 KT, 611 Org            | 3.853.460.171,89 |                      |
| XI   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                     | - Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, Meningkatkan pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instans terkait serta terlaksananya pemantauan PKH | 0                                    | 0          | 0           | 7771 KK, 41156 Jiwa, 216 Org, 2 Keg, 1 Lap | 959.832.000   | 8272 KK, 45271 Jiwa, 323 Org, 2 Keg, 1 Lap | 675.370.741   | 9099 KK, 49789 Jiwa, 431 org, 2 keg, 1 lap | 455.174.000 | 10008 KK, 54777 Jiwa, 540 Org, 2 Keg, 1 Lap | 3.097.050.870 | 11000KK, 6254 Jiwa,650 Org, 2 keg, 1 Lap | 3.173.314.351,74 | 46150 KK, 197247 Jiwa, 2160 Org, 10 Keg, 5 Lap | 8.360.741.962,88 |                      |
| XII  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                                   | - Meningkatnya derajat kesos lanjut usia, Meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan Menurunnya jumlah korban tindak kekerasan danperdagangan orang bermasalah sosial                                                            | 4120 org                             | 0          | 0           | 300 org                                    | 1.650.000.000 | 310 org                                    | 1.129.549.200 | 320 org                                    | 687.110.000 | 320 org                                     | 900.000.000   | 350 org                                  | 3.081.776.437,74 | 1610 org                                       | 7.448.435.637,74 |                      |
| XIII | Program Penyuluhan Sosial                                                                                   | - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial                                                                                                                                                                   | 0                                    | 0          | 0           | 120 Org                                    | 266.750.000   | 130 Org                                    | 120.788.100   | 150 Org                                    | 107.600.000 | 150 org                                     | 90.000.000    | 190 Org                                  | 915.379.139,92   | 760 Org                                        | 1.500.517.239,92 |                      |
| XIV  | Program Pengembangan Sistem Informasi Kesos                                                                 | - Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta data PMKS                                                                                                                   | 0                                    | 0          | 0           | 13 Kab/Kota                                | 181.636.900   | 13 Kab/Kota                                | 157.187.200   | 13 Kab/Kota                                | 348.943.260 | 13 Kab/Kota                                 | 250.000.000   | 13 Kab/Kota                              | 915.379.139,92   | 13 Kab/Kota                                    | 1.853.146.499,92 |                      |
| XV   | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma                                                          | - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas                                                                                                                                                                     | 3254 org                             | 100 Org    | 383.500.000 | 130 Org                                    | 330.000.000   | 170 Org                                    | 331.835.000   | 175 Org                                    | 158.150.000 | 175 org                                     | 195.000.000   | 183 Org                                  | 878.763.974,33   | 838 Org                                        | 1.893.748.974,33 |                      |
| XVI  | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | - Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi                                                                                                    | 1208 org                             | 428 Org    | 183.788.000 | 150 Org                                    | 275.000.000   | 151 Org                                    | 197.685.000   | 152 Org                                    | 179.355.000 | 152 org                                     | 100.000.000   | 154 Org                                  | 878.763.974,33   | 760 Org                                        | 1.630.803.974,33 |                      |

| Kode   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                 | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun - O                                                                                                                                                                                                       |            |                                           |               |          |                |          |                |          |               |          |                |                |                                          |                  | OPD Penanggung Jawab |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|--|
|        |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Tahun 2016 |                                           | Tahun 2017    |          | Tahun 2018     |          | Tahun 2019     |          | Tahun 2020    |          | Tahun 2021     |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                  |                      |  |
|        |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Target     | Rp                                        | Target        | Rp       | Target         | Rp       | Target         | Rp       | Target        | Rp       | Target         | Rp             | Target                                   | Rp               |                      |  |
|        | XVII                                                         | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraa Sosial | - Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai keuangan dan kepeintisan, berdayanya pekera sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi KT dalam UKS, meningkatnya TKSK | 235 org    | 20 PSM, 50 Orsos, 37 KT, 110 Org,42 WKSBM | 1.245.776.700 | -        | -              | -        | -              | -        | -             | -        | -              | -              | -                                        | -                |                      |  |
| JUMLAH |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                           | 9.683.526.283 |          | 10.768.866.000 |          | 10.530.094.500 |          | 9.984.595.672 |          | 20.947.884.666 |                | 22.833.194.287                           |                  | 76.023.691.078       |  |
|        | B.                                                           | UPT. PSAKW PALU                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                           |               |          |                |          |                |          |               |          |                |                |                                          |                  |                      |  |
|        | I                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran           | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                             | 100%       | 80%                                       | 250.000.000   | 20%      | 250.000.000    |          |                |          |               |          |                |                | 100%                                     | 500.000.000,00   |                      |  |
|        | II                                                           | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur    | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                            | 100%       | -                                         | -             | 20%      | 180.000.000    |          |                |          |               |          |                |                | 100%                                     | 180.000.000,00   |                      |  |
|        | III                                                          | Program Pembinaan Anak Terlantar                     | - Berdayanya anak terlantar                                                                                                                                                                                                                | 75 org     | 75 Orang                                  | 1.111.118.485 | 30 Anak  | 500.000.000    |          |                |          |               |          |                |                | 180 org                                  | 1.611.118.485,00 |                      |  |
|        | IV                                                           | Program Pembinaan Tuna Sosial                        | - Meningkatkan keterampilan WTS                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0                                         | 0             | 30 org   | 470.000.000    |          |                |          |               |          |                |                | 30 org                                   | 470.000.000,00   |                      |  |
| JUMLAH |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                           | 1.361.118.485 |          | 1.400.000.000  |          | -              |          | -             |          | -              |                | -                                        |                  | 2.761.118.485        |  |
|        | C.                                                           | UPT. PSTW TENTENA                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                           |               |          |                |          |                |          |               |          |                |                |                                          |                  |                      |  |
|        | I                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran           | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                             | 100%       | 75%                                       | 185.730.350   | 20%      | 200.000.000    | 40%      | 227.830.348    | 60%      | 201.697.950   | 80%      | 150.000.000    | 100%           | 900.000.000,00                           | 100%             | 1.679.528.298,00     |  |
|        | II                                                           | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur    | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                            | 100%       | 75%                                       | 58.734.500    | 20%      | 50.000.000     |          |                |          |               |          | 100%           | 650.000.000,00 | 100%                                     | 758.734.500      |                      |  |
|        | III                                                          | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo           | - Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti                                                                                                                                                                                             | 85 Org     | 85 Org                                    | 1.156.470.615 | 85 Orang | 1.125.000.000  | 65 Orang | 1.024.140.152  | 65 Orang | 1.109.515.789 | 50 Orang | 1.050.000.000  | 65 Orang       | 1.265.420.000,00                         | 415 org          | 5.574.075.941,00     |  |
| JUMLAH |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                           | 1.400.935.465 |          | 1.375.000.000  |          | 1.251.970.500  |          | 1.311.213.739 |          | 1.200.000.000  |                | 2.815.420.000                            |                  | 8.012.338.739        |  |

| Kode   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)            | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun - O |            |    |            |    |            |             |            |             |            |             |            |                  |                                          |                  | OPD Penanggung Jawab |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|
|        |                                                              |                                                 |                                      | Tahun 2016 |    | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |             | Tahun 2019 |             | Tahun 2020 |             | Tahun 2021 |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                  |                      |
|        |                                                              |                                                 |                                      | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp               | Target                                   | Rp               |                      |
| D      | UPT. Panti Sosial Anak                                       |                                                 |                                      |            |    |            |    |            |             |            |             |            |             |            |                  |                                          |                  |                      |
| I      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)  |                                      |            |    |            |    | 40%        | 170.463.941 | 60%        | 150.000.000 | 80%        | 250.000.000 | 100%       | 900.000.000,00   | 100%                                     | 1.470.463.941,00 |                      |
| II     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur |                                      |            |    |            |    |            |             |            |             |            |             | 100%       | 1.450.000.000,00 | 100%                                     | 1.450.000.000,00 |                      |
| III    | Program Pembinaan Anak Terlantar                             | - Berdayanya anak terlantar                     |                                      |            |    |            |    | 30 Anak    | 424.097.585 | 20 Anak    | 540.000.000 | 30 Anak    | 600.000.000 | 30 anak    | 2.500.000.000,00 | 110 org                                  | 4.064.097.585,00 |                      |
| JUMLAH |                                                              |                                                 | -                                    | -          | -  | -          | -  |            | 594.561.526 |            | 690.000.000 |            | 850.000.000 |            | 4.850.000.000    |                                          | 6.984.561.526    |                      |
| E      | UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial                   |                                                 |                                      |            |    |            |    |            |             |            |             |            |             |            |                  |                                          |                  |                      |
| I      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)  | -                                    | -          | -  | -          | -  | 40%        | 263.970.203 | 60%        | 100.000.000 | 80%        | 250.000.000 | 100%       | 900.000.000,00   | 100%                                     | 1.513.970.202,80 |                      |
| II     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | -                                    | -          | -  | -          | -  |            |             | 60%        |             |            |             | 100%       | 2.470.000.000,00 | 100%                                     | 2.470.000.000    |                      |
| IV     | Program Pembinaan Tuna Sosial                                | - Meningkatnya keterampilan WTS                 | -                                    | -          | -  | -          | -  | 30 Orang   | 395.443.788 | 30 Orang   | 453.338.500 | 30 Orang   | 439.381.987 | 30 Orang   | 2.000.000.000,00 | 120 org                                  | 3.288.164.275,58 |                      |
| JUMLAH |                                                              |                                                 | -                                    | -          | -  | -          | -  |            | 659.413.991 |            | 553.338.500 |            | 689.381.987 |            | 5.370.000.000    |                                          | 7.272.134.478    |                      |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi dan Target Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng

| Kode |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                              | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |                   | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                  |        |               | Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD |                | Bidang Penanggung Jawab |
|------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
|      |   |                                                                        |                                                                                                   | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |                   | Tahun 2019                                            |               | Tahun 2020 |                  | Target |               | Target                           | Rp             |                         |
|      |   |                                                                        |                                                                                                   | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp                | Target                                                | Rp            | Target     | Rp               | Target | Rp            | Target                           | Rp             |                         |
| 01   |   | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                        |                                                                                                   |                                                       |               |            |               |            |                   |                                                       |               |            |                  |        |               |                                  |                |                         |
|      | 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                    | 100                                                   | 1.889.131.920 | 100        | 1.823.479.140 | 100        | 1.805.354.047     | 100                                                   | 1.410.752.023 | 100        | 1.881.289.624    | 100    | 1.481.289.624 | 100                              | 10.291.296.378 | Sekretariat             |
|      | 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                   | 100                                                   | 2.838.061.406 | 100        | 1.346.611.150 | 100        | 14.389.306.216,74 | 60                                                    | 8.435.429.619 | 80         | 2.463.690.206,65 | 100    | 2.710.059.227 | 100                              | 32.183.157.826 | Sekretariat             |
|      |   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                          |                                                       |               |            |               |            |                   |                                                       |               | 80         | 300.000.000      | 100    | 330.000.000   | 100                              | 630.000.000    | Sekretariat             |
|      | 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | - Presentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai                                  | 100                                                   | 185.115.000   | 100        | 170.000.000   | 100        | 131.830.547       | 60                                                    | 76.000.000    | 80         | 150.000.000      | 80     | 165.000.000   | 80                               | 877.945.547    | Sekretariat             |
|      | 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan                                    | 100                                                   | 789.311.782   | 100        | 555.936.560   | 100        | 547.853.200       | 100                                                   | 481.955.308   | 100        | 706.053.073      | 100    | 776.658.381   | 100                              | 3.857.768.304  | Sekretariat             |
|      | 5 | Peningkatan Kualitas Perencanaan                                       | - Tercapainya perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas                                     | 4                                                     | 1.056.549.900 | 4          | 483.294.050   | 4          | 455.412.287       | 4                                                     | 362.008.550   | 4          | 470.108.978      | 4      | 517.119.875   | 4                                | 3.344.493.640  | Sekretariat             |
|      | 6 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas                  | - Presentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar      | 30                                                    | 1.157.000.000 | 35         | 1.308.108.600 | 40         | 1.157.337.075     | 45                                                    | 929.000.000   | 50         | 2.300.000.000    | 0      |               |                                  | 6.851.445.675  | P5TK                    |
|      |   |                                                                        | - Presentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang mendaftar      |                                                       |               |            |               |            |                   |                                                       |               |            |                  | 55     | 2.600.000.000 | 55                               | 2.600.000.000  | P5TK                    |
|      | 7 | Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja                              | - Presentase dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar | 38                                                    | 2.583.740.100 | 41         | 2.566.586.400 | 44         | 2.683.088.900     | 46,71                                                 | 2.346.548.000 | 50         | 3.463.875.400    | 53     | 3.810.262.940 | 53                               | 17.454.101.740 | P5TK                    |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                           | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                   | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |        |               | Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD |                | Bidang Penanggung Jawab |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
|      |                                                                                        |                                                                                                                                        | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019                                            |               | Tahun 2020 |               | Target |               | Target                           | Rp             |                         |
|      |                                                                                        |                                                                                                                                        | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Target                                                | Rp            | Target     | Rp            | Target | Rp            | Target                           | Rp             |                         |
| 8    | Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi                                       | - Peresentase dari jumlah KK transmigran yang menetap dengan jumlah KK trans yang sudah ditempatkan                                    | 80                                                    | 5.253.579.192 | 83         | 1.548.413.150 | 86         | 1.378.829.000 | 88                                                    | 1.270.105.000 | 89         | 2.000.000.000 | 90     |               |                                  | 11.450.926.342 | PKTDT                   |
| 9    | Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Derah Tertentu | - Presentase Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf hidup.<br><br>- Presentase dari kabupaten/kota tidak tertinggal              |                                                       |               |            |               |            |               |                                                       |               |            |               | 90     | 1.200.290.763 | 90                               | 1.200.290.763  | PKTDT                   |
| 10   | Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan           | - Presentase dari Perusahaan yang diperiksa dengan Perusahaan yang terdaftar                                                           | 30                                                    | 2.613.874.500 | 35         | 2.119.701.550 | 38         | 663.130.500   | 69                                                    | 677.630.000   | 72         | 1.075.000.000 | 75     | 947.087.075   | 75                               | 8.096.423.625  | PHI Wasnaker            |
| 11   | Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi                              | - Peresentase dari jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan dengan jumlah total KK calon Trans yang direncanakan untuk ditempatkan |                                                       |               | 69         | 1.633.411.000 | 72         | 1.509.824.076 | 72                                                    | 1.598.480.000 | 84         | 2.300.000.000 | 89     | -             | 89                               | 7.041.715.076  | PKP3T                   |
| 12   | Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Penataan Persebaran Penduduk                     | - Presentase Jumlah Transmigrasi yang menetap dengan Jumlah transmigran yang di tempatkan                                              |                                                       |               |            |               |            |               |                                                       |               |            |               | 89     | 3.314.837.206 | 89                               | 3.314.837.206  | PKP3T                   |
| 13   | Pembangunan Daerah Tertinggal                                                          | - Presentase dari kabupaten/kota tidak tertinggal                                                                                      |                                                       | -             | 31         | 1.545.336.750 | 38         | 1.252.130.000 | 53,85                                                 | 1.633.097.000 | 61,54      | 1.714.751.850 | 69,2   | -             | 0,0                              | 6.145.315.600  | PKTDT                   |
| 14   | Perencanaan dan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi                                 | - Tersedlanya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan Pertanahan serta Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi                    |                                                       | -             |            |               |            |               |                                                       |               |            |               | 9      | 1.890.000.000 | 9                                | 1.890.000.000  | PKT                     |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                 | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                        | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                   | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |        |                | Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD |                 | Bidang Penanggung Jawab |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                   | Tahun 2019                                            |                | Tahun 2020 |                | Target |                | Target                           | Rp              |                         |
|          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | Capaian                                               | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp                | Target                                                | Rp             | Target     | Rp             | Target | Rp             | Target                           | Rp              |                         |
| 15       | Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | - Presentase dari jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dengan jumlah kasus yang dicatatkan<br><br>- Presentase dari pekerja /buruh yang tedata aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan total pekerja / buruh |                                                       | -              |            |                | 88         | 1.179.552.200     | 89                                                    | 1.159.150.000  | 90         | 1.317.107.500  | 91     | 1.277.962.875  | 91                               | 4.933.772.575   | PHI Wasnaker            |
| JUMLAH 1 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 18.366.363.800 |            | 15.100.878.350 |            | 27.153.648.048,74 |                                                       | 20.380.155.500 |            | 20.141.876.632 |        | 22.370.567.966 |                                  | 123.513.490.297 |                         |
|          | UPT. P2T                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                   | 332.940.000    | 100        | 394.320.250    |            |                   |                                                       |                |            |                |        |                |                                  | 727.260.250     |                         |
|          | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                |                                                       |                |            |                |            |                   |                                                       |                |            |                |        |                |                                  |                 |                         |
|          | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan                   | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                               | 60                                                    | 307.790.000    | 80         | 345.890.000    |            |                   |                                                       |                |            |                |        |                |                                  | 653.680.000     |                         |
|          | Program Peningkatan Kompetensi & Produktivitas                               | Persentase Transmigran yang mendapat pelatihan dengan jumlah KK binaan                                                                                                                                                      | 41                                                    | 1.157.122.800  | 44         | 588.761.750    |            |                   |                                                       |                |            |                |        |                |                                  | 1.745.884.550   |                         |
|          | UPT. PK-UKM                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                |            |                |            |                   |                                                       |                |            |                |        |                |                                  |                 |                         |
|          | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                | 100                                                   | 309.450.000    |            |                |            |                   |                                                       |                |            |                |        |                |                                  | 309.450.000     |                         |

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |             |            |    | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |    |        |    | Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD |               | Bidang Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|----|-------------------------------------------------------|----|------------|----|--------|----|----------------------------------|---------------|-------------------------|
|      |  |                                                              |                                                                                              | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |             | Tahun 2018 |    | Tahun 2019                                            |    | Tahun 2020 |    | Target |    | Target                           | Rp            |                         |
|      |  |                                                              |                                                                                              | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp          | Capaian    | Rp | Target                                                | Rp | Target     | Rp | Target | Rp | Target                           | Rp            |                         |
|      |  | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan   | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                | 60                                                    | 231.740.000   |            |             |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  | 231.740.000   |                         |
|      |  |                                                              | Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasana Operasional SKPD                                     |                                                       |               |            |             |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  |               |                         |
|      |  | Program Peningkatan Kompetensi & Produktivitas               | Presentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar   | 75                                                    | 5.061.160.800 |            |             |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  | 5.061.160.800 |                         |
|      |  | <b>UPT. P2TKI</b>                                            |                                                                                              |                                                       |               |            |             |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  | -             |                         |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                 | 75                                                    | 286.812.800   | 100        | 389.921.000 |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  | 676.733.800   |                         |
|      |  | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan   | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                | 60                                                    | 68.217.500    | 80         | 94.000.000  |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  | 162.217.500   |                         |
|      |  |                                                              | Standar Daerah (%) Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasana Operasional SKPD                  | 92                                                    |               |            |             |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  |               |                         |
|      |  | Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja            | Presentase dari jumlah TKI legal yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar |                                                       | 1.510.956.200 | 95         | 831.000.000 |            |    |                                                       |    |            |    |        |    |                                  | 2.341.956.200 |                         |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                   | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |             |               |    | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |        |               | Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD |                 | Bidang Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                                                        | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |             | Tahun 2018    |    | Tahun 2019                                            |             | Tahun 2020 |             | Target |               | Target                           | Rp              |                         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                        | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp          | Capaian       | Rp | Target                                                | Rp          | Target     | Rp          | Target | Rp            | Target                           | Rp              |                         |
|      | UPT. P2D                                                     |                                                                                                                                                        | 100                                                   | 466.801.428   | 100        | 413.785.000 |               |    |                                                       |             |            |             |        |               |                                  | 880.586.428     |                         |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                           |                                                       |               |            |             |               |    |                                                       |             |            |             |        |               |                                  |                 |                         |
|      | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan   | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                          | 60                                                    | 443.994.000   | 80         | 135.687.400 |               |    |                                                       |             |            |             |        |               |                                  | 579.681.400     |                         |
|      | Program Peningkatan Kompetensi & Produktivitas               | Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasana Operasional SKPD<br>Presentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar | 89                                                    | 1.840.150.500 | 92         | 845.144.600 |               |    |                                                       |             |            |             |        |               |                                  | 2.685.295.100 - |                         |
|      | UPT. BLK-PP                                                  |                                                                                                                                                        |                                                       |               |            |             |               |    |                                                       |             |            |             |        |               |                                  |                 |                         |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                           |                                                       |               |            |             | 436.725.000   |    | 100                                                   | 317.835.000 | 100        | 400.000.000 | 100    | 436.000.000   | 100                              | 1.590.560.000   | UPT. BLKPP              |
|      | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan   | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                          |                                                       |               |            |             |               |    | 60                                                    | 908.148.000 | 80         | 953.555.400 | 100    | 1.039.375.386 | 100                              | 2.901.078.786   | UPT. BLKPP              |
|      |                                                              | Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasana Operasional SKPD                                                                                               |                                                       |               |            |             |               |    | 60                                                    | 137.485.516 | 80         | 144.359.792 | 100    | 157.352.173   | 100                              | 439.197.481     | UPT. BLKPP              |
|      | Program Peningkatan Kompetensi & Produktivitas               | Presentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar                                                             |                                                       |               |            |             | 1.081.410.800 |    | 82                                                    | 571.981.484 | 86         | 600.580.558 | 87     | -             | 87                               | 2.253.972.842   | UPT. BLKPP              |
|      |                                                              | Presentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang Mendaftar                                                             |                                                       |               |            |             |               |    |                                                       |             |            |             | 87     | 1.600.000.000 | 87                               | 1.600.000.000   | UPT. BLKPP              |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                 | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                            |            |                |            |                | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |        |                | Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD |                 | Bidang Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
|      |                                                              |                                                                                      | Tahun 2016                                            |                                                                            | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019                                            |                | Tahun 2020 |                | Target |                | Target                           | Rp              |                         |
|      |                                                              |                                                                                      | Capaian                                               | Rp                                                                         | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target                                                | Rp             | Target     | Rp             | Target | Rp             | Target                           | Rp              |                         |
|      |                                                              | JUMLAH 2                                                                             |                                                       | 12.017.136.028                                                             |            | 4.038.510.000  |            | 1.518.135.800  |                                                       | 1.935.450.000  |            | 2.098.495.750  |        | 3.232.727.559  |                                  | 24.840.455.137  |                         |
|      |                                                              | UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I                                               |                                                       |                                                                            |            |                |            |                |                                                       |                |            |                |        |                |                                  |                 |                         |
|      |                                                              | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                                                       |                                                                            | 50         | 209.693.400    | 75         | 112.080.013    | 100                                                   | 172.114.000    | 100        | 400.000.000    | 100    | 436.000.000    | 100                              | 1.329.887.413   | UPT. Wil I              |
|      |                                                              | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan                           |                                                       |                                                                            |            |                | 55         | 55.000.000     | 60                                                    | 191.784.400    | 80         | 476.984.567    | 100    | 519.913.178    | 100                              | 1.243.682.145   | UPT. Wil I              |
|      |                                                              |                                                                                      |                                                       |                                                                            |            |                |            |                | 60                                                    | 80.812.500     | 80         | 84.853.125     | 100    | 92.489.906     | 100                              | 258.155.531     | UPT. Wil I              |
|      |                                                              | Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | -                                                     | Presentase dari Perusahaan yang diperiksa dengan Perusahaan yang Terdaftar | 50         | 361.886.250    | 54         | 621.619.988    | 69                                                    | 537.209.600    | 72         | 964.070.080    | 75     | 1.050.836.387  | 75                               | 3.535.622.305   | UPT. Wil I              |
|      |                                                              | JUMLAH 3                                                                             |                                                       | -                                                                          |            | 571.579.650,00 |            | 788.700.001,26 |                                                       | 981.920.500    |            | 1.925.907.772  |        | 2.099.239.471  |                                  | 6.367.347.395   |                         |
|      |                                                              | UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II                                              |                                                       |                                                                            |            |                |            |                |                                                       |                |            |                |        |                |                                  |                 |                         |
|      |                                                              | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                                                       |                                                                            |            |                | 75         | 251.794.150    | 100                                                   | 280.786.095,00 | 100        | 400.000.000    | 100    | 436.000.000    | 100                              | 1.368.580.245   | UPT. Wil II             |
|      |                                                              | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan                           |                                                       |                                                                            |            |                | 55         | 240.400.000    | 60                                                    | 547.299.005    | 80         | 674.663.955    | 100    | 735.383.711    | 100                              | 2.197.746.671   | UPT. Wil II             |
|      |                                                              |                                                                                      |                                                       |                                                                            |            |                |            |                | 60                                                    | 94.050.000     | 80         | 98.752.500     | 100    | 107.640.225    | 100                              | 300.442.725     | UPT. Wil II             |
|      |                                                              | Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | -                                                     | Presentase dari Perusahaan yang diperiksa dengan Perusahaan yang Terdaftar |            |                | 55         | 323.290.000    | 69                                                    | 372.244.900    | 72         | 990.857.145    | 75     | 1.080.034.288  | 75                               | 2.766.426.333   | UPT. Wil II             |
|      |                                                              | JUMLAH 4                                                                             |                                                       | -                                                                          |            | -              |            | 815.484.150    |                                                       | 1.294.380.000  |            | 2.164.273.600  |        | 2.359.058.224  |                                  | 6.633.195.975   |                         |
|      |                                                              | JUMLAH 1 + 2 + 3 + 4                                                                 |                                                       | 30.383.499.828                                                             |            | 19.710.968.000 |            | 30.275.968.000 |                                                       | 24.591.906.000 |            | 26.330.553.754 |        | 30.061.593.221 |                                  | 161.354.488.803 |                         |

| Kode |    | PROGRAM                                                                           | Indikator Program Kinerja Program (Outcome)                                                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           | Unit Kerja Penanggungjawab                                 |                                    | Lokasi |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|      |    |                                                                                   |                                                                                                     | 2019                                                  |               |            |                  |            |                  |           |                   | 2020      |                    | 2021      |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    |                                                                                   |                                                                                                     | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |                  | Tahun 2018 |                  | Target    | Rp                | Target    | Rp                 |           |                   | Target                                   | Rp                                        |                                                            |                                    |        |
| 1    | 2  | 3                                                                                 | Capaian                                                                                             | Rp                                                    | Capaian       | Rp         | Capaian          | Rp         | 7                | 8         | 11                | 12        | 15                 | 16        | 17                | 18                                       |                                           | (20)                                                       |                                    |        |
|      |    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   | 18                                       |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                                |                                                                                                     |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    | BIDANG URUSAN -                                                                   |                                                                                                     |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                      |                                                                                                     |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |
| 11   | 01 | 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                        | 20%                                                   | 1.232.655.211 | 20%        | 1.232.655.211    | 40%        | 1.232.655.211    | 60%       | 1.628.931.540,52  | 80%       | 1.790.752.427,42   | 100%      | 1.957.380.239,24  | 100%                                     | 9.075.029.844,53                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak         | Provinsi                           |        |
|      |    | 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatn jumlah aparatur yang disiplin                                                            | 100%                                                  | 175.376.598   | 100%       | 194.004.955      | 100%       | 212.633.312      | 100%      | 256.374.035,41    | 100%      | 281.842.677,13     | 100%      | 308.067.870,44    | 100%                                     | 1.428.299.455,30                          | Sekretariat                                                | Provinsi                           |        |
|      |    | 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                            | 100%                                                  | 184.145.429   | 100%       | 203.705.203,08   | 100%       | 223.264.977,70   | 100%      | 269.192.737,19    | 100%      | 295.934.810,99     | 100%      | 323.471.263,95    | 100%                                     | 1.499.714.428,90                          |                                                            | Provinsi                           |        |
|      |    | 04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                       | 20%                                                   | 1.462.721.004 | 20%        | 1.618.090.016,87 | 40%        | 1.773.459.028,39 | 60%       | 2.138.276.656,97  | 80%       | 18.985.396.168,143 | 100%      | 22.972.329.363,45 | 100%                                     | 48.950.272.242,03                         |                                                            | Provinsi                           |        |
|      |    | 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                        | 100%                                                  | 241.663.691   | 100%       | 267.333.008,28   | 100%       | 293.002.325,07   | 100%      | 353.275.729,58    | 100%      | 388.370.753,808    | 100%      | 469.928.612,11    | 100%                                     | 2.013.574.126,84                          |                                                            | Provinsi                           |        |
|      |    | 06 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                       | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                                         | 100%                                                  | 1.447.509.338 | 100%       | 1.601.262.579,79 | 100%       | 1.755.015.820,72 | 100%      | 2.116.039.503,567 | 100%      | 2.560.407.799,316  | 100%      | 3.098.093.437,17  | 100%                                     | 12.578.328.485,57                         |                                                            | Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota |        |
|      |    | 07 Program Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi Gender                     | Tersedianya Data terpilah Gender dan anak sebagai bahan informasi                                   | 4 Dok                                                 | 1.935.594.156 | 6 Dok      | 2.141.191.361,24 | 4 Dok      | 2.346.788.566,47 | 4 Dokumen | 2.829.545.611,253 |           |                    |           |                   | 9.253.119.695                            | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota                         |                                    |        |
|      |    | Program Data dan Informasi Gender dan Anak                                        | Tersedianya data dan Informasi Terpilah Gender dan Anak serta dokumen perencanaan Rensponsif Gender |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   | 4 Dokumen | 3.423.750.189,616  | 4 Dokumen | 4.142.737.729,44  | 26 Dok                                   | 7.566.487.919                             |                                                            |                                    |        |
|      | 01 | 08 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan                                   | Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)                                                     | 70,43%                                                | 1.920.377.034 | 71,43%     | 2.017.341.127,36 | 73,43%     | 2.114.305.220,72 | 75,43%    | 2.549.238.198,79  |           |                    |           |                   | 8.601.261.584                            |                                           | Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota                         |                                    |        |
|      |    | 09 Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam                               | Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) (%)                                                    | 71,33%                                                | 110.358.618   | 73,33%     | 1.220.808.192,14 | 75,33%     | 1.338.030.200,86 | 77,37     | 1.471.833.220,95  |           |                    |           |                   | 4.141.030.312                            |                                           |                                                            |                                    |        |
|      | 03 | 10 Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga                        | Menurunnya jumlah Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I                                            | 48,00%                                                | 1.587.506.388 | 48,53%     | 1.756.130.000,93 | 48,00%     | 1.924.753.612,41 | 47,03%    | 2.203.166.396,92  |           |                    |           |                   | 7.471.556.400                            |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    | PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA                            | 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                  |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   | 77,43%    | 4.400.000.000,00   | 79,43%    | 5.324.000.000,00  | 79,43%                                   | 11.157.489.272                            | Bidang Kulitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga |                                    |        |
|      |    |                                                                                   | 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                 |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    |                                                                                   | 3. Cakupan Perencanaan Resonsif Gender                                                              |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    |                                                                                   | 4. Cakupan Kab/Kota yang memiliki lembaga sadar gender                                              |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |
|      |    |                                                                                   | 5. Indeks Ketahanan Keluarga                                                                        |                                                       |               |            |                  |            |                  |           |                   |           |                    |           |                   |                                          |                                           |                                                            |                                    |        |

| Kode | PROGRAM | Indikator Program Kinerja Program (Outcome)                     | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   |        |                   |        |                   | 2019   |                   | 2020   |                    | 2021                             |                                    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD                       |                                    | Unit Kerja Penanggungjawab | Lokasi |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
|      |         |                                                                 | Tahun 2016                                            |                   | Tahun 2017 |                   | Tahun 2018 |                   | Target | Rp                | Target | Rp                |        |                   | Target | Rp                 | Target                           | Rp                                 |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         |                                                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
| 01   | 11      | Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak             | 0,04%                                                 | 2.407.362.911     | 0,039%     | 2.663.071.002,75  | 0,037%     | 2.918.779.093,77  | 0,035% | 3.519.200.107,32  |        |                   |        |                   |        |                    |                                  | 11.508.413.114,84                  | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan khusus Anak | Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota |                            |        |
|      |         | PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        | -                 | 0,033% | 1.705.000.000,00  | 0,030% | 2.063.050.000,00  | 0,030% | 3.768.050.000,00   |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         |                                                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         |                                                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
| 01   | 12      | Program Pemenuhan Hak Anak (PUHA)                               | 32,00%                                                | 1.043.490.762     | 32,35%     | 1.154.329.484,13  | 32,30%     | 1.265.168.206,97  | 32,25% | 1.525.425.510,71  | 32,20% | 3.560.562.500,00  | 32,15% | 4.308.280.625,00  | 32,15% | 12.857.257.088,80  | Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA) | Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         |                                                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         |                                                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         | UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK         |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        | -                 | Kasus  | 880.000.000,00    | 32,15% | 990.000.000,00    | 32,15% | 1.700.000.000,00   | Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA) | Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         | Perlindungan Perempuan dan Anak                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        | 100,00%           |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         |                                                                 |                                                       |                   |            |                   |            |                   |        | 100,00%           |        |                   |        |                   |        |                    |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |
|      |         | JUMLAH                                                          |                                                       | 13.748.761.140,27 |            | 16.069.922.142,62 |            | 17.397.855.576,23 |        | 20.860.499.249,17 |        | 38.547.017.326,42 |        | 49.690.168.596,39 |        | 162.613.531.832,42 |                                  |                                    |                                                                |                                    |                            |        |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                       | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                          |               |                           |               |             |                  |             |                  |             |                  | PD Penangung Jawab                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                                           |                                                                            | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017               |               | Tahun 2018                |               | Tahun 2019  |                  | Tahun 2020  |                  | Tahun 2021  |                  |                                                  |
|      |                                                                                           |                                                                            | Capaian                                               | Rp            | Capaian                  | Rp            | Capaian                   | Rp            | Target      | Rp               | Target      | Rp               | Target      | Rp               |                                                  |
| 01   | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                                           |                                                                            |                                                       |               |                          |               |                           |               |             |                  |             |                  |             |                  |                                                  |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 100%                                                  | 610.326.075   | 100%                     | 803.731.629   | 100%                      | 705.730.328   | 100%        | 967.564.715,98   | 100%        | 964.321.190,93   | 100%        | 960.753.310,31   | Sekretariat                                      |
| 2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 20%                                                   | 2.015.376.271 | 20%                      | 1.871.542.420 | 20%                       | 2.908.364.865 | 60%         | 3.043.639.130,39 | 80%         | 3.248.003.043,00 | 100%        | 3.472.803.347,30 | Sekretariat                                      |
| 3    | Program Peningkatan Disipln Aparatur                                                      | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                 | -                                                     | -             | 20%                      | 73.500.000    | 20%                       | -             | 170 Pegawai | 302.500.000,00   | 175 Pegawai | 332.750.000,00   | 180 Pegawai | 366.025.000,00   | Sekretariat                                      |
| 4    | Program Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan.                                        | - Rekomendasi Ketahanan Pangan                                             | -                                                     | -             | 13 Kab/kota              | 193.125.000   | 13 Kab/Kota               | 202.184.945   | 13 Kab/Kota | 544.500.000,00   | 13 Kab/Kota | 598.950.000,00   | 13 Kab/Kota | 658.845.000,00   | Sekretariat                                      |
| 5    | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.                                        | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                                                  | 150.229.100   | 20%                      | 119.095.740   | 20%                       | 70.280.000    | 60%         | 477.363.970,40   | 80%         | 525.100.367,00   | 100%        | 577.610.403,70   | Sekretariat                                      |
| 6    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan             | 100%                                                  | 234.332.690   | 100%                     | 425.249.710   | 100%                      | 271.614.290   | 100%        | 726.000.000,00   | 100%        | 798.600.000,00   | 100%        | 878.460.000,00   | Sekretariat                                      |
| 7    | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                  | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas              | 100%                                                  | 447.945.440   | 100%                     | 559.102.799   | 100%                      | 763.078.977   | 100%        | 1.060.235.539,63 | 100%        | 1.166.259.093,00 | 100%        | 1.282.885.002,30 | Sekretariat                                      |
| 8    | Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga, dan Cadangan Pangan Masyarakat. | - Stabilitnya Harga Pangan (Gabah/Beras) di Tingkat Produsen (Rp./Kg).     | -                                                     | -             | 1,37 %                   | 1.903.809.200 | 3,05%                     | 1.225.261.595 | 10% ≥ HPP   | 5.981.611.782,00 | 10% ≥ HPP   | 6.579.772.960,00 | 10% ≥ HPP   | 7.147.500.256,00 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat |
|      |                                                                                           | - Stabilitnya Harga Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen.                    | -                                                     |               | 2,26 %                   |               | 1%                        |               | CV< 10%     |                  | CV< 10%     |                  | CV< 10%     |                  |                                                  |
|      |                                                                                           | - Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat                                   | -                                                     |               | 14 Unit Pengisin Lumbung |               | 10 Unit Pengisian Lumbung |               | 20 Kelompok |                  | 20 Kelompok |                  | 20 Kelompok |                  |                                                  |
| 9    | Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.                            | - Skor PPH Ketersediaan (%)                                                | -                                                     | -             | 67,59                    | 1.882.078.880 | 59,45                     | 5.981.021.276 | 89,38       | 6.403.732.224,00 | 92,06       | 6.691.900.173,00 | 95,00       | 7.748.515.990,00 | Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan         |
|      |                                                                                           | - Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%).                              | -                                                     |               | 1,06%                    |               | -13%                      |               | 1%          |                  | 1%          |                  | 1%          |                  |                                                  |
| 10   | Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.                                    | - Skor PPH Konsumsi                                                        | -                                                     | -             | 88,77                    | 2.107.690.850 | 91,4                      | 1.689.951.722 | 91,3        | 7.724.022.207,00 | 91,9        | 8.848.629.700,00 | 92,5        | 9.336.316.870,00 | Bidang Konsumsi dan Penganekaraga man Pangan     |
|      |                                                                                           | - Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr)                                            | -                                                     |               | 2142,1kkal/kap/hr        |               | 2295,5 kkl/kap/hr         |               | 2.091       |                  | 2.120       |                  | 2.150       |                  |                                                  |
|      |                                                                                           | - Konsumsi Protein (gram/kap/hr)                                           | -                                                     |               | 67,7 gram/kap/hr         |               | 66,61 kkl/kap/hr          |               | 56,76       |                  | 56,88       |                  | 57,0        |                  |                                                  |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan         | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                           | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                                    |                |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  | PD Penanggung Jawab |                           |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | Tahun 2016                                                                                               |                | Tahun 2017         |                | Tahun 2018              |                | Tahun 2019                   |                  | Tahun 2020                   |                  | Tahun 2021                    |                  |                     |                           |
|      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | Capaian                                                                                                  | Rp             | Capaian            | Rp             | Capaian                 | Rp             | Target                       | Rp               | Target                       | Rp               | Target                        | Rp               |                     |                           |
| 11   | Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan                | 1 Dipertahankannya ketersediaan Energi perkapita 2.200 Kkal/kap/hari, Penyediaan Protein Perkapita Minimal 57gram/hari dan Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk berdasarkan AKG sebesar 2000 Kkal/Kap/hari dan 52gram/kap/hari | 3830 kkal/kap/hari<br>201,01 kg/kap/tahun<br>89,64 gr/kap/hari<br>2192,1 kkal/kap/hari<br>63 gr/kap/hari | 1.135.803.300  |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  |                     | Bidang Konsumsi           |
|      |                                                                      | 2 Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin 1 % Tahunan dan desa Rawan Pangan                                                                                                                                                        | 0,1409                                                                                                   | 1.135.803.300  |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  |                     |                           |
|      |                                                                      | 3 Konsumsi Beras 1,03% tahunan yang di imbangi dengan peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan dengan Skor PPH 95 Tahun 2016                                                                                               | 104,77 kg/kap/hari<br>89,58 Skor                                                                         | 2.540.409.300  |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  |                     |                           |
|      |                                                                      | 4 dan Cadangan Pangan Masyarakat yang Mampu menjaga Stabilitas Harga Pangan SehinggaTerjangkau BagiMasyarakat                                                                                                                  | 85%<br>136 Ton                                                                                           | 5.793.664.734  |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  |                     |                           |
|      |                                                                      | 5 Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Melalui Peningkatan Pran Produsen dan Konsumen                                                                                                                                         | 80%                                                                                                      | 1.837.444.869  |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  |                     |                           |
|      |                                                                      | 6 meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan ketahan pangan                                                                                                                                                                 | 80%                                                                                                      | 329.494.300    |                    |                |                         |                |                              |                  |                              |                  |                               |                  |                     |                           |
| 12   | Program Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah                       | - Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (ton)<br>- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RP)                                                                                                                                    |                                                                                                          |                | 65,802 Ton         | 1.340.478.295  | 15,87 Ton               | 1.247.256.298  | 104<br>2.062.500             | 3.143.864.313,70 | 105<br>2.578.125             | 3.458.250.745,07 | 200<br>3.200.000              | 3.804.075.819,58 |                     | UPT. CP/Bidang Distribusi |
| 13   | Program Peningkatan Sertifikasi Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan. | - Persentase Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi.<br><br>- Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%).<br>- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)                                                             |                                                                                                          |                | 2%<br><br>80%<br>- | 797.985.925    | 112,29%<br><br>52%<br>- | 501.129.600    | 8%<br><br>≥ 80%<br>3.250.000 | 3.136.419.785,44 | 9%<br><br>≥ 80%<br>3.250.000 | 3.314.947.226,00 | 10%<br><br>≥ 80%<br>3.250.000 | 3.581.167.103,80 |                     | UPT. PSMKP                |
|      | JUMLAH                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 16.230.829.379 |                    | 12.077.390.448 |                         | 15.565.873.896 |                              | 33.511.453.669   |                              | 36.527.484.498   |                               | 39.814.958.103   |                     |                           |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                 | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |               |            |               |                 |                |                 |               |                 |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                |                                                                         | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019      |                | Tahun 2020      |               | Tahun 2021      |               | Target                                   | Rp             |                                                  |
|    |                                                                                |                                                                         | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian         | Rp             | Capaian         | Rp            | Capaian         | Rp            | Capaian                                  | Rp             |                                                  |
| A  | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                                               |                                                                         |                                                       |    |            |               |            |               |                 |                |                 |               |                 |               |                                          |                |                                                  |
| I. | BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP                                                 |                                                                         |                                                       |    |            | 7.036.846.000 |            | 8.468.799.742 |                 | 19.619.673.399 |                 | 8.618.857.219 |                 | 9.246.653.830 |                                          | 23.310.133.967 |                                                  |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                |                                                       |    | 20%        | 1.284.000.000 | 40%        | 1.553.599.266 | 60%             | 2.485.440.351  | 80%             | 1.091.845.673 | 100%            | 1.171.375.592 | 100%                                     | 2.952.951.681  | Sekretariat                                      |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur'                             | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                           |                                                       |    | 20%        | 491.479.200   | 40%        | 3.707.407.645 | 60%             | 1.996.715.216  | 80%             | 877.150.348   | 100%            | 941.041.883   | 100%                                     | 2.372.297.348  | sda                                              |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur                            |                                                       |    | 20%        | 129.055.800   | 40%        | 44.054.300    | 60%             | 330.165.508    | 80%             | 145.040.609   | 100%            | 155.605.351   | 100%                                     | 392.269.640    | sda                                              |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan            |                                                       |    | 100%       | 199.699.000   | 100%       | 66.070.000    | 100%            | 433.931.811    | 100%            | 190.624.800   | 100%            | 204.509.889   | 100%                                     | 515.554.384    | sda                                              |
|    | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                 | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat                 |                                                       |    | 69,39      | 1.236.628.000 | -          | 515.869.400   | 0,5 poin (IKLH) | 5.900.529.295  | 0,5 poin (IKLH) | 2.592.082.879 | 0,5 poin (IKLH) | 2.780.889.911 | 0,5 poin (IKLH)                          | 7.010.418.856  | Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan LH |
|    | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                           | Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina |                                                       |    | 2 Lokasi   | 833.703.000   | 3 Lokasi   | 512.792.880   | 4 Lokasi        | 471.665.011    | 5 Lokasi        | 207.200.870   | 5 Lokasi        | 222.293.358   | 5 Lokasi                                 | 560.385.200    | sda                                              |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |                                                                             |               |                                                                             |             |                                                                             |               |                                                                             |               |                                                                              |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD                                     |               | PD Penanggung Jawab                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                 | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017                                                                  |               | Tahun 2018                                                                  |             | Tahun 2019                                                                  |               | Tahun 2020                                                                  |               | Tahun 2021                                                                   |               | Target                                                                       | Rp            |                                                                         |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                 | Capaian                                               | Rp | Capaian                                                                     | Rp            | Capaian                                                                     | Rp          | Capaian                                                                     | Rp            | Capaian                                                                     | Rp            | Capaian                                                                      | Rp            | Capaian                                                                      | Rp            |                                                                         |
|    | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam                           | meningkatnya kualitas LH kabupaten/kota                                                                                                         |                                                       |    | 10 Kab/Kota                                                                 | 460.171.000   | 4 Kab/Kota                                                                  | 485.158.562 | 13 Kab / Kota                                                               | 706.141.660   | 13 Kab / Kota                                                               | 310.205.681   | 13 Kab / Kota                                                                | 332.801.028   | 13 Kab / Kota                                                                | 838.966.906   | sda                                                                     |
|    | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi                                                                                             |                                                       |    | 2 Dokumen                                                                   | 93.643.000    | 2 Dokumen                                                                   | 84.051.000  | 2 Dokumen                                                                   | 534.552.714   | 2 Dokumen                                                                   | 234.827.228   | 2 Dokumen                                                                    | 251.932.018   | 2 Dokumen                                                                    | 635.102.080   | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data LH |
|    | Program Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis                                    | evaluasi/validasi dokumen KLHS kebijakan, rencana dan program                                                                                   |                                                       |    | 4 Laporan                                                                   | 170.619.000   | 8 Laporan                                                                   | 397.134.400 | 9 Laporan                                                                   | 786.108.353   | 10 Laporan                                                                  | 345.334.783   | 11 Laporan                                                                   | 370.488.930   | 11 Laporan                                                                   | 933.975.334   | Bidang Tata Lingkungan                                                  |
|    | Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan                                        | Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha |                                                       |    | 35%                                                                         | 1.121.884.000 | 45%                                                                         | 416.220.389 | 55%                                                                         | 1.572.216.705 | 65%                                                                         | 690.669.565   | 70%                                                                          | 740.977.860   | 70%                                                                          | 1.867.950.668 | Bidang Tata Lingkungan                                                  |
|    | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                   | Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota);                                                                                         |                                                       |    | 2 Kab/ Kota                                                                 | 373.398.000   | 3 Kab/ Kota                                                                 | 282.174.800 | 1 Kota / 5 Kab                                                              | 2.358.325.058 | 1 Kota / 7 Kab                                                              | 1.036.004.348 | 1 Kota / 12 Kab                                                              | 1.111.466.791 | 1 Kota / 12 Kab                                                              | 2.801.926.001 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data LH |
|    | Program Peningkatan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia                                 | Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)                                          |                                                       |    | 0 Profil MHA, 2 Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH | 642.566.000   | 0 Profil MHA, 4 Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH | 404.267.100 | 1 Profil MHA, 6 Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH | 2.043.881.717 | 1 Profil MHA, 8 Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH | 897.870.435   | 1 Profil MHA, 10 Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH | 963.271.219   | 1 Profil MHA, 10 Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH | 2.428.335.868 | sda                                                                     |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)     | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |               |            |               |            |                |            |               |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
|    |                                                                |                                                             | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |                | Target                                   | Rp             |                    |
|    |                                                                |                                                             | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp             | Capaian                                  | Rp             |                    |
|    | UPT LABORATORIUM                                               |                                                             |                                                       |    |            | 1.538.154.100 |            | 702.119.220   |            | 1.380.972.796  |            | 779.377.397   |            | 1.483.310.632  |                                          | 3.739.316.966  |                    |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran                    |                                                       |    | 20%        | 130.879.100   | 40         | 136.306.920   | 60%        | 250.960.430    | 80%        | 110.246.082   | 100%       | 277.932.865    | 100%                                     | 700.648.304    | Kepala UPT         |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur               |                                                       |    | 20%        | 432.197.600   | 40         | 48.330.000    | 60%        | 522.834.230    | 80%        | 229.679.337   | 100%       | 579.026.802    | 100%                                     | 1.459.683.966  | sda                |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur             | Jumlah Pelatihan / workshop peningkatan kompetensi aparatur |                                                       |    | 2 P/WS     | 686.537.400   | 2 P/WS     | 238.092.300   | 2 P / WS   | 209.133.692    | 2 P / WS   | 91.871.735    | 2 P / WS   | 231.610.721    | 2 P / WS                                 | 583.873.586    | sda                |
|    | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH                    |                                                       |    | 18 Titik   | 288.540.000   | 18 Titik   | 279.390.000   | 18 Titik   | 398.044.444    | 39 Titik   | 347.580.243   | 45 Titik   | 394.740.244    | 45 Titik                                 | 995.111.111    | sda                |
|    | TOTAL DINAS & UPT                                              |                                                             |                                                       |    |            | 8.575.000.100 |            | 9.170.918.962 |            | 21.000.646.195 |            | 9.398.234.616 |            | 10.729.964.462 |                                          | 27.049.450.933 |                    |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (outcomes)         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |                                                                                 |                                              | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017    |               | Tahun 2018    |               | Tahun 2019    |                  | Tahun 2020       |                  | Tahun 2021       |                |                                          |                |                     |
|      |                                                                                 |                                              | Capaian                                               | Rp            | Capaian       | Rp            | Capaian       | Rp            | Capaian       | Rp               | Capaian          | Rp               | Capaian          | Rp             | Capaian                                  | Rp             |                     |
| 1    | URUSAN WAJIB                                                                    | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) |                                                       |               |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                |                                          |                |                     |
|      | BIDANG URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                  |                                              |                                                       |               |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                |                                          |                |                     |
|      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                         |                                              |                                                       |               |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                |                                          |                |                     |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                              | -                                                     | -             | 1.278.284.850 | 40%           | 1.787.777.850 | 60%           | 1.403.588.210 | 80%              | 1.436.708.209,13 | 100%             | 1.696.872.760,62 | 100%           | 4.537.169.180                            |                |                     |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                              | -                                                     | -             | 2.025.851.150 | 40%           | 963.955.000   | 60%           | 1.612.912.960 | 80%              | 2.128.517.863,45 | 100%             | 2.380.417.767,05 | 100%           | 6.121.848.591                            |                |                     |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                              | -                                                     | -             | 53.664.000    | 40%           | 21.320.000    | 60%           | 34.769.600    | 80%              | 119.848.978,80   | 100%             | 142.808.745,02   | 100%           | 297.427.324                              |                |                     |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan          |                                              | -                                                     | -             | 220.800.000   | 100%          | 176.056.000   | 60%           | 193.050.000   | 100%             | 730.279.777,47   | 100%             | 891.779.408,92   | 100%           | 1.815.109.186                            |                |                     |
|      | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                        |                                              | -                                                     | -             | 412.210.000   | 100%          | 347.234.000   | 60%           | 458.815.000   | 2 Dok            | 699.756.639,55   | 2 Dok            | 786.164.426,29   | 10 Dok         | 1.944.736.066                            |                |                     |
|      | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                      |                                              | -                                                     | -             |               |               |               | 1 Dok         | 2.152.011.270 | 1 Dok            | 2.200.000.000,00 | 1 Dok            | 2.300.000.000,00 | 3 Dok          | 6.652.011.270                            |                |                     |
| 7    | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                           | -                                            | -                                                     | 760.000.000   | 2 Dokumen     | 2.435.660.000 | 2 Dokumen     | 827.000.000   | 2 Dok         | 1.063.459.938,53 | 2 Dok            | 1.194.778.763,36 | 10 Dok           | 3.085.238.702  |                                          |                |                     |
| 8    | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil                               | -                                            | -                                                     | 760.000.000   | 2 Dokumen     | 913.900.000   | 2 Dokumen     | 711.600.000   | 2 Dok         | 1.063.459.938,53 | 2 Dok            | 1.194.778.763,36 | 10 Dok           | 2.969.838.702  |                                          |                |                     |
| 9    | Program Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | -                                            | -                                                     | 2.368.174.000 | 2 Dokumen     | 580.819.150   | 2 Dokumen     | 722.448.900   | 2 Dok         | 1.063.459.938,53 | 2 Dok            | 1.194.778.763,36 | 10 Dok           | 2.980.687.602  |                                          |                |                     |
|      |                                                                                 | JUMLAH                                       |                                                       |               |               | 7.878.984.000 |               | 7.226.722.000 |               | 8.116.195.940    |                  | 10.505.491.284   |                  | 11.782.379.398 |                                          | 30.404.066.622 |                     |

TABEL. VIII-1  
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program ( Outcomes )                                                       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                        |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|      |                                                              |                                                                                              | Tahun 2016                                                                            |       | Tahun 2017    |           | Tahun 2018    |           | Tahun 2019     |           | Tahun 2020    |                       | Tahun 2021       |                       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                       |               |
|      |                                                              |                                                                                              | Target                                                                                | Rp    | Target        | Rp        | Target        | Rp        | Target         | Rp        | Target        | Rp                    | Target           | Rp                    | Target                                   | Rp                    |               |
|      |                                                              | ( 2 )                                                                                        | ( 5 )                                                                                 | ( 6 ) | ( 7 )         | ( 8 )     | ( 9 )         | ( 10 )    | ( 11 )         | ( 12 )    | ( 13 )        | ( 14 )                | ( 15 )           | ( 16 )                | ( 17 )                                   | ( 18 )                |               |
|      |                                                              | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA<br>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA<br>Sekretariat |                                                                                       |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
| 1    | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                   | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | 65%   | 800.067.500   | 65%       | 750.398.291   | 75%       | 919.588.408    | 85%       | 969.588.408   | 95%                   | 5.400.000.000    | 100%                  | 5.940.000.000                            | 14.779.642.607        |               |
| 2    | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                            | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai standar daerah | 65%   | 1.987.600.210 | 65%       | 1.800.000.000 | 75%       | 443.281.317    | 85%       | 543.281.317   | 95%                   | 5.000.000.000    | 100%                  | 5.500.000.000                            | 15.274.162.844        |               |
| 3    | 3                                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                           | Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur                                            |       | -             | 4 Kali    | 986.751.325   | 4 Kali    | 989.674.200,00 | 4 Kali    | 906.721.889   | 30 orang              | 1.250.000.000,00 | 30 orang              | 1.375.000.000                            | 5.508.147.414         |               |
| 4    | 4                                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                            | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur                                          |       |               |           |               |           |                |           | 30 orang      |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
| 5    | 5                                                            | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan               | Terwujudnya laporan realisasi keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan                | 20%   | 3.891.231.890 | 6 Laporan | 623.400.987   | 6 Laporan | 852.591.104    | 6 Laporan | 852.591.104   | 3 Laporan             | 1.300.000.000    |                       | 1.430.000.000                            | 8.949.815.085         |               |
| 6    | 6                                                            | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                     | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Perencanaan                                        | 20%   | 3.578.200.189 | 20%       | 1.450.000.000 | 40%       | 2.740.142.699  | 60%       | 2.740.142.699 | 4 Dokumen             | 1.650.000.000    | 4 Dokumen             | 1.815.000.000                            | 13.973.485.587        |               |
|      |                                                              | Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran                                                | Tersedianya Laopran Perencanaan dan Program                                           |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
|      |                                                              | Kegiatan :                                                                                   |                                                                                       |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
|      |                                                              | Bidang Penataan dan Perkembangan Desa                                                        |                                                                                       |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
| 7    |                                                              | Program Penataan dan Perkembangan Desa                                                       | Terwujudnya tata kelola desa yang baik                                                |       |               |           |               |           |                |           |               | 25 Desa               | 2.400.000.000    | 25 Desa               | 2.640.000.000                            | 50 Desa               | 5.040.000.000 |
| 8    |                                                              | Program Penyelenggaraan Penataan Pembangunan Desa                                            | terselenggaranya Penataan Pembangunan Desa                                            |       |               |           |               |           |                |           |               | 25 Desa               | 1.000.000.000    | 25 Desa               | 1.100.000.000                            | 50 Desa               | 2.100.000.000 |
|      |                                                              | Bidang Pemerintahan Desa                                                                     |                                                                                       |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
| 9    |                                                              | Program Pembinaan Pemerintahan Desa                                                          | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yag baik                                      |       |               |           |               |           |                |           |               | 25 Desa               | 2.400.000.000    | 25 Desa               | 2.640.000.000                            | 50 Desa               | 5.040.000.000 |
| 10   |                                                              | Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa                                                       | Terpenuhinya sarpras desa                                                             |       |               |           |               |           |                |           |               | 20 Desa               | 1.500.000.000    | 20 Desa               | 1.650.000.000                            | 40 Desa               | 3.150.000.000 |
|      |                                                              | Bidang Pemberdayaan Desa                                                                     | Terwujudnya Pemberdayaan Desa serta kawasannya                                        |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
| 11   |                                                              | Program Pemberdayaan Desa dan Kawasannya                                                     |                                                                                       |       |               |           |               |           |                |           |               | 25 desa dan 10 Bumdes | 2.400.000.000    | 25 desa dan 10 Bumdes | 2.640.000.000                            | 50 desa dan 20 Bumdes | 5.040.000.000 |
| 12   |                                                              | Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perdesaan                                       | Terselenggaranya Penanggulangan Masyarakat desa                                       |       |               |           |               |           |                |           |               | 15 Kelompok/lembaga   | 1.500.000.000    | 15 Kelompok/lembaga   | 1.650.000.000                            | 30 Kelompok/lembaga   | 3.150.000.000 |
|      |                                                              | Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                   |                                                                                       |       |               |           |               |           |                |           |               |                       |                  |                       |                                          |                       |               |
| 13   |                                                              | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                  | Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Masyarakat                                     |       |               |           |               |           |                |           |               | 15 lembaga Desa       | 2.400.000.000    | 15 lembaga Desa       | 2.640.000.000                            | 30 lembaga Desa       | 5.040.000.000 |
| 14   |                                                              | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan                                          | Terpenuhinya pengembangan lembaga Eko Rakyat                                          |       |               |           |               |           |                |           |               | 20 Lembaga eko Rakyat | 1.500.000.000    | 20 Lembaga eko Rakyat | 1.650.000.000                            | 40 Lembaga eko Rakyat | 3.150.000.000 |
| 15   |                                                              | Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )                                          | Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Kel                                       |       |               |           |               |           |                |           |               | Laporan               | 1.500.000.000    | Laporan               | 1.650.000.000                            | Laporan               | 3.150.000.000 |
|      | 7                                                            | Program Penataan Desa                                                                        | Terlaksananya Penataan Desa                                                           |       | -             | 20%       | 1.400.568.900 | 40%       | 2.059.759.017  | 60%       | 2.700.000.000 |                       |                  |                       |                                          | 6.160.327.917         |               |
|      | 8                                                            | Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa                                             | Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa                                |       | -             | 20%       | 1.389.500.621 | 40%       | 2.058.690.738  | 60%       | 2.500.000.000 |                       |                  |                       |                                          | 5.948.191.359         |               |
|      | 9                                                            | Program Pengelolaan Data Desa                                                                | Tersedianya Pengelolaan Data Desa                                                     |       | -             | 20%       | 1.436.523.100 | 40%       | 2.035.713.217  | 60%       | 2.088.713.217 |                       |                  |                       |                                          | 5.560.949.534         |               |
|      | 10                                                           | Program Kerjasama Desa                                                                       | Terwujudnya Kerjasama antar Desa                                                      |       | -             | 20%       | 1.420.141.364 | 40%       | 1.776.800.567  | 60%       | 2.176.800.567 |                       |                  |                       |                                          | 5.373.742.498         |               |
|      | 11                                                           | Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan                                                      | Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa                     |       | -             | 20%       | 1.498.300.100 | 40%       | 2.179.400.320  | 60%       | 2.300.000.000 |                       |                  |                       |                                          | 5.977.700.420         |               |
|      | 12                                                           | Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat                                                    | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa                                     |       | -             | 84 Orang  | 1.352.300.000 | 168 Orang | 1.900.000.000  | 252 Orang | 2.200.000.000 |                       |                  |                       |                                          | 5.452.300.000         |               |
|      | 13                                                           | Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat                                                       | Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat                                          |       | -             | 3 Keg     | 1.232.089.200 | 6 Keg     | 2.000.000.000  | 9 Keg     | 2.000.000.000 |                       |                  |                       |                                          | 5.232.089.200         |               |

| Kode   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program ( Outcomes )                         | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |                |       |                   |        |                |        |                |        |                |        |                                          |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------|----------------|
|        |                                                              |                                                                | Tahun 2016                                     |       | Tahun 2017     |       | Tahun 2018        |        | Tahun 2019     |        | Tahun 2020     |        | Tahun 2021     |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |
|        |                                                              |                                                                | Target                                         | Rp    | Target         | Rp    | Target            | Rp     | Target         | Rp     | Target         | Rp     | Target         | Rp     | Target                                   | Rp             |
|        |                                                              | ( 2 )                                                          | ( 5 )                                          | ( 6 ) | ( 7 )          | ( 8 ) | ( 9 )             | ( 10 ) | ( 11 )         | ( 12 ) | ( 13 )         | ( 14 ) | ( 15 )         | ( 16 ) | ( 17 )                                   | ( 18 )         |
|        | 14                                                           | Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan                 |                                                |       | -              | 24,3% | 1.353.900.291     | 48,6%  | 2.000.000.000  | 66%    | 2.000.000.000  |        |                |        |                                          | 5.353.900.291  |
|        | 15                                                           | Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa             |                                                |       | -              | 20,4% | 1.300.000.000     | 40%    | 2.000.000.000  | 61%    | 2.466.426.262  |        |                |        |                                          | 5.766.426.262  |
|        | 16                                                           | Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam |                                                |       | -              | 21%   | 6.691.062.369     | 41%    | 2.015.079.543  | 63%    | 2.015.079.543  |        |                |        |                                          | 10.721.221.454 |
| Jumlah |                                                              |                                                                | 10.257.099.789,00                              |       | 27.610.844.813 |       | 30.095.820.846,60 |        | 32.804.444.723 |        | 31.200.000.000 |        | 34.320.000.000 |        | 166.288.210.171                          |                |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                 | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |                                     |               |                                     |               |                                    |               |                  |               |                   |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |                                                                        |                                                                                                      | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017                          |               | Tahun 2018                          |               | Tahun 2019                         |               | Tahun 2020       |               | Tahun 2021        |               |                                          |                |                     |
|      |                                                                        |                                                                                                      | Capaian                                               | Rp | Capaian                             | Rp            | Capaian                             | Rp            | Capaian                            | Rp            | Capaian          | Rp            | Capaian           | Rp            | Capaian                                  | Rp             |                     |
| 1    | URUSAN WAJIB                                                           |                                                                                                      |                                                       |    |                                     |               |                                     |               |                                    |               |                  |               |                   |               |                                          |                |                     |
|      | BIDANG URUSAN :<br>PENGENDALIAN PENDUDUK<br>DAN KELUARGA BERENCANA     |                                                                                                      |                                                       |    |                                     |               |                                     |               |                                    |               |                  |               |                   |               |                                          |                |                     |
|      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN KELUARGA<br>BERENCANA               |                                                                                                      |                                                       |    |                                     |               |                                     |               |                                    |               |                  |               |                   |               |                                          |                |                     |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                         | -                                                     | -  | 20%                                 | 614.840.712   | 40%                                 | 391.028.097   | 100%                               | 1.594.438.688 |                  | 1.862.073.454 |                   | 2.373.983.556 | 100%                                     | 5.830.495.699  |                     |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                        | -                                                     | -  | 20%                                 | 2.186.380.273 | 40%                                 | 741.177.000   |                                    | 9.224.800.000 | 111 Unit         | 4.655.183.636 | 206 Unit          | 2.322.375.218 | 256 Unit                                 | 16.202.358.854 |                     |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                             | -                                                     | -  | 8 ASN                               | 174.782.500   | 3 ASN                               | 417.505.000   | 9 Pegawai                          | 54.853.000    | 7 Pegawai (80%)  | 93.103.673    | 10 Pegawai (100%) | 154.825.015   | 10 Pegawai (100%)                        | 302.781.687    |                     |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                         | -                                                     | -  | 100%                                | 249.696.040   | 7 Dokumen                           | 1.030.956.625 | 7 Dokumen                          | 37.500.000    | 7 Laporan (100%) | 83.793.305    | 7 Laporan (100%)  | 103.216.676   | 7 Laporan (100%)                         | 224.509.982    |                     |
| 5    | Program Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE                         | Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Pelajar guna Keseimbangan sebaran juga potensi Jumlah Penduduk | -                                                     | -  | -                                   | -             | -                                   | -             | -                                  | 13 Kab/Kota   | 2.327.591.818    | -             | 3.096.500.291     | 13 Kab/Kota   | 5.424.092.109                            |                |                     |
| 6    | Program Pelayanan Kontrasepsi                                          | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kontrasepsi                                       | -                                                     | -  | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 584.460.035   | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 315.316.650   | 8 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya | 422.855.000   | 40%              | 1.818.813.764 | 20%               | 2.249.069.703 | 100%                                     | 4.490.738.467  |                     |
| 7    | Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam KB                      | Meningkatnya peserta KB                                                                              | -                                                     | -  | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 350.138.100   | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 354.055.000   | 8 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya | 418.447.600   | 70%              | 1.024.140.400 | 30%               | 1.599.858.484 | 70%                                      | 3.042.446.484  |                     |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |                                     |               |                                     |               |                                    |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
|      |                                                              |                                                              | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017                          |               | Tahun 2018                          |               | Tahun 2019                         |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                |                                          |                |                    |
|      |                                                              |                                                              | Capaian                                               | Rp | Capaian                             | Rp            | Capaian                             | Rp            | Capaian                            | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian                                  | Rp             |                    |
| 8    | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                          | Meningkatnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi  | -                                                     | -  | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 526.053.940   | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 482.623.628   | 5 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya | 600.000.000    | 40%        | 698.277.545    | 50%        | 1.599.858.484  | 90%                                      | 2.898.136.029  |                    |
| 9    | Program Keluarga Berencana                                   | Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%) | -                                                     | -  | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 413.648.000   | Kab/Kota,Jakarta Dan Daerah lainnya | 205.388.000   | 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya | 337.045.000    | -          | -              | -          | -              | -                                        | 337.045.000    |                    |
| 10   | Program Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga          | Menurunnya Presentase Keluarga Pra Sejahtera                 | -                                                     | -  |                                     |               |                                     |               |                                    |                | 40%        | 1.024.140.400  | 50%        | 2.012.725.189  | 90%                                      | 3.036.865.589  |                    |
|      | JUMLAH                                                       |                                                              |                                                       |    |                                     | 5.099.999.600 |                                     | 3.938.050.000 |                                    | 12.689.939.288 |            | 13.587.117.996 |            | 15.512.412.616 |                                          | 41.789.469.900 |                    |

**Tabel Capaian Program Prioritas yang Disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan  
Tahun 2016 - 2021**

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

| KODE                              | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)                                                            | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                                                                                         |               |                                                                                         |               | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN                                           |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD                                                 |               | PD PENANG GUNG JAWAB                           | Lokasi |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------|
|                                   |                                                                                  |                                                                                                 | TAHUN 2016                                     |               | TAHUN 2017                                                                              |               | TAHUN 2018                                                                              |               | TAHUN 2019                                                                              |               | TAHUN 2020                                                                          |               | TAHUN 2021                                                                          |               |                                                                                          |               |                                                |        |
|                                   |                                                                                  |                                                                                                 | CAPAIAN                                        | RP.           | CAPAIAN                                                                                 | RP.           | CAPAIAN                                                                                 | RP.           | TARGET                                                                                  | RP.           | TARGET                                                                              | RP.           | TARGET                                                                              | RP.           | TARGET                                                                                   | RP.           |                                                |        |
| Urusan Wajib :<br>Bidang Urusan : | Bukan Pelayanan Dasar<br>Perhubungan                                             |                                                                                                 |                                                |               |                                                                                         |               |                                                                                         |               |                                                                                         |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                          |               |                                                |        |
| 2.09. 2.09.01. 01                 | - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                  | 100%                                           | 1.260.467.250 | 20%                                                                                     | 1.450.869.204 | 40%                                                                                     | 1.369.612.515 | 60%                                                                                     | 1.395.301.300 | 80%                                                                                 | 935.154.751   | 100%                                                                                | 1.007.742.496 | 100%                                                                                     | 7.419.147.516 | Sekretariat                                    |        |
| 2.09. 2.09.01. 02                 | - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                 | 100%                                           | 769.406.922   | 20%                                                                                     | 1.530.582.575 | 40%                                                                                     | 1.553.024.450 | 60%                                                                                     | 2.021.149.028 | 80%                                                                                 | 1.950.636.358 | 100%                                                                                | 2.102.046.908 | 100%                                                                                     | 9.926.846.241 | Sekretariat                                    |        |
| 2.09. 2.09.01. 03                 | - Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                      | 100%                                           | 95.110.300    | 20%                                                                                     | 183.824.500   |                                                                                         | -             | 60%                                                                                     | 139.324.500   | 80%                                                                                 | 149.404.253   | 100%                                                                                | 161.001.177   | 100%                                                                                     | 728.664.730   | Sekretariat                                    |        |
| 2.09. 2.09.01. 06                 | - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                  | 100%                                           | 108.750.500   | 20%                                                                                     | 78.933.275    | 40%                                                                                     | 81.744.200    | 60%                                                                                     | 60.969.000    | 80%                                                                                 | 15.426.708    | 100%                                                                                | 16.624.146    | 100%                                                                                     | 362.447.829   | Sekretariat                                    |        |
| 2.09. 2.09.01. 15                 | - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                        | - Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan       | 100%                                           | 354.068.610   | 12 Laporan/2 Dok                                                                        | 403.613.745   | 14 Laporan/2 Dok                                                                        | 285.629.975   | 16 Laporan/2 Dok                                                                        | 174.065.000   | 3 Laporan/2 Dok                                                                     | 116.661.335   | 3 Laporan/2 Dok                                                                     | 125.716.716   | 25 Laporan/18 Dok                                                                        | 1.459.755.381 | Sekretariat                                    |        |
| 2.09. 2.09.01. 25                 | - Program Pengembangan Transportasi                                              | - Tercapainya Pelayanan Transportasi yang Optimal                                               | 100%                                           | 366.989.830   | -                                                                                       | -             | -                                                                                       | -             | -                                                                                       | -             | -                                                                                   | -             | -                                                                                   | -             | -                                                                                        | -             | Bid. Pengembangan Sistem Transportasi          |        |
| 2.09. 2.09.01. 26                 | - Program Kerjasama Transportasi                                                 | - Tercapainya sistem transportasi lokal, regional, dan internasional yang efektif dan efisiensi | 100%                                           | 227.531.410   | -                                                                                       | -             | -                                                                                       | -             | -                                                                                       | -             | -                                                                                   | -             | -                                                                                   | -             | -                                                                                        | -             | Bid. Pengembangan Sistem Transportasi          |        |
| 2.09. 2.09.01. 27                 | - Program Pengembangan Data dan Informasi                                        | - Tersedianya data target dan realisasi program dan kegiatan perhubungan yang relevan           | 100%                                           | 354.058.648   | -                                                                                       | -             | -                                                                                       | -             | -                                                                                       | -             | -                                                                                   | -             | -                                                                                   | -             | -                                                                                        | -             | Bid. Pengembangan Sistem Transportasi          |        |
| 2.09. 2.09.01. 04                 | - Program Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ)                         | - Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan                                              | -                                              | -             | 31 Perlengkapan Jalan                                                                   | 148.790.000   | 60 Perlengkapan Jalan                                                                   | 173.624.000   | 120 Perlengkapan Jalan                                                                  | 186.200.000   | 6 Perlengkapan Jalan                                                                | 959.047.834   | 6 Perlengkapan Jalan                                                                | 953.865.807   | 29 Perlengkapan Jalan                                                                    | 2.421.527.641 | Bid. Transportasi Darat/Bid. Lalu Lintas       |        |
| 2.09. 2.09.01. 16                 | - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ)            | - Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan                                        | 100%                                           | 149.809.000   | Rambu=220 Bh, Guardrail=200 m, Marka=5000 m, LPJU=4 Unit, Delineator=100 bh, RPPJ=12 Bh | 583.969.000   | Rambu=240 Bh, Guardrail=240 m, Marka=6000 m, LPJU=5 Unit, Delineator=110 bh, RPPJ=15 Bh | 1.486.364.952 | Rambu=260 Bh, Guardrail=280 m, Marka=7000 m, LPJU=6 Unit, Delineator=120 Bh, RPPJ=18 Bh | 831.899.000   | Rambu=220 Bh, Guardrail=0 m, Marka=8.240 m, LPJU=0 Unit, Delineator=0 Bh, RPPJ=0 Bh | 665.033.881   | Rambu=113 Bh, Guardrail=0 m, Marka=8.190 m, LPJU=0 Unit, Delineator=0 Bh, RPPJ=0 Bh | 570.570.226   | Rambu=785 Bh, Guardrail=260 m, Marka=42.390 m, LPJU=10 Unit, Delineator=0 Bh, RPPJ=13 Bh | 4.287.646.059 | Bid. Transportasi Darat/Bid. Lalu Lintas Jalan |        |
|                                   |                                                                                  |                                                                                                 |                                                |               |                                                                                         |               |                                                                                         |               |                                                                                         |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                          |               |                                                |        |

| KODE              | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)                                                          | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                                 |             |                                 |             | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                                 |             |                                 |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |               | PD PENANG GUNG JAWAB                                  | Lokasi |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                                               |                                                                                               | TAHUN 2016                                     |               | TAHUN 2017                      |             | TAHUN 2018                      |             | TAHUN 2019                                    |             | TAHUN 2020                      |             | TAHUN 2021                      |             |                                          |               |                                                       |        |
|                   |                                                                               |                                                                                               | CAPAIAN                                        | RP.           | CAPAIAN                         | RP.         | CAPAIAN                         | RP.         | TARGET                                        | RP.         | TARGET                          | RP.         | TARGET                          | RP.         | TARGET                                   | RP.           |                                                       |        |
| 2.09. 2.09.01. 17 | - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                      | - Meningkatnya pelayanan angkutan                                                             | 100%                                           | 623.951.214   | 1 Dok/150 Org                   | 884.514.188 | 170 Org                         | 978.664.375 | 190 Org                                       | 713.812.600 | 210 Org                         | 804.260.486 | 230 Org                         | 914.837.411 | 4 Dok/930 Org                            | 4.920.040.273 | Bid. Transportasi Darat/Bid.                          |        |
| 2.09. 2.09.01. 18 | - Program Rehabilitasi Angkutan Jalan                                         | - Meningkatnya rehabilitasi angkutan Jalan                                                    | -                                              | -             | 2 Terminal Penumpang            | 317.348.600 | 2 Terminal Penumpang            | 190.954.400 | 2 Terminal Penumpang                          | 182.296.600 | 2 Terminal Penumpang            | 134.043.414 | 2 Terminal Penumpang            | 192.597.350 | 2 Terminal Penumpang                     | 1.017.240.364 | Bid. Transportasi Darat/Bid.                          |        |
| 2.09. 2.09.01. 19 | - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                             | - Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                            | 100%                                           | 1.478.364.700 | 48 Kegiatan/2 lokasi pengawasan | 295.968.234 | 48 Kegiatan/3 lokasi pengawasan | 187.220.116 | 48 Kegiatan/4 lokasi pengawasan               | 263.318.000 | 48 Kegiatan/5 lokasi pengawasan | 334.342.102 | 48 Kegiatan/6 lokasi pengawasan | 375.059.264 | 48 Kegiatan/20 lokasi pengawasan         | 2.934.272.416 | Bid. Transportasi Darat/Bid. Lalu Lintas Jalan        |        |
| 2.09. 2.09.01. 20 | - Program Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Sulawesi Tengah    | - Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian                                  | -                                              | -             | 2 Terminal                      | 61.382.400  | 2 Terminal                      | 86.109.000  | 2 Terminal                                    | 152.180.000 | 2 Terminal                      | 241.278.146 | 2 Terminal                      | 312.970.693 | 2 Terminal                               | 853.920.239   | Bid. Transportasi Darat/Bid. Angkutan,                |        |
| 2.09. 2.09.01. 21 | - Program Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran                     | - Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran                                            | 100%                                           | 635.737.800   | 4 Lokasi/kawasan pelabuhan      | 266.307.750 | 6 Lokasi/kawasan pelabuhan      | 132.499.650 | 7 Lokasi/kawasan pelabuhan                    | 226.763.100 | 8 Lokasi/kawasan pelabuhan      | 455.432.607 | 9 Lokasi/kawasan pelabuhan      | 481.493.374 | 9 Lokasi/kawasan pelabuhan               | 2.198.234.281 | Bid. Transportasi Laut/Bid. Pelayaran Laut dan LLASDP |        |
| 2.09. 2.09.01. 22 | - Program Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Udara            | - Tercapainya ketertiban keselamatan penerbangan                                              | 100%                                           | 739.083.889   | -                               | -           | -                               | -           | -                                             | -           | -                               | -           | -                               | -           | -                                        | -             | Bid. Transportasi Udara                               |        |
| 2.09. 2.09.01. 27 | - Program Layanan Operasional Terminal, Pelabuhan Regional. Dan Penyeberangan | - Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan | -                                              | -             | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 59.832.000  | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 326.087.000 | 2 Terminal/5 Pelabuhan                        | 116.525.057 | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 187.660.780 | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 322.600.561 | 2 Terminal/5 Pelabuhan                   | 1.012.705.398 | UPT/ UPT Pengelolaa n Prasarana Perhubungan Kelas A   |        |
| 2.09. 2.09.01. 28 | - Program Peningkatan Operasional UPT                                         | - Meningkatnya operasional UPT                                                                | 100%                                           | 542.896.100   | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 466.539.714 | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 504.645.288 | 2 Terminal/5 Pelabuhan                        | 683.474.943 | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 504.003.238 | 2 Terminal/5 Pelabuhan          | 327.415.494 | 2 Terminal/5 Pelabuhan                   | 3.028.974.777 | UPT/ UPT Pengelolaa n Prasarana Perhubungan Kelas A   |        |
| 2.09. 2.09.01. 24 | - Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan                       | - Tersedianya dokumen perencanaan dan meningkatnya fasilitas pelabuhan penyeberangan          | -                                              | -             | -                               | -           | -                               | -           | -                                             | -           | -                               | -           | 4 Pelabuhan                     | 457.418.705 | 4 Pelabuhan                              | 457.418.705   | Bid. Transportasi Laut/Bid. Pelayaran Laut dan LLASDP |        |
|                   |                                                                               |                                                                                               |                                                |               |                                 |             |                                 |             |                                               |             |                                 |             |                                 |             |                                          |               |                                                       |        |
| 2.09. 2.09.01. 25 | - Program Pembangunan Transportasi Laut                                       | - Jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut                                              | 100%                                           | 1.435.212.000 | 1 Pelabuhan                     | 106.660.000 | -                               | -           | 1 Pelabuhan                                   | 146.000.000 | 1 Pelabuhan                     | 375.321.560 | -                               | -           | 1 Pelabuhan                              | 2.063.193.560 | Bid. Transportasi Laut/Bid. Pelayaran Laut dan LLASDP |        |
| 2.09. 2.09.01. 26 | - Program Rehabilitasi Pelabuhan                                              | - Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan                                              | -                                              | -             | -                               | -           | -                               | -           | -                                             | -           | -                               | -           | 5 Pelabuhan                     | 625.941.386 | 5 Pelabuhan                              | 625.941.386   | Bid. Transportasi Laut/Bid. Pelayaran Laut dan LLASDP |        |
|                   |                                                                               |                                                                                               |                                                |               |                                 |             |                                 |             |                                               |             |                                 |             |                                 |             |                                          |               |                                                       |        |

| KODE              | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOMES)                                             | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR<br>PERIODE RPJMD |                | PD<br>PENANG<br>GUNG<br>JAWAB | Lokasi |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
|                   |                                                                    |                                                                                     | TAHUN 2016                                     |               | TAHUN 2017 |               | TAHUN 2018 |               | TAHUN 2019                                    |               | TAHUN 2020 |               | TAHUN 2021 |               |                                             |                |                               |        |
|                   |                                                                    |                                                                                     | CAPAIAN                                        | RP.           | CAPAIAN    | RP.           | CAPAIAN    | RP.           | TARGET                                        | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET                                      | RP.            |                               |        |
| 2.09. 2.09.01. 05 | - Program Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur            | - Persentase sumberdaya<br>aparatur yang memiliki<br>kompetensi sesuai<br>bidangnya | 100%                                           | 122.210.450   | 20%        | 100.723.400   | 40%        | 126.947.460   | 60%                                           | 178.000.000   | 80%        | 171.790.040   | 100%       | 185.124.572   | 100%                                        | 884.795.922    | Sekretariat                   | (21)   |
|                   |                                                                    |                                                                                     |                                                |               |            |               |            |               |                                               |               |            |               |            |               |                                             |                |                               |        |
| JUMLAH            |                                                                    |                                                                                     |                                                | 9.263.648.623 |            | 6.939.858.585 |            | 7.483.127.381 |                                               | 7.471.278.128 |            | 7.999.497.492 |            | 9.133.026.286 |                                             | 46.602.772.718 |                               |        |

**Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021**

**OPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah**

| Kode |            | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (Outcomes)                                                                                                   | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                                                         | PD Penanggung Jawab                                        |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                |                                                                                                                                        | Tahun 2016                                     |               | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019                                    |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                                                         |                                                            |
|      |            |                                                                                |                                                                                                                                        | Capaian                                        | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Target                                        | RP            | Target     | RP            | Target     | RP            | Target                                   | RP                                                      |                                                            |
| 2.10 |            | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika                  |                                                                                                                                        |                                                |               |            |               |            |               |                                               |               |            |               |            |               |                                          | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |                                                            |
|      | 2.10.01    | Dinas Komunikasi, Informatika, Perandian dan Statistik                         |                                                                                                                                        |                                                |               |            |               |            |               |                                               |               |            |               |            |               |                                          |                                                         |                                                            |
|      | 2.10.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu                                                                                               | 100%                                           | 1.958.714.412 | 20%        | 1.368.924.227 | 32,91%     | 1.568.377.250 | 40%                                           | 1.633.663.916 | 80%        | 1.446.476.701 | 100%       | 1.823.275.209 | 60%                                      | 9.799.431.716                                           | Sekretariat                                                |
|      | 2.10.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)                                           | 100%                                           | 470.188.997   | 20%        | 429.002.874   | 31,63%     | 963.621.137   | 40%                                           | 1.850.014.776 | 80%        | 776.303.580   | 100%       | 2.795.688.654 | 60%                                      | 7.284.820.018                                           | Sekretariat                                                |
|      | 2.10.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur                                                                                           | 100%                                           | 100.760.000   | -          | -             | -          | -             | 100%                                          | -             | 80%        | 171.476.471   | 80%        | 159.012.310   | 60%                                      | 431.248.781                                             | Sekretariat                                                |
|      | 2.10.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu                                                                             | 100%                                           | 260.800.000   | 100%       | 130.480.000   | 100%       | 93.887.000    | 40%                                           | 65.960.000    | 100%       | 391.958.790   | 100%       | 363.468.365   | 60%                                      | 1.306.554.155                                           | Sekretariat                                                |
|      | 2.10.01.19 | Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik                                  | Termanfaatkannya dan Terwujudnya Monitoring Isu Publik, Pengelolaan Pendapat Umun dan Aduan Masyarakat                                 |                                                |               | 20%        | 186.865.812   | 29,48%     | 110.126.126   | 40%                                           | 212.681.400   | 80%        | 390.935.556   | 100%       | 362.519.507   | 60%                                      | 1.263.128.401                                           | Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik |
|      | 2.10.01.11 | Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi                                    | Tingkat Pemanfaatan Konten dan Pengelolaan Media serta Data Informasi Pendukung Komunikasi Publik dalam mendukung Kebijakan Pemerintah |                                                |               | 20%        | 284.740.000   | 35,85%     | 113.953.500   | 40%                                           | 185.245.000   | 80%        | 435.928.731   | 100%       | 404.242.250   | 60%                                      | 1.424.109.481                                           | Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik |
|      | 2.10.01.21 | Program Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik                                | Terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui penyelesaian sengketa informasi                                                       |                                                |               | 20%        | 619.676.562   | 35,91%     | 646.181.562   | 40%                                           | 686.180.962   | 80%        | 454.092.429   | 100%       | 421.085.677   | 60%                                      | 2.827.217.192                                           | Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik |
|      | 2.10.01.22 | Program Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik                                  | Tingkat Pemanfaatan Media Pemerintah Daerah sebagai Sarana Komunikasi Publik                                                           |                                                |               | 20%        | 532.013.350   | 30,75%     | 415.491.800   | 40%                                           | 259.195.000   | 80%        | 635.729.400   | 100%       | 589.519.948   | 100%                                     | 2.431.949.498                                           | Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik |
|      | 2.10.01.23 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK                         | Perluasan Pengembangan dan penyediaan Infrastruktur TIK SKPD Provinsi                                                                  |                                                |               | 20%        | 2.344.662.070 | 36,67%     | 2.990.653.225 | 40%                                           | 3.680.173.725 | 80%        | 1.362.277.286 | 80%        | 1.263.257.031 | 60%                                      | 11.641.023.337                                          | Bidang Penyelenggaraan E-Govemmet                          |

| Kode |            | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                            | Indikator Kinerja Program (Outcomes)                                                                                            | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |              |               |              |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |               |                |               |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab                                       |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                         |                                                                                                                                 | Tahun 2016                                     |               | Tahun 2017   |               | Tahun 2018   |               | Tahun 2019                                    |                | Tahun 2020    |                | Tahun 2021    |                |                                          |                |                                                           |
|      | 2.10.01.24 | Program Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi e-Government                 | Terlaksananya Pengembangan dan penyediaan Aplikasi Pemerintahan dan Publik wilayah Provinsi                                     |                                                |               | 0 Aplikasi   | 329.118.555   | 0 Aplikasi   | 171.890.400   | 1 Aplikasi                                    | 178.510.400    | 4 Aplikasi    | 681.138.643    | 5 Aplikasi    | 631.628.516    | 10 Aplikasi                              | 1.992.286.514  | Bidang Penyelenggaraan E-Governmet                        |
|      | 2.10.01.25 | Program Keamanan Informasi e-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi | Tingkat Layanan Penerapan Keamanan Informasi ISO. 27001 di SKPD Provinsi                                                        |                                                |               | 20%          | 248.811.000   | 18,62%       | 172.798.000   | 40%                                           | 159.742.500    | 80%           | 431.387.807    |               |                | 100%                                     | 1.012.739.307  | Bidang Penyelenggaraan E-Governmet                        |
|      |            | Program Pengendalian Aplikasi Informatika                                               | Prosentase Pengendalian Aplikasi Informatika                                                                                    |                                                |               |              |               |              |               |                                               |                |               |                | 10%           | 400.031.393    | 10%                                      | 400.031.393    | Bidang Penyelenggaraan E-Governmet                        |
|      | 2.10.01.26 | Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik                 | Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik                                                           |                                                |               | 5 Laporan    | 1.675.890.550 | 5 Laporan    | 566.215.000   | 3 Laporan                                     | 880.724.450    | 12 Laporan    | 317.864.700    | 12 Laporan    | 294.759.974    | 37 Laporan                               | 3.735.454.674  | Bidang Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika |
|      | 2.10.01.27 | Program Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                   | Terwujudnya Pemahaman SDM TIK dan Penguatan Infrastruktur Komunikasi Publik                                                     |                                                |               | 3 Kegiatan   | 117.299.400   | 3 Kegiatan   | 113.275.000   | 3 Kegiatan                                    | 168.505.150    | 3 Kegiatan    | 300.613.459    | 3 Kegiatan    | 278.762.679    | 15 Kegiatan                              | 978.455.688    | Bidang Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika |
|      | 2.10.01.28 | Program Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi                                        | Terwujudnya Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Provinsi                              |                                                |               | 0 Sub Domain | 98.211.250    | 0 Sub Domain | 89.461.250    | 3 Sub Domain                                  | 135.725.000    | 10 Sub Domain | 2.270.462.143  | 15 Sub Domain | 2.105.428.386  | 28 Sub Domain                            | 4.699.288.029  | Bidang Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika |
|      | 2.10.01.29 | Program Tata Kelola dan Ekosistem TIK                                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Ekosistem TIK Smart Province                        |                                                |               | 1 Dokumen    | 427.110.600   | 1 Dokumen    | 276.270.000   | 1 Dokumen                                     | 317.583.000    | 1 Dokumen     | 454.092.429    | 1 Dokumen     | 421.085.677    | 5 Dokumen                                | 1.896.141.706  | Bidang Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika |
|      | 2.10.01.30 | Program Penyelenggaraan Sistem Persandian Daerah                                        | Optimalisasi Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi, pengembangan dan pengamanan persandian                                      |                                                |               | 20%          | 235.748.000   | 30,28%       | 226.277.750   | 40%                                           | 349.717.400    | 80%           | 635.729.400    | 100%          | 589.519.948    | 100%                                     | 2.036.992.498  | Bidang persandian dan Statistik                           |
|      | 2.10.01.31 | Program Pengelolaan Statistik dan Layanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah          | Termanfaatkanya Dokumen dan Data Statistik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta akses informasi publik |                                                |               | 5 Dokumen    | 306.445.750   | 5 Dokumen    | 166.216.000   | 3 Dokumen                                     | 379.104.350    | 5 Dokumen     | 774.050.305    | 7 Dokumen     | 717.786.680    | 25 Dokumen                               | 2.343.603.085  | Bidang persandian dan Statistik                           |
|      |            |                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                |               |              |               |              |               |                                               |                |               |                |               |                |                                          |                |                                                           |
|      |            | JUMLAH                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                | 2.790.463.409 |              | 9.335.000.000 |              | 8.684.695.000 |                                               | 11.142.727.029 |               | 11.930.517.830 |               | 13.621.072.206 |                                          | 57.504.475.474 |                                                           |
|      |            |                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                |               |              |               |              |               |                                               |                |               |                |               |                |                                          |                |                                                           |
|      |            |                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                |               |              |               |              |               |                                               |                |               |                |               |                |                                          |                |                                                           |

## CAPAIAN DAN TARGET PROGRAM PRIORITAS KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016 - 2021

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                   | OPD Penanggung Jawab                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                 | Tahun 2016                                    |               | Tahun 2017    |               | Tahun 2018    |               | Tahun 2019       |                  | Tahun 2020       |                  | Tahun 2021       |                  | Periode RPJMD              |                   |                                                                   |
|      |                                                              |                                                                                 | Capaian                                       | Rp            | Capaian       | Rp            | Capaian       | Rp            | Target           | Rp               | Target           | Rp               | Target           | Rp               | Target                     | Rp                |                                                                   |
|      | URUSAN WAJIB                                                 |                                                                                 |                                               |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah |
|      | BIDANG URUSAN                                                |                                                                                 |                                               |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                   |                                                                   |
| 1    | Pelayanan Administrasi                                       | Tingkat layanan administrasi tepat waktu.                                       | 75%                                           | 1.558.223.700 | 75%           | 1.553.281.700 | 95%           | 1.263.072.200 | 100%             | 2.967.182.931,75 | 100%             | 3.234.229.395,60 | 85%              | 3.525.310.041,21 | 85%                        | 14.812.560.767,96 | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.             |
|      | 1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar      |                                                                                 |                                               | 493.247.000   |               | 415.543.400   |               | 205.070.000   |                  | 619.270.389,15   |                  | 675.004.724,17   |                  | 735.755.149,35   |                            |                   |                                                                   |
|      | 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran                    |                                                                                 |                                               | 1.064.976.700 |               | 1.137.738.300 |               | 1.058.002.200 |                  | 2.347.912.542,60 |                  | 2.559.224.671,43 |                  | 2.789.554.891,86 |                            |                   |                                                                   |
| 2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar. |                                               | 1.471.928.050 |               | 2.404.565.200 |               | 1.479.016.990 |                  | 2.845.771.642,90 |                  | 3.101.891.091,15 |                  | 3.381.061.289,36 |                            | 14.206.459.919,76 | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.             |
|      | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                   |                                                                                 | 90%                                           | 1.055.319.550 | 75%           | 1.924.751.000 | 95%           | 1.065.114.390 | 60%              | 2.276.272.730,53 | 80%              | 2.481.137.276,28 | 100%             | 2.704.439.631,15 | 100%                       |                   |                                                                   |
|      | 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                                                                                 | 90%                                           | 416.608.500   | 75%           | 479.814.200   | 95%           | 413.902.600   | 60%              | 569.498.912,37   | 80%              | 620.753.814,87   | 100%             | 676.621.658,21   | 100%                       |                   |                                                                   |
| 3    | Program Peningkatan Disiplin                                 | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas.                       |                                               | -             |               | 60.500.000    |               | -             |                  | 117.714.470,41   |                  | 128.308.772,74   |                  | 139.856.562,29   |                            | 587.645.856,06    | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.             |
|      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya               |                                                                                 | -                                             | -             | 90%           | 60.500.000    | -             | -             | 60%              | 117.714.470,41   | 80%              | 128.308.772,74   | 100%             | 139.856.562,29   | 100%                       |                   |                                                                   |
| 4    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur           | Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                            | 85%                                           | 125.120.000   | 85%           | 135.220.000   | 95%           | 38.680.000    | 60%              | 233.483.247,09   | 80%              | 254.496.739,33   | 100%             | 277.401.445,87   | 100%                       | 1.121.472.123,46  | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.             |
|      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal                           |                                                                                 | 85%                                           | 125.120.000   | 85%           | 135.220.000   | 95%           | 38.680.000    | 60%              | 233.483.247,09   | 80%              | 254.496.739,33   | 100%             | 277.401.445,87   | 100%                       |                   |                                                                   |
| 5    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan            | Pelaporan capaian kinerja tepat waktu                                           | 85%                                           | 715.102.400   | 90%           | 799.173.200   | 95%           | 373.272.950   | 100%             | 1.639.441.533,30 | 100%             | 1.786.991.271,30 | 100%             | 1.947.820.485,72 | 100%                       | 8.184.304.069,38  | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.             |
|      | 1. Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja SKPD               |                                                                                 | 85%                                           | 715.102.400   | 90%           | 799.173.200   | 95%           | 373.272.950   | 100%             | 1.639.441.533,30 | 100%             | 1.786.991.271,30 | 100%             | 1.947.820.485,72 | 100%                       |                   |                                                                   |
| 6    | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                     | Jumlah Acuan perencanaan yang dihasilkan.                                       | 3                                             | 2.032.594.057 | 4             | 1.580.326.300 | 4             | 1.433.108.344 | 4                | 2.439.899.932,06 | 4                | 2.659.490.925,96 | 4                | 2.898.845.109,29 | 20                         | 11.984.915.694,05 | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.             |
|      | 1. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan SKPD                      |                                                                                 | 1                                             | 532.024.457   | 1             | 595.386.200   | 1             | 429.427.200   | 2                | 1.122.738.704,03 | 2                | 1.223.785.187,40 | 2                | 1.333.925.854,26 |                            |                   |                                                                   |
|      | 2. Pengembangan Data Base KUMKM                              |                                                                                 | 13 Kab/kota                                   | 780.765.100   | 2             | 343.901.600   | 2             | 290.762.800   | 1                | 481.006.040,16   | 1                | 524.296.583,78   | 1                | 571.483.276,32   |                            |                   |                                                                   |
|      | 3. Penyusunan Perencanaan Pengembangan KUKM                  |                                                                                 | 12                                            | 719.804.500   | 1             | 641.038.500   | 1             | 712.918.344   | 4                | 836.155.187,87   | 4                | 911.409.154,78   | 4                | 993.435.978,71   |                            |                   |                                                                   |
| 7    | Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Koperasi           | Koperasi berkualitas                                                            | -                                             | 12,28%        | 2.547.734.300 | 35%           | 2.006.057.360 | 20%           | 6.174.269.899,88 | 10%              | 6.729.954.190,87 | 10%              | 7.335.650.068,04 | 80%              | 30.822.753.492,51          |                   | Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi                        |
|      | 1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi                            | Koperasi aktif                                                                  | -                                             | 21,05%        | 922.969.500   | 32,5%         | 613.429.680   | 20%           | 2.280.706.746,43 | 10%              | 2.485.970.353,61 | 10%              | 2.709.707.685,43 | 80%              |                            |                   |                                                                   |
|      | 2. Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Keehatan Koperasi    | Kopeasi Sehat                                                                   | -                                             | 9             | 768.047.900   | 20            | 598.390.000   | 10            | 1.921.790.272,57 | 10               | 2.094.751.397,10 | 5                | 2.283.279.022,84 | 55               |                            |                   |                                                                   |
|      | 3. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi                | Koperasi Tumbuh                                                                 | -                                             | 10,52%        | 856.716.900   | 10%           | 794.237.680   | 10            | 1.971.772.880,88 | 10               | 2.149.232.440,16 | 10               | 2.342.663.359,77 | 10               |                            |                   |                                                                   |

| Kode   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                   |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                    | OPD Penanggung Jawab                                   |                                                        |                                                        |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|        |                                                              |                                                                   | Tahun 2016                                                      |                                                                               | Tahun 2017    |                | Tahun 2018    |                | Tahun 2019    |                   | Tahun 2020       |                   | Tahun 2021       |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   | Capaian                                                         | Rp                                                                            | Capaian       | Rp             | Capaian       | Rp             | Target        | Rp                | Target           | Rp                | Target           | Rp                | Target                                   | Rp                 |                                                        |                                                        |                                                        |  |
| 8      | Program peningkatan usaha                                    | 1. Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi |                                                                 | -                                                                             |               | 2.213.127.000  |               | 1.561.262.000  |               | 6.093.912.749,01  |                  | 6.642.364.896,41  |                  | 7.240.177.737,09  |                                          | 30.421.600.205,06  | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi    |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 | -                                                                             | 3             | 892.314.300    | 8             | 662.964.800    | 8             | 2.541.156.222,17  | 9                | 2.769.860.282,16  | 10               | 3.019.147.707,56  | 10                                       |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        | 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia                   | Jumlah Tenaga Kerja Terserap                                      |                                                                 | -                                                                             | 15,9%         | 736.424.500    | 18%           | 447.303.000    | 30%           | 1.752.127.644,74  | 40%              | 1.909.819.132,76  | 50%              | 2.081.702.854,71  | 50%                                      |                    | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi    |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              | 3. Pengembangan Usaha                                             | Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas |                                                                               | -             | 9,24%          | 584.388.200   | 32%            | 450.994.200   | 30%               | 1.800.628.882,10 | 35%               | 1.962.685.481,49 | 40%               | 2.139.327.174,82                         | 40%                |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        | 9                                                            | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil                 |                                                                 |                                                                               | -             | 3              | 2.923.785.760 | 3              | 2.280.016.488 | 3                 | 6.907.212.726,36 | 3                 | 7.528.861.871,73 | 3                 | 8.206.459.440,20                         | 15                 | 34.481.698.827,57                                      | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi    |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   | 1. Peningkatan Fasilitas Usaha                                  | Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas                                 |               | -              | 762           | 1.252.372.900  | 1072          | 966.343.900       | 1000             | 2.958.631.973,44  | 1000             | 3.224.908.851,05  | 1000                                     | 3.515.150.647,65   | 5000                                                   |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   | 2. Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil          | Jumlah Usaha Kecil yang mendapat pendampingan                                 |               | -              | 500           | 885.723.860    | 196           | 740.447.985       | 500              | 2.092.452.600,85  | 500              | 2.280.773.334,92  | 500                                      | 2.486.042.935,07   | 2500                                                   |                                                        |                                                        |  |
|        | 3. Peningkatan Kualitas                                      | Jumlah Produk Usaha Kecil yang meningkat kualitasnya              |                                                                 | -                                                                             | 160           | 785.689.000    | 123           | 573.224.603    | 50            | 1.856.128.152,07  | 50               | 2.023.179.685,76  | 50               | 2.205.265.857,48  | 250                                      |                    | UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        | 10                                                           | Pelayanan Administrasi                                            |                                                                 | 98%                                                                           | 412.866.600   | 98%            | 235.226.700   | 98%            | 212.594.700   | 100%              | 506.193.625,38   | 100%              | 551.751.051,67   | 100%              | 601.408.646,32                           | 100%               | 2.526.984.017,71                                       | UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   | 1. Pelayanan Administrasi                                       | Tingkat layanan administrasi tepat waktu                                      |               | 98%            | 412.866.600   | 98%            | 235.226.700   | 98%               | 212.594.700      | 100%              | 506.193.625,38   | 100%              | 551.751.051,67                           | 100%               | 601.408.646,32                                         |                                                        | 100%                                                   |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        | 11                                                           | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         |                                                                 | 100%                                                                          | 550.231.800   | 80%            | 54.928.100    | 100%           | 56.923.188    | 60%               | 382.983.037,17   | 80%               | 318.120.924,16   | 100%              | 346.751.807,33                           | 100%               | 1.548.102.171,00                                       | UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur               |               | 100%           | 462.281.800   | 80%            | 4.502.800     | 100%              | 6.497.888        | 60%               | 31.395.515,59    | 80%               | 26.078.362,39                            | 100%               | 28.425.415,01                                          |                                                        | 100%                                                   |  |
|        |                                                              |                                                                   | 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                   | Tingkat Pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Dinas                   |               | 100%           | 87.950.000    | 80%            | 50.425.300    | 100%              | 50.425.300       | 60%               | 351.587.521,58   | 80%               | 292.042.561,77                           | 100%               | 318.326.392,32                                         |                                                        | 100%                                                   |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 | Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT pelatihan | 164.190.500   | 122.713.000    | 117.910.000   | 100.000.000    | 160.000.000   | 160.000.000       |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
| 12     | Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM                  | 1. Penyelenggaraan Pelatihan                                      | Jumlah diklat yang dilaksanakan                                 | 41                                                                            | 5.871.375.150 | 21             | 4.483.580.000 | 30             | 3.841.400.000 | 25                | 2.393.477.625,47 | 27                | 2.608.890.611,76 | 2.843.690.766,82  | 2.843.690.766,82                         | 30                 | 11.948.547.711,96                                      | 11.948.547.711,96                                      | UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
|        |                                                              |                                                                   |                                                                 |                                                                               |               |                |               |                |               |                   |                  |                   |                  |                   |                                          |                    |                                                        |                                                        |                                                        |  |
| Jumlah |                                                              |                                                                   |                                                                 | 12.737.441.757                                                                |               | 18.991.448.260 |               | 14.545.404.220 |               | 32.701.543.420,78 |                  | 35.545.351.742,68 |                  | 38.744.433.399,54 |                                          | 162.647.044.856,48 |                                                        |                                                        |                                                        |  |



OPD - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

| No                                                | Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program                                                | Capaian Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |               |               |               |                       | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                |                       |                |                    | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 | Penanggung Jawab                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | Tahun 2016                                                   |                   | Tahun 2017    |               | Tahun 2018    |                       | Tahun 2019                                    |                       | Tahun 2020     |                       | Tahun 2021     |                    |                                          |                 |                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | Sesudah Perubahan                                            | Sesudah Perubahan | Capaian       | Rp            | Capaian       | Rp                    | Capaian                                       | Rp                    | Target         | Rp.                   | Target         | Rp.                | Target                                   | Rp.             |                                                     |
| 1                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                        | 5                                                            | 6                 | 7             | 8             | 9             | 10                    | 8                                             | 9                     | 12             | 13                    | 16             | 17                 | 20                                       | 21              | 22                                                  |
| 1                                                 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       |                                               | 38.822.848.388        |                | 38.616.525.575        |                | 42.462.012.878     |                                          | 119.901.386.841 | S<br>e<br>k<br>r<br>e<br>t<br>a<br>r<br>i<br>a<br>t |
|                                                   | BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       |                                               |                       |                |                       |                |                    |                                          |                 |                                                     |
|                                                   | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cakupan layanan adminstrasi perkantoran (%)                              | 100%                                                         | 1.829.492.198     | 100%          | 2.457.611.910 | 100%          | 2.175.337.199         | 100%                                          | 2.835.657.150         | 100%           | 2.362.206.175         | 100%           | 2.847.804.731      | 100%                                     | 8.045.668.056   |                                                     |
|                                                   | 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 100%                                          | 1.889.853.000         | 100%           | 1.387.302.000         | 100%           | 1.648.659.000      |                                          | 4.925.814.000   |                                                     |
|                                                   | 2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 100%                                          | 945.804.150           | 100%           | 974.904.175           | 100%           | 1.199.145.731      |                                          | 3.119.854.056   |                                                     |
|                                                   | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)                        | 100%                                                         | 2.285.307.630     | 100%          | 2.826.600.360 | 41,01%        | 5.791.132.491         | 80%                                           | 24.426.653.250        | 80%            | 11.740.892.924        | 100%           | 10.347.573.287     | 100%                                     | 46.515.119.461  |                                                     |
|                                                   | 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 80%                                           | 22.747.343.250        | 80%            | 8.381.580.000         | 100%           | 6.775.922.000      |                                          | 37.904.845.250  |                                                     |
|                                                   | 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 80%                                           | 1.679.310.000         | 80%            | 3.359.312.924         | 100%           | 3.571.651.287      |                                          | 8.610.274.211   |                                                     |
|                                                   | 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                 | -                                                            |                   | 100%          | 63.860.000    | -             |                       | 60%                                           | 140.000.000           | 80%            | 108.146.100           |                | 217.879.250        |                                          | 466.025.350     |                                                     |
|                                                   | 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 100%                                          | 140.000.000           | 100%           | 108.146.100           | 100%           | 217.879.250        |                                          | 466.025.350     |                                                     |
|                                                   | 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                                                         | 289.617.000       | 100%          | 261.800.000   | 100%          | 277.753.100           | 60%                                           | 529.312.000           | 80%            | 1.270.251.973         | 100%           | 1.421.074.651      |                                          | 3.220.638.624   |                                                     |
|                                                   | 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 69 orang                                      | 529.312.000           | 75 orang       | 1.270.251.973         | 82 orang       | 1.421.074.651      |                                          | 3.220.638.624   |                                                     |
|                                                   | 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                 | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan           | 100%                                                         | 671.390.820       | 100%          | 592.138.000   | 100%          | 340.843.800           | 3 Laporan                                     | 489.087.000           | 3 Laporan      | 686.153.531           | 3 Laporan      | 793.407.349        |                                          | 1.968.647.880   |                                                     |
|                                                   | 1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 3 Laporan                                     | 489.087.000           | 3 Laporan      | 686.153.531           | 3 Laporan      | 793.407.349        |                                          | 1.968.647.880   |                                                     |
|                                                   | 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tercapainya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas              | 100%                                                         | 1.840.302.962     | 100%          | 1.928.150.750 | 100%          | 1.156.263.333         | 5 Dok                                         | 2.436.362.400         | 5 Dok          | 3.126.321.918         | 5 Dok          | 3.362.690.891      |                                          | 8.925.375.209   |                                                     |
|                                                   | 1 Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 3 Dok                                         | 1.560.841.400         | 3 Dok          | 1.300.528.000         | 3 Dok          | 1.395.076.000      |                                          | 4.256.445.400   |                                                     |
|                                                   | 2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 1 Lap                                         | 445.526.000           | 1 Lap          | 1.016.686.000         | 1 Lap          | 1.094.687.000      |                                          | 2.556.899.000   |                                                     |
|                                                   | 3 Koordinasi Pelaksanaan KEK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                              |                   |               |               |               |                       | 2 Dok                                         | 429.995.000           | 2 Dok          | 809.107.918           | 2 Dok          | 872.927.891        |                                          | 2.112.030.809   |                                                     |
| 7 Program Peningkatan Daya Saling Penanaman Modal | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) :<br>- Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)<br>- Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)<br><br>Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) :<br>- Jumlah Investor PMDN (Proyek )<br>- Jumlah Investor PMA (Proyek)<br><br>Rasio Daya Serap Tenaga kerja PMA/PMDN |                                                                          | 5.724.922.644                                                |                   | 5.313.409.802 |               | 3.917.643.529 | Rp 15.331.000.000.000 | 5.602.425.000                                 | Rp 16.864.100.000.000 | 15.095.614.140 | Rp 18.550.510.000.000 | 18.122.969.412 | 50.745.610.000.000 | 38.821.008.552                           |                 |                                                     |

S  
e  
k  
r  
e  
t  
a  
r  
i  
a  
t

| No | Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan                                                      | Indikator Kinerja Program                | Capaian Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                         |            |                                         |            |                           | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                           |                |                               |                |                               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | Penanggung Jawab                                             |                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      |                                          | Tahun 2016                                                   |                                         | Tahun 2017 |                                         | Tahun 2018 |                           | Tahun 2019                                    |                           | Tahun 2020     |                               | Tahun 2021     |                               |                                          |                |                                                              |                                                      |
|    |                                                                                                      |                                          | Sesudah Perubahan                                            | Sesudah Perubahan                       | Capaian    | Rp                                      | Capaian    | Rp                        | Capaian                                       | Rp                        | Target         | Rp.                           | Target         | Rp.                           | Target                                   | Rp.            |                                                              | Target                                               |
| 1  | 3                                                                                                    | 5                                        | 5                                                            | 6                                       | 7          | 8                                       | 9          | 10                        | 8                                             | 9                         | 12             | 13                            | 16             | 17                            | 20                                       | 21             | 22                                                           |                                                      |
| 1  | 1 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal                                                           |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Dok kajian                                  | 250.619.000               | 1 Dok          | 773.527.000                   | 1 Dok          | 888.644.000                   |                                          |                | Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal        |                                                      |
|    | 2 Penyusunan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal                                                    |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Dok rumusan                                 | 290.972.000               | 1 Dok          | 754.715.000                   | 1 Dok          | 918.139.000                   |                                          |                | 1.963.826.000                                                | sda                                                  |
|    | 3 Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan Usaha Daerah                                                   |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Dok                                         | 506.280.000               | 1 Dok          | 1.316.871.000                 | 1 Dok          | 1.626.390.000                 |                                          |                | 3.449.541.000                                                | sda                                                  |
|    | 4 Peningkatan Kualitas Strategi dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal                             |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Dok                                         | 375.180.000               | 1 Dok          | 828.971.000                   | 1 Dok          | 1.049.079.000                 |                                          |                | 2.253.230.000                                                | Bidang Promosi Penanaman Modal                       |
|    | 5 Penyelenggaraan Pameran Promosi Penanaman Modal                                                    |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 9 Event                                       | 1.335.120.000             | 9 Event        | 3.717.336.000                 | 10 Event       | 4.542.896.000                 |                                          |                | 9.595.352.000                                                | sda                                                  |
|    | 6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal                                            |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Paket                                       | 1.020.732.000             | 1 Paket        | 1.554.690.000                 | 1 Paket        | 1.817.363.000                 |                                          |                | 4.392.785.000                                                | sda                                                  |
|    | 7 Penyelenggaraan Pemantauan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal                                  |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 204.556.800               | 1 Laporan      | 773.542.140                   | 1 Laporan      | 938.661.412                   |                                          |                | 1.916.760.352                                                | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal      |
|    | 8 Penyelenggaraan Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 290.062.200               | 1 Laporan      | 773.374.000                   | 1 Laporan      | 888.477.000                   |                                          |                | 1.951.913.200                                                | sda                                                  |
|    | 9 Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Penggunaan Fasilitas Penanaman Modal                           |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 132 Perusahaan                                | 285.314.000               | 132 Perusahaan | 701.174.000                   | 145 Perusahaan | 909.779.000                   |                                          |                | 1.896.267.000                                                | sda                                                  |
|    | 10 Pengolahan dan Penyusunan Data Penanaman Modal dan Perizinan- Non Perizinan                       |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 211.700.000               | 1 Laporan      | 1.019.813.000                 | 1 Laporan      | 1.159.346.000                 |                                          |                | 2.390.859.000                                                | Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal |
|    | 11 Penyusunan Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal dan Perizinan-Non Perizinan                 |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 246.594.000               | 1 Laporan      | 879.010.000                   | 1 Laporan      | 1.053.621.000                 |                                          |                | 2.179.225.000                                                | sda                                                  |
|    | 12 Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)                                      |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 237.645.000               | 1 Laporan      | 1.326.417.000                 | 1 Laporan      | 1.520.795.000                 |                                          |                | 3.084.857.000                                                | sda                                                  |
|    | 13 Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah                                                          |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Dok/buku                                    | 347.650.000               | 1 Dok/buku     | 676.174.000                   | 1 Dok/buku     | 809.779.000                   |                                          |                | 1.833.603.000                                                | sda                                                  |
| 8  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                   |                                          |                                                              | 1.498.238.899                           |            | 1.981.295.686                           |            | 1.811.848.545             |                                               | 2.363.351.588             |                | 4.226.938.814                 |                | 5.348.613.307                 |                                          | 11.938.903.709 |                                                              |                                                      |
|    | Lama Proses Perizinan :<br>- Izin Usaha (hari kerja)<br>- Izin Non Usaha (hari kerja)                | 1 - 30 hari (100%)<br>1 - 10 hari (100%) |                                                              | 1 - 30 hari (100%)<br>1 - 7 hari (100%) |            | 1 - 25 hari (100%)<br>1 - 6 hari (100%) |            | 1 - 20 hari<br>1 - 5 hari |                                               | 1 - 15 hari<br>1 - 4 hari |                | 1 - 10 hari<br>1 - 3 hari     |                | 1 - 10 hari<br>1 - 3 hari     |                                          |                |                                                              |                                                      |
|    | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (%)                                          | 85% (Baik)                               |                                                              | 102% (Baik)                             |            | 94%(Sangat Baik)                        |            | 62,51 % - 81,25 % (Baik)  |                                               | 62,51 % - 81,25 % (Baik)  |                | 81,26 % - 100 % (Sangat Baik) |                | 81,26 % - 100 % (Sangat Baik) |                                          |                |                                                              |                                                      |
|    | 1 Fasilitasi Pelayanan perizinan-non perizinan                                                       |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 500 Izin                                      | 1.047.827.188             | 550 Izin       | 1.240.020.000                 | 600 nizin      | 1.583.621.000                 |                                          | 3.871.468.188  | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |                                                      |
|    | 2 Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis IT                                            |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 2 Laporan                                     | 478.950.000               | 2 Laporan      | 639.268.000                   | 2 Laporan      | 837.802.000                   |                                          | 1.956.020.000  |                                                              |                                                      |
|    | 3 Fasilitasi Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan                             |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 222.050.000               | 1 Laporan      | 487.246.814                   | 1 Laporan      | 603.851.307                   |                                          | 1.313.148.121  | Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan            |                                                      |
|    | 4 Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan non Perizinan             |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 1 Laporan                                     | 277.754.400               | 1 Laporan      | 949.462.000                   | 1 Laporan      | 1.207.663.000                 |                                          | 2.434.879.400  | sda                                                          |                                                      |
|    | 5 Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                    |                                          |                                                              |                                         |            |                                         |            |                           | 4 Laporan                                     | 336.770.000               | 4 Laporan      | 910.942.000                   | 4 Laporan      | 1.115.676.000                 |                                          | 2.363.388.000  | sda                                                          |                                                      |

Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| Kode |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (Outcomes)                                                             | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |                | Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |    |                                                                                |                                                                                                  | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017     |               | Tahun 2018     |                | Tahun 2019                                    |               | Tahun 2020     |               | Tahun 2021     |               |                                          |                |                     |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  | Capaian                                               | Rp            | Capaian        | Rp            | Capaian        | Rp             | Target                                        | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target                                   | Rp             |                     |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
| 1    |    | URUSAN WAJIB                                                                   |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      | 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat Layanan Administrasi yang Tepat Waktu                                                    | 60%                                                   | 1.374.100.450 | 13%            | 870.081.000   | 100%           | 1.020.164.210  |                                               | 1.322.513.010 |                | 1.158.077.811 |                | 1.331.789.482 | 100                                      | 3.812.380.303  | SEKRETARIAT         |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      | 2  | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                       |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               | -             |                | 560.197.717   |                | 644.227.375   |                                          | 1.204.425.092  | SEKRETARIAT         |
|      | 3  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Pemerintah Daerah |                                                       | 1.565.642.546 |                | 1.798.033.800 |                | 1.320.321.216  |                                               | 2.239.627.720 |                | 2.463.590.492 |                | 2.833.129.066 | 100                                      | 7.536.347.278  | SEKRETARIAT         |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      | 4  | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur                             | Meningkatnya Kemampuan dan bertambahnya aparatur yang kompeten                                   |                                                       | 156.292.000   |                | 76.057.700    |                | 56.850.400     |                                               | 50.941.000    |                | 56.035.100    |                | 64.440.365    | 100                                      | 171.416.465    | SEKRETARIAT         |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      | 5  | Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan yang tersusun                                                                     |                                                       | 25.350.000    |                | 40.000.000    |                | 339.602.000    |                                               | 92.400.000    | 22,08          | 58.080.000    | 25,39          | 116.886.000   | 100                                      | 267.366.000    | SEKRETARIAT         |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      | 6  | Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan                                  | Meningkatnya upaya permbinaan Dan Pengembangan Kepemudaan                                        |                                                       | 677.259.500   |                | 7.656.691.000 |                | 1.135.022.000  |                                               | 3.190.086.770 |                | 3.709.495.447 |                | 4.320.924.992 | 100                                      | 11.220.507.209 | PEMUDA              |
|      | 7  | Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan                                | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga                                        |                                                       | 139.518.500   |                | 3.200.727.000 |                | 20.892.099.134 |                                               | 4.979.796.630 |                | 5.519.202.519 |                | 6.137.743.109 | 100                                      | 16.636.742.258 | OLAHRAGA            |
|      | 8  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pemuda dan Olahraga                   | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai Standar      |                                                       | 1.630.550.000 |                | 4.234.794.000 |                | 8.523.413.000  |                                               | 8.397.462.188 |                | 8.832.541.922 |                | 9.291.695.505 | 100                                      | 26.521.699.615 | SARPRAS             |
|      | 9  | Program Pembinaan kapasitas Tenaga dan Kelembagaan                             | Meningkatnya Pembinaan kapasitas tenaga dan Kelembagaan                                          |                                                       | 113.765.600   |                | 709.414.400   |                | 248.910.600    |                                               | 1.782.678.040 |                | 1.917.340.844 |                | 2.065.017.678 | 100                                      | 5.765.036.562  | KETENAGAAN          |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      | 10 | Program Pembinaan Kepramukaan                                                  | Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan                                                               |                                                       |               |                | 169.632.400   |                | 40.000.000     |                                               | 658.256.832   |                | 789.908.198   |                | 947.889.838   | 100                                      | 2.396.054.868  | KETENAGAAN          |
|      |    |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |               |                |               |                |                |                                               |               |                |               |                |               |                                          |                |                     |
|      |    | TOTAL                                                                          |                                                                                                  | 5.682.478.596                                         |               | 18.585.798.900 |               | 33.536.382.560 |                | 22.713.762.190                                |               | 25.064.470.050 |               | 27.753.743.410 |               | 75.531.975.650                           |                |                     |

| Kode                      program                      Indikator Kinerja Program |    |                                                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                    |               |               |               |               |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |               |                    |               |                      | Kondisi Akhir priode RPJMD |                     | PD Penanggung Jawab              |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |    |                                                         | Tahun 2016                                                               |               | Tahun 2017    |               | Tahun 2018    |               | Tahun 2019                                    |                    | Tahun 2020    |                    | Tahun 2021    |                      | Target                     | Rp                  |                                  |                                                                             |
|                                                                                  |    |                                                         | Capaian                                                                  | Rp            | Capaian       | Rp            | Capaian       | Rp            | Target                                        | Rp                 | Target        | Rp                 | Target        | Rp                   |                            |                     |                                  |                                                                             |
| 1                                                                                | 2  | 3                                                       | 4                                                                        | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                                            | 11                 | 12            | 13                 | 14            | 15                   | 16                         | 17                  | 18                               |                                                                             |
| 2                                                                                | 17 |                                                         |                                                                          | 7.933.375.751 |               | 7.465.314.940 |               | 9.935.529.786 |                                               | 18.002.075.520     |               | 19.623.575.253     |               | 21.383.628.328       |                            | 90.676.788.590      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                                                                             |
| 2                                                                                | 17 | Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 50%           | 1.394.220.849 | 60%           | 1.351.653.424 | 65%           | 1.766.357.307                                 | 70%                | 3.537.788.239 | 75%                | 3.856.594.761 | 75%                  | 4.201.813.612              | 75%                 | 17.819.515.327                   | Bid. Sekretariat                                                            |
| 2                                                                                | 17 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 35%           | 1.876.156.890 | 40%           | 1.738.484.275 | 50%           | 2.251.060.816                                 | 70%                | 6.557.927.285 | 80%                | 7.149.595.781 | 80%                  | 7.786.333.845              | 80%                 | 33.029.821.749                   | Bid. Sekretariat                                                            |
| 2                                                                                | 17 | Peningkatan Disiplin Aparatur                           | Persentase peningkatan disiplin aparatur                                 | 75%           | -             | 80%           | 125.956.000   | 85%           | -                                             | 90%                | 202.193.472   | 95%                | 219.637.378   | 100%                 | 242.887.622                | 100%                | 1.020.481.296                    | Bid. Sekretariat                                                            |
| 2                                                                                | 17 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur              | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 55%           | 242.058.800   | 60%           | 93.741.700    | 65%           | 70.400.560                                    | 70%                | 414.765.566   | 80%                | 451.414.827   | 85%                  | 495.183.613                | 85%                 | 2.091.056.738                    | Bid. Sekretariat                                                            |
| 2                                                                                | 17 | Peningkatan Kualitas Perencanaan Pelaporan              | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas              | 60%           | 528.440.450   | 65%           | 492.774.442   | 75%           | 255.839.800                                   | 80%                | 568.572.923   | 90%                | 619.118.293   | 95%                  | 677.733.348                | 95%                 | 2.865.675.720                    | Bid. Sekretariat                                                            |
| 2                                                                                | 17 | Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Kerjasama | Persentase/ Jumlah pengunjung perpustakaan                               | 189.525 orang | -             | 390.016 orang | 1.094.840.700 | 570.111 orang | 2.104.024.508                                 | 80% (758.100)      | 3.156.579.699 | 90% (947.625)      | 3.441.381.853 | 100% (1.137.150)     | 3.747.824.531              | 100% (1.104.252)    | 15.898.483.456                   | Bid. Layanan Alih Otomasi & kerjama perpustakaan                            |
|                                                                                  |    | Pengembangan Koleksi dan Pelestarian bahan Perpustakaan | Persentase/Jumlah koleksi buku yang tersedia                             | 61.753 Judul  | -             | 64.342 Judul  | 1.547.749.843 | 66.685 Judul  | 2.523.953.566                                 | 80% (84.779 Judul) | 2.376.165.557 | 90% (93.279 Judul) | 2.590.554.907 | 100% (101.779 Judul) | 2.821.234.505              | 100% (78.386 Judul) | 11.967.836.203                   | Bid. Deposit pengembangan koleksi pengelolaan konservasi bahan perpustakaan |
|                                                                                  |    |                                                         | Jumlah Penerimaan Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam                    |               |               |               |               |               |                                               | - Judul            | -             | - Judul            | -             | - Judul              | -                          | 6.559 Judul         |                                  |                                                                             |

| Kode<br>program<br>Indikator Kinerja Program |    |                                                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                       |               |                       |                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                                |                |                                |                | Kondisi Akhir priode RPJMD     |                 | PD Penanggung Jawab                                           |
|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                                              |    |                                                         | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017            |               | Tahun 2018            |                | Tahun 2019                                    |                | Tahun 2020                     |                | Tahun 2021                     |                |                                |                 |                                                               |
|                                              |    |                                                         |                                                       |               |                       |               |                       |                | Target                                        | Rp             | Target                         | Rp             | Target                         | Rp             | Target                         | Rp              |                                                               |
|                                              |    |                                                         | Capaian                                               | Rp            | Capaian               | Rp            | Capaian               | Rp             |                                               |                |                                |                |                                |                |                                |                 |                                                               |
| 1                                            | 2  | 3                                                       | 4                                                     | 5             | 6                     | 7             | 8                     | 9              | 10                                            | 11             | 12                             | 13             | 14                             | 15             | 16                             | 17              | 18                                                            |
|                                              | 18 | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan     | 1.748<br>Perpustakaan                                 | 3.892.498.762 | 1.763<br>Perpustakaan | 1.020.114.556 | 1.774<br>Perpustakaan | 963.893.229    | 1.778<br>Perpustakaan                         | 1.188.082.779  | 1.788<br>Perpustakaan          | 1.295.277.454  | 1.798<br>Perpustakaan          | 1.410.617.253  | 1.798<br>Perpustakaan          | 5.983.918.101   | Bid. Pengembangan perpustakaan & kebudayaan kegemaran membaca |
|                                              |    | Jumlah Promosi Gemar Membaca                            | 439<br>kali                                           |               | 939<br>kali           |               | 1.439<br>kali         |                | 499<br>kali                                   | -              | 519<br>kali                    | -              | 539<br>kali                    | -              | 539<br>kali                    |                 |                                                               |
|                                              |    | -                                                       |                                                       |               |                       |               |                       |                | 6.819<br>Judul                                | -              | 7.119<br>Judul                 | -              | 7.419<br>Judul                 | -              | 6.559<br>Judul                 |                 |                                                               |
| 2                                            | 18 |                                                         |                                                       | -             |                       | 1.006.237.678 |                       | 1.416.409.285  |                                               | 3.333.520.182  |                                | 3.632.224.063  |                                | 3.965.192.927  |                                | 16.795.112.743  |                                                               |
| 2                                            | 18 | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan          |                                                       | -             | 56                    | 624.356.578   | 65                    | 1.130.801.368  | 79                                            | 1.010.162.495  | 88                             | 1.100.604.374  | 98                             | 1.201.843.906  | 80                             | 5.089.650.384   | Bid. Pembinaan & pengawasan kearsipan                         |
|                                              |    | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan         |                                                       |               |                       |               |                       |                | -<br>Perusahaan swasta/Ormas                  | -              | -                              | -              | -                              | -              | 277<br>Perusahaan swasta/Ormas | 5.541.240.086   |                                                               |
| 2                                            | 18 | Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip  |                                                       |               | 738.410<br>Arsip      | 381.881.100   | 989.070<br>Arsip      | 285.607.917    | 1.239.730<br>Arsip                            | 1.223.528.117  | 1.490.390<br>Arsip             | 1.333.247.044  | 1.741.050<br>Arsip             | 1.455.081.721  | 1.541.000<br>Arsip             | 6.164.222.274   | Bid. Pengelolaan Pemnafaatan arsip                            |
|                                              |    | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip |                                                       |               |                       |               |                       |                | 289<br>Perusahaan swasta/Ormas                | 1.099.829.570  | 346<br>Perusahaan swasta/Ormas | 1.198.372.645  | 403<br>Perusahaan swasta/Ormas | 1.308.267.300  | -                              | -               |                                                               |
|                                              |    |                                                         |                                                       | 7.933.375.751 |                       | 8.471.552.618 |                       | 11.351.939.071 |                                               | 21.335.595.702 |                                | 23.255.799.316 |                                | 25.348.821.255 |                                | 107.471.901.333 |                                                               |

| Kode |     |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                  | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun Ke-0 | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |     |                   |                   |                   |                   |                |                  |                   |                |               |               |                                          |                | SKPD Penanggung Jawab |      |  |      |             |  |      |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|--|------|-------------|--|------|
|      |     |    |                                                                                           |                                                                                                                      |                                       | Tahun 2016                                     |     | Tahun 2017        |                   | Tahun 2018        |                   | Tahun 2019     |                  | Tahun 2020        |                | Tahun 2021    |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                |                       |      |  |      |             |  |      |
|      |     |    |                                                                                           |                                                                                                                      |                                       | TARGET                                         | Rp. | TARGET            | Rp.               | TARGET            | Rp.               | TARGET         | Rp.              | TARGET            | Rp.            | TARGET        | Rp.           | TARGET                                   | Rp.            |                       |      |  |      |             |  |      |
| (1)  | (2) |    | (3)                                                                                       |                                                                                                                      | (4)                                   | (5)                                            | (6) | (7)               | (8)               |                   | (9)               | (10)           |                  | (11)              | (12)           |               | (13)          | (14)                                     |                | (15)                  | (16) |  | (17) | (18)        |  | (19) |
|      |     |    | PENUNJANG URUSAN                                                                          |                                                                                                                      |                                       |                                                |     |                   |                   |                   |                   |                |                  |                   |                |               |               |                                          |                |                       |      |  |      |             |  |      |
| 20   |     |    | BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, BIRO ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                      |                                       |                                                |     |                   |                   |                   |                   |                |                  |                   |                |               |               |                                          |                |                       |      |  |      |             |  |      |
|      |     |    | INSPEKTORAT                                                                               |                                                                                                                      |                                       |                                                |     | 12.144.897.122,93 |                   | 15.249.951.482,45 |                   | 16.622.447.116 |                  | 18.118.467.356,30 |                | 8.886.767.028 |               | 71.022.530.105,93                        |                |                       |      |  |      | INSPEKTORAT |  |      |
| 20   | 07  | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                         | 100%                                  |                                                |     | 20%               | 1.769.942.927,34  | 40%               | 1.806.052.175,570 | 60%            | 2.297.116.457    | 80%               | 2.537.034.315  | 100%          | 1.605.953.958 | 100%                                     | 10.016.099.834 |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 02 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur                                             | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                        | 100%                                  |                                                |     | 20%               |                   | 40%               | 1.873.029.4070    | 60%            | 2.117.337.591    | 80%               | 2.714.535.373  | 100%          | 1.203.151.740 | 100%                                     | #VALUE!        |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                     | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                             | 100%                                  |                                                |     | 20%               | 217.162.830       | 40%               | 249.737.254       | 60%            | 325.744.245      | 80%               | 347.460.528    | 100%          | 401.751.235   | 100%                                     | 1.541.856.092  |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja &                                                                  | 100%                                  |                                                |     | 100%              | 271.453.537       | 100%              | 282.311.679       | 100%           | 325.744.245      | 100%              | 358.318.669    | 100%          | 445.183.801   | 100%                                     | 1.683.011.931  |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 20 | Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH   | - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dan terwujudnya efisien dan efektif dan akuntabilitas penyelenggaraan PEMDA | 20 SKPD                               |                                                |     | 20 SKPD           | 7.600.699.044     | 25 SKPD           | 8.557.735.635,510 | 30 SKPD        | 8.923.405.266,33 | 35 SKPD           | 9.327.143.542  | 40 SKPD       | 3.223.021.101 | 45 SKPD                                  | 37.632.004.588 |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 21 | Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                  | - Terlatihnya aparatur pengawasan                                                                                    | 85 org                                |                                                |     | 85 org            | 1.845.884.054     | 85 org            | 2.008.756.176     | 87 org         | 2.117.337.591    | 89 org            | 2.280.209.713  | 90 org        | 1.388.791.128 | 95 org                                   | 1.388.791.128  |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 22 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan                                   | - Tersusunnya Sistem Prosedur Pengawasan                                                                             | 1 Dok                                 |                                                |     | 1 Dok             | 255.166.325       | 1 Dok             | 271.453.537000    | 1 Dok          | 304.027.962      | 1 Dok             | 325.744.245    | 1 Dok         | 347.460.528   | 5 Dok                                    | 1.503.852.597  |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
| 20   | 07  | 24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                   | - Tersusunnya Inventarisasi Pengaduan Masy                                                                           | 1 Dok                                 |                                                |     | 1 Dok             | 184.588.405       | 1 Dok             | 200.875.618-      | 1 Dok          | 211.733.759      | 1 Dok             | 228.020.971    | 1 Dok         | 271.453.537   | 5 Dok                                    | 1.096.672.291  |                       |      |  |      | SEKRETARIAT |  |      |
|      |     |    | Jumlah                                                                                    |                                                                                                                      |                                       |                                                |     |                   | 12.144.897.122,93 |                   | 15.249.951.482,45 |                | 16.622.447.116   |                   | 18.118.467.356 |               | 8.886.767.028 |                                          | 71.022.530.106 |                       |      |  |      |             |  |      |

**TABEL CAPAIAN DAN TARGET PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI REALISASI KEBUTUHAN PENDANAAN  
TAHUN 2016-2021**

| Kode |    |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                       | Indikator Kinerja Program (Outcomes)                                                                                        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | PD Penanggung Jawab |                                            |                     |
|------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|      |    |   |                                                                                    |                                                                                                                             | Tahun 2016                                     |               | Tahun 2017     |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               |                                          |               |                     | Tahun 2021                                 |                     |
|      |    |   |                                                                                    |                                                                                                                             | Capaian                                        | Rp            | Capaian        | Rp            | Capaian    | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |                     | Target                                     | Rp                  |
| 01   | 03 | 1 | BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br>BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  |                                                                                                                             |                                                |               |                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                     |                                            |                     |
| 01   |    |   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)                                                                           | 97%                                            | 1.595.039.323 | 82%            | 1.518.860.931 | 88%        | 2.167.187.600 | 100%       | 2.255.963.576 | 100%       | 2.415.460.201 | 100%                                     | 2.757.730.911 | 12.710.242.542      | Sekretariat Bappeda<br>Sekretariat Bappeda |                     |
| 02   |    |   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | Tingkat ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur                                                          | 98%                                            | 1.453.255.000 | 96%            | 1.962.159.500 | 99%        | 1.989.600.505 | 60%        | 5.908.549.927 | 80%        | 6.326.284.407 | 100%                                     | 7.222.718.907 | 24.862.568.246      |                                            |                     |
|      |    |   |                                                                                    | Tingkat Pemeliharaan sarana dan prasaran operasional SKPD (%)                                                               |                                                |               | -              | -             |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                     |                                            |                     |
| 03   |    |   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                                           | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas (%)                                                                | 94%                                            | 397.833.100   | 96%            | 572.169.430   | 86%        | 758.274.688   | 60%        | 510.846.106   | 80%        | 546.962.926   | 100%                                     | 624.467.572   | 3.410.553.822       | Sekretariat Bappeda                        |                     |
| 04   |    |   | Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | Pelaporan capaian kinerja tepat waktu                                                                                       | 99%                                            | 397.449.380   | 99%            | 733.770.900   | 95%        | 612.326.328   | 100%       | 587.051.328   | 100%       | 628.555.857   | 100%                                     | 717.622.222   | 3.676.776.015       | Sekretariat Bappeda                        |                     |
| 05   |    |   | Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik                                 | Jumlah dokumen/lap. Perencanaan yang berbasis Teknologi Informasi, Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan teknologi informasi | 97%<br>13 SKPD                                 | 2.322.266.960 | 95%<br>21 SKPD | 2.067.107.475 | 90%        | 1.875.623.122 |            |               |            |               |                                          |               | 6.264.997.557       |                                            |                     |
| 06   |    |   | Program Pelayanan Adm Perkantoran (UPTB Sattisdad)                                 |                                                                                                                             |                                                |               | 96%            | 402.077.150   |            |               |            |               |            |               |                                          |               | 402.077.150         |                                            |                     |
| 07   |    |   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (UPTB Sattisdad)                 |                                                                                                                             |                                                |               | 92%            | 240.356.000   |            |               |            |               |            |               |                                          |               | 240.356.000         |                                            |                     |
| 08   |    |   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (UPTB Sattisdad)                 |                                                                                                                             |                                                |               | 94%            | 215.074.800   |            |               |            |               |            |               |                                          |               | 215.074.800         |                                            |                     |
| 09   |    |   | Program Kerjasama Pembangunan                                                      | Jumlah dokumen/laporan kerjasama pembangunan antar daerah sebagai peningkatan kualitas pembangunan daerah                   | 99%                                            | 113.980.760   |                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               | 113.980.760         |                                            |                     |
| 10   |    |   | Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh                                | Jumlah dokumen/laporan perencanaan yang dihasilkan tepat waktu                                                              | 96%                                            | 435.054.800   | -              |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               | 435.054.800         |                                            |                     |
| 11   |    |   | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan                                          | Jumlah dokumen/laporan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah                                                           | 100%                                           | 950.162.844   |                |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               | 950.162.844         |                                            |                     |
| 12   |    |   | Program Perencanaan Pembangunan daerah                                             | Jumlah dokumen/laporan perencanaan pembangunan daerah                                                                       | 97%                                            | 2.631.551.150 | 98%            | 3.079.837.225 | 96%        | 2.989.491.493 | 100%       | 3.558.206.200 | 100%       | 3.809.771.378 | 100%                                     | 4.349.615.983 | 20.418.473.429      | Sekretariat Bappeda                        |                     |
| 13   |    |   | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                            | Jumlah dokumen/laporan perencanaan Pembangunan Ekonomi                                                                      | 98%                                            | 2.337.483.040 | 98%            | 2.779.930.970 | 95%        | 2.547.859.444 | 14 laporan | 2.080.887.450 | 16 laporan | 2.363.643.720 | 18 laporan                               | 2.684.027.618 | 48 laporan          | 14.793.832.242                             | Bid.Ekonomi Bappeda |

| Kode |  |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcomes)                                          | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 | PD Penanggung Jawab                     |
|------|--|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|      |  |  |                                                                |                                                                               | Tahun 2016                                     |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                |                                          |                 |                                         |
|      |  |  |                                                                |                                                                               | Capaian                                        | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |                                         |
| 14   |  |  | Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya              | Jumlah dokumen/laporan perencanaan pembangunan sosial dan budaya              | 98%                                            | 2.177.696.686  | 98%        | 2.379.766.729  | 96%        | 2.767.072.948  | 3 Dok      | 1.716.853.651  | 3 Dok      | 1.838.235.204  | 3 Dok      | 2.098.713.133  | 9 dokumen                                | 12.978.338.351  | Bid.Sosial Budaya Bappeda               |
| 15   |  |  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam      | Jumlah dokumen/laporan perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam      | 98%                                            | 1.291.475.306  | 98%        | 2.330.865.780  | 97%        | 2.863.342.366  | 8 laporan  | 2.647.530.762  | 9 Laporan  | 2.834.711.187  | 10 Laporan | 3.236.389.762  | 27 Laporan                               | 15.204.315.163  | Bid.Infrastruktur dan Kerjasama Bappeda |
| 16   |  |  | Program Perencanaan Tata Ruang                                 | Jumlah dokumen/laporan tata ruang                                             | 98%                                            | 335.834.800    |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | 335.834.800                              |                 |                                         |
| 17   |  |  | Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi                  | Jumlah dokumen/laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi                  | 97%                                            | 2.102.009.150  | 98%        | 1.887.709.000  | 93%        | 1.635.161.400  | 14 laporan | 1.337.221.000  | 14 laporan | 1.431.762.525  | 14 laporan | 1.634.643.274  | 32 Laporan                               | 10.028.506.349  | Bid.Pengendalian dan Evaluasi Bappeda   |
| 18   |  |  | Program Penguatan Kelembagaan AMPL-BM Provinsi Sulawesi Tengah | Jumlah dokumen/laporan penguatan kelembagaan AMPL-BM Provinsi Sulawesi Tengah | 99%                                            | 121.435.220    |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | 121.435.220                              |                 |                                         |
|      |  |  | JUMLAH                                                         |                                                                               |                                                | 18.662.527.519 |            | 20.169.685.890 |            | 20.205.939.894 |            | 20.603.110.000 |            | 22.195.387.404 |            | 25.325.929.382 |                                          | 127.162.580.089 |                                         |



Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                             | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                       |               |                       |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |                | PD Penangung Jawab      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------------|
|      |                                                                             |                                                                                  | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017            |               | Tahun 2018            |               | 2019                 |               | 2020                 |               | 2021                 |               |                      |                |                         |
|      |                                                                             |                                                                                  | Capaian                                               | Rp             | Capaian               | Rp            | Capaian               | Rp            | Target               | Rp            | Target               | Rp            | Target               | Rp            | Target               | Rp             |                         |
| 01   | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                             |                                                                                  |                                                       |                |                       |               |                       |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |                |                         |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                   | 60%                                                   | 3.469.723.698  | 70%                   | 3.900.968.850 | 75%                   | 4.578.700.517 | 70%                  | 5.044.971.200 | 75%                  | 5.401.650.664 | 80%                  | 6.167.064.563 | 80%                  | 28.563.079.492 | Sekretariat             |
| 2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                  | 65%                                                   | 12.529.461.400 | 75%                   | 5.535.504.068 | 80%                   | 9.044.000.234 | 75%                  | 4.956.713.342 | 80%                  | 5.307.152.975 | 85%                  | 6.059.176.552 | 85%                  | 43.432.008.571 | Sekretariat             |
| 3    | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                           | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidanannya      | 60%                                                   | 1.025.390.511  | 70%                   | 1.310.806.000 | 75%                   | 1.118.149.400 | 70%                  | 827.311.000   | 75%                  | 885.801.888   | 80%                  | 1.011.320.015 | 80%                  | 6.178.778.814  | Sekretariat             |
| 4    | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Asset | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                   | Laporan                                               | 1.062.240.233  | Laporan               | 672.444.600   | Laporan               | 746.838.600   | Laporan              | 572.600.084   | Laporan              | 613.082.910   | Laporan              | 699.956.758   | Laporan              | 4.367.163.185  | Sekretariat             |
| 5    | Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran                               | - Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan anggaran                        | Dokumen                                               | 946.713.297    | Dokumen               | 571.287.200   | Dokumen               | 688.690.400   | Dokumen              | 615.764.200   | Dokumen              | 659.298.729   | Dokumen              | 752.721.359   | Dokumen              | 4.234.475.185  | Sekretariat             |
| 6    | Program Pengembangan Pendapatan, sistem Informasi dan Pengolahan data       | - Terselenggaranya pengembangan Pendapatan, sistem informasi dan pengolahan data | Laporan                                               | 1.124.576.900  | Laporan               | 792.457.208   | Laporan               | 801.847.400   | Laporan              | 524.797.400   | Laporan              | 561.900.576   | Laporan              | 641.521.888   | Laporan              | 4.447.101.372  | Bid. Pengembangan       |
| 7    | Program Pengelolaan Pajak Daerah                                            | - Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan pajak Daerah                               | Target Pajak Daerah                                   | 1.937.239.400  | Target Pajak Daerah   | 1.229.753.100 | Target Pajak Daerah   | 1.055.543.000 | Target Pajak Daerah  | 796.165.200   | Target Pajak Daerah  | 852.454.080   | Target Pajak Daerah  | 973.246.823   | Target Pajak Daerah  | 6.844.401.602  | Bid. Pajak              |
| 8    | Program Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain    | - Meningkatnya Retribusi daerah,DBH pusat dan PLL                                | Target Retribusi,PLL                                  | 920.862.100    | Target Retribusi,PLL  | 602.453.000   | Target Retribusi,PLL  | 660.973.800   | Target Retribusi,PLL | 379.063.800   | Target Retribusi,PLL | 405.863.611   | Target Retribusi,PLL | 463.374.484   | Target Retribusi,PLL | 3.432.590.795  | Bid. Retribusi          |
| 9    | Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan                                | - Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan                                      | Laporan                                               | 789.375.600    | Laporan               | 466.280.800   | Laporan               | 581.530.800   | Laporan              | 336.386.600   | Laporan              | 360.169.133   | Laporan              | 411.205.099   | Laporan              | 2.944.948.031  | Bid. Pengawasan         |
| 10   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah       | - Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah                 | Target PKB dan BBN-KB                                 | 390.339.800    | Target PKB dan BBN-KB | -             | Target PKB dan BBN-KB | -             | 70%                  | -             | 75%                  | -             | 80%                  | -             | 85%                  | 390.339.800    |                         |
| 11   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah       | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat                     | Target PKB dan BBN-KB                                 | 701.785.000    | Target PKB dan BBN-KB | 605.074.600   | Target PKB dan BBN-KB | 403.050.000   | 70%                  | 255.850.000   | 75%                  | 273.938.595   | 80%                  | 312.755.694   | 85%                  | 2.552.453.889  | UPTB Wilayah. I Palu    |
| 12   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 65%                                                   | -              | 75%                   | 106.876.850   | 80%                   | 78.409.300    | 75%                  | 78.409.300    | 80%                  | 83.952.838    | 85%                  | 95.848.955    | 85%                  | 443.497.242    |                         |
| 13   | Program Pelayanan Administrsi Perkantoran                                   | - Tingkat Layanan Adimistrasi Perkantoran                                        | 60%                                                   | 926.181.759    | 70%                   | 702.492.050   | 75%                   | 900.284.200   | 75%                  | 928.184.200   | 80%                  | 993.806.823   | 85%                  | 1.134.629.250 | 85%                  | 5.585.578.282  |                         |
| 14   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah       | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat                     | Target PKB dan BBN-KB                                 | 382.883.000    | Target PKB dan BBN-KB | 269.136.400   | Target PKB dan BBN-KB | 327.391.400   | 70%                  | 212.391.400   | 75%                  | 227.407.472   | 80%                  | 259.631.111   | 85%                  | 1.678.840.783  | UPTB Wilayah. II Parimo |
| 15   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 65%                                                   | -              | 75%                   | 88.470.000    | 80%                   | 107.670.000   | 75%                  | 107.670.000   | 80%                  | 115.282.269   | 85%                  | 131.617.767   | 85%                  | 550.710.036    |                         |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan          | Indikator Kinerja Program (outcomes)                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                       |             |                       |             |        |             |        |             |        |             |        |               | PD Penangung Jawab          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|
|      |                                                                       |                                                              | Tahun 2016                                            |             | Tahun 2017            |             | Tahun 2018            |             | 2019   |             | 2020   |             | 2021   |             |        |               |                             |
|      |                                                                       |                                                              | Capaian                                               | Rp          | Capaian               | Rp          | Capaian               | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp            |                             |
| 16   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                   | 60%                                                   | 762.440.186 | 70%                   | 550.424.546 | 75%                   | 533.384.546 | 75%    | 551.384.546 | 80%    | 590.367.433 | 85%    | 674.022.499 | 85%    | 3.662.023.756 | UPTB Wilayah. III Poso      |
| 17   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 720.350.200 | Target PKB dan BBN-KB | 505.581.400 | Target PKB dan BBN-KB | 478.480.200 | 70%    | 220.235.200 | 75%    | 235.805.829 | 80%    | 269.219.515 | 85%    | 2.429.672.343 |                             |
| 18   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -           | 75%                   | 77.110.238  | 80%                   | 77.532.900  | 75%    | 80.332.900  | 80%    | 86.012.436  | 85%    | 98.200.398  | 85%    | 419.188.872   |                             |
| 19   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                   | 60%                                                   | 471.790.470 | 70%                   | 389.520.685 | 75%                   | 405.689.223 | 75%    | 408.889.223 | 80%    | 437.797.691 | 85%    | 499.833.624 | 85%    | 2.613.520.916 | UPTB Wilayah. IV Morowali   |
| 20   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 346.844.241 | Target PKB dan BBN-KB | 352.253.600 | Target PKB dan BBN-KB | 290.300.000 | 70%    | 150.152.000 | 75%    | 160.767.746 | 80%    | 183.548.536 | 85%    | 1.483.866.123 |                             |
| 21   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -           | 75%                   | 78.361.150  | 80%                   | 83.545.000  | 75%    | 83.545.000  | 80%    | 89.451.632  | 85%    | 102.126.928 | 85%    | 437.029.709   |                             |
| 22   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                   | 60%                                                   | 377.706.200 | 70%                   | 231.544.067 | 75%                   | 231.823.817 | 75%    | 271.971.817 | 80%    | 291.200.224 | 85%    | 332.463.296 | 85%    | 1.736.709.422 | UPTB Wilayah. V Banggai     |
| 23   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 718.812.300 | Target PKB dan BBN-KB | 449.488.300 | Target PKB dan BBN-KB | 500.307.800 | 70%    | 454.506.200 | 75%    | 486.639.788 | 80%    | 555.596.646 | 85%    | 3.165.351.035 |                             |
| 24   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -           | 75%                   | 28.873.350  | 80%                   | 51.763.550  | 75%    | 61.203.650  | 80%    | 65.530.748  | 85%    | 74.816.455  | 85%    | 282.187.753   |                             |
| 25   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                   | 60%                                                   | 684.597.463 | 70%                   | 608.840.049 | 75%                   | 569.881.349 | 75%    | 636.144.649 | 80%    | 681.120.076 | 85%    | 777.634.790 | 85%    | 3.958.218.376 | UPTB Wilayah. VI Bangkep    |
| 26   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 442.707.907 | Target PKB dan BBN-KB | 282.034.600 | Target PKB dan BBN-KB | 253.100.000 | 70%    | 188.900.000 | 75%    | 202.255.230 | 80%    | 230.914.796 | 85%    | 1.599.912.533 |                             |
| 27   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -           | 75%                   | 30.408.100  | 80%                   | 34.950.000  | 75%    | 34.950.000  | 80%    | 37.420.965  | 85%    | 42.723.516  | 85%    | 180.452.581   |                             |
| 28   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                   | 60%                                                   | 201.488.200 | 70%                   | 202.860.073 | 75%                   | 189.790.573 | 75%    | 207.790.573 | 80%    | 222.481.367 | 85%    | 254.006.976 | 85%    | 1.278.417.762 | UPTB Wilayah. VII Toli-Toli |
| 29   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 675.475.200 | Target PKB dan BBN-KB | 421.609.800 | Target PKB dan BBN-KB | 405.253.800 | 70%    | 431.281.800 | 75%    | 461.773.423 | 80%    | 527.206.717 | 80%    | 2.922.600.741 |                             |
| 30   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -           | 75%                   | 92.469.800  | 80%                   | 90.335.000  | 75%    | 106.644.346 | 80%    | 114.184.101 | 85%    | 130.363.988 | 85%    | 533.997.236   |                             |
| 31   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                   | 60%                                                   | 527.736.716 | 70%                   | 406.084.844 | 75%                   | 389.325.644 | 75%    | 414.688.298 | 80%    | 444.006.761 | 85%    | 506.922.519 | 85%    | 2.688.764.781 | UPTB Wilayah. VIII Buol     |
| 32   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 405.176.268 | Target PKB dan BBN-KB | 286.863.000 | Target PKB dan BBN-KB | 281.225.795 | 70%    | 213.004.600 | 75%    | 228.064.025 | 80%    | 260.380.698 | 80%    | 1.674.714.386 |                             |
| 33   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -           | 75%                   | 59.542.100  | 80%                   | 49.329.654  | 75%    | 58.433.700  | 80%    | 62.564.963  | 85%    | 71.430.418  | 85%    | 301.300.834   |                             |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan          | Indikator Kinerja Program (outcomes)                         | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                       |                |                       |                |        |                |        |                |        |                |                       |                 | PD Penanggung Jawab      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|      |                                                                       |                                                              | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017            |                | Tahun 2018            |                | 2019   |                | 2020   |                | 2021   |                |                       |                 |                          |
|      |                                                                       |                                                              | Capaian                                               | Rp             | Capaian               | Rp             | Capaian               | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                | Rp              |                          |
| 34   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Adimistrasi Perkantoran                    | 60%                                                   | 323.522.700    | 70%                   | 266.062.098    | 75%                   | 268.161.749    | 75%    | 292.278.898    | 80%    | 312.943.016    | 85%    | 357.287.041    | Target PKB dan BBN-KB | 1.820.255.503   | UPTB Wilayah. IX Touna   |
| 35   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 486.146.000    | Target PKB dan BBN-KB | 316.867.600    | Target PKB dan BBN-KB | 302.384.475    | 70%    | 170.100.000    | 75%    | 182.126.070    | 80%    | 207.933.334    | 80%                   | 1.665.557.479   |                          |
| 36   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -              | 75%                   | 53.286.200     | 80%                   | 53.286.200     | 75%    | 53.286.200     | 80%    | 57.053.534     | 85%    | 65.138.020     | 85%                   | 282.050.154     |                          |
| 37   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Adimistrasi Perkantoran                    | 60%                                                   | 294.938.291    | 70%                   | 199.205.746    | 75%                   | 199.205.746    | 75%    | 241.205.746    | 80%    | 258.258.992    | 85%    | 294.854.291    | Target PKB dan BBN-KB | 1.487.668.813   | UPTB Wilayah. X Donggala |
| 38   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 409.633.000    | Target PKB dan BBN-KB | 213.941.000    | Target PKB dan BBN-KB | 213.305.000    | 70%    | 196.905.000    | 75%    | 210.826.184    | 80%    | 240.700.254    | 80%                   | 1.485.310.437   |                          |
| 39   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -              | 75%                   | 84.880.000     | 80%                   | 103.280.000    | 75%    | 93.280.000     | 80%    | 99.874.896     | 85%    | 114.027.169    | 85%                   | 495.342.065     |                          |
| 40   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Adimistrasi Perkantoran                    | 60%                                                   | 577.096.841    | 70%                   | 374.842.970    | 75%                   | 372.538.970    | 75%    | 364.938.970    | 80%    | 390.740.155    | 85%    | 446.108.035    | Target PKB dan BBN-KB | 2.526.265.941   | UPTB Wilayah. XI Sigi    |
| 41   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | - Optimalisasi penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat | Target PKB dan BBN-KB                                 | 444.995.000    | Target PKB dan BBN-KB | 267.590.000    | Target PKB dan BBN-KB | 196.490.000    | 70%    | 157.190.000    | 75%    | 168.303.333    | 80%    | 192.151.915    | 80%                   | 1.426.720.248   |                          |
| 42   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | - Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 65%                                                   | -              | 75%                   | 72.274.958     | 80%                   | 72.274.958     | 75%    | 72.274.958     | 80%    | 77.384.798     | 85%    | 88.350.223     | 85%                   | 382.559.895     |                          |
| 43   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | - Tingkat Layanan Adimistrasi Perkantoran                    | 60%                                                   | 556.229.010    | 70%                   | 375.175.000    | 75%                   | 367.975.000    | 75%    | 434.275.000    | 80%    | 464.978.243    | 85%    | 530.865.659    | Target PKB dan BBN-KB | 2.729.497.912   |                          |
|      | JUMLAH                                                                |                                                              |                                                       | 35.634.458.891 |                       | 24.132.000.000 |                       | 28.158.000.000 |        | 22.286.071.000 |        | 23.861.696.220 |        | 27.242.898.574 |                       | 161.315.124.685 |                          |

**Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021 dan Indikasi Perubahan Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                 | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                                              |        |                |        |               |        |               |      |               |      |               |      |                                          |      | PD Penanggung Jawab                                                 |                |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                              |                                                                      | Tahun 2016                                                                                                         |        | Tahun 2017     |        | Tahun 2018    |        | Tahun 2019    |      | Tahun 2020    |      | Tahun 2021    |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |      |                                                                     |                |
|      |                                                              |                                                                      | Capaian                                                                                                            | Rp     | Capaian        | Rp     | Capaian       | Rp     | Target        | Rp   | Target        | Rp   | Target        | Rp   | Target                                   | Rp   |                                                                     |                |
| 01   | PENUNJANG URUSAN                                             |                                                                      |                                                                                                                    |        |                |        |               |        |               |      |               |      |               |      |                                          |      | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah |                |
|      | BIDANG URUSAN : KEUANGAN                                     |                                                                      |                                                                                                                    |        |                |        |               |        |               |      |               |      |               |      |                                          |      |                                                                     |                |
|      | 1                                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                     | 95,89% | 2.851.877.766  | 96,48% | 1.871.146.300 | 91,98% | 2.423.155.520 | 100% | 2.672.755.360 | 100% | 2.861.719.164 | 100% | 3.267.224.769                            | 100% |                                                                     | 15.947.878.879 |
|      | 2                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                             | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur<br>- Tingkat Pemeliharaan sarana dan prasaran operasional SKPD (%) | 96,87% | 1.335.065.000  | 92,26% | 1.373.899.500 | 81,18% | 6.443.797.500 | 60%  | 3.665.107.850 | 80%  | 3.924.230.975 | 100% | 4.480.294.504                            | 100% |                                                                     | 21.222.395.329 |
|      | 3                                                            | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                         | -      |                | 99,76% | 77.000.000    | 95,29% |               | 60%  | 187.500.000   | 80%  | 200.756.250   | 100% | 229.203.411                              | 100% |                                                                     | 694.459.661    |
|      | 4                                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                         | 76,35% | 1.120.969.600  | 90,55% | 521.650.000   | 71,04% | 442.967.400   | 60%  | 250.000.000   | 80%  | 267.675.000   | 100% | 305.604.548                              | 100% |                                                                     | 2.908.866.548  |
|      | 5                                                            | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                             | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                                                      | 96,71% | 1.804.266.030  | 96,98% | 1.165.070.150 | 98,40% | 994.739.400   | 4    | 1.043.456.640 | 4    | 1.117.229.024 | 4    | 1.275.540.377                            | 20   |                                                                     | 7.400.301.622  |
|      | 6                                                            | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset           | - Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset                                                    |        |                | 86,18% | 155.000.000   | 83,28% | 121.438.000   | 100% | 60.346.800    | 100% | 64.613.319    | 100% | 73.769.026                               | 100% |                                                                     | 475.167.145    |
|      | 8                                                            | Program Manajemen Kepegawaian dan Umum dan Humas                     | - Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum (%)                                                                  |        |                | 95,27% | 185.248.030   | 96,02% | 176.809.500   | 70%  | 103.000.000   | 75%  | 110.282.100   | 80%  | 125.909.074                              | 80%  |                                                                     | 701.248.704    |
|      | 9                                                            | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah     | - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                | 94,38% | 11.965.768.248 |        |               |        |               |      |               |      |               |      |                                          |      |                                                                     | 11.965.768.248 |
|      | 10                                                           | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab./Kota                                                             | 97,64% | 1.748.907.800  |        |               |        |               |      |               |      |               |      |                                          |      |                                                                     | 1.748.907.800  |
|      | 11                                                           | Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran daerah                 | - Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran daerah                                                                |        |                | 95,58% | 2.796.912.025 | 88,57% | 3.356.549.406 | WTP  | 3.592.456.550 | WTP  | 3.846.443.228 | 100% | 4.391.484.234                            | WTP  |                                                                     | 17.983.845.443 |
|      | 12                                                           | Program Peningkatan dan Pengembangan Perbendaharaan Daerah           | - Meningkatnya kualitas pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung                                    |        |                | 98,57% | 2.199.761.937 | 98,85% | 1.478.583.377 | WTP  | 1.797.700.000 | WTP  | 1.924.797.390 | 100% | 2.197.541.180                            | WTP  |                                                                     | 9.598.383.884  |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                           | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                          |                 | PD Penanggung Jawab |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|      |                                                                |                                                                                | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |                     |
|      |                                                                |                                                                                | Capaian                                               | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |                     |
| 13   | Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi Keuangan Daerah | - Meningkatnya kualitas penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah (%) |                                                       |                | 94,97%     | 3.528.196.780  | 94,91%     | 2.680.311.720  | WTP        | 1.849.300.000  | WTP        | 1.980.045.510  | 100%       | 2.260.617.959  | 100%                                     | 12.298.471.969  |                     |
| 14   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah   | - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah                                |                                                       |                | 92,08%     | 3.640.967.860  | 97,36%     | 2.254.283.300  | WTP        | 1.349.788.800  | WTP        | 1.445.218.868  | 100%       | 1.650.006.382  | 100%                                     | 10.340.265.210  |                     |
| 15   | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                    | - Laporan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                  | 93,66%                                                | 457.336.000    | 98,13%     | 470.147.400    | 94,44%     | 579.200.000    | 100%       | 224.064.000    | 100,00%    | 239.905.325    | 100%       | 273.899.909    | 100%                                     | 2.244.552.634   |                     |
|      | JUMLAH                                                         |                                                                                |                                                       | 21.284.190.444 |            | 17.984.999.982 |            | 20.951.835.123 |            | 16.795.476.000 |            | 17.982.916.153 |            | 20.531.095.372 |                                          | 115.530.513.074 |                     |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                 | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                  |            |               |            |               |            |                |            |                | PD Penangung Jawab                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                      | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |                  | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                |                                                         |
|      |                                                              |                                                                                      | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp               | Capaian    | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             |                                                         |
|      | URUSAN WAJIB<br>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |                                                                                      |                                                       |    |            |                  |            |               |            |               |            |                |            |                |                                                         |
| 1    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                       | -                                                     | -  | 20%        | Rp 1.559.768.500 | 40%        | 1.471.272.300 | 60%        | 1.383.252.910 | 80%        | 2.189.876.526  | 100%       | 2.386.965.414  |                                                         |
| 2    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                      | -                                                     | -  | 20%        | 1.005.595.600    | 40%        | 1.981.672.000 | 60%        | 2.118.018.000 | 80%        | 1.541.735.969  | 100%       | 1.850.083.163  |                                                         |
| 3    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya           | -                                                     | -  | 20%        | 77.722.000       | 40%        | 98.760.000    | 60%        | 80.400.000    | 80%        | 448.792.300    | 100%       | 489.183.607    |                                                         |
| 4    | Peningkatan Kualitas Perencanaan                             | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                        | -                                                     | -  | 6 Dok      | 507.890.000      | 5 Dok      | 248.022.400   | 5 Dok      | 200.840.000   | 5 Dok      | 556.862.470    | 6 Dok      | 606.980.092    |                                                         |
| 5    | Program Penataan Kepegawaian                                 | - Meningkatnya kualitas penataan formasi, informasi dan administrasi kepegawaian     | -                                                     | -  | 9 Laporan  | 2.148.349.700    | 16Laporan  | 1.614.443.000 | 9 Laporan  | 1.306.962.000 | 9 Laporan  | 3.594.098.646  | 9 Laporan  | 3.917.567.524  | Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian |
| 6    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                          | - Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur                                   | -                                                     | -  | 34%        | 2.477.927.000    | 51%        | 1.528.000.000 | 60%        | 1.273.717.000 | 80%        | 5.481.156.685  | 100%       | 5.974.460.787  | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai               |
| 7    | Pelayanan Mutasi Kepegawaian                                 | - Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran | -                                                     | -  | 26%        | 492.668.200      | 41%        | 446.251.800   | 60%        | 296.350.000   | 80%        | 1.693.897.932  | 100%       | 1.846.348.746  | Bidang Mutasi                                           |
|      | UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI                             |                                                                                      |                                                       |    |            |                  |            |               |            |               |            |                |            |                |                                                         |
| 1    | Pelayanran Administrasi Perkantoran                          | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                       | -                                                     | -  | 20%        | 147.333.000      | 40%        | 50.000.000    | 60%        | 45.000.000    | 80%        | 194.254.350    | 100%       | 211.737.242    | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai                        |
| 2    | Program Penilaian Komtepensi Aparatur                        | - Terpenuhihnya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi                             | -                                                     | -  | 22%        | 967.746.000      | 45%        | 502.295.000   | 60%        | 247.205.000   | 80%        | 1.552.871.864  | 100%       | 1.692.630.332  |                                                         |
|      | JUMLAH                                                       |                                                                                      |                                                       |    |            | 9.385.000.000    |            | 7.940.716.500 |            | 6.951.744.910 |            | 17.253.546.742 |            | 18.975.956.906 |                                                         |

| Kode |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                      | Capaian Kinerja Program dan Anggaran |               |            |               |            |                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | Bidang Penanggung Jawab                                   |
|------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|      |   |                                                              |                                                                                           | Tahun 2016                           |               | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |                | Tahun 2019                                    |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                |                                                           |
|      |   |                                                              |                                                                                           | Capaian                              | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp             | Target                                        | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp             |                                                           |
| 01   |   |                                                              |                                                                                           |                                      |               |            |               |            |                |                                               |               |            |               |            |               |                                          |                |                                                           |
|      | 1 | Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan   | - Meningkatnya Mutu layanan Diklat Aparatur                                               | 6414                                 | 1.223.990.000 | 12414      | 475.941.000   | 12414      | 664.227.400    | 12414                                         | 435.904.812   | 10%        | 1.200.000.000 | 10%        | 1.350.000.000 | 20%                                      | 4.126.073.212  | Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan            |
|      |   |                                                              | Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara n Pemerintahan Bagi ASN di Provinsi Sulawesi Tengah | -                                    |               | -          |               | -          | -              | -                                             | -             | 4%         | 600.000.000   | 5%         | 750.000.000   | 9%                                       | 1.350.000.000  | Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan            |
|      | 2 | Program Pengembangan Kompeten Teknis                         | - Meningkatnya Kompetensi Teknis Aparatur Daerah                                          | 790                                  | 1.944.189.050 | 360        | 2.093.705.296 | 183        | 900.000.000    | 213                                           | 900.000.000   | 450        | 2.025.000.000 | 540        | 2.632.500.000 | 2176                                     | 8.551.205.296  | Bidang Pengembangana Kompetensi Teknis                    |
|      | 3 | Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional    | - Meningkatnya Kompetensi Manajerial Aparatur Daerah                                      | 790                                  | 6.699.402.900 | 480        | 5.683.911.125 | 1315       | 12.115.478.000 | 400                                           | 6.540.730.000 | 200        | 4.200.000.000 | 200        | 4.200.000.000 | 2.905                                    | 32.740.119.125 | Bidang Pengembangana Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
|      |   |                                                              | Meningkatnya Kompetensi Jabatan Fungsional Daerah                                         | 0                                    |               | 0          |               | 0%         |                | 0%                                            |               | 90         | 747.000.000   | 120        | 996.000.000   | 210                                      | 1.743.000.000  | Bidang Pengembangana Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
|      | 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                            | 100%                                 | 1.593.543.815 | 20%        | 1.190.133.148 | 40         | 1.577.334.100  | 60                                            | 1.521.222.910 | 80         | 3.733.395.154 | 100        | 4.298.574.497 | 100                                      | 12.320.659.809 | Sekretariat                                               |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                 | Capaian Kinerja Program dan Anggaran                                       |      |                |       |                |       | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |                |       |                |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |        | Bidang Penanggung Jawab |             |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|
|      |                                                              |                                                                      | Tahun 2016                                                                 |      | Tahun 2017     |       | Tahun 2018     |       | Tahun 2019                                    |       | Tahun 2020     |       | Tahun 2021     |       |                                          |        |                         |             |
|      |                                                              |                                                                      | Capaian                                                                    | Rp   | Capaian        | Rp    | Capaian        | Rp    | Target                                        | Rp    | Target         | Rp    | Target         | Rp    | Target                                   | Rp     |                         |             |
|      | 5                                                            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 100% | 3.607.600.000  | 20%   | 4.253.153.831  | 40%   | 15.150.928.280                                | 60    | 20.096.802.135 | 80    | 3.414.588.587  | 100   | 3.406.597.125                            | 100    | 46.322.069.959          | Sekretariat |
|      | 6                                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 30%  | 49.750.000     | 40%   | 77.450.000     | 50%   | 450.000.000                                   | 70%   | 444.600.000    | 80%   | 127.965.797    | 85%   | 135.804.970,7                            | 85     | 1.235.820.768           | Sekretariat |
|      | 7                                                            | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan             | 100% | 869.484.650    | 6 Dok | 991.985.600    | 6 Dok | 509.986.220                                   | 5 Dok | 800.000.000    | 5 Dok | 1.512.281.354  | 5 Dok | 1.741.217.790                            | 26 Dok | 6.909.842.738           | Sekretariat |
|      |                                                              |                                                                      |                                                                            |      | 15.987.960.415 |       | 14.766.280.000 |       | 31.367.954.000                                |       | 30.739.259.857 |       | 16.213.230.892 |       | 17.764.694.383                           |        | 112.205.790.906         |             |



Tabel. Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID)

| KODE              |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)                                                                             | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |                | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR |                | PENANGGUNG JAWAB                |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
|                   |    |                                                                                   |                                                                                                                  | TAHUN 2016                                     |               | TAHUN 2017 |               | TAHUN 2018 |                | TAHUN 2019                                    |               | TAHUN 2020 |               | TAHUN 2021 |               | PERIODE RPJMD              |                |                                 |
|                   |    |                                                                                   |                                                                                                                  | CAPAIAN                                        | RP.           | CAPAIAN    | RP.           | CAPAIAN    | RP.            | TARGET                                        | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET                     | RP.            |                                 |
|                   |    |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                |               |            |               |            |                |                                               |               |            |               |            |               |                            |                |                                 |
| SESUDAH PERUBAHAN |    |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                |               |            |               |            |                |                                               |               |            |               |            |               |                            |                |                                 |
| 4,07              | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                                         | 1 Laporan                                      | 923.732.412   | 20%        | 994.953.525   | 40%        | 1.139.302.100  | 60%                                           | 1.294.896.200 | 80%        | 1.061.852.455 | 100%       | 1.102.011.239 | 100%                       | 6.516.747.931  | Sekretariat                     |
| 4,07              | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                 | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                    | 2 Paket                                        | 1.408.112.676 | 20%        | 2.270.417.698 | 40%        | 8.432.171.599  | 60%                                           | 2.226.602.580 | 80%        | 613.274.300   | 100%       | 802.953.289   | 100%                       | 15.753.532.141 | Sekretariat                     |
| 4,07              | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                             | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                         |                                                |               | 20%        | 154.238.000   | 40%        | 216.493.002    | 60%                                           | 267.370.000   | 80%        | 153.318.575   | 100%       | 200.738.322   | 100%                       | 992.157.899    | Sekretariat                     |
| 4,07              | 04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                 | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                         | 8 Orang                                        | 80.566.304    | 20%        | 166.200.000   | 40%        | 12.150.000     | 60%                                           | 139.363.800   | 80%        | 229.977.862   | 100%       | 256.945.052   | 100%                       | 885.203.019    | Sekretariat                     |
| 4,07              | 05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                                     | 25 Laporan                                     | 104.728.000   | 100%       | 97.101.000    | 100%       | 85.419.000     | 100%                                          | 241.957.105   | 100%       | 398.628.295   | 100%       | 394.149.696   | 100%                       | 1.321.983.095  | Sekretariat                     |
| 4,07              | 06 | Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang                        | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Litbang                                                                        | 3 Laporan/ 1 Dokument                          | 1.103.753.600 | 5 Dokumen  | 1.503.282.225 | 5 Dokumen  | 1.586.874.199  | 5 Dokumen                                     | 1.960.008.024 | 5 Dokumen  | 1.172.887.098 | 5 Dokumen  | 1.605.906.577 | 30 Dokumen                 | 8.932.711.723  | Sekretariat                     |
| 4,07              | 07 | Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan                          | Hasil Kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh OPD                                             | 4 Laporan                                      | 667.015.100   | 3 Dokumen  | 782.500.000   | 6 Dokumen  | 563.768.000    | 3 OPD                                         | 493.658.260   | 3 OPD      | 919.911.449   | 3 OPD      | 995.662.078   | 3 OPD                      | 4.422.514.887  | Bidang Sosial dan Kependudukan  |
| 4,07              | 08 | Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan            | Hasil Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh OPD                               |                                                |               | 3 Dokumen  | 612.250.000   | 6 Dokumen  | 824.320.000    | 3 OPD                                         | 668.842.221   | 3 OPD      | 919.911.449   | 3 OPD      | 995.662.078   | 3 OPD                      | 4.020.985.748  | Bidang Pengkajian dan Peraturan |
| 4,07              | 09 | Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDA); | Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/ Kota yang dimiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Prov. Sulteng | 6 Laporan                                      | 1.185.911.200 | 3 Dokumen  | 1.011.473.552 | 6 Dokumen  | 710.432.000    | 3 OPD                                         | 510.295.552   | 3 OPD      | 919.911.449   | 3 OPD      | 995.662.078   | 3 OPD                      | 5.333.685.831  | Bidang Inovasi dan Teknologi    |
| 4,07              | 10 | Program Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan                          | Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh OPD                                            | 3 Laporan                                      | 462.760.100   | 3 Dokument | 600.000.000   | 6 Dokumen  | 537.660.000    | 3 OPD                                         | 506.660.000   | 3 OPD      | 919.911.449   | 3 OPD      | 995.662.078   | 3 OPD                      | 4.022.653.627  | Bidang Ekonomi dan              |
|                   |    |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                | 5.936.579.392 |            | 8.192.416.000 |            | 14.108.589.900 |                                               | 8.309.653.742 |            | 7.309.584.381 |            | 8.345.352.488 |                            | 52.202.175.903 |                                 |

| Kode  | Fungsi/Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Sub Pemerintahan/Sub-Urusan/<br>Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja/Outcome                                                | Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun Ke-0 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |              |                  |              |                  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |              |                  |                                          |                 |                           |  | OPD Penanggung Jawab |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------|
|       |                                                                                                                         |                                                                          |                                       | Tahun 2017                                     |                  | Tahun 2018   |                  | Tahun 2019   |                  | Tahun 2020                                    |                  | Tahun 2021   |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |                           |  |                      |
|       |                                                                                                                         |                                                                          |                                       | %                                              | Rp               | %            | Rp               | %            | Rp               | %                                             | Rp               | %            | Rp               | Target                                   | Rp              |                           |  |                      |
| (1)   | (2)                                                                                                                     | (3)                                                                      | (4)                                   | (5)                                            | (6)              | (7)          | (8)              | (9)          | (10)             | (11)                                          | (12)             | (13)         | (14)             | (15)                                     | (16)            | (17)                      |  |                      |
|       | PENUNJANG URUSAN<br>BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, BIRO ADMINISTRASI DAN PERANGKAT SEKRETARIAT DPRD |                                                                          |                                       |                                                |                  |              |                  |              |                  |                                               |                  |              |                  |                                          |                 | Sekretariat DPRD          |  |                      |
| 1     | Program Pelayanan Adm.Perkantoran                                                                                       | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 100%                                  | 20%                                            | 8.593.022.587    | 40%          | 9.366.394.620    | 60%          | 10.209.370.135   | 80%                                           | 11.128.213.448   | 100%         | 12.129.759.158   | 100%                                     | 51.426.759.947  | Sekretariat               |  |                      |
| 2     | Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur:                                                                      | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 100%                                  | 20%                                            | 5.436.672.179,78 | 40%          | 5.925.972.675,97 | 60%          | 6.459.310.216,57 | 80%                                           | 7.040.648.136,55 | 100%         | 5.012.840.011,15 | 100%                                     | 29.875.443.220  | Sekretariat               |  |                      |
| 3     | Program Peningkatan Disiplin Aparat :                                                                                   | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                 | 100%                                  | 20%                                            | 639.467.561      | 40%          | 697.019.641      | 60%          | 759.751.409      | 80%                                           | 828.129.036      | 100%         | 702.838.450      | 100%                                     | 3.627.206.096   | Sekretariat               |  |                      |
| 4     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :                                                                    | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                                  | 20%                                            | 1.500.663.990    | 40%          | 1.635.723.749    | 60%          | 1.782.938.887    | 80%                                           | 1.943.403.387    | 100%         | 2.102.583.391    | 100%                                     | 8.965.313.404   | Sekretariat               |  |                      |
| 5     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                          | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan             | 100%                                  | 100%                                           | 3.927.191.263    | 100%         | 4.280.638.477    | 100%         | 4.665.895.940    | 100%                                          | 5.085.826.574    | 100%         | 5.053.550.366    | 100%                                     | 23.013.102.619  | Sekretariat               |  |                      |
| 6     | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                                          | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                  | 50 Keputusan                          | 50 Keputusan                                   | 29.082.283.736   | 50 Keputusan | 31.699.689.272   | 50 Keputusan | 34.552.661.307   | 50 Keputusan                                  | 37.662.400.824   | 50 Keputusan | 40.011.375.905   | 300 Keputusan                            | 173.008.411.044 | Sekretariat               |  |                      |
| 7     | Program Penataan Peraturan Perundang Undangan                                                                           | termanfaatkannya Raperda Inisiatif yang di hasilkan dan dipublikasikan   | 3 Raperda                             | 3 Raperda                                      | 4.337.486.677    | 3 Raperda    | 4.727.860.478    | 3 Raperda    | 5.153.367.921    | 3 Raperda                                     | 5.617.171.034    | 3 Raperda    | 6.002.986.329    | 18 Perda                                 | 25.838.872.439  | Bidang Perundang-Undangan |  |                      |
| TOTAL |                                                                                                                         |                                                                          |                                       |                                                | 53.516.787.993   |              | 58.333.298.913   |              | 63.583.295.815   |                                               | 69.305.792.438   |              | 71.015.933.610   |                                          | 315.755.108.770 |                           |  |                      |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah : Biro Otonomi Daerah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |                |            |               |            |               | PD Penangung Jawab                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                                                           | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                                            |
|      |                                                                                |                                                                                           | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp            | Target     | Rp            |                                                            |
| 01   | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                                |                                                                                           |                                                       |               |            |               |            |               |            |                |            |               |            |               |                                                            |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                            | 96,79%                                                | 354.847.400   | 100%       | 493.301.350   | 100%       | 603.301.350   | 100%       | 619.644.370,70 | 100%       | 681.608.809   | 100%       | 739.769.690   | Sekretariat                                                |
| 2    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                |                                                       |               | 20%        | 306.020.000   | 40%        | 281.020.000   | 60%        | 1.656.518.080  | 80%        | 1.437.169.888 | 100%       | 1.515.886.877 | Sekretariat                                                |
| 3    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                            | 15 Dokumen                                            | 565.432.600   | 6 Dokumen  | 805.838.650   | 6 Dokumen  | 720.838.650   | 6 Dokumen  | 1.473.000.000  | 6 Dokumen  | 1.930.300.000 | 6 Dokumen  | 2.113.330.000 | Sekretariat                                                |
| 4    | Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah     | - Prosentase pelaksanaan rapat dan koordinasi                                             | 92,53%                                                | 1.209.871.200 | 20%        | 425.000.000   | 40%        | 275.000.000   | 60%        | 947.000.000    | 100%       | 1.031.700.000 | 100%       | 1.124.870.000 | Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga |
| 5    | Program Fasilitasi Pertimbangan Daerah Otonomi Baru                            | - Prosentase Fasilitasi Pertimbangan Daerah Otda                                          |                                                       |               | 100%       | 535.000.000   | 100%       | 535.000.000   | 100%       | 886.500.000    | 100%       | 965.150.000   | 100%       | 1.051.665.000 | Bagaian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otda              |
| 6    | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD                                     | - Prosentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar lembaga eksekutif dan legislatif | 87,03%                                                | 245.937.964   | 65%        | 384.840.000   | 70%        | 384.840.000   | 80%        | 880.866.870    | 90%        | 961.583.263   | 100%       | 1.053.407.970 | Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga |
| 7    | Program Penataan Daerah Otonom Baru                                            | - Prosentase penataan daerah otonom baru/Daerah Persiapan                                 | 97,65%                                                | 250.757.000   | 75%        | 400.000.000   | 80%        | 400.000.000   | 85%        | 1.200.000.000  | 90%        | 1.310.000.000 | 100%       | 1.431.000.000 | Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otda               |
|      | JUMLAH                                                                         |                                                                                           |                                                       | 2.626.846.164 |            | 3.350.000.000 |            | 3.200.000.000 |            | 7.663.529.321  |            | 8.317.511.960 |            | 9.029.929.536 |                                                            |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: BIRO ADMINISTRASI WILAYAH DAERAH DAN PEMERINTAH

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                        | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |             |            |             |            |                |            |             |            |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | PD Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|
|      |  |                                                                                           |                                                                             | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |             | Tahun 2018 |             | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |             | Tahun 2021 |             |                                          |               |                     |
|      |  |                                                                                           |                                                                             | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp          | Capaian    | Rp          | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp          | Capaian    | Rp          | Capaian                                  | Rp            |                     |
| 1    |  | URUSAN WAJIB                                                                              |                                                                             |                                                       |               |            |             |            |             |            |                |            |             |            |             |                                          |               |                     |
|      |  | BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, BIRO ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DAERAH |                                                                             |                                                       |               |            |             |            |             |            |                |            |             |            |             |                                          |               |                     |
|      |  | BIRO BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN                                                        |                                                                             |                                                       |               |            |             |            |             |            |                |            |             |            |             |                                          |               |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                | 90%                                                   | 1.018.970.000 | 20%        | 666.964.000 | 40%        | 678.213.135 | 1 Dokumen  | 681.611.144,00 | 80%        | 673.998.882 | 100%       | 768.084.052 | 100%                                     | 2.123.694.078 |                     |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                               | -                                                     | -             | 20%        | 213.750.000 | 40%        | 369.995.865 | 1 Dokumen  | 315.640.506,00 | 80%        | 187.000.614 | 100%       | 213.104.501 | 100%                                     | 715.745.621   |                     |
|      |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                        | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya    | -                                                     | -             | 3 Orang    | 35.000.000  | 2 Orang    | 30.762.000  | 1 Dokumen  | 30.700.000,00  | 3 Orang    | 58.053.161  | 3 Orang    | 66.156.946  | 15 Orang                                 | 154.910.106   |                     |
|      |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan                    | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                | -                                                     | -             | 4 Dokumen  | 51.468.800  | 4 Dokumen  | 34.050.000  | 1 Dokumen  | 27.670.000,00  | 100%       | 67.152.639  | 100%       | 84.416.677  | 100%                                     | 179.239.316   |                     |
|      |  | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                  | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                 | -                                                     | -             | 4 Dokumen  | 200.000.000 | 4 Dokumen  | 115.615.230 | 1 Dokumen  | 235.142.830,00 | 100%       | 158.872.150 | 100%       | 181.049.523 | 100%                                     | 575.064.503   |                     |
|      |  | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                 | Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat terlaksana dengan baik | -                                                     | -             | 1 Dokumen  | 410.000.000 | 1 Dokumen  | 396.105.500 | 1 Dokumen  | 377.355.500,00 | 1 Dokumen  | 340.313.326 | 1 Dokumen  | 388.528.932 | 5 Dokumen                                | 1.106.197.757 |                     |
|      |  | Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan                                | Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan             | -                                                     | -             | 2 Dokumen  | 417.200.000 | 2 Dokumen  | 380.230.400 | 1 Dokumen  | 353.325.400,00 | 2 Dokumen  | 338.385.283 | 2 Dokumen  | 384.125.244 | 10 Dokumen                               | 1.075.835.927 |                     |
|      |  | Program Fasilitas Administrasi Pengembangan Kawasan                                       | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pengembangan Kawasan                  | -                                                     | -             | 1 Dokumen  | 185.336.000 | 1 Dokumen  | 132.353.175 | 1 Dokumen  | 113.353.175,00 | 1 Dokumen  | 155.419.782 | 1 Dokumen  | 177.115.201 | 5 Dokumen                                | 445.888.158   |                     |
|      |  | Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Kewilayahan                                   | Meningkatnya penataan Administrasi Kewilayahan                              | -                                                     | -             | 3 Dokumen  | 620.000.000 | 3 Dokumen  | 465.716.000 | 3 Dokumen  | 465.716.000,00 | 3 Dokumen  | 697.384.434 | 3 Dokumen  | 794.734.082 | 15 Dokumen                               | 1.957.834.515 |                     |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                             | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |                |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penangung Jawab |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|
|      |                                                                                     |                                                                                                                  | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                |                    |
|      |                                                                                     |                                                                                                                  | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian                                  | Rp             |                    |
| 10   | Program Pembinaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama        | Meningkatnya Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan serta Administrasi Kerjasama | 90%                                                   | 232.685.400   | 3 Dokumen  | 609.450.000   | 3 Dokumen  | 557.862.525   | 3 Dokumen  | 547.862.525,00 | 3 Dokumen  | 694.387.070   | 3 Dokumen  | 791.318.255   | 15 Dokumen                               | 2.033.567.850  |                    |
|      | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                                 | Terlaksananya Pembinaan Penyelenggraan Pemerintahan Umum                                                         | 95%                                                   | 1.009.687.200 | -          | -             | -          | -             | -          | -              | -          | -             | -          | -             | -                                        | -              | -                  |
|      | Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                     | Meningkatnya pelaksanaan Pendaftaran Penduduk                                                                    | 95%                                                   | 862.485.800   | -          | -             | -          | -             | -          | -              | -          | -             | -          | -             | -                                        | -              | -                  |
|      | Program Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                   | Tersusunya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                                     | 90%                                                   | 209.886.400   | -          | -             | -          | -             | -          | -              | -          | -             | -          | -             | -                                        | -              | -                  |
|      | Program Perencanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Dan Pemberdayan Penyelenggaran Pemerintahan                  | 90%                                                   | 769.614.797   | -          | -             | -          | -             | -          | -              | -          | -             | -          | -             | -                                        | -              | -                  |
|      | JUMLAH                                                                              |                                                                                                                  |                                                       | 4.103.329.597 |            | 3.409.168.800 |            | 3.160.903.830 |            | 3.148.377.080  |            | 3.370.967.340 |            | 3.848.633.412 |                                          | 10.367.977.832 |                    |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah: Biro ADM. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Setda Prov. Sulteng

| Kode    |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                            | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                               |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      | PD Penangung Jawab |                                                                       |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |    |                                                                                                                                             |                                                                                     | Tahun 2016                                            |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 | Tahun 2017                                                                          |                   | Tahun 2018        |                   | Tahun 2019        |      | Tahun 2020        |      | Tahun 2021        |      |                    |                                                                       |
|         |    |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                       |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         |    |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                       |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
| Capaian | Rp | Capaian                                                                                                                                     | Rp                                                                                  | Capaian                                               | Rp               | Target                                                                                                                                      | Rp.                                                                             | Target                                                                              | Rp.               | Target            | Rp.               |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         |    |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                       |                  |                                                                                                                                             | Sesudah Perubahan                                                               |                                                                                     | Sesudah Perubahan |                   | Sesudah Perubahan |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
| 01      |    | URUSAN WAJIB<br>Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |                                                                                     |                                                       |                  | URUSAN WAJIB<br>Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                  | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                        | 75%                                                   | 1.538.134.200,00 | 1                                                                                                                                           | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                        | 20%               | 1.077.638.200,00  | 40%               | 1.114.278.018,00  | 60%  | 1.476.636.386,00  | 80%  | 1.624.300.000,00  | 100% | 1.786.730.000,00   |                                                                       |
|         | 2  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                          | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya            | 75%                                                   | 42.557.200,00    | 2                                                                                                                                           | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya            | 100%              | 10.529.700,00     | 100%              | 42.704.900,00     | 100% | 23.000.000,00     | 100% | 25.300.000,00     | 100% | 27.830.000,00      |                                                                       |
|         | 3  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                              | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                        | 75%                                                   | 11.157.000,00    | 3                                                                                                                                           | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                        | 100%              | 16.350.000,00     | 100%              | 14.950.000,00     | 100% | 20.000.000,00     | 100% | 22.000.000,00     | 100% | 24.200.000,00      | Biro ADM. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Setda Prov. Sulteng |
|         | 4  | Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama                                                                                               | Meningkatnya kerukunan dan pelayanan hidup beragama                                 | 70%                                                   | 5.239.910.488,00 | 4                                                                                                                                           | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                        | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                         | 100%              | 650.251.500,00    | 100%              | 790.361.700,00    | 100% | 490.260.000,00    | 100% | 539.286.000,00    | 100% | 593.214.600,00     |                                                                       |
|         | 5  | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pelayananan Administrasi Umum Bagian Sarana dan Prasarana                                        | Meningkatnya pelayanan Adm. umum Bag. Sarana dan prasarana                          | 50%                                                   | 126.535.000,00   | 5                                                                                                                                           | Program Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan                         | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat (%) | 75%               | 16.997.497.200,00 | 80%               | 21.573.555.110,00 | 85%  | 15.080.692.614,00 | 90%  | 16.588.761.875,00 | 95%  | 18.247.638.000,00  |                                                                       |
|         | 6  | Program Pemberdayaan Kesramas                                                                                                               | Meningkatnya pemberdayaan kesramas, Meningkatkan pelayanan adm. umum kesramas       | 70%                                                   | 32.194.000,00    | 6                                                                                                                                           | Program Koordinasi Pembinaan & Pengendalian Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan | Meningkatnya pembinaan dan pengendalian kesejahteraan sosial kemasyarakatan         | 72%               | 850.872.900,00    | 78%               | 1.038.709.467,00  | 83%  | 356.513.000,00    | 89%  | 392.164.300       | 94%  | 431.380.730,00     |                                                                       |
|         | 7  | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Bagian Kesra                                                                                | Meningkatnya pelayanan adm. umum kesramas                                           | 65%                                                   | 573.583.900,00   |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 8  | Program Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat                                                                                       | Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kesramas                                    | 70%                                                   | 590.297.952,00   |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 9  | Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Administrasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan                                                          | Meningkatnya pelayanan di bidang bantuan sosial kemasyarakatan                      | 70%                                                   | 326.624.500,00   |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 10 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Bidang Bina Partisipasi Sosial Kemasyarakatan                                                    | Meningkatnya pelayanan Adm. Bidang Bina Partisipasi Sosial kemasyarakatan           | 70%                                                   | 442.854.100,00   |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 11 | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                                                                    | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                         |                                                       |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 12 | Program Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan                                                                                     | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat (%) |                                                       |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         | 13 | Program Koordinasi Pembinaan & Pengendalian Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan                                                             | Meningkatnya pembinaan dan pengendalian kesejahteraan sosial kemasyarakatan         |                                                       |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |      |                   |      |                   |      |                    |                                                                       |
|         |    | JUMLAH                                                                                                                                      |                                                                                     | 8.923.848.340,00                                      |                  |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                     |                   | 19.603.139.500,00 |                   | 24.574.559.195,00 |      | 17.447.102.000,00 |      | 19.191.812.175,00 |      | 21.110.993.330,00  |                                                                       |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |    |            |    |               |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                  | PD Penangung Jawab      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|      |                                                                                |                                                                           | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |    | Tahun 2019    |               | Tahun 2020    |               | Tahun 2021    |               |                                          |                  |                         |
|      |                                                                                |                                                                           | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp | Target        | Rp            | Target        | Rp            | Target        | Rp            | Target                                   | Rp               |                         |
| 01   | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                                |                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    |               |               |               |               |               |               |                                          |                  |                         |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                              | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 60%           | 1.197.720.000 | 80%           | 1.282.398.804 | 100%          | 1.464.114.715 |                                          | 3.944.233.518,53 | Bidang Sumber Daya Alam |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah                   | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                             | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 60%           | 1.139.402.754 | 80%           | 1.219.958.529 | 100%          | 1.392.826.652 |                                          | 3.752.187.934,93 | Bidang Sumber Daya Alam |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase Sumberdaya aparatur yang memiliki kompetenso sesuai bidangnya. | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 60%           | 28.900.000    | 80%           | 30.943.230    | 100%          | 35.327.886    |                                          | 95.171.115,69    | Bidang Sumber Daya Alam |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan              | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 100%          | 723.380.000   | 100%          | 774.522.966   | 100%          | 884.272.870   | 100%                                     | 2.382.175.836,28 | Bidang Pembangunan      |
|      | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan              | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan                           | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 1 dokumen     | 100.000.000   | 1 dokumen     | 107.070.000   | 1 dokumen     | 122.241.819   | 3 Dokumen                                | 329.311.819,00   | Bidang Pembangunan      |
|      | Program Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan             | Meningkatnya kualitas pembinaan, pemantauan dan Pelaporan                 | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 3 dok/lap     | 773.762.739   | 3 dok/lap     | 828.467.765   | 3 dok/lap     | 945.861.647   | 9 dokumen                                | 2.548.092.150,55 | Bidang Pembangunan      |
|      | Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam        | Meningkatnya dokumen Pemanfaatan Potensi SDA se-Sulteng                   | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 1 dok/lap     | 667.950.000   | 1 dok/lap     | 715.174.065   | 1 dok/lap     | 816.514.230   | 3 Dokumen                                | 2.199.638.295,01 | Bidang Sumber Daya Alam |
|      | Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi                           | Persentase Peningkatan Promosi dan Kerja Sama                             | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 5 dok/lap     | 677.507.000   | 5 dok/lap     | 725.406.745   | 5 dok/lap     | 828.196.881   | 15 Dokumen                               | 2.231.110.625,55 | Bidang Ekonomi          |
|      | Program Pengembangan Sistem Pendukung Dunia Usaha UMKM dan Industri.           | Laporan persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi                          | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 3 dok/lap     | 545.379.000   | 3 dok/lap     | 583.937.295   | 3 dok/lap     | 666.681.210   | 9 dokumen                                | 1.795.997.505,34 | Bidang Ekonomi          |
|      | Program Pengembangan Data dan Informasi                                        | Pertumbuhan ekonomi meningkat                                             | -                                                     | -  | -          | -  | -          | -  | 1 Lap         | 202.054.000   | 1 Lap         | 216.339.218   | 1 Lap         | 246.994.485   | 3 Laporan                                | 665.387.702,76   | Bidang Ekonomi          |
|      | JUMLAH                                                                         |                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 6.056.055.493 |               | 6.484.218.616 |               | 7.403.032.394 |               | 19.943.306.504                           |                  |                         |

Perangkat Daerah: BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG

| Kode |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | PD Penangung Jawab      |
|------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|      |   |                                                                        |                                                                          | Tahun 2016                                    |             | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |               |                         |
|      |   |                                                                        |                                                                          | Target                                        | Rp          | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |                         |
| 01   |   | Bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan  |                                                                          |                                               |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                                          |               |                         |
|      | 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                 | 75%                                           | 868.944.985 | 20%        | 1.704.523.645 | 40%        | 2.115.355.099 | 60%        | 2.202.244.728 | 80%        | 2.352.484.868 | 100%       | 2.442.302.928 | 100%                                     | 7.147.272.664 | Bagian Anforjab         |
|      | 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 80%                                           | 152.274.747 | 20%        | 300.962.844   | 40%        | 414.427.044   | 60%        | 476.806.781   | 80%        | 559.349.250   | 100%       | 629.981.649   | 100%                                     | 1.666.137.680 | Bagian Anforjab         |
|      | 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase peningkatan displin aparatur                                  | 100%                                          | 65.766.319  | 100%       | 26.344.787    | 100%       | 82.585.996    | 100%       | 140.184.158   | 100%       | 209.574.564   | 100%       | 276.410.193   | 100%                                     | 626.168.915   | Bagian Anforjab         |
|      | 4 | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidanenna | 80%                                           | 411.365.997 | 50%        | 166.990.822   | 60%        | 252.536.868   | 70%        | 312.585.921   | 80%        | 388.735.222   | 100%       | 457.492.325   | 100%                                     | 1.158.813.468 | Bagian Anforjab         |
|      | 5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan             | 90%                                           | 249.545.677 | 50%        | 226.257.495   | 60%        | 324.155.073   | 70%        | 385.234.061   | 80%        | 464.231.483   | 100%       | 533.798.274   | 100%                                     | 1.383.263.818 | Bagian Anforjab         |
|      | 6 | Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah            | Persentase terlaksananya evaluasi kelembagaan                            |                                               | -           | 4 dok      | 1.434.476.275 | 4 dok      | 1.784.134.078 | 4 dok      | 1.866.250.243 | 4 dok      | 2.003.309.904 | 100%       | 3.601.986.068 | 100%                                     | 7.471.546.215 | Bagian Kelembagaan      |
|      | 7 | Program Analisa dan Formasi Jabatan                                    | Persentase Analisa dan Formasi Penataan Jabatan                          |                                               | -           | 2 OPD      | 1.173.591.895 | 2 OPD      | 1.468.888.435 | 2 OPD      | 1.546.462.152 | 80%        | 1.670.984.738 | 100%       | 1.766.096.758 | 100%                                     | 4.983.543.648 | Bagian Anforjab         |
|      | 8 | Program Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik                         | Persentase meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Pelavanoan Publik      |                                               | -           | 20%        | 2.378.079.683 | 40%        | 1.636.153.287 | 60%        | 1.875.511.242 | 80%        | 1.949.039.394 | 100%       | 2.253.484.127 | 100%                                     | 6.078.034.763 | Bagian Pelayanan Publik |



Biro Humas dan Protokol

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program                                                                                           | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                     |               |               |               |             |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |                | PO Penanggung Jawab |                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                             | Tahun 2016                                                                |               | Tahun 2017    |               | Tahun 2018  |               | Tahun 2019                                    |               | Tahun 2020    |               | Tahun 2021    |               | RPJMD                              |                |                     |                                        |
|      |                                                              |                                                                                                             | Capaian                                                                   | Rp.           | Capaian       | Rp.           | Capaian     | Rp.           | Target                                        | Rp.           | Target        | Rp.           | Target        | Rp.           | Target                             | Rp.            |                     |                                        |
| 01   | 1                                                            | <b>Program :<br/>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                                     | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                                  | 94%           | 1.001.902.200 | 97%           | 657.062.600 | 98%           | 903.652.200                                   | 70%           | 942.070.945   | 75%           | 965.157.950   | 80%           | 989.095.155                        | 75%            | 5.792.648.100       | Ro. Humas dan Protokol                 |
|      | 2                                                            | <b>Program:<br/>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                               | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur                             | 99%           | 144.950.000   | 96%           | 37.300.000  | 99%           | 144.002.000                                   | 60%           | 231.170.000   | 65%           | 275.170.000   | 70%           | 376.190.000                        | 70%            | 1.765.060.000       | Bagian Pengumpulan Informasi           |
|      | 3                                                            | <b>Program :<br/>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>                                              | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya  | 100%          | 38.705.000    | 98%           | 58.660.000  | 94%           | 74.080.000                                    | 70%           | 95.970.000    | 75%           | 96.830.000    | 80%           | 99.770.000                         | 80%            | 585.140.000         | Bagian Pengumpulan Informasi           |
|      | 4                                                            | <b>Program :<br/>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                                          | Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | -             | -             | 100%          | 25.000.000  | 100%          | 25.000.000                                    | 55 Psg        | 100.024.000   | 55 Psg        | 102.757.000   | 60 Psg        | 113.903.000                        | 60 Psg         | 633.368.000         | Bagian Pengumpulan Informasi           |
|      | 5                                                            | <b>Program :<br/>Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>                         | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan              | -             | -             | 97%           | 65.700.000  | -             | -                                             | 6 Dok         | 115.043.000   | 8 Dok         | 162.343.000   | 9 Dok         | 162.343.000                        | 9 Dok          | 879.458.000         | Bagian Pengumpulan Informasi           |
|      | 6                                                            | <b>Program:<br/>Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.</b>                       | Terlaksananya Acara acara Resmi KDH/WKDH/Sekda dan Asisiten               |               |               |               |             |               |                                               | 100 Kali      | 1.070.920.000 | 110 Kali      | 1.108.420.000 | 120 Kali      | 1.260.420.000                      | 120 Kali       | 6.879.520.000       | Bagian Protokol dan Perjalanan         |
|      | 7                                                            | <b>Program:<br/>Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>                                                | Tersedianya Isu Publik Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan | 24 Kali       | 622.288.250   | 24 Kali       | 570.050.000 | 24 Kali       | 625.050.000                                   | 9 Dok         | 1.023.250.000 | 12 Dok        | 1.187.250.000 | 15 Dok        | 1.269.890.000                      | 15 Dok         | 6.960.780.000       | Bagian Pengumpulan Informasi           |
|      | 8                                                            | <b>Program :<br/>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b> | Termanfaatkannya Jaringan Komunikasi dan Informasi                        | 4 Jaringan    | 1.067.355.050 | 4 Jaringan    | 560.880.000 | 4 Jaringan    | 536.162.200                                   | 70%           | 1.029.810.000 | 1 Jaringan    | 1.170.810.000 | 1 Jaringan    | 1.257.750.000                      | 1 Jaringan     | 6.916.740.000       | Bagian Humas Publikasi dan Dokumentasi |
|      | 9                                                            | <b>Program:<br/>Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Dokumentasi</b>                                         | Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Kegiatan Acara Resmi KDH/WKDH            | 2 Dok         | 316.772.650   | 2 Dok         | 485.050.000 | 2 Dok         | 239.271.300                                   | 3 Dok         | 1.012.160.000 | 4 Dok         | 1.112.160.000 | 5 Dok         | 1.255.160.000                      | 5 Dok          | 6.758.960.000       | Bagian Humas Publikasi dan Dokumentasi |
|      | 10                                                           | <b>Program:<br/>Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>                                                   | Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat                | 7 Media       | 666.658.000   | 10 Media      | 867.670.000 | 10 Media      | 993.058.000                                   | 7 Media       | 940.471.000   | 7 Media       | 970.471.000   | 7 Media       | 1.010.471.000                      | 7 Media        | 5.842.826.000       | Bagian Humas Publikasi dan Dokumentasi |
|      |                                                              |                                                                                                             |                                                                           | 5.221.256.267 |               | 4.242.935.600 |             | 4.155.030.000 |                                               | 6.560.888.945 |               | 7.151.368.950 |               | 7.794.992.155 |                                    | 43.014.500.100 |                     |                                        |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah: Biro Pengadaan Barang/Jasa

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                           | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |    |            |    |            |               |            |               |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |           | PD Penanggung Jawab |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Tahun 2016                                            | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |    | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |                                          |           |                     |             |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                       | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp                                       | Capaian   |                     | Rp          |
|      | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                       |            |    |            |    |            |               |            |               |            |                                          |           |                     |             |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | - Cakupan Layanan Administrasi                                                                                                                                                 |                                                       |            |    |            |    | 60%        | 629.366.625   | 80%        | 750.000.000   | 100%       | 856.275.000                              | 100%      | 1.777.883.782       | Kepala Biro |
|      | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | cakupan layana sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                   |                                                       |            |    |            |    | 60%        | 448.568.035   | 80%        | 300.000.000   | 100%       | 342.510.000                              | 100%      | 711.153.513         | sda         |
|      | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya<br>Persentase sumber daya aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan                        |                                                       |            |    |            |    | 60%        | 399.047.600   | 80%        | 200.000.000   | 100%       | 228.340.000                              | 100%      | 474.102.342         | sda         |
|      | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat waktu ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                 |                                                       |            |    |            |    | 60%        | 13.200.000    | 80%        | 25.000.000    | 100%       | 28.542.520                               | 100%      | 59.396.707          | sda         |
|      | Program peningkatan pengelolaan pengadaan barang/jasa                          | Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa                                                                                                                                 |                                                       |            |    |            |    | 60%        | 275.175.000   | 80%        | 393.475.383   | 100%       | 449.230.844                              | 100%      | 932.738.000         | sda         |
|      |                                                                                | Tingkat ketepatan pengelolaan strategi pangadaan                                                                                                                               |                                                       |            |    |            |    |            |               |            |               |            |                                          |           |                     |             |
|      | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi                           | Cakupan layanan pengadaan secara elektronik                                                                                                                                    |                                                       |            |    |            |    | 2 Standar  | 340.485.070   | 2 Standar  | 293.000.000   | 2 Standar  | 334.518.100                              | 2 Standar | 694.559.931         | sda         |
|      | Program Peningkatan Keberdayaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa              | Presentase jumlah aparatur yang memenuhi/memiliki kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa                                                                                  |                                                       |            |    |            |    |            |               |            | 193.250.000   | 100%       | 220.633.505                              | 100%      | 458.101.388         | sda         |
|      | Program Peningkatan sistem informasi pengadaan barang /jasa                    | meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa<br><br>meningkatnya keterpenuhan informasi manajemen pengadaan barang/jasa secara elektronik |                                                       |            |    |            |    |            |               |            | 100.000.000   | 100%       | 114.170.000                              | 100%      | 237.051.171         | sda         |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                       |            |    |            |    |            |               |            |               |            |                                          |           |                     |             |
|      |                                                                                | JUMLAH                                                                                                                                                                         |                                                       |            |    |            |    |            | 2.105.842.330 |            | 2.254.725.383 |            | 2.574.219.969                            |           | 5.344.986.834       |             |

| KODE | BIDANG PROGRAM<br>PRIORITASURUSAN PEMERINTAHAN<br>PEMBANGUNAN                                                  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME)                                   | KONDISI<br>KINERJA AWAL<br>RPJMD (TAHUN<br>0) |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                |                                             |                | OPD Penanggung Jawab                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                |                                                                          |                                               | 2017                                |                  | 2018                                |                  | 2019                                |                  | 2020                                |                  | 2021                                |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE<br>RPJMD |                |                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                |                                                                          |                                               | Target                              | Rp               | Target                              | Rp               | Target                              | Rp               | Target                              | Rp               | Target                              | Rp             | Target                                      | Rp             |                                                                                                                                         |
| (1)  | (2)                                                                                                            | (3)                                                                      | (4)                                           | (5)                                 | (6)              | (7)                                 | (8)              | (9)                                 | (10)             | (11)                                | (12)             | (13)                                | (14)           | (15)                                        | (16)           | (17)                                                                                                                                    |
| 1 3  | PENUNJANG URUSAN                                                                                               |                                                                          |                                               |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                |                                             |                | Biro Hukum<br><br>Sekretariat<br><br>Sekretariat<br><br>Sekretariat<br><br>Bidang Perda<br><br>Bidang Bantuan Hukum<br><br>Bidang Perda |
|      | BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,<br>BIRO ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DAERAH<br><br>BIRO HUKUM |                                                                          |                                               |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                  |                                     |                |                                             |                |                                                                                                                                         |
|      | Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                      | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                           | 100%                                          | 20%                                 | 2.229.097.649,97 | 40%                                 | 2.389.810.878,55 | 60%                                 | 2.565.531.843    | 80%                                 | 2.757.611.242,54 | 100%                                | 967.521.332,28 | 100%                                        | 10.909.572.947 |                                                                                                                                         |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            | 100%                                          | 20%                                 | 56.367.625       | 40%                                 | -                | 60%                                 | 88.577.697       | 80%                                 | 104.682.732,81   | 100%                                | 245.923.817,63 | 100%                                        | 495.551.873    |                                                                                                                                         |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                                              | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                                          | 20%                                 | 1.053.747.295    | 40%                                 | 1.214.460.523    | 60%                                 | 1.390.181.487    | 80%                                 | 1.582.260.880,98 | 100%                                | 992.170.965,84 | 100%                                        | 6.232.821.151  |                                                                                                                                         |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja                                              | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan             | 100%                                          | 100%                                | 80.217.895       | 100%                                | 88.270.413       | 100%                                | 96.322.931       | 100%                                | 104.375.448,73   | 100%                                | 372.427.966,64 | 100%                                        | 741.614.654    |                                                                                                                                         |
|      | Program Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Tersedianya Rancangan Produk Hukum Daerah                                | 8 Kasus                                       | 8 Kasus                             | 1.153.838.260    | 10 Kasus                            | 1.314.551.488    | 11 kasus                            | 1.490.272.451    | 12 kasus                            | 1.682.351.845,83 | 14 Kasus                            | 892.261.930,70 | 55                                          | 6.533.275.976  |                                                                                                                                         |
|      | Program Bantuan Hukum                                                                                          | Jumlah Bantuan Hukumyang diberikan                                       | 8 Kasus                                       | 8 Kasus                             | 1.418.979.343,30 | 10 Kasus                            | 1.499.335.957,42 | 11 kasus                            | 1.587.196.439,16 | 12 kasus                            | 1.683.236.136,31 | 14 Kasus                            | 988.191.178,77 | 55                                          | 7.176.939.055  |                                                                                                                                         |
|      | Program Produk Hukum Daerah Provinsi                                                                           | Terselesaikannya Kasus dilingkungan Pemerintah Daerah                    | - 8 Perda, 50 Pergub, 500 Keputusan           | - 8 Perda, 50 Pergub, 500 Keputusan | 1.418.979.343,30 | - 8 Perda, 50 Pergub, 500 Keputusan | 1.499.335.957    | - 8 Perda, 50 Pergub, 500 Keputusan | 1.587.196.439    | - 8 Perda, 50 Pergub, 500 Keputusan | 1.683.236.136,31 | - 8 Perda, 50 Pergub, 500 Keputusan | 988.191.178,77 | - 55 Perda, 400 Pergub, 4000 Keputusan      | 7.176.939.055  |                                                                                                                                         |
|      | JUMLAH                                                                                                         |                                                                          |                                               |                                     | 7.411.227.412    |                                     | 8.005.765.217    |                                     | 8.805.279.288    |                                     | 9.597.754.424    |                                     | 5.446.688.371  |                                             | 39.266.714.711 |                                                                                                                                         |

| TABEL CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI REALISASI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 |                                                                              |                                                                           |                                                |                |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          |                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| PERANGKAT DAERAH: BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH                     |                                                                              |                                                                           |                                                |                |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          |                 |                          |
| KODE                                                                                        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)                                      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                |            |                   |            |                   | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                |            |                |            |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                 | PD PENANGGUNG JAWAB      |
|                                                                                             |                                                                              |                                                                           | TAHUN 2016                                     |                | TAHUN 2017 |                   | TAHUN 2018 |                   | TAHUN 2019                                    |                | TAHUN 2020 |                | TAHUN 2021 |                |                                          |                 |                          |
|                                                                                             |                                                                              |                                                                           | CAPAIAN                                        | RUPIAH         | CAPAIAN    | RUPIAH            | CAPAIAN    | RUPIAH            | TARGET                                        | RUPIAH         | TARGET     | RUPIAH         | TARGET     | RUPIAH         | TARGET                                   | RUPIAH          |                          |
| 4                                                                                           | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang                                         |                                                                           |                                                |                |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          |                 |                          |
| 4.1                                                                                         | Administrasi Pemerintahan                                                    |                                                                           |                                                |                |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          |                 |                          |
| 4.1.3.4                                                                                     | Biro Umum                                                                    |                                                                           |                                                |                |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          |                 |                          |
| 4.1.3.4.1                                                                                   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                              | 100%                                           | 13.088.818.465 | 20%        | 11.822.211.192,00 | 40%        | 11.433.283.910,00 | 60%                                           | 14.275.497.995 | 80%        | 5.815.341.715  | 100%       | 6.443.152.864  | 100%                                     | 62.878.306.141  | BAGIAN UMUM              |
| 4.1.3.4.2                                                                                   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                            | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                             | 100%                                           | 10.004.941.028 | 20%        | 20.866.202.318,00 | 40%        | 10.272.268.250,00 | 60%                                           | 10.450.357.885 | 80%        | 13.073.034.377 | 100%       | 15.370.465.413 | 100%                                     | 80.037.269.271  | BAGIAN RUMAH TANGGA      |
| 4.1.3.4.5                                                                                   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                           | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya  | 100%                                           | 108.138.800    | 20%        | 107.439.800,00    | 40%        | 45.850.000,00     | 60%                                           | 105.850.000    | 80%        | 478.910.494    | 100%       | 505.504.885    | 100%                                     | 1.351.693.979   | BAGIAN UMUM              |
| 4.1.3.4.6                                                                                   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan              | 100%                                           | 316.360.800    | 100%       | 39.310.000,00     | 100%       | 43.810.000,00     | 100%                                          | 59.310.000     | 80%        | 273.663.140    | 100%       | 322.157.643    | 100%                                     | 1.054.611.583   | BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
| 4.1.3.4.7                                                                                   | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                     | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas               |                                                |                | 100%       | 45.088.800,00     | 100%       | 43.671.500,00     | 100%                                          | 49.656.000     | 80%        | 684.157.848    | 100%       | 787.496.461    | 100%                                     | 1.610.070.610   | BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
| 4.1.3.4.107                                                                                 | Program Peningkatan Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggaan                   | Meningkatnya Prosentase Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggaan            |                                                |                | 1 kali     | 1.966.233.250,00  | 1 kali     | 2.084.423.200,00  | 1 kali                                        | 2.408.539.400  | 80%        | 3.184.405.607  | 100%       | 3.431.977.421  | 100%                                     | 13.075.578.878  | BAGIAN RUMAH TANGGA      |
| 4.1.3.4.108                                                                                 | Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas                          | Meningkatnya Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas                              |                                                |                | 4 kali     | 2.779.817.300,00  | 4 kali     | 2.534.447.500,00  | 4 kali                                        | 3.513.273.527  | 80%        | 2.668.215.610  | 100%       | 2.935.214.082  | 100%                                     | 14.430.968.019  | BAGIAN RUMAH TANGGA      |
| 4.1.3.4.109                                                                                 | Program Peningkatan Jasa Layanan Pengadaan barang/Jasa                       | Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan barang/jasa |                                                |                | 1 laporan  | 407.000.000,00    | 1 laporan  | 514.974.000,00    | 1 laporan                                     | 23.787.140     |            |                |            |                |                                          | 945.761.140     |                          |
| 4.1.3.4.23                                                                                  | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                         | Optimalnya Pemetaan Teknologi Informasi dan Persandian                    | 6 laporan                                      | 569.334.868    |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          | 569.334.868     |                          |
| 4.1.3.4.110                                                                                 | Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah                         | Meningkatnya Pengelolaan, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset/Barang Daerah   | 6 laporan                                      | 771.138.050    | 6 laporan  | 1.003.083.600,00  | 6 laporan  | 1.460.438.325,00  | 6 laporan                                     | 2.699.461.250  | 7 Laporan  | 1.331.036.195  | 7 Laporan  | 1.610.788.216  | 7 Laporan                                | 8.875.945.636   | BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
| TOTAL                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                | 24.858.732.011 |            | 39.036.386.260    |            | 28.433.166.685    |                                               | 33.585.733.197 |            | 27.508.764.986 |            | 31.406.756.985 |                                          | 184.829.540.124 |                          |
|                                                                                             |                                                                              |                                                                           |                                                |                |            |                   |            |                   |                                               |                |            |                |            |                |                                          |                 |                          |

| Kode                                        | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                        |                                                |               |               |               |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | OPD Penanggung Jawab |                |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|
|                                             |                                                              |                                                                       | Tahun 2016                                                                                                                                                                                                            |                                                | Tahun 2017    |               | Tahun 2018    |               | Tahun 2019                                    |               | Tahun 2020    |               | Tahun 2021    |               |                                          |                |                      |                |             |
|                                             |                                                              |                                                                       | Capaian                                                                                                                                                                                                               | Rp                                             | Capaian       | Rp            | Capaian       | Rp            | Target                                        | Rp            | Target        | Rp            | Target        | Rp            | Target                                   | Rp             |                      |                |             |
|                                             |                                                              |                                                                       | PENUNJANG URUSAN                                                                                                                                                                                                      |                                                |               |               |               |               |                                               |               |               |               |               |               |                                          |                |                      |                |             |
|                                             |                                                              |                                                                       | BIDANG URUSAN :<br>OTONOMI DAERAH,<br>PEMERINTAHAN UMUM,<br>BIRO ADMINISTRASI DAN<br>PERANGKAT DAERAH                                                                                                                 |                                                |               |               |               |               |                                               |               |               |               |               |               |                                          |                |                      |                |             |
| KEPALA DAERAH                               |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |               |               |               |               |                                               |               |               |               |               |               |                                          |                |                      | KDH & WKDH     |             |
|                                             | 1                                                            |                                                                       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Program Peningkatan Disiplin Aparatur<br>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) | 20%           | 1.054.780.400 | 20%           | 572.000.000   | 40%                                           | 362.500.000   | 60%           | 326.775.500   | 80%           | 1.540.886.199 | 100%                                     | 1.894.180.986  | 100%                 | 5.751.123.086  | TU PIMPANAN |
|                                             | 2                                                            | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                            |                                                                                                                                                                                                                       | 20%                                            | 199.295.000   | 20%           | 180.500.000   | 40%           | 164.500.000                                   | 60%           | 164.500.000   | 80%           | 143.114.375   | 100%          | 167.757.490                              | 100%           | 1.019.666.865        | TU PIMPANAN    |             |
|                                             | 3                                                            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                       |                                                                                                                                                                                                                       | 20%                                            | -             | 20%           | 436.100.000   | 40%           | 450.100.000                                   | 60%           | 551.350.000   | 80%           | 832.822.339   | 100%          | 876.994.761                              | 100%           | 3.147.367.101        | TU PIMPANAN    |             |
|                                             | 4                                                            | - Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                       | 20%                                            | 4.305.700.975 | 20%           | 4.305.594.800 | 40%           | 4.621.594.800                                 | 60%           | 6.005.005.743 | 80%           | 3.271.329.829 | 100%          | 3.669.167.300                            | 100%           | 26.178.393.447       | TU PIMPANAN    |             |
| TOTAL KEPALA DAERAH                         |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |               | 5.559.776.375 |               | 5.494.194.800 |                                               | 5.598.694.800 |               | 7.047.631.243 |               | 5.788.152.742 |                                          | 6.608.100.538  |                      | 36.096.550.498 |             |
| WAKIL KEPALA DAERAH                         |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |               |               |               |               |                                               |               |               |               |               |               |                                          |                |                      |                |             |
|                                             | 1                                                            |                                                                       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Program Peningkatan Disiplin Aparatur<br>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                                                      | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) | 20%           | 427.667.616   | 20%           | 172.849.830   | 40%                                           | 261.970.370   | 60%           | 193.212.500   | 80%           | 822.674.287   | 100%                                     | 959.435.351    | 100%                 | 2.837.809.953  | TU PIMPANAN |
|                                             | 2                                                            | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                            |                                                                                                                                                                                                                       | 20%                                            | -             | 20%           | -             | 40%           | -                                             | 60%           | -             | 80%           | 117.562.260   | 100%          | 170.439.684                              | 100%           | 288.001.944          | TU PIMPANAN    |             |
|                                             | 3                                                            | - Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                       | 20%                                            | 2.065.192.413 | 20%           | 910.120.540   | 40%           | -                                             | 60%           | 2.423.057.870 | 80%           | 2.918.191.188 | 100%          | 3.275.525.323                            | 100%           | 11.592.087.334       | TU PIMPANAN    |             |
| TOTAL WAKIL KEPALA DAERAH                   |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 20%           | 2.492.860.029 |               | 1.082.970.370 |                                               | 261.970.370   |               | 2.616.270.370 |               | 3.858.427.735 |                                          | 4.405.400.358  |                      | 14.717.899.232 |             |
| TOTAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |               | 8.052.636.404 |               | 6.577.165.170 |                                               | 5.860.665.170 |               | 9.663.901.613 |               | 9.646.580.477 |                                          | 11.013.500.896 |                      | 50.814.449.730 |             |

Perangkat Daerah : TU Pimpinan

| Kode              |   |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |               |            |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                            | OPD Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |   |  |                                                                                           |                                                                       | Tahun 2016                                     |                  | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019                                    |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               |                                          |                            |                      |
|                   |   |  |                                                                                           |                                                                       | Capaian                                        | Rp               | Capaian    | Rp            | Capaian    | Rp            | Target                                        | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp                         |                      |
|                   |   |  | PENUNJANG URUSAN                                                                          |                                                                       |                                                |                  |            |               |            |               |                                               |               |            |               |            |               |                                          |                            |                      |
|                   |   |  | BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, BIRO ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DAERAH |                                                                       |                                                |                  |            |               |            |               |                                               |               |            |               |            |               |                                          |                            |                      |
|                   |   |  | TU PIMPINAN                                                                               |                                                                       |                                                |                  |            |               |            |               |                                               |               |            |               |            |               | TU Pimpinan                              |                            |                      |
|                   | 1 |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                        | 20%                                            | 2.924.935.800    | 20%        | 2.927.254.185 | 40%        | 2.580.133.500 | 60%                                           | 3.039.100.197 | 80%        | 2.962.770.942 | 100%       | 3.581.689.248 | 100%                                     | 18.015.883.872 TU PIMPINAN |                      |
|                   | 2 |  | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                 | - Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 20%                                            | 4.558.510.309,00 | 20%        | 6.002.258.500 | 40%        | 3.063.419.000 | 60%                                           | 5.034.188.250 | 80%        | 5.595.642.998 | 100%       | 6.189.451.948 | 100%                                     | 30.443.471.005 TU PIMPINAN |                      |
| TOTAL TU PIMPINAN |   |  |                                                                                           |                                                                       |                                                | 7.483.446.109    |            | 8.929.512.685 |            | 5.643.552.500 |                                               | 8.073.288.447 |            | 8.558.413.940 |            | 9.771.141.196 |                                          | 48.459.354.877             |                      |

CAPAIAN DAN TARGET PROGRAM PRIORITAS KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016 - 2021

Perangkat Daerah : Badan Penghubung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                  | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                            | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |             |                   |             |               |             |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|      |                                                                               |                                                                                                                                 | Tahun 2016                                            |                  | Tahun 2017 |                  | Tahun 2018 |                  | Tahun 2019  |                   | Tahun 2020  |               | Tahun 2021  |               |                                          |                |                                |
|      |                                                                               |                                                                                                                                 | Capaian                                               | Rp               | Capaian    | Rp               | Capaian    | Rp               | Target      | Rp                | Target      | Rp            | Target      | Rp            | Target                                   | Rp             |                                |
| 01   | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                               |                                                                                                                                 |                                                       |                  |            |                  |            |                  |             |                   |             |               |             |               |                                          |                |                                |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | Tingkat Layanan OPD yang Paripurna dan<br>- Tepat waktu/Tercapainya Layanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu                | 85%                                                   | 2.100.808.200,00 | 85%        | 1.916.479.200,00 | 40%        | 1.627.912.450,00 | 65%         | 1.500.502.656,00  | 85%         | 1.551.795.250 | 95%         | 1.706.974.775 | 95%                                      | 10.404.472.531 | Bagian Tata Usaha              |
| 2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tepat Guna/Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana               | 80%                                                   | 3.167.510.950,00 | 80%        | 2.081.389.000,00 | 40%        | 1.290.620.825,00 | 65%         | 23.034.694.000,00 | 85%         | 2.310.880.574 | 95%         | 2.482.373.897 | 95%                                      | 34.367.469.246 | Bagian Tata Usaha              |
| 3    | Program Peningkatan disiplin Aparatur                                         |                                                                                                                                 |                                                       | -                | 90%        | 45.246.980,00    |            | -                |             | -                 |             | -             |             | -             |                                          | 45.246.980     | Bagian Tata Usaha              |
| 4    | Program Peningkatan Pengembangan sistem Palaporan Capain Kinerja dan Keuangan | Terciptanya Laporan Capaian Kinerja dn Keuangan yang Akuntabel/Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Kauangan yang Tepat Guna | 90%                                                   | 635.610.000,00   | 90%        | 916.173.600,00   | 40%        | 719.943.000,00   | 65%         | 511.696.000,00    | 85%         | 556.405.935   | 95%         | 612.046.528   | 95%                                      | 3.951.875.063  | Bagian Tata Usaha              |
| 5    | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                           | Dokumentasi Pengelolaan Kekayaan Seni Buadaya/<br>- Terlaksananya Even Promosi Seni Buadaya                                     | 7 dokumen                                             | 572.024.485,00   | 7 dokumen  | 1.762.400.000,00 | 40%        | 1.705.054.875,00 | 11 Kegiatan | 1.903.069.500,00  | 11 Kegiatan | 1.331.589.459 | 11 Kegiatan | 1.464.928.404 | 11 Kegiatan                              | 8.739.066.723  | Subid Promosi dan Informasi    |
|      | - Pengembangan Kerjasama masyarakat dalam pengelolaan                         |                                                                                                                                 |                                                       |                  |            |                  |            |                  |             |                   |             |               |             |               |                                          |                |                                |
|      | - Kegiatan pengelolaan Kekayaan Seni Budaya                                   |                                                                                                                                 |                                                       |                  |            |                  |            |                  |             |                   |             |               |             |               |                                          |                |                                |
| 6    | Program Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan                             | Jumlah Layanan Kegiatan                                                                                                         |                                                       |                  |            |                  |            |                  |             |                   |             |               |             |               |                                          |                | Subid HAL (Hub. Antar Lembaga) |
|      | - Fasilitas ubungan Imbaga Pemrintahan                                        | Kepemerintahan dan Kemasyarakatan                                                                                               | 80%                                                   | 1.842.211.240,00 | 40%        | 1.434.468.850,00 | 65%        | 2.292.504.000,00 | 85%         | 1.904.403.641     | 95%         | 2.094.844.464 | 95%         | 9.568.432.195 |                                          |                |                                |
|      | - Fasilitas Pelayanan Kemasyarakatan                                          | Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan                                                                         |                                                       |                  |            |                  |            |                  |             |                   |             |               |             |               |                                          |                |                                |
|      | JUMLAH                                                                        |                                                                                                                                 |                                                       | 6.475.953.635    |            | 8.563.900.020    |            | 6.778.000.000    |             | 29.242.466.156    |             | 7.655.074.859 |             | 8.361.168.068 |                                          | 67.076.562.738 |                                |

**Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018**

Perangkat Daerah: **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                 | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                        | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |               |                    |                |              |               |             |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                   | PD Penangung Jawab |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|      |                                                                                                              |                                                                                                                                             | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |               | Tahun 2019         |                | Tahun 2020   |               | Tahun 2021  |               |                                          |                   |                    |
|      |                                                                                                              |                                                                                                                                             | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp            | Capaian            | Rp             | Capaian      | Rp            | Capaian     | Rp            | Capaian                                  | Rp                |                    |
| 1    | URUSAN WAJIB                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                       |               |            |                |            |               |                    |                |              |               |             |               |                                          |                   |                    |
|      | BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, BIRO ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DAERAH                    |                                                                                                                                             |                                                       |               |            |                |            |               |                    |                |              |               |             |               |                                          |                   |                    |
|      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                          |                                                                                                                                             |                                                       |               |            |                |            |               |                    |                |              |               |             |               |                                          |                   |                    |
|      | Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran                                                                    | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                | 100%                                                  | 868.254.123   | 20%        | 532.049.104    | 40%        | 313.113.205   | 60%                | 476.600.000    | 80%          | 862.393.500   | 100%        | 1.124.746.193 | 100%                                     | 2.463.739.693,09  |                    |
|      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                        | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                                                    | 100%                                                  | -             | 20%        | 127.100.000    | 60%        | -             | 60%                |                | 80%          | 315.317.550   | 100%        | 412.841.797   | 100%                                     | 728.159.347,77    |                    |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                            | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                               | 100%                                                  | 1.274.069.000 | 20%        | 769.184.100    | 40%        | 538.876.000   | 60%                | 870.893.750    | 80%          | 1.549.888.517 | 100%        | 2.542.341.146 | 100%                                     | 4.963.123.413,07  |                    |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                           | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                                                    | 100%                                                  | 555.681.264   | 20%        | 152.876.000    | 40%        | 183.090.200   | 60%                | 122.463.935    | 80%          | 512.391.019   | 100%        | 577.978.516   | 100%                                     | 1.212.833.470,71  |                    |
|      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                               | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                                                                | 100%                                                  | 235.828.978   | 100%       | 350.011.025    | 100%       | 282.702.275   | 100%               | 614.881.185    | 100%         | 1.003.265.827 | 100%        | 1.135.673.507 | 100%                                     | 2.753.820.519,47  |                    |
|      | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                                     | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                                                                                 |                                                       | -             | 100%       | 231.144.775    | 100%       | 210.309.526   | 100%               | 335.436.040    | 100%         | 849.177.240   | 100%        | 1.007.333.986 | 100%                                     | 2.191.947.265,91  |                    |
| 7    | Program Pengurangan Resiko dan Kesiapsiagaan Bencana                                                         | Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan                                                                                    | 100%                                                  | 396.500.000   | 3 Kab/Kota | 7.806.856.346  | 6 Kab/Kota | 4.416.846.031 | 12 Kabupaten/ Kota | 13.566.880.915 | 12 Kab/Kot a | 3.241.493.700 | 13 Kab/Kota | 3.700.813.358 | 13 Kab/Kota                              | 20.509.187.973,28 |                    |
| 8    | Program Penanganan Bencana, Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat serta Pengelolaan Peralatan dan Logistik | Terpenuhinya Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa                                                                                     | 100%                                                  | 152.566.400   | 3 Kab/Kota | 2.217.201.150  | 6 Kab/Kota | 2.491.513.725 | 9 Kabupaten/ Kota  | 5.562.622.530  | 12 Kab/Kot a | 3.382.428.209 | 13 Kab/Kota | 3.861.718.289 | 13 Kab/Kota                              | 12.806.769.027,53 |                    |
| 9    | Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Wilayah Pasca Bencana                                                  | Terhimpunnya data Rekonstruksi dan Rehabilitasi, terbangunnya sarana & Prasarana Fisik Infrastruktur, meningkatnya kondisi sosek Masyarakat | 100%                                                  | 258.720.600   | 3 Kab/Kota | 15.877.017.500 | 6 Kab/Kota | 4.379.711.729 | 9 Kabupaten/ Kota  | 5.698.696.689  | 12 Kab/Kot a | 2.377.095.307 | 13 Kab/Kota | 1.727.046.066 | 13 Kab/Kota                              | 9.802.838.062,18  |                    |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                       | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |                                                               |                                                                                            | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                |                                          |                |                     |
|      |                                                               |                                                                                            | Capaian                                               | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian                                  | Rp             |                     |
| 10   | Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Sosialisasi Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya                                            | 1 Laporan                                             | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
| 11   | Program Pencegahan Dini Dan Penaggulangan Korban Bencana      | Sosialisasi Pencegahan Dan Penyebarluasan Informasi Di Daerah Rawan Bencana                | 100%                                                  | 3.516.226.200  | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
| 12   | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Korban Bencana          | Terpenuhinya Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa                                    | 100%                                                  | 400.466.800    | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
| 13   | Program Mobilisasi Korban Bencana                             | Tertanganinya Kebutuhan Dasar                                                              | 100%                                                  | 194.433.600    | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
| 14   | Program Penyiapan Logistik Bencana                            | Tersedianya Kesiapan Kebutuhan Dasar Untuk Setiap Bencana                                  | 100%                                                  | 993.467.600    | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
| 15   | Program Rehabilitasi Korban Bencana                           | Terbangunnya sarana & Prasarana Fisik Infrastruktur, meningkatnya kondisi sosek Masyarakat | 100%                                                  | 3.349.793.000  | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
| 16   | Program Tanggap Darurat                                       | Penenganan Sarurat Secara cepat dan Tepat                                                  | 1 Laporan                                             | 43.570.200     | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -                                        | -              |                     |
|      | JUMLAH                                                        |                                                                                            |                                                       | 12.239.577.765 |            | 28.063.440.000 |            | 12.816.162.691 |            | 13.162.838.209 |            | 14.093.450.870 |            | 16.090.492.859 |                                          | 57.432.418.773 |                     |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2018

Perangkat Daerah: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

| Perangkat Daerah: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH |                                                                                |                                                                                                                     |                                                       |                |                       |                |                          |                |                       |                |                       |                |                       |                |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode                                                                    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                       |                |                          |                |                       |                |                       |                |                       |                | PD Penanggung Jawab                                                                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                |                                                                                                                     | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017            |                | Tahun 2018               |                | Tahun 2019            |                |                       |                |                       |                |                                                                                                                                                                      |
|                                                                         |                                                                                |                                                                                                                     | Capaian                                               | Rp             | Capaian               | Rp             | Capaian                  | Rp             | Target                | Rp             | Target                | Rp             | Target                | Rp             |                                                                                                                                                                      |
| 01.                                                                     | URUSAN WAJIB<br>BIDANG URUSAN :                                                |                                                                                                                     |                                                       |                |                       |                |                          |                |                       |                |                       |                |                       |                |                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                      | 70                                                    | 5.794.390.295  | 100                   | 5.107.709.024  | 100                      | 4.466.967.249  | 100                   | 5.735.236.211  |                       | 5.007.194.092  |                       | 5.351.401.434  | - Sekretariat<br><br>- UPT Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan<br>- UPT Perbenihan Perikanan<br>- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV          |
| 2                                                                       | Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur                        | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur<br>- Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%) | 85<br>85                                              | 4.218.175.526  | 100<br>100            | 4.364.286.696  | 100<br>100               | 4.616.376.103  | 60<br>60              | 8.384.059.397  |                       | 9.680.682.367  |                       | 12.010.877.105 | - Sekretariat<br><br>- UPT Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan<br><br>- UPT Perbenihan Perikanan<br><br>- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV  |
| 3                                                                       | Program peningkatan disiplin paratur                                           | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                          | -                                                     |                | 100                   | 166.903.000    |                          |                | 60                    | 114.203.421    |                       | 179.634.858    |                       | 208.220.295    | Sekretariat                                                                                                                                                          |
| 4                                                                       | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                              | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                          | 80                                                    | 581.681.617    | 20                    | 406.227.270    | 30                       | 147.226.190    | 60                    | 651.960.347    |                       | 622.160.744    |                       | 490.232.746    | Sekretariat                                                                                                                                                          |
| 5                                                                       | Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                                                      | 85                                                    | 88.876.400     | 100                   | 321.192.800    | 100%                     | 375.491.000    | 100                   | 72.329.438     |                       | 130.137.280    |                       | 149.657.871    | Sekretariat                                                                                                                                                          |
| 6                                                                       | Program peningkatan kualitas perencanaan                                       | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                                                       | 100                                                   | 2.900.970.005  | 100                   | 2.137.313.216  | 100                      | 2.134.861.269  | 3                     | 1.221.754.947  |                       | 1.558.921.907  |                       | 1.832.619.762  | Sekretariat                                                                                                                                                          |
| 7                                                                       | Program pengembangan SDM Kelautan dan perikanan                                | - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan (orang)<br>- Lulusan STPL Palu (orang)            | 213 orang<br>32                                       | 862.264.660    | -<br>25               | 1.031.558.850  | -<br>20                  | 810.041.452    | 100<br>30             | 1.234.051.200  | 120<br>30             | 1.419.158.880  | 140<br>30             | 1.632.032.712  | Sekretariat                                                                                                                                                          |
| 8                                                                       | Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya                             | - Produksi Perikanan Budidaya (ton)<br>- Nilai Tukar Pembudidaya (NTP-Pi)                                           | #####<br>88,95                                        | 15.230.434.051 | #####<br>85,50        | 14.909.197.218 | 1.226.687,91<br>85,83    | 12.015.234.358 | 1.009.800<br>96,85    | 27.982.333.519 | 1.110.780             | 29.367.655.932 | 1.221.858             | 31.878.533.396 | - Bidang Budidaya & P2HP<br><br>- UPT Perbenihan Perikanan<br>- Bidang Budidaya & P2HP<br>- UPT Perbenihan Perikanan                                                 |
| 9                                                                       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                          | - Perikanan Tangkap (ton)<br><br>- Nilai Tukar Nelayan (NTN)                                                        | 212.330,60<br><br>114,28                              | 16.567.285.206 | 174.964<br><br>117,10 | 14.024.364.201 | 173.621,20<br><br>114,56 | 14.105.547.433 | 228.286<br><br>107,68 | 29.727.582.560 | 239.700<br><br>108,22 | 32.456.395.497 | 251.686<br><br>108,76 | 35.744.645.167 | - Bidang Perikanan Tangkap<br><br>- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV<br>- Bidang Perikanan Tangkap<br>- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan     | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                          | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |             |                |                |                |            |                 |            |                 |            |                 | PD Penangung Jawab                                   |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                               | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017  |                | Tahun 2018     |                | Tahun 2019 |                 | Tahun 2020 |                 | Tahun 2021 |                 |                                                      |
|      |                                                                  |                                                                                                                               | Capaian                                               | Rp             | Capaian     | Rp             | Capaian        | Rp             | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              |                                                      |
| 10   | Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan       | - Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$)                                                                                         | 12.582.300                                            | 7.210.208.978  | #####       | 5.462.446.022  | 3.630.475,19   | 3.317.132.692  | 3.200.000  | 13.481.441.415  | 3.580.000  | 15.223.803.601  | 3.784.000  | 13.977.230.152  | - Bidang Budidaya & P2HP                             |
|      |                                                                  | - Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)                                                                                                   | 47,27                                                 |                | 52,34       |                | 52,34          |                | 50,14      |                 | 51,95      |                 | 54         |                 | - UPT Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |
|      |                                                                  | - Nilai Pembayaran Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank (Rp. Juta)                    | -                                                     |                | 117.159.300 |                | 143.918.843,11 |                | 100.000    |                 | 110.000    |                 | 120.000    |                 | Bidang Budidaya & P2HP                               |
| 11   | Program Pengelolaan Ruang Laut                                   | - Jumlah luas kawasan konservasi (ha)                                                                                         | -                                                     | 8.115.565.208  | #####       | 7.895.695.135  | 1.379.159,79   | 6.665.412.700  | 1.000.000  | 9.366.709.027   | 1.100.000  | 11.128.473.737  | 1.200.000  | 13.178.173.751  | Bidang Pengelolaan Ruang Laut                        |
| 12   | Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | - Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku              | -                                                     | 2.293.222.432  | 59,71       | 1.907.408.421  | 59,71          | 4.269.628.746  | 55         | 3.950.817.123   | 60         | 4.629.403.469   | 65         | 5.379.289.430   | Bidang Pengawasan SDKP                               |
|      |                                                                  | - Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perunfdang undangan | -                                                     |                | 100         |                | 100            |                | 65         |                 | 70         |                 | 75         |                 | Bidang Pengawasan SDKP                               |
| 13   | Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan           | - Jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan (buah)                                                                | -                                                     | 4.742.840.383  | 2           | 1.034.790.435  | 2              | 1.461.087.849  | 2          | 2.449.440.000   | 2          | 2.645.395.200   | 2          | 2.993.075.712   | UPT Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan   |
| 14   | Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP              |                                                                                                                               | -                                                     | -              | -           | -              | -              | -              | 55         | 3.542.400.000   | 60         | 3.825.792.000   | 65         | 4.131.855.360   | UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV       |
|      | JUMLAH                                                           |                                                                                                                               |                                                       | 68.605.914.761 |             | 58.769.092.288 |                | 54.385.007.041 |            | 101.922.478.605 |            | 111.403.622.365 |            | 121.832.913.820 |                                                      |

Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Daerah

Perubahan RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021

| Kode |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (outcomes)                           | Tahun 2016 |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Periode RPJMD |                 | PD Penanggung Jawab                                                                     |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |                                                                                     |                                                                | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target        | Rp              |                                                                                         |
|      |   |                                                                                     |                                                                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |               |                 |                                                                                         |
|      | 8 | Program Pengembangan Industri Pariwisata                                            | - Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi         | -          | -              | 98%        | 1.708.172.174  | 98%        | 927.420.024    | 151        | 1.285.000.000  | 166        | 1.375.849.500  | 182        | 1.570.807.374  | 182           | 6.867.249.072   | Bidang Pengembangan Industri Pariwisata<br>Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata |
|      | 9 | Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata                                       | - Jumlah SDM Kepariwisata yang berkualitas                     | -          | -              | 97%        | 1.219.976.545  | 98%        | 1.079.645.040  | 400        | 1.282.400.000  | 460        | 1.373.065.680  | 540        | 1.567.629.087  | 1400          | 6.522.716.352   |                                                                                         |
|      |   |                                                                                     |                                                                |            | 7.289.112.383  |            | 12.494.580.511 |            | 22.295.576.133 |            | 16.257.451.500 |            | 17.406.853.321 |            | 19.873.404.437 |               | 95.616.978.285  |                                                                                         |
|      |   | UPTD. ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII)                                    |                                                                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |               |                 |                                                                                         |
|      |   |                                                                                     |                                                                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |               |                 |                                                                                         |
|      | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                 | 99%        | 1.008.013.159  | 97%        | 939.868.399    | -          | -              |            |                |            |                |            |                |               | 1.947.881.558   |                                                                                         |
|      | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                | 99%        | 2.064.419.750  | 98%        | 1.942.982.397  | -          | -              |            |                |            |                |            |                |               | 4.007.402.147   |                                                                                         |
|      | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan | 94%        | 49.350.500     | 95%        | 56.508.500     | -          | -              |            |                |            |                |            |                |               | 105.859.000     |                                                                                         |
|      | 4 | Program Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya                                            | - Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya                          | 99%        | 373.997.000    | 98%        | 403.675.800    | 99%        | 526.729.000    |            |                |            |                |            |                |               | 1.304.401.800   |                                                                                         |
|      |   |                                                                                     |                                                                |            | 3.495.780.409  |            | 3.343.035.096  |            | 526.729.000    |            | -              |            | -              |            | -              |               | 7.365.544.505   |                                                                                         |
|      |   | JUMLAH                                                                              |                                                                |            | 10.784.892.792 |            | 15.837.615.607 |            | 22.822.305.133 |            | 16.257.451.500 |            | 17.406.853.321 |            | 19.873.404.437 |               | 102.982.522.790 |                                                                                         |

**Perangkat Daerah: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah**

Perubahan RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                 | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                 | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                 |            |                 | PD Penangung Jawab                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|      |                                                                                                              |                                                                                                                      | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                 | Tahun 2021 |                 |                                                 |
|      |                                                                                                              |                                                                                                                      | Capaian                                               | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp              | Target     | Rp              |                                                 |
| 8    | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian/Perkebunan |                                                                                                                      |                                                       | 4.816.017.000  |            | -              |            | -              |            | -              |            | -               |            | -               | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 9    | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian                                           | - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian                                                                         | 25,52                                                 | 18.714.985.900 | 28,25      | 13.419.897.580 | 30,99      | 15.488.185.800 |            | 23.681.944.000 |            | 25.993.319.000  |            | 28.100.717.000  | Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian           |
|      |                                                                                                              | - Jumlah Peningkatan layanan JITUT dan JIDES (Ha)                                                                    | 63,07                                                 |                | 65         |                | 66,93      |                | 4.741      |                | 5.000      |                 | 6.000      |                 |                                                 |
|      |                                                                                                              | - Jumlah Panjang Infrastruktur Jalan Usaha Tani (Meter)                                                              | 45                                                    |                | 7          |                | 8          |                | 4.794      |                | 5.500      |                 | 6.000      |                 |                                                 |
|      |                                                                                                              | - Jumlah Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)                                                 | 5.400                                                 |                | 2.000      |                | 2.000      |                | 1.300      |                | 2.000      |                 | 2.500      |                 |                                                 |
|      |                                                                                                              | - Persentase Layanan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)                | -                                                     |                | -          |                | -          |                | 50         |                | 55         |                 | 60         |                 |                                                 |
|      |                                                                                                              | - Persentase Layanan Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura (%) | -                                                     |                | -          |                | -          |                | 20         |                | 21         |                 | 23         |                 |                                                 |
| 10   | Program Pemberdayaan Penyuluhan                                                                              | - Meningkatnya SDM Petani (%)                                                                                        | 78                                                    | -              | 79,15      | 2.921.068.800  | 80,40      | 3.805.008.350  |            | 803.339.400    |            | 923.840.310     |            | 1.062.416.356   | Bidang Penyuluhan                               |
|      |                                                                                                              | - Jumlah Kelembagaan yang Terbina (Lembaga)                                                                          | -                                                     |                | -          |                | -          |                | 755        |                | 815        |                 | 870        |                 |                                                 |
| 11   | Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani                                                    | - Meningkatnya Cakupan Binaan Kelompok Tani (%)                                                                      | 100                                                   | -              | 100        | 852.543.200    | 100        | 1.234.684.200  |            | 9.870.570.022  |            | 11.843.720.830  |            | 12.546.225.422  | 5. UPT Pendidikan dan Pelatihan                 |
|      |                                                                                                              | - Jumlah Peningkatan SDM Pertanian Aparatur (orang)                                                                  | -                                                     |                | -          |                | -          |                | 341        |                | 350        |                 | 359        |                 |                                                 |
|      |                                                                                                              | - Jumlah Peningkatan SDM Pertanian Non Aparatur (orang)                                                              | -                                                     |                | -          |                | -          |                | 135        |                | 150        |                 | 160        |                 |                                                 |
| 12   | Program Dukungan Alat dan Mesin Pertanian                                                                    | - Meningkatnya layanan alat dan mesin pertanian (%)                                                                  | -                                                     | -              | 31         | 603.692.800    | 15,50      | 30.362.000     |            | -              |            | -               |            | -               | UPT Mekanisasi Pertanian                        |
|      |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                       | 64.064.657.273 |            | 50.078.565.434 |            | 59.540.814.000 |            | 94.301.477.362 |            | 102.788.610.325 |            | 112.039.585.254 |                                                 |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab         |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|      |                                                                        |                                                                          | Tahun 2016                                            |     | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                |                                           |
|      |                                                                        |                                                                          | Capaian                                               | Rp. | Capaian    | Rp.            | Capaian    | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target                     | Rp.            |                                           |
|      | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH               |                                                                          |                                                       |     |            | 57.052.544.866 |            | 62.955.733.671 |            | 67.454.234.833 |            | 71.423.618.254 |            | 81.544.344.960 |                            |                |                                           |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                     | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                   |                                                       |     | 20         | 2.549.562.995  | 20         | 2.869.788.412  | 20         | 3.189.556.700  | 20         | 3.377.248.007  | 20         | 3.855.804.049  | 100                        | 15.841.960.163 | Bidang Sekretariat                        |
|      | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              | PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH (%) |                                                       |     | 20         | 2.870.833.528  | 20         | 7.058.675.929  | 20         | 14.781.979.742 | 20         | 15.651.833.880 | 20         | 17.140.680.934 | 100                        | 57.504.004.013 | Bidang Sekretariat                        |
|      | PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (%)                        |                                                       |     | 20         | 107.000.000    |            | -              |            | -              |            | -              | 20         | 729.017.807    | 40                         | 836.017.807    | Bidang Sekretariat                        |
|      | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             | PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)                            |                                                       |     | 20         | 211.235.450    | 20         | 180.115.600    | 20         | 416.188.000    | 20         | 440.678.823    | 20         | 503.123.013    | 100                        | 1.751.340.886  | Bidang Sekretariat                        |
|      | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)                          |                                                       |     | 20         | 561.632.350    | 20         | 586.515.050    | 20         | 503.543.000    | 20         | 533.174.279    | 20         | 608.725.074    | 100                        | 2.793.589.753  | Bidang Sekretariat                        |
|      | PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN                                       | TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PROGRAM                              |                                                       |     | 18         | 3.189.230.016  | 18         | 1.971.846.498  | 18         | 2.323.621.632  | 18         | 2.460.356.489  | 18         | 2.808.989.004  | 90                         | 12.754.043.639 | Bidang Sekretariat                        |
|      | PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN        | MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS 8 KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PERKEBUNAN       |                                                       |     |            | 14.246.131.859 |            | 7.752.319.079  |            | 7.739.059.740  |            | 8.194.469.182  |            | 9.355.625.465  |                            | 47.287.605.324 | Bidang Produksi dan Perbenihan Perkebunan |
|      |                                                                        | - JUMLAH PRODUKTIVITAS 8 KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PERKEBUNAN (Kg/Ha)   |                                                       |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                           |
|      |                                                                        | - KELAPA DALAM                                                           |                                                       |     | 1.149      |                | 1.189      |                | 1.192      |                | 1.267      |                | 1.330      |                | 1.330                      |                |                                           |
|      |                                                                        | - CENGKEH                                                                |                                                       |     | 125        |                | 323        |                | 373        |                | 486        |                | 535        |                | 535                        |                |                                           |
|      |                                                                        | - KOPI                                                                   |                                                       |     | 686        |                | 718        |                | 730        |                | 1.163      |                | 1.221      |                | 1.221                      |                |                                           |
|      |                                                                        | - KAKAO                                                                  |                                                       |     | 668        |                | 675        |                | 687        |                | 1.065      |                | 1.118      |                | 1.118                      |                |                                           |
|      |                                                                        | - PALA                                                                   |                                                       |     | 212        |                | 193        |                | 174        |                | 265        |                | 278        |                | 278                        |                |                                           |
|      |                                                                        | - LADA                                                                   |                                                       |     | 270        |                | 216        |                | 208        |                | 342        |                | 376        |                | 376                        |                |                                           |
|      |                                                                        | - KELAPA SAWIT                                                           |                                                       |     | 3.836      |                | 4.434      |                | 4.644      |                | 3.710      |                | 3.895      |                | 3.895                      |                |                                           |
|      |                                                                        | - KARET                                                                  |                                                       |     | 752        |                | 819        |                | 816        |                | 808        |                | 848        |                | 848                        |                |                                           |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                             | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                | Perangkat Daerah Penanggung                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Tahun 2016                                            |     | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                |                                               |
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Capaian                                               | Rp. | Capaian    | Rp.            | Capaian    | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target                     | Rp.            |                                               |
|      | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN SERTA PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN | TERJAMINNYA KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH PETANI DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN MENCEGAH TERJADINYA KONVERSI LAHAN PERKEBUNAN KE NON PERKEBUNAN (Persil) |                                                       |     | 300        | 14.019.698.031 |            | 20.888.759.760 |            | 16.650.679.575 |            | 17.630.498.435 |            | 20.128.740.063 |                            | 89.318.375.864 | Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan |
|      |                                                                                              | MEMUDAHKAN DALAM AKSES PERMODALAN MELALUI PERBANKAN DENGAN ANGUNAN SERTIFIKAT TANAH (Petani)                                                                    |                                                       |     | 100        |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      |                                                                                              | JALAN PRODUKSI MEMUDAHKAN PENGANGKUTAN SAPRODI DAN HASIL KEBUN MELALUI PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI/JALAN PERTANIAN (Km)                                          |                                                       |     | 20         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      |                                                                                              | JUMLAH PELAKU USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN (Pok Usaha/Poktan)                                                                                |                                                       |     | 40         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      |                                                                                              | TERSEDIAANYA PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN SERTA PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN                                                                                   |                                                       |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      |                                                                                              | JUMLAH PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN SERTA PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN (Laporan)                                                                               |                                                       |     |            |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                | 4                          |                |                                               |
|      | PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEJUTA SAPI (S3)                 | MENINGKATNYA POPULASI TERNAK SAPI (Ekor)                                                                                                                        |                                                       |     | 382.032    | 17.365.634.165 |            | 18.760.340.023 |            | 18.464.228.044 |            | 19.550.766.211 |            | 22.321.109.783 |                            | 96.462.078.226 | Bidang Peternakan dan Penvuluhan              |
|      |                                                                                              | MENINGKATNYA POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK UNGGAS DAN BABI (Ekor)                                                                                                |                                                       |     | #####      |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      |                                                                                              | MENINGKATNYA CAKUPAN BINA KELOMPOK PETERNAK (Kelompok)                                                                                                          |                                                       |     | 246        |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      |                                                                                              | MENINGKATNYA ANGKA KELAHIRAN TERNAK SAPI                                                                                                                        |                                                       |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                            |                |                                               |
|      | JUMLAH KELAHIRAN TERNAK SAPI (Ekor)                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                       |     |            | 12.758         |            | 135.575        |            | 163.662        |            | 198.339        |            | 510.334        |                            |                |                                               |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                             | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                                                                              |                                                                                 | Tahun 2016                                            |     | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                |                                                           |
|      |                                                                              |                                                                                 | Capaian                                               | Rp. | Capaian    | Rp.           | Capaian    | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target                     | Rp.            |                                                           |
|      | PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEJUTA SAPI (S3) | MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN HEWAN                                             |                                                       |     |            | 1.333.318.922 |            | 2.242.919.270 |            | 2.771.461.400 |            | 2.934.549.647 |            | 3.350.375.332 |                            | 12.632.624.572 | Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
|      |                                                                              | · PERSENTASE STATUS KESEHATAN HEWAN (%)                                         |                                                       |     | 76         |               | 79         |               | 82         |               | 85         |               | 88         |               | 88                         |                |                                                           |
|      |                                                                              | MENINGKATNYA JAMINAN HIGIENES SANITASI PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH (Unit usaha) |                                                       |     | 2          |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                           |
|      |                                                                              | MENINGKATNYA LUAS AREAL PENGEMBALAN DAN PRODUKTIVITAS PENGEMBALAN (Ha)          |                                                       |     | 2          |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                           |
|      |                                                                              | TERSEDIANYA PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH)           |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                           |
|      |                                                                              | · PERSENTASE TERSEDIANYA PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH (%)                        |                                                       |     | 72         |               | 73         |               | 75         |               | 78         |               | 80         |               | 80                         |                | Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
|      | PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT                                    | PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN PRODUK HASIL PETERNAKAN (Unit Usaha)            |                                                       |     | 5          | 598.267.550   |            | 644.454.050   |            | 613.917.000   |            | 650.043.301   |            | 742.154.436   |                            | 3.248.836.337  |                                                           |
|      |                                                                              | PENINGKATAN KELOMPOK PELAKU USAHA PETERNAKAN (Kelompok)                         |                                                       |     | 5          |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                           |
|      |                                                                              | MENINGKATNYA JARINGAN PEMASARAN PRODUK USAHA PETERNAKAN                         |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                           |
|      |                                                                              | · JUMLAH JARINGAN PEMASARAN PRODUK USAHA PETERNAKAN (Unit)                      |                                                       |     |            |               | 6          |               | 7          |               | 7          |               | 7          |               | 7                          |                |                                                           |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                | Perangkat Daerah Penanggung                          |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                               |                                                                          | Tahun 2016                                            |     | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                |                                                      |  |
|      |                                                                               |                                                                          | Capaian                                               | Rp. | Capaian    | Rp.           | Capaian    | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target                     | Rp.            |                                                      |  |
|      | UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN                                               |                                                                          |                                                       |     |            | 2.165.771.290 |            | 2.155.922.147 |            | 2.398.743.000 |            | 2.539.898.418 |            | 2.899.802.024 |                            |                |                                                      |  |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                            | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                   |                                                       | 20  |            | 138.262.730   | 20         | 120.711.136   | 20         | 263.300.000   | 20         | 278.794.041   | 20         | 318.299.156   | 100                        | 1.119.367.063  | UPT Proteksi Tanaman Perkebunan                      |  |
|      | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                     | PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH (%) |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               | 20         | 400.000.000   | 20                         | 400.000.000    | UPT Proteksi Tanaman Perkebunan                      |  |
|      | PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN               | MENURUNNYA TINGKAT SERANGAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN KAKAO (%)             |                                                       | 37  |            | 2.027.508.560 |            | 2.035.211.011 |            | 2.135.443.000 |            | 2.261.104.377 |            | 2.181.502.867 |                            | 10.640.769.815 | UPT Proteksi Tanaman Perkebunan                      |  |
|      |                                                                               | TERSEDIAANYA REKOMENDASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT SECARA TERPADU       |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                      |  |
|      |                                                                               | JUMLAH REKOMENDASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT SECARA TERPADU (Laporan)   |                                                       |     |            |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 4                          |                |                                                      |  |
|      | UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                          |                                                                          |                                                       |     |            | 1.207.254.877 |            | 1.266.480.041 |            | 1.409.023.566 |            | 1.491.938.372 |            | 1.703.346.039 |                            |                |                                                      |  |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                            | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                   |                                                       | 20  |            | 148.071.330   | 20         | 126.185.842   | 20         | 338.448.216   | 20         | 358.364.397   | 20         | 409.144.632   | 100                        | 1.380.214.417  | UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan |  |
|      | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                     | PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH (%) |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               | 20         | 350.000.000   | 20                         | 350.000.000    | UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan |  |
|      | PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN | MENINGKATNYA JUMLAH BIBIT/BENIH YANG DISERTIFIKASI                       |                                                       |     |            | 1.059.183.547 |            | 1.140.294.199 |            | 1.070.575.350 |            | 1.133.573.975 |            | 944.201.407   |                            | 5.347.828.478  | UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan |  |
|      |                                                                               | JUMLAH BIBIT/BENIH UNGGUL YANG DISERTIFIKASI (Pohon)                     |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                            |                |                                                      |  |
|      |                                                                               | KAKAO                                                                    |                                                       |     | 746.034    |               |            | 1.821.475     |            | 768.800       |            | 765.900       |            | 770.500       |                            | 4.872.709      |                                                      |  |
|      |                                                                               | KELAPA DALAM                                                             |                                                       |     | 420.954    |               |            | 858.030       |            | 611.043       |            | 695.120       |            | 740.226       |                            | 3.325.373      |                                                      |  |
|      |                                                                               | KOPI                                                                     |                                                       |     | 223.998    |               |            | 452.025       |            | 557.472       |            | 641.093       |            | 737.257       |                            | 2.611.845      |                                                      |  |
|      |                                                                               | CENGKEH                                                                  |                                                       |     | 375.087    |               |            | 495.345       |            | 496.053       |            | 570.461       |            | 656.050       |                            | 2.592.996      |                                                      |  |
|      |                                                                               | PALA                                                                     |                                                       |     | 123.792    |               |            | 401.711       |            | 160.390       |            | 184.449       |            | 212.116       |                            | 1.082.458      |                                                      |  |
|      |                                                                               | LADA                                                                     |                                                       |     | 92.653     |               |            | 187.987       |            | 132.576       |            | 156.653       |            | 184.320       |                            | 754.189        |                                                      |  |
|      |                                                                               | KELAPA SAWIT                                                             |                                                       |     | 9.800      |               |            | 36.298        |            | 12.961        |            | 14.905        |            | 17.141        |                            | 91.105         |                                                      |  |
|      |                                                                               | KARET                                                                    |                                                       |     | 34.821     |               |            |               |            | 40.218        |            | 44.240        |            | 48.664        |                            | 167.943        |                                                      |  |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                            | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |               |            |               |            |               |            |               |             |               |                            |                                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                                                                              |                                                                                | Tahun 2016                                            |     | Tahun 2017 |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021  |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                                         |                                         |
|      |                                                                              |                                                                                | Capaian                                               | Rp. | Capaian    | Rp.           | Capaian    | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target      | Rp.           | Target                     | Rp.                                     |                                         |
|      | UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN                                      |                                                                                |                                                       |     |            | -             |            | 1.377.825.405 |            | 1.739.101.925 |            | 1.841.440.383 |             | 2.102.372.485 |                            |                                         |                                         |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                           | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                         |                                                       |     |            | -             | 20         | 246.015.238   | 20         | 228.891.000   | 20         | 242.360.223   | 20          | 276.702.667   | 80                         | 993.969.128                             | UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan |
|      | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                    | PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH (%)       |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            | 20            | 550.000.000 | 20            | 550.000.000                | UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan |                                         |
|      | PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN              | TERSEDIANYA BENIH TANAMAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU                   |                                                       |     |            | -             |            | 1.131.810.167 |            | 1.510.210.925 |            | 1.599.080.159 |             | 1.275.669.818 |                            | 5.516.771.069                           | UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan |
|      |                                                                              | - JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU (Pohon) |                                                       |     |            |               |            |               |            |               |            |               |             |               |                            |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - KELAPA DALAM                                                                 |                                                       |     |            |               | 63.000     |               | 70.000     |               | 77.000     |               | 84.700      |               | 84.700                     |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - KAKAO                                                                        |                                                       |     |            |               | 87.750     |               | 93.500     |               | 107.250    |               | 117.975     |               | 117.975                    |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - KOPI                                                                         |                                                       |     |            |               | 450.000    |               | 500.000    |               | 550.000    |               | 605.000     |               | 605.000                    |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - KARET                                                                        |                                                       |     |            |               | 702        |               |            |               | 858        |               | 944         |               | 944                        |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - CENGKIH                                                                      |                                                       |     |            |               | 59.400     |               | 66.000     |               | 72.600     |               | 79.860      |               | 79.860                     |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - PALA                                                                         |                                                       |     |            |               | 54.000     |               | 60.000     |               | 66.000     |               | 72.600      |               | 72.600                     |                                         |                                         |
|      |                                                                              | - LADA                                                                         |                                                       |     |            |               | 67.500     |               | 75.000     |               | 82.500     |               | 90.750      |               | 90.750                     |                                         |                                         |
|      | UPT PEMBIBITAN TERNAK                                                        |                                                                                |                                                       |     |            | 3.465.066.822 |            | 2.589.528.953 |            | 4.730.539.900 |            | 5.008.911.254 |             | 5.718.673.978 |                            |                                         |                                         |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                           | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                         |                                                       |     | 20         | 162.330.095   | 20         | 152.290.872   | 20         | 195.392.100   | 20         | 206.890.061   | 20          | 236.206.383   | 100                        | 953.109.511                             | UPT Pembibitan Ternak                   |
|      | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                    | PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH (%)       |                                                       |     | 20         | 2.135.884.470 | 20         | 1.012.519.175 | 20         | 2.856.947.000 | 20         | 3.025.065.697 | 20          | 3.453.717.506 | 100                        | 12.484.133.848                          | UPT Pembibitan Ternak                   |
|      | PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEJUTA SAPI (S3) | TERSEDIANYA BIBIT TERNAK YANG BERKUALITAS                                      |                                                       |     |            | 1.166.852.257 |            | 1.424.718.906 |            | 1.678.200.800 |            | 1.776.955.496 |             | 2.028.750.089 |                            | 8.075.477.548                           | UPT Pembibitan Ternak                   |
|      |                                                                              | - JUMLAH BIBIT TERNAK YANG BERKUALITAS (Ekor)                                  |                                                       |     |            |               | 4          |               | 6          |               | 8          |               | 10          |               | 28                         |                                         |                                         |

| Kode | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas                       | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)                                          | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                            |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                              |                                                                                 | Tahun 2016                                            |       | Tahun 2017    |                | Tahun 2018    |                | Tahun 2019    |                | Tahun 2020    |                | Tahun 2021    |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir |                |                                            |
|      |                                                                              |                                                                                 | Capaian                                               | Rp.   | Capaian       | Rp.            | Capaian       | Rp.            | Target        | Rp.            | Target        | Rp.            | Target        | Rp.            | Target                     | Rp.            |                                            |
|      | UPT VETERINER                                                                |                                                                                 |                                                       |       | 1.242.419.309 |                | 1.598.308.062 |                | 1.932.830.000 |                | 2.046.568.498 |                | 2.336.567.254 |                |                            |                |                                            |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                           | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                          |                                                       | 20    | 172.917.741   | 20             | 197.349.307   | 20             | 153.419.000   | 20             | 162.447.030   | 20             | 185.465.774   | 100            | 871.598.851                | UPT Veteriner  |                                            |
|      | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                    | PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH (%)        |                                                       | 20    | 383.114.168   | 20             | 307.382.495   | 20             | 671.599.500   | 20             | 711.120.161   | 20             | 811.885.887   | 100            | 2.885.102.211              | UPT Veteriner  |                                            |
|      | PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEJUTA SAPI (S3) | MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER       |                                                       |       | 686.387.400   |                | 1.093.576.260 |                | 1.107.811.500 |                | 1.173.001.308 |                | 1.339.215.593 |                | 5399992061                 | UPT Veteriner  |                                            |
|      |                                                                              | - JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (Layanan) |                                                       |       |               | 40             |               | 100            |               | 95             |               | 96             |               | 331            |                            |                |                                            |
|      | UPT PENYULUHAN                                                               |                                                                                 |                                                       |       | 1.468.446.898 |                | 86.100.378    |                |               |                |               |                |               |                |                            |                |                                            |
|      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                           | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)                          |                                                       | 20    | 179.245.998   | 20             | 13.000.378    |                |               |                |               |                |               |                |                            | UPT Penyuluhan |                                            |
|      | PENGEMBANGAN SDM PERKEBUNAN, PETERNAKAN SERTA KELEMBAGAAN PENYULUHAN         | MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN               |                                                       |       | 1.289.200.900 |                | 73.100.000    |                |               |                |               |                |               |                |                            |                |                                            |
|      |                                                                              | - KETENAGAAN PENYULUH PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                 |                                                       | 271   |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                            |                |                                            |
|      |                                                                              | - KELOMPOK TANI PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                       |                                                       | 1.721 |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                            |                |                                            |
|      |                                                                              | - METODE DAN MATERI PENYULUHAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                        |                                                       | 5     |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                            |                |                                            |
|      |                                                                              | JUMLAH                                                                          |                                                       |       |               | 66.601.504.062 |               | 72.029.898.657 |               | 79.664.473.224 |               | 84.352.375.178 |               | 96.305.106.740 |                            |                |                                            |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021

| TUJUAN                                                                                  | SASARAN                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN                       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)                     | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN                                       | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN                                          |               |               |               |               |                |               |                |               |                |                                                          |                | LOKASI         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | 2017                                                                                   |               | 2018          |               | 2019          |                | 2020          |                | 2021          |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD THN 2016 |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | TARGET                                                                                 | Rp.           | TARGET        | Rp.           | TARGET        | Rp.            | TARGET        | Rp.            | TARGET        | Rp.            | TARGET                                                   | Rp.            |                |
| (1)                                                                                     | (2)                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)  | (5)                                        | (6)                                                                            | (7)                                                                            | (10)                                                                                   | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)           | (16)          | (17)           | (18)          | (19)           | (20)                                                     | (21)           | (22)           |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            | DINAS KEHUTANAN DAN UPTD                                                       |                                                                                |                                                                                        |               |               |               |               |                |               |                |               |                |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            | DINAS KEHUTANAN                                                                |                                                                                |                                                                                        | 9.232.407.850 |               | 8.634.072.328 |               | 18.361.199.997 |               | 20.013.707.997 |               | 21.814.941.717 |                                                          | 78.056.329.890 | -              |
| Memastikan sumber daya hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Tengah dikelola dengan baik | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan Secara Berkelanjutan | - Jumlah data dan informasi SDH yang mendukung KPH di Sulteng<br><br>- Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) terhadap penerimaan daerah meningkat setiap tahun<br><br>- Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021<br><br>- Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)<br><br>- Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun<br><br>- Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun<br><br>- Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun | 01   | 01                                         | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                     | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                           | 100%                                                                                   | 100 %         | 1.221.749.606 | 100 %         | 781.103.094   | 100 %          | 2.267.043.997 | 100 %          | 2.471.077.957 | 100 %          | 2.693.474.973                                            | 100 %          | 9.434.449.627  |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                | - Tingkat Ketersediaan administrasi layanan perkantoran                        | 100%                                                                                   | 100 %         |               |               | 100 %         |                | 100 %         |                | 100 %         |                | 100 %                                                    |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 01                                         | 22                                                                             | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                       | -Administrasi persuratan                                                               | 100%          | 1 Paket       | 846.749.606   | 1 Paket       | 781.103.094    | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Alat Tulis kantor                                                                     | 100%          | 1 Paket       |               | 1 Paket       | 1 Paket        | 1 Paket       | 1 Paket        | 1 Paket       | 1 Paket        |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Cetak dan penggandaan                                                                 | 100%          | 1 Paket       |               | 1 Paket       |                | 1 Paket       | 1 Paket        | 1 Paket       | 1 Paket        |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                   | 100%          | 1 Paket       |               | 1 Paket       |                | 1 Paket       | 1 Paket        | 1 Paket       | 1 Paket        |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                |                                                                                        |               |               |               |               |                |               |                |               |                |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Komponen instalasi listrik                                                            | 100%          | 1 Paket       |               | 0 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Makanan dan minuman rapat                                                             | 100%          | 1 Paket       |               | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 01                                         | 18                                                                             | Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah/Negeri                                   | Terselenggaranya rapat-rapat kerja/ koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah/negeri | 100%          | 1 Tahun       | 375.000.000   | 0 Tahun       |                | 1 Tahun       |                | 1 Tahun       |                | 1 Tahun                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 02                                         | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah | 100%                                                                                   | 20 %          | 3.333.110.000 | 40 %          | 3.356.255.174 | 60 %           | 3.900.978.255 | 80 %           | 4.252.066.298 | 100 %          | 4.634.752.265                                            | 100 %          | 19.477.161.993 |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 01                                         | 12                                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                        | Sarana dan Prasarana Kantor                                                            | 100%          | 1 Paket       | 2.631.129.000 | 1 Paket       | 1.127.098.174  | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                             | 100%          | 100 %         | 701.981.000   | 100 %         | 2.229.157.000  | 100 %         |                | 100 %         |                | 100 %                                                    |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 01                                         | 30                                                                             | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                               | 100%          | 1 Tahun       |               | 1 Tahun       |                | 1 Tahun       |                | 1 Tahun       |                | 1 Tahun                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 03                                         | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | - Tingkat Disiplin Aparatur                                                    | 100%                                                                                   | 100 %         | 322.550.000   | 100 %         |               | 100 %          | 680.113.199   | 100 %          | 741.323.387   | 100 %          | 808.042.492                                              | 100 %          | 2.552.029.078  |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 03                                         | 02                                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                  | 100%          | 1 Paket       | 322.550.000   | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket       |                | 1 Paket                                                  |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 05                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             | - Meningkatnya SDM Aparatur                                                    | 100%                                                                                   | 100 %         | 369.060.100   | 100 %         | 419.016.000   | 100 %          | 861.476.719   | 100 %          | 939.009.624   | 100 %          | 1.023.520.490                                            | 100 %          | 3.612.082.932  |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 05                                         | 19                                                                             | Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian                       | -Pembinaan Polhut                                                                      |               | 50 Orang      | 369.060.100   | 83 Orang      | 419.016.000    | 168 Orang     |                | 168 Orang     |                | 168 Orang                                                |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -Pembinaan Penyuluh Kehutanan              |                                                                                | 0 Orang                                                                        |                                                                                        | 0 Orang       |               | 85 Orang      |               | 85 Orang       |               | 85 Orang       |               |                |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi |                                                                                | 1 Paket                                                                        |                                                                                        | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket        |               | 1 Paket        |               |                |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -Laporan pengelolaan kepegawaian           |                                                                                | 1 Dok                                                                          |                                                                                        | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               | 1 Dok          |               | 1 Dok          |               |                |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 06                                         | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | - Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu                                        | 100%                                                                                   | 100 %         | 376.774.320   | 100 %         | 253.830.000   | 100 %          | 1.088.181.119 | 100 %          | 1.186.117.419 | 100 %          | 1.292.867.987                                            | 100 %          | 4.197.770.845  |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01   | 06                                         | 25                                                                             | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset                                | -Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan                                              |               | 1 Dok         | 376.774.320   | 1 Dok         | 253.830.000    | 1 Dok         |                | 1 Dok         |                | 1 Dok                                                    |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan                                                 |               | 1 Dok         |               | 1 Dok         |                | 1 Dok         |                | 1 Dok         |                |                                                          |                |                |
|                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                |                                                                                | -Laporan rekonsiliasi penerimaan                                                       |               | 1 Dok         |               | 1 Dok         |                | 1 Dok         |                | 1 Dok         |                |                                                          |                |                |

| (1) | (2) | (3)                                                                                           | (4)      | (5)                                                                        | (6)                                                                                                                                                               | (7)             | (10)      | (11)          | (12)      | (13)          | (14)      | (15)          | (16)      | (17)          | (18)      | (19)          | (20)       | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------|------|
|     |     | - Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya | 01 07    | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN                                   | - Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan                                                                                                                 | 0 Dokumen       | 10 Dok    | 1.049.810.250 | 9 Dok     | 1.143.931.997 | 9 Dok     | 2.574.658.189 | 9 Dok     | 2.806.377.426 | 9 Dok     | 3.058.951.394 | 46 Dok     | 10.633.729.256 |      |
|     |     |                                                                                               | 01 07 26 | Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kehutanan          | -RKA, DPA, DPPA, RKA-KL, Renja                                                                                                                                    |                 | 10 Dok    | 644.489.600   | 9 Dok     | 418.026.400   | 9 Dok     |               | 9 Dok     |               | 9 Dok     |               | 46 Dok     |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | -LAKIP, LPPD, LKPJ, Statistik                                                                                                                                     |                 |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | -Terselesaikannya LHP Baru                                                                                                                                        |                 |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                |      |
|     |     |                                                                                               | 01 07 27 | Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sul-Teng       | -Terselesaikannya LHP Lama                                                                                                                                        |                 |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | -Koordinasi pembangunan kehutanan                                                                                                                                 |                 | 14 Kali   | 405.320.650   | 36 Kali   | 725.905.597   | 14 Kali   |               | 14 Kali   |               | 14 Kali   |               | 92 Kali    |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | -Data & informasi promosi Dishut                                                                                                                                  |                 | 1 Paket   |               | 2 Paket   |               | 1 Paket   |               | 1 Paket   |               | 1 Paket   |               | 6 Paket    |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | -Pameran promosi kehutanan dan daerah                                                                                                                             |                 | 2 Kali    |               | 2 Kali    |               | 1 Kali    |               | 1 Kali    |               | 1 Kali    |               | 7 Kali     |                |      |
|     |     |                                                                                               | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                      | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                                                        | Rp. 643.135.000 | 3 %       | 247.138.819   | 856,82 %  | 218.764.963   | 3 %       | 1.305.113.550 | 3 %       | 1.422.573.770 | 3 %       | 1.550.605.409 | %          | 4.744.196.511  |      |
|     |     |                                                                                               | 01 21 01 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                | - Jumlah Unit IUPHHK yang mendapat pengesahan RKT kegiatan pemanfaatan hutan produksi                                                                             | 3 Unit          | 3 Unit    | 247.138.819   | 5 Unit    | 218.764.963   | 2 Unit    |               | 2 Unit    |               | 2 Unit    |               | 14 Unit    |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | - Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku (RPBB) Online                                                                | 20 Unit         | 56 Unit   |               | 69 Unit   |               | 20 Unit   |               | 20 Unit   |               | 20 Unit   |               | 185 Unit   |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Jumlah Unit yang melaksanakan sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Iuran Kehutanan (SIPNBP) dalam rangka Pemanfaatan Hasil Hutan secara terbit | 50 Unit         | 546 Unit  |               | 2107 Unit |               | 400 Unit  |               | 400 Unit  |               | 400 Unit  |               | 3.853 Unit |                |      |
|     |     |                                                                                               | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                              | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                                                      | 1 Dokumen       | 1 Dok     | 369.742.025   | 1 Dok     | 272.970.800   | 1 Dok     | 453.408.799   | 1 Dok     | 494.215.591   | 1 Dok     | 538.694.995   | 5 Dok      | 2.129.032.210  |      |
|     |     |                                                                                               | 01 22 01 | Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan          | Dokumen Promosi Investasi KPH                                                                                                                                     | -               | 1 Dok     | 369.742.025   | 1 Dok     | 272.970.800   | 1 Dok     |               | 1 Dok     |               | 1 Dok     |               | 5 Dok      |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Sistem Informasi KPH                                                                                                                                              | -               | 13 Dok    |               | 13 Dok    |               | 13 Dok    |               | 13 Dok    |               | 13 Dok    |               | 65 Dok     |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Dokumen Potensi Sumber Daya Hutan                                                                                                                                 | -               | 1 Dok     |               | 1 Dok     |               | 1 Dok     |               | 1 Dok     |               | 1 Dok     |               | 5 Dok      |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Data Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Di luar Kehutanan                                                                                                 | -               | 10 Lokasi |               | 10 Lokasi |               | 10 Lokasi |               | 10 Lokasi |               | 10 Lokasi |               | 50 Lokasi  |                |      |
|     |     |                                                                                               | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                       | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021                                        | 316 hotspot     | 3,6 %     | 139.880.000   | 4,6 %     | 134.098.000   | 2 %       | 317.386.160   | 2 %       | 345.950.914   | 2 %       | 377.086.496   | 12 %       | 1.314.401.570  |      |
|     |     |                                                                                               | 01 24 01 | Pengendalian Karhutla                                                      | Jumlah Lokasi titik hotspot yang ditangani                                                                                                                        | 14 Lokasi       | 14 Lokasi | 139.880.000   | 14 Lokasi | 134.098.000   | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi  |                |      |
|     |     |                                                                                               | 01 24    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                     | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (TK)                                                     | 241 Kasus       | 228 Kasus | 342.810.670   | 224 Kasus | 339.800.000   | 205 Kasus | 1.169.090.911 | 192 Kasus | 1.274.309.092 | 181 Kasus | 1.388.996.911 | 181 Kasus  | 4.515.007.584  |      |
|     |     |                                                                                               | 01 24 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                            | Jumlah lokasi pencegahan dan kerusakan SDH daerah rawan                                                                                                           | 14 Lokasi       | 23 Lokasi | 342.810.670   | 14 Lokasi | 339.800.000   | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi  |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Jumlah pengaduan dan lokasi yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan per-UU-an kehutanan                                                                       | 14 Lokasi       | 24 Lokasi |               | 17 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi |               | 14 Lokasi  |                |      |
|     |     |                                                                                               | 01 23    | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM                          | Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun.                                                                                               | 47%             | 58,8 %    | 153.740.500   | 60 %      | 137.100.000   | 60 %      | 1.169.090.911 | 65 %      | 1.274.309.092 | 70 %      | 1.388.996.911 | 70 %       | 4.123.237.414  |      |
|     |     |                                                                                               | 01 23 01 | Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial | Jumlah Dokumen Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi                                                                                               | 0               | 1 Dok     | 153.740.500   | 0 Dok     | 137.100.000   | 1 Dok     |               | 0 Dok     |               | 1 Dok     |               | 3 Dok      |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang dibina                                                                                                                     | 0               | 1 Lokasi  |               | 1 Lokasi  |               | 1 Lokasi  |               | 1 Lokasi  |               | 1 Lokasi  |               | 1 Lokasi   |                |      |
|     |     |                                                                                               |          |                                                                            | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di daerah penyangga KSA/ KPA                                                                                     | 7 D.esa         | 14 Desa   |               | 16 Desa   |               | 12 Desa   |               | 12 Desa   |               | 12 Desa   |               | 66 Desa    |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)                                                                                              | (6)                                                                                                               | (7)                 | (10)          | (11)          | (12)             | (13)          | (14)          | (15)          | (16)          | (17)          | (18)          | (19)          | (20)           | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 26 | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                               | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                 | 2.948.098,48 Hektar | 1.385 Hektar  | 711.245.760   | 3.213 Hektar     | 960.057.900   | 1.660 Hektar  | 1.758.522.350 | 1.975 Hektar  | 1.916.789.361 | 2.245 Hektar  | 2.089.300.404 | 10.478 Hektar  | 7.435.915.775  |      |
|     |     |     | 01 26 | 01 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah RPRHL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan)                                                           | 3 dokumen           | 13 Dok        | 398.619.000   | 0 Dok            | 451.778.950   | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               | - Dok         |               | 15 Dok         |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Jumlah RTnRHL (Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan)                                                              | 3 dokumen           | 13 Dok        |               | 13 Dok           |               | 13 Dok        |               | 13 Dok        |               | 13 Dok        |               | 65 Dok         |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Binwasdal kegiatan Rehabilitasi Lahan                                                                           | -                   | 13 KPH        |               | 13 KPH           |               | 13 KPH        |               | 13 KPH        |               | 13 KPH        |               | 13 KPH         |                |      |
|     |     |     | 01 26 | 02 Pembinaan Pengelolaan DAS                                                                     | - Jumlah Forum DAS Provinsi                                                                                       | -                   | 1 Dok         | 80.599.990    | -                | 80.549.950    | -             |               | -             |               | -             |               | 1 Dok          |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Binwasdal pengelolaan DAS di KPH                                                                                | -                   | 13 Unit       |               | 13 Unit          |               | 13 Unit       |               | 13 Unit       |               | 13 Unit       |               | 13 Unit        |                |      |
|     |     |     | 01 26 | 03 Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan                                               | - Jumlah sumber benih berkualitas yang dibangun                                                                   | -                   | 1 Unit        | 232.026.770   | 1 Unit           | 427.729.000   | 1 Unit        |               | 1 Unit        |               | 1 Unit        |               | 5 Unit         |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Binwasdal perbenihan tanaman hutan di KPH                                                                       | -                   | 13 Unit       |               | 13 Unit          |               | 13 Unit       |               | 13 Unit       |               | 13 Unit       |               | 13 Unit        |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                             | -                   | 37.200 Bibit  |               | 50.000 Bibit     |               | 50.000 Bibit  |               | 50.000 Bibit  |               | 50.000 Bibit  |               | 237.200 Bibit  |                |      |
|     |     |     | 01 27 | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                       | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                        | 8.089,55 Ha         | 30.096 Hektar | 383.854.300   | 24.044,82 Hektar | 435.370.500   | 20.000 Hektar | 408.067.919   | 20.000 Hektar | 444.794.032   | 20.000 Hektar | 484.825.495   | 114.140 Hektar | 2.156.912.247  |      |
|     |     |     | 01 27 | 01 Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial                                                          | - Luas hak kelola masyarakat melalui pemberian ijin HKm, HD, HTR, pengembangan HR dan Kemitraan seluas 100.000 Ha | -                   | 30.096 Hektar | 205.623.950   | 24.044,82 Hektar | 285.476.700   | 20.000 Hektar |               | 20.000 Hektar |               | 20.000 Hektar |               | 114.140 Hektar |                |      |
|     |     |     | 01 27 | 02 Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat                                                    | - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan                                                        | -                   | 13 Lokasi     | 178.230.350   | 19 Lokasi        | 149.893.800   | 13 Lokasi     |               | 13 Lokasi     |               | 13 Lokasi     |               | 71 Lokasi      |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                    | -                   | 16 Lokasi     |               | 15 Lokasi        |               | 13 Lokasi     |               | 13 Lokasi     |               | 13 Lokasi     |               | 70 Lokasi      |                |      |
|     |     |     | 01 28 | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                              | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                       | -                   | 15 Kelompok   | 210.941.500   | 28 Kelompok      | 181.773.900   | 28 Kelompok   | 408.067.919   | 28 Kelompok   | 444.794.032   | 28 Kelompok   | 484.825.495   | 127 Kelompok   | 1.730.402.847  |      |
|     |     |     | 01 28 | 01 Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                           | -                   | 15 Kelompok   | 210.941.500   | 28 Kelompok      | 181.773.900   | 28 Kelompok   |               | 28 Kelompok   |               | 28 Kelompok   |               | 127 Kelompok   |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                           | -                   | 15 Orang      |               | 26 Orang         |               | 14 Orang      |               | 14 Orang      |               | 14 Orang      |               | 83 Orang       |                |      |
|     |     |     |       | UPTD TAMAN HUTAN RAYA                                                                            |                                                                                                                   |                     |               | 1.219.843.233 |                  | 1.538.971.301 |               | 2.297.090.787 |               | 2.503.828.958 |               | 2.729.173.564 |                | 10.288.907.843 | -    |
|     |     |     | 01 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                       | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                              | 100%                | 100 %         | 106.009.145   | 95,54 %          | 138.806.501   | 100 %         | 68.011.320    | 100 %         | 74.132.339    | 100 %         | 80.804.249    | 100 %          | 467.763.554    |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                           | 100%                | 100 %         |               | 95,54 %          |               | 100 %         |               | 100 %         |               | 100 %         |               | 100 %          |                |      |
|     |     |     | 01 21 | 22 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | - Administrasi persuratan                                                                                         | 100%                | 1 Paket       | 106.009.145   | 1 Paket          | 138.806.501   | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | -Alat Tulis kantor                                                                                                | 100%                | 1 Paket       |               | 1 Paket          |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | -Cetak dan penggandaan                                                                                            | 100%                | 1 Paket       |               | 1 Paket          |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                              | 100%                | 1 Paket       |               | 1 Paket          |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | -Komponen instalasi listrik                                                                                       | 100%                | 1 Paket       |               | 1 Paket          |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | -Makanan dan minuman rapat                                                                                        | 100%                | 1 Paket       |               | 1 Paket          |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     | 01 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                                | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                    | 100%                | 100 %         | 443.896.700   | 99,33 %          | 486.876.800   | 100 %         | 226.704.400   | 100 %         | 247.107.796   | 100 %         | 269.347.497   | 100 %          | 1.673.933.193  |      |
|     |     |     | 01 02 | 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                       | 100%                | 1 Paket       | 315.265.000   | 1 Paket          | 344.325.000   | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               | 1 Paket       |               |                |                |      |
|     |     |     |       |                                                                                                  | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                        | 100%                | 100 %         | 128.631.700   | 97,83 %          | 142.551.800   | 100 %         |               | 100 %         |               | 100 %         |               | 100 %          |                |      |
|     |     |     | 01 02 | 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                          | 100%                | 1 Tahun       |               | 1 Tahun          |               | 1 Tahun       |               | 1 Tahun       |               | 1 Tahun       |               |                |                |      |



| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                         | (6)                                                                                                                              | (7)            | (10)        | (11)          | (12)        | (13)          | (14)        | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)         | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 23    | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM           | Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun.                                                              | 47%            | 52 %        | 669.937.388   | 56 %        | 913.288.000   | 60 %        | 2.002.375.068 | 65 %         | 2.182.588.824 | 70 %         | 2.379.021.818 | 70 %         | 8.147.211.097  |      |
|     |     |     | 01 23 01 | Pengelolaan Kawasan Konservasi                              | - Jumlah dokumen penataan blok; dokumen perencanaan pengelolaan; desain tapak Taman Hutan Raya yang tersusun                     | -              | 2 Dok       | 411.382.088   | 2 Dok       | 494.673.000   | 1 Dok       |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 7 Dok        |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan Taman Hutan Raya                                                                       | 1.500 Orang    | 3.500 Orang |               | 3.872 Orang |               | 8.000 Orang |               | 11.000 Orang |               | 15.000 Orang |               | 41.372 Orang |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah sarana dan prasarana wisata alam di Taman Hutan Raya bertambah                                                          | 21 Unit        | 2 Unit      |               | 3 Unit      |               | 2 Unit      |               | 2 Unit       |               | 2 Unit       |               | 11 Unit      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan gangguan dan ancaman bidang kehutanan                                                   | 8 desa         | 8 Desa      |               | 8 Desa      |               | 8 Desa      |               | 8 Desa       |               | 8 Desa       |               | 8 Desa       |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat                                                                               | 8 desa         | 8 Desa      |               | 8 Desa      |               | 8 Desa      |               | 8 Desa       |               | 8 Desa       |               | 8 Desa       |                |      |
|     |     |     | 01 23 02 | Konservasi Spesies dan Genetik                              | - Jumlah unit kebun koleksi tumbuhan dan penangkaran satwa                                                                       | -              | 2 Unit      | 258.555.300   | 2 Unit      | 418.615.000   | 2 Unit      |               | 3 Unit       |               | 3 Unit       |               | 13 Unit      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran tumbuhan dilindungi (Cendana dan Govasa)                                        | -              | 1 Lokasi    |               | 1 Lokasi    |               | 1 Lokasi    |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 5 Lokasi     |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO                                   |                                                                                                                                  |                |             | 1.221.417.799 |             | 1.933.184.600 |             | 3.494.090.018 |              | 3.808.558.119 |              | 4.151.328.350 |              | 14.608.578.886 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                  | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                             | 100%           | 20 %        | 71.728.357    | 40 %        | 96.123.100    | 60 %        | 90.681.760    | 80 %         | 98.843.118    | 100 %        | 107.738.999   | 100 %        | 465.115.334    |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Tingkat Ketersediaan administrasi layanan perkantoran                                                                          | 100%           | 20 %        |               | 40 %        |               | 60 %        |               | 80 %         |               | 100 %        |               | 100 %        |                |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                    | -Administrasi persuratan                                                                                                         | 100%           | 1 Paket     | 71.728.357    | 1 Paket     | 96.123.100    | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Alat Tulis kantor                                                                                                               | 100%           | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Cetak dan penggandaan                                                                                                           | 100%           | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                             | 100%           | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Komponen instalasi listrik                                                                                                      | 100%           | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                       | 100%           | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR           | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                   | 100%           | 20 %        | 143.920.472   | 40 %        | 689.929.100   | 60 %        | 272.045.280   | 80 %         | 296.529.355   | 100 %        | 323.216.997   | 100% %       | 1.725.641.203  |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                      | 100%           | 1 Paket     | 35.269.272    | 1 Paket     | 582.055.000   | 1 Paket     |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                       | 100%           | 100 %       | 108.651.200   | 100 %       | 107.874.100   | 100 %       |               | 100 %        |               | 100 %        |               | 100% %       |                |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                         | 100%           | 1 Tahun     |               | 1 Tahun     |               | 1 Tahun     |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               |              |                |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN       | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                       | Rp. 49.471.923 | 3 %         | 42.178.800    | 3 %         | 42.554.200    | 3 %         | 367.019.438   | 3 %          | 400.051.188   | 3 %          | 436.055.794   | 15 %         | 1.287.859.420  |      |
|     |     |     | 01 21 01 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIIPHHK                                                           | -              | 7 Unit      | 42.178.800    | 1 Unit      | 42.554.200    | 1 Unit      |               | 1 Unit       |               | 1 Unit       |               | 11 Unit      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK                                                                          | -              | 0 Unit      |               | 4 Unit      |               | 40 Unit     |               | 40 Unit      |               | 40 Unit      |               | 124 Unit     |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara terrib | -              | 36 Unit     |               | 36 Unit     |               | 40 Unit     |               | 40 Unit      |               | 40 Unit      |               | 192 Unit     |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                                 | (7)                                          | (10)                                                           | (11)          | (12)                                                           | (13)                                                              | (14)                                                           | (15)          | (16)                                                           | (17)                                 | (18)                                                           | (19)                                 | (20)                                       | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                                                                        | 1 Dokumen                                    | 1 Dok                                                          | 118.248.800   | 1 Dok                                                          | 105.248.800                                                       | 1 Dok                                                          | 367.019.438   | 1 Dok                                                          | 400.051.188                          | 1 Dok                                                          | 436.055.794                          | 5 Dok                                      | 1.426.624.020  |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPH/Pd<br>- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH<br>- Penataan Batas Blok/Petak<br>- Data Spasial Wilayah KPH                                | -<br>-<br>-<br>-                             | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>50 Lembar                      | 118.248.800   | 1 Dok<br>0 Hektar<br>50 Km<br>0 Lembar                         | 105.248.800<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar                   | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar                      |               | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar                      |                                      | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar                      |                                      | 5 Dok<br>400 Hektar<br>250 Km<br>80 Lembar |                |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021                                                          | 316 hotspot                                  | 2 %                                                            | 33.133.400    | 2 %                                                            | 31.983.400                                                        | 2 %                                                            | 367.019.438   | 2 %                                                            | 400.051.188                          | 2 %                                                            | 436.055.794                          | 10 %                                       | 1.268.243.220  |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Karhutla                                                                         | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                                                                                | -                                            | 5 Orang                                                        | 33.133.400    | 5 Orang                                                        | 31.983.400                                                        | 5 Orang                                                        |               | 5 Orang                                                        | 5 Orang                              | 5 Orang                                                        | 25 Orang                             |                                            |                |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (TK)                                                                       | 241 Kasus                                    | 5 %                                                            | 39.638.800    | 5 %                                                            | 47.788.800                                                        | 5 %                                                            | 367.019.438   | 5 %                                                            | 400.051.188                          | 5 %                                                            | 436.055.794                          | 25 %                                       | 1.290.554.020  |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan                                                                                                        | -                                            | 12 Kali                                                        | 39.638.800    | 12 Kali                                                        | 47.788.800                                                        | 12 Kali                                                        |               | 12 Kali                                                        | 12 Kali                              | 12 Kali                                                        | 60 Kali                              |                                            |                |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                                                                   | 450.827,185 Hektar                           | 185 Hektar                                                     | 678.293.370   | 235 Hektar                                                     | 834.983.000                                                       | 185 Hektar                                                     | 974.587.229   | 185 Hektar                                                     | 1.062.300.080                        | 185 Hektar                                                     | 1.157.907.087                        | 975 Hektar                                 | 4.708.070.767  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL<br>- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS<br>- Jumlah bibit penghijauan lingkungan                       | 3 dokumen<br>-<br>-                          | 1 Dok<br>185 Hektar<br>20.000 Bibit                            | 678.293.370   | 1 Dok<br>235 Hektar<br>20.000 Bibit                            | 834.983.000<br>185 Hektar<br>20.000 Bibit                         | 1 Dok<br>185 Hektar<br>20.000 Bibit                            |               | 1 Dok<br>185 Hektar<br>20.000 Bibit                            | 1 Dok<br>185 Hektar<br>20.000 Bibit  | 1 Dok<br>185 Hektar<br>20.000 Bibit                            | 5 Dok<br>975 Hektar<br>100.000 Bibit |                                            |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                                                                          | 8.089,55 Ha                                  | 2.000 Hektar                                                   | 56.253.000    | 5.340,65 Hektar                                                | 52.893.000                                                        | 2.000 Hektar                                                   | 367.019.438   | 2.000 Hektar                                                   | 400.051.188                          | 2.000 Hektar                                                   | 436.055.794                          | 13.341 Hektar                              | 1.312.272.420  |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan<br>- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan<br>- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat | -<br>-<br>-                                  | 2.000 Hektar<br>5 Lokasi<br>2 Lokasi                           | 56.253.000    | 5.340,65 Hektar<br>5 Lokasi<br>1 Lokasi                        | 52.893.000<br>5 Lokasi<br>1 Lokasi                                | 2.000 Hektar<br>5 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 2.000 Hektar<br>5 Lokasi<br>1 Lokasi                           | 2.000 Hektar<br>5 Lokasi<br>1 Lokasi | 13.341 Hektar<br>25 Lokasi<br>6 Lokasi                         |                                      |                                            |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                         | -                                            | 3 Kelompok                                                     | 38.022.800    | 3 Kelompok                                                     | 31.681.200                                                        | 3 Kelompok                                                     | 321.678.558   | 3 Kelompok                                                     | 350.629.628                          | 3 Kelompok                                                     | 382.186.295                          | 15 Kelompok                                | 1.124.198.482  |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tari Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya<br>- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                  | -<br>-                                       | 3 Kelompok<br>1 Orang                                          | 38.022.800    | 3 Kelompok<br>1 Orang                                          | 31.681.200<br>1 Orang                                             | 3 Kelompok<br>1 Orang                                          |               | 3 Kelompok<br>1 Orang                                          | 3 Kelompok<br>1 Orang                | 15 Kelompok<br>5 Orang                                         |                                      |                                            |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                | 1.337.620.000 |                                                                | 1.686.402.000                                                     |                                                                | 3.494.090.018 |                                                                | 3.808.558.119                        |                                                                | 4.151.328.350                        |                                            | 14.477.998.487 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD<br>- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                     | 100%<br>100%                                 | 20 %<br>100 %                                                  | 84.170.000    | 40 %<br>100 %                                                  | 78.192.800<br>100 %                                               | 60 %<br>100 %                                                  | 90.681.760    | 80 %<br>100 %                                                  | 98.843.118                           | 100 %<br>100 %                                                 | 107.738.999                          | 100 %<br>100 %                             | 459.626.677    |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | - Administrasi persuratan<br>- Alat Tulis kantor<br>- Cetak dan pengandaan<br>- Pembayaran listrik, telepon dan air<br>- Komponen instalasi listrik<br>- Makanan dan minuman rapat  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 84.170.000    | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 78.192.800<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |                                      | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |                                      |                                            |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                              | (7)                | (10)         | (11)        | (12)            | (13)        | (14)         | (15)        | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)          | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                   | 100%               | 20 %         | 270.739.000 | 40 %            | 461.016.200 | 60 %         | 272.045.280 | 80 %         | 296.529.355   | 100 %        | 323.216.997   | 100% %        | 1.623.546.831 |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                      | 100%               | 1 Paket      | 192.190.000 | 1 Paket         | 364.270.800 | 1 Paket      |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                       | 100%               | 100 %        | 78.549.000  | 100 %           |             | 100 %        |             | 100 %        |               | 100 %        |               | 100% %        |               |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                         | 100%               | 1 Tahun      |             | 1 Tahun         | 96.745.400  | 1 Tahun      |             | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               |               |               |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                         | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                       | Rp. 49.471.923     | 3 %          | 33.271.000  | 3 %             | 23.772.000  | 3 %          | 367.019.438 | 3 %          | 400.051.188   | 3 %          | 436.055.794   | 15 %          | 1.260.169.420 |      |
|     |     |     | 01 21 01 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK                                                           | -                  | 7 Unit       | 33.271.000  | 3 Unit          | 23.772.000  | 3 Unit       |             | 3 Unit       |               | 3 Unit       |               | 19 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK                                                                          | -                  | 2 Unit       |             | 0 Unit          |             | 28 Unit      |             | 28 Unit      |               | 28 Unit      |               | 86 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -                  | 2 Unit       |             | 28 Unit         |             | 28 Unit      |             | 28 Unit      |               | 28 Unit      |               | 114 Unit      |               |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                     | 1 Dokumen          | 1 Dok        | 184.788.000 | 1 Dok           | 145.650.000 | 1 Dok        | 367.019.438 | 1 Dok        | 400.051.188   | 1 Dok        | 436.055.794   | 5 Dok         | 1.533.564.420 |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPHJPD                                                                                                                 | -                  | 1 Dok        | 184.788.000 | 1 Dok           | 145.650.000 | 2 Dok        |             | 2 Dok        |               | 2 Dok        |               | 8 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                              | -                  | 100 Hektar   |             | 100 Hektar      |             | 100 Hektar   |             | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 500 Hektar    |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                      | -                  | 75 Km        |             | 50 Km           |             | 50 Km        |             | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 275 Km        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                       | -                  | - Lembar     |             | 0 Lembar        |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 30 Lembar     |               |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021       | 316 hotspot        | 2 %          | 25.691.000  | 4,7 %           | 29.199.000  | 2 %          | 367.019.438 | 2 %          | 400.051.188   | 2 %          | 436.055.794   | 12,7 %        | 1.258.016.420 |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Karhutla                                                                         | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                             | -                  | 14 Orang     | 25.691.000  | 15 Orang        | 29.199.000  | 15 Orang     |             | 15 Orang     |               | 15 Orang     |               | 74 Orang      |               |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)                    | 241 Kasus          | 5 %          | 97.794.000  | 2,5 %           | 108.248.000 | 5 %          | 367.019.438 | 5 %          | 400.051.188   | 5 %          | 436.055.794   | 22,5 %        | 1.409.168.420 |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan                                                     | -                  | 12 Kali      | 97.794.000  | 6 Kali          | 108.248.000 | 12 Kali      |             | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 54 Kali       |               |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                | 479.939,466 Hektar | 150 Hektar   | 521.363.000 | 190 Hektar      | 790.756.000 | 175 Hektar   | 974.587.229 | 200 Hektar   | 1.062.300.080 | 250 Hektar   | 1.157.907.087 | 965 Hektar    | 4.506.913.397 |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                                                                     | 3 dokumen          | 1 Dok        | 521.363.000 | 2 Dok           | 790.756.000 | 1 Dok        |             | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 6 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                             | -                  | 150 Hektar   |             | 190 Hektar      |             | 175 Hektar   |             | 200 Hektar   |               | 250 Hektar   |               | 965 Hektar    |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                            | -                  | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit    |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 100.000 Bibit |               |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                       | -                  | 4.476 Hektar | 40.353.000  | 4.626,88 Hektar | 27.572.000  | 2.000 Hektar | 367.019.438 | 2.000 Hektar | 400.051.188   | 2.000 Hektar | 436.055.794   | 15.103 Hektar | 1.271.051.420 |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                              | -                  | 4.476 Hektar | 40.353.000  | 4.626,88 Hektar | 27.572.000  | 2.000 Hektar |             | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 15.103 Hektar |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                       | -                  | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi        |             | 4 Lokasi     |             | 4 Lokasi     |               | 4 Lokasi     |               | 16 Lokasi     |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                   | -                  | 0 Lokasi     |             | 1 Lokasi        |             | 1 Lokasi     |             | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 4 Lokasi      |               |      |

| (1) | (2) | (3) | (4) |    | (5)                                                          | (6)                                                                                                                                       | (7)                                                                                                                                                   | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)       | (17)          | (18)       | (19)          | (20)        | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|------|
|     |     |     |     |    | PROGRAM PENINGKATAN<br>PENYULUHAN DAN<br>PENGEMBANGAN SDM    | Jumlah pelaku utama dan<br>pelaku usaha pemberdayaan<br>masyarakat<br>yang<br>ditingkatkan kapasitasnya                                   | -                                                                                                                                                     | 2 Kelompok | 79.451.000    | 2 Kelompok | 21.996.000    | 2 Kelomp   | 321.678.558   | 2 Kelompok | 350.629.628   | 2 Kelomp   | 382.186.295   | 10 Kelomp   | 1.155.941.482  |      |
|     |     |     | 01  | 28 | Kegiatan Peningkatan<br>Penyuluhan                           | - Jumlah Kelas Kelompok Tani<br>Hutan dari tingkat pemula ke<br>tingkat Madya                                                             | -                                                                                                                                                     | 2 Kelompok | 79.451.000    | 2 Kelompok | 21.996.000    | 2 Kelompok |               | 2 Kelompok |               | 2 Kelompok |               | 10 Kelompok |                |      |
|     |     |     | 01  | 28 |                                                              | 01                                                                                                                                        | - Jumlah tenaga pendamping<br>handal bagi KTH dalam<br>pemberdayaan masyarakat di<br>desa hutan.                                                      | -          |               | 2 Orang    | 2 Orang       |            | 2 Orang       |            | 2 Orang       |            | 2 Orang       |             | 10 Orang       |      |
|     |     |     |     |    | UPTD KPH TOILI BATURUBE                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |            | 1.205.972.066 |            | 1.439.157.110 |            | 3.312.726.498 |            | 3.610.871.883 |            | 3.935.850.352 |             | 13.504.577.909 | -    |
|     |     |     | 01  | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMIN                                      | - Tingkat pemenuhan<br>kebutuhan dasar operasional<br>SKPD                                                                                | 100%                                                                                                                                                  | 20 %       | 62.423.766    | 40 %       | 62.110.150    | 60 %       | 90.681.760    | 80 %       | 98.843.118    | 100 %      | 107.738.999   | 100 %       | 421.797.793    |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | - Tingkat Ketersediaan<br>layanan administrasi<br>perkantoran                                                                             | 100%                                                                                                                                                  | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %       |                |      |
|     |     |     | 01  | 01 | Penyediaan Jasa<br>Administrasi Perkantoran                  | -Administrasi persuratan                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                  | 1 Paket    | 62.423.766    | 1 Paket    | 62.110.150    | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | -Alat Tulis kantor                                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                  | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | -Cetak dan penggandaan                                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                  | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | -Pembayaran listrik, telepon<br>dan air                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                  | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | -Komponen instalasi listrik                                                                                                               | 100%                                                                                                                                                  | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                  | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |                |      |
|     |     |     | 01  | 02 | PROGRAM PENINGKATAN<br>SARANA DAN PRASARANA<br>APARATUR      | - Tingkat Pemenuhan<br>Kebutuhan Sarana dan<br>Prasarana kerja sesuai<br>standar daerah                                                   | 100%                                                                                                                                                  | 20 %       | 310.244.500   | 40 %       | 425.635.760   | 60 %       | 226.704.400   | 80 %       | 247.107.796   | 100 %      | 269.347.497   | 100 %       | 1.479.039.953  |      |
|     |     |     | 01  | 02 | 12                                                           | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                                                |                                                                                                                                                       | 1 Paket    | 218.554.000   | 1 Paket    | 358.888.000   | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              | - Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                                                                             | 100%                                                                                                                                                  | 100 %      | 91.690.500    | 100 %      | 66.747.760    | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %       |                |      |
|     |     |     | 01  | 02 | 30                                                           | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                                                                               | 100%                                                                                                                                                  | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               |             |                |      |
|     |     |     | 01  | 21 | PENGLOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI LESTARI DAN<br>USAHA KEHUTANAN  | Sumbangan Hutan Produksi<br>(termasuk Industri) pada<br>Penerimaan Daerah<br>Meningkat setiap Tahun                                       | Rp.<br>49.471.923                                                                                                                                     | 3 %        | 31.700.000    | 3 %        |               | 3 %        | 367.019.438   | 3 %        | 400.051.188   | 3 %        | 436.055.794   | 15 %        | 1.234.826.420  |      |
|     |     |     | 01  | 21 | 02                                                           | Pembinaan Pengelolaan Hutan<br>Produksi dan Industri<br>Kehutanan                                                                         | - Pemberian data dan informasi<br>sumber bahan baku industri<br>pada UIUPHHK                                                                          | -          | 20 Unit       | 31.700.000 | 2 Unit        | -          | 2 Unit        |            | 2 Unit        |            |               | 28 Unit     |                |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           | - Pemberian data dan informasi<br>terhadap pemungutan HHBK.                                                                                           | -          | 20 Unit       |            | 4 Unit        |            | 4 Unit        |            | 4 Unit        |            | 4 Unit        |             | 36 Unit        |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           | - Jumlah unit yang<br>melaksanakan penatausahaan<br>hasil hutan dan iuran<br>Kehutanan dalam rangka<br>pemanfaatan Hasil Hutan<br>dan iuran Kehutanan | -          | 2 Unit        |            | 4 Unit        |            | 4 Unit        |            | 4 Unit        |            | 4 Unit        |             | 18 Unit        |      |
|     |     |     | 01  | 22 | PLANOLOGI DAN TATA<br>LINGKUNGAN                             | Sistem Data dan Informasi<br>Sumber Daya Hutan<br>Mendukung KPH di Sulawesi<br>Tengah                                                     | 1 Dokumen                                                                                                                                             | 1 Dok      | 85.585.000    | 1 Dok      | 85.363.000    | 1 Dok      | 321.678.558   | 1 Dok      | 350.629.628   | 1 Dok      | 382.186.295   | 5 Dok       | 1.225.442.482  |      |
|     |     |     | 01  | 22 | 02                                                           | Inventarisasi dan Pemantauan<br>Sumberdaya Hutan                                                                                          | - Dokumen RPHJPD                                                                                                                                      | -          | 1 Dok         | 85.585.000 | 1 Dok         | 85.363.000 | 1 Dok         |            | 1 Dok         |            | 1 Dok         |             | 5 Dok          |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           | - Jumlah data dan informasi<br>Potensi Sumberdaya Hutan di<br>Wilayah KPH                                                                             | -          | 0 Hektar      |            | 100 Hektar    |            | 100 Hektar    |            | 100 Hektar    |            | 100 Hektar    |             | 400 Ha         |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                                           | -          | 42 Km         |            | 50 Km         |            | 50 Km         |            | 50 Km         |            | 50 Km         |             | 242 Km         |      |
|     |     |     |     |    |                                                              |                                                                                                                                           | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                                            | -          | 12 Lembar     |            | 0 Lembar      |            | 10 Lembar     |            | 10 Lembar     |            | 10 Lembar     |             | 42 Lembar      |      |
|     |     |     | 01  | 24 | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PERUBAHAN IKLIM                      | Persentase Penurunan<br>jumlah hotspot pada<br>kawasan hutan non<br>konservasi dan lahan dari<br>316 HS menjadi 285 HS pada<br>tahun 2021 | 26 hotspot                                                                                                                                            | 2 %        | 32.480.800    | 3,9 %      | 31.960.800    | 2 %        | 367.019.438   | 2 %        | 400.051.188   | 2 %        | 436.055.794   | 14 %        | 1.267.568.020  |      |
|     |     |     | 01  | 24 | 01                                                           | Pengendalian Kebakaran Hutan<br>dan Lahan                                                                                                 | - Jumlah Masyarakat Peduli<br>Api (MPA)                                                                                                               | -          | 5 Orang       | 32.480.800 | 12 Orang      | 31.960.800 | 5 Orang       |            | 5 Orang       |            | 5 Orang       |             | 32 Orang       |      |
|     |     |     | 01  | 25 | PROGRAM PENEGAKAN<br>HUKUM LINGKUNGAN HIDUP<br>DAN KEHUTANAN | Persentase kasus hukum<br>yang berkenaan dengan<br>kehutanan menurun setiap<br>tahun berdasarkan laporan<br>kejadian (LK)                 | 241 Kasus                                                                                                                                             | 5 %        | 54.220.000    | 5 %        | 55.680.000    | 5 %        | 367.019.438   | 5 %        | 400.051.188   | 5 %        | 436.055.794   | 5 %         | 1.313.026.420  |      |
|     |     |     | 01  | 25 | 01                                                           | Pencegahan dan Pengamanan<br>Hutan                                                                                                        | - Frekuensi pelaksanaan<br>pencegahan dan pengamanan<br>perusakan sumberdaya hutan                                                                    | -          | 10 Kali       | 54.220.000 | 12 Kali       | 55.680.000 | 12 Kali       |            | 12 Kali       |            | 12 Kali       |             | 58 Kali        |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)                                          | (10)                                                           | (11)        | (12)                                                           | (13)                                                               | (14)                                                           | (15)          | (16)                                                           | (17)          | (18)                                                           | (19)          | (20)                                  | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                                                                                                                                                    | 459.719,40 Hektar                            | 150 Hektar                                                     | 496.332.000 | 150 Hektar                                                     | 705.386.400                                                        | 175 Hektar                                                     | 974.587.229   | 200 Hektar                                                     | 1.062.300.080 | 250 Hektar                                                     | 1.157.907.087 | 925 Hektar                            | 4.396.512.797  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rancangan Teknik<br>- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS<br>- Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                                                   | -<br>-<br>-                                  | 1 Dok<br>150 Hektar<br>50.000 Bibit                            | 496.332.000 | 1 Dok<br>150 Hektar<br>20.000 Bibit                            | 705.386.400<br>175 Hektar                                          | 1 Dok<br>20.000 Bibit                                          |               | 1 Dok<br>200 Hektar<br>20.000 Bibit                            |               | 1 Dok<br>250 Hektar<br>20.000 Bibit                            |               | 5 Dok<br>925 Hektar<br>130.000 Bibit  |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                                                                                                                                                           | -                                            | 2.000 Hektar                                                   | 38.798.000  | 501,00 Hektar                                                  | 40.553.000                                                         | 2.000 Hektar                                                   | 276.337.678   | 2.000 Hektar                                                   | 301.208.069   | 2.000 Hektar                                                   | 328.316.796   | 8.501 Hektar                          | 985.213.543    |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan<br>- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan<br>- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                  | -<br>-<br>-                                  | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           | 38.798.000  | 501,00 Hektar<br>2 Lokasi<br>1 Lokasi                          | 40.553.000<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                                 | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 8.501 Hektar<br>18 Lokasi<br>5 Lokasi |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                          | -                                            | 2 Kelompok                                                     | 94.188.000  | 2 Kelompok                                                     | 32.468.000                                                         | 2 Kelompok                                                     | 321.678.558   | 2 Kelompok                                                     | 350.629.628   | 2 Kelompok                                                     | 382.186.295   | 10 Kelompok                           | 1.181.150.482  |      |
|     |     |     | 01 28    | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya<br>- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                                                                                   | -<br>-                                       | 2 Kelompok<br>1 Orang                                          | 94.188.000  | 2 Kelompok<br>1 Orang                                          | 32.468.000<br>2 Orang                                              | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          |               | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          |               | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          |               | 10 Kelompok<br>8 Orang                |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH BANAWA-LALUNDU                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                | 740.344.973 |                                                                | 2.841.368.124                                                      |                                                                | 2.587.272.419 |                                                                | 2.883.240.270 |                                                                | 3.073.938.361 |                                       | 12.126.164.147 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD<br>- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                      | 100%<br>100%                                 | 20 %<br>20 %                                                   | 76.325.023  | 40 %<br>40 %                                                   | 138.057.445<br>60 %                                                | 60 %<br>60 %                                                   | 90.681.760    | 80 %<br>80 %                                                   | 98.843.118    | 100 %<br>100 %                                                 | 107.738.999   | 100 %<br>100 %                        | 511.646.345    |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | - Administrasi persuratan<br>- Alat Tulis kantor<br>- Cetak dan penggandaan<br>- Pembayaran listrik, telepon dan air<br>- Komponen instalasi listrik<br>- Makanan dan minuman rapat                                                                                  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 49.197.050  | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 138.057.445<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               |                                       |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                                                                                                                                                       | 100%                                         | 20 %                                                           | 81.795.100  | 40 %                                                           | 1.201.610.429                                                      | 60 %                                                           | 181.363.520   | 80 %                                                           | 197.686.237   | 100 %                                                          | 215.477.998   | 100 %                                 | 1.877.933.284  |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                         | 1 Paket                                                        | 81.795.100  | 1 Paket                                                        | 1.114.692.229                                                      | 1 Paket                                                        |               | 1 Paket                                                        |               | 1 Paket                                                        |               |                                       |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                         | 100 %                                                          | 73.013.050  | 100 %                                                          | 86.918.200                                                         | 100 %                                                          |               | 100 %                                                          |               | 100 %                                                          |               | 100 %                                 |                |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                             | 100%                                         | 1 Tahun                                                        |             | 1 Tahun                                                        |                                                                    | 1 Tahun                                                        |               | 1 Tahun                                                        |               | 1 Tahun                                                        |               |                                       |                |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                         | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                                                                                                                                                           | Rp. 49.471.923                               | 3 %                                                            | 58.623.800  | 3 %                                                            | 65.800.000                                                         | 3 %                                                            | 276.337.678   | 3 %                                                            | 301.208.069   | 3 %                                                            | 328.316.795   | 15 %                                  | 1.030.286.342  |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada UIPHHK<br>- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK<br>- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -<br>-<br>-                                  | 9 Unit<br>24 Unit<br>24 Unit                                   | 58.623.800  | 1 Unit<br>0 Unit<br>0 Unit                                     | 65.800.000<br>20 Unit<br>20 Unit                                   | 4 Unit<br>20 Unit<br>20 Unit                                   |               | 4 Unit<br>20 Unit<br>20 Unit                                   |               | 4 Unit<br>20 Unit<br>20 Unit                                   |               | 22 Unit<br>84 Unit<br>84 Unit         |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                        | (7)               | (10)         | (11)        | (12)            | (13)          | (14)         | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                               | 1 Dokumen         | 1 Dok        | 52.290.200  | 1 Dok           | 218.810.000   | 1 Dok        | 321.678.558   | 1 Dok        | 350.629.628   | 1 Dok        | 382.186.295   | 15 Dok        | 1.325.594.681  |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPHJPD                                                                                                           | -                 | 1 Dok        | 52.290.200  | 1 Dok           | 218.810.000   | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok         |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                        | -                 | 100 Hektar   |             | 0 Hektar        |               | 60 Hektar    |               | 60 Hektar    |               | 60 Hektar    |               | 280 Ha        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                | -                 | 10 Km        |             | 50 Km           |               | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 210 Km        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                 | -                 | 15 Lembar    |             | 10 Lembar       |               | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 55 Lembar     |                |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021 | 24 hotspot        | 2 %          | 35.433.800  | 6,4 %           | 33.948.000    | 2 %          | 276.337.678   | 2 %          | 301.208.069   | 2 %          | 328.316.795   | 14 %          | 975.244.342    |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                       | -                 | 5 Orang      | 35.433.800  | 20 Orang        | 33.948.000    | 5 Orang      |               | 5 Orang      |               | 5 Orang      |               | 40 Orang      |                |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (TKI)             | 18 Kasus          | 5 %          | 52.149.400  | 5 %             | 122.000.000   | 5 %          | 321.678.558   | 5 %          | 382.186.295   | 5 %          | 382.186.295   | 25 %          | 1.260.200.548  |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusahaan sumberdaya hutan                                              | -                 | 9 Kali       | 52.149.400  | 21 Kali         | 122.000.000   | 11 Kali      |               | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 65 Kali       |                |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                          | 191.419,30 Hektar | 50 Hektar    | 301.477.850 | 182 Hektar      | 976.016.250   | 50 Hektar    | 566.519.311   | 50 Hektar    | 617.506.049   | 50 Hektar    | 673.081.593   | 382 Hektar    | 3.134.601.053  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                                                               | -                 | 1 Dok        | 301.477.850 | 1 Dok           | 976.016.250   | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok         |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                       | -                 | 50 Ha        |             | 182 Ha          |               | 50 Ha        |               | 50 Ha        |               | 50 Ha        |               | 382 Ha        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                      | -                 | 10.000 Bibit |             | 29.200 Bibit    |               | 40.000 Bibit |               | 40.000 Bibit |               | 40.000 Bibit |               | 159.200 Bibit |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                 | -                 | 2.000 Hektar | 47.008.400  | 1.926,34 Hektar | 58.746.000    | 2.000 Hektar | 321.678.558   | 2.000 Hektar | 382.186.295   | 2.000 Hektar | 382.186.295   | 9.926 Hektar  |                |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                        | -                 | 2.000 Hektar | 47.008.400  | 1.926,34 Hektar | 58.746.000    | 250 Hektar   |               | 250 Hektar   |               | 250 Hektar   |               | 4.676 Hektar  |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                 | -                 | 2 Lokasi     |             | 3 Lokasi        |               | 5 Lokasi     |               | 5 Lokasi     |               | 5 Lokasi     |               | 20 Lokasi     |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                             | -                 | 2 Lokasi     |             | 0 Lokasi        |               | 0 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 4 Lokasi      |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                | -                 | 2 Kelompok   | 35.241.400  | 2 Kelompok      | 26.380.000    | 2 Kelompok   | 230.996.798   | 2 Kelompok   | 251.786.510   | 2 Kelompok   | 274.447.296   | 10 Kelompok   | 818.852.004    |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                    | -                 | 2 Kelompok   | 35.241.400  | 2 Kelompok      | 26.380.000    | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 10 Kelompok   |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                    | -                 | 1 Orang      |             | 2 Orang         |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 9 Orang       |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH KULAWI                                                                               |                                                                                                                            |                   |              | 764.549.500 |                 | 2.070.009.950 |              | 2.587.272.419 |              | 2.820.126.937 |              | 3.073.938.361 |               | 11.315.897.167 |      |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                       | 100%              | 20 %         | 56.551.300  | 40 %            | 105.889.125   | 60 %         | 90.681.760    | 80 %         | 98.843.118    | 100 %        | 107.738.999   | 100 %         | 459.704.302    |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                    | 100%              | 100 %        |             | 100 %           |               | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %         |                |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | -Administrasi persuratan                                                                                                   | 100%              | 1 Paket      | 56.551.300  | 1 Paket         | 105.889.125   | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Alat Tulis kantor                                                                                                         | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Cetak dan penggandaan                                                                                                     | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                       | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Komponen instalasi listrik                                                                                                | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                 | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)               | (10)                                 | (11)        | (12)                                      | (13)        | (14)                                      | (15)        | (16)                                      | (17)        | (18)                                      | (19)        | (20)                                   | (21)          | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|------|
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                                                                                                                                                        | 100%              | 20 %                                 | 224.474.200 | 40 %                                      | 814.500.750 | 60 %                                      | 181.363.520 | 80 %                                      | 197.686.237 | 100 %                                     | 215.477.998 | 100 %                                  | 1.633.502.704 |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                                           | 100%              | 1 Paket                              | 202.207.200 | 1 Paket                                   | 777.152.000 | 1 Paket                                   |             | 1 Paket                                   |             | 1 Paket                                   |             |                                        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                            | 100%              | 100 %                                | 22.267.000  | 100 %                                     | 37.348.750  | 100 %                                     |             | 100 %                                     |             | 100 %                                     |             | 100 %                                  |               |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                              | 100%              | 1 Tahun                              |             | 1 Tahun                                   |             | 1 Tahun                                   |             | 1 Tahun                                   |             | 1 Tahun                                   |             |                                        |               |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                        | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                                                                                                                                                            | Rp. 49.471.923    | 3 %                                  | 39.435.800  | 3 %                                       | 272.860.600 | 3 %                                       | 276.337.678 | 3 %                                       | 301.208.069 | 3 %                                       | 328.316.795 | 15 %                                   | 1.218.158.943 |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK<br>- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK<br>- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -<br>-<br>-       | 2 Unit<br>2 Unit<br>24 Unit          | 39.435.800  | 0 Unit<br>66 Unit<br>27 Unit              | 272.860.600 | 0 Unit<br>88 Unit<br>88 Unit              |             | 0 Unit<br>88 Unit<br>88 Unit              |             | 0 Unit<br>88 Unit<br>88 Unit              |             | 2 Unit<br>332 Unit<br>315 Unit         |               |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen         | 1 Dok                                | 90.425.000  | 1 Dok                                     | 169.104.000 | 1 Dok                                     | 321.678.558 | 1 Dok                                     | 350.629.628 | 1 Dok                                     | 382.186.295 | 5 Dok                                  | 1.314.023.482 |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPHJPD<br>- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH<br>- Penataan Batas Blok/Petak<br>- Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                                  | -<br>-<br>-<br>-  | 0 Dok<br>50 Hektar<br>Km<br>Lembar   | 90.425.000  | 2 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar | 169.104.000 | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar |             | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar |             | 1 Dok<br>100 Hektar<br>50 Km<br>10 Lembar |             | 5 Dok<br>450 Ha<br>200 Km<br>40 Lembar |               |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021                                                                                                                                            | 24 hotspot        | 2 %                                  | 20.456.000  | 2,6 %                                     | 7.563.600   | 2 %                                       | 276.337.678 | 2 %                                       | 301.208.069 | 2 %                                       | 328.316.795 | 13 %                                   | 933.882.143   |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | 8 Orang                              | 20.456.000  | 8 Orang                                   | 7.563.600   | 8 Orang                                   |             | 8 Orang                                   |             | 8 Orang                                   |             | 40 Orang                               |               |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan keladahan (LK)                                                                                                                                                        | 18 Kasus          | 5 %                                  | 45.234.200  | 5 %                                       | 53.376.500  | 5 %                                       | 321.678.558 | 5 %                                       | 350.629.628 | 5 %                                       | 382.186.295 | 25 %                                   | 1.153.105.182 |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan                                                                                                                                                                                          | -                 | 12 Kali                              | 45.234.200  | 12 Kali                                   | 53.376.500  | 12 Kali                                   |             | 12 Kali                                   |             | 12 Kali                                   |             | 60 Kali                                |               |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                                                                                                                                                     | 329.292,99 Hektar | 50 Hektar                            | 189.920.000 | 50 Hektar                                 | 535.351.375 | 100 Hektar                                | 566.519.311 | 140 Hektar                                | 617.506.049 | 160 Hektar                                | 673.081.593 | 500 Hektar                             | 2.582.378.327 |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL<br>- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS<br>- Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                                         | -<br>-<br>-       | - Dok<br>50 Ha<br>10.000 Bibit       | 189.920.000 | 1 Dok<br>100 Ha<br>24.000 Bibit           | 535.351.375 | 1 Dok<br>100 Ha<br>20.000 Bibit           |             | 1 Dok<br>140 Ha<br>20.000 Bibit           |             | 1 Dok<br>160 Ha<br>20.000 Bibit           |             | 4 Dok<br>550 Ha<br>94.000 Bibit        |               |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                                                                                                                                                            | -                 | 2.000 Hektar                         | 47.280.000  | 1.302 Hektar                              | 62.750.000  | 2.000 Hektar                              | 321.678.558 | 2.000 Hektar                              | 350.629.628 | 2.000 Hektar                              | 382.186.295 | 9.302 Hektar                           | 1.164.524.481 |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan<br>- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan<br>- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                   | -<br>-<br>-       | 2.000 Hektar<br>2 Lokasi<br>- Lokasi | 47.280.000  | 1.302 Hektar<br>2 Lokasi<br>8 Lokasi      | 62.750.000  | 2.000 Hektar<br>2 Lokasi<br>1 Lokasi      |             | 2.000 Hektar<br>2 Lokasi<br>1 Lokasi      |             | 2.000 Hektar<br>2 Lokasi<br>1 Lokasi      |             | 9.302 Hektar<br>10 Lokasi<br>11 Lokasi |               |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                         | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)            | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)       | (17)          | (18)       | (19)          | (20)        | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM         | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                           |                | 2 Kelompok | 50.773.000    | 2 Kelompok | 48.614.000    | 2 Kelompok | 230.996.798   | 2 Kelompok | 251.786.510   | 2 Kelompok | 274.447.296   | 10 Kelompok | 856.617.604    |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                             | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya<br>- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                                                                                    | -              | 2 Kelompok | 50.773.000    | 2 Kelompok | 48.614.000    | 2 Kelompok |               | 2 Kelompok |               | 2 Kelompok |               | 10 Kelompok |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 2 Orang    |               | 2 Orang    |               | 2 Orang    |               | 2 Orang    |               | 2 Orang    |               | 10 Orang    |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH SINTUWU MAROSO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            | 1.145.392.701 |            | 2.535.686.200 |            | 2.855.025.300 |            | 3.111.977.577 |            | 3.392.055.559 |             | 13.040.137.337 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                  | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD<br>- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                       | 100%           | 20 %       | 49.369.350    | 40 %       | 46.026.350    | 60 %       | 90.681.760    | 80 %       | 98.843.118    | 100 %      | 107.738.999   | 100 %       | 392.659.577    |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                    | -Administrasi persuratan<br>-Alat Tulis kantor<br>-Cetak dan pengandaan<br>-Pembayaran listrik, telepon dan air<br>-Komponen instalasi listrik<br>-Makanan dan minuman rapat                                                                                          | 100%           | 1 Paket    | 49.369.350    | 1 Paket    | 46.026.350    | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%           | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%           | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%           | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%           | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%           | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR           | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                                                                                                                                                        | 100%           | 20 %       | 110.213.650   | 40 %       | 585.569.850   | 60 %       | 181.363.520   | 80 %       | 197.686.237   | 100 %      | 215.477.998   | 100 %       | 1.290.311.254  |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                                           | 100%           | 1 Paket    | 62.923.000    | 1 Paket    | 346.277.000   | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               | 1 Paket    |               |             |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                            | 100%           | 100 %      | 47.290.650    | 100 %      | 239.292.850   | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %      |               | 100 %       |                |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                              | 100%           | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               | 1 Tahun    |               |             |                |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN       | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                                                                                                                                                            | Rp. 49.471.923 | 3 %        | 14.453.000    | 0 %        |               | 3 %        | 299.008.118   | 3 %        | 325.918.849   | 3 %        | 355.251.545   | 15 %        | 994.631.512    |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK<br>- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK<br>- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -              | 3 Unit     | 14.453.000    | 0 Unit     | -             | 1 Unit     |               | 1 Unit     |               | 1 Unit     |               | 6 Unit      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 2 Unit     |               | 0 Unit     |               | 52 Unit    |               | 52 Unit    |               | 52 Unit    |               | 158 Unit    |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 2 Unit     |               | 0 Unit     |               | 52 Unit    |               | 52 Unit    |               | 52 Unit    |               | 158 Unit    |                |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                               | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen      | 1 Dok      | 151.450.000   | 1 Dok      | 145.380.000   | 1 Dok      | 321.678.558   | 1 Dok      | 350.629.628   | 1 Dok      | 382.186.295   | 5 Dok       | 1.351.324.482  |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan               | - Dokumen RPHJPD<br>- Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH<br>- Penataan Batas Blok/Petak<br>- Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                                  | -              | 1 Dok      | 151.450.000   | 1 Dok      | 145.380.000   | 1 Dok      |               | 1 Dok      |               | 1 Dok      |               | 5 Dok       |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 30 Hektar  |               | 100 Hektar |               | 100 Hektar |               | 100 Hektar |               | 100 Hektar |               | 430 Ha      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 75 Km      |               | 50 Km      |               | 50 Km      |               | 50 Km      |               | 50 Km      |               | 275 Km      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | Lembar     |               | 0 Lembar   |               | 10 Lembar  |               | 10 Lembar  |               | 10 Lembar  |               | 30 Lembar   |                |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                        | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021                                                                                                                                            | 24 hotspot     | 2 %        | 43.353.000    | 4,8 %      | 12.150.000    | 2 %        | 299.008.118   | 2 %        | 325.918.849   | 2 %        | 355.251.545   | 12,8 %      | 1.035.681.512  |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                      | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                                                                                                                                                                  | -              | 12 Orang   | 43.353.000    | 15 Orang   | 12.150.000    | 12 Orang   |               | 12 Orang   |               | 12 Orang   |               | 63 Orang    |                |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN      | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LKI)                                                                                                                                                        | 18 Kasus       | 5 %        | 107.162.500   | 5 %        | 100.500.000   | 5 %        | 321.678.558   | 5 %        | 350.629.628   | 5 %        | 382.186.295   | 25 %        | 1.262.156.982  |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                             | - Prekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan                                                                                                                                                                                          | -              | 12 Kali    | 107.162.500   | 15 Kali    | 100.500.000   | 12 Kali    |               | 12 Kali    |               | 12 Kali    |               | 63 Kali     |                |      |



| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                                          | (10)                                                           | (11)          | (12)                                                           | (13)          | (14)                                                           | (15)          | (16)                                                           | (17)          | (18)                                                           | (19)          | (20)                                   | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                                                                                                                                                     | 531.205,51 Hektar                            | 150 Hektar                                                     | 543.850.000   | 300 Hektar                                                     | 1.118.656.000 | 150 Hektar                                                     | 974.587.229   | 175 Hektar                                                     | 1.062.300.080 | 200 Hektar                                                     | 1.157.907.087 | 975 Hektar                             | 4.857.300.397  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL<br>- Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS<br>- Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                                         | -<br>-<br>-                                  | 1 Dok<br>150 Ha<br>20.000 Bibit                                | 543.850.000   | 2 Dok<br>300 Ha<br>40.600 Bibit                                | 1.118.656.000 | 1 Dok<br>150 Ha<br>20.000 Bibit                                |               | 1 Dok<br>175 Ha<br>20.000 Bibit                                |               | 1 Dok<br>200 Ha<br>20.000 Bibit                                |               | 6 Dok<br>975 Ha<br>120.600 Bibit       |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                                                                                                                                                            | -                                            | 2.000 Hektar                                                   | 61.485.201    | 2.743,93 Hektar                                                | 28.230.000    | 2.000 Hektar                                                   | 90.681.760    | 2.000 Hektar                                                   | 98.843.118    | 2.000 Hektar                                                   | 107.738.999   | 10.744 Hektar                          | 386.979.078    |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan<br>- Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan<br>- Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                   | -<br>-<br>-                                  | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           | 61.485.201    | 2.743,93 Hektar<br>4 Lokasi<br>0 Lokasi                        | 28.230.000    | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 2.000 Hektar<br>4 Lokasi<br>1 Lokasi                           |               | 10.744 Hektar<br>20 Lokasi<br>4 Lokasi |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                           | -                                            | 2 Kelompok                                                     | 64.056.000    | 3 Kelompok                                                     | 499.174.000   | 2 Kelomp                                                       | 276.337.678   | 2 Kelompok                                                     | 301.208.069   | 2 Kelomp                                                       | 328.316.796   | 11 Kelomp                              | 1.469.092.543  |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya<br>- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                                                                                    | -<br>-                                       | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          | 64.056.000    | 3 Kelompok<br>0 Orang                                          | 499.174.000   | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          |               | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          |               | 2 Kelompok<br>2 Orang                                          |               | 11 Kelompok<br>8 Orang                 |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH SIVIA PATUJU                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                | 1.101.592.800 |                                                                | 1.311.943.230 |                                                                | 3.040.681.218 |                                                                | 3.314.342.528 |                                                                | 3.612.633.355 |                                        | 12.381.193.132 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD<br>- Tingkat Ketersediaan administrasi layanan perkantoran                                                                                                                                                       | 100%<br>100%                                 | 100 %<br>100 %                                                 | 34.261.090    | 20 %<br>20 %                                                   | 46.702.040    | 40 %<br>40 %                                                   | 90.681.760    | 60 %<br>60 %                                                   | 98.843.118    | 80 %<br>80 %                                                   | 107.738.999   | 100 %<br>100 %                         | 378.227.007    |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | - Administrasi persuratan<br>- Alat Tulis kantor<br>- Cetak dan penggandaan<br>- Pembayaran listrik, telepon dan air<br>- Komponen instalasi listrik<br>- Makanan dan minuman rapat                                                                                   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 34.261.090    | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 46.702.040    | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |               |                                        |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                                                                                                                                                        | 100%                                         | 100 %                                                          | 177.811.710   | 20 %                                                           | 270.181.190   | 40 %                                                           | 181.363.520   | 60 %                                                           | 197.686.237   | 80 %                                                           | 215.477.998   | 100 %                                  | 1.042.520.654  |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                         | 1 Paket                                                        | 118.140.000   | 1 Paket                                                        | 209.255.200   | 1 Paket                                                        |               | 1 Paket                                                        |               | 1 Paket                                                        |               |                                        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                         | 100 %                                                          | 59.671.710    | 100 %                                                          | 60.925.990    | 100 %                                                          |               | 100 %                                                          |               | 100 %                                                          |               | 100 %                                  |                |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                         | 1 Tahun                                                        |               | 1 Tahun                                                        |               | 1 Tahun                                                        |               | 1 Tahun                                                        |               | 1 Tahun                                                        |               |                                        |                |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                         | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                                                                                                                                                            | Rp. 49.471.923                               | 3 %                                                            | 17.725.000    | 3 %                                                            | 13.250.000    | 3 %                                                            | 299.008.118   | 3 %                                                            | 325.918.849   | 3 %                                                            | 355.251.545   | 15 %                                   | 1.011.153.512  |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK<br>- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK<br>- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -<br>-<br>-                                  | 1 Unit<br>3 Unit<br>2 Unit                                     | 17.725.000    | 1 Unit<br>90 Unit<br>90 Unit                                   | 13.250.000    | 1 Unit<br>90 Unit<br>90 Unit                                   |               | 1 Unit<br>90 Unit<br>90 Unit                                   |               | 1 Unit<br>90 Unit<br>90 Unit                                   |               | 5 Unit<br>363 Unit<br>362 Unit         |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                        | (7)               | (10)         | (11)        | (12)            | (13)        | (14)         | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                               | 1 Dokumen         | 1 Dok        | 151.450.000 | 1 Dok           | 151.450.000 | 1 Dok        | 321.678.558   | 1 Dok        | 350.629.628   | 1 Dok        | 382.186.295   | 5 Dok         | 1.357.394.482  |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPHJPD                                                                                                           | -                 | 1 Dok        | 151.450.000 | 2 Dok           | 151.450.000 | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 6 Dok         |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                        | -                 | 30 Hektar    |             | 50 Hektar       |             | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 380 Ha        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                | -                 | 75 Km        |             | 10 Km           |             | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 235 Km        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                 | -                 | - Lembar     |             | 2 Lembar        |             | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 32 Lembar     |                |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021 | 24 hotspot        | 2 %          | 36.800.000  | 1,6 %           | 27.900.000  | 2 %          | 276.337.678   | 2 %          | 301.208.069   | 2 %          | 328.316.796   | 9,6 %         | 970.562.543    |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                       | -                 | 7 Orang      | 36.800.000  | 5 Orang         | 27.900.000  | 7 Orang      |               | 7 Orang      |               | 7 Orang      |               | 33 Orang      |                |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LKI)             | 18 Kasus          | 5 %          | 91.000.000  | 12 %            | 73.850.000  | 5 %          | 344.348.998   | 5 %          | 375.340.408   | 5 %          | 409.121.045   | 32 %          | 1.293.660.451  |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan merusak sumberdaya hutan                                                 | -                 | 15 Kali      | 91.000.000  | 12 Kali         | 73.850.000  | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 63 Kali       |                |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                          | 520.642,34 Hektar | 150 Hektar   | 472.235.000 | 150 Hektar      | 616.272.000 | 150 Hektar   | 974.587.229   | 150 Hektar   | 1.062.300.080 | 150 Hektar   | 1.157.907.087 | 750 Hektar    | 4.283.301.397  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                                                               | -                 | 1 Dok        | 472.235.000 | 1 Dok           | 616.272.000 | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok         |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                       | -                 | 150 Ha       |             | 150 Ha          |             | 150 Ha       |               | 150 Ha       |               | 150 Ha       |               | 750 Ha        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                      | -                 | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit    |             | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 100.000 Bibit |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                 | -                 | 2.000 Hektar | 29.100.000  | 1.729,00 Hektar | 33.128.000  | 1.750 Hektar | 276.337.678   | 1.750 Hektar | 301.208.069   | 1.750 Hektar | 328.316.796   | 8.979 Hektar  | 968.090.543    |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                        | -                 | 2.000 Hektar | 29.100.000  | 1.729,00 Hektar | 33.128.000  | 1.750 Hektar |               | 1.750 Hektar |               | 1.750 Hektar |               | 8.979 Hektar  |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                 | -                 | 4 Lokasi     |             | 1 Lokasi        |             | 4 Lokasi     |               | 4 Lokasi     |               | 4 Lokasi     |               | 17 Lokasi     |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                             | -                 | 1 Lokasi     |             | 0 Lokasi        |             | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 4 Lokasi      |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                | -                 | 2 Kelompok   | 91.210.000  | 2 Kelompok      | 79.210.000  | 2 Kelompok   | 276.337.678   | 2 Kelompok   | 301.208.069   | 2 Kelompok   | 328.316.796   | 10 Kelompok   | 1.076.282.543  |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                    | -                 | 2 Kelompok   | 91.210.000  | 2 Kelompok      | 79.210.000  | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 10 Kelompok   |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                    | -                 | 2 Orang      |             | 2 Orang         |             | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 10 Orang      |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH BALANTAK                                                                             |                                                                                                                            |                   |              | 970.940.599 |                 | 835.971.103 |              | 3.040.681.218 |              | 3.314.342.528 |              | 3.612.633.355 |               | 11.774.568.804 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                       | 100%              | 100 %        | 40.494.799  | 20 %            | 46.039.199  | 40 %         | 90.681.760    | 60 %         | 98.843.118    | 80 %         | 107.738.999   | 100 %         | 383.797.875    |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                    | 100%              | 100 %        |             | 20 %            |             | 40 %         |               | 60 %         |               | 80 %         |               | 100 %         |                |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | - Administrasi persuratan                                                                                                  | 100%              | 1 Paket      | 40.494.799  | 1 Paket         | 46.039.199  | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Alat Tulis kantor                                                                                                        | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Cetak dan penggandaan                                                                                                    | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                      | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Komponen instalasi listrik                                                                                               | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Makanan dan minuman rapat                                                                                                | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                              | (7)                | (10)         | (11)        | (12)         | (13)        | (14)         | (15)        | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)          | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                   | 100%               | 100 %        | 161.471.800 | 20 %         | 220.680.704 | 40 %         | 181.363.520 | 60 %         | 197.686.237   | 80 %         | 215.477.998   | 100 %         | 976.680.258   |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                      | 100%               | 1 Paket      | 122.556.200 | 1 Paket      | 181.494.704 | 1 Paket      |             | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                       | 100%               | 100 %        | 38.915.600  | 100 %        | 39.186.000  | 100 %        |             | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %         |               |      |
|     |     |     | 01 02 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                         | 100%               | 1 Tahun      |             | 1 Tahun      |             | 1 Tahun      |             | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               |               |               |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                         | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                       | Rp. 49.471.923     | 3 %          | 28.960.000  | 3 %          | 9.960.000   | 3 %          | 299.008.118 | 3 %          | 325.918.849   | 3 %          | 355.251.545   | 15 %          | 1.019.098.512 |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi kelengkapan persyaratan URKT IUPHHK-HA/HT                                                         | 2 Unit             | 1 Unit       | 28.960.000  | 15 Unit      | 9.960.000   | 1 Unit       |             | 1 Unit       |               | 1 Unit       |               | 1 Unit        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUPHHK                                                            | -                  | 19 Unit      |             | 2 Unit       |             | 4 Unit       |             | 4 Unit       |               | 4 Unit       |               | 33 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK                                                                          | -                  | 10 Unit      |             | 7 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |               | 6 Unit       |               | 35 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -                  | 9 Unit       |             | 4 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |               | 6 Unit       |               | 31 Unit       |               |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                     | 1 Dokumen          | 1 Dok        | 58.736.000  | 1 Dok        | 57.166.000  | 1 Dok        | 276.337.678 | 1 Dok        | 301.208.069   | 1 Dok        | 328.316.796   | 5 Dok         | 1.021.764.543 |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPHJPD                                                                                                                 | -                  | 1 Dok        | 58.736.000  | 1 Dok        | 57.166.000  | 1 Dok        |             | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                              | -                  | 0 Hektar     |             | 0 Hektar     |             | 100 Hektar   |             | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 300 Ha        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                      | -                  | 25 Km        |             | 25 Km        |             | 50 Km        |             | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 200 Km        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                       | -                  | 20 Lembar    |             | 20 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 70 Lembar     |               |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021       | 26 hotspot         | 2 %          | 33.352.800  | 3,2 %        | 27.430.800  | 2 %          | 299.008.118 | 2 %          | 325.918.849   | 2 %          | 355.251.545   | 11,2 %        | 1.040.962.112 |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                             | -                  | 5 Orang      | 33.352.800  | 10 Orang     | 27.430.800  | 5 Orang      |             | 5 Orang      |               | 5 Orang      |               | 30 Orang      |               |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)                    | 25 Kasus           | 5 %          | 49.280.000  | 5 %          | 36.330.000  | 5 %          | 367.019.438 | 5 %          | 400.051.188   | 5 %          | 436.055.794   | 5 %           |               |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan                                                     | -                  | 10 Kali      | 49.280.000  | 10 Kali      | 36.330.000  | 12 Kali      |             | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 56 Kali       |               |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                | 485.866,925 Hektar | 150 Hektar   | 474.474.400 | 150 Hektar   | 379.254.600 | 175 Hektar   | 974.587.229 | 200 Hektar   | 1.062.300.080 | 250 Hektar   | 1.157.907.087 | 925 Hektar    | 4.048.523.397 |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rancangan Teknik RHL                                                                                            | -                  | 1 Dok        | 474.474.400 | 0 Dok        | 379.254.600 | 1 Dok        |             | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 4 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                             | -                  | 150 Hektar   |             | 150 Hektar   |             | 175 Hektar   |             | 200 Hektar   |               | 250 Hektar   |               | 925 Hektar    |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                            |                    | 50.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 130.000 Bibit |               |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                         | (6)                                                                                                                             | (7)       | (10)         | (11)        | (12)       | (13)          | (14)         | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)         | (21)          | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                  | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                      | -         | 2.000 Hektar | 38.298.000  | 0 Hektar   | 35.198.000    | 2.000 Hektar | 276.337.678   | 2.000 Hektar | 301.208.069   | 2.000 Hektar | 328.316.796   | 8.000 Hektar | 979.358.543   |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                         | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                             | -         | 2.000 Hektar | 38.298.000  | 0 Hektar   | 35.198.000    | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 8.000 Hektar |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                      | -         | 4 Lokasi     |             | 1 Lokasi   |               | 4 Lokasi     |               | 4 Lokasi     |               | 4 Lokasi     |               | 17 Lokasi    |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                  | -         | 1 Lokasi     |             | 0 Lokasi   |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 4 Lokasi     |               |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM         | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                     | -         | 2 Kelompok   | 85.872.800  | 2 Kelompok | 23.911.800    | 2 Kelompok   | 276.337.678   | 2 Kelompok   | 301.208.069   | 2 Kelompok   | 328.316.796   | 10 Kelompok  | 1.015.647.143 |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                             | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                         | -         | 2 Kelompok   | 85.872.800  | 2 Kelompok | 23.911.800    | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 10 Kelompok  |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                         | -         | 1 Orang      |             | 2 Orang    |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 9 Orang      |               |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH PULAU PELING                                       |                                                                                                                                 |           |              | 704.711.850 |            | 1.208.804.852 |              | 2.265.593.860 |              | 2.469.497.308 |              | 2.691.752.066 |              | 9.340.359.936 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                  | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                            | 100%      | 20 %         | 33.075.600  | 40 %       | 155.808.652   | 60 %         | 90.681.760    | 80 %         | 98.843.118    | 100 %        | 107.738.999   | 100 %        | 486.148.129   |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                         | 100%      | 100 %        |             | 40 %       |               | 60 %         |               | 80 %         |               | 100 %        |               | 100 %        |               |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                    | -Administrasi persuratan                                                                                                        | 100%      | 1 Paket      | 33.075.600  | 1 Paket    | 155.808.652   | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Alat Tulis kantor                                                                                                              | 100%      | 1 Paket      |             | 1 Paket    |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Cetak dan pengandaan                                                                                                           | 100%      | 1 Paket      |             | 1 Paket    |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                            | 100%      | 1 Paket      |             | 1 Paket    |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Komponen instalasi listrik                                                                                                     | 100%      | 1 Paket      |             | 1 Paket    |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                      | 100%      | 1 Paket      |             | 1 Paket    |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR           | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                  | 100%      | 20 %         | 138.513.350 | 40 %       | 591.571.700   | 60 %         | 181.363.520   | 80 %         | 197.686.237   | 100 %        | 215.477.998   | 100 %        | 1.324.612.804 |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                     | 100%      | 1 Paket      | 107.310.000 | 1 Paket    | 558.179.000   | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |              |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                      | 100%      | 100 %        | 31.203.350  | 100 %      | 33.392.700    | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %        |               |      |
|     |     |     | 01 21 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                        | 100%      | 1 Tahun      |             | 1 Tahun    |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               |              |               |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN       | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                      | -         | 3 %          | 26.500.000  | 3 %        | 2.560.000     | 3 %          | 294.474.030   | 3 %          | 320.976.693   | 3 %          | 349.864.595   | 15 %         | 994.375.318   |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK                                                          | -         | 2 Unit       | 26.500.000  | 2 Unit     | 2.560.000     | 0 Unit       |               | 0 Unit       |               | 0 Unit       |               | 4 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK                                                                         | -         | 2 Unit       |             | 2 Unit     |               | 2 Unit       |               | 2 Unit       |               | 2 Unit       |               | 10 Unit      |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara terth | -         | 0 Unit       |             | 0 Unit     |               | 2 Unit       |               | 2 Unit       |               | 2 Unit       |               | 6 Unit       |               |      |
|     |     |     | 01 22    | FLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                               | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                    | 1 Dokumen | 1 Dok        | 61.956.000  | 1 Dok      | 39.456.000    | 1 Dok        | 276.337.678   | 1 Dok        | 301.208.069   | 1 Dok        | 328.316.796   | 5 Dok        | 1.007.274.543 |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan               | - Dokumen RPHJPD                                                                                                                | -         | 1 Dok        | 61.956.000  | 1 Dok      | 39.456.000    | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok        |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                             | -         | 0 Hektar     |             | 100 Hektar |               | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 400 Ha       |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                     | -         | 25 Km        |             | 0 Km       |               | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 175 Km       |               |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                      | -         | 20 Lembar    |             | 11 Lembar  |               | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 61 Lembar    |               |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                        | (7)               | (10)         | (11)        | (12)            | (13)          | (14)         | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021 | 24 hotspot        | 2 %          | 18.222.000  | 2 %             | 9.539.700     | 2 %          | 276.337.678   | 2 %          | 301.208.069   | 2 %          | 328.316.796   | 9,58 %        | 933.624.243    |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                       | -                 | 5 Orang      | 18.222.000  | 5 Orang         | 9.539.700     | 5 Orang      |               | 5 Orang      |               | 5 Orang      |               | 25 Orang      |                |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan pengadilan                 | 18 Kasus          | 5 %          | 44.826.800  | 5 %             | 49.169.800    | 5 %          | 321.678.558   | 5 %          | 350.629.628   | 5 %          | 382.186.295   | 25 %          | 1.148.491.082  |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Prekuersi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan merusak sumberdaya hutan                                                 | -                 | 10 Kali      | 44.826.800  | 12 Kali         | 49.169.800    | 10 Kali      |               | 10 Kali      |               | 10 Kali      |               | 52 Kali       |                |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                          | 307.213,11 Hektar | 50 Hektar    | 303.293.300 | 50 Hektar       | 305.490.000   | 50 Hektar    | 548.382.958   | 100 Hektar   | 597.737.424   | 100 Hektar   | 651.533.792   | 350 Hektar    | 2.406.437.474  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rancangan Teknik RHL                                                                                      | -                 | 1 Dok        | 303.293.300 | 0 Dok           | 305.490.000   | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 4 Dok         |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                       | -                 | 50 Hektar    |             | 50 Hektar       |               | 50 Hektar    |               | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 350 Hektar    |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                      |                   | 50.370 Bibit |             | 20.000 Bibit    |               | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 130.370 Bibit |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                 | -                 | -            | -           | 3.150,00 Hektar | -             | 250 Hektar   | -             | 250 Hektar   | -             | 250 Hektar   | -             | 3.900 Hektar  | -              |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                        | -                 | -            | -           | 3.150,00 Hektar | -             | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 9.150 Hektar  |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                 | -                 | -            |             | 2 Lokasi        |               | 2 Lokasi     |               | 2 Lokasi     |               | 2 Lokasi     |               | 8 Lokasi      |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                             | -                 | -            |             | 2 Lokasi        |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 5 Lokasi      |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                | -                 | 2 Kelompok   | 78.324.800  | 2 Kelompok      | 55.209.000    | 2 Kelompok   | 276.337.678   | 2 Kelompok   | 301.208.069   | 2 Kelompok   | 328.316.796   | 10 Kelompok   | 1.039.396.343  |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                    | -                 | 2 Kelompok   | 78.324.800  | 2 Kelompok      | 55.209.000    | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 10 Kelompok   |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                    | -                 | 1 Orang      |             | 2 Orang         |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 9 Orang       |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH TEPEASA MAROSO                                                                       |                                                                                                                            |                   |              | 666.441.620 |                 | 1.194.369.300 |              | 2.587.272.419 |              | 2.820.126.937 |              | 3.073.938.361 |               | 10.342.148.636 |      |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                       | 100%              | 20 %         | 64.335.450  | 40 %            | 139.407.700   | 60 %         | 90.681.760    | 80 %         | 98.843.118    | 100 %        | 107.738.999   | 100 %         | 501.007.027    |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                    | 100%              | 20 %         |             | 40 %            |               | 60 %         |               | 80 %         |               | 100 %        |               | 100 %         |                |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | -Administrasi persuratan                                                                                                   | 100%              | 1 Paket      | 64.335.450  | 1 Paket         | 139.407.700   | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Alat Tulis kantor                                                                                                         | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Cetak dan penggandaan                                                                                                     | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                       | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Komponen instalasi listrik                                                                                                | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                 | 100%              | 1 Paket      |             | 1 Paket         |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                             | 100%              | 20 %         | 106.324.503 | 40 %            | 86.299.800    | 60 %         | 136.022.640   | 80 %         | 148.264.677   | 100 %        | 161.608.498   | 100 %         | 638.520.119    |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                | 100%              | 1 Paket      | 90.511.803  | 1 Paket         | 67.775.000    | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                 | 100%              | 100 %        | 15.812.700  | 100 %           | 18.524.800    | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %         |                |      |
|     |     |     | 01 21 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                   | 100%              | 1 Tahun      |             | 1 Tahun         |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               |               |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                              | (7)               | (10)         | (11)        | (12)         | (13)        | (14)         | (15)        | (16)         | (17)        | (18)         | (19)        | (20)          | (21)          | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------|
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                         | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                       | Rp. 49.471.923    | 3 %          | 27.300.000  | 3 %          | 8.049.000   | 3 %          | 276.337.678 | 3 %          | 301.208.069 | 3 %          | 328.316.796 | 15 %          | 941.211.543   |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK                                                           | 3 IUIPHHK         | 0 Unit       | 27.300.000  | 0 Unit       | 8.049.000   | 0 Unit       |             | 0 Unit       |             | 0 Unit       |             | 0 Unit        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK                                                                          | 2 IPHHBK          | 2 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |             | 26 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib | -                 | 2 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |             | 6 Unit       |             | 26 Unit       |               |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                     | 1 Dokumen         | 1 Dok        | 74.045.000  | 1 Dok        | 36.000.000  | 1 Dok        | 321.678.558 | 1 Dok        | 350.629.628 | 1 Dok        | 382.186.295 | 5 Dok         | 1.164.539.482 |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan                                                 | - Dokumen RPHJPH                                                                                                                 | -                 | 0 Dok        | 74.045.000  | 1 Dok        | 36.000.000  | 1 Dok        |             | 1 Dok        |             | 1 Dok        |             | 4 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                              | -                 | 50 Hektar    |             | 100 Hektar   |             | 100 Hektar   |             | 100 Hektar   |             | 100 Hektar   |             | 450 Ha        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                      | -                 | 0 Km         |             | 50 Km        |             | 50 Km        |             | 50 Km        |             | 50 Km        |             | 200 Km        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                       | -                 | 20 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 60 Lembar     |               |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021       | 24 hotspot        | 2 %          | 51.100.000  | 2,5 %        | 27.199.000  | 2 %          | 276.337.678 | 2 %          | 301.208.069 | 2 %          | 328.316.796 | 10,5 %        | 984.161.543   |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                             | -                 | 8 Orang      | 51.100.000  | 8 Orang      | 27.199.000  | 8 Orang      |             | 8 Orang      |             | 8 Orang      |             | 40 Orang      |               |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)                    | 18 Kasus          | 5 %          | 65.064.667  | 5 %          | 23.799.000  | 5 %          | 276.337.678 | 5 %          | 301.208.069 | 5 %          | 328.316.796 | 5 %           | 994.726.210   |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan                                                     | -                 | 12 Kali      | 65.064.667  | 12 Kali      | 23.799.000  | 12 Kali      |             | 12 Kali      |             | 12 Kali      |             | 60 Kali       |               |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                | 392.769,66 Hektar | 50 Hektar    | 130.150.000 | 150 Hektar   | 562.645.000 | 50 Hektar    | 611.860.190 | 100 Hektar   | 666.927.607 | 100 Hektar   | 726.951.092 | 450 Hektar    | 2.698.533.888 |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                                                                     | -                 | 2 Dok        | 130.150.000 | 1 Dok        | 562.645.000 | 1 Dok        |             | 1 Dok        |             | 1 Dok        |             | 6 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                             | -                 | 50 Ha        |             | 150 Ha       |             | 50 Ha        |             | 100 Ha       |             | 100 Ha       |             | 450 Ha        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                            | -                 | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 100.000 Bibit |               |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                       | -                 | 500 Hektar   | 55.767.000  | 0 Hektar     | 47.980.800  | 500 Hektar   | 276.337.678 | 500 Hektar   | 301.208.069 | 500 Hektar   | 328.316.796 | 2.000 Hektar  | 1.009.610.343 |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                              | -                 | 500 Hektar   | 55.767.000  | 0 Hektar     | 47.980.800  | 500 Hektar   |             | 500 Hektar   |             | 500 Hektar   |             | 2.000 Hektar  |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                       | -                 | 2 Lokasi     |             | 0 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 8 Lokasi      |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                   | -                 | 2 Lokasi     |             | 0 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 8 Lokasi      |               |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | -                 | 3 Kelompok   | 92.355.000  | 2 Kelompok   | 262.989.000 | 3 Kelompok   | 321.678.558 | 3 Kelompok   | 350.629.628 | 3 Kelompok   | 382.186.295 | 14 Kelompok   | 1.409.838.482 |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                          | -                 | 0 Kelompok   | 92.355.000  | 2 Kelompok   | 262.989.000 | 3 Kelompok   |             | 3 Kelompok   |             | 3 Kelompok   |             | 11 Kelompok   |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                          | -                 | 2 Orang      |             | 2 Orang      |             | 2 Orang      |             | 2 Orang      |             | 2 Orang      |             | 10 Orang      |               |      |

| (1) | (2) | (3) | (4) |    | (5)                                                      | (6)                                                                                                                        | (7)                                      | (10)      | (11)                                                                                          | (12)                                                                         | (13)          | (14)       | (15)          | (16)       | (17)          | (18)       | (19)          | (20)       | (21)           | (22)    |           |          |  |                                                         |
|-----|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---------|-----------|----------|--|---------------------------------------------------------|
|     |     |     |     |    | UPTD KPH TEPO ASA AROA                                   |                                                                                                                            |                                          |           | 759.177.181                                                                                   |                                                                              | 1.147.432.218 |            | 2.587.272.419 |            | 2.820.126.937 |            | 3.073.938.361 |            | 10.387.947.115 | -       |           |          |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN               | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                       | 100%                                     | 20 %      | 84.211.675                                                                                    | 40 %                                                                         | 77.525.850    | 60 %       | 90.681.760    | 80 %       | 98.843.118    | 100 %      | 107.738.999   | 100 %      | 459.001.402    |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                    | 100%                                     | 20 %      |                                                                                               | 40 %                                                                         |               | 60 %       |               | 80 %       |               | 100 %      |               | 100 %      |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 01 | 22                                                       | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                                                   | -Administrasi persuratan                 | 100%      | 1 Paket                                                                                       | 84.211.675                                                                   | 1 Paket       | 77.525.850 | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket        |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            | -Alat Tulis kantor                       | 100%      | 1 Paket                                                                                       |                                                                              | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            | -Cetak dan penggandaan                   | 100%      | 1 Paket                                                                                       |                                                                              | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            | -Pembayaran listrik, telepon dan air     | 100%      | 1 Paket                                                                                       |                                                                              | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            | -Komponen instalasi listrik              | 100%      | 1 Paket                                                                                       |                                                                              | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            | -Makanan dan minuman rapat               | 100%      | 1 Paket                                                                                       |                                                                              | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            | 1 Paket       |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR        | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                             | 100%                                     | 100 %     | 168.301.047                                                                                   | 40 %                                                                         | 143.277.568   | 60 %       | 181.363.520   | 80 %       | 197.686.237   | 100 %      | 215.477.998   | 100 %      | 906.106.369    |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | 01                                                                                                                         | 02                                       | 12        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                  | 100%          | 1 Paket    | 140.430.250   | 1 Paket    | 116.420.000   | 1 Paket    |               | 1 Paket    |                | 1 Paket |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor              |
|     |     |     | 01  | 21 | 30                                                       | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100%      | 1 Tahun                                                                                       |                                                                              | 1 Tahun       |            | 1 Tahun       |            | 1 Tahun       |            | 1 Tahun       |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 21 | PENGLOLAAN HUTAN (termasuk Industri) dan USAHA KEHUTANAN | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                 | Rp. 643.135.000                          | 3 %       | 26.350.000                                                                                    | 3 %                                                                          | 5.250.000     | 3 %        | 276.337.678   | 3 %        | 301.208.069   | 3 %        | 328.316.796   | 15 %       | 937.462.543    |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | 01                                                                                                                         | 21                                       | 04        | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK       | 6 IUIPHHK     | 6 Unit     | 26.350.000    | 1 Unit     | 5.250.000     | 1 Unit     |               | 1 Unit     |                | 1 Unit  |           | 10 Unit  |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 22 | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                            | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                               | 1 Dokumen                                | 1 Dok     | 94.000.000                                                                                    | 1 Dok                                                                        | 28.700.000    | 1 Dok      | 276.337.678   | 1 Dok      | 301.208.069   | 1 Dok      | 328.316.796   | 5 Dok      | 1.028.562.543  |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | 01                                                                                                                         | 22                                       | 02        | Inventarisasi dan Pemantauan                                                                  | - Dokumen RPHJpd                                                             | -             | 0          | 94.000.000    | 1 Dok      | 28.700.000    | 1 Dok      |               | 1 Dok      |                | 1 Dok   |           | 4 Dok    |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                           | -                                                                            | 48 Hektar     |            | 100 Hektar    |            | 100 Hektar    |            | 100 Hektar    |            | 100 Hektar     |         | 448 Ha    |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                   | -                                                                            | - Km          |            | 50 Km         |            | 50 Km         |            | 50 Km         |            | 50 Km          |         | 200 Km    |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                    | -                                                                            | - Lembar      |            | 10 Lembar     |            | 10 Lembar     |            | 10 Lembar     |            | 10 Lembar      |         | 40 Lembar |          |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 24 | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                     | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021 | 316 hotspot                              | 2 %       | 56.350.000                                                                                    | 1,9 %                                                                        | 58.800.000    | 2 %        | 276.337.678   | 2 %        | 301.208.069   | 2 %        | 328.316.796   | 9,9 %      | 1.021.012.543  |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | 01                                                                                                                         | 24                                       | 01        | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                         | -             | 6 Orang    | 56.350.000    | 6 Orang    | 58.800.000    | 6 Orang    |               | 6 Orang    |                | 6 Orang |           | 30 Orang |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 25 | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LKI)             | 241 Kasus                                | 5 %       | 66.950.000                                                                                    | 5 %                                                                          | 29.950.000    | 5 %        | 276.337.678   | 5 %        | 301.208.069   | 5 %        | 328.316.796   | 25 %       | 1.002.762.543  |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | 01                                                                                                                         | 25                                       | 01        | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan | -             | 12 Kali    | 66.950.000    | 12 Kali    | 29.950.000    | 12 Kali    |               | 12 Kali    |                | 12 Kali |           | 60 Kali  |  |                                                         |
|     |     |     | 01  | 26 | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                       | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                          | 2.948.098,48 Hektar                      | 50 Hektar | 113.675.000                                                                                   | 50 Hektar                                                                    | 546.825.000   | 100 Hektar | 611.860.190   | 150 Hektar | 666.927.607   | 200 Hektar | 726.951.092   | 550 Hektar | 2.666.238.888  |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          | 01                                                                                                                         | 26                                       | 01        | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                 | -             | 1 Dok      | 113.675.000   | 1 Dok      | 546.825.000   | 1 Dok      |               | 1 Dok      |                | 1 Dok   |           | 5 Dok    |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                          | -                                                                            | 50 Ha         |            | 50 Ha         |            | 100 Ha        |            | 150 Ha        |            | 200 Ha         |         | 550 Ha    |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    |                                                          |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |
|     |     |     |     |    | </                                                       |                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                               |                                                                              |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |           |          |  |                                                         |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                         | (6)                                                                                                                              | (7)             | (10)        | (11)        | (12)            | (13)          | (14)        | (15)          | (16)        | (17)          | (18)        | (19)          | (20)         | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                  | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                       | 8.089,55 Ha     | 810 Hektar  | 74.153.188  | 2.003,00 Hektar | 220.580.800   | 500 Hektar  | 321.678.558   | 500 Hektar  | 350.629.628   | 500 Hektar  | 382.186.295   | 4.313 Hektar | 1.349.228.470  |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                         | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                              | -               | 810 Hektar  | 74.153.188  | 2.003,00 Hektar | 220.580.800   | 500 Hektar  |               | 500 Hektar  |               | 500 Hektar  |               | 4.313 Hektar |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                       | -               | 3 Lokasi    |             | 2 Lokasi        |               | 2 Lokasi    |               | 2 Lokasi    |               | 2 Lokasi    |               | 11 Lokasi    |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                   | -               | 4 Lokasi    |             | 1 Lokasi        |               | 1 Lokasi    |               | 1 Lokasi    |               | 1 Lokasi    |               | 8 Lokasi     |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM         | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | -               | 28 Kelompok | 75.186.271  | 28 Kelompok     | 36.523.000    | 28 Kelompok | 276.337.678   | 28 Kelompok | 301.208.069   | 28 Kelompok | 328.316.796   | 140 Kelompok | 1.017.571.814  |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                             | - Jumlah Kelas Kelompok Tari Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                          | -               | 0 Kelompok  | 75.186.271  | 2 Kelompok      | 36.523.000    | 2 Kelompok  |               | 2 Kelompok  |               | 2 Kelompok  |               | 8 Kelompok   |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                          | -               | 3 Orang     |             | 2 Orang         |               | 2 Orang     |               | 2 Orang     |               | 2 Orang     |               | 11 Orang     |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH GUNUNG DAKO                                        |                                                                                                                                  |                 |             | 863.056.704 |                 | 2.736.721.656 |             | 2.587.272.419 |             | 2.820.126.937 |             | 3.073.938.361 |              | 12.081.116.076 | -    |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                  | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                             | 100%            | 100 %       | 24.899.200  | 40 %            | 164.264.370   | 60 %        | 90.681.760    | 80 %        | 98.843.118    | 100 %       | 107.738.999   | 100 %        | 486.427.447    |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                          | 100%            | 100 %       |             | 100 %           |               | 100 %       |               | 100 %       |               | 100 %       |               | 100 %        |                |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                    | -Administrasi persuratan                                                                                                         | 100%            | 1 Paket     | 24.899.200  | 1 Paket         | 164.264.370   | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Alat Tulis kantor                                                                                                               | 100%            | 1 Paket     |             | 1 Paket         |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Cetak dan pengandaan                                                                                                            | 100%            | 1 Paket     |             | 1 Paket         |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                             | 100%            | 1 Paket     |             | 1 Paket         |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Komponen instalasi listrik                                                                                                      | 100%            | 1 Paket     |             | 1 Paket         |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                       | 100%            | 1 Paket     |             | 1 Paket         |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR           | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                                   | 100%            | 100 %       | 138.013.400 | 40 %            | 689.597.686   | 60 %        | 226.704.400   | 80 %        | 247.107.796   | 100 %       | 269.347.497   | 100 %        | 1.570.770.779  |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                      | 100%            | 1 Paket     | 88.000.000  | 1 Paket         | 579.342.886   | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               | 1 Paket     |               |              |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                       | 100%            | 100 %       | 50.013.400  | 100 %           | 110.254.800   | 100 %       |               | 100 %       |               | 100 %       |               | 100 %        |                |      |
|     |     |     | 01 21 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                         | 100%            | 1 Tahun     |             | 1 Tahun         |               | 1 Tahun     |               | 1 Tahun     |               | 1 Tahun     |               |              |                |      |
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN       | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkatkan setiap Tahun                                    | Rp. 643.135.000 | 3 %         | 34.256.704  | 3 %             | 27.200.000    | 3 %         | 276.337.678   | 3 %         | 301.208.069   | 3 %         | 328.316.796   | 15 %         | 967.319.247    |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan | - Pemberian data dan informasi kelengkapan persyaratan URKT IUPHHK-HA/HT                                                         | -               | 1 Unit      | 34.256.704  | 1 Unit          | 27.200.000    | 1 Unit      |               | 1 Unit      |               | 1 Unit      |               | 1 Unit       |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUPHHK                                                            | -               | 13 Unit     |             | 3 Unit          |               | 3 Unit      |               | 3 Unit      |               | 3 Unit      |               | 25 Unit      |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK                                                                          | -               | 18 Unit     |             | 12 Unit         |               | 32 Unit     |               | 32 Unit     |               | 32 Unit     |               | 126 Unit     |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib |                 | 4 Unit      |             | 13 Unit         |               | 32 Unit     |               | 32 Unit     |               | 32 Unit     |               | 113 Unit     |                |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                               | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                     | 1 Dokumen       | 1 Dok       | 132.745.000 | 1 Dok           | 69.745.000    | 1 Dok       | 276.337.678   | 1 Dok       | 301.208.069   | 1 Dok       | 328.316.796   | 5 Dok        | 1.108.352.543  |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan                                | - Dokumen RPHJPD                                                                                                                 | -               | 1 Dok       | 132.745.000 | 1 Dok           | 69.745.000    | 1 Dok       |               | 1 Dok       |               | 1 Dok       |               | 5 Dok        |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                              |                 | 0 Hektar    |             | 0 Hektar        |               | 100 Hektar  |               | 100 Hektar  |               | 100 Hektar  |               | 300 Ha       |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                      |                 | 75 Km       |             | 75 Km           |               | 50 Km       |               | 50 Km       |               | 50 Km       |               | 300 Km       |                |      |
|     |     |     |          |                                                             | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                       |                 | 0 Lembar    |             | 0 Lembar        |               | 10 Lembar   |               | 10 Lembar   |               | 10 Lembar   |               | 30 Lembar    |                |      |



| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                        | (7)                 | (10)         | (11)          | (12)          | (13)          | (14)         | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)           | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021 | 316 hotspot         | 2 %          | 31.300.400    | 3,2 %         | 26.812.500    | 2 %          | 276.337.678   | 2 %          | 301.208.069   | 2 %          | 328.316.796   | 11,2 %        | 963.975.443    |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                       |                     | 5 Orang      | 31.300.400    | 10 Orang      | 26.812.500    | 10 Orang     |               | 10 Orang     |               | 10 Orang     |               | 45 Orang      |                |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian II-KI             | 241 Kasus           | 5 %          | 45.570.000    | 5 %           | 76.200.000    | 5 %          | 276.337.678   | 5 %          | 301.208.069   | 5 %          | 328.316.796   | 25 %          | 1.027.632.543  |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Prekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan merusak sumberdaya hutan                                                 |                     | 12 Kali      | 45.570.000    | 12 Kali       | 76.200.000    | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 60 Kali       |                |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                          | 2.948.098,48 Hektar | 50 Hektar    | 324.722.000   | 150 Hektar    | 1.163.309.100 | 150 Hektar   | 611.860.190   | 150 Hektar   | 666.927.607   | 150 Hektar   | 726.951.092   | 650 Hektar    | 3.493.769.988  |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                                                               | -                   | 1 Dok        | 324.722.000   | 2 Dok         | 1.163.309.100 | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 6 Dok         |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                       | -                   | 50 Ha        |               | 250 Ha        |               | 150 Ha       |               | 150 Ha       |               | 150 Ha       |               | 750 Ha        |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                      | -                   | 25.000 Bibit |               | 20.000 Bibit  |               | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 105.000 Bibit |                |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                 | 8.089,55 Ha         | 2.000 Hektar | 37.782.000    | 722,02 Hektar | 55.618.000    | 2.000 Hektar | 276.337.678   | 2.000 Hektar | 301.208.069   | 2.000 Hektar | 328.316.796   | 8.722 Hektar  | 999.262.543    |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                        | -                   | 819 Hektar   | 37.782.000    | 722,02 Hektar | 55.618.000    | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 2.000 Hektar |               | 7.541 Hektar  |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                 | -                   | 1 Lokasi     |               | 5 Lokasi      |               | 2 Lokasi     |               | 2 Lokasi     |               | 2 Lokasi     |               | 12 Lokasi     |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                             | -                   | 0 Lokasi     |               | 3 Lokasi      |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 6 Lokasi      |                |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                | -                   | 28 Kelompok  | 93.768.000    | 28 Kelompok   | 463.975.000   | 28 Kelompok  | 276.337.678   | 28 Kelompok  | 301.208.069   | 28 Kelompok  | 328.316.796   | 140 Kelompok  | 1.463.605.543  |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                    | -                   | 2 Kelompok   | 93.768.000    | 3 Kelompok    | 463.975.000   | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 11 Kelompok   |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                    | -                   | 2 Orang      |               | 2 Orang       |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 10 Orang      |                |      |
|     |     |     |          | UPTD KPH POGOGUL                                                                              |                                                                                                                            |                     |              | 1.107.740.465 |               | 1.215.902.505 |              | 3.040.681.218 |              | 3.314.342.528 |              | 3.612.633.355 |               | 12.291.300.072 |      |
|     |     |     | 01 01    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    | - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD                                                                       | 100%                | 20 %         | 38.679.815    | 40 %          | 45.492.319    | 60 %         | 90.681.760    | 80 %         | 98.843.118    | 100 %        | 107.738.999   | 100 %         | 381.436.011    |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran                                                                    | 100%                | 20 %         |               | 40 %          |               | 60 %         |               | 80 %         |               | 100 %        |               | 100 %         |                |      |
|     |     |     | 01 01 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                                                      | - Administrasi persuratan                                                                                                  | 100%                | 1 Paket      | 38.679.815    | 1 Paket       | 45.492.319    | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Alat Tulis kantor                                                                                                         | 100%                | 1 Paket      |               | 1 Paket       |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Cetak dan penggandaan                                                                                                     | 100%                | 1 Paket      |               | 1 Paket       |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Pembayaran listrik, telepon dan air                                                                                       | 100%                | 1 Paket      |               | 1 Paket       |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Komponen instalasi listrik                                                                                                | 100%                | 1 Paket      |               | 1 Paket       |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | -Makanan dan minuman rapat                                                                                                 | 100%                | 1 Paket      |               | 1 Paket       |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     | 01 02    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                             | - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah                                             | 100%                | 20 %         | 183.189.650   | 40 %          | 373.024.186   | 60 %         | 136.022.640   | 80 %         | 148.264.677   | 100 %        | 161.608.498   | 100 %         | 1.002.109.652  |      |
|     |     |     | 01 02 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                | 100%                | 1 Paket      | 102.300.000   | 1 Paket       | 294.060.000   | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               | 1 Paket      |               |               |                |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                 | 100%                | 100 %        | 80.889.650    | 100 %         | 78.964.186    | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %        |               | 100 %         |                |      |
|     |     |     | 01 21 30 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                   | 100%                | 1 Tahun      |               | 1 Tahun       |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               | 1 Tahun      |               |               |                |      |

| (1) | (2) | (3) | (4)      | (5)                                                                                           | (6)                                                                                                                               | (7)                 | (10)         | (11)        | (12)         | (13)        | (14)         | (15)        | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)          | (21)          | (22) |
|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
|     |     |     | 01 21    | PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN                                         | Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun                                        | Rp. 643.135.000     | 3 %          | 28.650.000  | 3 %          | 13.950.000  | 3 %          | 276.337.678 | 3 %          | 301.208.069   | 3 %          | 328.316.796   | 15 %          | 948.462.543   |      |
|     |     |     | 01 21 04 | Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan                                   | - Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK                                                            | -                   | 12 Unit      | 28.650.000  | 0 Unit       | 13.950.000  | 0 Unit       |             | 0 Unit       |               | 0 Unit       |               | 12 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HBBK                                                                           | -                   | 36 Unit      |             | 12 Unit      |             | 12 Unit      |             | 12 Unit      |               | 12 Unit      |               | 84 Unit       |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara terarah | -                   | 12 Unit      |             | 12 Unit      |             | 12 Unit      |             | 12 Unit      |               | 12 Unit      |               | 60 Unit       |               |      |
|     |     |     | 01 22    | PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN                                                                 | Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah                                                      | 1 Dokumen           | 1 Dok        | 144.799.000 | 1 Dok        | 119.095.000 | 1 Dok        | 276.337.678 | 1 Dok        | 301.208.069   | 1 Dok        | 328.316.796   | 5 Dok         | 1.169.756.543 |      |
|     |     |     | 01 22 02 | Inventarisasi dan Pemantauan                                                                  | - Dokumen RPHJPD                                                                                                                  | -                   | 1 Dok        | 144.799.000 | 1 Dok        | 119.095.000 | 1 Dok        |             | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan di Wilayah KPH                                                               | -                   | 100 Hektar   |             | 0 Hektar     |             | 100 Hektar   |             | 100 Hektar   |               | 100 Hektar   |               | 400 Ha        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Penataan Batas Blok/Petak                                                                                                       | -                   | 75 Km        |             | 50 Km        |             | 50 Km        |             | 50 Km        |               | 50 Km        |               | 275 Km        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data Spasial Wilayah KPH                                                                                                        | -                   | 50 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |             | 10 Lembar    |               | 10 Lembar    |               | 90 Lembar     |               |      |
|     |     |     | 01 24    | PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM                                                          | Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021        | 316 hotspot         | 2 %          | 38.747.400  | 3,2 %        | 33.547.400  | 2 %          | 276.337.678 | 2 %          | 301.208.069   | 2 %          | 328.316.796   | 11,2 %        | 978.157.343   |      |
|     |     |     | 01 24 01 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                        | - Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                                                              | -                   | 5 Orang      | 38.747.400  | 10 Orang     | 33.547.400  | 5 Orang      |             | 5 Orang      |               | 5 Orang      |               | 30 Orang      |               |      |
|     |     |     | 01 25    | PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                        | Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)                     | 241 Kasus           | 5 %          | 53.460.000  | 5 %          | 41.710.000  | 5 %          | 321.678.558 | 5 %          | 350.629.628   | 5 %          | 382.186.295   | 25 %          | 1.149.664.482 |      |
|     |     |     | 01 25 01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                               | - Prekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan                                                      | -                   | 12 Kali      | 53.460.000  | 12 Kali      | 41.710.000  | 12 Kali      |             | 12 Kali      |               | 12 Kali      |               | 60 Kali       |               |      |
|     |     |     | 01 26    | PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG                                                            | Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun                                 | 2.948.098,48 Hektar | 150 Hektar   | 494.330.600 | 150 Hektar   | 469.528.600 | 150 Hektar   | 974.587.229 | 175 Hektar   | 1.062.300.080 | 200 Hektar   | 1.157.907.087 | 825 Hektar    | 4.158.653.597 |      |
|     |     |     | 01 26 01 | Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air | - Jumlah Dokumen Rencana Teknik Kegiatan RHL                                                                                      | -                   | 1 Dok        | 494.330.600 | 1 Dok        | 469.528.600 | 1 Dok        |             | 1 Dok        |               | 1 Dok        |               | 5 Dok         |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di Wilayah KPH dan DAS                                                              | -                   | 150 Ha       |             | 150 Ha       |             | 150 Ha       |             | 175 Ha       |               | 200 Ha       |               | 825 Ha        |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah bibit penghijauan lingkungan                                                                                             | -                   | 50.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |             | 20.000 Bibit |               | 20.000 Bibit |               | 130.000 Bibit |               |      |
|     |     |     | 01 27    | PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN                                                    | Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun                                                                        | 8.089,55 Ha         | 1.000 Hektar | 37.974.000  | 0 Hektar     | 33.524.000  | 1.000 Hektar | 367.019.438 | 1.000 Hektar | 400.051.188   | 1.000 Hektar | 436.055.794   | 4.000 Hektar  | 1.274.624.420 |      |
|     |     |     | 01 27 01 | Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial                                                           | - Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan                                                               | -                   | 1.000 Hektar | 37.974.000  | 0 Hektar     | 33.524.000  | 1.000 Hektar |             | 1.000 Hektar |               | 1.000 Hektar |               | 4.000 Hektar  |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Data penguasaan lahan non prosedural dalam kawasan hutan                                                                        | -                   | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |             | 2 Lokasi     |               | 2 Lokasi     |               | 10 Lokasi     |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat                                                                                    | -                   | 1 Lokasi     |             | 0 Lokasi     |             | 1 Lokasi     |             | 1 Lokasi     |               | 1 Lokasi     |               | 4 Lokasi      |               |      |
|     |     |     | 01 28    | PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                           | Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya                                       | -                   | 28 Kelompok  | 87.910.000  | 28 Kelompok  | 86.031.000  | 28 Kelompok  | 321.678.558 | 28 Kelompok  | 350.629.628   | 28 Kelompok  | 382.186.295   | 140 Kelompok  | 1.228.435.482 |      |
|     |     |     | 01 28 01 | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan                                                               | - Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat Madya                                                           | -                   | 2 Kelompok   | 87.910.000  | 2 Kelompok   | 86.031.000  | 2 Kelompok   |             | 2 Kelompok   |               | 2 Kelompok   |               | 10 Kelompok   |               |      |
|     |     |     |          |                                                                                               | - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan.                                           | -                   | 2 Orang      |             | 2 Orang      |             | 2 Orang      |             | 2 Orang      |               | 2 Orang      |               | 10 Orang      |               |      |

Tabel Capaian Program Prioritas yang disertai Realisasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021

Perangkat Daerah: DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                             | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                |                   |               |                   |                |                   |                |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                             | PD Penanggung Jawab       |
|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|      |  |                                                                                          |                                                                                     | Tahun 2016                                            |             | Tahun 2017     |               | Tahun 2018     |                   | Tahun 2019    |                   | Tahun 2020     |                   | Tahun 2021     |                   |                                          |                             |                           |
|      |  |                                                                                          |                                                                                     | Capaian                                               | Rp          | Capaian        | Rp            | Capaian        | Rp                | Capaian       | Rp                | Capaian        | Rp                | Capaian        | Rp                | Capaian                                  | Rp                          |                           |
| 01   |  | URUSAN PILIHAN<br>BIDANG URUSAN : ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL                          |                                                                                     |                                                       |             |                |               |                |                   |               |                   |                |                   |                |                   |                                          |                             |                           |
|      |  | DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL                                                      |                                                                                     | 2.314.580.409                                         |             | 17.772.888.043 |               | 29.771.960.965 |                   | 9.761.305.507 |                   | 10.450.300.653 |                   | 11.973.345.585 |                   | 82.044.381.162                           |                             |                           |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                               | - Cakupan layanan administrasi administrasi perkantoran (%)                         | 100%                                                  | 904.456.424 | 20%            | 900.836.939   | 40%            | 1.233.221.239     | 60%           | 1.252.417.060     | 80%            | 1.276.415.053     | 100%           | 1.475.989.685     | 100%                                     | 7.043.336.400               | Sekretariat               |
|      |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                    | - Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                          | 0%                                                    | -           | 20%            | 2.800.000     | 0%             | 0                 | 0%            | 0                 | 0%             | -                 | 40%            | 63.128.800        | 40%                                      | 65.928.800                  | sda                       |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                        | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                     | 100%                                                  | 587.031.200 | 20%            | 1.031.897.300 | 40%            | 2.761.680.002     | 60%           | 2.820.200.257     | 80%            | 2.820.377.000     | 100%           | 2.878.707.000     | 100%                                     | 12.899.892.759              | sda                       |
|      |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                       | - Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya          | 100%                                                  | -           | 20%            | 52.609.215    | 40%            | 49.681.300        | 60%           | 13.589.000        | 80%            | 90.123.000        | 100%           | 135.890.100       | 100%                                     | 341.892.615                 | sda                       |
|      |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan           | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan                      | 100%                                                  | 76.452.000  | 100%           | 274.764.800   | 100%           | 294.780.216       | 100%          | 101.522.350       | 100%           | 135.522.300       | 100%           | 140.522.000       | 100%                                     | 1.023.563.666               | sda                       |
|      |  | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                                 | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas                       | 100%                                                  | 746.640.785 | 100%           | 517.413.189   | 100%           | 550.847.680       | 100%          | 311.471.000       | 100%           | 630.158.000       | 100%           | 759.243.000       | 100%                                     | 3.515.773.654               | sda                       |
|      |  | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan                                          | - Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan | 150 IUP                                               |             | 170 IUP        | 1.583.548.523 | 247 IUP        | 1.859.429.801     |               |                   |                |                   |                |                   | 97 IUP                                   | 7.422.447.924               | Bid. Mineral dan Batubara |
|      |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan                                     | - Jumlah Usaha Pertambangan yang baik                                               |                                                       |             |                |               |                |                   | 86 IUP        | 1.206.954.300     | 91 IUP         | 1.300.954.300     | 97 IUP         | 1.471.561.000     |                                          |                             |                           |
|      |  | - Meningkatnya Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri | 77%                                                                                 |                                                       | 79,56%      | 1.286.672.664  | 91,93%        | 1.697.001.428  |                   |               |                   |                |                   |                | 98%               | 6.813.974.892                            | Bid. Ketenagalistrikan      |                           |
|      |  | - Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga                                            |                                                                                     |                                                       |             |                |               |                | 93%               | 1.182.716.400 | 96%               | 1.249.716.400  | 98%               | 1.397.868.000  |                   |                                          |                             |                           |
|      |  | - Jumlah pemilik usaha ketenagalistrikan yang untuk kepentingan sendiri yang terbina     |                                                                                     |                                                       |             |                |               |                | 150 pemilik usaha |               | 150 pemilik usaha |                | 150 pemilik usaha |                | 450 pemilik usaha |                                          |                             |                           |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)                                 | - Meningkatnya Persentase pemanfaatan EBT                                           | 3%                                                    |             | 3%             | 9.978.932.784 | 5,1%           | 18.323.383.868    |               |                   |                |                   |                | 7,5%              | 33.492.011.202                           | Bid. Energi Baru Terbarukan |                           |
|      |  |                                                                                          | - Persentase pemanfaatan EBT                                                        |                                                       |             |                |               |                | 6,5%              | 1.536.467.550 | 7%                | 1.600.467.000  | 7,5%              | 2.052.760.000  |                   |                                          |                             |                           |

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                     | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | PD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017        |               | Tahun 2018        |               | Tahun 2019        |               | Tahun 2020        |               | Tahun 2021        |               |                                          |               |                     |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | Capaian                                               | Rp | Capaian           | Rp            | Capaian           | Rp            | Capaian           | Rp            | Capaian           | Rp            | Capaian           | Rp            | Capaian                                  | Rp            |                     |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Geologi & Air Tanah              | - Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah<br><br>- Persentase pemanfaatan cekungan air tanah                                                                                                          | 2 titik sumur bor                                     |    | 6 titik sumur bor | 2.143.412.629 | 8 titik sumur bor | 3.001.935.431 |                   |               |                   |               |                   |               |                                          | 9.425.559.250 | Bid. Geologi        |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |    |                   |               |                   |               | 28%               | 1.335.967.590 | 35%               | 1.346.567.600 | 40%               | 1.597.676.000 | 40%                                      |               |                     |
|      |  | Cabang Dinas ESDM Wilayah I                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |    |                   |               |                   |               |                   | 300.000.000   |                   | 317.927.700   |                   | 374.232.480   |                                          | 992.160.180   |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                           |                                                       |    |                   |               |                   |               | 60%               | 96.724.275    | 80%               | 112.500.000   | 100%              | 123.750.000   | 100%                                     | 332.974.275   | Kepala UPT          |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                          |                                                       |    |                   |               |                   |               | 60%               | 123.628.225   | 80%               | 122.000.000   | 100%              | 146.400.000   | 100%                                     | 392.028.225   | sda                 |
|      |  | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan              | - Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah<br>- Jumlah Usaha Pertambangan yang baik                                                                                                        |                                                       |    |                   |               |                   |               | 86 IUP            | 35.235.300    | 91 IUP            | 35.235.300    | 97 IUP            | 42.282.360    | 97 IUP                                   | 112.752.960   | sda                 |
|      |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan         | - Meningkatnya Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan<br>- Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga<br>- Jumlah pemilik usaha ketenagalistrikan yang untuk kepentingan sendiri yang terbina |                                                       |    |                   |               |                   |               | 93%               | 21.223.900    | 96%               | 21.085.000    | 98%               | 27.410.500    | 98%                                      | 69.719.400    | sda                 |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |    |                   |               |                   |               | 150 pemilik usaha |               | 150 pemilik usaha |               | 150 pemilik usaha |               | 450 pemilik usaha                        |               |                     |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)     | - Meningkatnya Persentase pemanfaatan EBT<br>- Persentase pemanfaatan EBT                                                                                                                                                |                                                       |    |                   |               |                   |               | 6,5%              | 4.580.000     | 7%                | 8.500.000     | 7,5%              | 10.200.000    | 7,5%                                     | 23.280.000    | sda                 |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Geologi & Air Tanah              | - Meningkatkan Pemanfaatan sumber<br>- Persentase pemanfaatan cekungan air tanah                                                                                                                                         |                                                       |    |                   |               |                   |               | 28%               | 18.608.300    | 35%               | 18.607.400    | 40%               | 24.189.620    | 40%                                      | 61.405.320    | sda                 |

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |    |            |    |                   |             |                   |             |                   |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | PD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |    | Tahun 2019        |             | Tahun 2020        |             | Tahun 2021        |             |                                          |               |                     |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp | Capaian           | Rp          | Capaian           | Rp          | Capaian           | Rp          | Capaian                                  | Rp            |                     |
|      |  | Cabang Dinas ESDM Wilayah II                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    |                   | 387.999.360 |                   | 393.849.500 |                   | 430.394.450 |                                          | 1.212.243.310 |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                            |                                                       |    |            |    |            |    | 60%               | 110.332.050 | 80%               | 120.000.000 | 100%              | 125.000.000 | 100%                                     | 355.332.050   | Kepala UPT          |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 60%               | 211.369.310 | 80%               | 155.000.000 | 100%              | 168.750.000 | 100%                                     | 535.119.310   | sda                 |
|      |  | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan              | - Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan<br><br>- Jumlah Usaha Pertambangan yang baik                                                                                                          |                                                       |    |            |    |            |    | 86 IUP            | 25.072.500  | 91 IUP            | 47.500.000  | 97 IUP            | 54.625.000  | 97 IUP                                   | 127.197.500   | sda                 |
|      |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan         | - Meningkatnya Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri<br><br>- Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga<br><br>- Jumlah pemilik usaha ketenagalistrikan yang untuk kepentingan sendiri yang terbina |                                                       |    |            |    |            |    | 93%               | 20.226.000  | 96%               | 35.350.000  | 98%               | 42.420.000  | 98%                                      | 97.996.000    | sda                 |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 150 pemilik usaha |             | 150 pemilik usaha |             | 150 pemilik usaha |             | 450 pemilik usaha                        |               |                     |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)     | - Meningkatnya Persentase pemanfaatan EBT<br>- Persentase pemanfaatan EBT                                                                                                                                                                 |                                                       |    |            |    |            |    | 6,5%              | 3.150.000   | 7%                | 8.150.000   | 7,5%              | 8.965.000   | 7,5%                                     | 20.265.000    | sda                 |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Geologi & Air Tanah              | - Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah<br><br>- Persentase pemanfaatan cekungan air tanah                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    |                   | 28%         | 17.849.500        | 35%         | 27.849.500        | 40%         | 30.634.450                               | 40%           | 76.333.450          |

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                              | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |    |            |    |                   |             |                   |             |                   |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |             | PD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |    | Tahun 2019        |             | Tahun 2020        |             | Tahun 2021        |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp | Capaian           | Rp          | Capaian           | Rp          | Capaian           | Rp          | Capaian                                  | Rp          |                     |
|      |  | Cabang Dinas ESDM Wilayah III                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |    |            |    |            |    | 436.999.613       |             | 445.094.200       |             | 485.712.420       |             | 1.367.806.233                            |             |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                    |                                                       |    |            |    |            |    | 60%               | 110.859.776 | 80%               | 116.700.000 | 100%              | 122.535.000 | 100%                                     | 350.094.776 | Kepala UPT          |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                   |                                                       |    |            |    |            |    | 60%               | 199.537.932 | 80%               | 171.233.900 | 100%              | 188.357.290 | 100%                                     | 559.129.122 | sda                 |
|      |  | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan              | - Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan<br>- Jumlah Usaha Pertambangan yang baik                                                                                                      |                                                       |    |            |    |            |    | 86 IUP            | 49.643.391  | 91 IUP            | 72.200.000  | 97 IUP            | 79.420.000  | 97 IUP                                   | 201.263.391 | sda                 |
|      |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan         | - Meningkatnya Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri<br>- Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga<br>- Jumlah pemilik usaha ketenagalistrikan yang untuk kepentingan sendiri yang terbina |                                                       |    |            |    |            |    | 93%               | 30.488.176  | 96%               | 34.490.000  | 98%               | 41.388.000  | 98%                                      | 106.366.176 | sda                 |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |    |            |    |            |    | 150 pemilik usaha |             | 150 pemilik usaha |             | 150 pemilik usaha |             | 450 pemilik usaha                        |             |                     |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)     | - Meningkatnya Persentase pemanfaatan EBT<br>- Persentase pemanfaatan EBT                                                                                                                                                         |                                                       |    |            |    |            |    | 6,5%              | 9.052.000   | 7%                | 15.052.000  | 7,5%              | 15.052.000  | 7,5%                                     | 39.156.000  | sda                 |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Geologi & Air Tanah              | - Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah<br>- Persentase pemanfaatan cekungan air tanah                                                                                                                       |                                                       |    |            |    |            |    | 28%               | 37.418.338  | 35%               | 35.418.300  | 40%               | 38.960.130  | 40%                                      | 111.796.768 | sda                 |

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                     | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |    |            |    |             |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |             | PD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
|      |  |                                                              |                                                                                          | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |    | Tahun 2019  |             | Tahun 2020  |             | Tahun 2021  |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              |                                                                                          | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp | Capaian     | Rp          | Capaian     | Rp          | Capaian     | Rp          | Capaian                                  | Rp          |                     |
|      |  | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV                                 |                                                                                          |                                                       |    |            |    |            |    | 446.655.200 |             | 452.916.000 |             | 488.550.300 |             | 1.388.121.500                            |             |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 60%         | 124.964.630 | 80%         | 125.300.000 | 100%        | 137.830.000 | 100%                                     | 388.094.630 | Kepala UPT          |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                       |    |            |    |            |    | 60%         | 204.742.570 | 80%         | 177.146.000 | 100%        | 186.003.300 | 100%                                     | 567.891.870 | sda                 |
|      |  | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan              | - Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan      |                                                       |    |            |    |            |    |             |             |             |             |             |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              | - Jumlah Usaha Pertambangan yang baik                                                    |                                                       |    |            |    |            |    | 86 IUP      | 55.283.250  | 91 IUP      | 75.900.000  | 97 IUP      | 83.490.000  | 97 IUP                                   | 214.673.250 | sda                 |
|      |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan         | - Meningkatnya Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri |                                                       |    |            |    |            |    |             |             |             |             |             |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              | - Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga                                            |                                                       |    |            |    |            |    | 93%         | 38.257.750  | 96%         | 39.670.000  | 98%         | 43.637.000  | 98%                                      | 121.564.750 | sda                 |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)     | - Meningkatnya Persentase pemanfaatan EBT                                                |                                                       |    |            |    |            |    |             |             |             |             |             |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              | - Persentase pemanfaatan EBT                                                             |                                                       |    |            |    |            |    | 6,5%        | 9.000.000   | 7%          | 16.000.000  | 7,5%        | 16.800.000  | 7,5%                                     | 41.800.000  | sda                 |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Geologi & Air Tanah              | - Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah                             |                                                       |    |            |    |            |    |             |             |             |             |             |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              | - Persentase pemanfaatan cekungan air tanah                                              |                                                       |    |            |    |            |    | 28%         | 14.407.000  | 35%         | 18.900.000  | 40%         | 20.790.000  | 40%                                      | 54.097.000  | sda                 |

| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                                                                                                                                                                                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |    |            |    |                   |             |                   |             |                   |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |             | PD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | Tahun 2016                                            |    | Tahun 2017 |    | Tahun 2018 |    | Tahun 2019        |             | Tahun 2020        |             | Tahun 2021        |             |                                          |             |                     |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian                                               | Rp | Capaian    | Rp | Capaian    | Rp | Capaian           | Rp          | Capaian           | Rp          | Capaian           | Rp          | Capaian                                  | Rp          |                     |
|      |  | Cabang Dinas ESDM Wilayah V                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 215.123.842       |             | 319.700.000       |             | 381.970.000       |             | 916.793.842                              |             |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                                                                                                                                            |                                                       |    |            |    |            |    | 60%               | 45.417.720  | 80%               | 84.400.000  | 100%              | 101.280.000 | 100%                                     | 231.097.720 | Kepala UPT          |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 60%               | 123.553.922 | 80%               | 130.000.000 | 100%              | 149.500.000 | 100%                                     | 403.053.922 | sda                 |
|      |  | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan              | - Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan<br>- Jumlah Usaha Pertambangan yang baik                                                                                                              |                                                       |    |            |    |            |    | 86 IUP            | 15.473.600  | 91 IUP            | 51.800.000  | 97 IUP            | 67.340.000  | 97 IUP                                   | 134.613.600 | sda                 |
|      |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan         | - Meningkatnya Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri<br><br>- Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga<br><br>- Jumlah pemilik usaha ketenagalistrikan yang untuk kepentingan sendiri yang terbina |                                                       |    |            |    |            |    | 93%               | 15.263.200  | 96%               | 35.000.000  | 98%               | 38.500.000  | 98%                                      | 88.763.200  | sda                 |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 150 pemilik usaha |             | 150 pemilik usaha |             | 150 pemilik usaha |             | 450 pemilik usaha                        |             |                     |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)     | - Meningkatnya Persentase pemanfaatan EBT<br>- Persentase pemanfaatan EBT                                                                                                                                                                 |                                                       |    |            |    |            |    | 6,5%              | 6.306.000   | 7%                | 8.000.000   | 7,5%              | 9.600.000   | 7,5%                                     | 23.906.000  | sda                 |
|      |  | Program Pengembangan Bidang Geologi & Air Tanah              | - Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah<br><br>- Persentase pemanfaatan cekungan air tanah                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    | 28%               | 9.109.400   | 35%               | 10.500.000  | 40%               | 15.750.000  | 40%                                      | 35.359.400  | sda                 |
|      |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |    |            |    |            |    |                   |             |                   |             |                   |             |                                          |             |                     |



| Kode |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcomes)                          | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | PD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |  |                                                              |                                                               | Tahun 2016                                            |               | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                |                                          |                |                     |
|      |  |                                                              |                                                               | Capaian                                               | Rp            | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian                                  | Rp             |                     |
|      |  | UPT. Pelayanan Teknis Labarotarium                           |                                                               |                                                       |               |            |                |            | 164.337.000    |            | 160.700.600    |            | 183.270.660    |            | 508.308.260    |                                          |                |                     |
|      |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                |                                                       |               |            |                |            | 60%            | 67.912.000 | 80%            | 65.000.000 | 100%           | 78.000.000 | 100%           | 210.912.000                              | Kepala UPT     |                     |
|      |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur               |                                                       |               |            |                |            | 60%            | 72.405.000 | 80%            | 65.700.600 | 100%           | 72.270.660 | 100%           | 210.376.260                              | sda            |                     |
|      |  | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                     | - Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas |                                                       |               |            |                |            | 60%            | 24.020.000 | 80%            | 30.000.000 | 100%           | 33.000.000 | 100%           | 87.020.000                               | sda            |                     |
|      |  | TOTAL DINAS & UPT                                            |                                                               |                                                       | 2.314.580.409 |            | 17.772.888.043 |            | 29.771.960.965 |            | 11.712.420.522 |            | 12.540.488.653 |            | 14.317.475.895 |                                          | 88.429.814.487 |                     |
|      |  |                                                              |                                                               |                                                       |               |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                          |                |                     |

Capaian dan Target Program Prioritas Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021

Perangkat Daerah:

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                  |                 | PD Penanggung Jawab                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                     |                                                                                                                    | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Isi Kinerja Pada Akhir Periode R |                 |                                     |
|      |                                                                                     |                                                                                                                    | Capaian                                               | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target                           | Rp              |                                     |
|      |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                       |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                  |                 |                                     |
|      | URUSAN PILIHAN<br>BIDANG URUSAN: PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                      |                                                                                                                    |                                                       |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                  |                 |                                     |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                                                                       | 100                                                   | 1.994.420.626  | 100        | 2.258.718.100  | 100        | 3.454.955.900  | 100%       | 3.010.675.700  | 100%       | 3.896.016.700  | 100%       | 3.436.430.976  | 100%                             | 13.397.874.450  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan                      | - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur<br>- Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasinal SKPD (%) | 100                                                   | 6.068.008.151  | 100        | 7.024.169.347  | 100        | 6.537.581.003  | 60%        | 6.538.481.350  | 80%        | 6.260.303.791  | 100%       | 11.024.467.317 | 100%                             | 48.378.742.412  |                                     |
| 3    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                               | Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                                                           |                                                       |                | 100        | 634.912.500    | 100        | 539.538.000    | 60%        |                | 80%        | 176.575.000    |            | 622.883.559    |                                  | 2.433.801.102   |                                     |
| 4    | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                   | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                           |                                                       |                |            |                |            |                | 60%        | 417.700.000    | 80%        | 300.149.550    | 100%       | 1.349.581.045  | 80%                              | 4.788.259.029   |                                     |
| 5    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja & Keuangan SKPD                                                  | 100                                                   | 657.721.208    | 100        | 511.400.000    | 100        | 367.715.000    | 100%       | 403.000.400    |            | 361.241.050    | 100%       | 1.349.581.045  | 76%                              | 5.449.400.060   |                                     |
| 6    | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                            | Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                         | 100                                                   | 482.353.400    | 100        | 1.132.605.000  | 100        | 785.175.000    | 2          | 544.359.600    | 100%       | 638.140.377    | 100%       | 3.010.603.870  | 100%                             | 12.260.797.360  |                                     |
| 7    | Program Penataan Struktur Industri                                                  | Pertumbuhan industri besar                                                                                         | 5,12                                                  | 6.139.549.208  | 5,41       | 2.106.509.000  | 7,69       | 1.730.273.659  | 9,52%      | 1.681.684.500  | 2          | 1.590.066.027  | 2          | 7.474.602.712  | 10                               | 31.922.050.278  |                                     |
| 8    | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                    | Fasilitasi penguatan industri                                                                                      |                                                       |                |            | 2.036.003.753  | 23         | 1.744.245.054  | 20         | 1.702.004.500  | 10,87%     | 1.697.142.541  | 11,76%     | 7.474.602.712  | 11,76%                           | 31.922.050.278  |                                     |
| 9    | Program Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga                                 | Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus)                                                                        |                                                       |                | 60         | 867.000.000    | 69         | 585.792.300    | 70         | 991.993.850    | 23         | 974.099.461    | 25         | 3.353.877.731  | 95                               | 14.387.740.420  |                                     |
| 10   | Program Pengembangan & Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri                          | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                                                                        | 9,20                                                  | 3.568.147.915  | 21,92      | 1.572.500.000  | 21,64      | 1.272.382.700  | 19,25%     | 912.026.600    | 70         | 992.851.046    | 70         | 5.605.952.034  | 700                              | 24.258.640.831  |                                     |
| 11   | Program Pengembangan & Pengamanan Perdagangan Luar Negeri                           | Ekspor bersih perdagangan (jt USD)                                                                                 | 427,24                                                | 3.595.562.463  | 1.734,23   | 2.285.028.000  | 2.288,10   | 2.117.273.000  | 1.000      | 2.042.537.900  | 1.100      | 2.018.810.732  | 19,75%     | 7.474.602.712  | 42%                              | 31.922.050.278  |                                     |
|      | Jumlah                                                                              |                                                                                                                    |                                                       | 22.856.162.971 |            | 20.556.345.700 |            | 19.134.931.616 |            | 18.244.464.400 |            | 18.905.396.275 |            | 52.177.185.713 |                                  | 221.121.406.498 |                                     |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                  |                 | PD Penanggung Jawab |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
|      |                                                                                                         |                                                                          | Tahun 2016                                            |                | Tahun 2017 |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Isi Kinerja Pada Akhir Periode R |                 |                     |
|      |                                                                                                         |                                                                          | Capaian                                               | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Capaian    | Rp             | Target                           | Rp              |                     |
|      | 12 UPTD PSMB<br>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                              | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             | 100                                                   | 4.119.126.559  | 100        | 284.134.700    | 100        | 555.813.950    | 100%       | 315.600.000    | 100%       | 316.073.400    | 100%       | 383.188.291    | 100%                             | 1.634.406.632   |                     |
|      | 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan                                       | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            |                                                       | 2.866.672.500  | 100        | 994.381.350    | 100        | 1.066.098.450  | 60%        | 1.248.401.200  | 80%        | 1.031.137.390  | 100%       | 2.696.893.336  | 100%                             | 12.482.408.104  |                     |
|      | 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                                    | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                                                       |                | 100        | 140.570.000    | 100        | 149.684.500    | 60%        | 153.293.800    | 80%        | 156.040.711    | 100%       | 425.825.264    | 100%                             | 1.931.312.800   |                     |
|      | 15 Program Pengembangan Pengujian dan Kalibrasi                                                         | - Jumlah komoditi yang diuji<br>- Jumlah alat yang dikalibrasi           |                                                       | 805.373.620    | 63<br>61   | 680.163.950    | 150<br>128 | 514.034.620    | 95<br>90   | 634.030.000    | 100<br>95  | 693.038.000    | 105<br>100 | 3.132.702.280  | 450                              | 12.097.715.752  |                     |
|      | Jumlah                                                                                                  |                                                                          |                                                       | 7.791.172.679  |            | 2.099.250.000  |            | 2.285.631.520  |            | 2.351.325.000  |            | 2.196.289.501  |            | 6.638.609.171  |                                  | 28.145.843.288  |                     |
|      | 16 UPTD PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH<br>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)                             |                                                       |                | 100        | 419.083.400    | 100        | 668.954.887    | 100%       | 636.586.700    | 100%       | 736.640.005    | 100%       | 331.197.427    | 100%                             | 1.349.268.074   |                     |
|      | 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan                                       | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                            |                                                       |                | 100        | 410.342.250    | 100        | 267.846.433    | 60%        | 468.398.300    | 80%        | 433.769.680    | 100%       | 671.857.638    | 100%                             | 3.141.431.530   |                     |
|      | 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                                    | persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                                                       |                | 100        | 172.742.500    | 100        | 114.902.000    | 60%        | 249.990.000    | 80%        | 121.181.500    | 100%       | 246.032.375    | 100%                             | 1.104.934.623   |                     |
|      | 19 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi                                                  | Jumlah IKM yang terlayani                                                |                                                       |                | 75         | 1.735.174.850  | 120        | 1.522.446.256  | 150        | 1.639.525.000  | 170        | 1.431.988.065  | 200        | 4.651.898.497  | 730                              | 19.159.496.855  |                     |
|      | UPT KEMETEROLOGIAN                                                                                      |                                                                          |                                                       | 2.220.744.123  |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                  |                 |                     |
|      | JUMLAH                                                                                                  |                                                                          |                                                       |                |            | 2.737.343.000  |            | 2.574.149.576  |            | 2.994.500.000  |            | 2.723.579.250  |            | 5.900.985.937  |                                  | 24.755.131.082  |                     |
|      | JUMLAH                                                                                                  |                                                                          |                                                       | 32.868.079.773 |            | 25.392.938.700 |            | 23.994.712.712 |            | 23.590.289.400 |            | 23.825.265.026 |            | 64.716.780.821 |                                  | 274.022.380.868 |                     |

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Memperhatikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi serta bencana alam yang telah menimpa Provinsi Sulawesi Tengah yakni Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang melanda 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu, dimana bencana alam ini telah membawa dampak pada kerusakan dan kerugian diberbagai sektor, maka indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agak sulit untuk dicapai pada akhir periode RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan target IKU dan IKK dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021. Adapun Capaian Indikator dan Perubahan Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKU dan IKK) pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tahun 2016-2021 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

**TABEL 8.1**  
**CAPAIAN INDIKATOR DAN PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

| NO.                                        | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                              | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |        |       | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |                 |                 |                 |                |                | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                   | 2016                                                | 2017   | 2018  | 2019                                                      |                 | 2020            |                 | 2021           |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                                   |                                                     |        |       | SEBELUM                                                   | SESUDAH         | SEBELUM         | SESUDAH         | SEBELUM        | SESUDAH        |                                                                    |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT             |                                                                                                                   |                                                     |        |       |                                                           |                 |                 |                 |                |                |                                                                    |
| Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi |                                                                                                                   |                                                     |        |       |                                                           |                 |                 |                 |                |                |                                                                    |
| 1.                                         | Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum.<br>Administrasi Keuangan Umum. Perangkat<br>Daerah. Kepegawaian dan Persandian |                                                     |        |       |                                                           |                 |                 |                 |                |                |                                                                    |
| 1.1                                        | Pertumbuhan PDRB %                                                                                                | 9,94                                                | 7,14   | 6,30  | 14.4 +/- 1,8                                              | 6,0 - 6,5       | 14.76 +/- 1,5   | 6,25-6,50       | 15.3 +/- 1,3   | 6,50-6,75      | 6,50-6,75                                                          |
| 1.2                                        | Laju inflasi provinsi (Kota Palu) (%)                                                                             | 1,49                                                | 4,33   | 6,46  | 3,5 - 6,0 %                                               | 5 - 6           | 3,5 - 6,0 %     | 4,5-5           | 3,5 - 6,0 %    | 4,5-5          | 4,5-5                                                              |
| 1.3                                        | PDRB per kapita BHB (juta Rp)                                                                                     | 41,11                                               | 45,24  | 50,18 | 61.89 +/- 4,5                                             | 52,69           | 70.19 +/- 5     | 55,32           | 79.61 +/- 6    | 58,09          | 58,09                                                              |
| 1.4                                        | Indeks Gini                                                                                                       | 0,347                                               | 0,345  | 0,317 | 0.354 - 0,344                                             | 0,31 - 0,35     | 0.344 - 0,334   | 0,31 - 0,35     | 0.334 - 0,324  | 0,31 - 0,35    | 0,31 - 0,35                                                        |
| 1.5                                        | Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia (%)                                                                        | 19,24                                               | 19,30  | 20,95 | 27,08                                                     | 20,96 - 21,00   | 29,16           | 20,97 - 21,01   | 31,24          | 20,98 - 21,02  | 20,98 - 21,02                                                      |
| 1.6                                        | Indeks ketimpangan Regional (Indeks                                                                               | 0,506                                               | 0,539  | 0,530 | 0,28                                                      | 0,525 - 0,530   | 0,25            | 0,524 - 0,529   | 0,22           | 0,523 - 0,528  | 0,523 - 0,528                                                      |
| 1.7                                        | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)                                                                   | 85,91                                               | 85,78  | 86,31 | 86.71 - 87,11                                             | 85,00 - 85,20   | 87,11 - 87,51   | 85,20 - 85,40   | 87,51 - 87,91  | 85,40 - 85,60  | 85,40 - 85,60                                                      |
| 1.8                                        | ICOR                                                                                                              | 4,25                                                | 4,20   | 4,10  | 3,00 - 2,75                                               | 4,00 - 4,10     | 2,75 - 2,50     | 3,90 - 4,00     | 2,50 - 2,25    | 3,80 - 3,90    | 3,80 - 3,90                                                        |
| 1.9                                        | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)                                                                              | 2,28                                                | 2,80   | 2,28  |                                                           | 2,27 - 2,28     |                 | 2,26 - 2,27     |                | 2,25 - 2,26    | 2,25 - 2,26                                                        |
| 1.10                                       | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)                                                                              | 0,56                                                | 0,78   | 0,68  |                                                           | 0,67 - 0,68     |                 | 0,66 - 0,67     |                | 0,65 - 0,66    | 0,65 - 0,66                                                        |
| 1.11                                       | Angka kriminalitas yang tertangani                                                                                | 714                                                 | 769    | 719   | 822                                                       |                 | 858             | 858             | 894            | 858            | 858                                                                |
| 1.12                                       | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                   | 91,91                                               | 91,66  | 92,08 | 75,43                                                     | 92,48 - 92,68   | 77,43           | 92,88 - 93,28   | 79,43          | 93,38 - 93,78  | 93,38 - 93,78                                                      |
| 1.13                                       | Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)                                                                                  | 70,05                                               | 70,38  | 70,71 | 77,37                                                     | 71,00 - 71,08   | 79,33           | 71,29 - 71,45   | 81,33          | 71,64 - 71,71  | 71,64 - 71,71                                                      |
| 1.14                                       | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                                                  | 67,47                                               | 68,11  | 68,88 | -                                                         | 68,25-68,75     | -               | 68,5-69,0       | -              | 69,0-70,25     |                                                                    |
| Fokus Kesejahteraan Sosial                 |                                                                                                                   |                                                     |        |       |                                                           |                 |                 |                 |                |                |                                                                    |
| 1.                                         | Pendidikan                                                                                                        |                                                     |        |       |                                                           |                 |                 |                 |                |                |                                                                    |
| 1.1                                        | Angka melek aksara (%)                                                                                            | 99,18                                               | 96,10  | 96,50 | 98.40 -98,75                                              | 98.40 -98,75    | 98.50 -99,35    | 98.50 -99,35    | 99.25 - 100,00 | 99.25 - 100,00 | 99.25 - 100,00                                                     |
| 1.2                                        | Angka rata-rata lama sekolah (tahun)                                                                              | 8,12                                                | 8,29   |       | 10,63                                                     | 10,63           | 11,32           | 11,32           | 12,00          | 12,00          | 12,00                                                              |
| 1.3                                        | Angka Partisipasi Kasar (%) :                                                                                     |                                                     |        |       |                                                           |                 |                 |                 |                |                |                                                                    |
|                                            | - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A                                                                     | 104,19                                              | 104,19 |       | 104,25 - 104,85                                           | 104,25 - 104,85 | 103,25 - 104,00 | 103,25 - 104,00 | 102,75 -103,75 | 102,75 -103,75 | 102,75 -103,75                                                     |
|                                            | - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B                                                                   | 91,86                                               | 91,86  |       | 92,25 - 92,75                                             | 92,25 - 92,75   | 92,50 - 93,25   | 92,50 - 93,25   | 93,00 - 93,75  | 93,00 - 93,75  | 93,00 - 93,75                                                      |
|                                            | - Angka Partisipasi Kasar (APK)                                                                                   | 84,85                                               | 84,85  |       | 84,00 -84,85                                              | 84,00 -84,85    | 84,50 -85,25    | 84,50 -85,25    | 85,00 - 85,75  | 85,00 - 85,75  | 85,00 - 85,75                                                      |

| NO.                            | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |       |       | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |               |               |               |               |               | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                      | 2016                                                | 2017  | 2018  | 2019                                                      |               | 2020          |               | 2021          |               |                                                                    |
|                                |                                                                      |                                                     |       |       | SEBELUM                                                   | SESUDAH       | SEBELUM       | SESUDAH       | SEBELUM       | SESUDAH       |                                                                    |
| 1.4                            | Angka Partisipasi Murni (%) :                                        |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI                                | 92,74                                               | 92,74 |       | 93,75 - 94,50                                             | 93,75 - 94,50 | 94,00 - 94,75 | 94,00 - 94,75 | 94,5 - 96,25  | 94,5 - 96,25  | 94,5 - 96,25                                                       |
|                                | - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs                              | 72,16                                               | 72,16 |       | 73,50 - 74,25                                             | 73,50 - 74,25 | 74,00 -74,75  | 74,00 -74,75  | 74,50 -75,25  | 74,50 -75,25  | 74,50 -75,25                                                       |
|                                | - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK                           | 63,80                                               | 63,80 |       | 65,00 - 66,00                                             | 65,00 - 66,00 | 65,50 - 6650  | 65,50 - 6650  | 66,00 - 70,00 | 66,00 - 70,00 | 66,00 - 70,00                                                      |
| 2.                             | Kesehatan                                                            |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 2.1.                           | Angka Usia Harapan Hidup (tahun)                                     | 67,31                                               | 67,32 | 67,90 | 67,95                                                     | 67,91         | 67,98         | 67,92         | 68,00         | 67,93         | 67,93                                                              |
| 2.2                            | Persentase Balita Gizi Buruk                                         | 0,16                                                | 0,15  | 0,15  | 0,14                                                      | 0,14          | 0,13          | 0,13          | 0,12          | 0,12          | 0,12                                                               |
| 3.                             | Ketenagakerjaan                                                      |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 3.1                            | Rasio penduduk yang bekerja                                          | 0,967                                               | 0,962 | 0,966 | 0,985                                                     | 0,965         | 0,991         | 0,969         | 0,998         | 0,970         | 0,970                                                              |
| Fokus Seni Budaya dan Olahraga |                                                                      |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 1.                             | Kebudayaan                                                           |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 1.1                            | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk                             |                                                     |       |       | 0,865                                                     | 0,865         | 0,884         | 0,884         | 0,903         | 0,903         | 0,903                                                              |
| 1.2                            | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk                           | 0,05                                                | 0,05  | 0,05  | 0,040                                                     | 0,056         | 0,048         | 0,057         | 0,056         | 0,058         | 0,058                                                              |
| 2.                             | Pemuda dan Olahraga                                                  |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 2.1                            | a. Jumlah gedung olahraga per 10.000                                 | 0,05                                                | 0,05  | 0,05  | 0,071                                                     | 0,056         | 0,073         | 0,057         | 0,075         | 0,058         | 0,058                                                              |
| ASPEK PELAYANAN UMUM           |                                                                      |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| Pelayanan Urusan Wajib         |                                                                      |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 1.                             | Pendidikan                                                           |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 1.1.1                          | Pendidikan dasar :                                                   |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 1.1.1.1                        | Angka partisipasi sekolah (%) :                                      |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI                              | 98,14                                               | 98,14 |       | 98,08 -99,05                                              | 98,08 -99,05  | 99,00 - 99,35 | 99,00 - 99,35 | 99,25 - 99,75 | 99,25 - 99,75 | 99,25 - 99,75                                                      |
|                                | - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs                            | 92,32                                               | 92,32 |       | 93,50 - 94,00                                             | 93,50 - 94,00 | 93,75 - 94,50 | 93,75 - 94,50 | 94,00 - 95,00 | 94,00 - 95,00 | 94,00 - 95,00                                                      |
| 1.1.1.2                        | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per 1000 penduduk) |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - SD/MI                                                              | 11,05                                               | 8,42  |       | 11,97                                                     | 11,97         | 12,23         | 12,23         | 12,49         | 12,49         | 12,49                                                              |
|                                | - SMP/MTs                                                            | 4,01                                                | 6,68  |       | 4,60                                                      | 4,60          | 4,62          | 4,62          | 4,65          | 4,65          | 4,65                                                               |
| 1.1.1.3                        | Rasio Guru terhadap Murid (per 1000)                                 |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - SD/MI                                                              | 67,71                                               | 93,23 |       | 68,45                                                     | 68,45         | 68,46         | 68,46         | 68,48         | 68,48         | 68,48                                                              |
|                                | - SMP/MTs                                                            | 66,15                                               | 79,57 |       | 78,25                                                     | 78,25         | 78,26         | 78,26         | 78,28         | 78,28         | 78,28                                                              |
| 1.1.1.4                        | Rasio guru/murid per kelas rata-rata (per 1000)                      |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - SD/MI                                                              | 67,71                                               | 93,23 |       | 11,97                                                     | 11,97         | 12,23         | 12,23         | 12,49         | 12,49         | 12,49                                                              |
|                                | - SMP/MTs                                                            | 66,15                                               | 79,57 |       | 4,60                                                      | 4,60          | 4,62          | 4,62          | 4,65          | 4,65          | 4,65                                                               |
| 1.1.2.                         | Pendidikan menengah:                                                 |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
| 1.1.2.1                        | Angka Partisipasi Sekolah (%):                                       |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK                         | 74,82                                               | 74,82 |       | 74,75 - 75,25                                             | 74,75 - 75,25 | 75,00- 75,50  | 75,00- 75,50  | 75,25 - 75,75 | 75,25 - 75,75 | 75,25 - 75,75                                                      |
| 1.1.2.2                        | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per 1000):         |                                                     |       |       |                                                           |               |               |               |               |               |                                                                    |
|                                | - SMA/MA/SMK                                                         | 1,91                                                | 4,22  |       | 2,03                                                      | 2,03          | 2,08          | 2,08          | 2,09          | 2,09          | 2,09                                                               |

| NO.     | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                        | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |       |       | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |         |         |         |         |         | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                             | 2016                                                | 2017  | 2018  | 2019                                                      |         | 2020    |         | 2021    |         |                                                                    |
|         |                                                                                             |                                                     |       |       | SEBELUM                                                   | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH |                                                                    |
| 1.1.2.3 | Rasio Guru terhadap Murid (per 1000)                                                        |                                                     |       |       |                                                           |         |         |         |         |         |                                                                    |
|         | SMA/MA/SMK                                                                                  | 64,84                                               | 84,29 |       | 0,58                                                      | 1,15    | 1,15    | 1,73    | 1,73    | 2,30    | 2,30                                                               |
| 1.1.2.4 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)                         | 98,89                                               | 96,01 | 96,50 | 96,50                                                     | 96,50   | 96,50   | 96,50   | 96,50   | 96,50   | 96,50                                                              |
| 1.1.4   | Angka Putus Sekolah :                                                                       |                                                     |       |       |                                                           |         |         |         |         |         |                                                                    |
| 1.1.4.1 | Angka Putus Sekolah (%):                                                                    |                                                     |       |       |                                                           |         |         |         |         |         |                                                                    |
|         | - Angka Putus Sekolah SD/MI                                                                 | 1,00                                                | 1,60  | 1,30  | 0,48                                                      | 0,48    | 0,42    | 0,42    | 0,37    | 0,37    | 0,37                                                               |
|         | - Angka Putus Sekolah SMP/MTs                                                               | 9,00                                                | 11,00 | 9,00  | 2,07                                                      | 2,07    | 2,00    | 2,00    | 1,93    | 1,93    | 1,93                                                               |
|         | - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK                                                            | 2,00                                                | 3,20  | 3,10  | 2,90                                                      | 2,90    | 2,87    | 2,87    | 2,84    | 2,84    | 2,84                                                               |
| 1.1.5   | Angka Kelulusan (%):                                                                        |                                                     |       |       |                                                           |         |         |         |         |         |                                                                    |
|         | - Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)                                                            | 98,99                                               | 96,80 | 97,00 | 100,00                                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                                             |
|         | - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)                                                          | 97,52                                               | 95,00 | 95,50 | 100,00                                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                                             |
|         | - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK (%)                                                       | 98,08                                               | 95,50 | 97,75 | 100,00                                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                                             |
| 2.      | Kesehatan                                                                                   |                                                     |       |       |                                                           |         |         |         |         |         |                                                                    |
| 2.1     | Rasio posyandu per satuan balita (per 1000                                                  | 10,74                                               | 10,70 | 20,00 |                                                           | 25,00   |         | 30,00   |         | 40,00   | 40,00                                                              |
| 2.2     | Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                                     | 0,064                                               | 0,065 | 1,20  |                                                           | 1,20    |         | 1,20    |         | 1,20    | 1,20                                                               |
| 2.3     | Rasio Pustu per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                                         | 0,25                                                | 0,25  | 0,24  |                                                           | 0,50    |         | 0,75    |         | 1,00    | 1,00                                                               |
| 2.4     | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                                   | 0,10                                                | 0,11  | 0,01  |                                                           | 0,01    |         | 0,01    |         | 0,01    | 0,01                                                               |
| 2.5     | Rasio Dokter gigi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                                   | 0,099                                               | 0,044 | 0,03  |                                                           | 0,0130  |         | 0,0132  |         | 0,0135  | 0,0135                                                             |
| 2.6     | Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                              | 0,060                                               | 0,062 | 0,011 |                                                           | 0,011   |         | 0,012   |         | 0,012   | 11,500                                                             |
| 2.7     | Rasio Dokter Umum per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                                   | 1,16                                                | 0,15  | 0,045 |                                                           | 0,045   |         | 0,046   |         | 0,047   | 47,000                                                             |
| 2.8     | Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk (per 1000 penduduk)                         | 1,88                                                | 2,28  | 0,180 |                                                           | 0,180   |         | 0,184   |         | 0,188   | 0,188                                                              |
| 2.9     | Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                          | 1,28                                                | 1,52  | 0,120 |                                                           | 0,120   |         | 0,122   |         | 0,124   | 0,124                                                              |
| 2.10    | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)                                             | 73,30                                               | 61,20 | 60,30 |                                                           | 65,00   |         | 70,00   |         | 80,00   | 80,00                                                              |
| 2.11    | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 65,20                                               | 75,70 | 77,30 |                                                           | 80,00   |         | 82,00   |         | 85,00   | 85,00                                                              |
| 2.12    | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)                               | 86,00                                               | 83,00 | 84,10 |                                                           | 88,00   |         | 92,00   |         | 95,00   | 95,00                                                              |

| NO.  | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                                | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |          |          | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |          |             |          |             |          | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                     | 2016                                                | 2017     | 2018     | 2019                                                      |          | 2020        |          | 2021        |          |                                                                    |
|      |                                                                                                                     |                                                     |          |          | SEBELUM                                                   | SESUDAH  | SEBELUM     | SESUDAH  | SEBELUM     | SESUDAH  |                                                                    |
| 2.13 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)                                                                    | 100,00                                              | 100,00   | 100,00   |                                                           | 100,00   |             | 100,00   |             | 100,00   | 100,00                                                             |
| 2.14 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)                                                      | 28,40                                               | 40,00    | 59,00    |                                                           | 63,00    |             | 67,00    |             | 70,00    | 70,00                                                              |
| 2.15 | Jumlah Posyandu                                                                                                     | 3.347                                               | 3.347    | 3.347    |                                                           | 3.347    |             | 3.347    |             | 3.347    | 3.347                                                              |
| 3.   | Pekerjaan Umum                                                                                                      |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 3.1  | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/mantap                                                           | 0,589                                               | 0,609    | 0,605    | 0,65 - 0,70                                               | 0,610    | 0,70 - 0,75 | 0,615    | 0,75 - 0,80 | 0,620    |                                                                    |
| 3.2  | Rasio Jaringan Irigasi                                                                                              | 0,673                                               | 0,707    | 0,727    | 0,713                                                     |          | 0,725       |          | 0,785       |          | 100%                                                               |
| 3.3  | Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk                                                                               | 2,34                                                | 2,31     | 2,31     | 2,58                                                      | 2,58     | 2,63        | 2,63     | 2,69        | 2,69     | 2,69                                                               |
| 3.4  | Persentase rumah tinggal bersanitasi (per 100)                                                                      |                                                     | 40%      | 63,08%   | 66,67%                                                    |          | 72,05%      |          | 90,00%      | 100%     | 100%                                                               |
| 3.5  | Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km jalan provinsi)                                                                    | 1.531,04                                            | 1.556,44 | 1.567,04 | 1.451,16                                                  | 1.585,04 | 1.451,61    | 1.603,04 | 1.452,11    | 1.621,04 | 1.470,11                                                           |
|      |                                                                                                                     |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 4.   | Perumahan                                                                                                           |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 4.1  | Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana                                               | 0                                                   | 0        | 0,56     | 1,83                                                      | 1,83     | 2,74        | 2,74     | 4,55        | 4,55     | 4,55                                                               |
| 4.2  | Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Sulawesi Tengah | 0                                                   | 0        | 0        | 0                                                         | 0        | 0           | 0        | 10,64       | 10,64    | 10,64                                                              |
| 4.3  | Persentase Luas Permukiman kumuh                                                                                    | 0                                                   | 3,05     | 6,04     | 18,04                                                     | 18,04    | 30,04       | 30,04    | 42,04       | 42,04    | 42,04                                                              |
|      |                                                                                                                     |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 5.   | Perencanaan Pembangunan                                                                                             |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 5.1  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA                                       | Ada                                                 | Ada      | Ada      | Ada                                                       | Ada      | Ada         | Ada      | Ada         | Ada      | Ada                                                                |
| 5.2  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA                                              | Ada                                                 | Ada      | Ada      | Ada                                                       | Ada      | Ada         | Ada      | Ada         | Ada      | Ada                                                                |
| 5.3  | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD                                                                               |                                                     |          |          | 100%                                                      | 100%     | 100%        | 100%     | 100%        | 100%     | 100%                                                               |
| 6.   | Perhubungan                                                                                                         |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 6.1  | Jumlah uji kir angkutan umum                                                                                        | 12.525                                              | 13.075   | 13.625   | 14.175                                                    |          | 14.275      |          | 15.275      |          |                                                                    |
| 6.2  | Rasio Ijin Trayek                                                                                                   | 23                                                  | 23       | 23       |                                                           | 23       |             | 23       |             | 23       | 23                                                                 |
| 6.3  | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                                                                            | 34                                                  | 35       | 35       | 35                                                        | 7        | 35          | 7        | 35          | 7        | 7                                                                  |
| 6.4  | Pemasangan Rambu-Rambu                                                                                              | 393                                                 | 147      | 257      |                                                           | 48       |             | 7.250    |             | 7.250    | 7.250                                                              |
| 6.5  | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun                                                       | 143.854                                             | 152.782  | 201.958  |                                                           | 222.154  |             | 244.369  |             | 268.806  | 268.806                                                            |
| 7.   | Lingkungan Hidup                                                                                                    |                                                     |          |          |                                                           |          |             |          |             |          |                                                                    |
| 7.1  | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (Jml Perush.)                                                         | 66                                                  | 2        | 2        | 86                                                        | 2        | 96          | 2        | 100         | 2        | 76                                                                 |
| 7.2  | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (per 10.000 pddk)                                                | 0,89                                                | 0,94     | 0,87     | 287                                                       | 0,87     | 288         | 0,87     | 289         | 0,88     | 0,88                                                               |



| NO.  | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                        | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |         |         | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |            |         |            |         |            | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                             | 2016                                                | 2017    | 2018    | 2019                                                      |            | 2020    |            | 2021    |            |                                                                    |
|      |                                                                                             |                                                     |         |         | SEBELUM                                                   | SESUDAH    | SEBELUM | SESUDAH    | SEBELUM | SESUDAH    |                                                                    |
| 7.3  | Penegakan hukum lingkungan (Kasus)                                                          | 13                                                  | 1       | 4       | 16                                                        | 1          | 17      | 1          | 18      | 1          | 21                                                                 |
| 7.4  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)                                              | 68,78                                               | 69,39   | 69,5    | 83,0                                                      | 70,0       | 84,0    | 70,5       | 85,0    | 71,0       | 71,0                                                               |
| 8.   | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                |                                                     |         |         |                                                           |            |         |            |         |            |                                                                    |
| 8.3  | Menurunnya jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I                                     | 48,99                                               | 48,53%  | 51,00%  | 47,03%                                                    | 50,03      | 46,05%  | 45,05%     | 45,07%  | 48,07%     | 48,07                                                              |
| 8.3  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                      | 28,70                                               | 39,70%  | 43,70%  | 41,70%                                                    | 44,70      | 42,70%  | 45,70%     | 43,70   | 46,70%     | 46,70                                                              |
| 8.4  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta                                          | 79,09                                               | 83,09%  | 88,09%  | 87,09%                                                    | 92,09      | 89,09%  | 92,09%     | 81.09%% | 84,09      | 84,09                                                              |
| 8.5  | Partisipasi Perempuan di Parlemen                                                           | 13,05%                                              | 19,30%  | 25,30%  | 25,30%                                                    | 28,30      | 28,30%  | 31,30%     | 31,30%  | 34,30%     | 34,30                                                              |
| 8.6  | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)                                                   | 0,041%                                              | 0,039   | 0,038   | 0,035%                                                    | 0,036      | 0,033%  | 0,034%     | 0,030%  | 0,032%     | 0,032                                                              |
| 8.7  | Menurunnya pekerja anak                                                                     | 32,40                                               | 32,35%  | 32,30%  | 32,25%                                                    | 30,25      | 32,20%  | 28,00%     | 32,15%  | 27,00%     | 27,00                                                              |
| 8.8  | Menurunnya Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (%)          | 93,7                                                | 90,90%  | 82,2%   | 85,30%                                                    | 80,00      | 82,50%  | 78,00%     | 79,70%  | 75,00%     | 75,00                                                              |
| 8.9  | Meningkatnya Anak yang memiliki akte kelahiran                                              |                                                     | 100%    | 100%    | 100%                                                      |            | 100%    |            | 100%    |            | 100                                                                |
| 9.   | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera                                                   |                                                     |         |         |                                                           |            |         |            |         |            |                                                                    |
| 9.1  | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                          |                                                     | 3,1%    | 3,0%    | 2,8%                                                      | 2,8%       | 2,6%    | 2,6%       | 2,5%    | 2,7%       | 40%                                                                |
| 9.2  | Rasio akseptor KB                                                                           |                                                     | 19%     | 20,4%   | 21,6%                                                     | 21,6%      | 22,1%   | 22,1%      | 23,3%   | 23,3%      | 50%                                                                |
| 9.3  | Cakupan peserta KB aktif (%)                                                                |                                                     | 52,5%   | 55%     | 59%                                                       | 58%        | 63%     | 63%        | 69%     | 65%        | 50%                                                                |
| 9.3  | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)                                         |                                                     | 49%     | 45%     | 42%                                                       | 42%        | 38%     | 38%        | 35%     | 35%        | 30%                                                                |
| 10.  | Sosial                                                                                      |                                                     |         |         |                                                           |            |         |            |         |            |                                                                    |
| 10.1 | Persentase kualitas sumber daya kesejahteraan sosial kemasyarakatan (%)                     | 65                                                  | 72      | 78      | 83                                                        | 83         | 89      | 89         | 94      | 94         | 94,00                                                              |
| 10.2 | Persentase binaan dalam kegiatan keagamaan (%)                                              | 70                                                  | 75      | 80      | 85                                                        | 85         | 90      | 90         | 95      | 95         | 95,00                                                              |
| 10.3 | Persentase lembaga sosial keagamaan & rumah ibadah yang diverifikasi dan dikerjasamakan (%) | 70                                                  | 75      | 80      | 85                                                        | 85         | 90      | 90         | 95      | 95         | 95,00                                                              |
| 11.  | Ketenagakerjaan                                                                             |                                                     |         |         |                                                           |            |         |            |         |            |                                                                    |
| 11.1 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)                                                      | 72,28                                               | 67,14   | 69,52   | 75,25                                                     | 70,96      | 76,00   | 76,75      | 76,75   | 70,01      |                                                                    |
| 11.2 | Pencari kerja yang ditempatkan (%)                                                          | 30,25                                               | 63,02   | 34,25   | 52,24                                                     | 68,15      | 52,31   | 52,23      | 52,39   | 52,49      |                                                                    |
| 11.3 | Tingkat pengangguran terbuka (%)                                                            | 3,29                                                | 3,81    | 3,43    | 3,36                                                      | 3,75 - 3,5 | 3,33    | 3,5 - 3,25 | 3,25    | 3,25- 3,00 |                                                                    |
|      |                                                                                             |                                                     |         |         |                                                           |            |         |            |         |            |                                                                    |
| 12.  | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                           |                                                     |         |         |                                                           |            |         |            |         |            |                                                                    |
| 12.1 | persentase koperasi aktif (%)                                                               | 65,50                                               | 65,56   | 65,61   | 65,67                                                     | 65,67      | 65,72   | 65,72      | 65,78   | 65,78      |                                                                    |
| 12.2 | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)                                                           | 707.643                                             | 711.143 | 714.643 | 718.143                                                   | 718.143    | 721.643 | 721.643    | 725.143 | 725.143    |                                                                    |
| 12.3 | Jumlah BPR/LKM (unit)                                                                       | 71                                                  | 71      | 71      | 71                                                        | 71         | 71      | 71         | 72      | 72         |                                                                    |
| 12.4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)                                                        | 96,97                                               | 97,00   | 97,02   | 97,05                                                     | 97,05      | 97,07   | 97,07      | 97,10   | 97,10      |                                                                    |

| NO.                      | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH          | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |            |            | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |              |            |              |            |              | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                               | 2016                                                | 2017       | 2018       | 2019                                                      |              | 2020       |              | 2021       |              |                                                                    |
|                          |                                                                               |                                                     |            |            | SEBELUM                                                   | SESUDAH      | SEBELUM    | SESUDAH      | SEBELUM    | SESUDAH      |                                                                    |
| 13.                      | Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum.<br>Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 13.2                     | Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan<br>adiministrasi pemerintah          | ada                                                 | ada        | ada        | ada                                                       | ada          | ada        | ada          | ada        | ada          | ada                                                                |
| 14.                      | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                              |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 14.1                     | PKK aktif                                                                     | 1622                                                | 1642       | 1842       |                                                           | 1842         | 1862       |              | 1882       |              | 13 kab/kota                                                        |
| 15.                      | Komunikasi dan Informatika                                                    |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 15.1                     | Web site milik pemerintah daerah                                              | ada                                                 | ada        | ada        | ada                                                       | ada          | ada        | ada          | ada        | ada          | ada                                                                |
| 16                       | Kehutanan                                                                     |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 16.1                     | Rehabilitasi hutan dan lahan (Hektar)                                         | 700                                                 | 1.385      | 1.535      |                                                           | 1660         |            | 1975         |            | 2245         | 2245                                                               |
| 16.2                     | Kerusakan Kawasan Hutan (%)                                                   | 0,19                                                | 0,01       | 0,17       | 0,16                                                      | 0,16         | 0,15       | 0,15         | 0,14       | 0,14         | 0,14                                                               |
|                          |                                                                               |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 17                       | Penanaman Modal                                                               |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 17.1                     | Lamanya Proses Perizinan :                                                    |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
|                          | . Izin Usaha                                                                  |                                                     | 1-30 hari  | 1-25 hari  | 1-20 hari                                                 | 1-20 hari    | 1-15 hari  | 1-15 hari    | 1-10 hari  | 1-10 hari    | 1-10 hari                                                          |
|                          | . Izin Non Usaha                                                              |                                                     | 1-7 hari   | 1-6 hari   | 1-5 hari                                                  | 1-5 hari     | 1-4 hari   | 1-4 hari     | 1-3 hari   | 1-3 hari     | 1-3 hari                                                           |
| 17.2                     | Nilai Realisasi Investasi :                                                   |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
|                          | . PMDN (Rp 000,000)                                                           |                                                     | 1,100,000  | 1,210,000  | 1,331,000                                                 | 4,000,000    | 1,464,100  | 5,000,000    | 1,610,510  | 6,250,000    | 6,250,000                                                          |
|                          | . PMA (Rp)                                                                    |                                                     | 14,850,000 | 16,335,000 | 17,968,500                                                | 14,000,000   | 19,765,350 | 15,400,000   | 21,741,885 | 16,940,000   | 16,940,000                                                         |
| 18                       | Hukum dan Peridang Undangan                                                   |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 18.2                     | Rancangan Produk Hukum Daerah                                                 | -                                                   | 558        | 558        |                                                           | 558          |            |              |            |              |                                                                    |
| 18.5                     | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran daerah                             | WTP                                                 | WTP        | WTP        | WTP                                                       | WTP          | WTP        | WTP          | WTP        | WTP          | WTP                                                                |
| Pelayanan Urusan Pilihan |                                                                               |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 1.                       | Pertanian                                                                     |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
| 1.1                      | Produksi padi atau bahan pangan utama lokal<br>lainnya (ton):                 |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |
|                          | - Padi                                                                        |                                                     |            |            | 49,68                                                     | 1.167.400,00 | 50,06      | 1.179.074,00 | 50,44      | 1.190.865,00 | 1.190.865,00                                                       |
|                          | - Jagung                                                                      |                                                     |            |            | 44,41                                                     | 389.445,00   | 45,19      | 397.234,00   | 45,97      | 405.178,00   | 405.178,00                                                         |
|                          | - Kedelai                                                                     |                                                     |            |            | 21,63                                                     | 16.932,00    | 22,54      | 17.779,00    | 23,46      | 18.668,00    | 18.668,00                                                          |
|                          | - Kacang Tanah                                                                |                                                     |            |            | 17,02                                                     | 2.878,00     | 17,06      | 2.935,00     | 17,1       | 2.994,00     | 2.994,00                                                           |
|                          | - Kacang Hijau                                                                |                                                     |            |            | 8,6                                                       | 844,00       | 8,64       | 886,00       | 8,68       | 930,00       | 930,00                                                             |
|                          | - Ubi Kayu                                                                    |                                                     |            |            | 229,58                                                    | 55.864,00    | 233,8      | 56.702,00    | 238,02     | 57.552,00    | 57.552,00                                                          |
|                          | - Ubi Jalar                                                                   |                                                     |            |            | 112,54                                                    | 15.931,00    | 113,19     | 16.170,00    | 113,84     | 16.413,00    | 16.413,00                                                          |
| 1.2                      | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB BHB<br>(%)                          |                                                     |            |            |                                                           |              |            |              |            |              |                                                                    |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH       | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |                 |                 | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |            |                 |            |                   |            | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            | 2016                                                | 2017            | 2018            | 2019                                                      |            | 2020            |            | 2021              |            |                                                                    |
|     |                                                                            |                                                     |                 |                 | SEBELUM                                                   | SESUDAH    | SEBELUM         | SESUDAH    | SEBELUM           | SESUDAH    |                                                                    |
| 2.  | Perkebunan                                                                 |                                                     |                 |                 |                                                           |            |                 |            |                   |            |                                                                    |
| 2,1 | Produksi Komoditas Unggulan (Ton)                                          |                                                     |                 |                 |                                                           |            |                 |            |                   |            |                                                                    |
|     | - Kelapa Dalam                                                             | 163.115                                             | 166.377         | 169.705         | 173.099                                                   | 170.099    | 176.561         | 173.561    | 180.092           | 177.092    | 177.092                                                            |
|     | - Cengkeh                                                                  | 14.692                                              | 15.720          | 16.821          | 17.998                                                    | 17.998     | 19.258          | 18.258     | 20.606            | 19.606     | 19.606                                                             |
|     | - Kopi                                                                     | 3.547                                               | 3.653           | 3.763           | 3.876                                                     | 2.817      | 3.992           | 2.817      | 4.112             | 2.817      | 2.817                                                              |
|     | - Kakao                                                                    | 175.662                                             | 184.445         | 193.667         | 203.351                                                   | 142.785    | 213.518         | 142.985    | 224.194           | 143.185    | 143.185                                                            |
|     | - Pala                                                                     | 208                                                 | 223             | 238             | 255                                                       | 255        | 273             | 273        | 292               | 292        | 292                                                                |
|     | - Lada                                                                     | 91                                                  | 93              | 95              | 97                                                        | 97         | 99              | 99         | 100               | 100        | 100                                                                |
|     | - Kelapa Sawit                                                             | 293.195                                             | 301.991         | 311.051         | 320.382                                                   | 320.382    | 329.994         | 329.994    | 339.893           | 339.893    | 339.893                                                            |
|     | - Karet                                                                    | 2.243                                               | 2.310           | 2.380           | 2.451                                                     | 2.451      | 2.525           | 2.525      | 2.600             | 2.600      | 2.600                                                              |
| 2,2 | Tingkat Serangan OPT Tanaman Komoditi Kakao (%)                            |                                                     |                 |                 | 25                                                        | 28         | 20              | 26         | 15                | 24         | 24                                                                 |
| 2,3 | PDRB ADHB Sub Sektor Perkebunan (Juta Rp)                                  | 14.592.301                                          | 16.016.795      |                 | 12.722.383                                                | 12.722.383 | 13.104.055      | 13.104.055 | 13.497.176        | 13.497.176 | 13.497.176                                                         |
| 2,4 | NTP Sub Sektor Perkebunan (%)                                              | 92,74                                               | 82,31           | 86,88           | 94,23                                                     | 87,53      | 94,88           | 88,18      | 95,53             | 88,83      | 88,83                                                              |
| 3.  | Peternakan                                                                 |                                                     |                 |                 |                                                           |            |                 |            |                   |            |                                                                    |
| 3,1 | Populasi Ternak Sapi (ekor)                                                | 350.000                                             | 350.000-450.000 | 450.000-570.000 | 570.000-685.000                                           | 364.630    | 685.000-830.000 | 394.630    | 830.000-1.006.000 | 424.630    | 424.630                                                            |
| 3,2 | Status Kesehatan Hewan (%)                                                 | 73                                                  | 76              | 79              | 82                                                        | 82         | 85              | 85         | 88                | 88         | 88                                                                 |
| 3,3 | Cakupan Bina Kelompok Peternak (jumlah kelompok)                           | 680                                                 | 730             | 780             | 830                                                       | 830        | 880             | 880        | 930               | 930        | 930                                                                |
| 3,4 | NTP Sub Sektor Peternakan                                                  | 100                                                 | 101             | 102             | 103                                                       | 103        | 104             | 104        | 105               | 105        | 105                                                                |
| 4.  | Energi dan Sumber Daya Mineral                                             |                                                     |                 |                 |                                                           |            |                 |            |                   |            |                                                                    |
| 4,2 | Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB                | 11,83                                               | 12,83           | 13,44           | 10,89                                                     | 14,08      | 10,94           | 14,75      | 10,98             | 15,45      | 15,45                                                              |
| 4,3 | Persentase Rasio Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri  | 79,31%                                              | 79,56%          | 91,93%          | 82%                                                       | 94%        | 84%             | 96%        | 86%               | 98%        | 98%                                                                |
| 4,4 | Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan (IUP) | 150                                                 | 170             | 247             | 225                                                       | 86         | 250             | 91         | 275               | 97         | 97                                                                 |
| 4,5 | Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah (unit sumur bor)             | 2                                                   | 6               | 8               | 9                                                         | 2          | 9               | 4          | 10                | 4          | 24                                                                 |
| 5.  | Pariwisata                                                                 |                                                     |                 |                 |                                                           |            |                 |            |                   |            |                                                                    |
| 5.1 | - Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)                           | 10.141                                              | 18.500          | 19.000          | 19.500                                                    | 19.500     | 20.000          | 20.000     | 21.500            | 21.500     | 21.500                                                             |
| 5,2 | - Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)                             |                                                     | 3.200.000       | 3.450.000       | 3.600.000                                                 | 3.600.000  | 3.800.000       | 3.800.000  | 4.000.000         | 4.000.000  | 4.000.000                                                          |

| NO.                            | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                          | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |              |              | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |              |              |              |              |              | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                               | 2016                                                | 2017         | 2018         | 2019                                                      |              | 2020         |              | 2021         |              |                                                                    |
|                                |                                                                                                               |                                                     |              |              | SEBELUM                                                   | SESUDAH      | SEBELUM      | SESUDAH      | SEBELUM      | SESUDAH      |                                                                    |
| 6.                             | Kelautan dan Perikanan                                                                                        |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 6.1                            | Produksi perikanan Tangkap (ton)                                                                              | 212.330,60                                          | 174.964,00   | 217.415,87   | 199.356,20                                                | 228.286,66   | 207.996,70   | 239.700,00   | 217.637,20   | 251.686,00   | 251.686,00                                                         |
| 6.2                            | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                                             | 1.339.013,78                                        | 1.059.050,30 | 1.343.131,90 | 1.410.288,00                                              | 1.009.800,00 | 1.480.802,00 | 1.110.780,00 | 1.554.842,00 | 1.221.858,00 | 1.221.858,00                                                       |
| 6.3                            | Konsumsi ikan (kg/kap/thn)                                                                                    | 47,27                                               | 52,34        | 48,39        | 50,95                                                     | 50,14        | 51,95        | 51,95        | 53,83        | 53,83        | 53,83                                                              |
| 6.4                            | Nilai Tukar Perikanan (%)                                                                                     | 106,09                                              | 106,62       | 107,15       | 107,68                                                    |              | 108,22       |              | 108,76       |              |                                                                    |
| 6.5                            | Nilai Ekspor Perikanan ( US\$)                                                                                | 12.582.300                                          | 3.227.836    | 4.961.250    | 5.209.313                                                 | 3.200,00     | 5.469.778    | 3.520.000    | 5.743.267    | 3.784.000    | 3.784.000                                                          |
| 6.6                            | Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)                                                                     | 6,90                                                | 5,94%        | 6,5 - 7,0    | 7,0 - 7,5                                                 |              | 7,5 - 8,0    |              | 8,0 - 8,5    |              |                                                                    |
|                                |                                                                                                               |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 7.                             | Perdagangan                                                                                                   |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 7.1                            | Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran terhadap PDRB (%)                                          | 9,89                                                | 10,09        | 10,29        | 10,59                                                     | 10,59        | 10,99        | 10,99        | 11,59        | 11,59        | 11,59                                                              |
| 7.2                            | Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)                                                                          |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 7.3                            | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)                                                             | 15,89                                               | 16,23        | 16,57        | 16,91                                                     | 16,91        | 17,25        | 17,25        | 17,59        | 17,59        | 17,59                                                              |
| 8.                             | Perindustrian                                                                                                 |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 8.1                            | Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)                                                       | 9,42                                                | 9,57         | 9,72         | 9,72                                                      | 9,72         | 10,02        | 10,02        | 10,17        | 10,17        | 10,17                                                              |
| 8.2                            | Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB HK 2010 (%)                                               | 9,95                                                | 10,10        | 10,25        | 10,25                                                     | 10,25        | 10,55        | 10,55        | 10,70        | 10,70        | 10,70                                                              |
| 8.3                            | Pertumbuhan Industri (%)                                                                                      | 7,25                                                | 7,00-7,20    | 7,20-7,40    | 7,20-7,40                                                 | 7,20-7,40    | 7,60-7,80    | 7,60-7,80    | 7,80-8,00    | 7,80-8,00    | 7,80-8,00                                                          |
| 8.4                            | urutan peringkat daya saing bisnis dan tenaga kerja                                                           | 25                                                  | 25           | 24           | 24                                                        | 24           | 22           | 22           | 21           | 21           | 21                                                                 |
| 8.5                            | Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Masyarakat Desa                                                         |                                                     | 84 Orang     | 168 orang    | 168 orang                                                 | 168 orang    | 336 orang    | 336 orang    | 420 orang    | 420 orang    | 420 orang                                                          |
| 9.                             | Kehutanan                                                                                                     |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 9.1                            | Pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan (%)                                                                     | 8-9%                                                | 8-9%         | 8-9%         | 8-9%                                                      | 8-9%         | 8-9%         | 8-9%         | 8-9%         | 8-9%         | 8-9%                                                               |
| 9.2                            | Luas hutan yang dikelola masyarakat                                                                           | 8089,55 Ha                                          | 30.153,14 Ha | 40.000 Ha    | 60.000 Ha                                                 | 60.000 Ha    | 80.000 Ha    | 80.000 Ha    | 100.000 Ha   | 100.000 Ha   | 100.000 Ha                                                         |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH        |                                                                                                               |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah |                                                                                                               |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 1.                             | Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian |                                                     |              |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 1.1                            | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (barang makanan) (Rp)                                            | 842.912                                             | 918.350      |              |                                                           |              |              |              |              |              |                                                                    |
| 1.2                            | Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Rp)                                                                | 422.730,00                                          | 437.364      |              |                                                           | 447.364      |              | 457.364      |              | 467.364      | 467.364                                                            |
| 1.3                            | Produktivitas Total Daerah (Rp/Tenaga Kerja)                                                                  | 79.631.402                                          | 93.969.339   | 100.225.420  |                                                           | 106.225.420  |              | 112.225.420  |              | 118.225.420  | 118.225.420                                                        |

| NO.                       | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                                | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH<br>TAHUN 2016-2018 |       |             | PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2019-2021 |             |             |             |             |             | KONDISI<br>KINERJA PADA<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD 2016-<br>2021 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                     | 2016                                                | 2017  | 2018        | 2019                                                      |             | 2020        |             | 2021        |             |                                                                    |
|                           |                                                                                                                     |                                                     |       |             | SEBELUM                                                   | SESUDAH     | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM     | SESUDAH     |                                                                    |
| 2.                        | Pertanian                                                                                                           |                                                     |       |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 2.1                       | Nilai tukar petani                                                                                                  | 99,35                                               | 95,04 | 96,93       |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 3.                        | Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum.<br>Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat<br>Daerah. Kepegawaian dan Persandian |                                                     |       |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 3.1                       | Jenis dan jumlah bank dan cabang                                                                                    | 204                                                 | 217   |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 3.2                       | Jumlah restoran (unit)                                                                                              | 892                                                 | 1.066 |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 3.3                       | Jumlah Penginapan/Hotel (unit)                                                                                      |                                                     | 537   |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 4.                        | Komunikas dan Informatika                                                                                           |                                                     |       |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 4.1                       | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)                                                                | 79,31                                               | 79,56 | 91,93       | 88,44                                                     | 94,00       | 89,79       | 96,00       | 91,14       | 98,00       | 98,00                                                              |
| Fokus Sumber Daya Manusia |                                                                                                                     |                                                     |       |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 1                         | Ketenagakerjaan                                                                                                     |                                                     |       |             |                                                           |             |             |             |             |             |                                                                    |
| 1.1                       | Rasio Lulusan (S1/S2/S3) per 10.000 penduduk                                                                        | 93,02                                               | 82,67 | 82,67       | 101,97                                                    | 82,5 - 83,5 | 103,11      | 83,5 - 84,5 | 104,25      | 84,5 - 85,5 | 84,5 - 85,5                                                        |
| 1.2                       | Rasio ketergantungan                                                                                                | 50,16                                               | 49,97 | 49,85       | 49,30                                                     | 49,78       | 48,87       | 49,74       | 48,44       | 48,92       | 48,92                                                              |
| 1.3.                      | persentase jumlah pegawai negeri sipil berpendidikan S1, S2 dan S3                                                  |                                                     |       | 82,50-85,00 | 85,00-87,50                                               |             | 87,50-90,00 |             | 90,00-92,50 |             |                                                                    |
| 1.4                       | Kesempatan Kerja (%)                                                                                                |                                                     |       | 95,25-95,50 | 95,50-95,75                                               | 95,50-95,75 | 95,75-96,00 | 95,75-96,00 | 96,00-96,25 | 96,00-96,25 | 96,00-96,25                                                        |
| 1.5                       | Pencari kerja yang ditempatkan (%)                                                                                  |                                                     |       | 52,16       | 52,24                                                     | 52,24       | 52,31       | 52,31       | 52,39       | 52,39       | 52,39                                                              |
| 1.6                       | Presentase dari pekerja/buruh yang tedata aktif BPJS Ketenagakerjaan                                                | 63                                                  | 66,0  | 88,0        | 72,0                                                      | 89,0        | 75,0        | 90,0        | 78,0        | 91,0        | 91,0                                                               |
| 1.7                       | Presentase dari kabupaten/kota tidak tertinggal (%)                                                                 | 55,13                                               | 53,61 | 46,15       | 53,85                                                     | 46,15       | 61,54       | 53,85       | 69,23       | 61,54       | 61,54                                                              |

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya.

Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dokumen Perubahan RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat.

Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang.





Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
2019